



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023 - 2026**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yang menginstruksikan kepada Gubernur agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023-2026;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026 serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
7. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 4 (lima) tahun.
14. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
15. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
16. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (lima) tahun.
17. Sasaran pokok adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian arah kebijakan pembangunan pada setiap tahapan pembangunan dalam jangka waktu 4 (lima) tahunan.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur untuk pencapaian kinerja suatu sasaran dalam bentuk dampak (*impact*).
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana struktur tata ruang provinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

RPD

Pasal 2

- (1) RPD merupakan pedoman Penjabat (Pj.) Gubernur untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan program pembangunan selama kurun waktu 2023-2026;
- b. Penyusunan RPD Kabupaten/Kota di Provinsi; dan
- c. Dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 4

RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Gambaran Umum
- c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah
- d. BAB IV Permasalahan dan Isu Srategis Daerah
- e. BAB V Tujuan dan Sasaran
- f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. BAB IX Penutup

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPD meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan; dan
- c. evaluasi terhadap hasil.

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah provinsi telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW Provinsi, serta memperhatikan RTRW Provinsi lainnya.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

RKPD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada RPD Tahun 2023-2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Mei 2022

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



MAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022
NOMOR 11 SERI E

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.3.1. Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.....	I-8
1.3.2. Keselarasan RTRW Tahun 2014-2034 dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.....	I-9
1.3.3. Keselarasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.....	I-11
1.4. Maksud Dan Tujuan	I-12
1.4.1. Maksud	I-12
1.4.2. Tujuan	I-12
1.5. Sistematika Penulisan	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-6
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-28
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-31
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-31
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-42
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-57
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-63
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib.....	II-63
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-84
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-109
2.3.4. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum	II-123
2.3.5. Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	II-125
2.3.6. Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-128
2.3.7. Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-132

	Halaman
2.4. Aspek Daya Saing Wilayah	II-134
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-134
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	II-137
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-139
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-146
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2021	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	III-2
3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah	III-2
3.1.1.2. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah	III-12
3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah	III-24
3.1.2. Neraca Daerah.....	III-25
3.1.2.1. Pertumbuhan Neraca Daerah.....	III-25
3.1.2.2. Rasio Neraca	III-30
3.1.3. Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah	III-31
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.1. Permasalahan Daerah.....	IV-1
4.1.2. Permasalahan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	IV-8
A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	IV-8
B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar..	IV-14
C. Urusan Pilihan.....	IV-22
D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintah.....	IV-26
E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintah	IV-27
F. Unsur Pengawasan Pemerintahan.....	IV-28
4.2. Analisis Dan Penetapan Isu Strategis	IV-29
4.2.1. Analisis Isu Strategis	IV-29
4.2.2. Penetapan Isu Strategis.....	IV-42
BAB V TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1. Tujuan dan Sasaran	V-1
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan	VI-2
6.1.1. Strategi pencapaian sasaran	VI-2
6.1.2. Arah Kebijakan untuk mendukung Strategi	VI-10
6.2. Program Pembangunan Daerah.....	VI-22
6.2.1. Unggulan Pembangunan Daerah	VI-22
6.2.2. Program Pembangunan Daerah.....	VI-24
6.2.3. Tema Prioritas Pembangunan Daerah.....	VI-27
6.2.4. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	VI-27

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
7.1. Analisis Keuangan Daerah.....	VII-1
7.1.1. Pendapatan Daerah.....	VII-1
7.1.2. Belanja Daerah.....	VII-7
7.2. Kerangka Pendanaan.....	VII-8
7.2.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.....	VII-9
7.2.2. Proyeksi Data Masa Lalu.....	VII-15
7.2.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	VII-17
7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas	VII-29
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VIII-1
8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII-1
8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	VIII-1
8.2.1. Indikator Kinerja Tujuan dan Target	VIII-1
8.2.2. Indikator Kinerja Sasaran dan Target.....	VIII-4
8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK).....	VIII-8
BAB VIII PENUTUP	IX-1
9.1. Pedoman Transisi.....	IX-1
9.2. Kaidah Pelaksanaan	IX-1
8.2.3. Indikator Kinerja Tujuan dan Target	VIII-1
8.2.4. Indikator Kinerja Sasaran dan Target.....	VIII-4
8.2.5. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK).....	VIII-8

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026	I-8
Tabel I.2 Keselarasan Dokumen RTRW 2014-2034 dengan Perubahan RPJMD 2017-2022	I-10
Tabel I.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-12
Tabel II.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	II-3
Tabel II.2 Luas Lahan menurut Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	II-5
Tabel II.3 Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-8
Tabel II.4 Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010-2030 – KVA.....	II-10
Tabel II.5 Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-12
Tabel II.6 Potensi Energi Baru dan Terbarukan Provinsi Kep. Bangka Belitung ...	II-13
Tabel II.7 Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030 ..	II-13
Tabel II.8 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Prov. Kep. Bangka Belitung 2015-2018 (Ha)	II-20
Tabel II.9 Potensi Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)	II-22
Tabel II.10 Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)	II-23
Tabel II.11 Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ...	II-24
Tabel II.12 Indikator Kependudukan Provinsi Kep. Bangka Belitung 2016-2020...	II-28
Tabel II.13 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020	II-29
Tabel II.14 Jumlah Penduduk Kep. Bangka Belitung menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	II-30
Tabel II.15 PDRB Tahun 2017 –2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Milyar Rupiah).....	II-32
Tabel II.16 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2021.....	II-33
Tabel II.17 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017–2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)	II-35
Tabel II.18 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2021.....	II-35
Tabel II.19 Perkembangan PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2016 – 2020	II-36

Tabel II.20	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2016–2020	II-37
Tabel II.21	Andil/Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019.....	II-39
Tabel II.22	Andil/Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2021.....	II-39
Tabel II.23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung dan Nasional ...	II-42
Tabel II.24	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Bangka Belitung	II-43
Tabel II.25	Perkembangan Kemiskinan Tahun 2016-2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-43
Tabel II.26	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2015-2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-44
Tabel II.27	Data Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-44
Tabel II.27	Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021.....	II-45
Tabel II.29	Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-46
Tabel II.30	Data Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-46
Tabel II.31	Angka Harapan Sekolah Tahun 2017 s.d. 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-49
Tabel II.32	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017 s.d. 2021 Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional ..	II-52
Tabel II.33	Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-54
Tabel II.34	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 s.d. 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-54
Tabel II.35	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-55
Tabel II.36	Perkembangan Persentase Balita Stunting Tahun 2016 s.d. 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-57
Tabel II.36	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-57
Tabel II.38	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2017-2019 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-58
Tabel II.39	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2019-2020 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-59
Tabel II.40	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik dan Sepak Bola Tahun 2016 s.d. 2020Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-60
Tabel II.41	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli dan Bulu Tangkis Tahun 2016 s.d. 2020Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-61

Tabel II.42	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-61
Tabel II.43	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak Silat Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-62
Tabel II.44	Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-62
Tabel II.45	Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020	II-67
Tabel II.46	Rasio Guru Terhadap Murid SMA/SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020	II-67
Tabel II.47	Hasil Survey Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2020.....	II-71
Tabel II.48	Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (Ha)	II-73
Tabel II.49	Data Kondisi Jaringan Irigasi D.I Kewenangan Provinsi (m)	II-73
Tabel II.50	Luas Kawasan Banjir Kewenangan Provinsi.....	II-74
Tabel II.51	Luas Kawasan Terlindungi Infrastruktur Banjir (ha)	II-74
Tabel II.52	Status dan Progress RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021.....	II-76
Tabel II.53	Status dan Progress RDTR Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-76
Tabel II.54	Tabel Perkembangan Skor PPH Konsumsi dan Ketersediaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2020.....	II-89
Tabel II.55	Perkembangan Data Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020.....	II-90
Tabel II.56	Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun 2002 - 2021	II-98
Tabel II.57	Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2014 s.d. 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta US\$)	II-120
Tabel II.58	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021.....	II-135
Tabel II.59	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2013 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-135
Tabel II.60	Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2015 s.d 2020.....	II-135
Tabel II.61	Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2020 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-136
Tabel II.62	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019	II-137
Tabel II.63	Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut Tahun 2014-2018.....	II-137
Tabel II.64	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Kep. Bangka Belitung	II-138
Tabel II.65	Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 Provinsi Kep. Bangka Belitung.....	II-138
Tabel II.66	Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-145
Tabel II.67	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016 s.d 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-146
Tabel III.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2018-2021	III-2
Tabel III.2	Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021	III-2

Tabel III.3	Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan Tahun Anggaran 2018-2021	III-3
Tabel III.4	Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 2021 menurut jenis PAD	III-4
Tabel III.5	Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021	III-5
Tabel III.6	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021	III-5
Tabel III.7	Realisasi Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021	III-6
Tabel III.8	Realisasi Lain-lain PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021	III-7
Tabel III.9	Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021	III-7
Tabel III.10	Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021	III-8
Tabel III.11	Dana Alokasi Umum / Penyeimbang DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021	III-8
Tabel III.12	Realisasi Pos Dana Alokasi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021	III-9
Tabel III.13	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2021	III-9
Tabel III.14	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 s/d Tahun 2021	III-10
Tabel III.15	Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021	III-12
Tabel III.16	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung serta Komponennya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018.....	III-14
Tabel III.17	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung serta Komponennya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018.....	III-15
Tabel III.18	Realisasi Belanja Operasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021	III-15
Tabel III.19	Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021	III-16
Tabel III.20	Realisasi Belanja Barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021	III-16
Tabel III.21	Realisasi Belanja Bunga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021	III-16
Tabel III.22	Realisasi Belanja Subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021	III-17
Tabel III.23	Realisasi Belanja Hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021	III-17
Tabel III.24	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021.....	III-18

Tabel III.25	Realisasi Belanja Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021	III-18
Tabel III.26	Realisasi Tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021	III-19
Tabel III.27	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021	III-19
Tabel III.28	Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021	III-20
Tabel III.29	Realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021	III-20
Tabel III.30	Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021	III-20
Tabel III.31	Realisasi Belanja Tak Terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021.....	III-21
Tabel III.32	Realisasi Transfer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021	III-21
Tabel III.33	Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021.....	III-22
Tabel III.34	Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021	III-22
Tabel III.35	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-23
Tabel III.36	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2021.....	III-24
Tabel III.37	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2021	III-25
Tabel III.38	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2021	III-25
Tabel III.39	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020.....	III-27
Tabel III.40	Rasio Likuiditas Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2020.....	III-30
Tabel III.41	Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2020.....	III-31
Tabel III.42	Prediksi Kemampuan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2026.....	III-32
Tabel V.1	Keterkaitan Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPD Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	V-4
Tabel V.2	Target Indikator Kinerja Tujuan RPD 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	V-5
Tabel V.3	Target Indikator Kinerja Sasaran RPD 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	V-6
Tabel VI.1	Tujuan, Sasaran dan Strategis RPD Tahun 2023-2026	VI-7
Tabel VI.2	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan RPD 2023-2026	VI-17
Tabel VI.3	Program Pembangunan Daerah Yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026	VI-29

Tabel VII.1	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022	VII-2
Tabel VII.2	Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2026	VII-6
Tabel VII.3	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2022	VII-8
Tabel VII.4	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022	VII-13
Tabel VII.5	Prediksi Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung Tahun 2023-2026	VII-15
Tabel VII.6	Prediksi PAD dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026	VII-16
Tabel VII.7	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026	VII-16
Tabel VII.8	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Lalu (SILPA) pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.....	VII-17
Tabel VII.9	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022	VII-18
Tabel VII.10	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026	VII-20
Tabel VII.11	Proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026	VII-21
Tabel VII.12	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	VII-27
Tabel VII.13	Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.....	VII-16
Tabel VII.14	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026	VII-16
Tabel VII.15	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026	VII-16
Tabel VII.16	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026	VII-16
Tabel VII.17	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026	VII-16
Tabel VIII.1	Target Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	VIII-3
Tabel VIII.2	Target Indikator Kinerja Sasaran RPD 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	VIII-6
Tabel VIII.3	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.....	VIII-9

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar I.1	Keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-8
Gambar II.1	Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-1
Gambar II.2	Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).....	II-2
Gambar II.3	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-2
Gambar II.4	Peta Penutupan Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	II-6
Gambar II.5	<i>Traffic Flow pada Ruas Jalan Nasional dan Provinsi</i> pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-7
Gambar II.6	Pengembangan Jalur Pelayaran Laut.....	II-8
Gambar II.7	Kondisi Kelistrikan Bangka Belitung	II-10
Gambar II.8	Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026 (RUPTL).....	II-11
Gambar II.9	Energi Baru dan Terbarukan.....	II-12
Gambar II.10	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-15
Gambar II.11	Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-18
Gambar II.12	Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dalam RKTP Tahun 2014-2034	II-19
Gambar II.13	Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-22
Gambar II.14	Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-25
Gambar II.15	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-26
Gambar II.16	Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-27

DAFTAR GRAFIK

			Halaman
Grafik	II.1	Jumlah Penduduk Kab/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020	II-29
Grafik	II.2	Piramida Penduduk Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2015 dan Proyeksi pada Tahun 2020.....	II-31
Grafik	II.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021	II-33
Grafik	II.4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021	II-38
Grafik	II.5	Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021.....	II-38
Grafik	II.6	Perbandingan Inflasi Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Nasional 2017 – 2021	II-40
Grafik	II.7	Indeks Gini Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021	II-41
Grafik	II.8	Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020.....	II-41
Grafik	II.9	Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017-2021	II-47
Grafik	II.10	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional (2016-2021).....	II-48
Grafik	II.11	Pertumbuhan angka HLS 2017 s.d 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-49
Grafik	II.12	Angka HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2021	II-50
Grafik	II.13	Pertumbuhan Angka Harapan Lama Sekolah Kep. Bangka Belitung & Nasional	II-51
Grafik	II.14	Pertumbuhan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional (2017-2021)	II-53
Grafik	II.15	Persentase Bayi kurus dan <i>Stunting</i> Tahun 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	II-56
Grafik	II.16	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kep. Bangka Belitung Tahun 2017-2021	II-63
Grafik	II.17	Angka Partisipasi Kasar Jenjang SM/SMK/MA/Paket C Kep. Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017-2021	II-64
Grafik	II.18	APM SM/SMK/MA/Paket C Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017-2021	II-65
Grafik	II.19	SMA/SMK/SLB Terakreditasi Provisi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	II-66
Grafik	II.20	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya.....	II-68
Grafik	II.21	Akreditasi Rumah Sakit.....	II-69
Grafik	II.22	Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Air Minum Layak.....	II-70

			Halaman
Grafik	II.23	Akses Sanitasi Layak.....	II-70
Grafik	II.24	Proporsi Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)	II-72
Grafik	II.25	Rasio Irigasi (%).....	II-72
Grafik	II.26	Penyediaan Air Baku dan Luas Kawasan Terlindungi dari Daya Rusak Air.....	II-75
Grafik	II.27	Capaian Persentase Rumah Layak Huni (%)	II-78
Grafik	II.28	Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Air Minum Layak (%)	II-79
Grafik	II.29	Akses Sanitasi Layak (%)	II-79
Grafik	II.30	Penanganan Sampah Perkotaan (%)	II-80
Grafik	II.31	Indeks Risiko Bencana	II-81
Grafik	II.32	Indeks Ketahanan Daerah	II-81
Grafik	II.33	Pelanggaran Perda dan Perkada yang Ditindaklanjuti.....	II-82
Grafik	II.34	Indeks Pembangunan Sosial	II-83
Grafik	II.35	Data PMKS dan PSKS 2015-2019	II-84
Grafik	II.36	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	II-85
Grafik	II.37	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-85
Grafik	II.38	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	II-86
Grafik	II.39	Industri Rumah Tangga Bagi Perempuan.....	II-87
Grafik	II.40	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	II-88
Grafik	II.41	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	II-88
Grafik	II.42	Skor PPH Konsumsi Dan Ketersediaan	II-90
Grafik	II.43	Prevalence of Undernourishment (PoU)	II-91
Grafik	II.44	Penyelesaian Kasus Tanah	II-91
Grafik	II.45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-92
Grafik	II.46	Persentase Aduan Masyarakat yang Diverifikasi.....	II-93
Grafik	II.47	Persentase Ketaatan Usaha	II-94
Grafik	II.48	Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan Provinsi	II-94
Grafik	II.49	Kampung Keluarga Berencana (KB).....	II-95
Grafik	II.50	Kependudukan dan Catatan Sipil	II-96
Grafik	II.51	Badan Usaha Milik Desa	II-97
Grafik	II.52	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan (%)	II-98
Grafik	II.53	Nilai Investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021.....	II-99
Grafik	II.54	Jumlah Perizinan	II-100
Grafik	II.55	Indeks Pembangunan Manusia	II-101
Grafik	II.56	Indeks Pembangunan Olahraga	II-101
Grafik	II.57	Layanan Infrastruktur Teknologi dan Kapasitas Layanan Publik Pemerintah Berbasis 3-Government.....	II-102
Grafik	II.58	Data dan Informasi Statistik yang digunakan untuk Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan	II-103
Grafik	II.59	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI).....	II-104
Grafik	II.60	Persentase Cagar Budaya Dilestarikan dan Dikelola	II-105
Grafik	II.61	Persentase Perpustakaan Yang Dibina	II-105
Grafik	II.62	Koleksi Buku di Perpustakaan	II-106

			Halaman
Grafik	II.63	Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar Baku	II-107
Grafik	II.64	Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi Aktif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2021	II-108
Grafik	II.65	Jumlah UMKM Yang Diberdayakan.....	II-109
Grafik	II.66	Kontribusi Sub Sektor Perikanan dalam PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-110
Grafik	II.67	Pertumbuhan Produksi Perikanan	II-111
Grafik	II.68	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)	II-112
Grafik	II.69	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	II-113
Grafik	II.70	Sumber Daya Manusia Pariwisata Tersertifikasi	II-114
Grafik	II.71	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian.....	II-114
Grafik	II.72	Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan & Holtikultura	II-115
Grafik	II.73	Produksi Lada Dan Karet	II-116
Grafik	II.74	Populasi Ternaka Sapi dan Ayam	II-117
Grafik	II.75	Kawasan Perhutanan Sosial	II-118
Grafik	II.76	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kritis	II-119
Grafik	II.77	Rasio Elektrifikasi	II-120
Grafik	II.78	Kawasan Transmigrasi	II-122
Grafik	II.79	Nilai Kebebasan Sipil	II-123
Grafik	II.80	Nilai Kelembagaan Demokrasi	II-124
Grafik	II.81	Nilai Hak-Hak Politik	II-125
Grafik	II.82	Nilai SAKIP	II-126
Grafik	II.83	Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan.....	II-127
Grafik	II.84	Konsistensi Program Pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD.....	II-128
Grafik	II.85	Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020.....	II-129
Grafik	II.86	Indeks Profesionalitas ASN	II-130
Grafik	II.87	Opini BPK	II-130
Grafik	II.88	Persentase Kontribusi PAD Terhadap APBD.....	II-131
Grafik	II.89	Persentase Jumlah Pelayanan Penghubung yang Terlaksana	II-132
Grafik	II.90	Indeks Reformasi Birokrasi	II-133
Grafik	II.91	Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD.....	II-133
Grafik	II.92	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021	II-134
Grafik	II.93	Angka Kriminalitas	II-139
Grafik	II.94	Jumlah Demo	II-140
Grafik	II.95	Nilai Kebebasan Sipil	II-141
Grafik	II.96	Nilai Lembaga Demokrasi	II-142
Grafik	II.97	Nilai Hak-Hak Politik	II-143
Grafik	II.98	Realisasi Pajak Dan Retribusi Daerah	II-144
Grafik	II.99	Rasio Ketergantungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilu kepala daerah serentak di Tahun 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Sehingga di Tahun 2022 akan ada kekosongan pimpinan kepala daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka Gubernur menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026, selanjutnya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2023.

Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun 2017-2022;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 disusun tanpa mengabaikan prinsip-prinsip berupa:

- 1) Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP); rencana pembangunan jangka menengah (RPJM); dan rencana pembangunan tahunan. Selaras dengan hal tersebut maka perencanaan pembangunan daerah juga menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) daerah; rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) daerah; rencana kerja perangkat daerah (RKPD).

- 2) Dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026, Pemerintah Daerah melakukan forum konsultasi publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan.

- 3) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;

Pengintegrasian antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah merupakan amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, harmonisasi RTRW dengan rencana pembangunan daerah menjamin terlaksananya pembangunan daerah dengan baik.

- 4) Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kondisi pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 hingga kini yang belum usai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, banyak memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan ditingkat nasional serta ditingkat daerah, yang menguras tenaga dan waktu sehingga perlu dilakukan analisa yang mendalam untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang muncul.

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari pendekatan politik, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif serta pendekatan atas bawah dan bawah atas, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan secara:

- a. Transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- c. Efisien, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
- d. Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- h. Berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- j. Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan Tahap Keempat Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 (Tahun 2020-2025) yang fokus pada bidang ekonomi, bidang SDM dan penguatan birokrasi diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 yaitu: ***“PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025”***.

Visi ini pada dasarnya meletakkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (*sustainable growth through poverty*) sebagai motor pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya akan menggerakkan bidang-bidang pembangunan lainnya, seperti fungsi pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dan lainnya.

Secara umum yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Pandemi Covid-19 membuat perlambatan dalam pencapaian target pembangunan yang berdampak langsung pada perencanaan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sehingga dibutuhkan koreksi terhadap proyeksi target indikator makro pembangunan;
3. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga semua nomenklatur program dan kegiatan Perangkat Daerah yang digunakan didalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni Perubahan RPJMD 2017–2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merujuk pada Kepmendagri tersebut;
4. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
5. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026;
6. Sebagai acuan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Tahun 2023, dan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023;

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung

Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (SK Nomor 010750 A);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Untuk itu Rencana Pembangunan Daerah harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

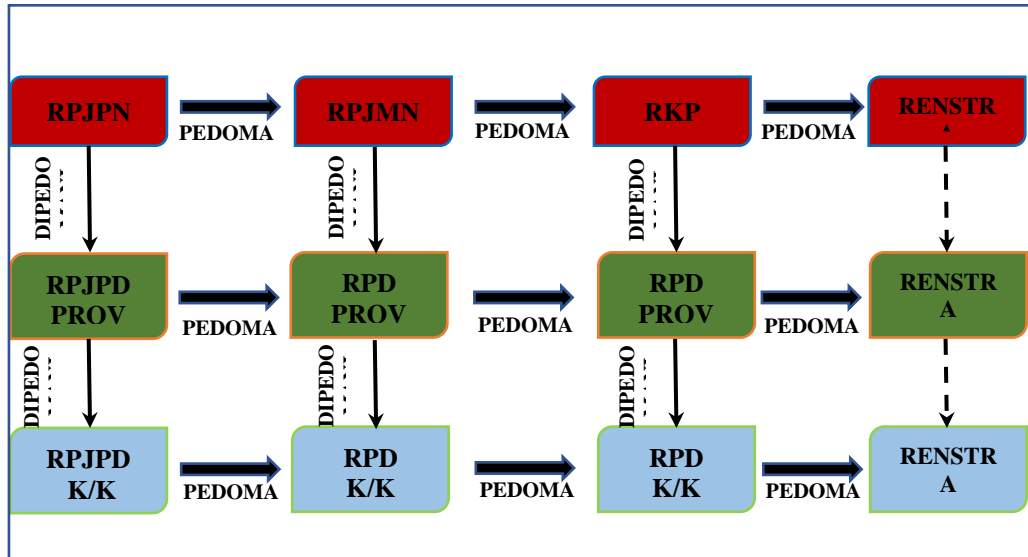
Pada pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD; dan RKPD. RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan untuk Tahun 2005-2025 dengan Visi dan Misi yang telah diuraikan diatas, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa tujuan dan sasaran RPD 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD 2005-2025 tahap keempat dan isu strategis aktual. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 juga berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Informasi dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025.

Keterkaitan dokumen perencanaan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dengan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 khususnya pada tahap pembangunan lima tahun keempat yang merupakan tahap penguatan sektor industri dengan melakukan upaya perluasan akses komoditas hasil industri pengolahan hasil produk unggulan ke pasar regional nasional bahkan ke pasar internasional, upaya berikutnya adalah promosi pariwisata yang berkelanjutan dan komprehensif terhadap objek-objek wisata yang ada di Provinsi Kep. Bangka Belitung, upaya selanjutnya yang akan dilakukan ditahap keempat adalah dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan bertumpu pada kekuatan/keunggulan daerah, misalkan dengan pengembangan sektor pendidikan yang berfokus pada pengembangan kekayaan alam.

Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar I.1

Keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara substansi, berikut adalah keselarasan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, RPJPD 2005-2025 dan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.3.1 Keselarasan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dengan RPJPD 2005-2025

Untuk menjamin keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dengan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 khususnya pada RPJPD Tahun 2005–2025 Tahun keempat yang fokus pada Ekonomi, SDM dan Penguatan Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel I.1

Keselarasan Hubungan RPJPD Tahun 2005–2025 dan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

No.	RPJPD Tahun 2005–2025 (tahun keempat)	No.	RPD Tahun 2023-2026
	Fokus		Arah Kebijakan
1.	Memperluas akses komoditas hasil industri pengolahan hasil produk unggulan ke pasar regional, nasional bahkan kalau mungkin pasar internasional	1.	Peningkatan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian
		2.	Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta

No.	RPJPD Tahun 2005-2025 (tahun keempat)	No.	RPD Tahun 2023-2026
	Fokus		Arah Kebijakan
			Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian
		3.	Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya
		4.	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
		5.	Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan
		6.	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja
		7.	Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk
		8.	Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.
		9.	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk
		10.	Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting
2.	Promosi pariwisata yang kontinyu dan komprehensif terhadap objek-objek wisata yang ada di Bangka Belitung	11.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
3.	Mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan bertumpu pada kekuatan/keunggulan daerah.	12.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata
		13.	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah
		14.	Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing
		15.	Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)
		16.	Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan
		17.	meningkatkan kebebasan demokrasi

No.	RPJPD Tahun 2005-2025 (tahun keempat)	No.	RPD Tahun 2023-2026
	Fokus		Arah Kebijakan
		18.	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
		19.	meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi
		20.	meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi
		21.	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
		22.	Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa
		23.	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
		24.	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
		25.	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
		26.	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
		27.	Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah
		28.	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel
		29.	Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah
		30.	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
		31.	Pemerataan ketersediaan infrastruktur
		32.	Peningkatan ketaatan tata ruang
		33.	Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana
		34.	Peningkatan Kapasitas Desa
		35.	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi
		36.	Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
		37.	Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas
		38.	Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial

No.	RPJPD Tahun 2005-2025 (tahun keempat)	No.	RPD Tahun 2023-2026
	Fokus		Arah Kebijakan
		39.	Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin
		40.	Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja
		41.	Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)
		42.	Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya
		43.	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
		44.	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		45.	Peningkatan tata kelola kehutanan

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dengan maksud menyiapkan dokumen pembangunan untuk tahun 2023-2026 mendatang dan sekaligus menjadi arahan serta pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4.2 Tujuan

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026;
2. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu tahun 2023-2026 mendatang;
3. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Menjadi pedoman penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun sebagai dasar penyusunan APBD;
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar PD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah

Pusat, antar Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha, serta dengan masyarakat dan dengan Provinsi yang berbatasan/berdekatan;

6. Memampukan Pemerintah Daerah mengukur dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan;
7. Menjaga pemerataan pembangunan yang berkelanjutan antar sektor dan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara efisien dan efektif;
8. Menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah dan perencanaan penganggaran kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.5 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Rencana Perangkat Daerah 2023-2026 terkait dengan pengaturan bab secara garis besar isi setiap bab didalamnya, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara singkat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan dilakukannya penyusunan Rencana Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Gambaran umum kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam lima tahun mendatang.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah lima tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan tahun 2023-2026 mendatang.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama tahun 2023-2026, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum kondisi daerah.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan

dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program pembangunan daerah selama tahun 2023-2026 mendatang.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisikan indikator kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IX PENUTUP

Berisikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan selama tahun 2023-2026 mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

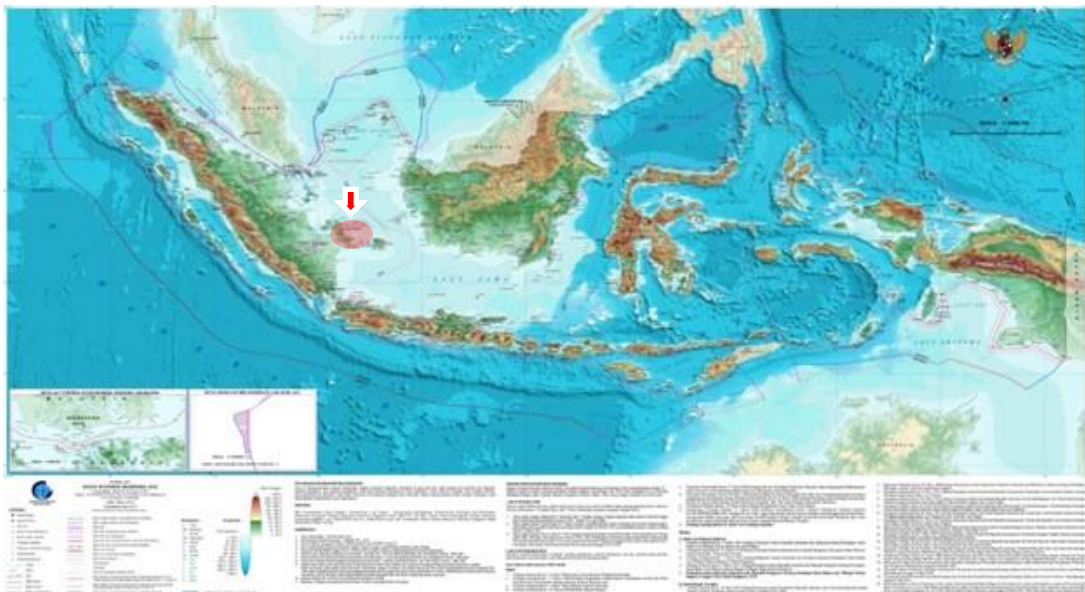
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Kondisi Geografi Daerah

1. Kondisi Astronomis dan Geografi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara astronomis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut ini.

Gambar II.1
Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2018

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada wilayah Indonesia sebelah Barat, dengan posisi geografis yang sangat strategis. Berada pada pertemuan arus Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sehingga menjadi wilayah yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan. Disamping itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dekat dan berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, seperti tergambar pada peta Alur Laut Kepulauan Indonesia pada Gambar II.2. Jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A), berada pada posisi silang antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dengan

Belitung sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata, sebelah Utara dengan Laut Natuna, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

2. Luas dan Daerah Administrasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung, serta 1 (satu) Kota yaitu Kota Pangkalpinang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemekaran, dengan membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah administrasi yang paling besar adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas wilayah 3.607,08 km² dan Kabupaten/Kota yang paling kecil luas wilayah Administrasi adalah Kota Pangkalpinang sebesar 118,80 km².

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,23 km². Terdiri atas daratan seluas 16.424,06 km² atau 20,10 persen dari total wilayah, dan wilayah laut seluas 65.301,00 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang secara terperinci dapat dilihat pada data Tabel II.1.

Tabel II.1
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No	Nama Kab/Kota	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	Sungailiat	2.950,68	8	19	62
2	Bangka Barat	Muntok	2.820,61	6	6	60
3	Bangka Tengah	Koba	2.155,77	6	7	56
4	Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	8	3	50
5	Belitung	Tanjung Pandan	2.293,61	5	7	42
6	Belitung Timur	Manggar	2.506,91	7	0	39
7	Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	7	42	0
Provinsi Kep. Bangka Belitung			81.725,06	47	82	309
Luas Daratan			16.424,06			
Luas Laut			65.301,00			

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021

Total seluruh kecamatan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 47 kecamatan. Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah wilayah Administrasi Kecamatan yang paling banyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah masing-masing 8 kecamatan, sedangkan Kabupaten Belitung merupakan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Kecamatan yakni sebanyak 5 kecamatan. Sedangkan wilayah Administrasi Kelurahan yang paling banyak adalah Kota Pangkalpinang dengan jumlah 42 kelurahan dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah administrasi kelurahan adalah Kabupaten Belitung Timur yang tidak memiliki wilayah kelurahan. Desa yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dengan jumlah 62 desa dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah administrasi desa adalah Kabupaten Belitung

Timur yakni sebanyak 39 desa. Adapun total seluruh desa yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 309 Desa.

3. Keadaan Topografi, Geologi, dan Hidrologi

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten Bangka dengan ketinggian 699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten Belitung dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut. Komposisi lahan datar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebagian kecil di Kabupaten Bangka Selatan.

Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari “*Tin Mayor South East Asian Tin Belt*” dengan tipe *granit main range* yang mempunyai ciri-ciri megakristal (terutama *K-Feldspar*) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Granit ini umumnya terdiri atas granit biotit dan granit muskovit yang semuanya merupakan tipe sedimen tipe S yang diperkirakan umurnya Trias (Sumber: Arsip PT. Koba Tin: *Survey dan Geology Department*, 2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula mineral-mineral ikutan timah seperti *Zircon* (ZrSiO_4), *Monazite* ($(\text{Ce, La, Dy})\text{PO}_4$ (ThSiO_2)), *Hematite* (Fe_2O_3), *Pyrite* (FeS_2), *Ilmenite* (FeTiO_3), dan *Xenotime* (YPO_4). Sedangkan secara geologis mineralisasi timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (*granite belt*) Asia Tenggara yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep dan Pulau Karimun. Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada pula produk tambang lainnya seperti pasir kuarsa (SiO_2), material Kaolin, dan *bilitonite* (dikenal dengan nama “satam”). Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya. Sedangkan Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca.

Hasil kajian hidrologi menyatakan bahwa daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, dan Sungai Lenggang.

4. Klimatologi

Kepulauan Bangka Belitung memiliki Iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Dari data BPS yang dirilis dari BMKG pada tahun 2012-2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahunan antara 26,7-27,3 °C dan curah hujan rata-rata bulanan antara 397-580 mm. Curah hujan maximum tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 577,3 mm di Belitung dan tahun 2012 sebesar 466,2 mm di Pangkalpinang. Sementara kelembabannya relatif tinggi dengan fluktuasi yang kecil. Di bulan Desember dan Januari, biasanya musim penghujan terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, disertai angin kencang dan ombak laut cenderung meninggi.

Pada tahun 2020, Pulau Bangka berdasarkan data Stasiun Metereologi Kelas I Depati Amir memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 27,3°C dengan suhu maksimum 34,9°C dan suhu minimum 22,5°C. Curah hujan tergolong tinggi mencapai 2.073.3 mm dengan 196 hari hujan. Sedangkan Pulau Belitung, berdasarkan data Stasiun Meteorologi H.AS Hanandjoedin tercatat memiliki suhu rata-rata sebesar 27°C dengan suhu maksimum 35,8°C dan suhu minimum 20,6°C. Pulau Belitung memiliki total curah hujan lebih tinggi yakni 2.650mm dengan jumlah hari hujan lebih sedikit yakni 143 hari.

5. Kondisi Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur semak (35,97%), Belukar dan Belukar Rawa (22,7%), Perkebunan (15,15%), Hutan (11,8%), pertambangan (9,28%) dan permukiman (2,32%). Lebih lanjut dapat diperhatikan tabel di bawah ini.

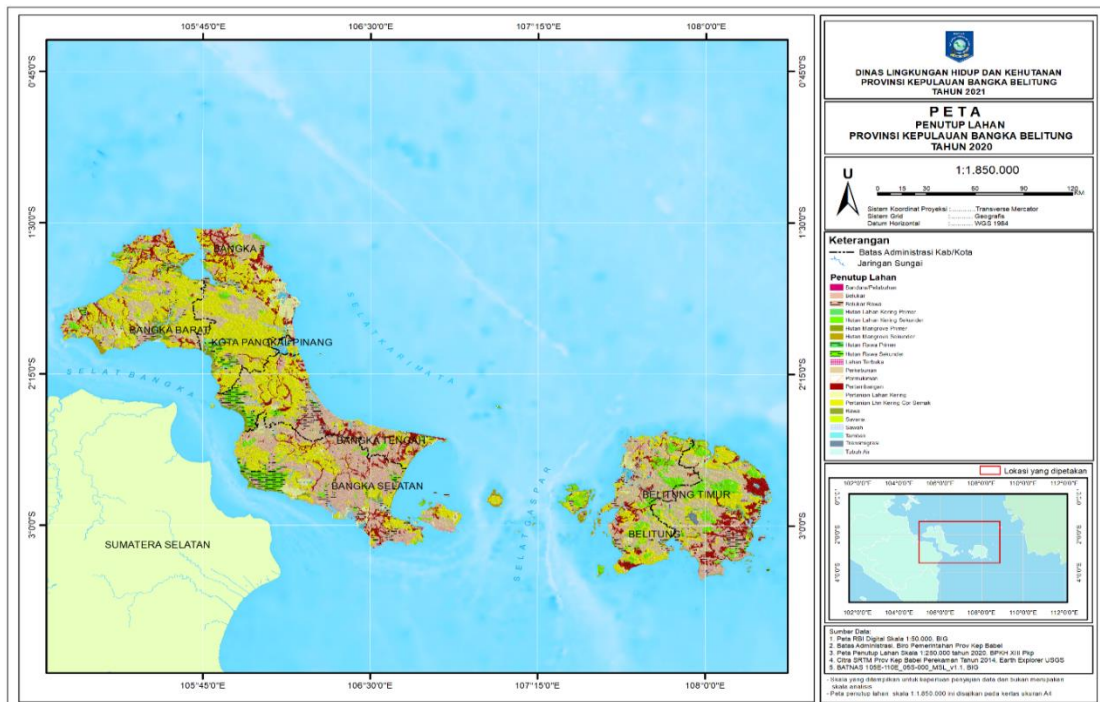
Tabel II.2
 Luas Lahan menurut Penggunaan Lahan
 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persen
1	Bandara/Pelabuhan	253.51	0.02%
2	Belukar	306,131.80	18.31%
3	Belukar Rawa	73,471.99	4.39%
4	Hutan Lahan Kering Primer	486.43	0.03%
5	Hutan Lahan Kering Sekunder	83,887.91	5.02%
6	Hutan Mangrove Primer	22,789.09	1.36%
7	Hutan Mangrove Sekunder	40,665.51	2.43%
8	Hutan Rawa Primer	0.15	0.00%
9	Hutan Rawa Primer	277.27	0.02%
10	Hutan Rawa Sekunder	49,148.81	2.94%
11	Lahan Terbuka	8,381.27	0.50%
12	Perkebunan	253,359.81	15.15%
13	Permukiman	38,845.94	2.32%
14	Pertambangan	155,168.33	9.28%
15	Pertanian Lahan Kering	56,855.22	3.40%
16	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	544,496.27	32.57%
17	Rawa	10,673.09	0.64%
18	Savana	7,423.64	0.44%
19	Sawah	4,705.22	0.28%

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persen
20	Tambak	522.24	0.03%
21	Transmigrasi	2,416.80	0.14%
22	Tubuh Air	11,945.68	0.71%
Total		1,671,905.99	100.00%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Gambar II.4
Peta Penutupan Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, pengembangannya disesuaikan dengan arahan yang digariskan pada RTRWN dan RTR Pulau Sumatera. Perencanaan dan pengembangan dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis.

Perencanaan dan pengembangan rencana struktur ruang, meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana lingkungan.

1. Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014, rencana sistem perkotaan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi sistem perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKNp), yaitu: Kota Pangkalpinang;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi: Muntok, Tanjung Pandan, Manggar;
3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), meliputi: Toboali dan Koba;
4. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parittiga, Belinyu, Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung, Puding Besar, Pangkalan Baru, Payung, dan Selat Nasik.

Namun berdasarkan revisi RTRW Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, ada perubahan status sistem perkotaan di mana Kota Pangkalpinang yang tadinya merupakan Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) naik kelas menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

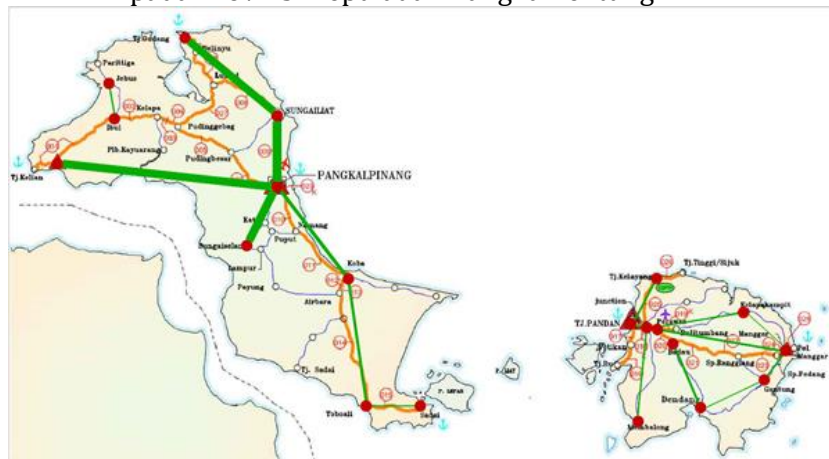
Sesuai dengan karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan wilayah kepulauan, maka sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung direncanakan sebagai sistem transportasi terpadu antar moda yang meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara, dengan uraian sebagai berikut:

a. Sistem Transportasi Darat

Sistem transportasi darat yang ada di Provinsi ini terdiri dari jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta jaringan transportasi perkotaan. Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang berkenaan dengan peningkatan status jalan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas: jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Gambar II.5

Traffic Flow pada Ruas Jalan Nasional dan Provinsi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan jaringan yang menjadi kewenangan pusat diatur dengan Surat Keputusan Menteri terkait, pengembangan jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur. Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan jalur penyeberangan.

b. Sistem Transportasi Laut

Sistem transportasi laut terdiri dari pelabuhan dan alur pelayaran. Pengembangan sistem transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan sistem kegiatan perekonomian antar kawasan maupun internasional.

Gambar II.6
Pengembangan Jalur Pelayaran Laut



Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan, serta dilakukan juga melalui pengembangan alur pelayaran. Sesuai dengan RTRWN dan kewenangan Pemerintah Provinsi, sistem pelabuhan laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.3
Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Klasifikasi & Nama Pelabuhan	Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
A	Pelabuhan Utama	
1	Pelabuhan Tanjung Batu	Belitung
B	Pelabuhan Pengumpul	
1	Pelabuhan Belinyu	Bangka
2	Pelabuhan Sadai	Bangka Selatan
3	Pelabuhan Muntok	Bangka Barat
4	Pelabuhan Pangkal Balam	Pangkalpinang
5	Pelabuhan Tanjung Pandan	Belitung
6	Pelabuhan Manggar	Belitung Timur
C	Pelabuhan Pengumpan	
1	Pelabuhan Sungailiat	Bangka

No.	Klasifikasi & Nama Pelabuhan	Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)
A	Pelabuhan Utama	
2	Pelabuhan Sungai Selan	Bangka Tengah
3	Pelabuhan Toboali	Bangka Selatan
4	Pelabuhan Tanjung Berikat	Bangka Tengah
5	Pelabuhan Tanjung Kalian	Bangka Barat
6	Pelabuhan Tanjung Tedung	Bangka Tengah
7	Pelabuhan Teluk Asam	Belitung Timur
8	Pelabuhan Dendang	Belitung Timur
D	Pelabuhan Khusus (Wisata)	
1	Pelabuhan Tanjung Pandan	Belitung
2	Pelabuhan Tanjung Kelayang	Belitung

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Adapun angkutan penyeberangan meliputi simpul dan jalur sebagai berikut:

1. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian (Kabupaten Bangka Barat)-Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan);
2. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru (Kabupaten Bangka Barat)-Pelabuhan Belinyu (Kabupaten Bangka);
3. Pelabuhan penyeberangan Pangkal Balam (Kota Pangkal Pinang)-Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); dan
4. Pelabuhan penyeberangan Sadai (Kabupaten Bangka Selatan)-Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung) dan Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan).

c. **Sistem Transportasi Udara**

Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang lalu lintas udara. Tatanan bandar udara terdiri dari: a) bandar udara pengumpul (*hub*); dan b) bandar udara pengumpan (*spoke*). Bandar udara pengumpul merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Pengembangan sistem transportasi udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru di Pangkalpinang dan Bandar Udara H.AS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan. Dalam pembangunan dan pengembangan bandar udara harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Rencana Jaringan Energi**

Rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 100 persen. Dengan kondisi semua rumah tangga dan desa sudah dialiri listrik PLN. Jumlah pelanggan listrik PLN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berjumlah 492.359 pelanggan, dengan daya terpasang sebesar 357.143 KW dan jumlah produksi listrik sebesar 1.350.582.502 KWh (Babel Dalam Angka, 2021).

Gambar II.7
Kondisi Kelistrikan Bangka Belitung



Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan jaringan energi ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik. Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya primer, terutama sumber energi terbarukan yang banyak tersedia di Kabupaten/Kota diantaranya tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, biogas, biomassa, gelombang laut dan sumber energi alternatif lainnya. Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan listrik. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan energi listrik tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan energi listrik dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.4
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010-2030 – KVA

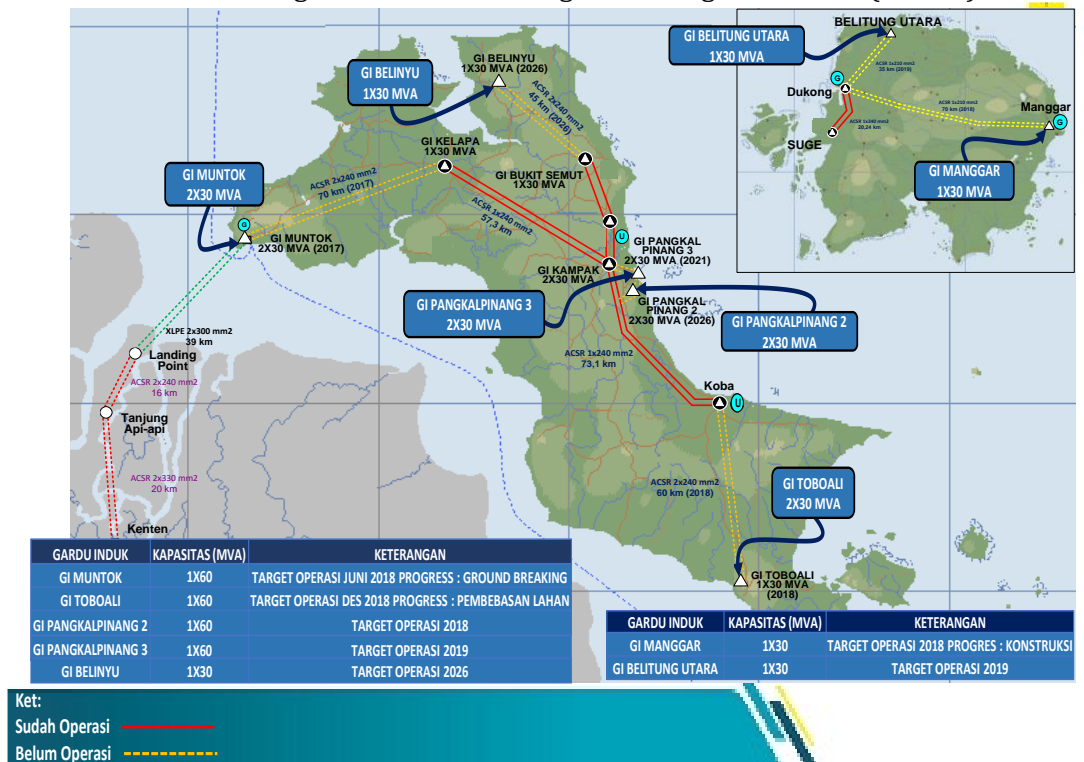
Wilayah	2010	2015	2020	2025	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pulau Bangka					
1 Bangka	138.036	147.013	160.571	175.380	190.182
2 Bangka Barat	73.556	78.340	85.564	93.456	101.344
3 Bangka Tengah	89.821	95.662	104.484	114.120	123.752
4 Bangka Selatan	86.245	91.854	100.325	109.578	118.826
5 Pangkal Pinang	89.501	94.440	102.543	111.341	120.738
Jumlah	477.159	507.309	553.487	603.875	654.842
B. Pulau Belitung					
6 Belitung	83.842	87.455	92.464	97.759	104.266
7 Belitung Timur	62.441	65.133	68.863	72.807	77.653
Jumlah	146.283	152.588	161.327	170.566	181.919
Jumlah Total	623.442	659.897	714.814	774.441	836.761

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Proyeksi kebutuhan Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030- KVA pada tahun 2010 sebanyak 623.442 KK. Dimana kebutuhan daya listrik di Pulau Bangka sebanyak 477.159 KK sedangkan di Pulau Belitung sebanyak 146.283 KK. Pada tahun 2030 kebutuhan daya listrik semakin meningkat dimana kebutuhan daya listrik di Pulau Bangka sebanyak 454.842 KK sedangkan di Pulau Belitung sebanyak 836.761 KK. Artinya dari tahun 2010 kebutuhan daya listrik 2010-2030- KVA semakin meningkat sampai dengan tahun 2030 mendatang.

Gambar II.8

Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026 (RUPTL)



Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Gambar II.9

Energi Baru dan Terbarukan

 BIOMASS		<table><tr><th>Eksisting</th><th>Rencana</th></tr><tr><td>1) IPP - PLTBm Listrindo 4 MW (Bangka Barat) 2) IPP - PLTBm Belitung Energi 4 MW (Belitung Timur)</td><td>1. IPP – PLTBm Energi Karya Persada 6 MW (Sudah PPA, Konstruksi). (Bangka Barat) 2. IPP - PLTBm PT. Sentosa Jaya Purnama 10 MW (Sudah PPA, Konstruksi). (Bangka Tengah)</td></tr></table>	Eksisting	Rencana	1) IPP - PLTBm Listrindo 4 MW (Bangka Barat) 2) IPP - PLTBm Belitung Energi 4 MW (Belitung Timur)	1. IPP – PLTBm Energi Karya Persada 6 MW (Sudah PPA, Konstruksi). (Bangka Barat) 2. IPP - PLTBm PT. Sentosa Jaya Purnama 10 MW (Sudah PPA, Konstruksi). (Bangka Tengah)
Eksisting	Rencana					
1) IPP - PLTBm Listrindo 4 MW (Bangka Barat) 2) IPP - PLTBm Belitung Energi 4 MW (Belitung Timur)	1. IPP – PLTBm Energi Karya Persada 6 MW (Sudah PPA, Konstruksi). (Bangka Barat) 2. IPP - PLTBm PT. Sentosa Jaya Purnama 10 MW (Sudah PPA, Konstruksi). (Bangka Tengah)					
 BIOGAS		<table><tr><th>Eksisting</th><th>Rencana</th></tr><tr><td>1) IPP - PLT Biogas Austindo 1,2 MW, ekspansi 0,6 MW (total 1,8 MW) . (Belitung Timur) 2) Excess Power - PLTBg Tuang 1,2 MW (Bangka)</td><td>1) IPP – PLTBg PT. Bangka Biogas Synergi, 2 MW (sudah PPA, Konstruksi). (bangka) 2) IPP - PLTBg PT. Gunung Sawit Bina Lestari, 4 MW (pengajuan Proposal). (Bangka Barat) 3) IPP - PLTBg PT. Gunung Maras Lestari, 3 MW (pengajuan Proposal). (Bangka) 4) IPP - PLTBg PT. Gunung Sawit Bina Lestari, 4 MW (pengajuan Proposal). (Bangka Barat) 5) IPP - PLTBg PT. Asindo Tech, 4 MW (pengajuan Proposal). (Bangka) 6) IPP - PLTBg PT. Prima Gasifikasi Indonesia, 10 MW (Pengajuan Proposal). (Bangka Selatan)</td></tr></table>	Eksisting	Rencana	1) IPP - PLT Biogas Austindo 1,2 MW, ekspansi 0,6 MW (total 1,8 MW) . (Belitung Timur) 2) Excess Power - PLTBg Tuang 1,2 MW (Bangka)	1) IPP – PLTBg PT. Bangka Biogas Synergi, 2 MW (sudah PPA, Konstruksi). (bangka) 2) IPP - PLTBg PT. Gunung Sawit Bina Lestari, 4 MW (pengajuan Proposal). (Bangka Barat) 3) IPP - PLTBg PT. Gunung Maras Lestari, 3 MW (pengajuan Proposal). (Bangka) 4) IPP - PLTBg PT. Gunung Sawit Bina Lestari, 4 MW (pengajuan Proposal). (Bangka Barat) 5) IPP - PLTBg PT. Asindo Tech, 4 MW (pengajuan Proposal). (Bangka) 6) IPP - PLTBg PT. Prima Gasifikasi Indonesia, 10 MW (Pengajuan Proposal). (Bangka Selatan)
Eksisting	Rencana					
1) IPP - PLT Biogas Austindo 1,2 MW, ekspansi 0,6 MW (total 1,8 MW) . (Belitung Timur) 2) Excess Power - PLTBg Tuang 1,2 MW (Bangka)	1) IPP – PLTBg PT. Bangka Biogas Synergi, 2 MW (sudah PPA, Konstruksi). (bangka) 2) IPP - PLTBg PT. Gunung Sawit Bina Lestari, 4 MW (pengajuan Proposal). (Bangka Barat) 3) IPP - PLTBg PT. Gunung Maras Lestari, 3 MW (pengajuan Proposal). (Bangka) 4) IPP - PLTBg PT. Gunung Sawit Bina Lestari, 4 MW (pengajuan Proposal). (Bangka Barat) 5) IPP - PLTBg PT. Asindo Tech, 4 MW (pengajuan Proposal). (Bangka) 6) IPP - PLTBg PT. Prima Gasifikasi Indonesia, 10 MW (Pengajuan Proposal). (Bangka Selatan)					
 PLTS		<table><tr><th>Eksisting</th><th>Rencana</th></tr><tr><td>1) PLTS On Grid 1 MWp di Belinyu 2) PLTS Off Grid 40 KwP P. Gersik 3) PLTS Off Grid 80 KwP P. Celagen 4) PLTS Off Grid 80 KwP P. Bukulimau 5) PLTS Off Grid 125 KwP P. Pongok</td><td>1) IPP – PLTS Synergi Energy Baru, 4 MW (proposai) (Bangka) 2) IPP – PLTS Cakrawala Energi Nusantara, 1 MW (proposai) (Belitung) 3) IPP – PLTS Pulau Tersebar (8.860 kWp)</td></tr></table>	Eksisting	Rencana	1) PLTS On Grid 1 MWp di Belinyu 2) PLTS Off Grid 40 KwP P. Gersik 3) PLTS Off Grid 80 KwP P. Celagen 4) PLTS Off Grid 80 KwP P. Bukulimau 5) PLTS Off Grid 125 KwP P. Pongok	1) IPP – PLTS Synergi Energy Baru, 4 MW (proposai) (Bangka) 2) IPP – PLTS Cakrawala Energi Nusantara, 1 MW (proposai) (Belitung) 3) IPP – PLTS Pulau Tersebar (8.860 kWp)
Eksisting	Rencana					
1) PLTS On Grid 1 MWp di Belinyu 2) PLTS Off Grid 40 KwP P. Gersik 3) PLTS Off Grid 80 KwP P. Celagen 4) PLTS Off Grid 80 KwP P. Bukulimau 5) PLTS Off Grid 125 KwP P. Pongok	1) IPP – PLTS Synergi Energy Baru, 4 MW (proposai) (Bangka) 2) IPP – PLTS Cakrawala Energi Nusantara, 1 MW (proposai) (Belitung) 3) IPP – PLTS Pulau Tersebar (8.860 kWp)					
 PLTD CPO		<table><tr><th>Rencana</th></tr><tr><td>1) PLTD CPO 5 MW oleh Kementerian ESDM (Belitung)</td></tr></table>	Rencana	1) PLTD CPO 5 MW oleh Kementerian ESDM (Belitung)		
Rencana						
1) PLTD CPO 5 MW oleh Kementerian ESDM (Belitung)						

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Dengan keterbatasan alternatif pembangkit listrik maka arahan pengembangan energi listrik di Provinsi Bangka Belitung adalah pembangkit listrik berbahan bakar non minyak, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan bahan bakar batubara. Sedangkan untuk daerah terpencil arahan penyediaan prasarana listrik adalah dengan membangun jaringan terisolasi. Arahan pengaturan penempatan pembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan.

Tabel II.5
Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	*Jumlah Desa	Desa Berlistrik PLN	Rasio Desa Berlistrik PLN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(%)
1	Bangka	71	71	100
2	Bangka Barat	66	66	100
3	Bangka Tengah	63	63	100
4	Pangkalpinang	42	42	100
5	Bangka Selatan	53	53	100
6	Belitung Timur	39	39	100
7	Belitung	49	49	100
Bangka Belitung		381	381	100

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait.

Tabel II.6
Potensi Energi Baru dan Terbarukan Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Jenis Energi Baru Dan Terbarukan (Ebt)	Potensi
(1)	(2)	(3)
1	Energi Surya	220 MW
2	Biomassa	72,45 MW
3	Energi Angin	1,67 MW
4	Energi Air	-
5	Energi Biogas POME	9,4 MW
6	Energi Biodiesel	5 MW

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pihak PT. PLN (Persero) telah melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006. Saat ini kedua PLTU tersebut sudah beroperasi. Sementara itu, hingga tahun 2019 dari 6 (enam) potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang tidak ada hanya jenis energi. Sedangkan untuk jenis energi surya potensinya sampai dengan tahun 2050 sebesar 220 MW.

4. Rencana Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan akan telepon terdiri atas kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik terdiri atas untuk rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dengan standar masing-masing sebagai berikut:

1. 4 (empat) rumah kecil memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst);
2. 2 (dua) rumah sedang memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst); dan
3. Setiap rumah besar memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst).

Sedangkan standar kebutuhan non-domestik adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan umum dan komersil: 15 persen dari domestik;
2. Wartel: 250 jiwa per wartel; dan
3. Telepon umum: 800 jiwa per unit.

Kedepannya seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan sambungan telepon tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan sambungan telepon per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.7
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030

Wilayah		2010	2015	2020	2025	2030
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pulau Bangka						
1	Bangka	32.582	36.207	39.546	43.193	45.552
2	Bangka Barat	17.363	19.294	21.073	23.017	24.258
3	Bangka Tengah	21.202	23.560	25.733	28.106	30.379
4	Bangka Selatan	20.358	22.622	24.708	26.987	29.170
5	Pangkal Pinang	21.179	23.259	25.255	27.421	29.502
	Jumlah	112.683	124.942	136.315	148.724	158.861
B. Pulau Belitung						
6	Belitung	19.173	19.963	21.106	22.315	23.491
7	Belitung Timur	14.278	14.867	15.719	16.619	17.495
	Jumlah	33.451	34.830	36.825	38.934	40.986
Kep. Bangka Belitung		146.134	159.772	173.140	187.658	199.847

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem terestrial dan sistem satelit sebagai penghubung lokal dan interlokal, pengembangan jaringan ini dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi. Tersedianya fasilitas telepon sangat diperlukan bagi kelancaran komunikasi dan arus informasi. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan kegiatan ekonomi, maka permintaan terhadap sambungan telepon akan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Kebutuhan sambungan telepon se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 adalah sebanyak 146.134 sambungan telepon. Jika diasumsikan peningkatan sambungan telepon terus meningkat setiap tahunnya maka kebutuhan sambungan telepon di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan tahun 2030 adalah sebanyak 199.847 sambungan telepon. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk tiap tahunnya.

5. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem pengembangan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: sistem jaringan sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai, dengan rincian sebagai berikut:

- Sistem jaringan sungai berupa Wilayah Strategis Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yaitu WS Belitung;
- Sistem jaringan irigasi terdiri atas daerah irigasi kewenangan pemerintah dan daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;
- Sistem jaringan air baku terdiri dari: sumber air baku, sistem pengelolaan air baku, dan peruntukan air baku;
- Sistem pengendalian banjir berupa: pengamanan kawasan tangkapan air hujan, pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi, pengamanan sempadan sungai, pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air, dan pembangunan kanal pengatur distribusi air sungai serta normalisasi sungai;
- Sistem pengamanan pantai dilakukan dengan cara: naturalisasi pantai dengan penghijauan, pengamanan gundukan pasir, pemecah ombak, turap dan pengamanan sempadan pantai

6. Sistem Prasarana Lingkungan

Sistem prasarana lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: tempat pemrosesan akhir sampah (TPA Regional); tempat pengolahan dan/atau pengelolaan limbah domestik; sistem drainase; sistem pengelolaan air minum (SPAM); dan sarana prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kebutuhan dasar masyarakat. SPAM dikembangkan di setiap pusat kegiatan wilayah dan lokal (PKNp, PKW, PKWp, dan PKL).

Gambar II.10
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

7. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi:

1) Hutan lindung

Sesuai dengan arahan dalam RTRWN dan kondisi ekosistem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rencana minimal luas kawasan lindung yang harus dipulihkan kembali dan/atau dipertahankan di provinsi ini mencapai 492.700 ha, di mana 32 persen diantaranya (atau 156.730 ha) merupakan kawasan hutan lindung. Hutan lindung yang dimaksud terdapat di Kabupaten Bangka Barat (28.589 ha), Kabupaten Bangka (15.736 ha), Kabupaten Bangka Tengah (32.226 ha), Kabupaten Bangka Selatan (28.234 ha), Kabupaten Belitung (39.306 ha) dan Kabupaten Belitung Timur (45.874 ha).

2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Merupakan kawasan gambut dan atau kawasan resapan air hujan. Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria: kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam kategori ini hanyalah kawasan bergambut di Bangka Barat, tepatnya di Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jebus.

3) Kawasan perlindungan setempat

a) Sempadan Pantai. Sebagaimana diketahui bahwa Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 (dua) pulau besar: Bangka dan Belitung. Disamping itu terdapat pulau-pulau lain yang lebih kecil yaitu Pulau Nangka, Pulau Penyu, Pulau Burung, Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Gelasa, Pulau Panjang, Pulau Tujuh, Pulau Lima, Pulau Lengkuas, Pulau Selindung, Pulau Pelanduk, Pulau Seliu, Pulau Nadu, Pulau Mendanau, Pulau Batu Dinding, Pulau Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Kriteria untuk sempadan pantai adalah wilayah pantai dengan jarak 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

b) Sempadan Sungai. Adapun sungai-sungai besar yang terdapat di Kepulauan Bangka Belitung diantaranya adalah Sungai Baturusa, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau. Ketentuan terkait sempadan sungai adalah daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar 5

(lima) meter atau lebih dari kaki tanggul sebelah luar; daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 50 (lima puluh) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi.

- c) Sempadan Kolong.** Berupa kolam-kolam bekas galian timah yang tergenang air hujan atau sungai yang dalam hal ini dapat diperlakukan sebagai danau/waduk. Kawasan sempadan kolong ditetapkan dengan kriteria: wilayah daratan dengan jarak antara 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian kolong yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik kolong.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya

- a) Kawasan Cagar Alam.** Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat cagar alam sebagai berikut: Cagar Alam Gunung Lalang-BELITUNG, Gunung Menumbing, Gunung Maras, Gunung Mangkol, Gunung Permisan, dan Jering Menduyung, kawasan Gunung Tajam Belitung.
- b) Taman Wisata Alam Laut.** Taman Wisata Alam Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan Perairan Bangka Selatan.
- c) Kawasan Suaka Alam Laut** dan perairan lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur.

Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan cagar budaya berskala internasional yang berada di bawah naungan UNESCO yaitu kawasan Kota Tua Muntok dan Bukit Menumbing. Di kawasan pusat kota terdapat mercusuar Tanjung Kalian dan Benteng Kuta Seribu yang di bangun tahun 1812-1817, Masjid Jamik dan Kelenteng Kung Fuk Nio serta Komplek Perumahan Mayor Chung A Thiam yang berusia ratusan tahun (dibangun 1830-an). Bukit Menumbing yang mempunyai ketinggian hampir 500 meter dpa dan dikelilingi hutan lindung terdapat bangunan tua yang dikenal dengan Giri Sasana Menumbing yang dibangun Belanda pada tahun 1932. Bangunan-bangunan yang dimaksud bukan saja berusia ratusan tahun namun juga mempunyai nilai sejarah, arsitektur dan budaya yang tinggi, sehingga pemerintah daerah bersama UNESCO telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan cagar budaya.

5) Kawasan rawan bencana

Berdasarkan data yang tersedia pada laporan RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung dapat diketahui kawasan rawan bencana, yaitu:

- a) Kawasan rawan banjir** terdapat di Kecamatan Muntok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat), Lubuk Besar, Koba, Namang dan Sungai Selan (Kabupaten Bangka Tengah), Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan), Kota Pangkalpinang, Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan

Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur), Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung), Sungai Liat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);

- b) Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parit Tiga, Kecamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sada, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka); dan
- c) Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat).

b. Kawasan Budidaya

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, yang dimaksud kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Definisi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan definisi hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +10.878 Hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas +3.210 Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan lampiran peta keputusan tersebut, kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 659.014,58 Hektar, berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Konservasi 35.473,00 Ha, Hutan Lindung 189.965,00 Ha, Hutan Produksi 432.882,82 Ha, dan Hutan Produksi Konversi 692,58 Ha.

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 30 huruf (a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a tersebar di seluruh Kabupaten meliputi:

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 78.368,92 ha (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma sembilan puluh dua hektar);
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 65.884 ha (enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat hektar);

- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 84.990 ha (delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sembilan puluh hektar);
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 106.154 ha (seratus enam ribu seratus lima puluh empat hektar);
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.377 ha (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh hektar); dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 57.638 ha (lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan hektar)

Gambar II.11

Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034, Kawasan Hutan Produksi diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Kawasan untuk Rehabilitasi, kriteria Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan.
- b. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil, kriteria Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar, kriteria Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak Belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin.
- d. Kawasan untuk non Kehutanan, kriteria Hutan Produksi dengan penutupan hutan selain Hutan Primer, tidak bergambut lebih dari 2 meter, dengan menggunakan mekanisme izin pinjam pakai.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan

Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai dengan Tahun 2016, Kawasan Hutan seluas 657.378,26 ha, terdiri dari 35.750,84 ha Hutan Konservasi, 184.276,95 ha Hutan Lindung, 436.647,89 ha Hutan Produksi dan 692,58 ha Hutan Produksi Konversi.

Gambar II.12
Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi
dalam RKTP Tahun 2014-2034



Sumber : RKTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2034

Potensi Hasil Hutan Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hasil Hutan Kayu (HHK) terdiri dari jenis: meranti, ramin, membalong, mendaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, manggeris, gelam, bakau, rotan, sengon, dan beberapa jenis dari kelompok rimba campuran lainnya. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) terdiri dari: gaharu, madu alam, jamur, rotan, getah karet, tanaman bahan obat (pasak bumi), tanaman penghasil buah, tanaman penghasil minyak atsiri. Selain hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, kawasan hutan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata alam dan jasa lingkungan untuk mendukung pariwisata. Bahkan telah ditetapkan 2 (dua) kawasan hutan yang dikelola melalui skema izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Juru Seberang dan HKm Bukit Peramun di Kabupaten Belitung sebagai Geopark Nasional.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Bangka Belitung karena terdapat sejumlah besar penduduk Bangka Belitung yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Berdasarkan data luasan areal baik RTRW maupun penggunaan lahan dapat ditelaah bahwa potensi pembangunan pertanian masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan baik sebagai kawasan pertanian sub sektor tertentu maupun pertanian terpadu. Secara terperinci penggunaan lahan/*land use* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.8

Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Prov. Kep. Bangka Belitung 2015-2018 (Ha)

Jenis Penggunaan Lahan	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
-1	-2	-3	-4	-5
Lahan Pertanian	1,124,286	1,186,652	1,174,938	1,173,412
1. Lahan Sawah	15,719	22,771	25,058	25,093
<i>a. Irigasi</i>	3,090	4,602	4,234	4,966
<i>b. Tadah Hujan</i>	12,136	16,397	17,878	17,181
<i>c. Rawa Pasang Surut</i>	18	270	390	390
<i>d. Rawa Lebak</i>	475	1,502	2,556	2,556
2. Lahan Bukan Sawah	1,108,567	1,163,881	1,149,880	1,148,319
<i>a. Tegalan</i>	113,105	117,376	99,038	97,930
<i>b. Ladang</i>	30,348	28,147	27,435	30,416
<i>c. Perkebunan</i>	441,152	367,848	391,064	394,408
<i>d. Hutan Rakyat</i>	47,753	42,637	43,315	43,661
<i>e. Padang Pengembalaan</i>	1,815	2,263	3,232	3,232
<i>f. Tanah kosong/ (Sementara tidak diusahakan)</i>	76,588	67,415	55,987	59,174
<i>g. Lain-Lain (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara, dll)</i>	397,806	538,195	529,810	519,497
Lahan Bukan Pertanian	517,741	455,762	489,080	490,607
a. Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dll	517,741	455,762	489,080	490,607
JUMLAH	1,642,027	1,642,414	1,664,019	1,664,018

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2016-2019

Selanjutnya, merujuk ke Tabel II.2 untuk Penggunaan Lahan di tahun 2020, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan pertanian dengan rincian kawasan Pertanian Lahan Kering (56.855,22 Ha), Pertanian Lahan Kering Campur Semak seluas (544.496,27 Ha), perkebunan seluas (253.359,81 Ha) dan sawah (4.705,22 Ha).

Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) seluas 903.450 Ha (Sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh hektar), terdiri atas:

- kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha (tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga hektar);
- kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua belas hektar);
- kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha (tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga hektar); dan
- kawasan peruntukan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha (sepuluh ribu seratus dua hektar).

Pasal 31 ayat (2) Pengembangan kawasan peruntukan tanaman pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha (tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh hektar);
- Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha (tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga hektar);

- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha (sebelas ribu empat puluh empat hektar);
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350Ha (seratus tujuh puluh satu tiga ratus lima puluh hektar);
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga hektar); dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473Ha (tiga puluh delapan empat ratus tujuh puluh tiga hektar).

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha (lima puluh tiga ribu seratus enam belas hektar);
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha (tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima hektar);
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha (dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu hektar);
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha (lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan hektar);
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha (empat puluh ribu dua ratus lima puluh dua hektar); dan
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha (delapan belas ribu hektar).

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Perkebunan Besar meliputi:
 - 1. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808 Ha (tiga puluh ribu delapan ratus delapan hektar);
 - 2. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590 Ha (enam belas ribu lima ratus sembilan puluh hektar);
 - 3. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908 Ha (empat ribu sembilan ratus delapan hektar);
 - 4. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329 Ha (empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan hektar);
 - 5. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047 Ha (tiga puluh lima ribu empat puluh tujuh hektar); dan
 - 6. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188 Ha (tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan hektar).
- b. Perkebunan Rakyat meliputi:
 - 1. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120 Ha (empat puluh ribu seratus dua puluh) hektar);
 - 2. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660 Ha (empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh hektar);
 - 3. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687 Ha (tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh hektar);

4. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326 Ha (tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh enam hektar);
5. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264 Ha (dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat hektar); dan
6. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456 Ha (delapan belas ribu empat ratus lima puluh enam hektar).

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha (tujuh ratus sembilan puluh satu hektar);
- b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha (tiga ratus delapan belas hektar);
- c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh hektar);
- d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha (lima ratus enam puluh enam hektar);
- e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha (empat ratus enam puluh tujuh hektar);
- f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha (seratus enam puluh hektar); dan
- g. Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha (delapan puluh hektar).

Saat ini, fungsi strategis lahan pertanian secara sosial, ekonomi dan religius bagi masyarakat agraris, terus berkurang dengan cepat karena kebutuhan terhadap lahan-lahan baru serta luas lahan yang terbatas serta laju pertumbuhan penduduk yang memerlukan lahan, alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Alih fungsi lahan bila tidak diantisipasi akan mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan petani dan masyarakat.

3) Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas: Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); PPN Sungailiat; PPN Tanjung Pandan; Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI); PPI Kurau; PPI Manggar; PPI Sungai Selan; PPI Sadai; PPI Selat Nasik; dan PPI Gantung.

Kawasan Peruntukan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan di seluruh wilayah Provinsi yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi:

- a. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
- b. perikanan budidaya yang terdiri atas budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas :

- a. Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang terdiri atas:
 1. PPN Sungailiat; dan
 2. PPN Tanjungpandan.
- b. Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) terdiri atas :
 1. PPI Bangka Kota;
 2. PPI Permis;
 3. PPI Pulau Pongok;
 4. PPI Batubetumpang;
 5. PPI TanjungSangkar;
 6. PPI Ketapang;
 7. PPI Batu DindingBelinyu;
 8. PPI Kurau;
 9. PPI Manggar;
 10. PPI Mentok;
 11. PPI BatuBeriga;
 12. PPI Sadai;
 13. PPI Selat Nasik;
 14. PPI Pulau Seliu;
 15. PPI Sungai Selan;
 16. PPI Tanjung Binga;
 17. PPI Toboali;
 18. PPI Selendang; dan
 19. PPI Dendang.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan :

- a. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha (lima hektar);
- b. Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha (tujuhkom lima hektar); dan
- c. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha (lima belas hektar).

Sebagai provinsi kepulauan pertama di Indonesia yang diapit oleh 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, wilayah laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang lebih 65,301.00 km² atau 79,80 persen yang memiliki potensi produksi (ton), baik perikanan tangkap maupun perikanan budi daya. Potensi perikanan tangkap sebesar 1.059.000 ton sedangkan perikanan budi daya memiliki potensi sebesar 1.316.000 ton. Meskipun demikian potensi besar untuk perikanan tangkap maupun perikanan budi daya masih belum optimal dalam pemanfaatannya. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya: masih banyak Nelayan yang menggunakan Kapal *Trawl* yang penggunaannya sudah dilarang karena merusak lingkungan laut (terumbu karang) dan meresahkan nelayan lainnya; masih kurangnya pengawasan di laut karena luasnya perairan Bangka Belitung; kebutuhan benih untuk kegiatan budi daya sebagian besar masih didapatkan dari luar Bangka Belitung; dan pemanfaatan teknologi baru dalam kegiatan budi daya masih terbatas hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang terlatih dan kurangnya permodalan untuk melakukan kegiatan usaha.

Selain dari pada itu terdapat potensi pada kawasan konservasi yang dikelola baru mencapai 447.785,25 ha meliputi wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Tahun 2017; a). Kawasan Konservasi Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya Kabupaten Belitung Timur. Nomor SK 52/KEPMEN-KP/2017 Tanggal 22 Desember 2017, dengan status penetapan. b). Kawasan Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur Kabupaten Bangka Tengah. 188.45/268/DKP /2007 Tanggal 17 Juli 2017, dengan status pencadangan.
2. Tahun 2018; Kawasan Konservasi Perairan Tuing Kabupaten Bangka 188.44/739/DKP/2018 Tanggal 27 September 2018 dengan status pencadangan.
3. Tahun 2019; Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Belitung 188.44/927/DKP/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 (Reviu Pencadangan). Status masih dalam proses penetapan.

4) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan darat seluas +400.000 Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian, memfasilitasi dan mengawasi kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 Ha di wilayah WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.

Gambar II.13
Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Potensi pertambangan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.9
Potensi Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)

No	Jenis Bahan Galian	Tipe	Potensi Sumber Daya dan Cadangan					
			Timah	Bauksit	Monasit	Xenotim	Diabas	Titan Plaser
1	Logam	Sumber daya	2.564.388,929		181.735,62	20.734,223		515.188,8
		Cadangan	2.068.069,829	868.000	3.311	0,058		562
2	Biji	Sumber daya	9.970.982.968		6.384.384.512	970.843.849		6.869.184
		Cadangan	2.010.642.708,109	3.100.000	1.084	0,089		
			Titan Plaser	Besi Primer	Seng	Timbal	Perak	
1	Logam	Sumber daya	515.188,8	18.524.967,611	1.679.138	1.027.076	1.531,67	
		Cadangan	562	14,781				
2	Biji	Sumber daya	6.869.184	36.629.375,54	25.610.000	25.610.000	25.610.000	
		Cadangan		328.465,96				

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Potensi pertambangan lainnya terdapat di 6 (enam) wilayah kabupaten kecuali Kota Pangkalpinang di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Dari 10 (sepuluh) potensi sumber daya alam, diketahui potensi sumber daya paling banyak adalah biji timah sebesar 9.970.982.967,54 ton, disusul biji monasit yaitu sebesar 6.384.384.512,00 ton. Sedangkan untuk logam perak merupakan potensi yang paling sedikit sebesar 1.531,67 ton. Sumber daya pasir kuarsa menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 690.424.868 ton, disusul granit sebesar 528.553.883 ton.

Kawasan peruntukan pertambangan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah kawasan darat seluas 400.000 Ha (empat ratus ribu hektar) didalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. Luasan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 62.700Ha (enam puluh dua ribu tujuh ratus hektar);
 - Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 79.900 Ha (tujuh puluh Sembilan ribu Sembilan ratus hektar);
 - Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 55.800 Ha (lima puluh lima ribu delapan ratus hektar);
 - Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 125.700 Ha (seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus hektar);
 - Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 29.900 Ha (dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus hektar); dan
 - Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 46.000 Ha (empat puluh enam ribu hektar).
- 1) Luasan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana pada ayat (1), dapat berkurang sesuai dengan perkembangan keadaan.

- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) WPR tidak boleh tumpang tindih dengan WIP;
 - b) Tidak dilakukan di kawasan hutan;
 - c) Tidak dilakukan di sempa dan pantai, sungai, dan jalan;
 - d) Penambangan tidak menggunakan alat berat;
 - e) Pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
 - f) Tidak dilakukan di kawasan terlarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemerintah dapat menetapkan wilayah pencadangan Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 4) Peta pertambangan wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Untuk data potensi bahan galian non logam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik potensi sumber daya maupun cadangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.10
 Potensi Bahan Galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (ton)

No	Jenis Bahan Galian	Potensi Sumber Daya dan Cadangan	Potensi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kaolin	Sumber Daya	376.687.532
		Cadangan	5.990.630
2	Pasir kuarsa	Sumber Daya	690.424.868
		Cadangan	18.389.856
3	Diabas	Sumber Daya	
		Cadangan	
4	Granit	Sumber Daya	528.553.883
		Cadangan	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

5) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan pembangunan industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 (tujuh) kawasan dengan total luas kawasan sekitar 15.158 Ha yang tersebar di 7 kota/kabupaten. Ketujuh peruntukan kawasan tersebut adalah : (1) Ketapang Kota Pangkalpinang (2) Tanjung Ular dan Tanjung Kelian di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, (3) Sungailiat di Kabupaten Bangka, (4) Sadai di Kabupaten Bangka Selatan, (5) Suge di Kabupaten Belitung, (6) Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur, dan (7) Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 34 Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dilakukan pada kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri yang meliputi:

- a. Kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Mentok di Kabupaten Bangka Barat;
- b. Kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;

- c. Kawasan peruntukan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
- d. Kawasan peruntukan industri Ketapang di Pangkalpinang;
- e. Kawasan peruntukan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- f. Kawasan peruntukan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
- g. Kawasan peruntukan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

Tabel II.11
Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama Kawasan Industri	Dasar Hukum Pembentukan Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Bidang Kewenangan
1	2	3	4	5
1	Kawasan Peruntukan Industri Pangkalpinang (Ketapang)	Perda Kota Pangkalpinang No.1 Th 2012 ttg RTRW Kota Pangkalpinang 2011-2030	± 440	Pemkot Pangkalpinang
2	Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bangka Barat (Tanjung Ular dan sekitar Tanjung Kalian)	Perda Kab. Bangka Barat No.1 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Bangka Barat 2014-2034	± 1.414	Pemkab Bangka Barat
3	Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Bangka (Jelitik, Sungailiat)	Perda Kab. Bangka No. 15 Tahun 2014 ttg RDTR Sungailiat 2014-2034	± 253	Pemkab Bangka
4	Kawasan peruntukan industri Kabupaten Bangka Selatan (Sadai)	Perda Kab. Bangka Selatan No.6 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Bangka Selatan 2014-2034	± 3.086	Pemkab Bangka Selatan
5	Kawasan peruntukan industri Kabupaten Belitung (Suge)	Perda Kab. Belitung No.3 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Belitung 2014-2034	± 1.414	Pemkab Belitung
6	Kawasan industri Kabupaten Belitung Timur (Air Kelik)	Perda Kab. Belitung Timur No.13 Tahun 2014 ttg RTRW Kab. Belitum 2014-2034	± 1.532	Pemkab Belitum
7	Kawasan peruntukan industri Kabupaten Bangka Tengah (Tanjung Berikat-Lubuk Besar)	Perda Kab. Bangka Tengah No.48 Tahun 2011 ttg RTRW Kab. Bangka Tengah 2011-2031	± 7.019	Pemkab Bangka Tengah
	Total Luas Kawasan		± 15.158	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

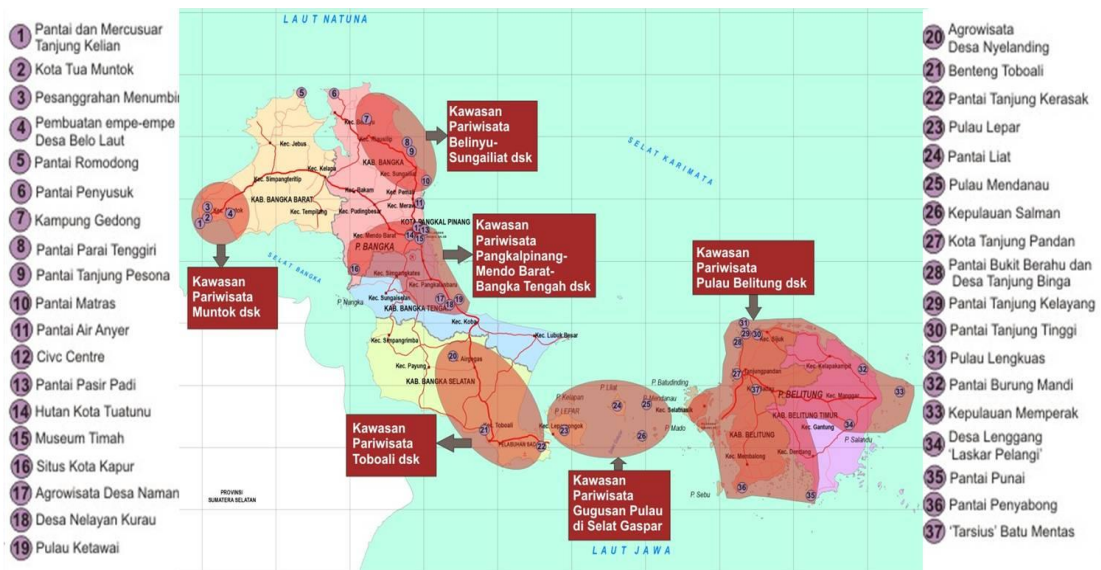
6) Kawasan peruntukan pariwisata

Dalam penataan ruang, kawasan pariwisata merupakan bagian dari kawasan budidaya. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan kawasan peruntukan pariwisata adalah: memiliki daya tarik wisata; dan/atau mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan. Sebagai sektor yang ramah lingkungan, pariwisata juga diharapkan dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat yang saat ini masih mengandalkan pada sektor pertambangan. Daya Tarik Wisata (DTW) tersebar disemua Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung, dimana Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung memiliki 81 DTW, Kabupaten Belitung Timur 120 DTW, Kabupaten Bangka Barat 47 DTW, Kabupaten Bangka Tengah 42 DTW, Kabupaten Bangka Selatan 66 DTW, dan Pangkal Pinang 25 DTW. Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana gambar di bawah ini.

Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 35 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, terdiri atas: Wisata alam; Wisata budaya; dan Wisata buatan.

- a. Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1) seluruh wilayah pesisir Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil;
 - 2) Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur;
 - 3) Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
 - 4) Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan;
 - 5) Taman wisata laut;
 - 6) Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
 - 7) Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
- b. Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - 1) Kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat;
 - 2) Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka;
 - 3) Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di Kabupaten/Kota;
 - 4) Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di Kabupaten/Kota;
 - 5) Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
 - 6) Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kota.
- c. Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema dan resort serta fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten/Kota.

Gambar II.14
Potensi Pengembangan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

7) Kawasan peruntukan permukiman

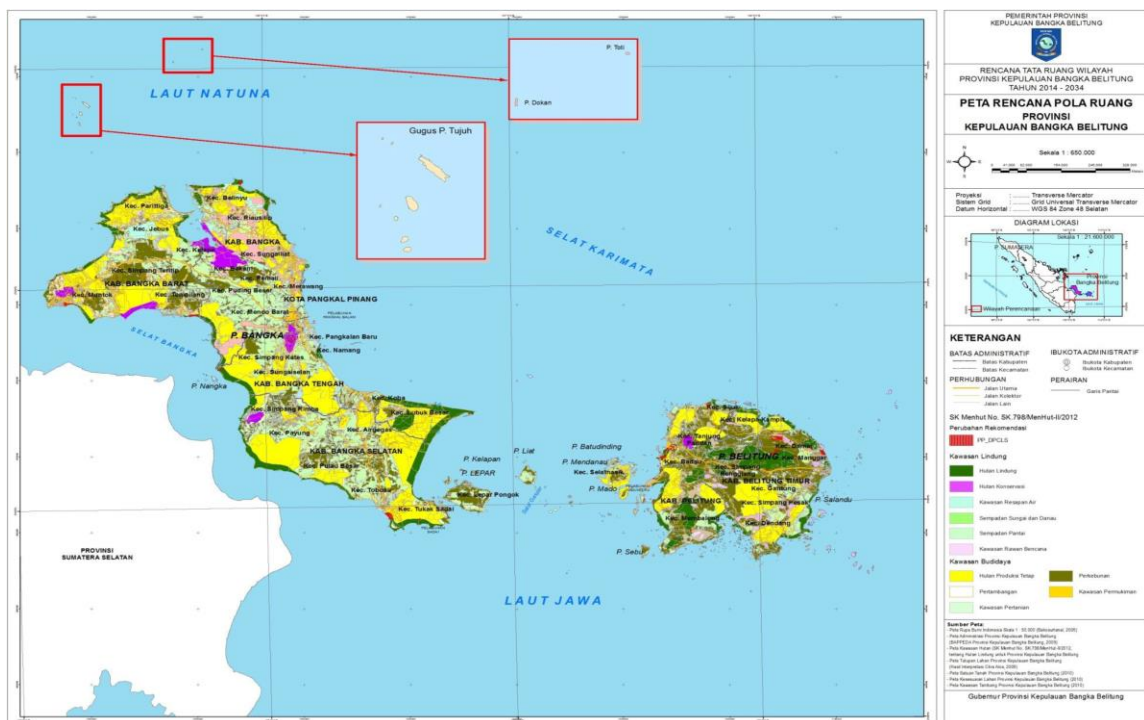
Kawasan Peruntukan Permukiman Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dengan luas kurang lebih 59.188 Ha (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan hektar), meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan diseluruh wilayah Provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman. Dibedakan menjadi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan/pelayanan seperti kawasan perkotaan Muntok, Sungailiat, Pangkalpinang, Koba, Toboali, Tanjung Pandan, dan Manggar. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dikembangkan pada wilayah belakang (hinterland dari pusat-pusat permukiman yang disebut di atas).

8) Kawasan peruntukan lainnya

Kawasan peruntukan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h meliputi kawasan pertahanan keamanan berada di Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung.

Gambar II.15

Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

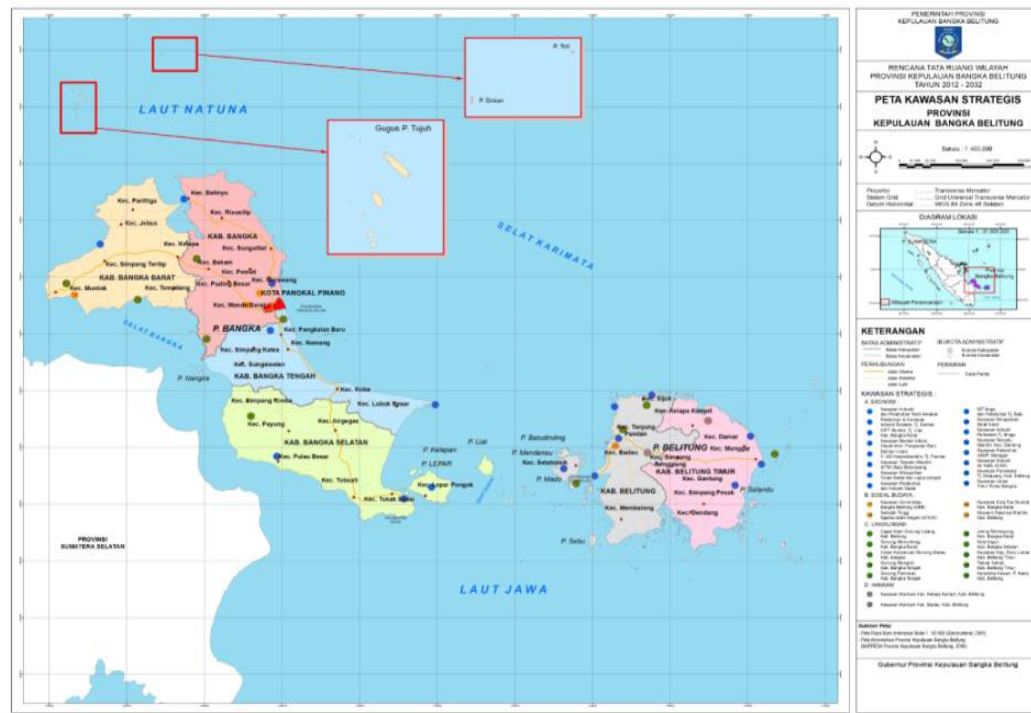


Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

c. Kawasan Strategis Provinsi

Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya; Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Gambar II.16
Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Penetapan kawasan strategis Provinsi terdiri atas:

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat di Belinyu Kabupaten Bangka;
 - Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
 - Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Mentok di Kawasan Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat;
 - Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru dan Bandar Udara HAS Hanandjoeddin Tanjung Pandan;
 - Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan;
 - Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok di Kabupaten Bangka Selatan;
 - Kawasan pelabuhan dan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
 - Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
 - Kawasan minapolitan Selat Nasik di Kabupaten Belitung;
 - Kawasan industri perikanan Tanjung Binga di Kabupaten Belitung;
 - Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
 - Kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
 - Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
 - Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan
 - Kawasan lintas timur Pulau Bangka.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi: kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten

Bangka, kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat dan Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung.

- c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi: Cagar Alam Gunung Lalang di Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, Hutan Konservasi Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan, Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat, Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka, Kawasan Kepulauan Buku Limau di Kabupaten Belitung Timur, Taman Kehati di Kabupaten Belitung dan Karantina Hewan di Pulau Nadu di Kabupaten Belitung.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Sejarah kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bencana alam lebih disebabkan oleh kondisi geografis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, ancaman gelombang ekstrem dan abrasi laut yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa. Potensi rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel II.12

Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Lokasi Bencana	Jenis Bencana
(1)	(2)	(3)
1	Bangka	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
2	Bangka Tengah	Puting Beliung, Tanah Longsor, Karhutla
3	Bangka Selatan	Puting Beliung Dan Karhutla
4	Bangka Barat	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
5	Belitung	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
6	Belitung Timur	Banjir, Puting Beliung, Karhutla
7	Pangkalpinang	Banjir, Puting Beliung, Karhutla

Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Gerunggang (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Puding, Riau Silip, Mendo Barat (Kabupaten Bangka); Kecamatan Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Kecamatan Parit Tiga (Kabupaten Bangka Barat); dan Kecamatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur);
2. Kawasan rawan puting beliung terdapat di Kecamatan Taman Sari, Rangkui, Gabek, Gerunggang (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Bakam (Kabupaten Bangka); Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Pangkalan Baru dan Simpang Katis (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Mentok, Jebus, Simpang Teritip, dan Parit Tiga (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Manggar (Kabupaten Belitung Timur); dan Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); dan

3. Kawasan rawan karhutlah tersebar di Kecamatan Pangkal Balam, Bukit Intan, Gerunggang, Girimaya, Gabek (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Sungailiat, Pemali, Puding Besar, Belinyu, Mendo Barat, Merawang, Bakam (Kabupaten Bangka); Kecamatan Tanjung Pandan, Sijuk, Badau, Membalong (Kabupaten Belitung); Kecamatan Pangkalan Baru, Simpang katis, Koba, Namang, Lubuk Besar (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Mentok, Jebus, Kelapa, Parittiga, Tempilang, Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Manggar, Simpang Renggiang, Damar, Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Kecamatan Pulau Besar, Toboali dan Tukak Sadai (Kabupaten Bangka Selatan); dan
4. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Lubuk besar (Kabupaten Bangka Tengah).

Gambar II.17

Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Pada tahun 2020 kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 4 (empat) potensi bencana dengan kejadian sebanyak 29 kejadian yaitu 5 banjir, 12 angin puting beliung, 3 tanah longsor dan 9 kebakaran hutan & lahan (karhutla). Dengan korban meninggal dunia dan hilang akibat tanah longsor sebanyak 8 jiwa dan korban terdampak dan mengungsi akibat banjir sebanyak 95 jiwa, angin puting beliung sebanyak 77 jiwa sedangkan rumah terendam akibat banjir sebanyak 95 unit rumah, rusak berat akibat angin puting beliung 3 unit rumah, 23 unit rumah rusak sedang dan 51 unit rumah rusak ringan akibat angin puting beliung sedangkan untuk fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, peribadatan dan pendidikan tidak ada mengalami kerusakan. data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.13
Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban (jiwa)			Rumah (unit)				Fasilitas Publik (unit)		
		Meninggal Dunia & Hilang	Luka-luka	Terdampak & mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Teren dam	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Banjir	5	-	-	95	-	-	-	95	-	-	-
Angin Puting Beliung	12	-	-	77	3	23	51	-	-	-	-
Tanah Longsor	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebakaran Hutan & lahan	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	29	8	3	172	3	23	51	95	-	-	-

Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

2.1.4 Demografi

Kondisi Demografi Kepulauan Bangka Belitung secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, dan sebaran penduduk sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.14
Indikator Kependudukan Provinsi Kep. Bangka Belitung 2016-2020

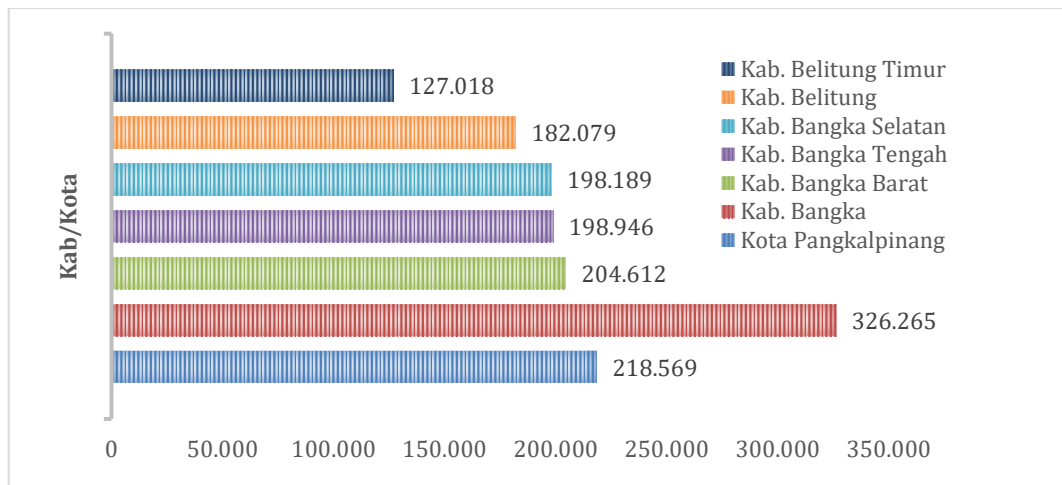
INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jumlah Penduduk	jiwa	1.401.827	1.430.865	1.459.873	1.488.792	1.455.678
a. Laki-Laki	jiwa	728.580	743.931	759.255	774.523	749.548
b. Perempuan	jiwa	673.247	686.934	700.618	714.269	706.130
2. Kepadatan Penduduk	jiwa/km ²	86	87	89	91	89
3. Rasio Jenis Kelamin	persen	108,22	108,30	108,37	108,40	106,10
		2015-2016	2015-2017	2015-2018	2010-2019	2010-2020
4. Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	2,11	4,23	6,34	2,21	1,7

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2019-2021

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 mencapai 1.455.678 jiwa yang terdiri dari 749.548 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 706.130 penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan rasio jenis kelamin 106,10. Indikator kependudukan ini merupakan jumlah penduduk hasil sensus penduduk tahun 2020 sedangkan tahun 2016-2019 merupakan hasil estimasi/proyeksi berdasarkan sensus 2010.

Grafik II.1

Jumlah Penduduk Kab/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021

Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan kabupaten/kota tergambar pada tabel di bawah ini. Tabel tersebut menunjukkan bahwa, penduduk terbanyak pada tahun 2020 berada di Kabupaten Bangka yaitu sebesar 326,3 ribu jiwa dan yang paling sedikit di Kabupaten Belitung Timur, sebanyak 127,0 ribu jiwa. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, angka tertinggi berada di Kota Pangkalpinang yakni sebanyak 1.840 orang/km², dan terendah di Kabupaten Belitung Timur yakni sebanyak 51 orang/km².

Tabel II.15

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Penduduk (ribu)		Kepadatan Penduduk (org/km)
	Km ²	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	2,950.68	17.97	326,265	22.41	111
Belitung	2,293.61	13.97	182,079	12.51	79
Pangkalpinang	118.80	0.72	218,569	15.01	1840
Bangka Barat	2,820.61	17.17	204,612	14.06	73
Bangka Tengah	2,155.77	12.95	198,946	13.67	92
Bangka Selatan	3,607.08	21.96	198,189	13.61	55
Belitung Timur	2,506.91	15.26	127,018	8.73	51
Luas Daratan	16,424.06				
Luas Perairan	65,301.00				
Kep. Bangka Belitung	81,725.23		1,455,678	100	89

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021

Kepadatan penduduk menunjukkan penurunan, dari 91 jiwa per km² pada tahun 2019 menjadi 89 jiwa per km². Pada tahun 2020 penduduk usia non produktif, usia 0-14 tahun berjumlah 363.044 dan usia 65+ tahun berjumlah 72.643 sedangkan penduduk usia produktif, usia 15-64 tahun berjumlah 1.019.991. Dengan demikian, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki era bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak bekerja. Agar bonus demografi dapat menjadi keuntungan bagi daerah, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian penduduk, hingga kebijakan ekonomi.

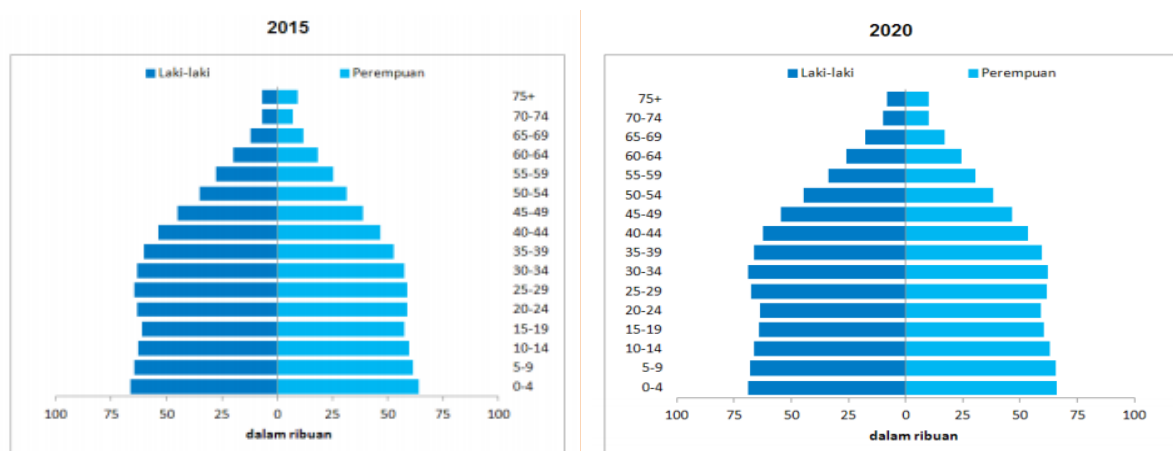
Tabel II.16
 Jumlah Penduduk Kep. Bangka Belitung menurut
 Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0-4	61,368	58,424	119,792
2	5-9	60,122	57,330	117,452
3	10-14	64,871	60,929	125,800
4	15-19	65,256	61,321	126,577
5	20-24	64,276	60,998	125,274
6	25-29	63,843	60,363	124,206
7	30-34	64,832	60,725	125,557
8	35-39	61,695	57,276	118,971
9	40-44	57,838	52,835	110,673
10	45-49	50,667	46,167	96,834
11	50-54	41,313	37,816	79,129
12	55-59	33,182	30,687	63,869
13	60-64	25,094	23,807	48,901
14	65-69	17,629	17,178	34,807
15	70-74	10,106	10,437	20,543
16	75+	7,456	9,837	17,293
JUMLAH		749,548	706,130	1,455,678

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021

Di samping jumlah penduduk, juga diperlukan untuk mengetahui proyeksi parameter kependudukan, seperti struktur umur, angka kelahiran total, serta angka harapan hidup. Berdasarkan proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, yang disusun oleh Bappenas bekerja sama dengan BPS dan UNFPA (*United Nations Population Fund*), proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 menggambarkan Piramida Penduduk Muda (*Expansive*) sebagaimana grafik dibawah ini:

Grafik II.2
 Piramida Penduduk Provinsi Kep. Bangka Belitung
 Tahun 2015 dan Proyeksi pada Tahun 2020



Sumber: Bappenas, BPS & UNFPO, 2020

Berdasarkan grafik di atas bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Tipe ini memiliki kebiasaan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dan terdapat pada daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk cukup tinggi pula. Pertumbuhan ini disebabkan selisih antara tingkat kematian dan kelahiran yang cukup tinggi di mana penurunan tingkat kematian lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Penduduk usia lanjut dan usia produktif termasuk usia angkatan kerja akan bertambah besar proporsinya. Sementara itu penduduk usia muda (bayi dan anak) jumlahnya meningkat.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan *Williamson* (indeks ketimpangan regional), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Gambaran perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu Tahun 2017-2021 dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010. Sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat. Namun pada tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak besar bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyebabkan penurunan nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Tabel II.17

PDRB Tahun 2017 –2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Milyar Rupiah)

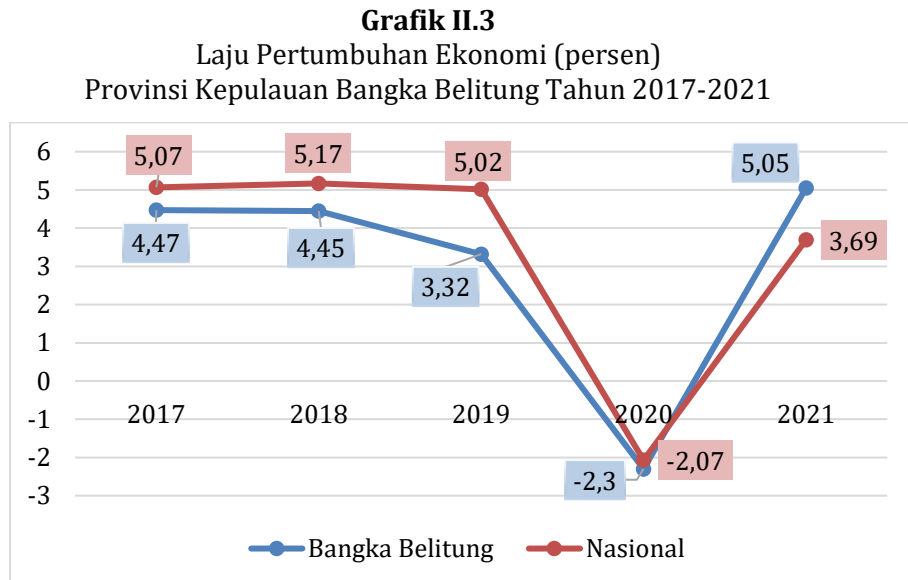
No.	PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	69.865,2	73.113,3	75.794,9	75.495,3	85.942,7
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	49.985,2	52.208	53.941,9	52.699,2	55.360,7

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp85,94 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp55,36 triliun. Capaian ini meningkat dari tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen setelah sempat berkontraksi pada tahun sebelumnya sebesar 2,30 persen

sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menurun, bahkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda, menyebabkan kontraksi sebesar 2,3 pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagaimana diperlihatkan pada Grafik II.3



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Pada tahun 2021, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah kembali bangkit yang terlihat dari pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 14,16 persen, diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 10,62 persen serta lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 10,42 persen.

Struktur PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni: Industri Pengolahan sebesar 20,86 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 19,66 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,74 persen; Konstruksi sebesar 9,67 persen serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,54 persen. Dari Gambar 1 terlihat bahwa penyumbang terbesar bagi penciptaan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni lapangan usaha Industri Pengolahan mampu tumbuh di tengah pandemi Covid-19. Hal ini didorong oleh kinerja subkategori Industri Logam Dasar serta subkategori Industri Makanan dan Minuman sebagai penyumbang terbesar kategori ini. Masih tingginya harga timah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai peluang besar untuk melakukan penambangan timah. Hal ini mendorong peningkatan produksi baik bijih maupun logam timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian juga yang terjadi pada industri makanan dan minuman yang ditopang oleh industri minyak kelapa sawit (CPO) mengalami kenaikan kapasitas produksi akibat dibukanya beberapa pabrik baru.

Tabel II.18
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017 – 2021

	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,30	5,43	2,85	8,24	1,02
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,22	-0,95	0,93	-9,02	6,78
C.	Industri Pengolahan	6,15	3,97	1,20	-5,63	5,44
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,85	7,43	6,57	5,26	10,42
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,79	-5,39	3,40	5,59	4,93
F.	Konstruksi	5,64	5,74	7,07	-2,38	4,31
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,81	2,64	1,81	-4,54	5,78
H.	Transportasi dan Pergudangan	7,99	6,79	2,23	-16,70	8,76
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,61	6,20	9,25	-2,95	10,62
J.	Informasi dan Komunikasi	8,19	10,68	13,33	14,89	8,79
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,48	6,78	4,97	-6,72	5,57
L.	Real Estat	5,19	8,29	1,44	4,64	6,73
M,N.	Jasa Perusahaan	5,89	6,66	1,23	-13,76	5,75
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,06	9,20	8,05	-3,11	5,48
P.	Jasa Pendidikan	3,86	8,95	7,08	-0,81	2,42
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,18	4,55	10,18	1,09	14,16
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	6,14	7,37	10,55	-6,94	3,73
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,47	4,45	3,32	-2,30	5,05

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Semakin maraknya rapid tes/PCR yang dilakukan oleh klinik maupun rumah sakit dalam masa pandemi Covid-19 mendorong pertumbuhan positif pada lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Selain itu jumlah pasien yang memerlukan perawatan kesehatan juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 lalu. Peningkatan kinerja yang terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha pada akhirnya juga ikut berdampak pada peningkatan kinerja lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebagai lapangan usaha pendukungnya. Sementara itu pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mengalami pertumbuhan yang tinggi karena peningkatan jumlah konsumen. Dibandingkan tahun 2020 saat awal pandemi, pada tahun 2021 masyarakat sudah lebih berani untuk menginap di hotel maupun melakukan pembelian makan minum di restoran atau rumah makan.

Struktur PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni: Industri Pengolahan sebesar Rp17.924,8 milyar (20,86%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp16.896,1 milyar (19,66%); Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor sebesar Rp12.666,2 milyar (14,74%); Konstruksi sebesar Rp8.313,9 milya (9,67%) serta Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp8.201,9milyar (9,54%). Dari kelima sektor tersebut, nilai tambah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terus meningkat selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021. Sedangkan sektor lainnya mengalami penurunan pada tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19 melanda.

Tabel II.19
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017–2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.143,2	13.143,2	13.589,9	15.444,1	16.896,1
B	Pertambangan dan Penggalian	8.182,1	7.757,1	7.208,7	6.465,9	8.201,9
C	Industri Pengolahan	14.229,6	15.062,5	14.847,5	14.153,9	17.924,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	79,4	86,8	94,7	101,1	111,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,0	14,9	15,4	16,6	17,7
F	Konstruksi	6.371,9	7.104,9	7.860,8	7.709,6	8.313,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.840,5	11.470,8	11.972,4	11.594,7	12.666,2
H	Transportasi dan Pergudangan	2.900,1	3.103,8	3.376,5	2.723,6	3.081,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.734,1	1.896,6	2.203,6	2.296,3	2.582,2
J	Informasi dan Komunikasi	1.135,4	1.254,4	1.426,2	1.630,6	1.788,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.280,6	1.415,1	1.509,6	1.407,8	1.560,2
L	Real Estate	2.281,2	2.517,4	2.627,4	2.792,9	3.011,6
M,N	Jasa Perusahaan	196,8	217,2	232,2	212,4	230,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.121,1	4.418,8	4.797,2	4.847,6	5.117,1
P	Jasa Pendidikan	1.960,4	2.127,7	2.320,6	2.386,1	2.520,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	845,3	905,7	1.022,9	1.049,1	1.222,1
R,S,T,U	Jasa lainnya	548,5	600,3	689,3	662,8	607,2
PDRB		69.865,2	73.113,3	75.794,9	75.495,3	85.942,7

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Selanjutnya, dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 nilai PDRB lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2017 sebesar Rp11.337,7 milyar dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp11.870,1 miliar. Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada periode yang sama sebesar Rp9.095,7 miliar dan meningkat menjadi Rp10.783,8 miliar. Nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp7.253,3 miliar dan meningkat menjadi sebesar Rp7.654,1 miliar.

Tabel II.20
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017 – 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.095,7	9.589,7	9.862,8	10.675,2	10.783,8
B	Pertambangan dan Penggalan	6.634,7	6.571,5	6.632,7	6.034,6	6.443,6
C	Industri Pengolahan	11.337,7	11.787,7	11.929,0	11.257,4	11.870,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	45,9	49,3	52,5	55,3	61,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,4	8,9	9,2	9,7	10,2
F	Konstruksi	4.248,5	4.492,4	4.809,8	4.695,3	4.897,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.253,3	7.444,9	7.579,7	7.235,5	7.654,1
H	Transportasi dan Pergudangan	1.892,2	2.020,7	2.065,7	1.720,8	1.871,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.136,5	1.207,0	1.318,7	1.279,8	1.415,8
J	Informasi dan Komunikasi	1.002,8	1.109,9	1.257,8	1.445,2	1.572,3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	881,3	941,0	987,8	921,4	972,8
L	Real Estate	1.572,2	1.702,4	1.726,9	1.807,0	1.928,7
M,N	Jasa Perusahaan	127,5	135,9	137,7	118,7	125,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.604,2	2.843,6	3.072,7	2.977,1	3.140,1
P	Jasa Pendidikan	1.183,2	1.289,2	1.380,5	1.369,4	1.402,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	605,2	632,8	697,1	704,8	804,5
R,S,T,U	Jasa lainnya	354,9	381,1	421,3	392,0	406,6
	PDRB	49.985,2	52.208,0	53.941,9	52.699,3	55.360,7

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Secara teoritis nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan akumulasi dari nilai PDRB Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan PDRB ADHB sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.21, sepanjang periode tahun 2016–2020 nilai PDRB Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah capaian nasional. Dari besaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, selama kurun waktu lima tahun terakhir, daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, dan Kota Pangkalpinang.

Tabel II.21

Perkembangan PDRB/PDB Atas Dasar Harga Berlaku
 menurut Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah)
 Tahun 2016 – 2020

Kab/Kota/ Prov/Nasional	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	11.771,7	12.807,9	13.310,6	13.770,5	13.944,3
Belitung	8.001,0	8.739,9	9.314,6	9.856,8	9.838,6
Bangka Barat	12.249,4	13.221,4	13.817,3	14.149,5	13.391,4
Bangka Tengah	7.469,0	7.972,2	8.213,3	8.567,6	8.448,9
Bangka Selatan	7.541,5	8.165,2	8.457,2	8.665,0	8.694,8
Belitung Timur	6.604,2	7.151,8	7.405,9	7.718,1	7.856,5
Pangkalpinang	11.116,5	12.108,6	12.955,3	13.653,8	13.463,8
Bangka Belitung	64.753,3	70.167,0	73.474,2	76.381,3	75.638,3
Nasional (Triliun)	12.401,7	13.587,2	14.837,4	15.832,7	15.438,0

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2021

Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada Tabel II.22, juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016–2020 besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih kecil dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional. Dari besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, selama kurun waktu lima tahun terakhir, daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, dan Kota Pangkalpinang.

Tabel II.22

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut
 Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional (miliar/triliun rupiah) Tahun 2016–2020

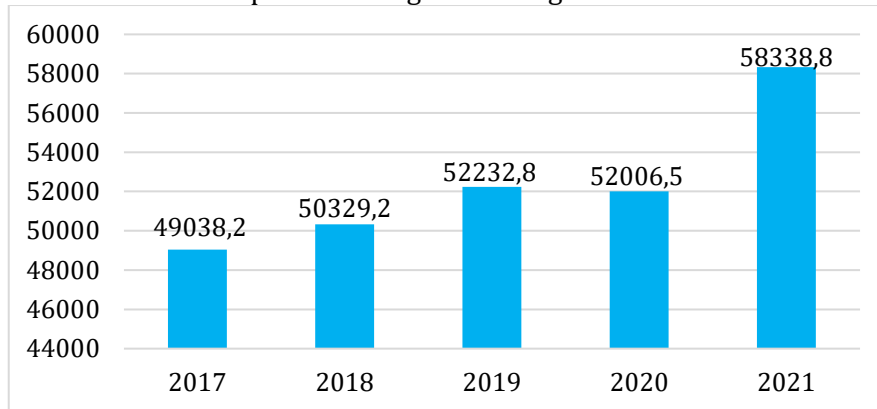
Kab/Kota/ Prov/Nasional	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	8.906,2	9.355,3	9.778,0	10.060,5	9.987,0
Belitung	5.669,1	5.969,7	6.290,9	6.502,0	6.352,0
Bangka Barat	9.190,2	9.673,7	10.117,2	10.897,4	10.306,0
Bangka Tengah	5.432,8	5.620,6	5.812,7	5.884,1	5.715,0
Bangka Selatan	5.511,8	5.763,9	6.024,2	6.177,5	6.054,3
Belitung Timur	4.873,9	5.110,3	5.326,1	5.501,5	5.465,2
Pangkalpinang	7.946,0	8.358,5	8.782,8	9.017,5	8.797,8
Bangka Belitung	47.530,0	49.852,0	52.191,9	54.094,5	52.677,3
Nasional (triliun)	9.434,6	9.912,7	10.425,3	10.949,2	10.723,1

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2021

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2017– 2021 terus mengalami peningkatan, walaupun tahun 2020 menurun yang disebabkan adanya pandemi Covid-19, namun meningkat signifikan pada tahun 2021. Pada tahun 2017, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp49.038,2 ribu, hingga tahun 2019 terus meningkat menjadi Rp52.232,8 ribu. Walaupun sempat meurun menjadi Rp52.006,5 pada tahun 2020 namun pada tahun 2021 meningkat signifikan menjadi Rp58.338,8. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju

pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut. Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017–2021, sebagaimana disajikan pada Grafik II.4.

Grafik II.4
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021

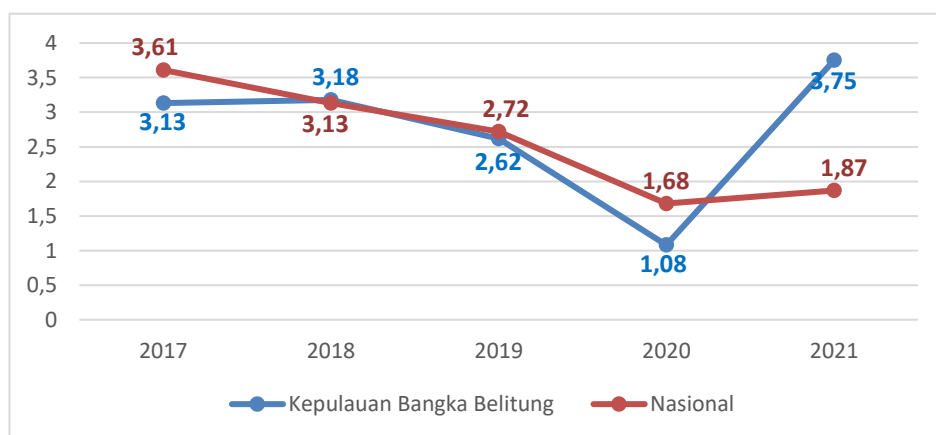


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2022

2. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Sepanjang tahun 2017–2021 secara keseluruhan tingkat Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuasi. Walaupun sempat naik dari 3,13 pada tahun 2017 menjadi 3,18 pada tahun 2018, hingga tahun 2020 menurun menjadi 1,08, walaupun selanjutnya pada tahun 2021 kembali meningkat cukup tinggi menjadi 3,75. Sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2021, nilai inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2021.

Grafik II.5
Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Selama tahun 2017, beberapa komoditas yang memberikan sumbangan/andil inflasi dominan diantaranya adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; Kesehatan; Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga; dan Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau.

Tabel II.23
Andil/Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019

Kelompok Pengeluaran	2017	2018	2019
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Umum	3,13	3,18	2,62
1. Bahan Makanan	1,66	0,87	1,12
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	2,90	0,67	0,59
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	5,63	0,62	0,19
4. Sandang	2,06	0,13	0,16
5. Kesehatan	3,61	0,11	0,07
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	3,36	0,25	0,25
7. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	2,09	0,53	0,24

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

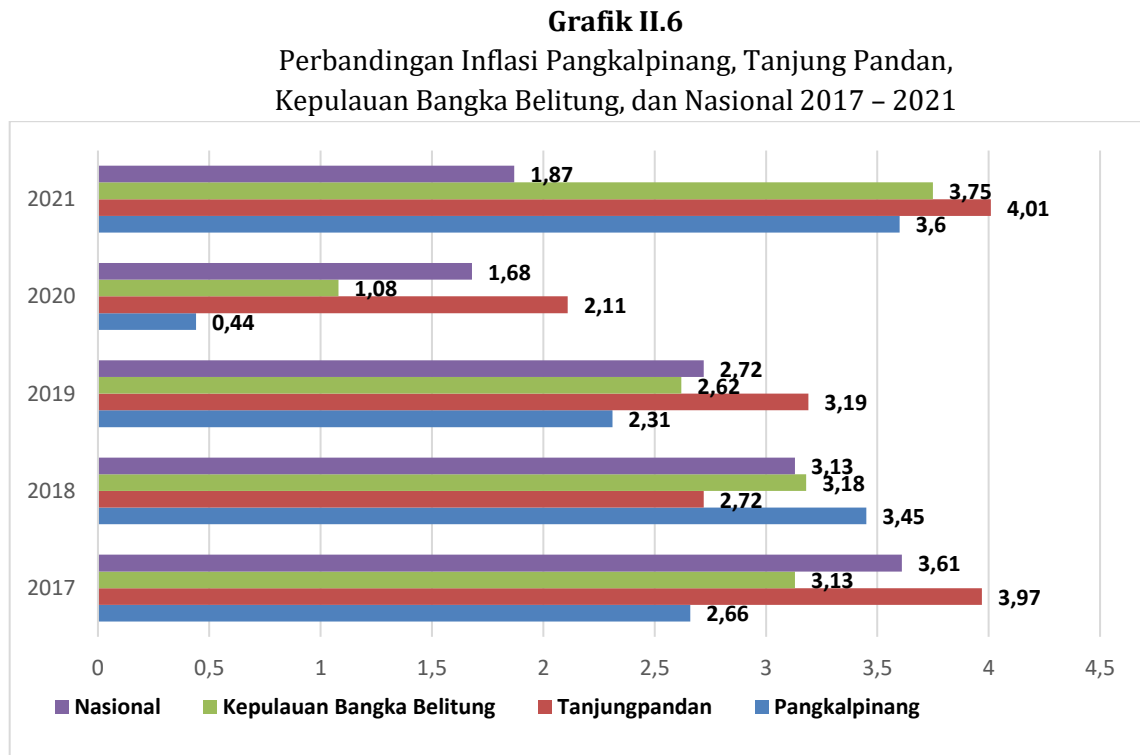
Pada tahun 2021 (Januari - Desember) telah terjadi inflasi sebesar 3,75 persen setelah tahun sebelumnya (Januari - Desember 2020) mengalami inflasi yang lebih rendah sebesar 1,08 persen. Dilihat dari besarnya andil/sumbangan inflasi selama tahun 2021, dari 11 kelompok komoditas, 9 kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi dan 2 kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi. Kelompok yang memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,5593 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,0419 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,2863 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,0926 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,0407 persen; kelompok transportasi sebesar 0,2983 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,0629 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,2501 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,1524 persen. Sementara itu, kelompok yang memberikan andil/sumbangan terhadap deflasi yaitu: kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,0182 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,0182 persen.

Tabel II.24
Andil/Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2021

Kelompok Pengeluaran	2020	2021
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Umum	1,08	3,75
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,4092	2,5593
2. Pakaian dan Alas Kaki	0,0274	0,0419
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,0169	0,2863
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,1269	0,0926
5. Kesehatan	0,0093	0,0407
6. Transportasi	-0,9390	0,2983
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,1079	- 0,0182
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,0072	- 0,0182
9. Pendidikan	0,1270	0,0629
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,1739	0,2501
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,2334	0,1524

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kondisi inflasi Pangkalpinang dan Tanjungpandan selama kurun waktu 2017-2021 juga mengalami fluktuasi. Inflasi di Tanjungpandan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan namun tahun 2021 kembali meningkat. Sedangkan Pangkalpinang mengalami fluktuasi namun kondisi inflasi tertinggi juga terjadi pada tahun 2021. Pada tahun 2021, inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas nilai inflasi nasional. Angka inflasi sebagaimana dimaksud dapat diamati pada Grafik II.6.



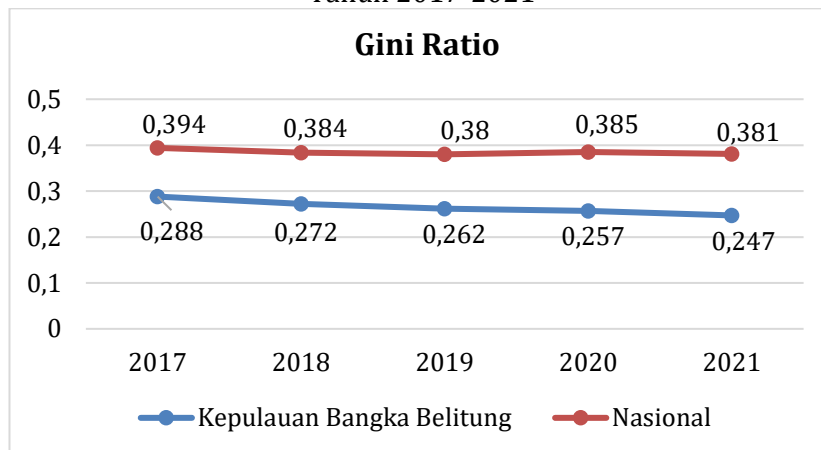
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

3. Indeks Gini dan Indeks Ketimpangan Williamson

a) Indeks Gini

Selama periode tahun 2017-2021 nilai indeks gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menurun, dari 0,288 pada tahun 2017 menjadi 0,247 pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Bangka Belitung. Adanya pandemi Covid-19, tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pengeluaran. Secara nasional, selama tiga tahun yaitu tahun 2019 hingga tahun 2021, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai Indeks Gini terendah di Indonesia.

Grafik II.7
Indeks Gini Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017-2021

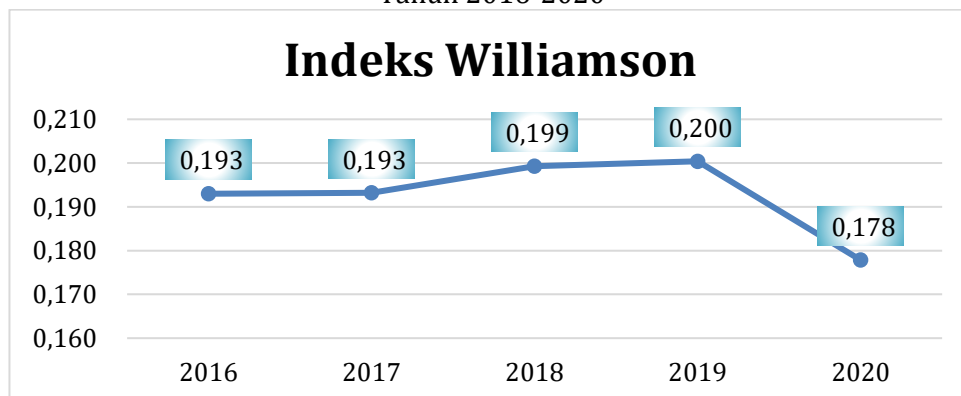


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

b) Indeks Ketimpangan Williamson

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 nilai indeks sebesar 0,193, tahun 2017 tetap namun meningkat menjadi 0,200 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai Indeks Williamson menurun menjadi 0,178, nilai ini berada dibawah nilai indeks pada tahun 2016. Hal ini sebagaimana yang ditampilkan pada Grafik II.8 berikut:

Grafik II.8
Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Berdasarkan nilai indeks ini, maka ketimpangan pembangunan wilayah antar kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin rendah yang menggambarkan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif baik, atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mendekati merata.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator rata-rata besarnya pengeluaran per kapita atau PNB per kapita.

Pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Di tahun 2017 pembangunan manusia Bangka Belitung menempati kriteria sedang, sedangkan pada 2018 sampai dengan 2021 mengalami kemajuan dan perubahan status yaitu dengan kriteria tinggi. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel II.25
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung dan Nasional

Indeks Pembangunan Manusia	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka Belitung	69,99	70,67	71,30	71,47	71,69
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan tabel diatas, peningkatan IPM Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir tergambar sebagai berikut. Pada tahun 2017 capaian 69,99 dengan kriteria sedang. Di tahun 2018 IPM Kepulauan Bangka Belitung mencapai 70,67 dimana angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,68 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada 2019 IPM Kepulauan Bangka Belitung mencapai 71,30, angka ini meningkat sebesar 0,63 poin atau tumbuh 0,89 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Peningkatan IPM pada tahun 2020 sebesar 0,17 poin atau tumbuh 0,24 persen dengan angka 71,47. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 mencapai 71,69, meningkat 0,22 poin atau 0,31 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Peningkatan ini menunjukkan upaya serius pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan pembangunan manusia, meskipun pada tingkat nasional pembangunan manusia Bangka Belitung masih berada dibawah rata-rata.

Tabel II.26
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Bangka Belitung

Indeks Pembangunan Manusia	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	71,09	71,80	72,39	72,40	72,46
Belitung	70,93	71,70	72,46	72,51	72,57
Bangka Barat	67,94	68,68	69,05	69,08	69,60

Indeks Pembangunan Manusia	2017	2018	2019	2020	2021
Bangka Tengah	68,99	69,52	70,33	70,45	70,89
Bangka Selatan	65,02	65,98	66,54	66,90	67,06
Belitung Timur	69,57	70,22	70,84	70,92	71,42
Pangkalpinang	76,86	77,43	77,97	78,22	78,57

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Berdasarkan tabel di atas, IPM tertinggi tercatat di Kota Pangkalpinang dengan capaian tahun 2021 sebesar 78,57. Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur merupakan daerah dengan IPM berkategori “tinggi”. Kabupaten Bangka Tengah yang semula mempunyai IPM berkategori sedang mulai tahun 2019 berpindah status ke kategori “tinggi”. Masih terdapat dua kabupaten dengan kategori IPM “sedang” yaitu Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat.

2. Kemiskinan

a. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin sebesar 5,22 persen, kemudian mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 menjadi sebesar 5,20 persen. Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 5,25 persen dan pada 2020 menurun kembali menjadi 4,53 persen. Penurunan ini menunjukkan tingkat ketahanan ekonomi masyarakat di Bangka Belitung cukup baik.

Tabel II.27
Perkembangan Kemiskinan Tahun 2016-2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,22	5,20	5,25	4,62	4,53
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	72,8	74,09	76,26	68,38	-
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	534.229	587.530	631.467	677.716	721.455
4.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,67	0,49	0,69	0,51	0,60

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Memperhatikan tabel di bawah ini, sepanjang periode tahun 2015-2019 tingkat kemiskinan kota dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan kota sebesar 2,85 persen dan naik dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebesar 2,78 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan desa mengalami penurunan dari 7,16 persen (2018) menjadi 6,79 persen (2019). Menurunnya kemiskinan di perdesaan menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang cukup mempengaruhi menurunnya jumlah penduduk miskin hingga 0,26 persen.

Tabel II.28
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2015-2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	2,77	2,67	3,00	2,78	2,85
2.	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	6,83	7,57	7,92	7,16	6,79

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sementara itu, berdasarkan tabel di bawah ini, dapat diketahui pada tahun 2018 persentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung sebesar 7,56 persen atau sebanyak 14,00 ribu jiwa. Di Kabupaten Belitung garis kemiskinan tahun 2018 sebesar Rp704.855 per kapita per bulan dan merupakan yang tertinggi diseluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian persentase jumlah penduduk miskin cukup tinggi yaitu Kabupaten Belitung Timur sebesar 7,06 persen atau sebanyak 8,93 ribu jiwa. Sementara itu, angka kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat sebesar 3,05 persen atau sebanyak 6,35 ribu jiwa. Garis kemiskinan Kabupaten Bangka Barat kondisi tahun 2019 sebesar Rp520.462 per kapita perbulan, dimana indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,34. Angka ini menunjukkan rata-rata pengeluaran semakin baik di tahun 2018.

Tabel II.29
Data Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	5,52	5,10	5,47	4,92	4,51
Belitung	7,85	7,77	7,56	6,29	6,27
Bangka Barat	2,74	2,98	3,05	2,67	2,70
Bangka Tengah	5,64	6,07	5,81	5,02	4,85
Bangka Selatan	3,62	3,92	3,70	3,36	3,52
Belitung Timur	6,99	6,81	7,06	6,60	6,52
Kota Pangkalpinang	5,02	4,80	4,95	4,25	4,36
Provinsi Kep. Bangka Belitung	5,22	5,20	5,25	4,62	4,53

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

b. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran

Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan peningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan jumlah tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial dan pengembangan Jamsostek, meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Dalam menggambarkan seberapa Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sebagai ukuran persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.28, tren TPAK dari tahun 2017-2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya dimana tahun 2017 sebesar 70,35 dan tahun 2018 turun menjadi 67,26 sedangkan tahun 2021 naik menjadi 65,88.

Tabel II.30
 Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70.35	67.26	67.10	66.89	65.88
2.	Tingkat Pengangguran	4.46	3.61	3.35	5.25	5.03

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

c. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Selama tiga tahun terakhir (2017-2019) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rasio penduduk yang bekerja stagnan diangka 0,96 persen. Demikian jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif fluktuatif selama periode 4 (empat) tahun (2016-2019) diiringi dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Di tahun 2020 terjadi Penurunan yang secara dramatis baik jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang bekerja.

Berdasarkan Tabel di bawah ini dapat dilihat perkembangan penduduk yang bekerja, angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 4 (empat) tahun terakhir relatif meningkat. Namun mengalami penurunan dari angkatan kerja, serta penduduk yang bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan bertambahnya penduduk usia kerja tidak mempengaruhi bertambahnya angkatan kerja dan penduduk yang bekerja.

Tabel II.31
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2016 s.d. 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Penduduk Usia Kerja	1.022.955	1.047.683	1.073.861	1.097.261	1.121.080
2.	Angkatan Kerja	705.173	699.017	727.918	742.798	738.620
3.	Penduduk Yang Bekerja	686.830	672.618	701.366	715.927	701.440
4.	Rasio Penduduk Yang Bekerja	0,97	0,96	0,96	0,96	0,94

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan pola perubahan pada masing-masing sektornya. Di sektor primer terjadi pergeseran, di mana untuk lapangan pekerjaan di bidang pertanian tahun 2020 memberikan kontribusi terbesar penyerapan tenaga kerja sebesar 32,49%, mengalami peningkatan dari tahun 2019. Sedangkan untuk lapangan pekerjaan pertambangan dan penggalian memberikan mengalami penurunan terbesar pertama pada tahun 2020 sebesar 10,19% yang mana setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja untuk sektor pertanian meningkat dan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih cenderung untuk bertani ketimbang untuk bekerja di bidang pertambangan dikarenakan harga biji timah dipasaran menurun tajam. Di sektor tersier kontribusi penyerapan tenaga kerja terbesar ada pada lapangan pekerjaan perdagangan sebesar 18,60% merupakan penyerapan tenaga kerja kedua terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020. Sektor sekunder mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja dari tahun 2019, di mana kontribusi terbesar ada pada lapangan pekerjaan industri pengolahan sebesar 8,18%.

Tabel II.32
Data Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lapangan Pekerjaan Utama	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sektor Primer :					
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	32,13	32,56	30,99	29,09	32,49
2. Pertambangan dan Penggalian	10,81	13,59	13,65	14,14	10,19
Sektor Sekunder:					
3. Industri Pengolahan	8,17	6,56	7,05	7,6	8,18
4. Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,91	0,46	0,53	0,54	0,42
5. Bangunan	3,21	5,28	5,08	5,26	4,64
Sektor Tersier:					
6. Perdagangan	19,21	17,48	18,81	17,37	18,60
7. Transportasi dan Pergudangan	2,39	2,04	1,74	2,24	2,72
8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,07	3,54	3,9	4,62	4,89

Lapangan Pekerjaan Utama	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate	1,32	1,7	1,65	1,61	0,32
10. Jasa Perusahaan	1,04	0,75	0,97	1,1	0,83
11. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,28	6,37	6,33	6,11	5,63
12. Jasa Pendidikan	5,01	3,75	3,96	4,48	4,25
13. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,18	1,91	1,54	1,89	1,70
14. Jasa Lainnya	4,6	4,01	3,82	3,95	4,02
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional -Sakernas, 2021

3. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

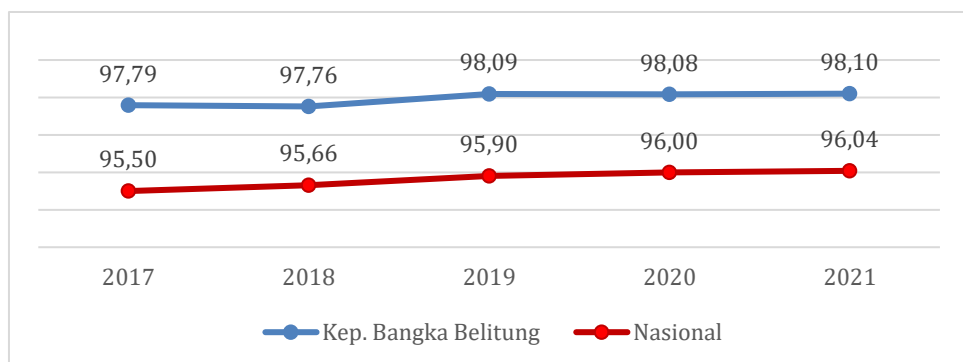
Melek huruf dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO) mendefinisikan melek aksara sebagai “kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi.

1) Angka Melek Huruf Penduduk Umur ≥ 15 tahun

Angka melek huruf (AMH) penduduk umur ≥ 15 tahun dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk berumur ≥ 15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun. AMH merefleksikan *outcome* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran keefektifan sistem pendidikan dasar. Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi.

Grafik II.9

Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional



Sumber: Biro Pusat Statistik, 2022 (Data diolah)

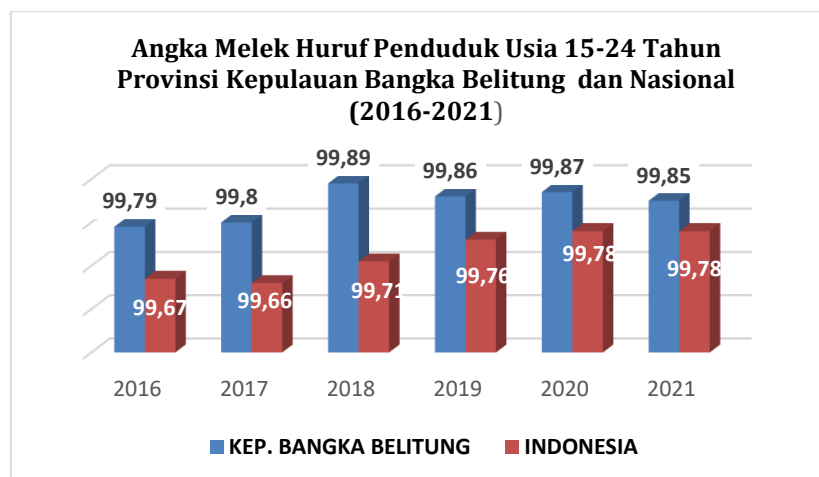
Dalam kurun waktu lima tahun, angka melek huruf penduduk umur ≥ 15 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat sebesar 0,31 poin, dimana pada tahun 2017 capaian angka ini sebesar 97,79 naik menjadi 98,10 pada tahun 2021. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi yang tidak terlalu signifikan sebesar 0,01 poin, namun pada tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 98,10 atau mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin dibanding dengan capaian tahun 2020 sebesar 98,08. Selamam lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 0,34 persen. Sementara itu, dalam skala nasional, selama periode 2017-2021, angka melek huruf penduduk ≥ 15 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menerus berada di atas rata-rata angka melek huruf di tingkat nasional. Peningkatan capaian selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pelayanan dan mutu/kualitas pendidikan yang diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin baik.

2) Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15-24 Tahun

Angka melek huruf penduduk umur 15-24 tahun menggambarkan proporsi penduduk kelompok umur 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama periode 2016-2021, angka melek huruf untuk penduduk usia 15-24 tahun bersifat fluktuatif, namun angka ini selalu berada di atas capaian nasional. Dalam periode waktu 6 (enam) tahun, capaian ini mencapai angka tertinggi pada tahun 2018, yaitu sebesar 99,89. Meskipun angka ini menurun pada tahun 2019 sebesar 0,03 poin, angka ini kembali meningkat sebesar 0,01 poin atau mencapai 99,87 pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, angka ini menurun sebesar 0,02 poin menjadi 99,85.

Grafik II.10

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional (2016-2021)



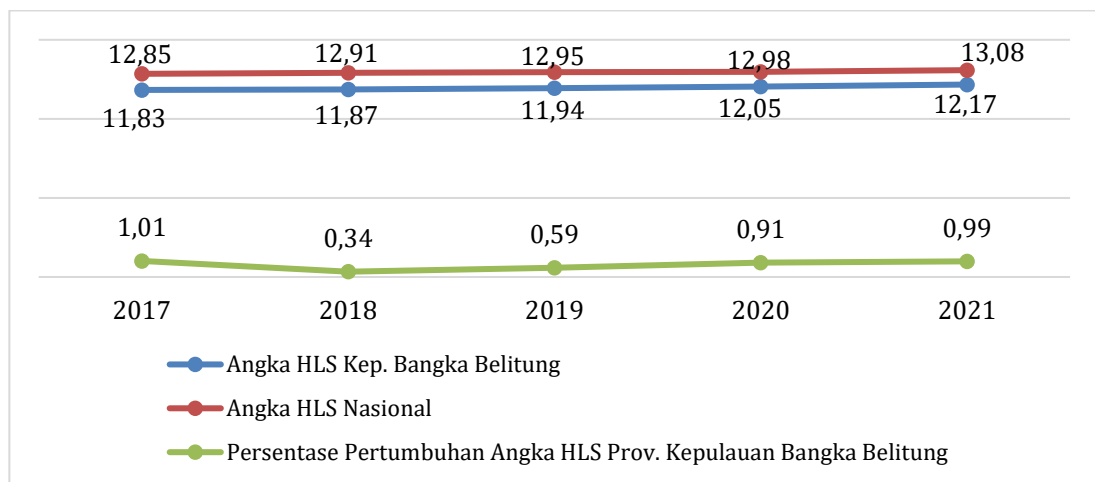
Sumber: Biro Pusat Statistik, 2022 (Data diolah)

b. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang digunakan untuk memotret pemerataan pendidikan dan mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dari usia tujuh tahun untuk dalam menyelesaikan di masa mendatang. Berdasarkan perhitungan terbaru yang dikeluarkan oleh The United Nations Development Programme (UNDP), jumlah tahun pendidikan yang diharapkan seorang siswa dapatkan adalah selama 18 tahun. Lamanya waktu 18 tahun ini mencerminkan bahwa seorang siswa diharapkan dapat mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat universitas dan mendapatkan gelar master. Dan jika setiap siswa di suatu negara mendaftar di gelar master, maka indeks (angka) harapan lama sekolah akan menjadi 1,0.

Grafik II.11

Pertumbuhan angka HLS 2017 s.d 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Biro Pusat Statistik, 2022 (Data diolah)

Selama dalam periode 2017-2021, meskipun berada di bawah capaian angka HLS nasional, angka HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat. Angka HLS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertinggi terjadi di tahun 2021, yaitu sebesar 12,17. Pada periode 2020-2021, pertumbuhan angka HLS mengalami peningkatan sebesar 0,99 persen, yakni 12,05 di tahun 2020 menjadi 12,17 di tahun 2021. Dalam kurun waktu lima tahun, pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2017, yakni sebesar 1,01 persen, kemudian laju pertumbuhan ini mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019, yaitu sebesar 0,34 dan 0,59 persen. Di tahun 2020 dan 2021, persentase pertumbuhan ini meningkat kembali, tumbuh sebesar 0,91 dan 0,99 persen.

Tabel II.33

Angka Harapan Sekolah Tahun 2017 s.d. 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)					Selisih 2020-2021	Pertumbuhan %
		2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	12,58	12,68	12,76	12,77	12,78	0,01	0,08
2	Belitung	11,51	11,83	11,84	11,85	11,86	0,01	0,08
3	Bangka Barat	11,50	11,51	11,52	11,53	11,70	0,17	1,45

No	Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)					Selisih 2020- 2021	Pertumbuhan %
		2017	2018	2019	2020	2021		
4.	Bangka Tengah	11,74	11,75	11,76	11,81	12,10	0,29	2,40
5.	Bangka Selatan	11,34	11,35	11,36	11,37	11,38	0,01	0,09
6.	Belitung Timur	11,48	11,49	11,51	11,52	11,63	0,11	0,95
7.	Pangkalpinang	12,78	12,83	12,99	13,15	13,16	0,01	0,08
	Bangka Belitung	11,83	11,87	11,94	12,05	12,17	0,12	0,99
	Nasional	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	0,10	0,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (Data diolah)

Di tahun 2021, dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang mencapai angka HLS tertinggi, yaitu sebesar 13,66. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2021, angka HLS di Kota Pangkalpinang tetap berada di atas angka HLS se-nasional, yaitu sebesar 13,08. Pada tahun 2020, angka HLS Kota Pangkalpinang, sebesar 13,15, juga berada di atas angka HLS tingkat nasional dengan capaian 12,98 tahun. Selanjutnya, angka HLS tertinggi kedua dan ketiga dicapai oleh Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah, yakni sebesar 12,78 dan 12,10.

Selanjutnya, laju pertumbuhan angka HLS tertinggi pertama dan kedua di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicapai oleh Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Barat, yaitu sebesar 2,40 dan 1,45 persen. Secara umum, dalam periode lima tahun terakhir (2017-2021), angka HLS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, yaitu 11,83 di tahun 2017 menjadi 12,17 di tahun 2021. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kesempatan untuk bersekolah selama 12,17 tahun atau memiliki harapan untuk lulus SMA/SMK/MA sederajat.

c. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

1) Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia ≥ 25 tahun

Angka rata-rata lama sekolah dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia di atas usia 25 tahun untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Durasi rata-rata waktu 15 tahun menjadi proyeksi maksimum indikator angka (indeks) rata-rata lama sekolah untuk tahun 2025. Dengan demikian, ketika sebuah negara yang memiliki warganya dengan capaian pendidikan 15 tahun pada usia 25 tahun, akan memiliki indeks rata-rata lama sekolah sebesar 1,0.

Tabel II.34
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017 s.d. 2021 Menurut Kabupaten/Kota,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional

No	Kabupaten/ kota	Rata - Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)						
		2017	2018	2019	2020	2021	Selisih	Pertumbuhan(%)
1	Bangka	8,19	8,20	8,23	8,24	8,25	0,01	0,12
2	Belitung	8,11	8,15	8,41	8,46	8,47	0,01	0,12
3	Bangka Barat	7,06	7,18	7,21	7,22	7,44	0,22	2,96
4	Bangka Tengah	6,79	6,80	7,13	7,19	7,20	0,01	0,14

No	Kabupaten/ kota	Rata - Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)						
		2017	2018	2019	2020	2021	Selisih	Pertumbuhan(%)
5	Bangka Selatan	6,12	6,36	6,42	6,67	6,71	0,04	0,60
6	Belitung Timur	8,00	8,14	8,15	8,22	8,47	0,25	2,95
7	Pangkalpinang	9,77	9,78	9,80	9,92	10,13	0,21	2,07
Bangka Belitung		7,78	7,84	7,98	8,06	8,08	0,02	0,25
Nasional		8,1	8,17	8,34	8,48	8,54	0,06	0,70

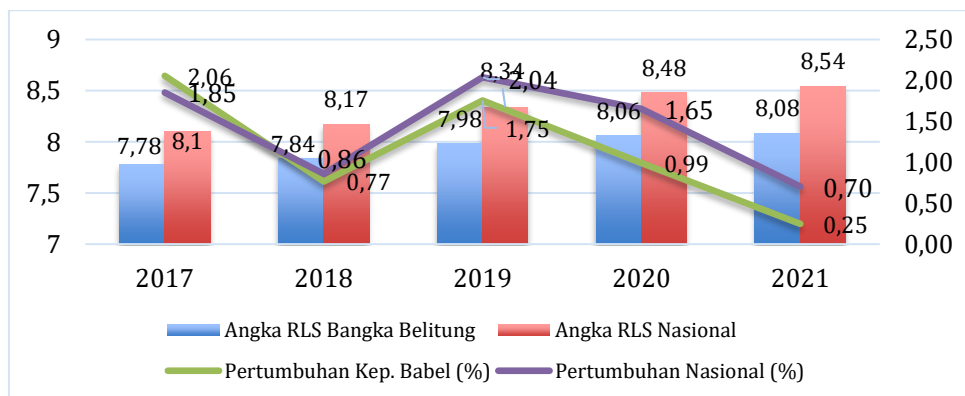
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022 (Data diolah)

Dari tujuh (7) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di tahun 2021, angka rata-rata lama sekolah tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang, yaitu sebesar 10,13. Angka ini menunjukkan Kota Pangkalpinang berada di atas angka rata-rata lama sekolah tingkat nasional, dimana capaian nasional sebesar 8,54. Capaian angka rata-rata lama sekolah Kota Pangkalpinang juga berada di atas capaian angka rata-rata lama sekolah di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 8,08. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi kedua dan ketiga berada di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur dengan capaian yang sama, yakni sebesar 8,47. Sementara itu, angka rata-rata lama sekolah terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 6,71. Namun, capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Selatan di tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah di tahun 2020, yakni sebesar 6,67.

Ditinjau dari laju pertumbuhan, laju pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun terakhir sebesar 3,71 persen. Di tahun 2021, Kabupaten Bangka Barat mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 2,96 persen. Sementara itu, Kabupaten Belitung Timur tumbuh sebesar 2,95 persen. Kota Pangkalpinang berada di urutan ketiga tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan terendah berada di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung dengan laju pertumbuhan yang sama, yakni sebesar 0,12 persen.

Grafik II.12

Pertumbuhan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional (2017-2021)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022 (Data diolah)

Pada periode 2017-2021, angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah tingkat nasional. Namun dalam waktu lima tahun terakhir, angka ini terus meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 3,71 persen, sementara itu laju pertumbuhan nasional sebesar 5,15 persen, Meskipun laju pertumbuhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di bawah pertumbuhan tingkat nasional, selama lima tahun terakhir angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2017 sebesar 2,06 persen. Di tahun 2021, angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,25 persen, yakni 8,06 pada tahun 2020 menjadi 8,08 di tahun 2021, dan merupakan laju pertumbuhan terendah selama kurun waktu lima tahun. Meskipun rata-rata lama sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di bawah rata-rata lama sekolah di tingkat nasional, dimana waktu lama belajar siswa usia 15 tahun ke atas pada tahun 2021 hanya mencapai kelas VIII, waktu lama belajar ini sudah meningkat dibandingkan dengan tahun 2017- 2019. Beberapa faktor pendukung peningkatan capaian ini adalah adanya peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta adanya program beasiswa bagi siswa dengan latar belakang keluarga yang kurang mampu.

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia ≥ 15 tahun

Selama periode 2017-2021, pertumbuhan RLS penduduk usia ≥ 15 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai angka 4,80 dan capaian ini masih berada di bawah capaian nasional dengan angka RLS sebesar 5,24 persen. Pertumbuhan RLS tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi pada tahun 2020, sebesar 1,65 persen dengan capaian angka 8,49. Namun, capaian angka RLS tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 8,54 meskipun pertumbuhannya hanya sebesar 0,59 persen, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2020.

Tabel II.35
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia ≥ 15 tahun Tahun 2017 s.d. 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Usia ≥ 15 Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	Selisih 2017-2021	Pertumbuhan 2017-2021 (%)
Kep. Bangka Belitung	8,13	8,24	8,35	8,49	8,54	0,41	4,80
Selisih	0,09	0,11	0,11	0,14	0,05		
Pertumbuhan (%)	1,11	1,33	1,32	1,65	0,59		
Nasional	8,5	8,58	8,75	8,9	8,97	0,47	5,24
Selisih	0,08	0,08	0,17	0,15	0,07		
Pertumbuhan (%)	0,94	0,93	1,94	1,69	0,78		

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022 (Data diolah)

Kenaikan angka RLS bagi penduduk usia ≥ 15 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, peningkatan dan perluasan akses dan mutu pendidikan menengah, serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan pengelolaan pendidikan. Hal ini juga selanjutnya didukung semakin besarnya perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Kesehatan

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 sebesar 70,73 tahun dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 70,64 tahun. Selama rentang waktu 2016-2021, UHH tertinggi berada di Kota Pangkalpinang yaitu 73,41 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 68,35 tahun. Dilihat dari perkembangannya, UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun peningkatan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menjadi prioritas karena angka tersebut masih dibawah target UHH nasional yaitu sebesar 71,57 tahun.

Tabel II.36

Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	70,52	70,58	70,73	70,99	71,06	71,14
Belitung	69,52	70,44	70,64	70,94	71,05	71,1
Bangka Barat	70,38	69,56	69,73	69,99	70,06	70,08
Bangka Tengah	66,99	70,49	70,78	71,16	71,36	71,52
Bangka Selatan	66,99	67,13	67,47	67,9	68,16	68,35
Belitung Timur	71,3	71,37	71,59	71,9	72,03	72,1
Pangkalpinang	72,57	72,64	72,86	73,17	73,3	73,41
Bangka Belitung	69,92	69,95	70,18	70,5	70,64	70,73

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

b. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu prioritas nasional dalam bidang kesehatan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan dihitung menggunakan rumusan jumlah kematian ibu selama 1 tahun dibagi dengan jumlah lahir hidup selama 1 tahun yang sama dikali dengan konstanta 100.000. Pada tahun 2021, AKI paling tinggi di Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah sebesar 504,88 orang/100000 kelahiran hidup dan jumlah kematian ibu sebesar 15 orang. Sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Belitung dengan AKI sebesar 128,78 orang/100.000 kelahiran hidup dan jumlah kematian ibu sebesar 4 orang. Secara keseluruhan AKI di tingkat provinsi tahun 2021 sebanyak 253,49 dengan jumlah kematian ibu sebesar 62 orang dan mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu 99,96 dengan jumlah kematian ibu sebesar 26 orang . Berikut perkembangan AKI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016-2021.

Tabel II.37

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016 s.d. 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Angka Kematian Ibu/100.000 kelahiran hidup					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	96,85	67,76	141,49	108,41	80,97	309,60
Belitung	147,55	207,76	196,85	136,71	93,84	128,78
Bangka Barat	127,52	104,33	185,23	136,91	56,71	208,71
Bangka Tengah	58,69	0,00	172,46	168,35	114,88	179,21
Bangka Selatan	0,00	60,31	216,65	122,55	61,09	504,88
Belitung Timur	95,83	49,70	189,75	452,03	189,84	197,34
Pangkalpinang	121,65	95,72	116,20	22,93	141,24	216,34
Bangka Belitung	92,23	82,49	167,24	137,33	99,96	253,49

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

c. Angka Kematian Bayi dan Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi dan Balita merupakan indikator yang termasuk dalam prioritas nasional dalam bidang kesehatan yang tercantum dalam dokumen RPJMN2020-2024. Perhitungan rumusan Angka Kematian Bayi dan Balita melalui pembagian antara jumlah kematian bayi dan balita selama satu tahun dan jumlah lahir hidup selama 1 tahun yang sama dikali dengan konstanta sebesar 1000 kelahiran penduduk. Berikut perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota.

Tabel II.38

Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2017-2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2017		2018		2019		2020		2021	
		Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	6,27	7,12	3,77	4,56	5,24	6,04	4,86	5,34	6,92	6,92
2	Belitung	10,04	12,12	12,14	13,45	17,77	20,85	14,39	15,95	14,17	15,78
3	Bangka Tengah	6,52	8,35	4,76	6,62	6,3	6,57	6,32	7,75	8,94	9,84
4	Bangka Barat	5,11	6,01	6,04	7,76	3,09	3,37	7,37	8,51	5,38	5,68
5	Bangka Selatan	6,03	6,63	7,43	7,74	9,19	9,8	8,86	9,47	5,05	6,06
6	Belitung Timur	8,95	10,44	13,28	14,71	11,55	13,56	11,39	14,24	12,33	13,32
7	Pangkalpinang	3,11	3,59	3,25	3,72	3,21	3,21	2,12	2,59	2,64	2,88
Bangka Belitung		6,25	7,35	6,31	7,37	7,17	7,97	7,15	8,19	7,40	8,01

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan tabel di atas, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2017–2021 di kabupaten/kota menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2017 angka kematian bayi dan balita mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan. Dari 5 (lima) tahun terakhir terlihat kematian bayi dan balita tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung dengan angka kematian bayi pada tahun

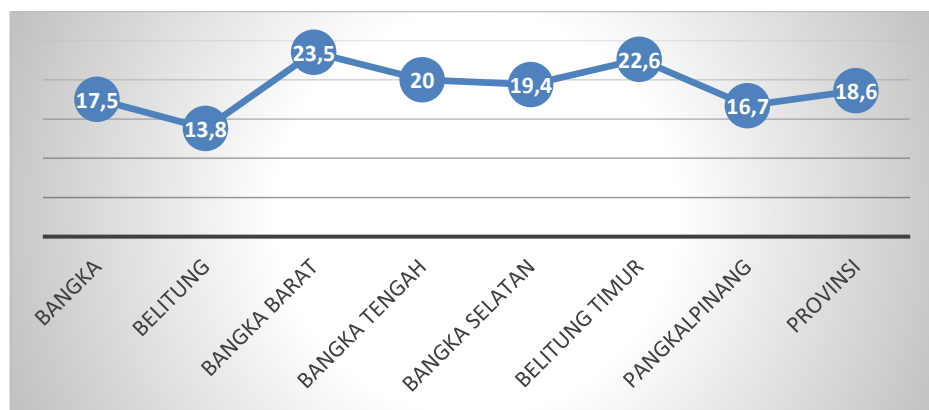
2021 sebesar 14,17 dan angka kematian balita 15,78. Pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka kematian bayi tahun 2021 sebesar 7,40 dan mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2020 dengan 7,15/1000 kelahiran hidup. Untuk angka kematian balita tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 8,01 dan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 dengan 8,19/1000 kelahiran hidup. Faktor terbesar penyebab kematian pada anak dan bayi ini adalah DBD, kelainan bawaan, jantung, *hidrocephalus*, dehidrasi berat, pneumonia dan sepsis.

d. Prevalensi *Stunting* dan *Wasting*

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih pendek (kerdil) dari standar usianya. Menurut hasil SSGI tahun 2021, prevalensi *stunting* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 18,6 dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 19,93. Berikut prevalensi *stunting* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pada hasil SSGI tahun 2021.

Grafik II.13

Persentase Bayi kurus dan *Stunting* Tahun 2021
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: SSGI, 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan prevalensi *stunting* tertinggi pada tahun 2021 terdapat di Kabupaten Bangka Barat dengan 23,5 persen dan yang terendah adalah Kota Pangkalpinang dengan prevalensi *stunting* sebesar 16,7. Kemudian, hasil prevalensi *stunting* secara Provinsi berada pada angka 18,6 dan hasil secara nasional dengan prevalensi *stunting* sebesar 24,4. Hasil pencapaian SSGI tahun 2021 ini senada dengan hasil e-PPBGM tahun 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil e-PPBGM tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Kabupaten Bangka Barat tertinggi dengan nilai sebesar 10,58 persen dan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 12,38 persen. Lalu, Kota Pangkalpinang mempunyai *prevalensi stunting* yang terendah dengan nilai sebesar 0,69 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 dengan nilai 0,92. Secara keseluruhan, tahun 2021 prevalensi *stunting* di Bangka Belitung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 4,6 menjadi 4,07. Berikut perkembangan prevalensi *stunting* 2016-2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.39

Perkembangan Persentase Balita *Stunting* Tahun 2016 s.d. 2021
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Persentase Stunting Menurut Kabupaten/Kota					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	27,52	27,66	12,21	4,61	1,96	1,68
Belitung	18,87	27,66	13,82	10,76	6,99	7,73
Bangka Barat	23,21	25	18,37	16,96	12,38	10,58
Bangka Tengah	21,96	25,64	6,91	5,85	5,11	3,61
Bangka Selatan	25,48	30,03	16,2	9,47	3,74	3,87
Belitung Timur	14,72	29,3	2,59	8,02	5,34	3,84
Pangkalpinang	21,71	26,69	7,99	1,29	0,92	0,69
Bangka Belitung	21,91	27,3	12,05	8,61	4,6	4,07

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan

a. Jumlah Grup Kesenian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dimiliki dan dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata.

Tabel II.40

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 s.d. 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	Selisih (poin)	Pertumbuhan (2016-2019) (%)	2020	Selisih (poin)	Pertumbuhan (2019-2020) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)		
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	12,47	12,74	12,89	13,17	0,7	5,6	10,79	-2,38	- 18,07
2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,0081	0,0081	0,0081	0,0081	0	0	0,0066	-0,0015	- 18,52

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021 (diolah)

Berdasarkan data perkembangan grup kesenian di atas, dalam kurun waktu 2016- 2019, terjadi pertumbuhan kenaikan kesenian adalah sebesar 5,6 persen, di mana pada tahun 2016 jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk adalah 12,47 meningkat menjadi 13,17 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, angka pertumbuhan ini menurun sebesar 18,07 persen, yakni dari 13,17 di tahun 2019 turun menjadi 10,79 di tahun 2020. Untuk jumlah gedung kesenian dari periode 2016-2019, jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk masih sama. Pada tahun 2020, jumlah gedung kesenian ini mengalami penurunan sebesar 18,52 persen, yaitu dari 0,0081 di tahun 2019 turun menjadi 0,0066 di tahun 2020.

Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah Perang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu Maras Taun, Beripat, dan sebagainya. Dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan budaya, peran sanggar-sanggar kesenian dan budaya yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, hal yang tergambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel II.41

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2017-2019
 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten Kota	Jumlah kesenian per 10.000 penduduk					Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk				
		2017	2018	2019	Selisih (Poin)	Pertumbuhan (%)	2017	2018	2019	Selisih (Poin)	Pertumbuhan (%)
1	Bangka	11,87	11,87	11,98	0,11	0,93	0	0	0	0	0
2	Belitung	13,85	13,85	13,98	0,13	0,94	0	0	0	0	0
3	Bangka Barat	16,21	16,33	16,96	0,75	4,63	0	0	0	0	0
4	Bangka Tengah	11,10	11,54	12,16	1,06	9,55	0	0	0	0	0
5	Bangka Selatan	10,49	10,72	10,84	0,35	3,34	0	0	0	0	0
6	Belitung Timur	18,32	18,50	18,60	0,28	1,53	0	0	0	0	0
7	Pangkalpinang	10,81	11,04	11,39	0,58	5,37	0	0	0	0	0
Jumlah		92,65	93,85	95,91	3,26	3,52	0	0	0	0	0

Sumber: Disparbudpora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Dalam kurun waktu tiga tahun (2017-2019), Kabupaten Bangka Tengah mengalami laju pertumbuhan jumlah grup kesenian tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yakni sebesar 9,55 persen, dimana di tahun 2017 sebesar 11,10 meningkat menjadi 12,16 di tahun 2019. Berada pada posisi kedua tertinggi kedua dan ketiga adalah Kota Pangkalpinang dengan pertumbuhan 5,37 persen dan Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,63 persen. Kabupaten dengan pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Bangka, yaitu sebesar 0,11 persen. Di tahun 2019, Kabupaten Belitung memiliki jumlah grup kesenian tertinggi, sebesar 18,60, kemudian diikuti Kabupaten Bangka Barat sebesar 16,96 dan Kabupaten Bangka Tengah sebesar 12,16 grup kesenian. Berkenaan dengan jumlah gedung kesenian di Kepulauan Bangka Belitung, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 masih sama, yaitu sebesar 0 persen.

Tabel II.42

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2020-2021
 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lanjutan)

Kab/Kota	Jumlah Grup Kesenian		Jumlah Gedung Kesenian		Jumlah Grup Kesenian		Jumlah Gedung Kesenian	
	Per 10.000 Penduduk				Per 10.000 Penduduk			
	2020	2021	2020	2021	Selisih	%	Selisih	%
Kab. Bangka	10,01	10,18	0	0	0,17	1,70	0	0
Kab. Belitung	11,42	11,52	0	0	0,10	0,88	0	0
Kab. Bangka Barat	13,16	13,21	0	0	0,05	0,38	0	0
Kab. Bangka Tengah	9,10	9,05	0	0	-0,05	-0,55	0	0
Kab. Bangka Selatan	8,55	8,93	0	0	0,38	4,44	0	0
Kab. Belitung Timur	15,52	15,30	0	0	-0,22	-1,42	0	0
Kota Pangkal Pinang	10,19	10,37	0	0	0,18	1,77	0	0
Jumlah	77,95	78,56	0	0	0,61	7,20	0	0

Sumber: SKPD yang menangani urusan, 2021(diolah).

Berdasarkan data perkembangan grup kesenian di atas, dalam kurun waktu 2020-2021, jumlah grup kesenian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari 77,95 pada tahun 2020 menjadi 78,56 per 10.000 penduduk pada tahun 2021. Dari tujuh (7) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur memiliki jumlah grup kesenian tertinggi, yaitu sebesar 15,52 pada tahun 2020 dan 15,30 pada tahun 2021 meskipun capaian pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Kabupaten dengan jumlah grup kesenian tertinggi kedua dicapai oleh Kabupaten Bangka Barat, yaitu sebesar 13,16 pada tahun 2020 dan 13,21 pada tahun 2021. Sementara itu, kabupaten dengan jumlah grup kesenian terendah berada di Bangka Selatan sebesar 8,55 pada tahun 2020 dan 8,93 pada tahun 2021.

2. Kepemudaan dan Olahraga

1) Jumlah Klub Olahraga

Data yang diperoleh dari Perangkat Daerah yang menangani pemuda dan olahraga, serta Organisasi Cabang Olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga, atletik, Sepak Bola, Bola Voli, Bola Basket, Bulu Tangkis, dan Pencak Silat, sebanyak 1.361 perkumpulan, terdapat 183 perkumpulan di Kabupaten Bangka, 246 perkumpulan di Kabupaten Belitung, 256 perkumpulan Kabupaten Bangka Barat, 137 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah, 255 perkumpulan di Kabupaten Bangka Selatan, 194 perkumpulan di Kabupaten Belitung Timur, dan 132 perkumpulan di Kota Pangkalpinang. Perkumpulan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak terdapat pada cabang Sepak Bola (654 perkumpulan), kemudian Bola Voli (452 perkumpulan), Bulu tangkis (118 perkumpulan), Pencak Silat (95 perkumpulan), Bola Basket (63 perkumpulan), dan Atletik (21 perkumpulan).

Tabel di dibawah ini menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, Kota Pangkalpinang memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5 jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 21 jumlah perkumpulan cabang olahraga Atletik.

Tabel II.43
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik dan Sepak Bola
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
		Atl	Spb	Atl	Spb	Atl	Spb	Atl	Spb	Atl	Spb
1.	Bangka	2	40	2	64	3	64	3	64	3	64
2.	Belitung	2	110	2	120	3	123	3	123	3	123
3.	Bangka Barat	2	120	2	120	3	120	3	125	3	130
4.	Bangka Tengah	2	56	2	56	2	56	2	56	2	58
5.	Bangka Selatan	2	135	2	135	3	135	3	139	3	142
6.	Belitung Timur	2	75	2	75	2	75	2	80	2	90
7.	Pangkal Pinang	3	32	3	40	5	40	5	45	5	47
Bangka Belitung		15	568	15	610	21	613	21	632	21	654

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sedangkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bolaterbanyak se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 142 jumlah perkumpulancabang olahraga Sepak Bola mengalami kenaikan. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 654 jumlah perkumpulan cabang olahraga Sepak Bola dan mengalami kenaikan.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Belitung memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli terbanyak se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 83 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli. Sedangkan Kota Pangkalpinang memiliki jumlah terkecil yaitu 36 perkumpulan cabang olahraga Bola Voli. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 sebanyak 451 perkumpulan dan tahun 2020 sebanyak 452 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Voli (bertambah 1 perkumpulan di Kota Pangkalpinang).

Tabel II.44

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli dan Bulu Tangkis
 Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
		Volly	BB	Volly	BB	Volly	BB	Volly	BB	Volly	BB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Bangka	25	27	38	28	47	30	47	30	47	30
2.	Belitung	70	4	76	7	83	7	83	7	83	7
3.	Bangka Barat	64	4	75	4	80	4	80	4	80	4
4.	Bangka Tengah	52	7	48	7	43	7	43	7	43	7
5.	Bangka Selatan	76	3	78	3	82	3	82	3	82	3
6.	Belitung Timur	65	5	78	5	81	5	81	5	81	5
7.	Pangkal Pinang	47	10	40	9	35	7	36	7	36	7
Bangka Belitung		399	60	433	63	451	63	452	63	452	63

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sedangkan menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basketterbanyak se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 30 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket. Jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 63 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bola Basket.

Tabel II.45

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket
 Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	13	16	16	16	16
2.	Kab. Belitung	14	18	20	20	20
3.	Kab. Bangka Barat	20	20	21	21	21
4.	Kab. Bangka Tengah	8	16	18	18	18
5.	Kab. Bangka Selatan	10	12	15	15	15
6.	Kab. Belitung Timur	5	9	10	10	10
7.	Kota Pangkal Pinang	15	17	18	18	18
	Bangka Belitung	85	108	118	118	118

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulutangkis pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 21 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulu Tangkis. Jumlah perkumpulan cabang olahraga BuluTangkis Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 118 jumlah perkumpulan cabang olahraga Bulutangkis.

Tabel II.46

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak Silat
 Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	19	23	23	23	23
2.	Kab. Belitung	10	10	10	10	10
3.	Kab. Bangka Barat	18	18	18	18	18
4.	Kab. Bangka Tengah	7	7	9	9	9
5.	Kab. Bangka Selatan	10	10	10	10	10
6.	Kab. Belitung Timur	6	6	6	6	6
7.	Kota Pangkal Pinang	19	19	19	19	19
	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	89	93	95	95	95

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel di atas menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, Kabupaten Bangka memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 23 jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat. Jumlah perkumpulan cabang olah raga Pencak Silat Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 95 jumlah perkumpulan cabang olahraga Pencak Silat.

2) Jumlah Gedung Olahraga

Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan sumber daya manusia sebagai bagian dari pelaku pembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2018 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah telah disediakannya lahan seluas ±50 ha untuk pembangunan *Sport Center*, saat ini di kawasan tersebut telah tersedia Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga seluruh *venue* cabang olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut.

Tabel II.47

Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
Tahun 2016 s.d. 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Gedung Olahraga	10	12	14	14	14
2.	Jumlah Lapangan Olahraga	1730	1731	1732	1733	1733

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dari data perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) **tahun** terakhir mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu banyak, dimana pada tahun 2020, jumlah gedung olahraga sebanyak 14 buah dan lapangan olahraga sebanyak 1.733 buah.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

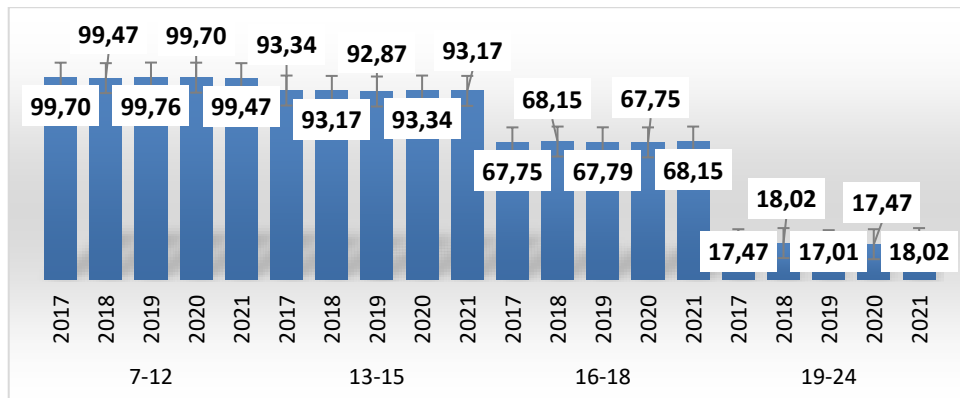
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021), Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021, APS penduduk usia 19-14 tahun mengalami pertumbuhan sebesar 3,05 persen, yakni pada angka 17,47 di tahun 2020 meningkat menjadi 18,02 pada tahun 2021. Selanjutnya, APS penduduk usia 16-18 tahun atau jenjang SMA/SLB/SMK dan Paket C mengalami pertumbuhan sebesar 1,70 persen, yakni pada angka 67,11 pada tahun 2020 meningkat menjadi 68,15 pada tahun 2021. Sementara itu APS penduduk usia 13-15 tahun atau pada jenjang SMP/MTS turun sebesar 0,18 persen, yakni dari angka 93,34 pada tahun 2020 turun menjadi 93,17. Dan APS penduduk usia 7-12 tahun atau jenjang SD, menurun sebesar 0,23 persen, yakni dari angka 99,70 pada tahun 2020 menjadi 99,47 pada tahun 2021.

Grafik II.14
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2017-2021

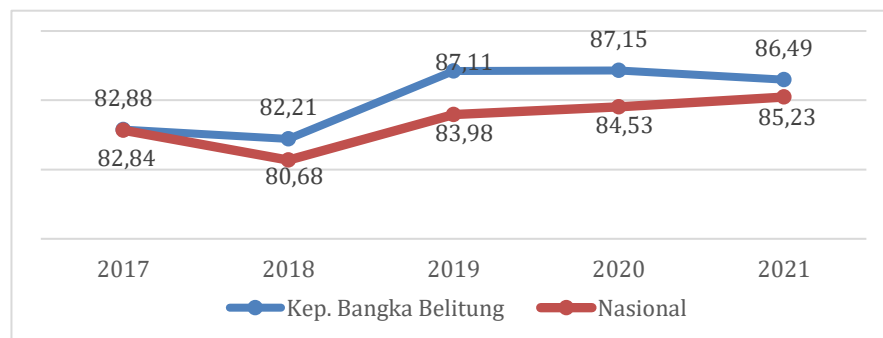


Sumber: Biro Pusat Statistik, 2022 (Data diolah)

b. Angka Partisipasi Kasar Jenjang SM/SMK/MA/Paket C

Angka Partisipasi Kasar merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu atau dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Sejak tahun 2007, APK jenjang SMA/SMK/MA juga mencakup APK pendidikan non formal, dalam hal ini adalah Paket C.

Grafik II.15
Angka Partisipasi Kasar Jenjang SM/SMK/MA/Paket C
Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017-2021



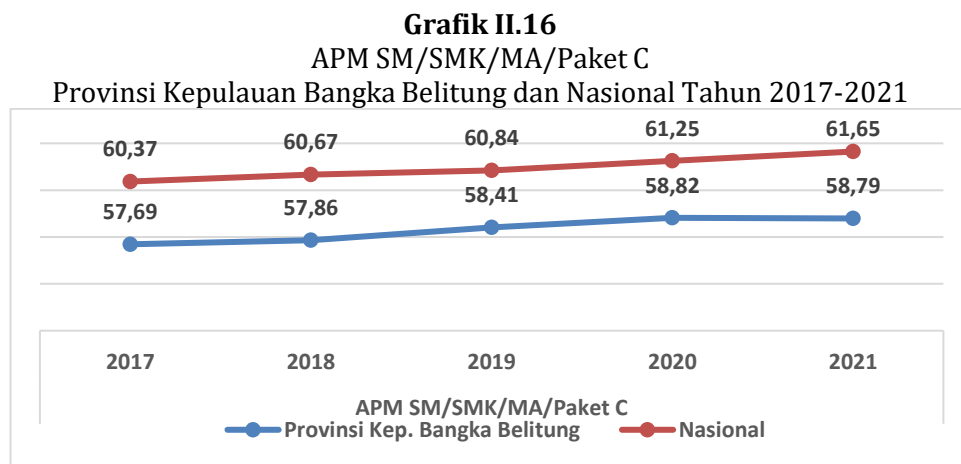
Sumber: BPS, 2022 (Data diolah).

Selama periode 2017-2021, APK SM/SMK/MA/Paket C bersifat fluktuatif, namun APK SM/SMK/MA/Paket C yang dicapai oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berada di atas APK SM/SMK/MA/Paket C tingkat nasional. Dalam periode 2017-2021, APK SM/SMK/MA/Paket C mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2020, yakni sebesar 87,15 atau tumbuh sebesar 5,63 persen dari tahun 2019. Di tahun 2021, APK SM/SMK/MA/Paket C mengalami penurunan, dari 87,15 di tahun 2020 menjadi 86,49. Penurunan pertumbuhan ini sebesar 0,76 persen dari capaian APK di jenjang yang sama di tahun 2021.

c. Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SM/SMA/SMK dan Paket C

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase. Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan.

Selama periode 2017-2021, APM SM/SMK/MA dan Paket C di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di bawah rata-rata nasional. Di tahun 2021, APM jenjang SM/SMK/MA dan Paket C menurun 0,03 poin dari 58,82 di 2020, menjadi 58,79 di tahun 2021. Namun secara umum selama periode 2017-2020, APM jenjang SM/SMK/MA dan Paket C di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat, meskipun peningkatan ini hanya sebesar 1,13 poin, yakni dari 57,69 di tahun 2017 menjadi 58,82 di tahun 2020 dan menjadi 58,79 di tahun 2021.



Sumber: BPS, 2022 (Data diolah).

Secara umum, kenaikan APM jenjang SM/SMK/MA dan Paket C di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi antara lain oleh perluasan akses layanan pendidikan yang semakin baik, seperti ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang semakin meningkat, ketersediaan tenaga guru dan tenaga kependidikan, informasi pendidikan yang mencukupi, pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta koordinasi antara lembaga pemerintahan yang semakin baik. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup, serta faktor kondisi ekonomi masyarakat yang semakin baik, turut menjadi pendorong kenaikan APM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

d. Jumlah Siswa Putus Sekolah

Tabel II.48
Jumlah Siswa Putus Sekolah
Jenjang SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah Siswa Putus Sekolah	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
SMK	392	685	104	20	370	1571
SMA	186	302	31	28	94	641
Jumlah	578	987	135	48	464	2212

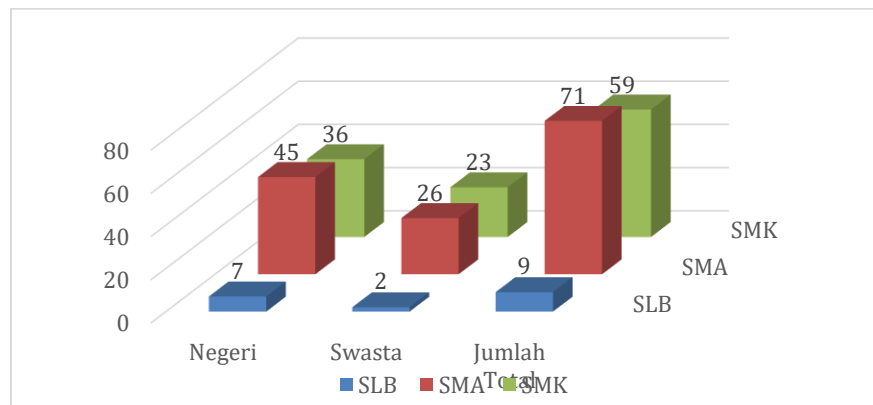
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Secara keseluruhan, jumlah siswa putus sekolah pada periode 2017-2021 adalah 2.212 orang. Tahun 2017 dan 2018 merupakan tahun-tahun dimana siswa yang putus sekolah mencapai jumlah tertinggi, yakni sebanyak 578 dan 987 orang. Berdasarkan jenis sekolah, selama lima tahun terakhir, jumlah siswa yang mengalami putus sekolah tertinggi berada di SMK mencapai 1.571 orang siswa SMK yang putus sekolah. Tahun 2018 dan 2020 merupakan tahun-tahun dengan jumlah siswa putus sekolah tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya dalam periode 2017-2021, dimana sebanyak 527 dan 632 orang siswa SMK putus sekolah. Sementara itu, pada sekolah menengah jenis SMA, jumlah siswa yang mengalami putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2017 dimana sebanyak 302 dan 186 orang siswa SMA putus sekolah pada masing-masing tahun tersebut.

e. Jumlah Sekolah

Pada tahun 2021, jumlah sekolah jenjang menengah atas dan pendidikan khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 139 sekolah. Jumlah keseluruhan SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 71 sekolah, terdiri dari 45 SMA negeri dan 26 SMA swasta. Selanjutnya, jumlah keseluruhan SMK adalah 59 sekolah, terdiri dari 36 SMK negeri dan 23 SMK swasta. Sementara itu, jumlah SLB sebanyak sembilan sekolah, terdiri dari tujuh (7) SLB Negeri yang tersebar di tujuh kabupaten/kota dan dua (2) SLB swasta yang berada di Kota Pangkalpinang dan Belinyu, Kabupaten Bangka.

Grafik II.17
Jumlah SMA/SMK/SLB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

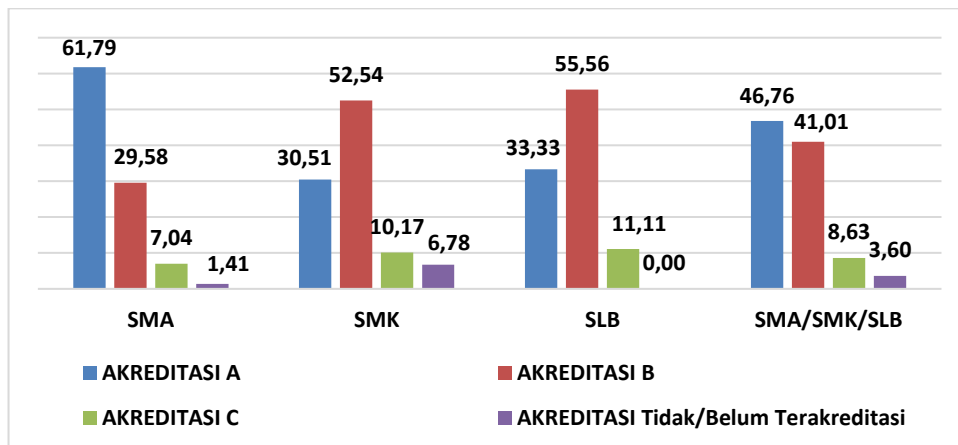


Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

f. Akreditasi Sekolah dan Mutu Pendidikan

Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat diukur melalui hasil akreditasi yang dinilai berdasarkan standar. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan menjadi sarana untuk melakukan upaya yang terus menerus dalam meningkatkan kekuatan yang dimiliki sekolah serta memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Pada tahun 2022, secara umum, dari 139 SMA/SMK dan SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekolah dengan akreditasi A berjumlah 65 sekolah (46,76 persen), akreditasi B sebanyak 57 sekolah (41,01 persen), akreditasi C sebanyak 12 sekolah (8,63 persen) dan sebanyak 5 sekolah (3,6 persen) yang belum terakreditasi.

Grafik II.18
SMA/SMK/SLB Terakreditasi Provisi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2022



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (Data diolah)

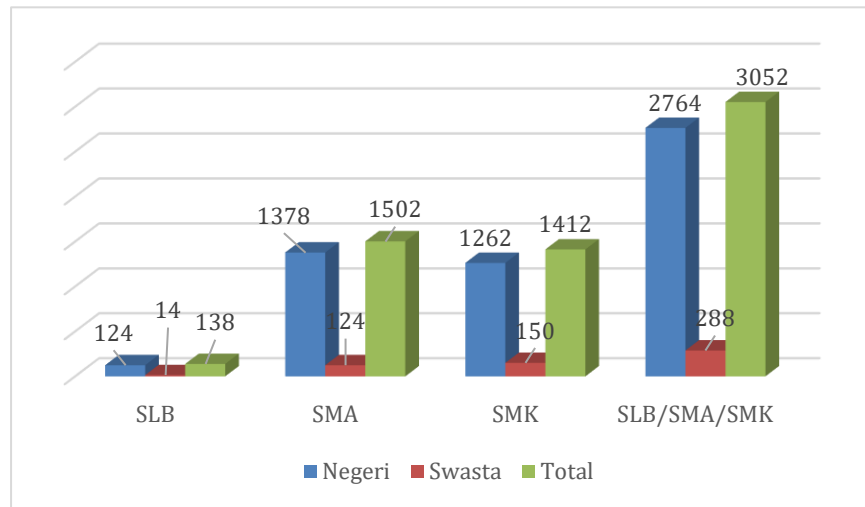
Pada jenjang SMA, dari 65 SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah SMA dengan akreditasi A sebanyak 44 SMA atau 61,79 persen, akreditasi B sebanyak 21 sekolah atau 29,58 persen, akreditasi C sebanyak 5 SMA atau sebesar 7,04 persen dan masih terdapat 1 SMA atau sebesar 1,41 persen yang belum terakreditasi. Untuk jenjang SMK, dari 59 SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah SMK dengan akreditasi A adalah sebanyak 18 SMK atau 30,51 persen, akreditasi B sebanyak 31 SMK atau sebesar 52,54 persen, akreditasi C sebanyak 6 SMK atau 10,17 persen dan masih terdapat 4 SMK yang belum terakreditasi. Pada jenjang SLB, dari 9 (sembilan) SLB yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 3 (tiga) SLB atau 46,76 persen memiliki akreditasi A, 5 (lima) SLB atau 41,01 persen dengan akreditasi B, dan masih ada 1 (satu) SLB dengan akreditasi C. Ditinjau dari capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), beberapa faktor penunjang peningkatan persentase ini adalah dikarenakan adanya peningkatan sarana prasarana pendidikan, dan jumlah serta kualitas guru dan tenaga kependidikan.

g. Jumlah dan Kualifikasi Guru SMA/MA/SMK

Ketersediaan jumlah yang cukup dan kualifikasi pendidikan tenaga guru dan kependidikan sangat berperan di dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan permintaan pasaran (market demand) dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Ketersediaan tenaga guru dan kependidikan yang cukup dan mumpuni juga akan mempengaruhi dalam pembentukan Pelajar Pancasila yang berkarakter kuat dan berdaya saing tinggi sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, di dalam perencanaan pembangunan pendidikan yang berkualitas tinggi dan merata, ketersediaan tenaga guru dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan rasio siswa, serta tingkat pendidikan yang didapatkan oleh guru dan tenaga kependidikan minimal S1/D.4 sudah sepatutnya menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2022, jumlah ketersediaan guru yang tersedia di SMA/SMK dan SLB swasta dan negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 3.052 orang, dengan rincian 138 orang di SLB, 1.502 orang di SMA dan 1.412 orang di SMK, baik di sekolah negeri maupun swasta.

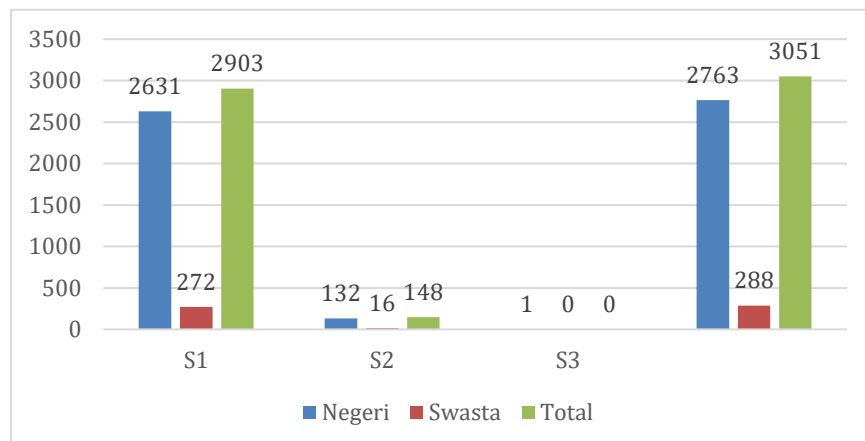
Grafik II.19
Jumlah Guru Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2022



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (Data diolah BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022).

Berdasarkan latar belakang pendidikan, terdapat 2.903 orang guru dengan pendidikan S1 dan 148 orang guru yang lulusan S2, dan satu (1) dengan pendidikan S3, baik yang tersebar di SLB, SMA dan SMK negeri dan swasta. Selanjutnya, berdasarkan status kepegawaian, terdapat 1.696 guru berstatus CPNS dan/atau PNS, dan 1.356 orang guru berstatus non-PNS.

Grafik II.20
Pendidikan Terakhir dan Status Kepegawaian Guru

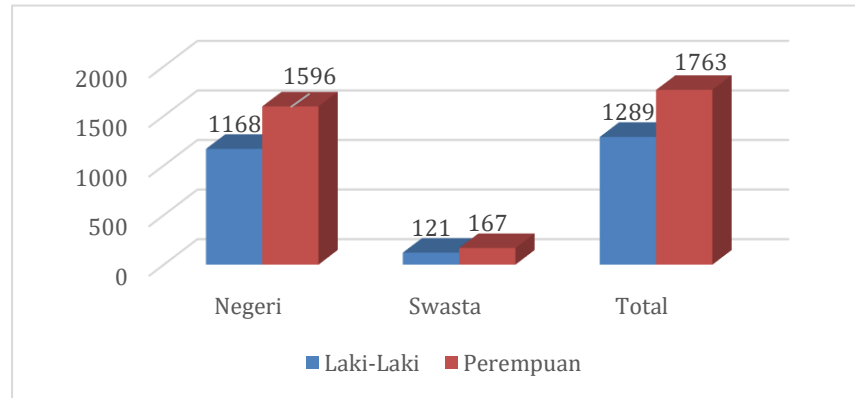


Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (Data diolah BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

Sampai dengan tahun 2021, jumlah guru yang mengajar di SMA/SMK dan SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 3.052 orang, terdiri dari 2.764 orang guru mengajar di SMA/SMK dan SLB negeri dan 288 orang mengajar di SMA/SMK dan SLB swasta. Di SMA/SMK/SLB negeri, jumlah guru laki-laki dan perempuan adalah 1.168 orang dan 1.596 orang. Sementara itu, di SMA/SMK/SLB swasta, jumlah guru laki-laki yang mengajar adalah 121 orang dan jumlah guru perempuan sebanyak 167 orang. Secara keseluruhan,

jumlah guru laki-laki yang mengajar di SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 1.289 orang dan jumlah guru perempuan sebanyak 1.763 orang.

Grafik II.21
Jumlah Guru Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022 (Data diolah BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022)

h. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sampai dengan SMA/SMK di tahun 2016 sampai dengan 2020 bersifat fluktuatif. Di tahun 2016, pada jenjang SD/MI, rasio ketersediaan sekolah sebesar 54,63 menurun menjadi 48,36 di tahun 2020. Pada jenjang SMP/MTs, rasio ketersediaan sekolah di tahun 2016 sebesar 33,1 menurun menjadi 27,28 di tahun 2020. Pada jenjang sekolah menengah, rasio ketersediaan sekolah sebesar 19,85 meningkat menjadi 20,65 di tahun 2019. Namun di tahun 2020, rasio ketersediaan jenjang SMA/SMK ini kembali turun, yakni dari 20,65 di tahun 2019 menjadi 18,06 di tahun 2020.

Tabel II.49
Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI					
Jumlah SD/MI	825	832	848	845	824
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	149.549	150.252	161.477	159.800	170.385
Rasio	54,63	54,66	52,39	52,88	48,36
SMP/MTs					
Jumlah SMP/MTs	248	255	259	257	219
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	74.754	75.115	78.522	75.700	80.269
Rasio	33,1	33,4	22,98	33,95	27,28
SMA/SMK					
Jumlah SMA/SMK	140	140	158	153	127
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	73.885	74.530	78.192	74.100	70.306
Rasio	19,85	19,90	20,21	20,65	18,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

i. Rasio Guru terhadap Siswa

Dalam masa waktu lima tahun (2016-2020), jumlah guru SMA/SMK/MA di Kepulauan Bangka Belitung fluktuatif. Rasio guru terhadap murid di jenjang pendidikan SD/MI di tahun 2016 meningkat dari 17,75 menjadi 19,27 di tahun 2020. Pada jenjang SMP/MTs, rasio guru meningkat dari 17,13 di tahun 2016 menjadi 17,84. Dan pada jenjang SMA/SMK, rasio guru di tahun 2016 sebesar 14,35 meningkat menjadi 16,76 di tahun 2020.

Tabel II.50
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sekolah Dasar					
Jumlah guru	9,283	8.544	8.665	9.655	8.564
Jumlah murid	164,727	166.610	168.877	172.678	165.071
Rasio	17,75	19,50	19,49	17,88	19,27
Sekolah Menengah Pertama					
Jumlah guru	3.920	3.836	3.883	4.293	3.409
Jumlah murid	67,152	69,064	68,078	69.454	60.827
Rasio	17,13	18,00	17,53	16,18	17,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Tabel II.51
Rasio Guru Terhadap Siswa SMA/SMK/SLB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sekolah Menengah Kejuruan					
Jumlah guru	1,582	1,649	1,682	1,658	1,658
Jumlah murid	23,879	24,387	25,241	26,218	25,718
Rasio	15.09	14.79	15.01	15.81	15.51
Sekolah Menengah Atas					
Jumlah guru	1,581	1,661	1,707	1,694	1,658
Jumlah murid	26,177	27,575	28,198	28,883	25,901
Rasio	16.56	16.6	16.52	17.05	17.61
Sekolah Luar Biasa (SLB)					
Jumlah guru	154	160	155	161	172
Jumlah murid	874	986	1,089	1,134	1,186
Rasio	5.68	6.16	7.03	7.04	6.9

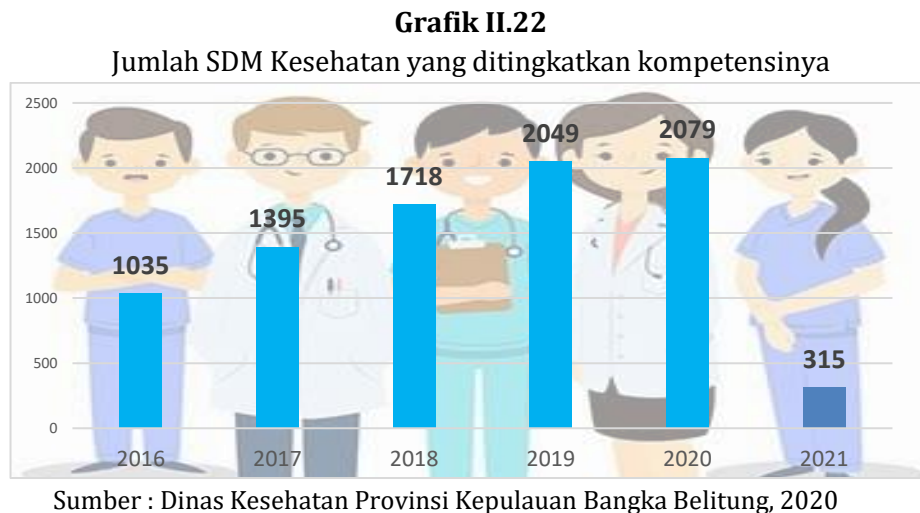
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Di tahun 2020, rasio guru terhadap murid di jenjang SMA adalah 1 orang guru per 16 murid SMA, sedangkan di jenjang SMK, rasio guru terhadap murid adalah 1 orang guru per 15 orang murid SMK. Di jenjang SLB, rasio guru terhadap murid adalah 1 orang guru per 6 murid. Selanjutnya, rasio guru terhadap murid di jenjang SMP adalah 1 orang guru per 18 orang murid, dan di jenjang SD adalah 1 orang guru per 19 murid. Angka ini masih sesuai dengan standar nasional dimana rasio guru dan murid adalah 15-20 murid per 1 orang guru. Dengan demikian, sekolah jenjang SD, SMP dan SMA/SMK di Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Urusan Kesehatan

1) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan sebagai salah satu sub sistem dari sistem kesehatan memberikan fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Bahwa salah satu indikator sasaran meningkatnya kualitas kesehatan adalah jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya. Berikut gambaran indikator dimaksud sebagaimana tabel di bawah ini.

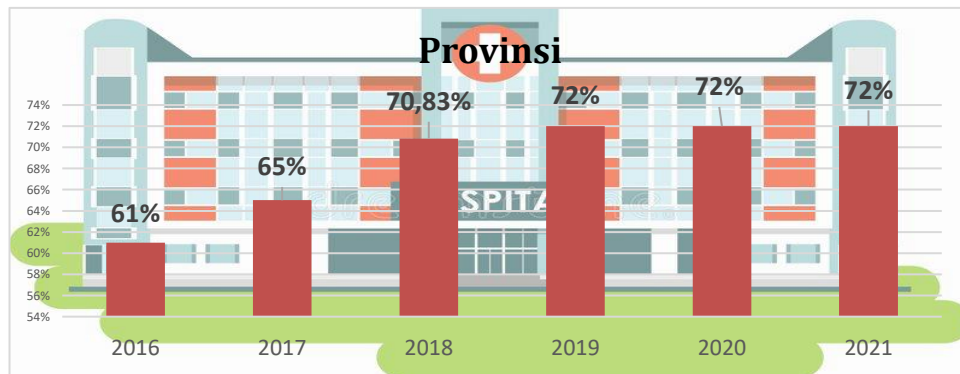


Pada tahun 2015-2017 pendataan SDM Kesehatan masih dilakukan secara manual sehingga jumlah SDM Kesehatan cenderung fluktuatif. Namun pada tahun 2018 Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dukcapil untuk mendata SDM Kesehatan by NIK dan menggunakan aplikasi SISDMK yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2019, SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya berjumlah 2049 dan mengalami peningkatan sejumlah 30 orang menjadi 2079 orang pada tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021, jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensi berjumlah 315 orang dan peningkatan kompetensi ini dilakukan melalui tugas belajar serta pelatihan.

2) Akreditasi Rumah Sakit

Selama periode tahun 2015-2019 perkembangan Rumah Sakit (RS) di Povinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup pesat. Pada tahun 2015 jumlah rumah sakit sebanyak 18 RS, dan pada tahun 2019 bertambah mencapai 28 RS, yaitu rumah sakit pemerintah 11 (sebelas) RS, rumah sakit swasta 13 (tiga belas) RS dan rumah sakit khusus 4 (empat) RS, dengan klasifikasi kelas B sebanyak 2 RS (pemerintah dan khusus), klasifikasi C berjumlah 15 RS (7 pemerintah, 5 swasta, dan 1 khusus), klasifikasi D sebanyak 6 RS (2 pemerintah dan 4 swasta) dan klasifikasi kelas DPratama 1 RS.

Grafik II.23
Akreditasi Rumah Sakit



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

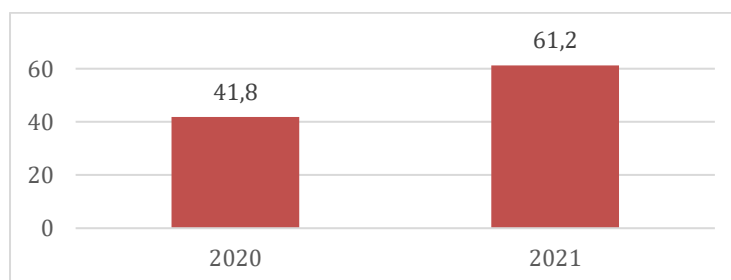
Terkait upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dari 28 Rumah Sakit yang ada sampai dengan tahun 2021, jumlah Rumah Sakit (RS) yang terakreditasi sebanyak 18 RS (72%), terdiri dari 10 RS Pemerintah dan 8 RS Swasta, capaiannya sama seperti tahun 2019 dan 2020. Hasil pencapaian yang sama ini disebabkan oleh kebijakan pembatasan skala sosial akibat pandemi COVID-19 sehingga kegiatan akreditasi tahun 2020 dan 2021 ditunda. Rumah Sakit terakreditasi Paripurna yaitu RS Jiwa, RS Depati Bahrin, RS Bhakti Timah. Yang terakreditasi Madya yaitu RS Jiwa, RS Dr. (HC) Ir. Soekarno, RS Depati Bahrin, RS Bhakti Timah, dan RS Dr. H. Marsidi Judono. Sedangkan yang terakreditasi Utama yaitu RS Siloam, RS Bhakti Wara, RS Alma. Yang terakreditasi madya, yaitu RS Depati Hamzah, Kabupaten Bangka Tengah, RS Medika Stania. Sedangkan yang terakreditasi Perdana yaitu Sejiran Setason, RS Belitung Timur, RS Bangka Selatan, RS Eko Maulana Ali, RS Arsani, RSBT Mentok, dan RSIA Muhaya.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Persentase Ketersediaan Infrastruktur ke-PU-an

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas mempunyai peran penting untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah. Hingga tahun 2021, persentase ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum mencapai 61,2%, meningkat sebanyak 19,4% dari Tahun 2020.

Grafik II.24
Persentase Ketersediaan Infrastruktur ke-PU-an (%)



Sumber : Dinas PUPR PRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

2) Proporsi Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Konektivitas merupakan suatu upaya untuk tercapainya mobilisasi penumpang/ barang/ jasa/ informasi yang lancar, aman, handal, dan efisien. Jalan merupakan salah satu prasarana untuk mewujudkan konektivitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terintegrasi secara local dan terkoneksi secara global.

Pembangunan konektivitas ini adalah strategi penyelenggaraan jalan melalui pendekatan kewilayahan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam kerangka sistem jaringan jalan sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya pembangunan melalui investasi yang lebih tepat sasaran.

Kendala yang dihadapi dalam pembangunan konektivitas ini adalah pemograman dan penganggaran perlu penajaman dalam menentukan prioritas, baik untuk preservasi terhadap jaringan jalan yang ada maupun peningkatan kapasitas jalan dan pembangunan jalan baru. Preservasi jalan merupakan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pelebaran jalan, sesuai dengan standar yang berkelanjutan untuk mempertahankan jalan dalam kondisi mantap.

Panjang jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/79/PU/I/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer menurut Perannya sebagai Jalan Provinsi adalah 850,99 km. Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang.

Berdasarkan hasil survey kondisi jalan pada tahun 2020, proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 94,64% yang terdiri dari jalan dengan kondisi baik 81,67% dan kondisi sedang 12,97%. Hal ini terbukti dengan sudah banyak jalan aspal dari perkotaan hingga pelosok pedesaan di Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, masih terdapat jalan provinsi yang memiliki kondisi rusak ringan sebesar 5,36% yang butuh direhabilitasi (perbaikan dan/atau perkuatan).

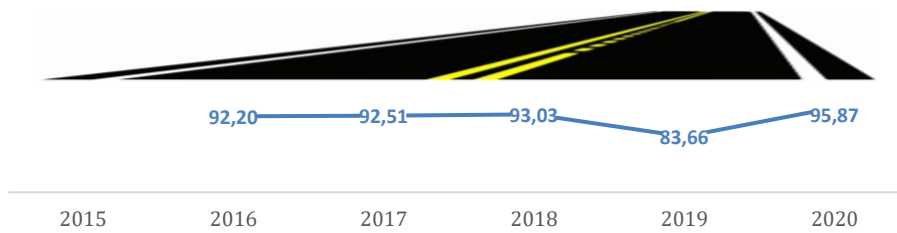
Tabel II.52
Hasil Survey Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2020

REKAPITULASI KONDISI JALAN	KM	%
Jalan Kondisi Baik	695.00	81.67
Jalan Kondisi Sedang	110.39	12.97
Jalan Kondisi Rusak Ringan	45.60	5.36
Jalan Kondisi Rusak Berat	0.00	0.00
Jalan Kondisi Mantap	805.39	94.64
Jalan Kondisi Tidak Mantap	45.60	5.36

Sumber: Dinas PUPR PRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan dan memiliki banyak sungai sehingga memerlukan pembangunan jembatan yang kokoh untuk menghubungkan suatu daerah dengan daerah lain. Berdasarkan Data Dasar Jembatan Tahun 2021, terdapat 3.802,86 meter jembatan yang merupakan kewenangan provinsi dimana konstruksi jembatan tersebut didominasi beton bertulang dan rangka baja karena lebih kokoh dan tahan lama.

Grafik II.25
Proporsi Jalan Dalam Kondisi Mantap (%)



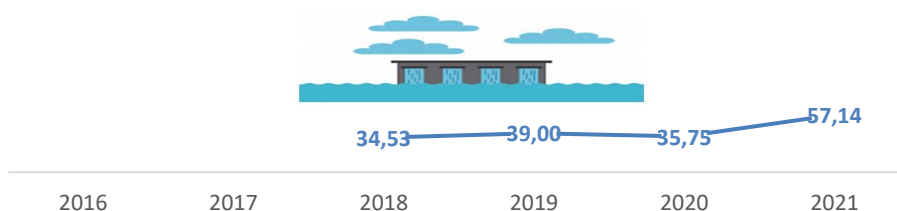
Sumber : Dinas PUPR PRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Provinsi Bangka Belitung mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2021. Dimana pada tahun 2016 sebesar 92,20% dan terus meningkat hingga 93,03% (2018), menurun tajam hampir 10% hingga 83,66% pada Tahun 2019, kemudian meningkat 95,87% pada Tahun 2020, dan menurun sedikit menjadi pada Tahun 2021 menjadi 94,64%. Fluktuasi ini dikarenakan *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19 yang juga berdampak berkurangnya penganggaran pada Program Penanganan Jalan. Meskipun demikian, tingkat kemantapan jalan masih berada di atas 90% yang menunjukkan bahwa jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi relatif baik.

3) Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder yang merupakan kewenangan provinsi pada daerah irigasi yang luasnya 1000-3000 ha dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

Grafik II.26
Rasio Irigasi (%)



Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Terdapat 7 (tujuh) Daerah Irigasi kewenangan provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni D.I Kimak, D.I Buleng, D.I Jeriji, D.I.R Serdang Pergam, D.I Jeruk, D.I Gadung Bikang Kepoh, dan D.I Jelutung II - Sukajaya.

Pada tahun 2016 rasio irigasi hanya sebesar 1% yang tertangani atau hanya seluas 28.49 Ha. Namun pada tahun 2017-2019 terjadi peningkatan hingga mencapai 7% (199.43 Ha) dengan luas potensial jaringan irigasi yang ditangani provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.527 Ha. Pada Tahun 2021, terdapat peningkatan hingga mencapai 24,18%. Hal ini dikarenakan terdapat penambahan luas potensial jaringan irigasi sebesar 7.974 ha dan luas fungsional sebesar 2.909 ha.

Tabel II.53
Data Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (Ha)

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Potensial	Luas Fungsional 2020	Luas Fungsional 2021
1	D.I Kimak	311	125	125
2	D.I Buleng	829	829	829
3	D.I Jeriji	174	88	88
4	D.I.R Serdang Pergam	2100	946	1100
5	D.I Sungai Jeruk	1151	-	-
6	D.I Gadung Bikang Kepoh	1707	493	767
7	D.I Jelutung II - Sukajaya	1702	-	-
	Total	7974	2481	2909

Sumber: Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Tabel II.54
Data Kondisi Jaringan Irigasi D.I Kewenangan Provinsi (m)

No	Nama Daerah Irigasi	Kondisi 2020 (m)			Kondisi 2021 (m)			Panjang Jaringan Irigasi
		Baik	Sedang	Rusak	Baik	Sedang	Rusak	
1	D.I Kimak	754.17	463.00	1,741.67	754.17	463.00	1,741.67	2,958.84
2	D.I Buleng	3,536.11	4,942.59	49,144.35	6,036.11	4,342.59	47,244.35	57,623.05
3	D.I Jeriji	-	3,300.00	4,350.00	-	3,300.00	4,350.00	7,650.00
4	D.I.R Serdang Pergam	3,581.07	18,515.48	43,214.80	13,581.07	18,515.48	33,214.77	65,311.32
5	D.I Sungai Jeruk	-	-	-	-	-	-	-
6	D.I Gadung Bikang Kepoh	38,434.06	459.14	-	38,434.06	459.14	-	38,893.20
7	D.I Jelutung II - Sukajaya	-	-	-	-	-	-	-
	Total	46,305.41	27,680.21	98,450.83	58,805.41	27,080.21	86,550.79	172,436.41
	Persentase (%)	26.85	16.05	57.09	34.10	15.7	50.2	100

Sumber: Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Tahun 2021, total panjang jaringan irigasi mencapai 172.436,41 meter setelah dilakukan pengambil alihan status daerah irigasi yang mulanya kewenangan kabupaten. Jaringan irigasi dengan kondisi baik mencapai 58.805,41 meter (34,10%), kondisi sedang 27.080,21 meter (15,7%), dan kondisi rusak sepanjang 86,550,79 meter (50,2%). Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak menunjukkan masih diperlukan perbaikan/ rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian lahan basah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4) Persentase Penyediaan Air Baku Peningkatan Luas Kawasan Yang Terlindungi Dari Daya Rusak Air

Air baku merupakan air yang didistribusikan dalam penyediaan air bersih/ konsumsi yang harus memenuhi baku mutu tertentu sebagai bahan baku untuk air bersih/ konsumsi. Air baku dapat diperoleh dari beberapa sumber air seperti sumber air permukaan, cekungan air tanah dan air hujan. Ketersediaan infrastruktur sumber daya air sangat penting dan perlu dijaga dari daya rusak air.

Pengendalian daya rusak air merupakan upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air. Salah satu daya rusak air adalah banjir.

Tabel II.55
Luas Kawasan Banjir Kewenangan Provinsi

No	Nama DAS	Luas DAS (Km ²)	WS	Nama Sungai Utama	Panjang Sungai Utama (m)	Luas Banjir (ha)		
						Daerah Banjir	Rawan Banjir	Total
1	Manggar	735.558	Beltim	S. Lenggang	60.17	8,922.79	4,270.93	13,193.72
2	Cerucuk	553.573	Belitung	S. Cerucuk	24.59	3,558.04	1,864.77	5,422.81
3	Kampit	274.404	Beltim	S, Manggar	21.41	2,269.65	2,926.46	5,196.11
4	Buding	532.132	Beltim	S. Buding	17.34	2,409.24	2,360.79	4,770.03
5	Kembiri	182.237	Belitung	S. Kembiri	9.58	1,401.98	1,845.73	3,247.71
6	Sagu	70.515	Beltim	S. Gadung	7.63	1,022.33	608.70	1,631.03
			Jumlah		140.71	19,584.03	13,877.37	33,461.41

Sumber: Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Daerah Aliran Sungai yang menjadi kewenangan provinsi terletak Pulau Belitung seperti yang tertera pada tabel di atas. Luas kawasan banjir di Wilayah Sungai kewenangan provinsi mencapai 33.461.41 ha yang terdiri dari daerah banjir 19.584,03 Ha dan rawan banjir 13.877.37 Ha dengan kedalaman rata-rata daerah banjir 0.5-4 meter.

Tabel II.56
Luas Kawasan Terlindungi Infrastruktur Banjir (ha)

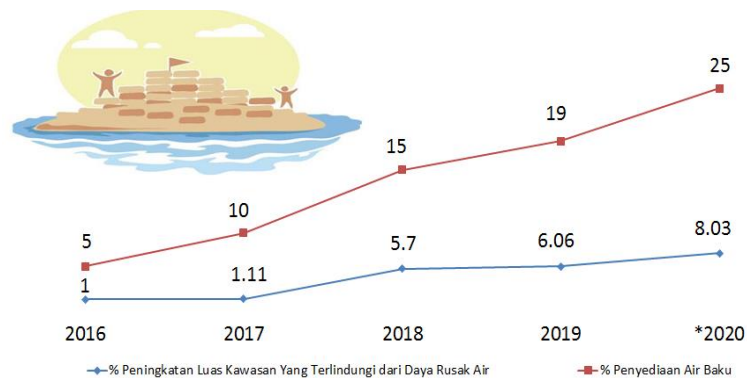
Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	2020	2021	Panjang (m)
Belitung	Tj. Pandan	Desa Air Raya, Siburik	177.90	112.00	1500
	Membalong	Desa Kembiri			
Belitung Timur	Gantung	Lenggang	892.28	52.10	1400
	Manggar	Kurnia jaya, Gg. Semuntok, Mempayak	226.97		
	Kelapa Kampit	Desa Mayang	51.12	10.45	3000
		Desa Buding			
			1348.26	174.55	5900

Sumber: Dinas PUPRPRKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Luas kawasan banjir kewenangan provinsi yang tertangani selama tahun 2020-2021 seluas 1.522,82 Ha (4,55%) dari total kawasan banjir kewenangan provinsi sebesar 33.461,41 Ha dengan panjang infrastruktur banjir yang dibangun sepanjang 5900 meter. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya pembangunan infrastruktur untuk penanganan banjir.

Grafik II.27

Penyediaan Air Baku dan Luas Kawasan Terlindungi dari Daya Rusak Air



Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Penyediaan air baku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari tahun 2016-2019. Dimana pada tahun 2016 hanya 5 persen sedangkan tahun 2019 mencapai 19 persen. Angka ini tidak berubah hingga tahun 2021 dikarenakan tidak adanya kegiatan fisik penyediaan air baku. Penyediaan air baku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memanfaatkan kolong bekas penambangan timah. Di Pulau Bangka terdapat 635 kolong dan di Pulau Belitung terdapat 66 kolong. Untuk menjaga mutu baku air maka perlindungan terhadap daya rusak air selalu ditingkatkan.

5) Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari 3 aspek dasar yakni perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang didasarkan kepada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). Undang-undang sebagaimana dimaksud mengamanatkan disusunnya Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang baik berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rencana Tata Ruang ini berfungsi sebagai acuan pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, arahan lokasi investasi, serta pedoman pemanfaatan ruang.

Adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) berimplikasi terhadap pelaksanaan UUPR yang salah satunya mengamanatkan diintegrasikannya RTRW dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) agar pengelolaan darat dan laut terpadu dan terintegrasi. Selain itu, UUCK juga mengamanatkan percepatan penyusunan RDTR untuk kemudahan perizinan berusaha berbasis resiko yang diselenggarakan melalui mekanisme *One Single Submission (OSS)*.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 dan juga telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040. Integrasi rencana tata ruang darat dan laut ini akan dilakukan pada tahun 2022 dengan tenggat waktu maksimal 18 Bulan.

Untuk mengukur peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta pewujudan tertib tata ruang digunakan Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang yang

dihitung dari Indeks Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang ditambah Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal dibagi dua. Pada tahun 2019, berdasarkan hasil kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 didapatkan nilai capaian Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 0,6. Adapun status dan progress RTRW dan RDTR Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.57
Status dan Progress RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Kab/ Kota	Revisi dan PK	Rekom Gub	Persub ATR	Evaluasi Gub	Perda	Keterangan
1	Bangka	v	-	-	-	-	PK RTRW dimulai pada Tahun 2022
2	Belitung	v	-	-	-	-	Tahun 2022 Proses menuju Persub dengan melengkapi persyaratan berupa KLHS tindak lanjut proses ta.2021
3	Bangka Barat	-	-	-	-	-	Tidak ada Revisi maupun PK RTRW (Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034)
4	Bangka Tengah	v					Proses Revisi RTRW
5	Bangka Selatan	v	-	-	-	-	Proses PK RTRW
6	Belitung Timur	v					Proses Revisi RTRW
7	Pangkalpinang	v	-	-	-	-	PK Perda RTRW Pangkalpinang 2022-2040. Masih dalam proses Rekomendasi Gubernur
8	Provinsi Kep. Bangka Belitung	v	-	-	-	-	Tahun 2022 akan dilakukan pengintegrasian dengan RZWP3K

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Tabel II.58
Status dan Progress RDTR Kabupaten/Kota Tahun 2021

No	Kawasan Perkotaan	Matek	Rekom Gub	Persub ATR	Evaluasi Gub	Perbup	Keterangan
Kab. Bangka							
1	RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034	v	-	-	-	-	Revisi Perda Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034. Proses Revisi mulai Tahun 2020 sampai dengan saat ini
2	RDTR Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2021-2041	v	v	v	v	v	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Merawang Tahun 2021-2041
Kab. Belitung							
1	RDTR Kawasan Perkotaan Tanjungpandan	v	-	-	-	-	Tahun 2022 Proses menuju Persub dengan melengkapi

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

No	Kawasan Perkotaan	Matek	Rekom Gub	Persub ATR	Evaluasi Gub	Perbup	Keterangan
							persyaratan berupa KLHS. Tindak lanjut proses TA.2021
2	RDTR Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang dan Sekitarnya	v	-	-	-	-	Menuju Persub dengan melengkapi KLHS. tindak lanjut Bantek Kemen. ATR TA. 2019.
3	Penyusunan RDTR Kawasan Pariwisata Geopark Belitung	v	-	-	-	-	Tahun 2022 Proses menuju Validasi KLHS di DLHK Provinsi. Tindak lanjut Bantek Kemen. ATR TA. 2021)
Kab. Bangka Barat							
1	RDTR Kawasan Perkotaan Muntok	v	-	-	-	-	Materi Teknis dalam proses penyusunan pada Tahun 2022
2	RDTR Kawasan Perkotaan Jebus	v	-	-	-	-	Materi Teknis dalam proses penyusunan pada Tahun 2022
Kab. Bangka Tengah							
1	RDTR Kawasan Perkotaan Sungaiselan	v	v	v	v	v	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungaiselan Tahun 2022-2042
2	RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pangkalanbaru dan Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038	v	v	v	v	v	Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pangkalanbaru dan Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018-2038
Kab. Bangka Selatan							
1	RDTR Kawasan Tukak Sadai Tahun 2021-2041	v	-	-	-	-	Bantek Kemen. ATR TA. 2021
Kab. Belitung Timur							
1	RDTR Kawasan Perkotaan Manggar Tahun 2021-2041	v	v	-	-	-	Matek telah disusun pada tahun 2021. Masih dalam tahap KLHS Pra validasi
Kota Pangkalpinang							
-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada penyusunan RDTR

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Dari 2 (dua) tabel di atas dapat terlihat bahwa masih banyak dokumen tata ruang baik RTRW maupun RDTR yang perlu untuk direvisi/ disusun. Hingga akhir Februari 2022, terdapat 7 (tujuh) RTRW Provinsi/Kab/Kota yang dalam proses revisi, termasuk di dalamnya RTRW Provinsi yang sedang dalam proses integrasi dengan RZWP3K. Selain itu, terdapat 8 (delapan) RDTR yang sedang dalam proses penyusunan, termasuk 1 (satu) diantaranya RDTR yang direvisi yakni RDTR Kawasan Perkotaan Sungailiat. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terpenuhinya kegiatan penyelenggaraan penataan ruang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar seperti halnya pendidikan dan kesehatan yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28(h). Komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan dasar tersebut juga sejalan dengan Agenda Global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals*) atau yang dikenal dengan SDGs, terutama Goals 6.1.1 (akses air minum); Goals 6.2.1 (akses sanitasi); dan Goals 11.1.1 (akses rumah layak huni).

Sesuai dengan perkembangan global, Indonesia harus mengubah indikator yang digunakan dalam Millenium Development Goals (MDGs) agar sesuai dengan misi SDGs termasuk dalam bidang perumahan. SDGs dirancang secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan.

a. Persentase Capaian Rumah Layak Huni

Terdapat 4 (empat) komponen dalam perhitungan Rumah Layak Huni yakni ketahanan bangunan, luas tempat tinggal, akses sanitasi layak dan akses air minum layak. Walaupun SDGs dan MDGs menggunakan komponen yang sama untuk rumah layak huni, tetapi ada dua perbedaan dalam melakukan perhitungan.

Pertama, dibandingkan MDGs, parameter dalam tiap komponen di SDGs didefinisikan secara rinci. Kedua, adanya pembobotan dalam MDGs yang mendefinisikan satu komponen lebih penting dari komponen lainnya. Sementara SDGs memandang bahwa semua komponen adalah hal dasar yang mutlak dan wajib dipenuhi 100% kelayakannya. Hingga tahun 2019, capaian rumah layak huni masih menggunakan metode perhitungan MDGs, dan mulai tahun 2020 telah menggunakan metode baru yakni metode perhitungan SDGs.

Grafik II.28

Capaian Persentase Rumah Layak Huni (%)



Capaian rumah layak huni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlihat cukup fluktuatif pada rentang 26-28% tetapi cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari capaian Tahun 2020 yang menggunakan metode SDGs dengan parameter yang lebih detail menunjukkan peningkatan capaian sebesar 4,46% dari Tahun 2019 menjadi 30.64%. Walaupun meningkat, angka ini menunjukkan hanya kurang dari 1/3 masyarakat yang memiliki akses terhadap rumah layak huni yang berarti kemampuan mayoritas masyarakat masih rendah untuk menempati atau memiliki rumah layak huni sehingga masih diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan nilai capaian ini kedepannya.

b. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak

Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia, terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Untuk keperluan air minum dibutuhkan air rata-rata sebanyak 5 liter/hari, sedangkan secara keseluruhan kebutuhan air suatu rumah tangga

diperkirakan sebesar 60 liter/hari. Air Minum Layak adalah air ledeng eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja ≥ 10 m.



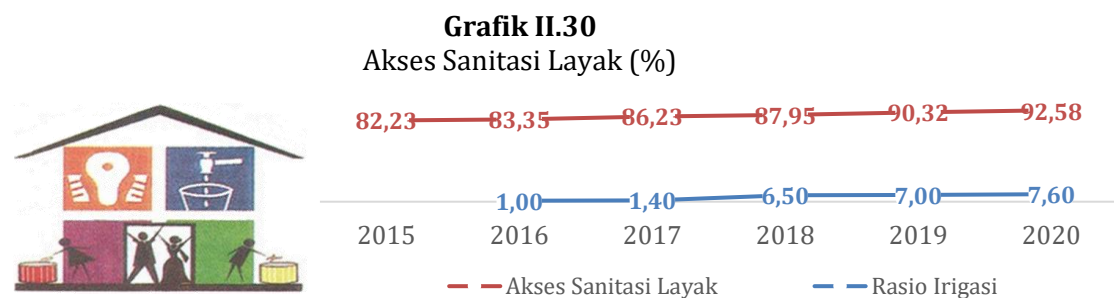
Sumber : Pokja PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 77.50 persen dan menurun ditahun 2016 menjadi sebesar 72.57 persen. Kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 76.82 persen (2017), 73.21 persen (2018), 73,45 persen (2019).

Dalam SDGs, terdapat beberapa komponen yang menjadi penilaian akses air minum layak, antara lain sumber air minum utama, jarak ke penampungan kotoran/limbah, dan waktu tempuh pulang pergi mengambil air (termasuk waktu antri). Pada Tahun 2020, capaian terhadap indikator ini sebesar 75,06 persen (2020). Kabupaten/kota yang memiliki nilai persentase rumah tangga dengan akses air minum layak tertinggi adalah Kota Pangkalpinang sebesar 93,86% dan yang terendah adalah Kabupaten Bangka sebesar 63,22%.

c. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL/sistem terpusat).



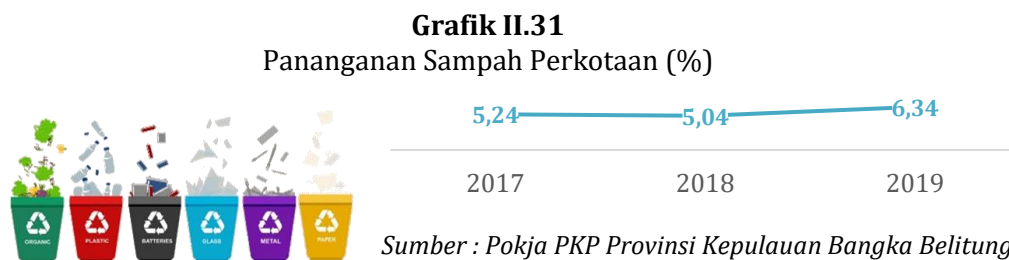
Sumber : Pokja PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Capaian akses sanitasi layak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015-2020 terus mengalami trend positif dimana pada tahun 2015, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 82,23% dan terus meningkat sampai dengan tahun 2020 sebesar 92,58%. Artinya masih ada 7,42 persen rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak, yang diantaranya masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang pada tahun 2019 masih sebesar 6,23%. Angka BABS ini menurun hampir setengahnya

dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 12,62%. Peningkatan akses terhadap sanitasi layak tahun 2019-2020 mencapai 2,26 persen, artinya dengan asumsi laju yang sama, masih diperlukan 3-4 tahun untuk menuntaskan 7,42 persen tersisa yang belum memiliki akses layak.

d. Penanganan Sampah Perkotaan

Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan merupakan target 11 dalam SDGs, di mana target tersebut juga mencakup penanganan sampah kota yang tercantum dalam target 11.6. Capaian penanganan sampah perkotaan merupakan jumlah rumah tangga di perkotaan yang sampahnya diangkut petugas dan atau dibuang ke TPS. Diukur pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).



Pada tahun 2017, penanganan sampah perkotaan sebesar 57,92%, meningkat menjadi 65,10% (2018), dan menurun menjadi 58,64% (2019). Hal ini berarti masih lebih dari 2/5 sampah perkotaan yang belum tertangani dengan baik, sehingga masih diperlukan penanganan sampah perkotaan yang lebih untuk mendukung perwujudan lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

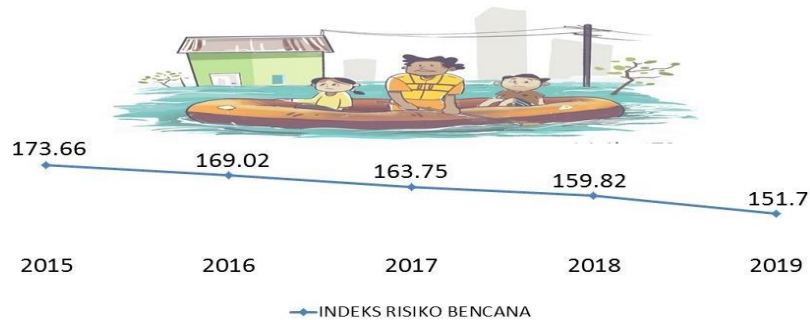
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana.

Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kemudian kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Selanjutnya kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.

Grafik II.32

Indeks Resiko Bencana

INDEKS RISIKO BENCANA



Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data di atas, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 173,66, kemudian menurun menjadi 169,02 (2016), 163,75 (2017), 159,82 (2018), dan 151,7 (2019). Meskipun menunjukkan tren penurunan namun IRBI Bangka Belitung masih dalam kategori “tinggi”. Masih tingginya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Risiko tertinggi berada di Bangka Tengah (214,8) dan Bangka Selatan (214), sedangkan terendah pada Kabupaten Bangka Barat (95,2).

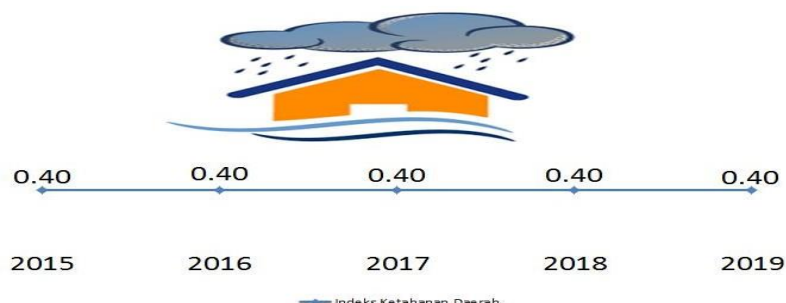
b. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

IKD adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan daerah tersebut kondisinya tetap dengan 3 hal, yaitu : indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman yang merupakan komponen penyusun IRBI. IKD dibagi dalam kedalam 3 (tiga) indeks, yaitu rendah (0– 0,33), sedang (0,34 – 0,66) dan tinggi (0,67 – 1,00). Penghitungan IKD menggunakan aplikasi pusat dengan penilaian kapasitas daerah yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator diantaranya untuk mengetahui jenis bencana dominan dan jiwa terpapar, penyusunan peta risiko bencana dan tren risiko bencana.

Grafik II.33

Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

INDEKS KETAHANAN DAERAH



Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015-2019 sebesar 0,40 atau dalam kategori “sedang”. Meskipun setiap tahun terdapat komponen yang berubah namun capaiannya hanya mencapai 0,40 (sedang). Artinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tangguh dalam menghadapi bencana. Tingkat

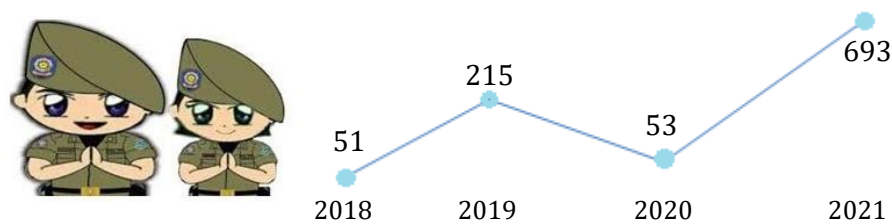
kerentanan dari Potensi kerugian materiil dan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam kategori sedang dan bencana yang ditimbulkan dominan dari gelombang ekstim dan abrasi.

c. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Ditindaklanjuti

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah sebagaimana ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada Tahun 2020 Jumlah anggota Satuan polisi Pamong praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 232 orang mengalami pengurangan sebanyak 5 orang sehingga pada tahun 2021 jumlah anggota Satuan polisi Pamong praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 227 dengan rasio jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk mencapai 1,56 (2021).

Grafik II.34

Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti



Sumber : Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada tahun 2021 ditemukan 693 pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 693 pelanggaran ditindaklanjuti. Pada tahun 2019-2021 pelanggaran Perda dan Perkada menunjukkan tren penurunan dari 975 pelanggaran mengalami penurunan sebanyak 282 pelanggaran. Semua pelanggaran Perda dan Perkada ditindaklanjuti atau dengan capaian 100 persen. Pelanggaran terhadap ketentuan Perda dan Perkada tersebut dikenakan tindakan preventif non-yustisial atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sampai proses pengadilan.

6. Urusan Sosial

1) Indeks Pembangunan Sosial (IPS)

Indeks Pembangunan Sosial merupakan suatu alat untuk menyediakan secara holistik, tujuan dan ukuran yang berbasis hasil kesejahteraan yang bebas dari indikator ekonomi. Pengukuran angka Indeks Pembangunan Sosial (IPS) Bangka Belitung tergabung dalam nilai-nilai komponen dan dimensi. Dimensi tersebut merupakan indikator dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA), Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), dan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan komponen pengukuran bobot diukur dari jumlah bayi lahir, jumlah penduduk laki-laki dan

perempuan, jumlah pemuda, jumlah anak, jumlah penduduk usia >10 tahun, dan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indeks Kesejahteraan Sosial Bangka Belitung disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data di atas pada tahun 2016 belum diukur Indeks Pembangunan Sosial (IPS), namun pada tahun 2017 nilai IPS Bangka Belitung mencapai 39,01. Angka ini meningkat di tahun 2018 menjadi 44,04, dan 44,12 (2019). Pada tahun 2020 target IPS Bangka Belitung sebesar 44.20. Rentang nilai IPS: 0-100. Semakin mendekati angka 100, artinya tingkat pembangunan sosial semakin baik. Nilai IPS Bangka Belitung < 65 artinya tingkat pembangunan sosial Bangka Belitung dalam kategori “rendah.”

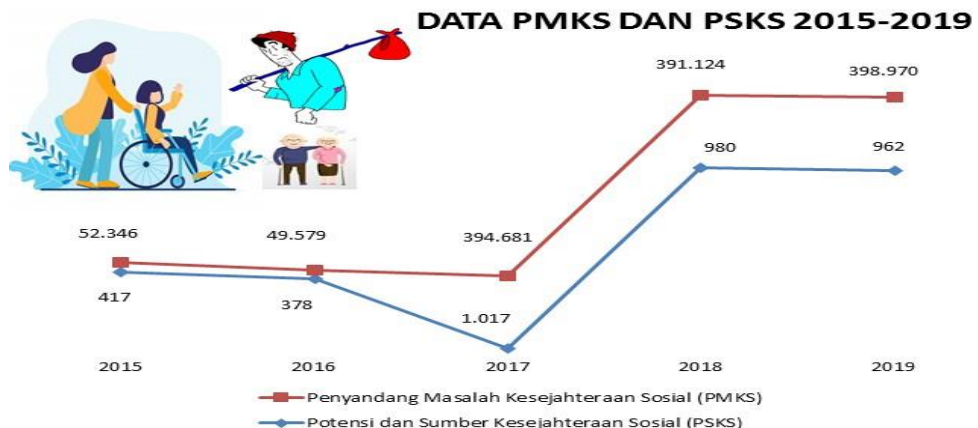
2) Jumlah PMKS/PSKS Yang Terberdayakan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Dewasa ini masalah PMKS seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan perlu ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, hal tersebut di mana pada tahun 2017 jumlah PMKS sebesar 48.521 orang, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 391.124 orang, dan tahun 2019 menjadi sebesar 398.970 orang.

Grafik II.36

Data PMKS dan PSKS 2015-2019



Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) setiap tahun selalu naik. Pada tahun 2017 PMKS Provinsi Bangka Belitung berjumlah 394,681 orang menjadi 398.970 orang di tahun 2019. Bertambahnya jumlah PMKS dikarenakan beberapa komponen PMKS seperti anak telantar, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, dan lain sebagainya meningkat. Namun hal ini berbanding terbalik dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengalami penurunan yaitu dari tahun 2017 berjumlah 1.017 orang menjadi 962 orang. Hal ini dikarenakan berkurangnya beberapa komponen potensi dan sumber kesejahteraan sosial, seperti: pekerja sosial profesional, pekerja sosial kemasyarakatan, dan lembaga kesejahteraan sosial.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

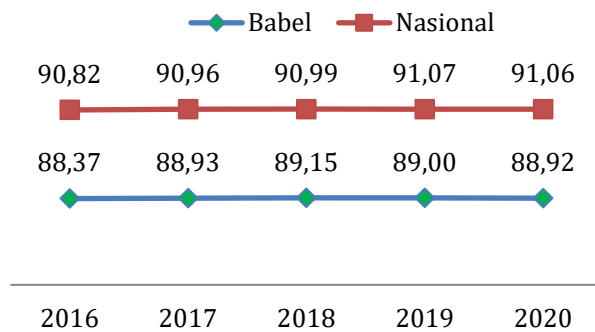
1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Gambaran terhadap perkembangan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan sebagaimana tabel dibawah ini.

Grafik II.37
Indeks Pembangunan Gender (IPG)



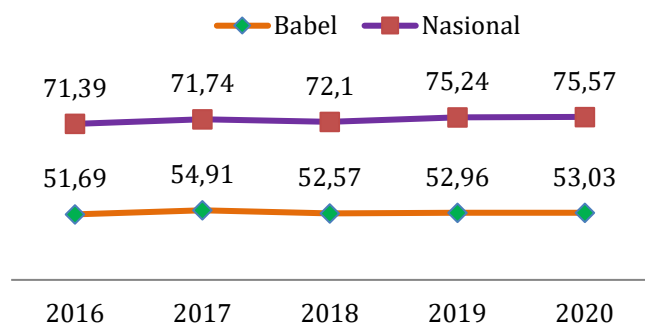
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Saat ini capaian angka IPG berfluktuatif dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun 2016 sebesar 88.37 persen meningkat menjadi 89.15 pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 89 persen menurun lagi tahun 2020 menjadi 88.92 persen. Jika dibandingkan secara nasional, capaian Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masih di bawah rata- rata nasiona, dimana rata-rata nasional sebesar 91,06 persen pada tahun 2020.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen. Dari capaian lima tahun terakhir, IDG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat terutama pada 3 (tiga) tahun terakhir, walaupun masih di bawah capaian Nasional.

Grafik II.38
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Untuk capaian Kabupaten Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi pada tahun 2020 adalah di Kabupaten Bangka sebesar 65.24 dan diikuti oleh Kabupaten Bangka Barat sebesar 64.48, sedangkan terendah di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 49.93.

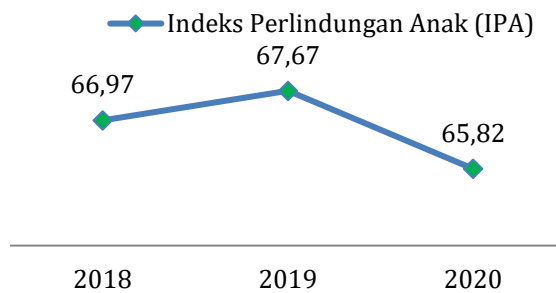
c. Indeks Perlindungan Anak (IPA)



Indeks perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Indikator itu menggambarkan capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai amanat Konvensi Hak Anak (KHA). Indeks ini diharapkan bisa menjadi ukuran untuk memastikan program dan kebijakan sudah efektif dan efisien dalam menjawab berbagai permasalahan, khususnya, terkait perlindungan anak dan melahirkan sistem perlindungan anak yang terintegrasi di lintas sektor.

Grafik II.39

Indeks Perlindungan Anak (IPA)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

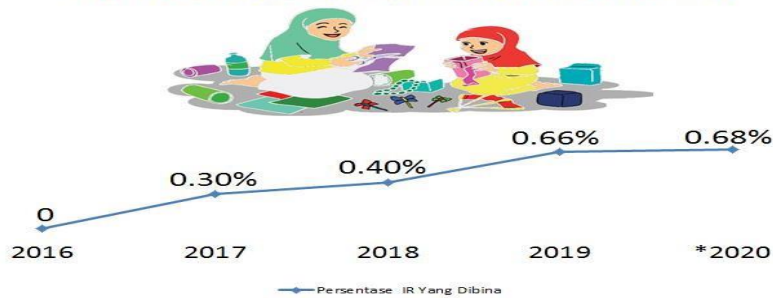
Dari tabel di atas terlihat capaian indeks perlindungan Anak (IPA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang menggembirakan, karena capaian tahun 2020 sebesar 65.82 menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 67.67 walaupun tahun 2019 sempat meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 66.97. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mendorong dan menentukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan Indeks Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

d. Persentase Industri Rumah (IR) yang Dibina

Industri Rumah/IR (*Home Industry*) adalah suatu sistem produksi yang menghasilkan suatu produk melalui proses pembentukan nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan di lokasi rumah dan bukan di suatu lokasi khusus (seperti pabrik), dengan menggunakan alat-alat produksi yang sederhana. IR merupakan Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang dicanangkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi.

Grafik II.40

Industri Rumah Tangga Bagi Perempuan
INDUSTRI RUMAH TANGGA BAGI PEREMPUAN



Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pengembangan Industri Rumahan (IR) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 hanya 0,30 persen IR yang dibina, namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,40 persen dan tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 0,66 persen. Beberapa indikator atau ukuran keberhasilan pengembangan industri rumahan adalah sebagai berikut: 1). Meningkatnya kesejahteraan dari masyarakat (khususnya keluarga pelaku usaha mikro); 2). Adanya peningkatan pendapatan perempuan dan anggota keluarga dari hasil usahanya; 3). Terjadi hubungan keluarga yang baik antara suami dan istri, anak dan mungkin dengan keluarga dekat yang lain; 4). Meningkatnya kualitas gizi dalam keluarga dan biaya sekolah; dan 5). Adanya perubahan kategori IR dari IR Pemula ke IR Berkembang. IR Berkembang ke IR Maju.

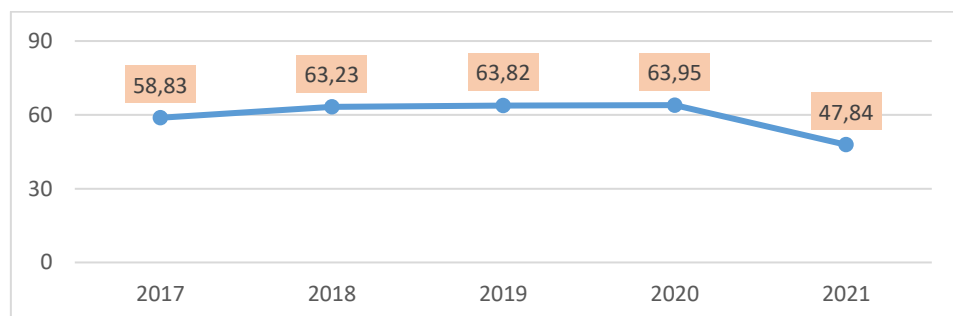
2. Urusan Tenaga Kerja

a. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar, yaitu: 1). perencanaan tenaga kerja; 2). penduduk dan tenaga kerja; 3). kesempatan kerja; 4). pelatihan kerja dan kompetensi kerja; 5). produktivitas tenaga kerja; 6). hubungan industrial; 7). kondisi lingkungan kerja; 8). pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan 9). jaminan sosial tenaga kerja.

Grafik II.41

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 58.83 dan meningkat sampai dengan tahun 2020 sebesar 63,82 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 47.84. Ini berarti IPK Bangka Belitung masih kurang dari (<) 65,99 dengan kategori “menengah ke bawah”. Sejak tahun 2017 pengukuran IPK sudah menggunakan perspektif baru, sehingga hasil pencapaian “menengah kebawah” diartikan bahwa Provinsi Bangka Belitung masih jauh dari target dan standar *Sustainable Development Goals* (SDGs).

b. Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan kluster kompetensi

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja setiap tahun dilakukan berbagai jenis pelatihan kerja, baik yang berbasis kompetensi kerja, berbasis masyarakat, maupun pelatihan kewirausahaan. Pelatihan berbasis kompetensi merupakan pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sesuai standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Adapun pelatihan yang diberikan antara lain: otomotif, las, listrik, menjahit, teknologi informatika komputer (tik) elektro, bangunan, pariwisata, elektronika/ HP dan tata rias.

Grafik II.42

Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Penempatan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi, berdasarkan data yang ada memperlihatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan berfluktuatif. Pada tahun 2016 dari 15.593 orang pencari kerja, tenaga kerja yang ditempatkan hanya 2,7 persen. Artinya dari seluruh pencari kerja hanya 424 orang yang ditempatkan sesuai kompetensi. Tahun 2017 turun menjadi sebesar 2,5 persen, dan tahun 2018 turun cukup signifikan hanya 1 persen. Diperkirakan hal ini sebagai dampak krisis moneter yang melanda dunia sehingga banyak tenaga kerja yang di PHK. Namun seiring dengan perbaikan ekonomi, pada tahun 2019 kembali meningkat yaitu sebesar 3persen dari 5.225 pencari kerja atau 155 tenaga kerja yang ditempatkan sesuai kompetensinya. Pada tahun 2020 diharapkan meningkat menjadi sebesar 4 persen.

3. Urusan Pangan

a. Capaian Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencerminkan ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan. Skor PPH maksimal adalah 100.

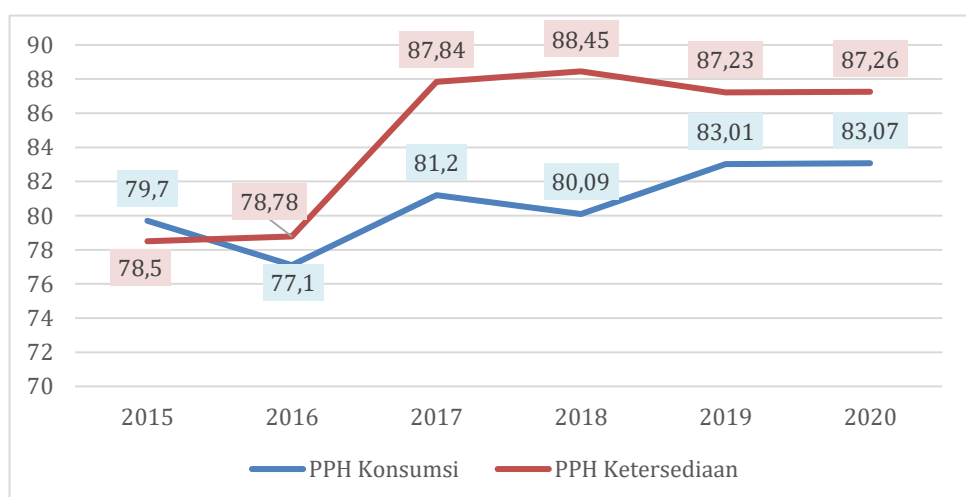
Skor PPH Ketersediaan Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 78,5 kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 87,26. Begitupun dengan skor PPH Konsumsi juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebesar 79,7 dan 2020 mencapai 83,07 sebagaimana grafik di bawah ini.

Tabel II.59
Perkembangan Skor PPH Konsumsi dan Ketersediaan
Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2015-2020

No	Keterangan	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PPH Konsumsi	Skor	79,7	77,1	81,2	80,09	83,01	83,07
2	PPH Ketersediaan	Skor	78,5	78,78	87,84	88,45	87,23	87,26

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Grafik II.43
Skor PPH Konsumsi dan Ketersediaan



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Berdasarkan grafik di atas skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami dan

mempunyai kesadaran akan pentingnya kualitas konsumsi pangan untuk hidup sehat. Namun demikian perlu untuk lebih mengoptimalkan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui upaya meningkatkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), maka perlu didorong melalui sosialisasi, promosi dan kegiatan yang dapat memberi wawasan dan pengetahuan untuk percepatan pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH).

b. Persentase Penduduk Rawan Pangan

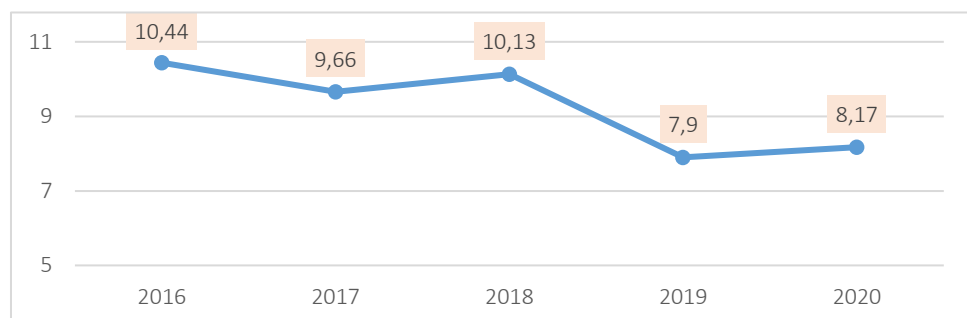
Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Masih adanya penduduk rawan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat di lihat berdasarkan data *Prevalence of Undernourishment* (PoU) atau yang dikenal dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu jumlah penduduk yang konsumsi pangannya belum mencukupi standar kecukupan gizi.

Tabel II.60
 Perkembangan Data Prevalence of Undernourishment (PoU)
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	10,44	9,66	10,13	7,9	8,17

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Grafik II.44
Prevalence of Undernourishment (PoU)



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

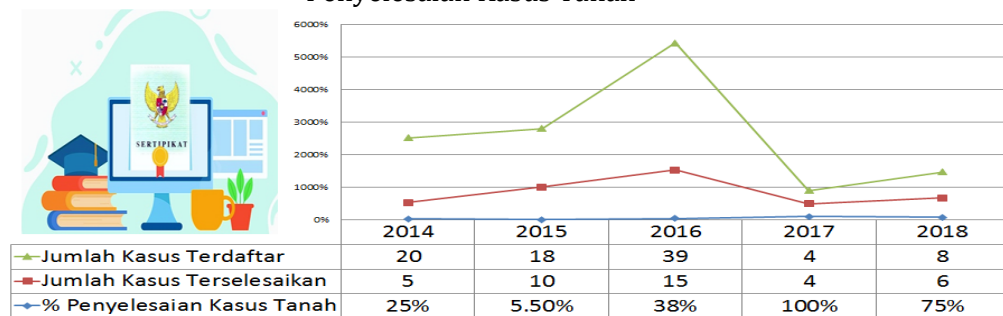
Prevalence of Undernourishment (PoU) Bangka Belitung sangat berfluktuatif, di mana pada tahun 2016 sebesar 10,44 persen, kemudian menurun sebesar 9,66 persen (2017), naik menjadi 10,13 persen (2018), namun pada tahun 2019 turun menjadi 7,9persen, kemudian naik kembali di tahun 2020 menjadi sebesar 8,17 persen. Kondisi fluktuatif ini menunjukkan prevalensi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan atau penduduk rawan pangan. Dengan PoU sebesar 8,17 persen maka dari 1.517.590 jiwa penduduk Bangka Belitung terdapat 124.442 jiwa yang mengalami rawan pangan.

4. Urusan Pertanahan

a. Persentase Penyelesaian Kasus Tanah

Dengan ditetapkannya urusan pertanahan kedalam tata ruang menjadi satu kesatuan, maka ada peluang untuk dapat memperbaiki fragmentasi pelaksanaan penataan ruang yang terjadi selama ini khususnya dalam menyelesaikan kasus pertanahan. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan disebutkan, sengketa tanah ialah: “Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.”

Grafik II.45
Penyelesaian Kasus Tanah



Sumber: BPN dan Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

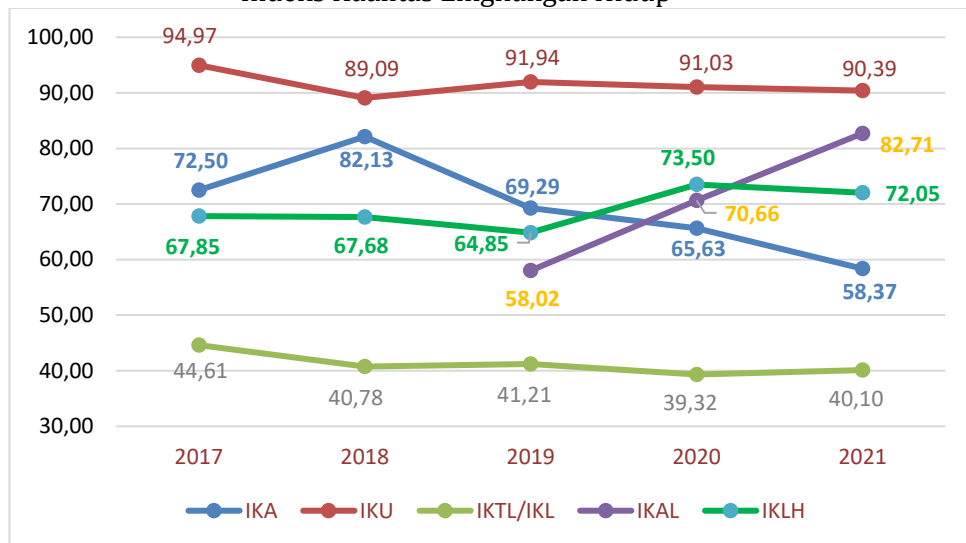
Kasus sengketa tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014-2018 tercatat terbanyak pada tahun 2016 yaitu 39 kasus terdaftar dan hanya 15 kasus yang terselesaikan atau sebesar 38 persen. Pada tahun 2017 tercatat jumlah kasus terdaftar sebanyak 4 kasus yaitu 2 kasus di Kabupaten Bangka dan 2 Kasus di Kota Pangkalpinang dan semua kasus terselesaikan atau sebesar 100 persen. Sedangkan tahun 2018 ada 8 kasus yang terdaftar yaitu 1 kasus di Kabupaten Bangka, 3 Kasus di Kabupaten Bangka Tengah, 1 Kasus di Kabupaten Bangka Selatan, dan 3 Kasus di Kota Pangkalpinang. Penyelesaian kasus pada tahun 2018 hanya sebesar 75 persen. Kasus ini di dominasi oleh kasus sengketa tanah desa dan kasus tumpang tindih kepemilikan lahan serta pemalsuan sertifikat.

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan komponen penyusun berupa Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)/ Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Grafik II.46
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Berdasarkan data di atas, selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Nilai IKLH dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus menurun dari 67,85 menjadi 64,85 namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 73,50. Tahun 2021 nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menurun menjadi 72,05. Indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara yang menurun memberikan andil terhadap penurunan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

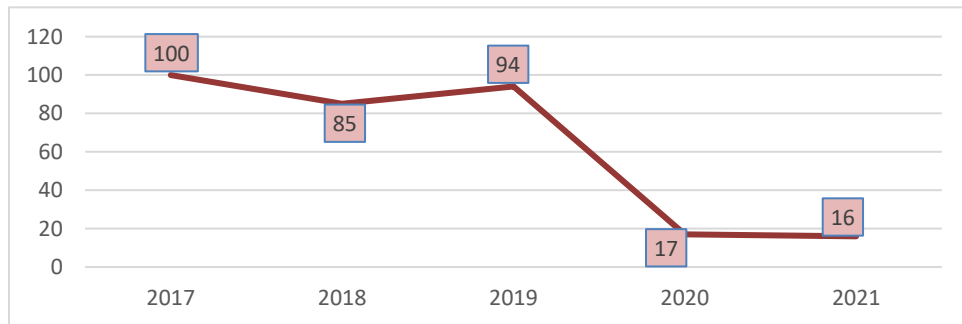
Masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indeks kualitas air dihitung untuk 11 sungai dan menggunakan avg NSF memasukkan unsur pencemar untuk 10 parameter+debit, sedangkan udara hanya dihitung 3 titik lokasi: industri, perumahan dan transportasi.

b. Persentase Aduan Masyarakat Yang Diverifikasi

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengaduan kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pengaduan dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada petugas di sekretariat pengaduan. Pengaduan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui media pengaduan berupa telepon, surat, surat elektronik, faksimile, pesan singkat, website, media sosial, aplikasi pengaduan dan media lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Grafik II.47

Persentase Aduan Masyarakat yang Diverifikasi



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

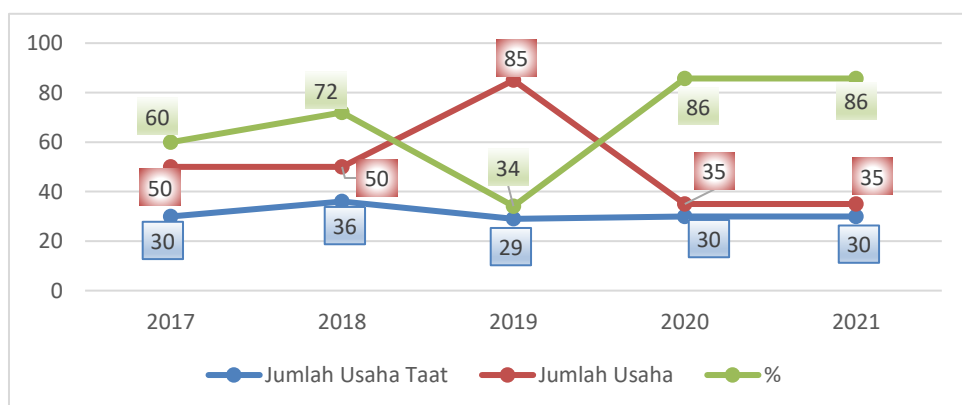
Pengaduan Masyarakat ini bersumber baik dari hasil pengawasan, pengaduan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup ataupun yang berasal dari Media massa baik yang izin lingkungannya dikeluarkan oleh Provinsi maupun oleh Kabupaten/Kota. Pada tahun 2017 semua pengaduan/kasus yang masuk 100% diverifikasi. Sedangkan pada tahun 2018 pengaduan yang masuk sebanyak 20 kasus (85%), dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus. Pada tahun 2019, pengaduan yang masuk sebanyak 18 kasus dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus atau sebesar 94 persen karena terdapat satu pengaduan yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

c. Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Salah satu instrumen penegak hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, ketaatan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan), serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dokumen lingkungan, air, udara, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).

Grafik II.48

Persentase Ketaatan Usaha



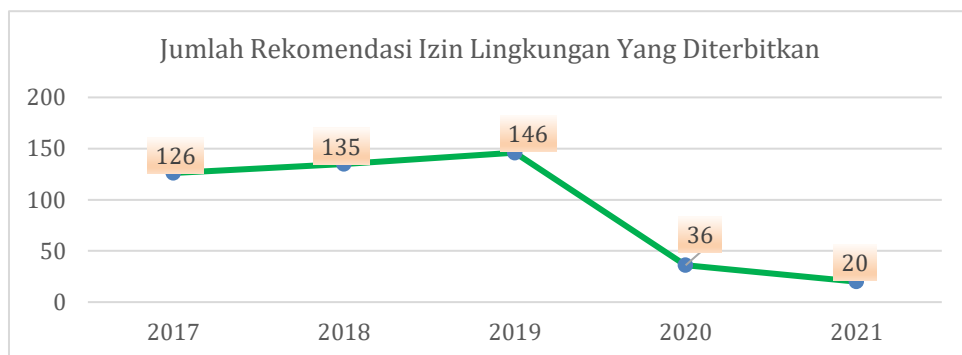
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Ketaatan usaha/kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, namun dari kondisi tahun 2017 sebesar 60% meningkat menjadi 86% pada tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah usaha/kegiatan yang menggunakan izin lingkungan juga menurun dari sebanyak 50 usaha/kegiatan pada tahun 2017 menjadi 35 usaha/kegiatan di tahun 2021.

d. Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Yang Diterbitkan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Grafik II.49
Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan Provinsi



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Berdasarkan data di atas izin lingkungan yang dikeluarkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 meningkat dari 126 usaha/kegiatan (2017) menjadi sebanyak 146 usaha/kegiatan. Namun kondisi ini menurun menjadi 36 usaha/kegiatan di tahun 2020 dan 20 usaha/kegiatan di tahun 2021.

6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Persentase Kampung KB

Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program pembangunan sector terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Kampung KB ini diharapkan menjadi miniatur atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sector terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Grafik II.50

Kampung Keluarga Berencana (KB)

KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB)



Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian kampung KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan cukup tinggi. Pada tahun awal pembentukan Kampung KB hanya tercapai 5 persen atau hanya ada 7 Kampung KB yang terbentuk. Namun pada tahun 2017 mulai terjadi peningkatan pembentukan Kampung KB hingga mencapai 30 persen atau sebanyak 47 Kampung KB yang terbentuk. Pada tahun 2018 capaian mencapai 63,63 persen atau 98 sebanyak Kampung KB dan selanjutnya tahun 2019 mencapai 76,62 persen atau sebanyak 118 Kampung KB. Artinya semakin tinggi kesadaran masyarakat Bangka Belitung tentang pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

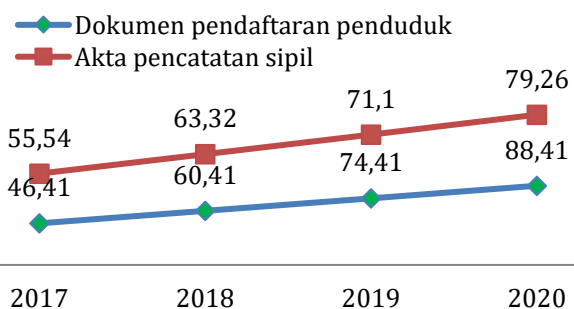
7. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pendaftaran penduduk dapat melalui Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak, sedangkan pencatatan sipil melalui Akta Lahir, Akta Mati, dan Akta Perkawinan.

Grafik II.51

Kependudukan dan Catatan Sipil



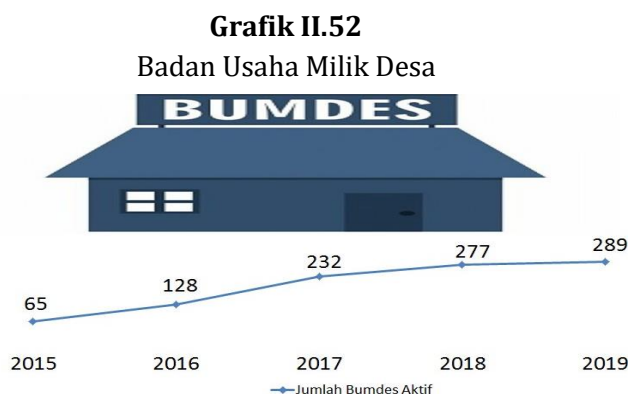
Sumber: DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil dari tahun 2016-2020 meningkat setiap tahunnya. Masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk tercatat pada tahun 2018 sebesar 60,41 persen menjadi 74,41 persen (2019). Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah KK yang diterbitkan sebanyak 373.274 (2018) menjadi 396.352 (2019) atau terjadi peningkatan dari 85,54% menjadi 89% dari jumlah KK. Begitupun dengan KTP- Elektronik yang diterbitkan dari 922.235 (2018) menjadi 962.937 (2019) atau meningkat dari 95,69% menjadi 98,34% dari jumlah KTP. Untuk jumlah KIA yang diterbitkan tahun 2019 sebanyak 151.553 dan jumlah anak usia 0-17 tahun berjumlah 422.141. Begitupun dengan masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil pada tahun 2018 sebesar 63,32 persen meningkat menjadi 71,10 persen (2020), artinya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan semakin baik.

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Terdapat beberapa data sektoral yang menjadi kewenangan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya terkait dengan jumlah BUMDes yang aktif.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan LPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, di mana jumlah BUMDes aktif tahun 2015 berjumlah 65 meningkat menjadi 289 di tahun 2019. Terdapat perbedaan status BUMDes tahun 2017 dengan tahun 2018 dikarenakan adanya pembaharuan status yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 tentang petunjuk teknis operasional dan tata cara pemberian bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui program peningkatan dan pendampingan kelembagaan BUMDes di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keterkaitan antara status BUMDes di tahun 2017 dengan tahun 2018 untuk lebih mengetahui BUMDes mana yang benar-benar aktif dan perlu didorong lebih aktif untuk dapat membantu BUMDes tersebut dalam segi keuangan, harapan yang akan didapatkan dengan keaktifan BUMDes adanya bantuan keuangan baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun dana CSR.

b. Lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Kawasan Perdesaan Pengembangan (Budidaya) Lada Putih, Kab. Bangka Selatan

Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu produsen lada putih terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komoditas ini telah dibudidayakan secara turun menurun oleh para petani dari beberapa generasi dan diusahakan seluruhnya sebagai perkebunan rakyat. Pengelolaan yang masih konvensional menyebabkan budidaya tanaman lada memiliki resiko yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan mengusahakan komoditas tanaman perkebunan lainnya. Berbagai faktor ikut mempengaruhi eksistensi usaha budidaya perkebunan tanaman lada yang ada di Kabupaten Bangka Selatan seperti fluktuasi harga, hama penyakit, konversi lahan dan daya saing yang masih rendah.

Bibit lada tersertifikasi dan pupuk organik memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan budidaya tanaman lada, agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Secara alami kebutuhan unsure hara dapat dipenuhi dari media tanah yang baik dan system pengolahan lahan yang benar. Kondisi tanah saat ini banyak mengalami perubahan sehingga kualitas unsur hara dirasakan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Alternatif penyediaan bahan organik sebagai unsur hara baru untuk pertanian khususnya pada areal tanaman lada, dapat dilakukan pada Kegiatan Perluasan Tanaman Lada dengan memanfaatkan pupuk organik sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki struktur tanah. Adapun desa yang dijadikan lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Nasional adalah Desa Air Gegas, Delas, Nyelanding, Air bara, Renggas, Nangka, Payung, Paku, Bedenggung, Irat, dan Sengir.

2. Kawasan Perdesaan Mina-Agrowisata Selat Nasik, Kab. Belitung

Penetapan kawasan perdesaan Mina Agro Wisata Kecamatan Selat Nasik ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Tahun 2017 – 2021. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari beberapa desa dalam wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.

Adapun desa yang dijadikan lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Nasional adalah Desa Suak Gual, Petaling, Selat Nasik, P. Gersik.

3. Kawasan Perdesaan Minapolitan Perikanan Tangkap, Kab. Belitung Timur

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang secara geografis dikelilingi lautan dan selat. Hal ini menyebabkan sektor perikanan didominasi oleh perikanan laut yang diperoleh melalui aktivitas penangkapan. Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km² atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km.

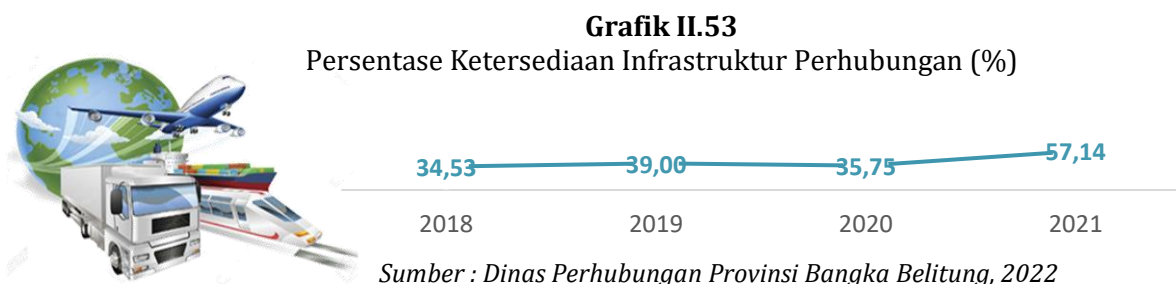
Sumberdaya perikanan tangkap di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 dan potensinya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/MEN/2011 tentang

Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Pangkalan Pendaratan Ikan dan Pelabuhan Perikanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur, PPI Selat Nasik, PPI Gantung, PPI Manggar. Adapun desa yang dijadikan lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Nasional adalah Desa Kurnia Jaya, Baru, dan Mekar Jaya.

9. Urusan Perhubungan

a. Persentase ketersediaan Infrastruktur Perhubungan

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi pada Urusan Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/Perhubungan Darat (pengelolaan terminal penumpang tipe B, penyediaan perlengkapan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas di jaringan jalan provinsi, penyediaan angkutan umum (orang dan/atau barang) antar kota dalam satu provinsi); Pelayaran/Perhubungan Laut (Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional) terdiri dari Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat dan laut serta modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah. Gambaran tentang ketersediaan infrastruktur perhubungan di Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana di bawah ini:



Infrastruktur perhubungan dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepelabuhanan, dan Angkutan Pelayaran. Dari ketiga komponen tersebut, capaian Infrastruktur perhubungan terealisasi pada tahun 2018 sebesar 34.53 persen, Tahun 2019 sebesar 39.00%, Tahun 2020 menurun menjadi 35.75% dan Tahun 2021 meningkat hingga 57.14%. Dari grafik tersebut menunjukkan tren positif penyediaan infrastruktur perhubungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini diharapkan dapat terus ditingkatkan.

Kondisi saat ini, Infrastruktur Perhubungan di Provinsi Kep. Bangka Belitung belum di Kelola oleh Provinsi dan masih berada di bawah kewenangan masing-masing Kabupaten. Infrastruktur tersebut terdiri dari:

- 1 (satu) Terminal Tipe B yang terletak di Kota Pangkalpinang;
- 2 (dua) Pelabuhan Pengumpan Regional yang terletak di Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;
- 2 (dua) Pelabuhan Penyeberangan yakni Pelabuhan Bakit, Kabupaten Bangka Barat dan Pelabuhan Sebetik, Kabupaten Bangka Selatan.

Hal ini dikarenakan belum adanya serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana Pelabuhan, serta dokumen administrasi penyelenggaraan Pelabuhan seperti yang dimanakan pada Pasal 115 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Terkait hasl tersebut, Tahun 2023 baru akan dilakukan rencana pengambil-alihan kewenangan (serah terima) untuk Pelabuhan Regional dan Pelabuhan Penyeberangan yang seharusnya menjadi kewenangan provinsi.

b. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan perlu disusunnya program yang mendukung Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), termasuk di dalamnya untuk penyediaan data kecelakaan dan data daerah rawan kecelakaan.

Tabel II.61
 Daerah Rawan Kecelakaan (*Black Spot*)

Kab/Kota	Status Jalan	KOORDINAT BLACKSPOT	
		Lokasi	Koordinat
Belitung	Nasional	Jl Jenderal Sudirman	-2.749753, 107.693936
	Nasional	Jl Tanjung Kelayang	-2.704343, 107.621489
	Kabupaten	Jl Air Saga	-2.719674, 107.637762
Bangka	Nasional	Jl. Raya Pangkalpinang Muntok, Ds Puding Besar	-2.010127, 105.932747
	Nasional	Jl, Raya Sungailiat - Belinyu, Kec, Riausilip	-1.746168, 105.947695
Bangka Tengah	Nasional	Jl. Raya Pangkalpinang - Koba Ds. Kurau	-2.324898, 106.221386
	Provinsi	Jl. Raya Pangkalpinang - Simpang Katis Ds. Terak	-2.275848, 106.070209
Belitung Timur	Nasional	Jl. Raya Manggar - Tj. Pandan, Ds. Padang, U-Turn Bengkel Joni	-2.871039, 108.263980
Bangka Selatan	Nasional	Jl. Air Bara - Toboali (Tikungan Air Gegas, Kec. Air Gegas)	-2.665873, 106.377886
	Nasional	Jl. Toboali - Sadai (ujung Desa Pasir Putih)	-3.016187, 106.738952

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Tabel II.62
 Jumlah Kecelakaan dan Korban Kecelakaan Tahun 2015-2021

No	Tahun	Kejadian	Korban			Rumat
			MD	LB	LR	
1	2015	250	192	126	162	1.224.850.000
2	2016	228	192	117	143	941.550.000
3	2017	230	207	132	169	1.475.350.000
4	2018	275	206	127	136	1.283.000.000
5	2019	326	179	178	101	2.118.347.800

No	Tahun	Kejadian	Korban			Rumat
			MD	LB	LR	
6	2020*	292	133	171	124	800.000.000
7	2021*		108	69	121	812.000.000

Sumber:

Tahun 2015-2019: Korlantas Polri, 2020 dalam Buku Potret Keselamatan Lalu Lintas di Indonesia Edisi 4, 2020

Tahun 2020-2021: Data Lakalantas Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2021. Untuk Data Tahun 2021 hingga per Agustus 2021

Perlengkapan jalan berperan penting untuk mendukung ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Perlengkapan jalan raya inilah yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien.

Tabel II.63
Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun 2002 - 2021

No.	Jenis Perlengkapan Jalan	Satuan	Jumlah Pemasangan
1	Paku Jalan	Unit	2998
2	Rambu Petunjuk Pengarah Jurusan	Unit	237
3	Rambu Jalan	Unit	2227
4	Delineator	Unit	3725
5	Pagar Pengaman	Meter	920
6	Traffic Light (APILL)	Set	10
7	Warning Light	Set	12
8	Marka Jalan	M ²	57080
9	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Unit	592

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Bangka Belitung sejak tahun 2002-2021 sebesar 39,46% terdiri dari Paku Jalan sebanyak 2998 Unit, Rambu Petunjuk Pengarah Jurusan sebanyak 237 Unit, Rambu Jalan sebanyak 2227 Unit, Delineator sebanyak 3725 Unit, Pagar Pengaman 920 meter, *Traffic Light*(APILL) sebanyak 10 set, Warning Light sebanyak 12 set, Marka Jalan sebanyak 57080 M², Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sebanyak 592 Unit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 diamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek (RUJT). Terkait hal ini, Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung baru akan disusun RUJT pada Tahun 2023, dan untuk nilai rasio izin trayek, telah terlayani di atas 80% per Tahun 2020.

c. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan

Klasifikasi Pelabuhan di Provinsi kep. Bangka Belitung terdiri dari 3 (tiga) kategori yakni Pelabuhan Pengumpan (PP), Pelabuhan regional (PR), dan Pelabuhan Lokal (PL). Pelabuhan Pengumpan (PP) sejumlah 8 (delapan) pelabuhan, Pelabuhan Regional (PR) sejumlah 2 (dua) pelabuhan dan Pelabuhan Lokal sejumlah 8 (delapan) pelabuhan. Dari 18 Pelabuhan tersebut, yang telah beroperasi sebanyak 6 (enam) pelabuhan, 3 (tiga) digunakan sebagai tambat kapal nelayan, 1 (satu) Pelabuhan tidak beroperasi, dan sisanya masih dalam proses dokumen/pembangunan.

Tabel II.64
Klasifikasi Pelabuhan di Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Nama	Lokasi	Panjang Dermaga (m)	Kapal Berdasarkan DWT	Otoritas	Ket.	Ket
1	Pangkal Balam	Pk. Pinang	60;68;55;71 = 254 m	2 ton/m ² ;3 ton/m ²	PT Pelabuhan Indonesia II	Beroperasi	PP
2	Tanjung Gudang	Bangka	1515 m	50 ton / m2	PT. Pelabuhan Indonesia II	Beroperasi	PP
3	Tanjung Pandan	Belitung	4200 m2	2,5 ton / m2	Administrasi pelabuhan	Beroperasi	PP
4	Tanjung Batu	Belitung	204 m	8000 ton	Kemenhub	Beroperasi	PP
5	Sadai	Bangka Selatan	175 m ²	3000 ton	Kemenhub	Beroperasi	PP
6	Toboali	Bangka Selatan	171 m		Kantor UPP Toboali	Digunakan untuk Tambat Kapal Nelayan	PP
7	Tanjung Ular	Bangka Barat	-	-		Sedang Proses Pembangunan	PP
8	Mentok	Bangka Barat	30 m	2 ton/m ²	PT Pelabuhan Indonesia II	Digunakan untuk Tambat Kapal Nelayan	PR
9	Sungai Selan	Bangka Tengah	50 m ²	200 ton	PEMDA Kabupaten	Beroperasi	PR
10	Jelitik	Bangka	100 m ¹	200 ton	PEMDA Kab Bangka	Digunakan untuk Tambat Kapal Nelayan	PL
11	Manggar	Belitung Timur	65,5 m	2,5 ton / m2	Kemenhub	Tidak beroperasi	PL
12	Ninjuk/ Tuing	Bangka	-	-	BUMD	Sedang Persiapan Studi	PL
13	Pulau Liat	Bangka Selatan	-	-	Kabupaten	FS, SID, DED	PL
14	Tanjung Gading	Bangka Selatan	-	-	Kabupaten	FS, SID, DED	PL
15	Pulau Besar	Bangka Selatan	-	-	Kabupaten	FS	PL
16	Pulau Gersik	Belitung	-	-	Kabupaten	FS	PL
17	Pulau Siliu	Belitung	-	-	Kabupaten	FS	PL
18	Dendang	Belitung Timur	-	-	Kemenhub	FS, SID, RIP, DLKR/DLKP	PP

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2022

d. Persentase Rute Pelayaran yang terfasilitasi

Rute pelayaran yang beroperasi di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang melayani Pulau Bangka berjumlah 12 rute dan Pulau Belitung berjumlah 6 rute, yang detailnya terlihat dalam tabel berikut.

Tabel II.65
Rute Pelayaran di Provinsi Kep. Bangka Belitung

NO	RUTE	TRIP KAPAL	UKURAN (GT)	ASAL	TUJUAN
Pulau Bangka					
1	Bangka - Belitung	KM. Express Bahari 3A	252	Pk. Balam	Tg. Pandan
2	Bangka Selatan - Belitung	KM. Menumbing Raya	652	Sadai	Tg. Ru
3	Bangka Selatan - Belitung	KM.Gorare	236	Sadai	Tg. Ru
4	Tg. Api - Tg Kelian	Feri 9 Unit		Tg. Kalian	Tg .Api - Api
5	Bangka Selatan- Beltim	KM. Sabuk Nusantara 30	1202	Sadai	Manggar
6	Tg. Priok - Belinyu	Pelni KM. Bukit Raya	6022	Tg Priok	Belinyu
7	Belinyu - Kijang	Pelni KM. Bukit Raya	6022	Belinyu	Kijang
8	Pekajang - Belinyu	KM Sabuk Nusantara 48	2090	Belinyu	Pekajang
9	Jakarta - Pangkalpinang	KM. Srikandi	1914	Tg. Priok	Pk. Balam
10	Selan - Palembang	KM. Lawit	6022	Selan	Palembang
11	Jakarta - Selan	Kapal Klm	150-250	Sunda Kelapa	Selan
12	Oki (Sumsel)- Bangka	Jejofern Faster	27	Kelian (Muntok)	Sunsang
Pulau Belitung					
1	Belitung - Bangka	KM. Express Bahari 3A	252	Tg. Pandan	Pk. Balam
2	Beltim - Ketapang	KM. Sabuk Nusantara 30	1202	Sadai	Manggar
3	Bangka Selatan- Beltim	KM. Sabuk Nusantara 30	1202	Sadai	Manggar
4	Jakarta - Belitung	Star Belitung	2534	Tg. Priok	Tg. Pandan
5	Belitung - Pontianak	KM. Lawit	6022	Tg.Batu	Dwikora
6	Jakarta - Belitung	KM. Lawit	6022	Tg. Priok	Tg. Batu

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2022

Tabel II.66
Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Nama	Lokasi	Otoritas	Status	Ket
1	Tanjung Kalian	Bangka Barat	PT ASDP Indonesia Ferry	Beroperasi	ASDP
2	Sadai	Bangka Selatan	Kemenhub	Beroperasi	ASDP
3	Tanjung RU	Belitung	Kemenhub	Beroperasi	ASDP
4	Manggar	Belitung Timur	Kemenhub	Tidak beroperasi	ASDP
5	Tanjung Gading	Belitung	Kemenhub	Sarana sudah Siap, operasi menunggu SK Menteri	ASDP
6	Tanjung Nyato	Belitung	Kemenhub	Sarana sudah Siap, operasi menunggu SK Menteri	ASDP

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2022

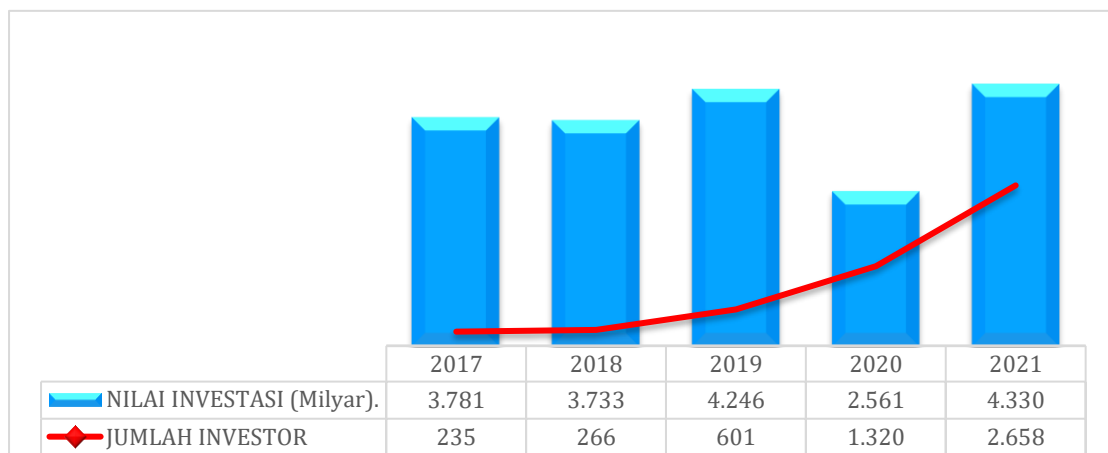
Pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 6 (enam) pelabuhan yang terdiri dari 2 (dua) pelabuhan di Pulau Bangka, dan 4 (empat) pelabuhan di Pulau Belitung yang sebagian besar dibawah otoritas Kementerian Perhubungan kecuali Pelabuhan Tj. Kalian di Kabupaten Bangka Barat yang berada di bawah otoritas PT. ASDP Indonesia Ferry.

10. Urusan Penanaman Modal

a. Nilai Investasi

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Selanjutnya peningkatan stok modal akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir ditunjukkan oleh tabel berikut.

Grafik II.54
Nilai Investasi Provinsi Kep. Bangka Belitung
Tahun 2017-2021



Sumber: DMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Capaian investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017-2021 relatif meningkat seiring dengan peningkatan jumlah investor. Namun mengalami penurunan di tahun 2020 seiring merebaknya wabah virus Corona. Wabah COVID-19 telah memberikan dampak serius pada hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah investasi. Adanya berbagai pembatasan di suatu wilayah sudah tentu berimbas pada aktivitas ekonomi.

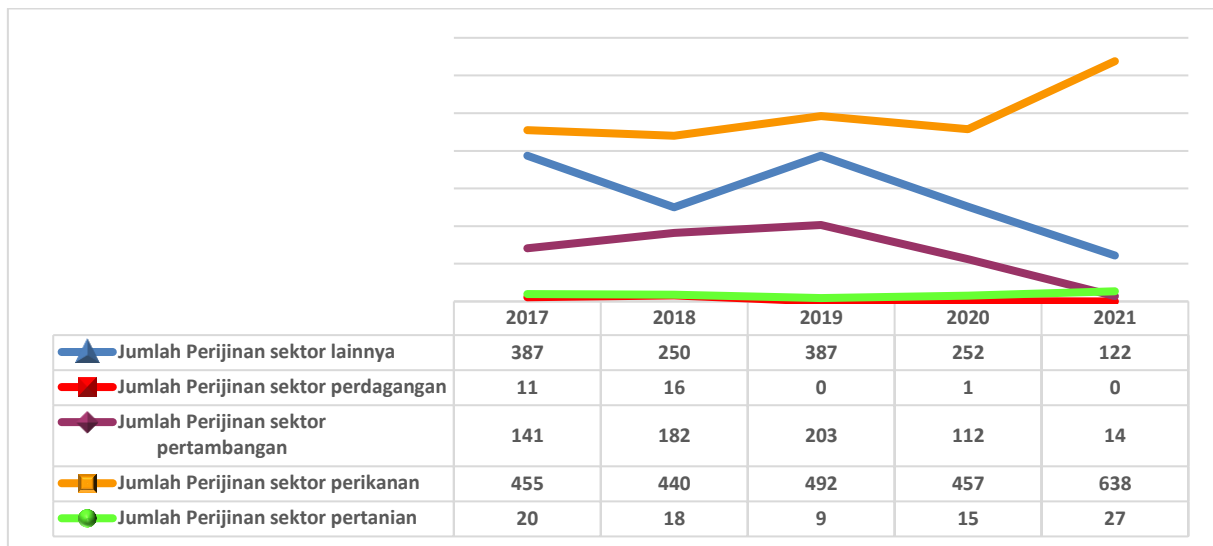
Perkembangan nilai investasi dari sebesar 3.781 Milyar (2017) menjadi sebesar 4.330 Milyar (2021). Nilai investasi sebesar 4.330 Milyar dengan rincian 3.677 Milyar PMDN

dan 652 Milyar PMA. Nilai investasi ini meliputi 2.371 proyek untuk PMDN dan 287 proyek untuk PMA. Meskipun nilai investasi mengalami penurunan ditahun 2020, namun jumlah investor tetap meningkat.

b. Jumlah Data Perizinan yang Update

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Pemerintah meluncurkan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*) untuk mempermudah pengurusan perizinan investasi. Ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.

Grafik II.55
Jumlah Perizinan



Sumber: DMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Data perizinan dari tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan. Perizinan didominasi oleh sektor perikanan, pertambangan, dan sektor lainnya. Capaian perizinan sektor perikanan meningkat dari tahun 2017-2021, dimana pada tahun 2017 sebanyak 455 perizinan yang diterbitkan hingga tahun 2021 mencapai 638 perizinan yang diterbitkan. Perizinan sektor pertambangan mengalami penurunan dari 141 di tahun 2017 menjadi 14 di tahun 2021. Meskipun pada tahun 2019 mengalami peningkatan tertinggi mencapai angka 203. Sedangkan perizinan sektor lainnya didominasi oleh perizinan kesehatan, UMKM, dan lain sebagainya. Jumlah perizinan sektor lainnya mencapai 122 di tahun 2021, menurun sebanyak 130 dari tahun sebelumnya. Sejak tahun 2018, Semua perizinan telah terlayani menggunakan sistem perizinan tunggal oleh sistem *Online Single Submission* (OSS). Dalam sistem OSS ini syarat pokok ada tiga yaitu izin lokasi, izin IMB, dan izin lingkungan yang wajib bagi pelaku usaha. Dengan OSS perizinan lebih mudah dan tanpa dipungut biaya.

11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Rumusan Indikator Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan formula pencapaian pembangunan kepemudaan berdasarkan rata-rata sederhana dari indeks setiap dimensi yang telah ditentukan dengan bobot tertentu pula untuk setiap indeksinya. Dimensi tersebut meliputi domain Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Ketenagakerjaan dan Kesempatan, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi.

Grafik II.56

Indeks Pembangunan Pemuda



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

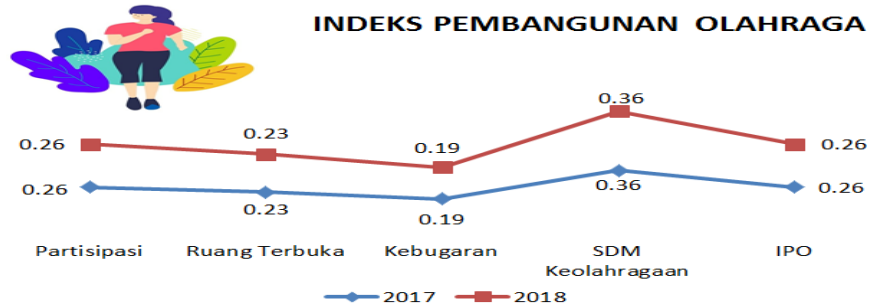
Hasil Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat kemajuan dalam beberapa tahun dengan kenaikan 6,84 poin dari indeks 46,83 di tahun 2015 menjadi 53,67 di tahun 2018. Ini merupakan hal yang positif dimana harapan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengembangan potensi intelektual dan keterampilan pemuda dalam mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu peningkatan kualitas pemuda harus tetap dilakukan dengan memberikan pengembangan potensi diri untuk memperkaya *hard skill* dan *soft skill* guna menyiapkan mereka menjadi generasi hebat penerus bangsa.

b. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Olahraga memiliki peran yang semakin penting dan strategis dalam kehidupan era global yang penuh perubahan, persaingan, dan kompleksitas. Indeks Pembangunan Olahraga diukur meliputi dimensi Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran dan SDM Keolahragaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik II.57

Indeks Pembangunan Olahraga



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Hasil Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 menunjukkan bahwa (1) Indeks partisipasi 0,26, (2) Indeks ruang terbuka 0,23, (3) Indeks kebugaran 0,19 (4) Indeks SDM Keolahragaan 0,36 dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 0,26. Kesimpulannya adalah Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada kategori kurang karena Indeks total IPO yang meliputi Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran dan SDM Keolahragaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,26 berada direntang 0,24-0,49. Artinya bahwa pembangunan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintah dan semua lapisan masyarakat agar pembangunan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa lebih baik.

12. Urusan Komunikasi dan Informasi

a. Persentase Jumlah layanan infrastruktur teknologi dan Kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government.

Layanan Infrastruktur teknologi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Layanan akses internet yang diperuntukan pada instansi Pemerintah dan Instansi Pelayanan kepada Publik serta Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data yang sudah terintegrasi pada Data Center Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyediaan Jaringan internet untuk kebutuhan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam supporting Akses Layanan Aplikasi di antaranya Aplikasi SiRUP, e-Monev, TEPR, Website seluruh perangkat daerah, email resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan layanan Interaksi tatap muka berbasis video interaktif, serta Layanan *Hotspot* kepada Publik yang diprioritaskan pada tempat-tempat wisata yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik II.58

Layanan Infrastruktur Teknologi dan Kapasitas Layanan Publik Pemerintah Berbasis E-Government



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Layanan Infrastruktur teknologi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 hanya sebesar 60%. Layanan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sudah mencapai 75% dan tahun 2018 sebesar 85%. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 90%, dan pada tahun 2020 sebesar 97%. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan Layanan infrastruktur jaringan data (Data Center) yang fasilitas Ruang Server dengan kapasitas 6 unit rack dengan 60 kVA, Untuk penempatan Server aplikasi Perangkat Daerah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Selain Data Center Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyediakan Layanan IDC yang terletak pada Duren Tiga Jakarta yang berfungsi sebagai *Back Up* Data pada Data Center Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

13. Urusan Statistik

a. Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan

Pada urusan statistik, terutama statistik sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah, ketersediaan data serta *up-dating* data dan informasi yang akurat menjadi hal yang penting untuk diperkuat, terutama kaitannya sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, selain itu data tersebut dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing.

Grafik II.59

Data dan Informasi Statistik yang Digunakan
Untuk Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pemanfaatan data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pada tahun 2016 hanya 25 persen. Namun pada tahun 2019 pemanfaatan data sudah mencapai 95 persen. Data sektoral sudah menjadi pusat data dengan menyajikan data dasar dan informasi terbaru diberbagai bidang dan sektor pembangunan Provinsi Bangka Belitung sehingga proses perencanaan dan pengendalian pembangunan menjadi semakin baik. Data dan informasi ini meliputi data di sektor ekonomi, sumber daya manusia, sarana prasarana masyarakat dan peran serta masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara terus menerus mengingat data dasar pembangunan merupakan data bergerak yang dapat berubah sewaktu waktu.

Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya seperti perpindahan penduduk, investasi yang terjadi, kebijakan pemerintah dan sebagainya.

14. Urusan Persandian

a. Indeks Kematangan Keamanan Informasi

Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) merupakan agregate nilai pelaksanaan kontrol pengamanan informasi terhadap fungsi tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, teknologi dan keamanan informasi. Secara umum Indeks Kematangan Keamanan Informasi memiliki 5 (lima) level I-V. Level V merupakan level kematangan paling tinggi sebagai level paling ideal.



Berdasarkan data diatas Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015-2017 belum terhitung atau masih nol. Sedangkan pada tahun 2018 Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) yaitu 1 atau berada pada level I (sangat kurang/nonexistent/kondisi awal) serta tahun 2018 dan 2019 meningkat yaitu 2 atau berada pada level II, dimana level ini masih berada pada kondisi awal penerapan keamanan informasi dan kondisi penerapan kerangka kerja dasar penerapan keamanan informasi.

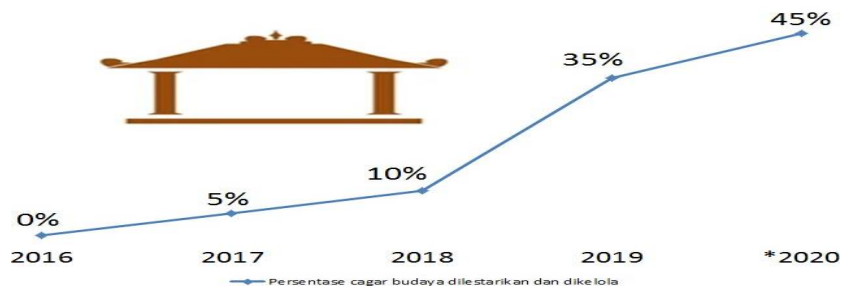
15. Urusan Kebudayaan

a. Persentase Cagar Budaya Dilestarikan dan Dikelola

Aspek kebudayaan antara lain meliputi pelayanan berkaitan dengan kesenian dan kepurbakalaan, melindungi keberadaan bangunan cagar budaya, pelestarian seni budaya tradisional, dan memberdayakan kebudayaan tradisional melalui regulasi kegiatan secara berkala. Provinsi Bangka Belitung kaya dengan potensi cagar budaya yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Terdata pada tahun 2019 sebanyak 309 potensi objek cagar budaya, diantaranya telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 33 objek dengan rincian dua objek merupakan cagar budaya peringkat Nasional, dan 31 objek merupakan cagar budaya peringkat Kabupaten.

Grafik II.61

Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data diatas cagar budaya Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2017 hanya sebesar 5 persen yang dikelola dan dilestarikan. Namun pada tahun 2018 meningkat sebesar 10 persen dan di tahun 2019 sebesar 35 persen. Keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengelola cagar budaya dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya sehingga diharapkan pada tahun 2020 terdapat peningkatan dalam pengelolaan cagar budaya menjadi sebesar 45 persen.

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peranan yang penting dalam keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Nilai karakter yang positif dan kuat menjadi nilai budaya dan sikap mental yang sangat diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan dikarenakan nilai budaya dan sikap mental yang kuat dan positif mendorong produktivitas dan kemajuan sebuah bangsa. Dilatarbelakangi hal tersebut, Indonesia kemudian mengukur capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang disusun berdasarkan framework Culture Development Indicators atau CDIs yang dikembangkan oleh UNESCO. Dari tahun 2018 sampai dengan 2020, IPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2018 mencapai 54,37, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 56,62, dan pada tahun 2020, capaian ini kembali turun menjadi 54,70.

Dari tujuh (7) dimensi yang diukur dalam IPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya dan Dimensi Budaya Literasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya pada tahun 2018 sebesar 72,02 meningkat menjadi 72,95 pada tahun 2019 dan 73,37 pada tahun 2020. Capaian Dimensi Budaya Literasi sebesar 54,99 pada tahun 2018 meningkat menjadi 59,76 pada tahun 2019, dan naik menjadi 61,87 pada tahun 2020. Sementara itu, lima (5) dimensi lainnya bersifat fluktuatif, Dari semua dimensi tersebut, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya selama periode 2018-2020 selalu mencapai angka tertinggi dibanding dengan keenam dimensi lainnya.

Tabel II.67

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020

No.	Dimensi	2018	2019	2020
D1	Ekonomi Budaya	25,53	32,86	23,49
D2	Pendidikan	70,21	72,75	70,68
D3	Ketahanan Sosial Budaya	72,02	72,95	73,37

No.	Dimensi	2018	2019	2020
D4	Warisan Budaya	51,34	52,60	49,06
D5	Ekspresi Budaya	24,83	26,13	25,07
D6	Budaya Literasi	54,99	59,76	61,87
D7	Gender	51,15	49,18	51,67
IPK Provinsi Bangka Belitung		54,37	56,62	54,70

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2021

Dimensi Ekonomi Budaya diukur berdasarkan persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) bersifat fluktuatif, yakni dengan capaian sebesar 0,26 pada tahun 2018, lalu naik menjadi 0,33 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, capaian ini turun menjadi 0,23. Pada Dimensi Pendidikan yang salah satu indikatornya diukur rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas terus mengalami peningkatan, yaitu dari 7,84 persen pada tahun 2018 menjadi 7,98 persen pada tahun 2019 dan 8,06 persen pada tahun 2020. Pada indikator persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan yang signifikan, yakni dari 80,78, persen pada tahun 2018 menjadi 75,31 persen pada tahun 2019 dan 70,84 persen pada tahun 2020.

Selanjutnya, persentase partisipasi pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termiskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bersifat fluktuatif, yakni sebesar 86,06 persen pada tahun 2018, kemudian naik menjadi 88,93 persen pada tahun 2019, dan turun kembali menjadi 88,20 persen pada tahun 2020. Capaian terendah dari enam (6) indikator Dimensi Pendidikan berada pada indikator persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya, dimana pada tahun 2018 sebesar 22,85 persen meningkat menjadi 30,12 persen pada tahun 2019, lalu turun menjadi 26,64 persen pada tahun 2020.

Tabel II.68

Capaian Dimensi Ekonomi Budaya dan Dimensi Pendidikan
 Berdasarkan Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020

No.	Dimensi	Indikator	2018	2019	2020
D1	Ekonomi Budaya	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	0,26	0,33	0,23
D2	Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) 25 tahun ke atas	7,84	7,98	8,06
D2	Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,87	11,94	12,05
D2	Pendidikan	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	85,44	85,8	85,14
D2	Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya	22,85	30,12	26,64
D2	Pendidikan	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	80,78	75,31	70,84

No.	Dimensi	Indikator	2018	2019	2020
D2	Pendidikan	Partisipasi pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori 40% termisikin	86,06	88,93	88,20

Sumber: Statistik Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2021

Dari Dimensi Ketahanan Sosial Budaya selama periode 2018-2020, enam (6) dari delapan (8) indikator penyusun dimensi ini terus meningkat. Sementara itu, dua (2) indikator lainnya, yakni pada persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku dan indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong terus menurun meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan. Persentase masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku pada tahun 2018 sebesar 92,09 persen menurun menjadi 92,06 persen pada tahun 2019 dan 91,14 persen pada tahun 2020. Sementara itu, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengikuti gotong royong pada tahun 2018 sebesar 26,15 persen turun menjadi 25,71 persen pada tahun 2019 dan 25,35 persen pada tahun 2020. Capaian terendah dari indikator Dimensi Pendidikan terdapat pada persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong sebagaimana dengan capaian yang telah diuraikan sebelumnya dan pada persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir, yakni sebesar 27,62 persen pada tahun 2018, lalu meningkat menjadi 27,65 persen pada tahun 2019 dan 27,69 persen pada tahun 2020.

Tabel II.69

Capaian Dimensi Ketahanan Sosial Budaya Berdasarkan Indikator
 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2020

No.	Dimensi	Indikator	2018	2019	2020
D3	Ketahanan Sosial Budaya	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	77,78	80,01	81,67
D3	Ketahanan Sosial Budaya	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	84,22	87,23	88,60
D3	Ketahanan Sosial Budaya	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang beda agama.	89,63	91,20	92,41
D3	Ketahanan Sosial Budaya	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku.	92,09	92,06	91,14
D3	Ketahanan Sosial Budaya	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir	79,42	80,54	81,04
D3	Ketahanan Sosial Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	26,15	25,71	25,35

No.	Dimensi	Indikator	2018	2019	2020
D3	Ketahanan Sosial Budaya	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir	27,62	27,65	27,69
D3	Ketahanan Sosial Budaya	Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal	82,10	82,16	82,14

Sumber: Statistik Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2021

Dari enam (6) indikator Dimensi Warisan Budaya, persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan terhadap total registrasi menurun, yaitu 5,13 persen pada tahun 2018 menjadi 5,10 persen pada tahun 2019 dan 5,02 persen pada tahun 2020. Persentase warisan budaya takbenda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan terhadap total registrasi juga terus mengalami penurunan, yakni dari tahun 2018 sebesar 19,15 persen menjadi 17,22 persen pada tahun 2019 dan 16,67 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari juga terus menurun dari 96,47 persen pada tahun 2018 menjadi 95,89 persen pada tahun 2019 dan 93,18 persen pada tahun 2020. Persentase masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menggunakan produk tradisional juga terus menurun dari 47,37 persen pada tahun 2018 menjadi 47,32 persen pada tahun 2019 dan 42,76 persen pada tahun 2020.

Sementara itu, indikator-indikator lainnya pada Dimensi Warisan Budaya bersifat fluktuatif, seperti pada persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengunjungi peninggalan sejarah/wardun pada tahun 2018 sebesar 12,40 persen naik menjadi 14,54 persen pada tahun 2019, lalu kemudian turun menjadi 12,10 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni juga mengalami fluktuatif dari 50,25 pada tahun 2018 naik menjadi 53,73 persen pada tahun 2019 dan turun menjadi 50,50 persen pada tahun 2020. Dari seluruh indikator Dimensi Warisan Budaya, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari memiliki capaian tertinggi meskipun capaian ini terus mengalami penurunan selama periode 2018-2020.

Tabel II.70

Capaian Dimensi Warisan Budaya dan Ekspresi Budaya
 Berdasarkan Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2020

No.	Dimensi	Indikator	2018	2019	2020
D4	Warisan Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	5,13	5,10	5,02
D4	Warisan Budaya	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	19,15	17,22	16,67
D4	Warisan Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	96,47	95,89	93,18

No.	Dimensi	Indikator	2018	2019	2020
D4	Warisan Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	50,25	53,73	50,50
D4	Warisan Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/wardun	12,40	14,54	12,19
D4	Warisan Budaya	Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional	47,37	47,32	42,76
D5	Ekspresi Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir	5,95	6,29	6,65
D5	Ekspresi Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	4,77	4,55	4,20
D5	Ekspresi Budaya	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	1,19	1,22	0,93
D5	Ekspresi Budaya	Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat	17,38	19,50	19,71

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2021

Dari empat (4) indikator pada Dimensi Ekspresi Budaya, indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir pada periode 2018-2020 terus meningkat dari 45,95 persen pada tahun 2018 menjadi 6,29 persen pada tahun 2019 dan 6,65 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga meningkat dari 17,38 persen pada tahun 2018 menjadi 19,50 persen dan 19,71 persen pada tahun 2020. Sementara itu, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi mengalami penurunan, yaitu dari 4,77 persen pada tahun 2018 menjadi 4,55 persen pada tahun 2019 dan 4,20 persen pada tahun 2020. Persentase penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni bersifat fluktuatif, yakni dari 1,19 persen pada tahun 2018 naik menjadi 1,22 persen pada tahun 2019 dan kembali turun menjadi 0,93 persen pada tahun 2020.

Tabel II.71
Capaian Dimensi Budaya Literasi
Berdasarkan Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2020

No.	Dimensi	Indikator	2018	2019	2020
D6	Budaya Literasi	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir	46,58	46,14	46,03
D6	Budaya Literasi	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir	40,82	49,49	54,67
D6	Budaya Literasi	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	12,60	13,79	13,89

No.	Dimensi	Indikator	2018	2019	2020
D7	Gender	Rasio Tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	59,89	56,51	57,65
D7	Gender	Rasio penduduk 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SM/Sederajat	86,42	83,59	92,70
D7	Gender	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	7,14	7,44	4,65

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2022

Pada Dimensi Budaya Literasi, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir selama periode 2018-2020 mengalami penurunan dari 46,58 persen pada tahun 2018 menjadi 46,14 persen pada tahun 2019 dan 46,03 persen pada tahun 2020. Sebaliknya, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir mengalami peningkatan dari 40,82 persen pada tahun 2018 menjadi 49,49 persen pada tahun 2019 dan 54,67 persen pada tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi pada persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat mengalami peningkatan, yaitu dari 12,60 persen pada tahun 2018 menjadi 13,79 persen pada tahun 2019 dan 13,89 persen pada tahun 2020.

Pada Dimensi Gender, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki, rasio penduduk 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SM/Sederajat dan rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki bersifat fluktuatif, yaitu dari 59,89 pada tahun 2018 turun menjadi 56,51 pada tahun 2019, lalu meningkat kembali menjadi 57,65 pada tahun 2020. Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki mengalami fluktuatif, yaitu dari 7,14 meningkat menjadi 7,44 pada tahun 2019 dan kemudian turun menjadi 4,65 pada tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi pada rasio penduduk 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SM/Sederajat dimana pada tahun 2018 mencapai 86,42, kemudian turun menjadi 83,59 pada tahun 2019 dan kembali meningkat secara signifikan menjadi 92,70 pada tahun 2020, dan capaian ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan dua (2) indikator lainnya dari Dimensi Gender.

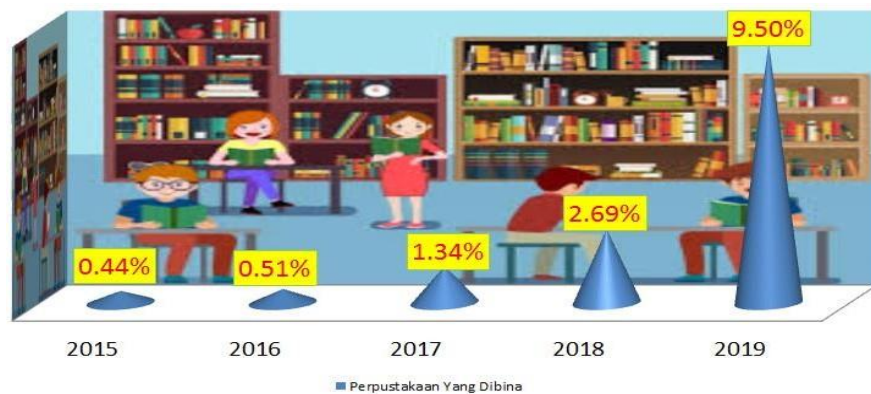
16. Urusan Perpustakaan

a. Persentase Perpustakaan Yang Dibina

Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Pentingnya keberadaan lembaga perpustakaan sebagai media belajar bagi masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang maju untuk mendukung pembangunan daerah.

Grafik II.62

Persentase Perpustakaan yang Dibina



Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa dari tahun 2015-2019 persentase perpustakaan yang dibina meningkat dari 0.44 persen (2015) menjadi 9,50 persen (2019) dari 1.560 perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dilakukan pembinaan perpustakaan adalah memperkuat peran perpustakaan provinsi dalam peningkatan kemampuan literasi dan pengembangan perpustakaan ditingkat kabupaten/kota dan desa. Dengan adanya pembinaan perpustakaan maka kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan, pengelolaan perpustakaan serta sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai, dapat meningkat dengan baik. Maka dari itu pembinaan perpustakaan sangat penting dan perlu didukung oleh semua pihak.

b. Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan

Salah satu bentuk pelayanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya tercermin dalam koleksi bahan pustaka lengkap yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan kebutuhan pemustaka. Jika kebutuhan informasi tinggi, maka tingkat ketersediaan koleksi pun harus tinggi dan selaras dengan kebutuhan informasi tersebut. Kelengkapan koleksi itulah yang menjadi daya tarik pemustaka untuk kemudian kembali berkunjung dan memanfaatkan informasi yang tersedia secara terus menerus.

Grafik II.63

Koleksi Buku di Perpustakaan



Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2016 berjumlah 21.137, di tahun 2017 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah meningkat menjadi 23.055 dan pada tahun 2018 terjadi penyusutan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sehingga berjumlah 22.379. Pada tahun 2019 koleksi buku kembali meningkat berjumlah 24.429 dan 2020 juga meningkat dengan jumlah 26.600.

17. Urusan Kearsipan

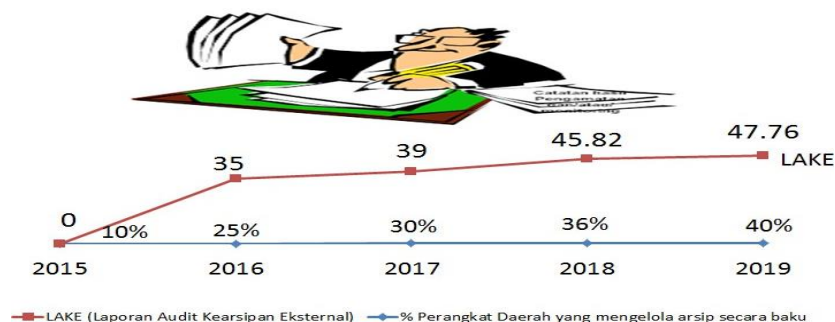
a. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standard Baku Kearsipan

Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) adalah laporan yang disusun berdasarkan laporan hasil audit penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan daerah. Untuk meningkatkan nilai LAKE banyak aspek/sub aspek yang menjadi penilaian di antaranya:

- 1) Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan (tata naskah dinas; klasifikasi arsip; sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; jadwal retensi arsip; pedoman pengolahan arsip inaktif; pedoman penyusutan arsip);
- 2) Pedoman pengelolaan arsip vital (Program Kearsipan, Pengolahan Arsip Inaktif dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 tahun, Penyusutan Arsip, Pengelolaan Arsip Statis, SDM Kearsipan, Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Kearsipan).

Grafik II.64

Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Standar Baku



Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Grafik di atas dapat menjelaskan nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 belum ada penilaian LAKE. Namun mulai tahun 2016 LAKE (Laporan Kearsipan Eksternal) sudah dinilai dengan angka 35. Pada tahun 2017 nilai LAKE meningkat sebesar 38 dan terus meningkat menjadi sebesar 45,82 (2018). Sampai dengan tahun 2019 nilai LAKE Bangka Belitung sebesar 47,76 (berpredikat “buruk”).

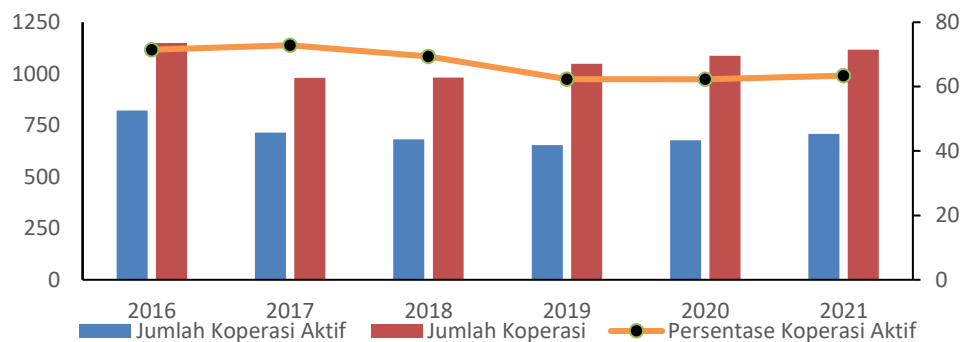
18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting terhadap pencapaian target sasaran kinerja pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan mendasar pada urusan ini antara lain adalah: masih lemahnya pengawasan terhadap koperasi, rendahnya kapasitas SDM Koperasi, rendahnya akses anggota koperasi dan UMKM terhadap akses permodalan yang ada, belum optimalnya sarana pemasaran yang salah satunya melalui pasar tradisional, pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM yang juga masih belum optimal, serta pengembangan skala usaha yang masih cenderung mengalami stagnan.

Grafik II.65

Jumlah Koperasi, Koperasi Aktif dan Persentase Koperasi Aktif
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Persentase koperasi aktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sebesar 71,45% dan meningkat sampai dengan 72,86% di tahun 2017, selanjutnya (2018- 2020) terjadi penurunan persentase koperasi aktif, yaitu sebesar 69,42%, 62,35% dan 62,28% dengan total jumlah koperasi sebanyak 981 Koperasi, 1.049 koperasi dan 1.087 koperasi. Sedangkan pada satu tahun terakhir, yaitu di tahun 2021 terjadi peningkatan kembali persentase koperasi aktif sebesar 63,44% dengan total jumlah koperasi sebesar 1.116 koperasi, ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan eksistensi serta produktifitas koperasi pada satu tahun terakhir.

b. Jumlah UMKM yang Diberdayakan

Di samping perannya bagi perekonomian daerah, UMKM juga terbukti merupakan pelaku usaha yang cukup mandiri, kukuh, fleksibel yang sudah cukup teruji terutama di saat krisis berlangsung, selain juga menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah UMKM meningkat setiap tahunnya, sebagaimana dibawah ini.

Tabel II.72
Jumlah UMKM yang Diberdayakan



	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
2016	257.763	35.387	835	293.985
2017	114.648	35.387	835	150.870
2018	114.573	35.514	861	150.948
2019	124.601	35.724	861	161.186
2020	146.662	36.228	841	183.731
2021	177.198	2.900	86	180.184

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dari tabel di atas, jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 sebesar 293.985 UMKM, pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 150.870 UMKM. Selanjutnya terjadi peningkatan kembali jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung pada kurun waktu 2018-2020, yakni masing-masing sebesar 150.948 (2018), 161.186 (2019) dan 183.731 (2020). Sedangkan pada tahun terakhir, yaitu tahun 2021 terjadi penurunan kembali jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 180.184 UMKM, pada tahun tersebut juga terjadi penurunan jumlah usaha kecil dan menengah, beralih menjadi usaha mikro disebabkan karena sesuai dengan peraturan no 7 tahun 2021, yang menjelaskan bahwa kriteria modal usaha mikro harus memiliki modal usaha sampai dan paling banyak satu milyar rupiah dan kriteria penjualan usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dan paling banyak dua milyar rupiah.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

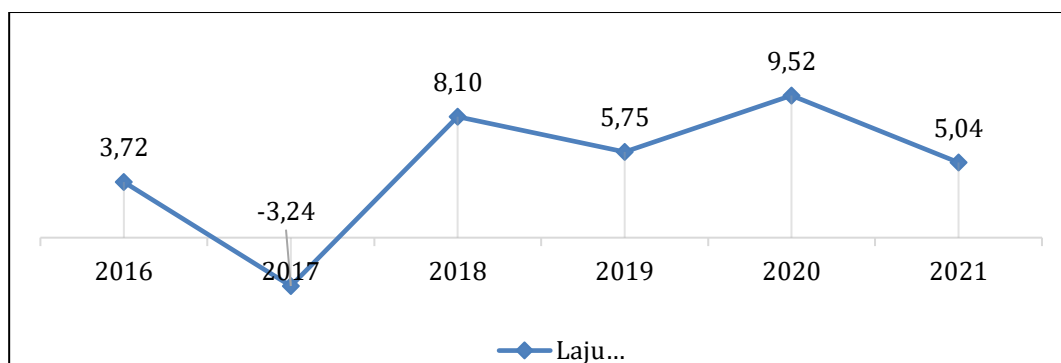
1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan

Sebagai wilayah kepulauan dengan luas laut kurang lebih 65,301.00 km² atau 79.90% dari total wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan garis pantai sepanjang 1.295.83 km, sektor perikanan merupakan salah satu basis ekonomi pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberhasilan capaian pembangunan sektor perikanan dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena pertumbuhan PDRB menggambarkan besarnya pertumbuhan perekonomian daerah.

Grafik II.66

Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan dalam PDRB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



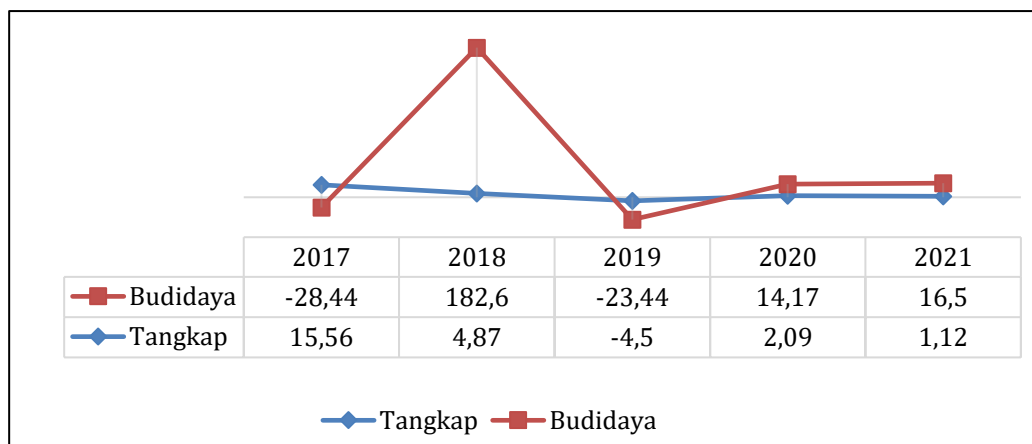
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Laju pertumbuhan PDRB dari sub sektor perikanan dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 terjadi kontraksi sebesar -3,24 persen dimana sebelumnya, yakni pada tahun 2016, pertumbuhannya sebesar 3,72 persen. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan pertumbuhan mencapai 8,10 persen, kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sehingga laju pertumbuhan sebesar 5,75 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 pertumbuhan mencapai 9,52 persen merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode 2016-2021 yang kemudian pada tahun 2021, kembali menurun menjadi 5,04 persen.

b. Pertumbuhan Produksi Perikanan

Perkembangan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018-2021 bersifat fluktuatif. Produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 222.789 ton menjadi 223.680,33 ton pada tahun 2019 dan 228.980,33 ton pada tahun 2018 kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 225.292 ton. Demikian pula dengan produksi perikanan budidaya, pada tahun 2018 tercatat sebesar 9.340,93 ton turun menjadi 7.150,663 ton pada tahun 2019 dan naik pada tahun 2020 menjadi 8.164,26 dan pada tahun 2021 sebesar 9.512,118 ton.

Grafik II.67
Pertumbuhan Produksi Perikanan



Sumber: Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Prov.Kep. Babel Tahun 2021

Selama periode 2017-2021 Laju pertumbuhan produksi perikanan budidaya mengalami fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi produksi perikanan budidaya terjadi di tahun 2018, dengan capaian 182,6 persen. Pada Tahun 2017 dan 2019 terjadi kontraksi laju pertumbuhan sebesar -28,44 persen dan -23,44 persen. Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 14,17 persen dan di tahun 2021 meningkat menjadi 16,5 persen.

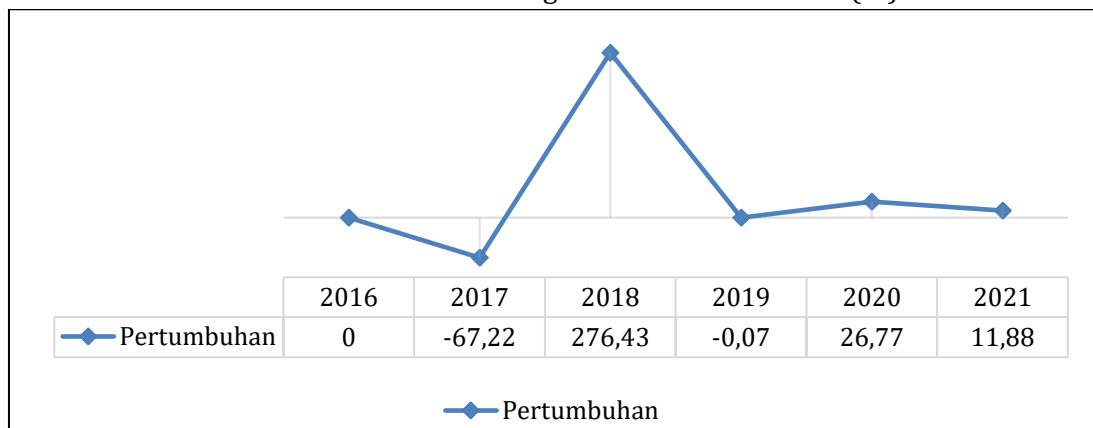
Dalam sektor perikanan tangkap selama periode 2017-2021, laju pertumbuhan tertinggi pertama terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 15,56 persen. Pertumbuhan tertinggi kedua terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,87 persen. Sementara itu, pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2019 dengan capaian sebesar minus 4,5 persen. Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,09 persen dan kembali menurun menjadi 1,12 persen di tahun 2021.

c. Pertumbuhan Produksi Usaha Hasil Pengolahan

Produksi pengolahan hasil perikanan merupakan kegiatan yang mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi lebih tinggi sebagai output. Sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota baik yang berupa Unit Pengolah Ikan (UPI), *coldstorage*, pabrik es dan rumah kemasan yang secara umum dikelola langsung oleh masyarakat ataupun koperasi.

Grafik II.68

Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Selama periode 2016-2021 pertumbuhan produksi usaha pengolahan hasil perikanan cukup mengalami fluktuatif. pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai 276,43 persen. Pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar minus 67,22 persen dan tahun 2016 sebesar 0 persen. Kemudian pada tahun 2019 menurun mencapai minus 0,07 persen, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 26,77 persen dan di tahun 2021 kembali turun menjadi 11,88 persen.

2. Urusan Periwisata

a. Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan kunjungan wisata ke suatu tempat. Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Sedangkan wisatawan domestik yaitu pengunjung yang berasal dari dalam negeri, namun bukan berasal dari daerah yang dikunjungi.

Grafik II.69

Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

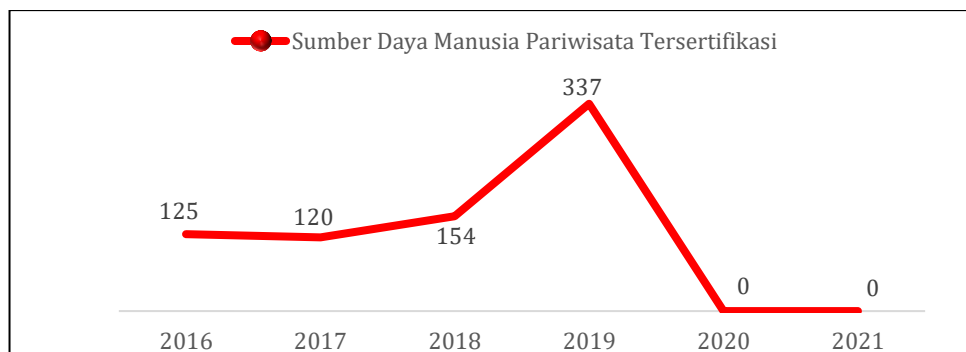
Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan dari tahun 2017-2021 cukup berfluktuatif. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan sebesar 22,07 persen (369.422 wisatawan), ditahun 2018 menurun sebesar 16,03 persen (425.942 wisatawan), tahun 2019 kembali menurun 2,84 persen (438.373 wisatawan) hingga tahun 2020 turun menjadi minus 48,87 persen (223.951 wisatawan). Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan hampir terjadi disetiap kabupaten kota di seluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pariwisata menjadi sektor yang paling terpuak akibat pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami penurunan sangat tajam sepanjang tahun 2020. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat di angka 39,76 persen (313.040 wisatawan). Meskipun jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun meningkat namun peningkatan tersebut tidak signifikan sehingga pertumbuhan kunjungan wisatawan pun menjadi kecil.

b. Persentase Tenaga Pariwisata yang Tersertifikasi

Peningkatan SDM tenaga kerja pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan merupakan bagian penting, baik melalui jalur pendidikan formal seperti sekolah tinggi vokasi maupun jalur pelatihan seperti kursus-kursus, lembaga pelatihan kerja (BLK) dan pemagangan di tempat kerja. Jenis usaha kepariwisataan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 meliputi 13 jenis usaha yaitu : 1) daya tarik wisata, 2) kawasan pariwisata, 3) jasa transportasi wisata, 4) jasa perjalanan wisata, 5) jasa makanan dan minuman, 6) penyediaan akomodasi, 7) penyelenggaraan pertemuan, 8) penyediaan akomodasi, 9) penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, 10) perjalanan insentif, konferensi dan pameran, 11) jasa informasi pariwisata, 12) jasa konsultan pariwisata, dan 13) jasa pramuwisata, Wisata Tirta, dan SPA.

Grafik II.70

Sumber Daya Manusia Pariwisata Tersertifikasi



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Persentase tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun semakin meningkat hingga tahun 2019 seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga pariwisata. Tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2016 sebesar 125 orang, ditahun 2017 menurun sebesar 4,00 persen menjadi 120 orang. Pada tahun 2018 tenaga pariwisata tersertifikasi meningkat sebesar 154 orang dan ditahun 2019 merupakan puncak tertinggi periode 2016 - 2021 sebanyak 337 orang SDM Pariwisata. Namun untuk dua tahun terakhir kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM Pariwisata tersertifikasi tidak dapat diselenggarakan.

3. Urusan Pertanian

a. Rasio Sarana dan Prasarana Pertanian

Sarana dan prasarana pertanian berdampak pada peningkatan produksi pertanian. Dukungan prasarana dan sarana pertanian bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas dan produksi melalui upaya memperluas lahan pertanian pada kawasan tanaman pangan untuk mengimbangi alih fungsi lahan.



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

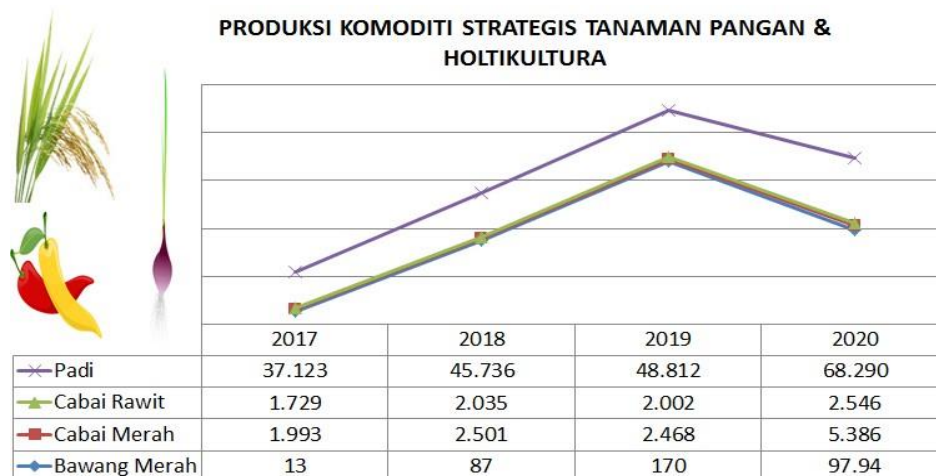
Berdasarkan tabel di atas, rasio ketersediaan sarana dan prasarana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 rasio ketersediaan sarana dan prasarana sebesar 10 persen dan terus meningkat rata-rata 1% per tahun menjadi 14 persen di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 rata-rata peningkatannya mengalami perlambatan hanya meningkat tipis menjadi 14,25%. Hal ini terjadi karena adanya refocusing dan realokasi anggaran pemerintah dalam menghadapi dan menanggulangi dampak pandemic Covid19 yang terjadi. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dipengaruhi oleh besarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti bantuan Saprodi berupa benih unggul dan pupuk kepada setiap Kelompok Tani (Poktan) dan Gapoktan CPCL serta penambahan luas panen. Meningkatnya rasio ketersediaan sarana dan prasarana menunjukkan korelasi positif terhadap peningkatan produksi pangan khususnya padi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka Tetap Produksi padi Tahun 2018 mencapai 45.725 Ton, Tahun 2019 sebesar 48.806 Ton dan pada tahun 2020 produksi padi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 68.290.

b. Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tanaman pangan merupakan jumlah produksi padi, sedangkan hortikultura merupakan produksi bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Ketersediaan benih sumber padi, benih pertanian mampu memproduksi sebesar 2 ton pada tahun 2018, 4ton pada tahun 2019 dan 6 ton pada tahun 2020. Pada tahun 2018 jumlah benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel sebanyak 1.050.000 polibag, tahun 2019 sebanyak 1.310.000 polibag dan tahun 2020 sebanyak 1.570.000 polibag. Jumlah benih tanaman pangan yang bersertifikat dan berlabel pada tahun 2018 sebesar 125 ton, tahun 2019 sebanyak 150 ton dan tahun 2020 sebanyak 175 ton.

Grafik II.72

Produksi Komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikultura



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Untuk jumlah benih tanaman hortikultura yang bersertifikat dan berlabel, balai pengawasan dan sertifikasi mutu benih mampu mensertifikasi dan melabeli sebanyak 1.250 polibag pada Tahun 2018, 1.500 polibag pada Tahun 2019 dan 1.750 polibag pada Tahun 2020. Sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Tanaman Pangan mencapai 101,36 (2019) dan meningkat sebesar 100,21 (2020), sedangkan NTP subsektor Hortikultura menurun dari 104,30 (2019) menjadi 102,05 (2020).

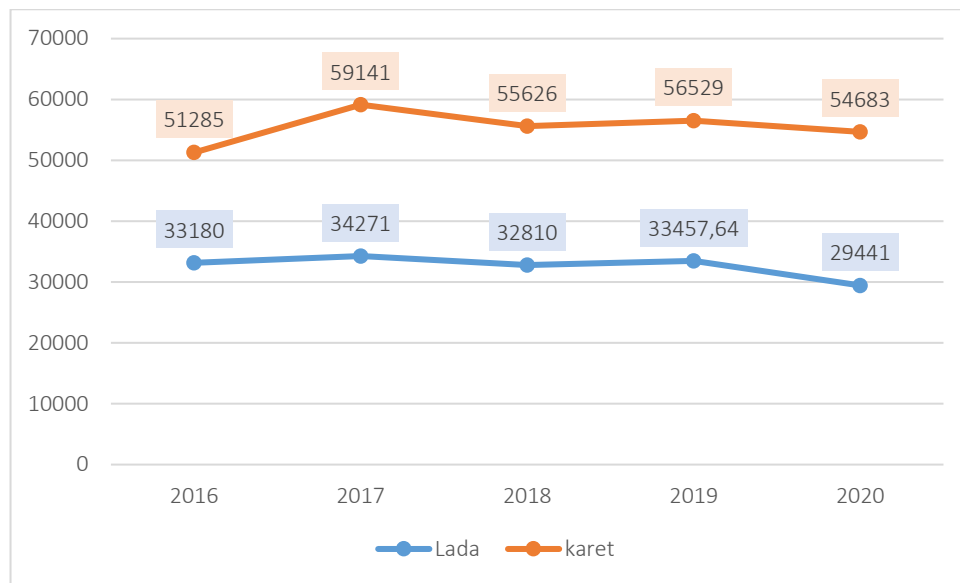
Pada tanaman pangan berdasarkan angka tetap, produksi padi Bangka Belitung tahun 2018 mencapai 45.725 ton, tahun 2019 sebesar 48.806 ton dan di tahun 2020 mencapai sebesar 68.290. Sedangkan pada tanaman hortikultura penurunan produksi cabai besar dan cabai rawit pada tahun 2018 dan 2019 disebabkan adanya gagal panen dikarenakan bencana banjir dan serangan hama penyakit. Kenaikan produksi kembali meningkat di tahun 2019-2020.

Angka produksi cabai merah meningkat dari 2.468 ton (2018) menjadi sebesar 5.393 ton (2020). Begitupun dengan Produksi cabai rawit sebesar 3.520 (2019) meningkat menjadi sebesar 367,6 ton (2020). Angka produksi pada bawang merah tahun 2018 mencapai 87 ton, tahun 2019 sebesar 170 ton dan tahun 2020 produksi bawang merah sebesar 157.4 ton. Bawang merah merupakan kegiatan bantuan pemerintah berupa benih dan pupuk, masyarakat sama sekali tidak mengeluarkan biaya, sehinggatinggi atau rendahnya produksi sangat tergantung dengan banyaknya bantuan dari pemerintah.

c. **Produksi Lada dan Karet**

Pada sektor perkebunan, ketersediaan bibit lada pada tahun 2018 di balai benih pertanian sebesar 25.000 polibag, tahun 2019 sebesar 50.000 polibag dan tahun 2020 sebesar 75.000 polibag. ketersediaan bibit karet di balai benih pertanian pada tahun 2018 sebesar 40.000 polibag, tahun 2019 sebesar 40.000 polibag dan tahun 2020 sebesar 40.000 polibag. Kawasan lada dan karet rata-rata mencapai 1 ton. Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor Perkebunan sebesar 102,32 (2019) dan meningkat di tahun 2020 menjadi 104,24 (2020). Hal ini tidak terlepas dari terjadinya kenaikan komoditas harga pertanian khususnya komoditas lada dan kelapa sawit.

Grafik II.73
Produksi Lada dan Karet



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Produksi lada dan karet Bangka Belitung cukup fluktuatif dimana pada tahun 2016 produksi lada sebesar 33.180 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 mencapai sebesar 34.271 ton. Kemudian sedikit menurun di tahun 2018 menjadi sebesar 32.810 ton dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 33.457 ton serta kembali mengalami penurunan menjadi 29.441 ton pada tahun 2020. Tidak tercapainya target pada komoditas lada disebabkan karena banyak tanaman baru ditanam atau masa panen pertama sehingga produktivitas belum maksimal walaupun pada dasarnya produksi naik namun produktivitas memang sedikit turun. Harga lada yang cenderung turun serta maraknya Kembali aktivitas pertambangan timah mengakibatkan ketertarikan masyarakat untuk berkebun lada menurun jauh.

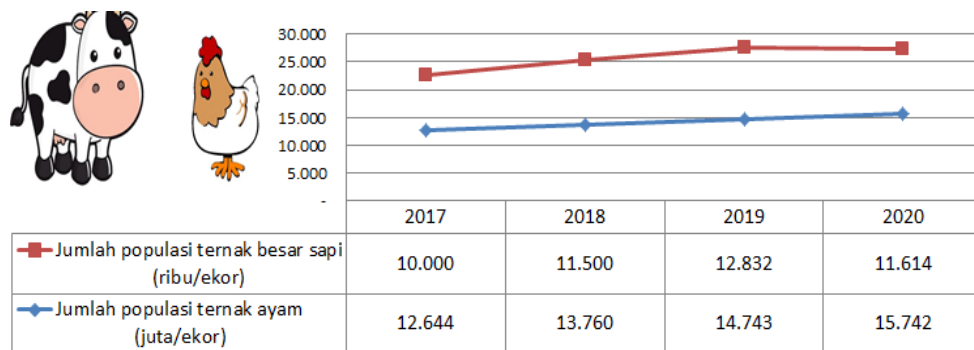
Begitupun dengan produksi karet tahun 2018 mencapai 55.626 ton, tahun 2019 sebesar 56.529 ton dan mengalami penurunan produksi di tahun 2020 menjadi sebesar 54.683 ton. Tidak tercapainya target pada komoditas karet selain karena adanya serangan hama penyakit yang mengakibatkan tanaman mengalami penyakit gugur daun juga karena rendahnya harga komoditas tersebut yang rata-rata masih dibawah ongkos produksi yang dikeluarkan petani.

d. Produksi Sapi dan Ayam

Pada tahun 2018 ketersediaan bibit ayam sebanyak 5.000 ekor, tahun 2019 sebanyak 6.000 ekor dan tahun 2020 sebanyak 8.000 ekor. untuk ketersediaan anakan sapi tahun 2018 tersedia anakan sapi sebanyak 15 ekor, tahun 2019 sebanyak 20 ekor dan tahun 2020 sebanyak 25 ekor.

Grafik II.74

Populasi Ternak Sapi dan Ayam



Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data di atas angka populasi Sapi meningkat periode 2017-2019, dimana pada tahun 2017 berjumlah 10.000 ekor dan tahun 2019 mencapai 12.832 ekor sapi. Namun populasi ternak sapi mengalami penurunan ditahun 2020 berjumlah 11.614 ekor sapi. Meningkatnya capaian populasi ternak sapi dikarenakan ada peningkatan kelahiran dan banyak pemasukan sapi dari luar provinsi, sehingga populasi kian meningkat. Ditambah dengan kegiatan Sapi Wajib Bunting (Siwab), petani yang berhasil membuat sapinya bunting dan melahirkan dibayar, serta jika mengalamikematian dibayar ganti rugi oleh dinas.

Sementara itu jumlah populasi ayam meningkat dari tahun ke tahun. Angka tetap populasi ayam tahun 2018 mencapai 13.760 ekor, tahun 2019 sebesar 14.743 ekor dan tahun 2020 populasi ayam sebesar 15.742 ekor. Populasi ayam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat dipengaruhi dari data pemasukan ayam ke provinsi. Oleh karena itu, faktor harga ayam menjadi faktor penentu banyak tidaknya permintaan konsumen untuk kebutuhan ayam setiap tahunnya yang pada akhirnya berpengaruh terhadap populasi ayam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Urusan Kehutanan

a. Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai *pelaku utama* untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Perhutanan Sosial dengan memberikan legalitas dan akses masyarakat sekitar hutan guna pemanfaatan kawasan hutan. Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan sistem kemitraan yang pelaksanaanya diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Grafik II.75
Kawasan Perhutanan Sosial



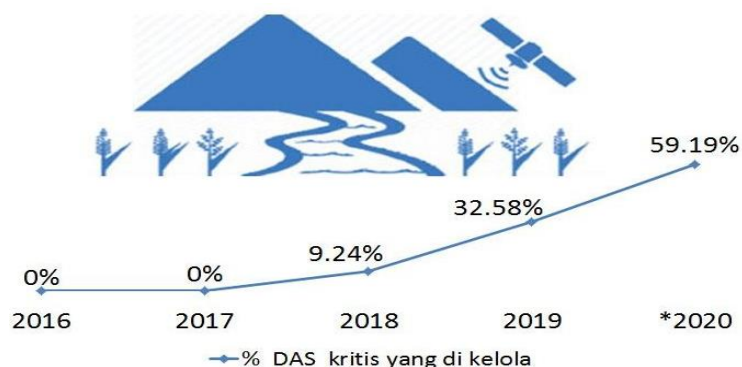
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Luas kawasan perhutanan sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 143.503,32 ha. Pada tahun 2018-2019 persentase luas kawasan perhutanan sosial menurun dari 52,02 persen menjadi 50,49 persen. Realisasi Perhutanan Sosial (PS) yang aksesnya diberikan kepada masyarakat sudah mencapai luas 38.051 ha dan jumlah 102 KK dengan total unit 348 Surat Keputusan (SK) izin/hak yang telah diserahkan ke masyarakat.

b. Persentase Daerah Aliran Sungai Yang Dikelola

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 433 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 357 DAS bernama dan 76 DAS belum bernama. Kelembagaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS) Kabupaten/Kota baru terbentuk 3 Forum DAS dari 7 kabupaten dan kota.

Grafik II.76
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kritis



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

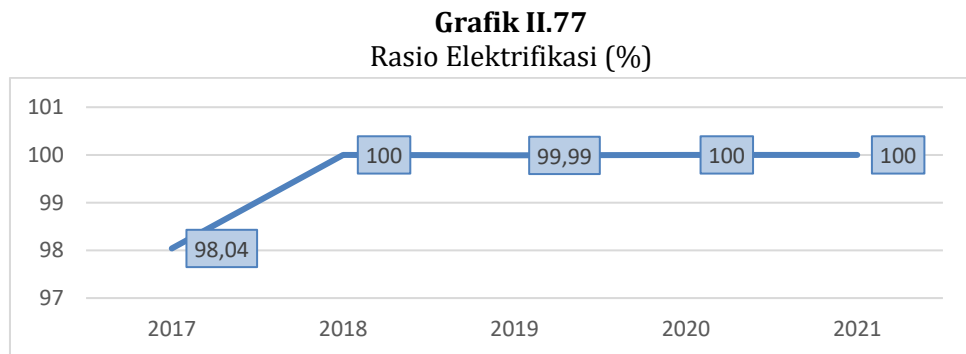
Capaian daerah aliran sungai kritis yang dikelola pada tahun 2018 sebesar 9,24 persen atau capaian pengelolaan DAS kritis seluas 202,70 ha. Sedangkan tahun 2019 daerah aliran sungai kritis yang dikelola meningkat menjadi sebesar 32,58 persen atau

mencapai 715,11 ha. Data sementara pada tahun 2020 target capaian sebesar 59,19 persen atau dengan capaian seluas 1.299,11 ha. Pada tahun 2019 DAS kritis berjumlah 159 DAS. Maraknya aktivitas pertambangan pasir timah menyebabkan sungai tidak mampu menahan debit air sehingga terjadi pendangkalan karena sedimentasi tambang.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Rasio Elektrifikasi

Ketersediaan energi listrik menjadi pendongkrak perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya fasilitas listrik untuk penerangan, pemanfaatan waktu belajar anak di rumah bisa lebih lama dan aktivitas ekonomi di rumah tangga yang mengusahakan aktivitas ekonomi di rumah dapat lebih berlangsung sampai malam hari. Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah terlistrik dengan total rumah tangga.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, rasio elektrifikasi terus meningkat. Walaupun pada tahun 2019 sempat menurun sebesar 0,01%. Menurunnya rasio elektrifikasi ini dikarenakan adanya pelanggan yang baru mendaftar. Tahun 2020 dan 2021 rasio elektrifikasi sudah mencapai 100%. Tingginya rasio elektrifikasi artinya seluruh masyarakat di berbagai daerah bisa menikmati pasokan listrik untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan usaha.

6. Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan oleh Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Neraca perdagangan luar negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2016-2021) bergerak fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan, semula pada tahun 2016 sebesar 1.159 Juta US\$ menjadi 2.638 Juta US\$. Dalam kurun waktu tersebut, ekspor lebih besar daripada impor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nilai ekspor pada tahun 2016 sebesar 1.291 Juta US\$ bergerak fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan sampai dengan 2.672 Juta US\$ di tahun 2021, sedangkan nilai impor semula sebesar 132 Juta US\$ (2016) bergerak fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan sampai dengan 34 Juta US\$ di tahun 2021.

Tabel II.73
Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2015-2019
Provinsi Kep. Bangka Belitung (juta US\$)

INDIKATOR	TAHUN					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ekspor	1.290.658,40	1.784.138,50	1.774.900,50	1.373.981,80	1.291.160,00	2.672.050,00
Impor	132.013,40	74.359,50	144.740,70	16.039,10	14.610,00	34.230,00
Neraca Perdagangan	1.158.645,00	1.709.779,00	1.630.159,80	1.357.942,70	1.276.550,00	2.637.820,00

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Komoditas ekspor Kepulauan Bangka Belitung dikirim melalui pelabuhan laut dan bandar udara. Untuk daerah Bangka di ekspor melalui pelabuhan laut Muntok, dan Pangkalbalam, serta Bandara Depati Amir. Sementara untuk wilayah Pulau Belitung diekspor melalui pelabuhan laut Tanjung Pandan dan Manggar. Jika dilihat dari sisi ekspor dalam kurun waktu 2016-2021, kontribusi terbesar masih didominasi oleh ekspor timah dengan rata-rata kontribusi sebesar 80,95 persen, sedangkan ekspor non timah sebesar 19,05 persen. Selanjutnya jika dilihat dari sisi impor, dalam kurun waktu 2016-2021, kontribusi terbesar berada pada impor non migas dengan rata-rata kontribusi sebesar 57,57 persen dan impor migas berkontribusi sebesar 42,43 persen (Grafik II.63)

7. Urusan Perindustrian

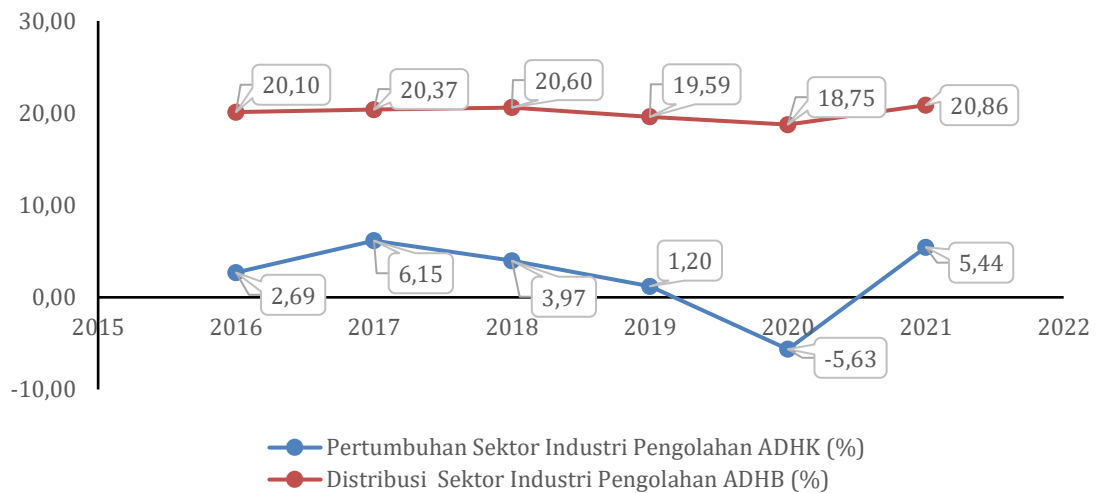
a. Persentase Laju Pertumbuhan Industri

Rencana pembangunan industri nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019, yang keduanya menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi dan rencana pembangunan industri kabupaten/kota. Rencana pembangunan industri provinsi atau rencana pembangunan industri kabupaten/kota berdasarkan delegasi Undang-Undang tersebut diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing. Jadi untuk menjadi sebuah acuan daerah masing-masing baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menetapkan peraturan daerah pada wilayahnya.

Sektor perdagangan besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Jika dilihat dari data empiric selama periode enam tahun terakhir (2016-2021) terkait pertumbuhan dan distribusi sektoral menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dan cenderung menunjukkan trend yang mengalami peningkatan. Pertumbuhan dan distribusi sektor industri pengolahan semula pada tahun 2016 sebesar 2,69 persen dan 20,10 persen. Terus bergerak fluktuatif dan cenderung mengalami pertumbuhan yang melambat sampai dengan tahun 2019 sebesar 1,20 persen (untuk pertumbuhan) dan 19,59 persen (untuk distribusi sektoral).

Grafik I.78

Pertumbuhan, Kontribusi Sektor dan Tenaga kerja Sektor Industri Pengolahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2021



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan sektor industri pengolahan terkontraksi sampai dengan -5,63 persen dengan distribusi sektoral terhadap PDRB ADHB sebesar 18,75 persen. Hal ini disebabkan karena dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda internasional, nasional dan regional termasuk pada wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya pada tahun 2021 pertumbuhan sektor industri pengolahan kembali tumbuh positif sampai dengan 5,44 persen dengan distribusi sektor industri terhadap PDRB ADHK sebesar 20,86 persen. Hal ini sejalan dengan mulai meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha seiring dengan mulai terbiasanya masyarakat dengan implementasi protokol COVID-19 sebagai bagian dari tatanan kehidupan baru.

Tabel II.74

Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2021

INDIKATOR	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laju Pertumbuhan Industri Kecil (%)	0,05	0,19	0,13	0,09	8,90	6,64
Industri kecil (Unit Usaha)	12.737,00	15.108,00	17.024,00	18.607,00	20.263,00	21.609,00
Laju Pertumbuhan industri menengah (%)	-0,05	0,05	-0,11	0,01	40,00	-9,29
Industri menengah (Unit Usaha)	106,00	111,00	99,00	100,00	140,00	127,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Selanjutnya jika dilihat dari jumlah dan laju pertumbuhan industri kecil dan menengah, laju pertumbuhan industri kecil selama tahun 2020 dan 2021 cenderung meningkat. Laju pertumbuhan Industri kecil ditahun 2020 sebesar 8,90%, selanjutnya pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang melambat sebesar 6,64%. Seperti di ketahui bahwa pada

tahun 2020 dan 2021 terjadi pandemi Covid-19 yang memaksa pelaku industri kecil harus *struggle* untuk bertahan di masa pandemi. Pelaku industri kecil yang *existing* tetap berusaha bertahan dan penambahan pelaku industri kecil terjadi karena *shifting-nya* pekerja formal yang kemudian dirumahkan lalu membuka usaha sendiri dirumah ditambah dengan pelaku usaha baru yang mendapat fasilitasi pelatihan dan kemudahan biaya dari pemerintah melalui program-program pemulihan ekonomi nasional serta ditopang dengan maraknya insentif dari pemerintah untuk pelaku industri kecil melalui kebijakan restrukturisasi pinjaman serta dukungan pembiayaan lainnya bagi para pelaku IKM Bangka Belitung pada masa pandemi.

Sementara itu pada industri menengah selama rentang waktu 2020 sampai dengan 2021, laju pertumbuhan industri menengah tercatat cenderung berfluktuasi. Tahun 2020 tercatat pertumbuhan sebesar 40% atau naik sebanyak 40 unit usaha industri menengah sehingga menjadi 140 unit usaha, sedangkan di tahun 2021 terjadi penurunan unit usaha industri menengah sebesar -9,29% atau menjadi 127 unit usaha, penurunan tersebut diakibatkan karena tekanan pandemi covid-19 yang memaksa industri menengah Bangka Belitung untuk *shut down*.

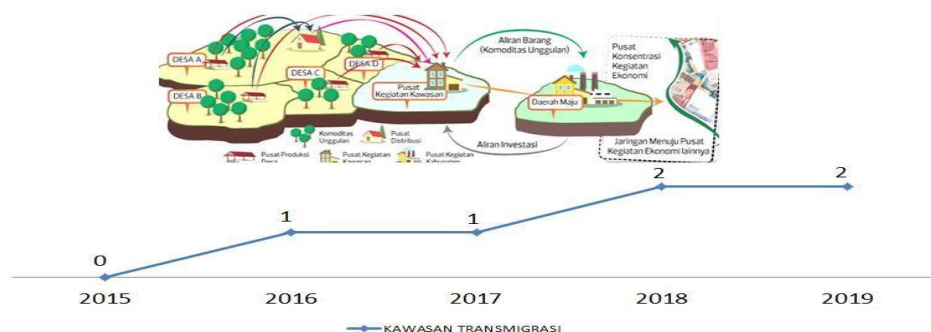
8. Urusan Transmigrasi

a. Jumlah Satuan Kawasan Perkotaan Baru

Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru yang sebelumnya disebut Kawasan Transmigrasi pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal dan pemerataan penduduk. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru, Provinsi Bangka Belitung mengembangkan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di kawasan-kawasan transmigrasi salah satunya kawasan Batu Betumpang. Kawasan terpadu mandiri Batu Betumpang yang juga merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi dengan luas 41.100,3 ha.

Kawasan Perkotaan Baru harus memperhatikan ketentuan/kriteria yakni kawasan tersebut tidak berada di kawasan hutan. Berdasarkan SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Selatan (SK Menhut Nomor 357/Menhut-II Tahun 2004) dapat dilihat bahwa di dalam kawasan tidak memiliki status kawasan hutan. Berdasarkan SK tersebut pada kawasan ini berada dalam area penggunaan lain (APL). Perkembangan kawasan perkotaan baru sebagaimana dibawah ini.

Grafik II.79
Kawasan Transmigrasi



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Terdapat 2 (dua) Kawasan Perkotaan Baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Luas kawasan Batu Betumpang yaitu 180.278.28 ha dengan jumlah KK sebanyak 8.323 KK. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2018 menetapkan kawasan Jebus sebagai kawasan transmigrasi seluas 74.015.27 dengan jumlah KK sebanyak 3.600 KK.

2.3.4 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018 mencapai angka 73,43. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 80,11. Capaian kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 turun dari kategori “baik” menjadi kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

1. Nilai Kebebasan Sipil

Nilai kebebasan sipil dihitung melalui 4 aspek yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi. hal ini mengindikasikan adanya ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan dalam berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan menjalankan ibadah/ajaran agama, serta kebebasan dari diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok.



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Nilai kebebasan sipil Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2015 sebesar 81,25. Kemudian pada tahun 2016-2017 Kebebasan Sipil turun 4,58 poin (dari 87,65 menjadi 83,07). Sedangkan pada tahun 2018-2019 kebebasan sipil naik 3,17 poin (dari 80,95 menjadi 84,12) dan masuk dalam kategori “sedang”. Artinya meningkatnya nilai kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi atau berkurangnya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat

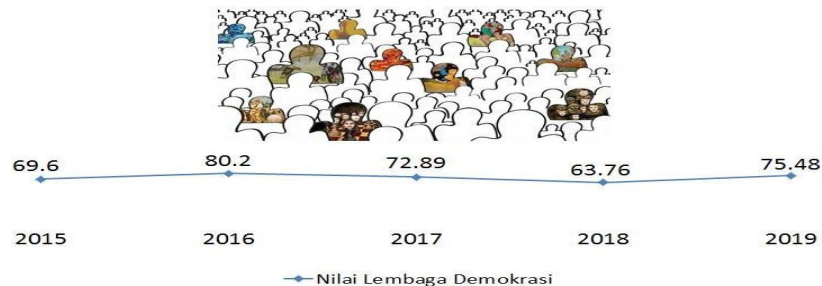
pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat dan ancaman atau penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama.

2. Nilai Kelembagaan Demokrasi

Nilai Kelembagaan Demokrasi dilihat dari 2 aspek yaitu Pemilu yang Bebas dan Adil (Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu, Kecurangan dalam penghitungan suara), dan Peran DPRD (Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan, Perda yang merupakan inisiatif DPRD, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif).

Grafik II.81

Nilai Lembaga Demokrasi



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

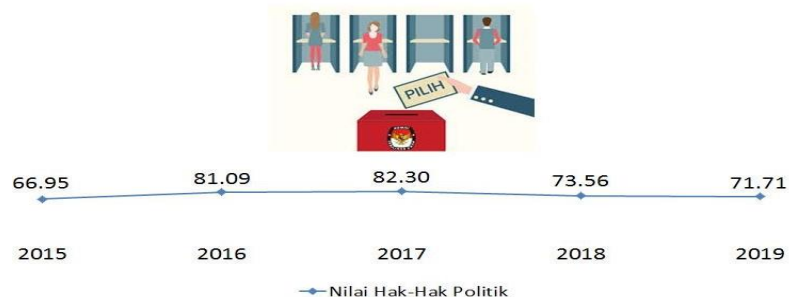
Nilai kelembagaan demokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 sebesar 69,6 persen. pada tahun 2016-2017 turun 7,31 poin (dari 80,20 menjadi 72,89). Sedangkan pada tahun 2018-2019 lembaga-lembaga demokrasi naik 11,72 poin (dari 63,76 menjadi 75,48) atau dalam kategori “buruk”. Artinya menurunnya netralitas penyelenggaraan Pemilu, menurunkan rekomendasi DPRD kepada eksekutif, meningkatnya kecurangan dalam perhitungan suara dan menurunkan kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu.

3. Nilai Hak-Hak Politik

Nilai hak-hak politik dihitung melalui 2 aspek yaitu: pertama, Hak Memilih dan Dipilih (hak memilih atau dipilih terhambat, kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), *Voters Turnout*, dan persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi. Sedangkan yang kedua adalah Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan (demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah).

Grafik II.82

Nilai Hak-Hak Politik



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Nilai hak-hak politik Provinsi Bangka Belitung di tahun 2015 hanya sebesar 66,95. Pada tahun 2016-2017 hak-hak politik naik 1,21 poin (dari 81,09 menjadi 82,30), dan pada tahun 2018-2019 turun 1,85 poin (dari 73,56 menjadi 71,71) dan masuk dalam kategori “buruk”. Artinya rendahnya terhambatnya hak pilih masyarakat dan rendahnya perempuan terpilih dalam anggota DPRD. Pada tahun 2019 perempuan terpilih dalam DPRD Provinsi hanya berjumlah 2 orang.

2.3.5 Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pemerintahan Umum, Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana system ini merupakan integrasi dari system perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini , setiap organisasi diwajibkan untuk mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi Birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori. yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Grafik II.83
Nilai SAKIP



Sumber : BIRO ORGANISASI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2016 nilai Sakip Bangka Belitung sebesar 58,55 atau CC. Namun pada tahun 2020 nilai Sakip Bangka Belitung mencapai 70,96 atau dengan kategori BB sedangkan untuk di tahun 2021 datanya belum di rilis dan diperkirakan dibulan maret atau april tahun berikutnya. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Peningkatan Nilai selama lima tahun terakhir menunjukkan serta membuktikan bahwa kinerja Instansi Pemerintah dalam menuangkan program dan arah keuangannya sudah akurat dan program-program yang direncanakan punya manfaat bagi masyarakat.

b. Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan

Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Dalam menerapkan definisi ini, digunakan tiga tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat:

a. Jumlahnya tidak material.

Jika terdapat salah saji dalam laporan keuangan, tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material. Dalam hal ini pendapat tidak wajar dapat diberikan.

b. Jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan.

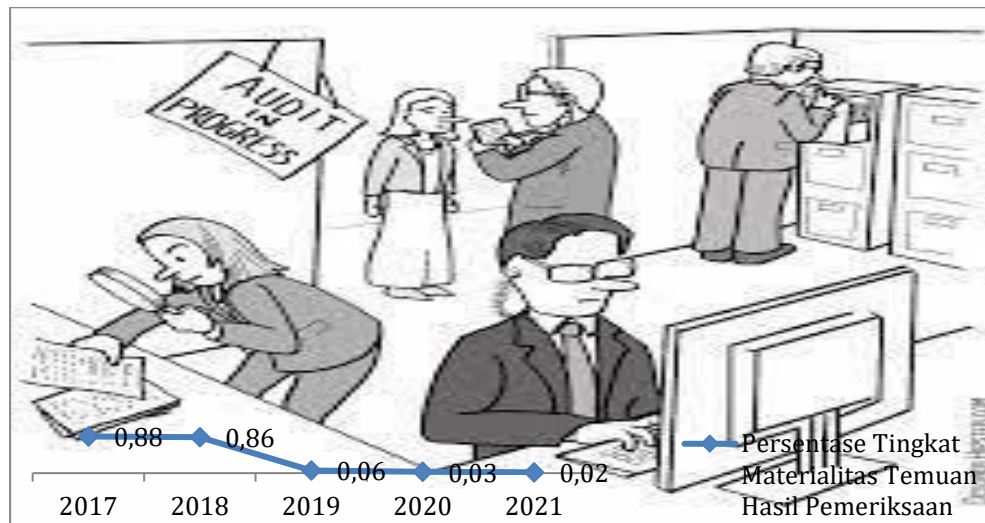
Tingkat materialitas kedua terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetap bpi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar, sehingga tetap berguna. Jika auditor menyimpulkan bahwa salah saji tersebut cukup material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, pendapat yang tepat adalah pendapat wajar dengan pengecualian (menggunakan “kecuali untuk”)

c. Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan.

Tingkat materialitas dikatakan tertinggi terjadi apabila para pengguna informasi laporan keuangan dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Semakin meluas pengaruh salah saji, kemungkinan untuk menerbitkan pendapat tidak wajar akan lebih besar daripada pendapat wajar dengan pengecualian.

Grafik II.84

Persentase Tingkat Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan



Sumber : Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Berdasarkan data diatas tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin menurun. Selama lima tahun terakhir tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan mengalami penurunan yang cukup baik dimana pada tahun 2017 persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan mencapai 0,88 % dan ditahun 2021 di angka 0,02 %. Capaian kinerja pada indikator ini sangat tinggi yaitu dibawah satu persen ($<1\%$). Artinya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan secara wajar dalam semua material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

2.3.6 Fokus Layanan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

a. Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan disusunnya dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan RKPD dan Renstra sangat penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah.

Grafik II.85

Konsistensi Program Pembangunan di RKPD dengan RPJMD
 dan Renstra dengan RPJMD



Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tingkat konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2016 tingkat konsistensi hanya mencapai 75 persen, kemudian meningkat di tahun 2017 sebesar 78% dan 2018 sebesar 80 persen. Pada tahun 2019 tingkat konsistensi mencapai 85 persen dan diharapkan pada tahun 2020 tingkat konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD mencapai 100 persen sehingga semua program dalam Renstra dan RKPD konsisten dengan program yang tertuang dalam RPJMD.

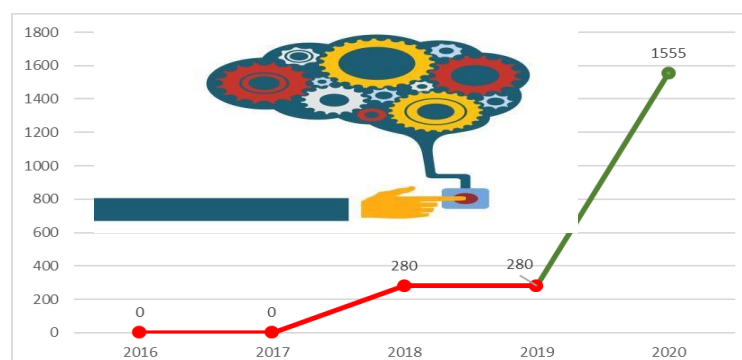
2. Unsur Penelitian dan Pengembangan

a. Indeks Inovasi Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 mengikuti *Innovative Government Award* (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan memasukkan 13 (tiga belas) inovasi yang telah dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Grafik II.86

Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Tahun 2016-2020



Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada Tahun 2020 hasil Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, baik dalam jumlah skor dan kategori inovasi. Indeks Inovasi Daerah dari 280 (2019) menjadi 1.555 (2020). Hal tersebut sangat dipengaruhi jumlah inovasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masuk dalam kategori “Provinsi Sangat Inovatif”.

3. Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Nilai Indeks Profesionalitas ASN

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Beberapa indikator dalam mengukur profesional ASN antarlain kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja pegawai. Adapun premis indikator dari profesional ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik dan pegawainya semakin bersih. Umumnya problem profesionalisme ASN dapat dilihat dari kurangnya integritas, rendahnya kompetensi, lambatnya kinerja, dan banyaknya pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, peningkatan profesionalitas ASN sebagai motor penyelenggara negara perlu di dorong pada aspek kerja, integritas, dan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.



Sumber : BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2016 hanya sebesar 58. Namun pada tahun 2019 sudah mencapai sebesar 80,6. Artinya semakin meningkatnya pegawai ASN yang sesuai kompetensi baik dari segi penempatan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan yang sudah sesuai dengan jabatan. Selain dari pada itu kompensasi sudah mengarah ke kinerja, tingkat disiplin yang meningkat, serta kinerja yang juga semakin meningkat.

4. Unsur Keuangan

a. Opini BPK

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah: Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP (*Unqualified Opinion*), Opini Wajar Dengan Pengecualian/WDP (*Qualified Opinion*), Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*), dan Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*).

Grafik II.88

Opini BPK



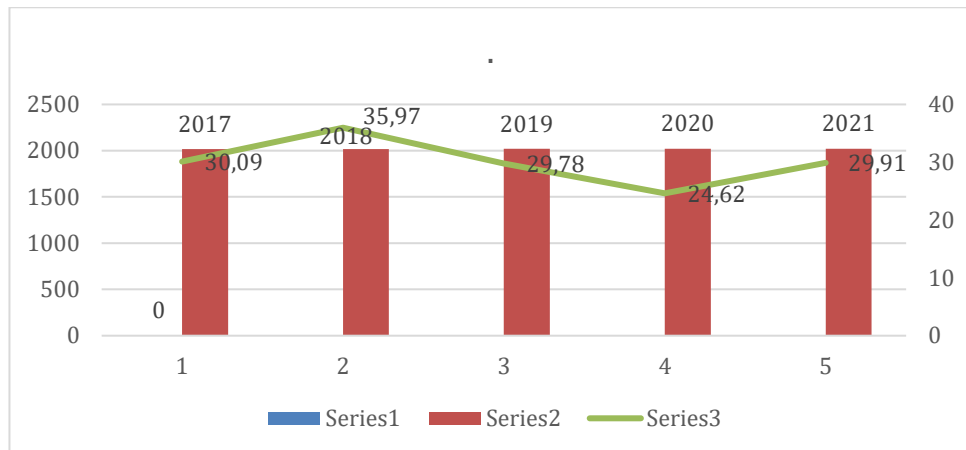
Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Pada tahun 2016, capaian opini BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun selama periode 2017-2021 capaian opini BPK atas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara konsisten mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyajikan laporannya secara wajar, semua informasi keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau dapat disimpulkan tata kelola keuangan Pemerintah secara umum telah baik.

b. Persentase Peningkatan pertumbuhan PAD

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam upaya peningkatan potensi dari sumber-sumber PAD meskipun perfoma terus ditingkatkan kemajuan pertumbuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir bergerak fluktuatif. Hal ini terlihat pada Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2017 hingga 2021 dimana angka kontribusi menunjukkan kinerja yang naik turun dengan rata-rata capaian 31.57%.

Grafik II.89
Persentase Kontribusi PAD Terhadap APBD



Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Dalam kurun 2017-2021 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD performa tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai angka 35.97 %, sementara capaian terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 24.62%. Pada tahun 2020 ini pertumbuhan PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat mengalami penurunan drastis sebesar -17.33% atau dari hasil audited PAD tercatat sebesar 683.43 milyar. Performa kinerja terus ditingkatkan, dan hasilnya terlihat dari pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 naik sebesar 24.55% tercatat sebesar 851.23 milyar.

5. Unsur Penghubung

a. Persentase Jumlah Pelayanan Penghubung yang terlaksana

Pelayanan Penghubung adalah melayani penyiapan hal-hal yang diperlukan dalam membantu untuk mempermudah komunikasi serta administrasi antara daerah dan pusat, baik penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat daerah di Jakarta, promosi dan pengelolaan Anjungan Daerah di TMII, serta pelayanan kepada pejabat daerah dan pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi di Jakarta.

Grafik II.90
Persentase Jumlah Pelayanan Penghubung yang Terlaksana



Sumber : Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian kinerja pelayanan penghubung yang terlaksana meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pelayanan penghubung sebesar 80 persen, kemudian tahun 2017 sebesar 85%, 2018 sebesar 90 persen, serta 2019 sebesar 95 persen. Pada tahun 2020 diharapkan pelayanan penghubung sudah paripurna mencapai 100 persen. Salah satu komponen yang paling penting dalam ketatalaksanaan pemerintah adalah pelayanan yang salah satunya meliputi pelayanan dan fasilitasi pejabat daerah di Jakarta. Kegiatan pelayanan dilakukan dalam satu kesatuan. Pelayanan Instansi pemerintah adalah pemerintah daerah/pejabat, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, sekretariat lembaga negara, lembaga setingkat menteri dan lembaga lain, lembaga non struktural, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

2.3.7 Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Urusan Kesekretariatan Daerah

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui peningkatan profesionalisme pegawai dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: Mental Aparatur, Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas Dan Pelayanan Publik.

Grafik II.91

Indeks Reformasi Birokrasi



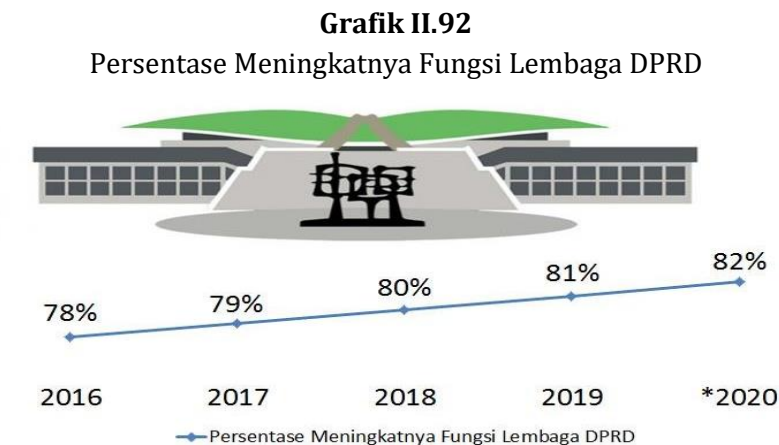
Sumber : Biro Organisasi SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2015-2019 secara umum meningkat. Pada tahun 2015 nilai Rb hanya sebesar 28,59, namun pada tahun 2019 mencapai 66,84. Nilai pengungkit/proses dari 8 area perubahan sebesar 34,96, sedangkan nilai hasil implementasi (kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kualitas pelayanan publik) sebesar 31,88, sehingga nilai Rb tahun 2019 mencapai 66,84 dengan predikat “B” (Baik). Artinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.

2. Urusan Kesekretariatan DPRD

a. Persentase Meningkatnya Fungsi Lembaga DPRD

Lembaga DPRD biasa disebut sebagai lembaga legislatif. Fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang, membentuk Peraturan Daerah bersama-sama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh kepala daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.



Sumber Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Persentase meningkatnya fungsi Lembaga DPRD dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2018 peningkatan fungsi Lembaga DPRD hanya sebesar 78 persen dan meningkat di tahun 2017 sebesar 79 persen. Hal ini semakin terjadi peningkatan di tahun 2018 menjadi sebesar 80 persen dan 2019 sebesar 81 persen. Artinya semakin meningkatnya inisiasi terhadap rancangan peraturan daerah dan semakin meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.4 Aspek Daya Saing Wilayah

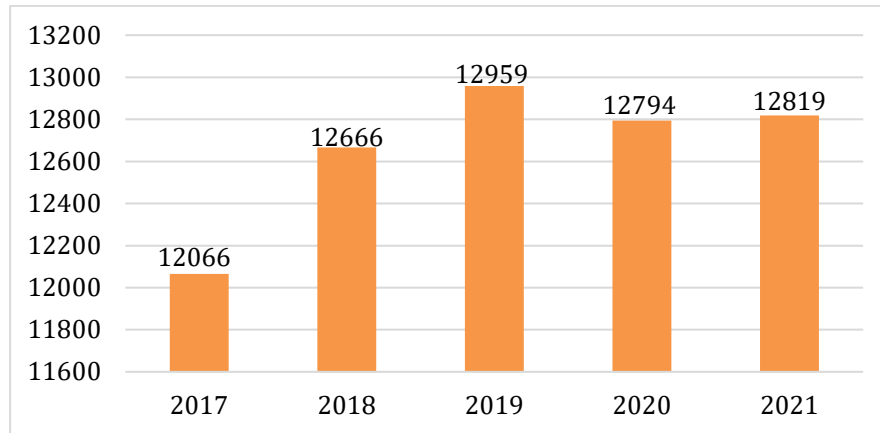
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Rata-Rata Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan yang dibelanjakan/pengeluaran untuk kebutuhannya, maka rata-rata pengeluaran per kapita pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2019, nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkat, dari Rp12.066 ribu pada tahun 2017 menjadi Rp12.959 ribu pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 seiring terjadinya pandemic Covid-19, nilai ini menurun menjadi Rp12.794 ribu.

Grafik II.93
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Pada tahun 2021, pengeluaran rumah tangga per kapita yang disesuaikan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp12.819 ribu per tahun. Angka ini meningkat 0,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pengeluaran rumah tangga per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai meningkat kembali setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan.

2. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecenderungan nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dengan Rasionisasi tukar petani ditampilkan pada Tabel II.64

Tabel II.75
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2013 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Yang Diterima Petani (lt)	120,77	116,43	106,13	107,15	114,89	117,43
2	Indeks Yang Dibayar Petani (lb)	119,09	122,09	125,73	129,08	110,53	112,23
3	Rasio	1,01	0,96	0,84	0,83	1,04	1,05

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2021 bersifat fluktuatif. Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2020-2021 mengalami peningkatan. Adanya penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani.

3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan berapa besar konsumsi rumah tangga non pangan perkeluarga per tahun. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.65, dapat dijelaskan bahwa konsumsi rumah tangga non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2015 s.d. 2020 yaitu sebesar Rp. 539.290 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.730.723 pada tahun 2020.

Tabel II.76
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2015 s.d 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	539.290	615.498	639.949	709.094	758.333	730.723
2	Total pengeluaran	1.118.101	1.211.879	1.360.994	1.419.495	1.509.974	1.501.844
3	Rasio	0,482	0,508	0,47	0,5	0,502	0,49

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Selanjutnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel..... menunjukkan bahwa besaran total pengeluaran non-pangan pada setiap Kabupaten/kota secara relatif sangat bervariasi. Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau kebiasaan penduduk setempat terkait perilaku pengeluarannya. Apabila suatu penduduk dalam suatu wilayah/daerah nilai pengeluaran pangannya lebih besar dari pada nilai pengeluaran non-pangan, maka daerah tersebut dapat dikatakan secara relatif sebagai daerah berkembang, tetapi apabila pengeluaran pangan lebih kecil dari pada nilai pengeluaran non-pangan maka daerah tersebut dapat dikatakan relatif maju. Secara keseluruhan total pengeluaran tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 1.501.844. Total pengeluaran paling tinggi adalah Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 1.845.502, sedangkan total pengeluaran paling kecil adalah Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 1.362.167.

Tabel II.77
Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2020
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	Total pengeluaran	Rasio
-1	-2	-3	-4	-5
1	Kabupaten Bangka	696.823	1.465.540	0,48
2	Kabupaten Bangka Barat	585.056	1.256.163	0,47
3	Kabupaten Bangka Selatan	525.228	1.257.371	0,42
4	Kabupaten Bangka Tengah	631.310	1.362.167	0,46
5	Kabupaten Belitung	917.281	1.752.785	0,52
6	Kabupaten Belitung Timur	805.002	1.676.259	0,48
7	Kota Pangkalpinang	1.013.183	1.845.502	0,55
	Provinsi	730.723	1.501.844	0,49

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2017-2021 kecenderungan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 merupakan jumlah tenaga kerja yang paling banyak bekerja sebanyak 10.559 dan jumlah PMA/PMDN sebanyak 1.320. Sementara itu, berbeda dengan potret tahun 2021 jumlah PMA/PMDN mengalami penurunan yang signifikan, tenaga kerja yang diserap hanya sebanyak 4.604 dengan rasio sebesar 1,73 yang mana kita ketahui bersama karena dampak Covid-19. sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.78
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(9)	(9)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/ PMDN	3.543	4.512	5.499	10.559	4.604
2	Jumlah seluruh PMA/ PMDN	235	411	633	1.320	2.658
3	Rasio daya serap tenaga kerja	15,07	10,97	8,68	8,68	1,73

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur yang menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor antara lain dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang terangkut angkutan umum baik laut maupun udara, Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, penataan wilayah, fasilitas Perbankan, Hotel berbintang/non bintang, terminal, bandara, dan pelabuhan.

1. Jumlah Penumpang Angkutan

Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain baik darat, laut dan udara. Penggunaan moda tersebut dapat dilihat dari jumlah penumpang terangkut dalam angkutan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.79
Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut Tahun 2014-2018

Uraian	Jumlah Penumpang (Orang)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Angkutan Udara					
Bandara Depati Amir					
a. Kedatangan	696.430	767.707	948.634	994.269	1.070.188
b. Keberangkatan	705.483	792.297	955.274	993.859	1.019.615
Bandara H.A.S Hanandjoeddin					
a. Kedatangan	307.960	350.010	434.361	475.899	523.196

Uraian	Jumlah Penumpang (Orang)				
	2014	2015	2016	2017	2018
b. Keberangkatan	305.524	354.514	434.433	489.150	522.727
2. Angkutan Laut					
a. Embarkasi	77.783	54.183	32.729	33.167	34.343
b. Debarkasi	64.383	48.030	32.293	29.183	31.823

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Berdasarkan data di atas baik keberangkatan maupun kedatangan angkutan udara selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya kenaikan jumlah permintaan jasa penerbangan yang diukur dari pertumbuhan penumpang udara melalui indikasi jumlah penumpang yang terus mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya. Sebaliknya, angkutan laut terlihat cukup fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2014-2015, dalam hal embarkasi maupun debarkasi, hal ini semakin diperlukannya penyediaan sarana angkutan laut yang handal dan memadai.

2. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan (km) terhadap jumlah kendaraan (unit). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor.

Tabel II.80

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Panjang Jalan Provinsi (km)	899,33	899,33	850,99	850,99	850,99
2	Jumlah Kendaraan	875.527	934.354	998.080	1.039.803	1.048.188
3	Rasio*	0,00103	0,00096	0,00085	0,00082	0,00081

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2021

*) dihitung

Berdasarkan data diatas dari tahun 2016-2020 rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan mengalami penurunan. Pada tahun 2019 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 0,00082 dan menurun di tahun 2020 menjadi 0,00081. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan pada tahun 2020 sebanyak 8.385 unit dari 1.039.803 unit pada Tahun 2019 menjadi 1.048.188 unit pada Tahun 2020.

3. Luas Wilayah Produktif

Penataan Wilayah dilihat dari Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase seluas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.81
Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
Provinsi Kep. Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Kabupaten Bangka	233.977 ha	295.068 ha	0,79
2	Kabupaten Bangka Barat	218.878 ha	282.061 ha	0,78
3	Kabupaten Bangka Selatan	231.828 ha	360.707 ha	0,64
4	Kabupaten Bangka Tengah	164.227 ha	212.677 ha	0,77
5	Kabupaten Belitung	195.776 ha	229.369 ha	0,85
6	Kabupaten Belitung Timur	139.850 ha	250.691 ha	0,56
7	Kota Pangkalpinang	2.203 ha	11.840 ha	0,19
Jumlah		1.186.652 ha	1.542.414 ha	0,73

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

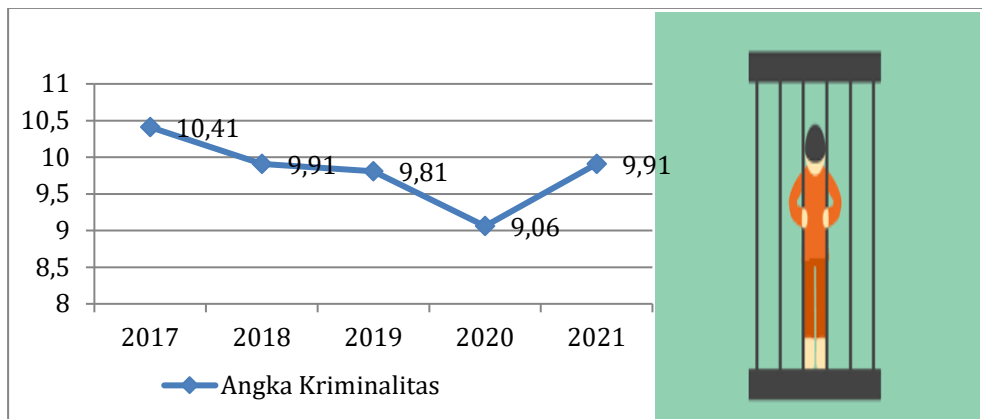
Berdasarkan data diatas Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Belitung dengan rasio sebesar 0,85. Tingginya nilai rasio menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah produktif dikelola dan dikembangkan dalam upaya mendukung aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma- norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindakan criminal umumnya berkaitan dengan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Ada banyak faktor penyebab yang bisa melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu: pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan emosional.

Grafik II.94
Angka Kriminalitas



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Angka Kriminalitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2019 dari 9,81 persen menurun menjadi 9,06 persen pada 2020. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,85 persen dihitung berdasarkan Jumlah penduduk tahun 2020.

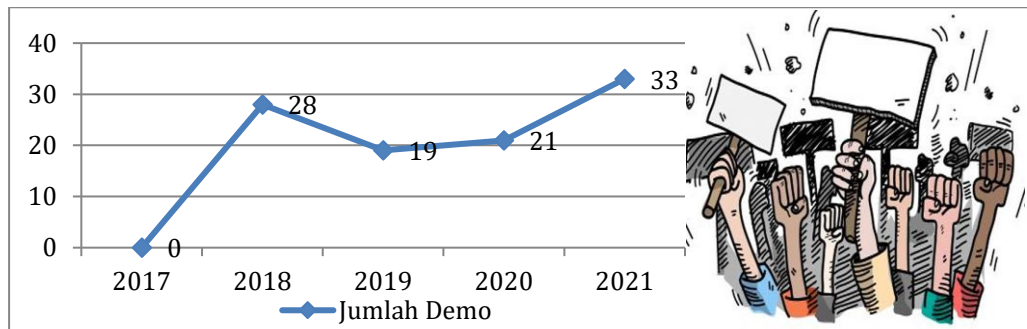
2. Jumlah Demo

Demonstrasi merupakan salah satu kegiatan menyampaikan aspirasi atau menentang kebijakan suatu pihak, baik itu organisasi atau pemerintah, dimana kegiatan tersebut merupakan upaya penekanan secara politik yang dilakukan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan.

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat ini juga merupakan implementasi dari demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia. Selain itu, gerakan menyampaikan pendapat atau demonstrasi ini juga diatur di dalam Undang-Undang negara.

Demonstrasi merupakan salah satu cara kelompok tertentu menyuarakan idenya dan tidak heran aksi ini kerap menimbulkan kerugian meskipun tujuannya bisa dibilang cukup baik, “agar suara didengar”. Faktor penyebab demonstrasi kegiatan aksi unjuk rasa tidak terjadi begitu saja, ada banyak faktor yang melatarbelakanginya. Mengacu pada pengertian demonstrasi, adapun beberapa faktor penyebab terjadinya demonstrasi adalah Ketidakadilan sosial, ketidaksesuaian pendapat, dan aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi. Dampak Demonstrasi adalah kerusakan, Penangkapan “Otak” Demonstrasi, dan menghambat laju Pembangunan Daerah.

Grafik II.95
Jumlah Demo



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif sedikit daripada provinsi lain. Demonstrasi di Bangka Belitung didominasi oleh isu lingkungan dan pertambangan. Jumlah demonstrasi dari tahun 2017-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 0 kasus menjadi 28 kasus. Dan pada tahun 2018 sampai dengan 2020 jumlah demo cukup stabil dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 sebesar 33 Kasus. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan stabilitas keamanan bermasyarakat di Bangka Belitung relatif lebih rendah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah Alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019 mencapai angka 76,75. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2018 yang sebesar 73,43. Capaian kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 masuk dalam kategori “Sedang”. Dan pada tahun 2020 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai angka 77,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2019 yang sebesar 76,75. Capaian kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada kategori “Sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

4. Nilai Kebebasan Sipil

Peningkatan nilai aspek Kebebasan Sipil didukung oleh berkurangnya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah terkait kebebasan berkumpul dan berserikat serta berkurangnya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Nilai kebebasan sipil dihitung melalui 4 aspek yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi. Hal ini mengindikasikan adanya ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan dalam berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan menjalankan ibadah/ajaran agama, serta kebebasan dari diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok.

Grafik II.96
Nilai Kebebasan Sipil



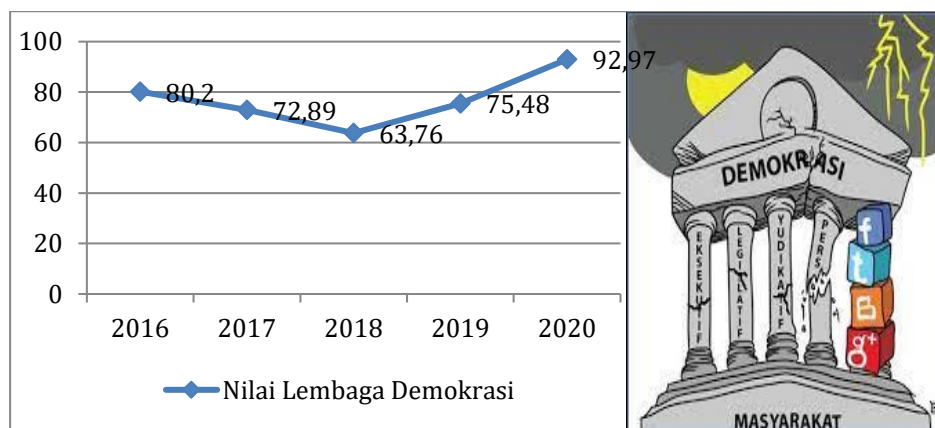
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Nilai kebebasan sipil Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2016 sebesar 87,65. Kemudian pada tahun 2017-2018 Kebebasan Sipil turun 2,12 poin (dari 83,07 menjadi 80,95). Dan pada tahun 2019-2020 kebebasan sipil mengalami trend penurunan kembali sebesar 5 poin (dari 84,12 menjadi 79,12) dan masuk dalam kategori “sedang”. Penurunan Aspek Kebebasan Sipil disebabkan oleh berkurangnya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah terkait kebebasan berkumpul dan berserikat serta berkurangnya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh pemerintah dan masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

5. Nilai Kelembagaan Demokrasi

Peningkatan nilai aspek Kelembagaan Demokrasi didukung oleh kinerja pemerintah yang semakin baik, seperti meningkatnya persentase perda inisiatif dan rekomendasi DPRD, penyediaan informasi APBD dalam rangka transparansi anggaran, serta berkurangnya keputusan hakim yang kontroversial. Adapun aspek Lembaga demokrasi antara lain Pemilu yang bebas dan adil, Peran DPRD, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peran Peradilan yang Independen.

Grafik II.97
Nilai Lembaga Demokrasi



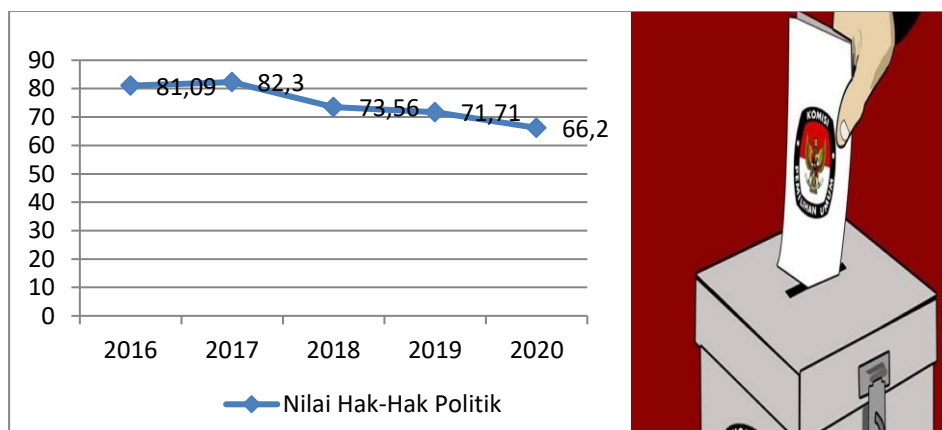
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Nilai kelembagaan demokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 sebesar 80,2 persen. pada tahun 2017-2018 turun 9,13 poin (dari 72,89 menjadi 63,76). Sedangkan pada tahun 2019-2020 lembaga-lembaga demokrasi naik 17,49 poin (dari 75,48 menjadi 92,97) atau dalam kategori “buruk”. Artinya Peningkatan Aspek Lembaga Demokrasi tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah, seperti meningkatnya persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, menurunnya kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN, menurunnya keputusan hukum yang kontroversial dan berkurangnya penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

6. Nilai Hak-Hak Politik

Penurunan nilai aspek Hak-Hak Politik terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah demonstrasi yang bersifat kekerasan, diantaranya terkait pengusiran KIP dan PIP oleh nelayan serta persoalan lahan perkebunan. Aspek hak-hak politik antara lain: Hak memilih atau dipilih terhambat, Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), Voters turnout, persentase anggota perempuan DPRD Provinsi, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan dan pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Grafik II.98
Nilai Hak-Hak Politik



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Nilai hak-hak politik Provinsi Bangka Belitung di tahun 2016 sebesar 81,09. Pada tahun 2017-2018 hak-hak politik turun 8,74 poin (dari 82,30 menjadi 73,56), dan pada tahun 2019-2020 cenderung mengalami penurunan kembali sebesar 5,51 poin (dari 71,71 menjadi 66,20) dan masuk dalam kategori “sedang”. Artinya Penurunan Aspek Hak-Hak Politik terutama disebabkan oleh menurunnya persentase anggota perempuan di DPRD, meningkatnya jumlah demonstrasi yang bersifat kekerasan, dan menurunnya jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah.

7. Kemudahan Perizinan

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang prima menjadi hal mutlak yang harus segera diwujudkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip kepastian waktu, biaya, cepat, mudah, efisien dan transparan guna mendorong

terciptanya iklim usaha yang kondusif. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, kini para pelaku usaha PMA-PMDN, baik mikro-kecil, perseorangan maupun non perorangan (Badan Usaha – PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain) kini bisa langsung mendaftarkan usahanya secara online melalui OSS (Online Single Submission).

Seiring dengan perkembangan kondisi saat ini, Pemerintah melalui UU Cipta Kerja, mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (license based) menjadi berbasis risiko (risk based). Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

OSS telah melakukan pengembangan sistem melalui Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Berbasis Risiko mengkategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Tingkat risiko pada sistem tersebut dibagi menjadi 4 kategori yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.

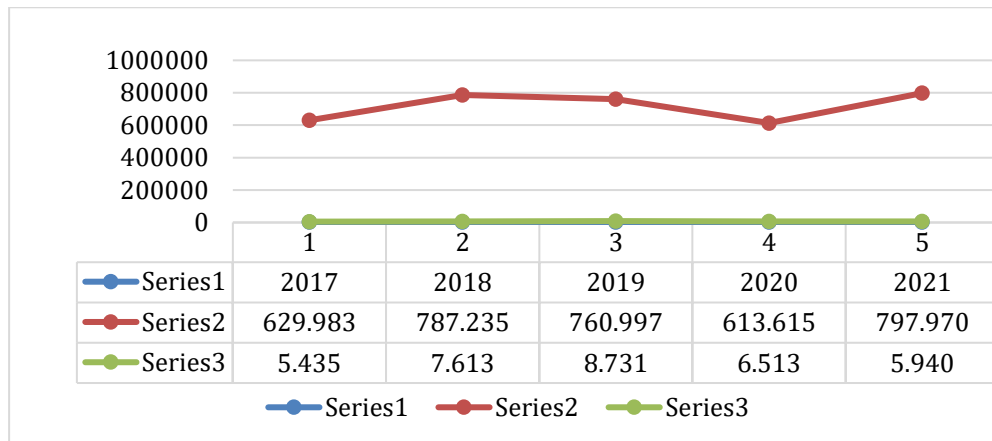
Tahun 2021 Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang dikeluarkan atau yang diterbitkan DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 801 (delapan ratus satu) sudah termasuk yang diterbitkan oleh UPT Wilayah Belitung.

8. Penguasaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selama kurun waktu 2017-2021 pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan diikuti oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak rokok dan pajak air permukaan kontribusinya masih relatif rendah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang Dasar hukum penguasaan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Grafik II.99
Realisasi Pajak Dan Retribusi Daerah



Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas menunjukkan penurunan realisasi penerimaan pajak daerah, dimana pada tahun 2019 jumlah Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp760.997 (dalam juta) menurun signifikan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp613.615 (dalam juta) atau mengalami penurunan pertumbuhan PAD sebesar (-)17.33% meskipun demikian terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 sebesar Rp797.970 (dalam juta) berarti adanya kenaikan pertumbuhan PAD sebesar 24.55%, sedangkan untuk Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di tahun 2019 jumlah yang diperoleh sebesar Rp8.731 (dalam juta) menurun signifikan di tahun 2020 sebesar menjadi Rp6.513 (dalam juta) dan mengalami penurunan Retribusi Daerah lagi di tahun 2021 sebesar Rp5.940 (dalam juta).

9. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim investasi dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel II.82
Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nomor	Peraturan Daerah
1	18 Tahun 2008	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera
2	11 Tahun 2008	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Perkreditan
3	12 Tahun 2008	Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Sumsel
4	1 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Bangka Belitung
5	3 Tahun 2010	Pembentukan BUMD PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	7 Tahun 2011	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung

No	Nomor	Peraturan Daerah
7	7 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung
8	3 Tahun 2014	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah
9	15 Tahun 2016	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
10	5 Tahun 2017	Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi
11	7 Tahun 2017	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
12	2 Tahun 2019	Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Sebagaimana diperlihatkan pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kurun waktu 2008-2019 jumlah Perda yang disahkan untuk mendukung iklim investasi sebanyak 12 Perda, mulai dari Perda pembentukan BUMD sampai dengan Perda penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah serta pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel II.83

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016 s.d 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	60.655	50.603	54.999	83.328	74.394
2.	Jumlah penduduk	1.401.827	1.430.865	1.459.873	1.488.792	1.517.590
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	434.70	358.12	384.07	574.27	511.06

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kualitas tenaga kerja/rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi dimana tahun 2016 sebesar 434,70 per 10.000 penduduk. Namun mengalami penurunan kembali secara bertahap ditahun 2017 menjadi 358,12 per 10.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja dengan latar pendidikan

sarjana/ perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun, walaupun sempat pada tahun 2018 dan 2019 rasio ini meningkat sebesar 384,07 dan 574,27 per 10.000 penduduk dan kembali menurun menjadi 511,06 per 10.000 penduduk pada tahun 2020. Oleh karena itu diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dengan kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai dengan keinginan pengguna tenaga kerja agar dapat terserap dalam perusahaan-perusahaan, dan secara otomatis dapat meningkatkan rasio kelulusan S1/S2/S3.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun.



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pada tahun 2016, angka dependency ratio untuk Bangka Belitung sebesar 45,74 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43-44 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka dependency ratio cukup fluktuatif, namun mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 44,88 yang berarti bahwa semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan indikator dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pusat maupun daerah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pemetaan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut pemetaan pencapaian indikator TPB 2014-2018 dengan RPJMD.

Tabel II.84
Pemetaan Capaian Indikator Pembangunan terhadap Target/Indikator TPB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.2.	1.2.1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase Angka Kemiskinan (Maks 7-8%)	Persen	-	5,40	5,51	5,61	5,72
1.3.	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persentase kepesertaan JKN (Min 95%)	Persen	-	-	73,25	74,80	76,36
	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persentase kepesertaan JKN Ketenagakerjaan (62,4 jt formal, 3,5 jt nonformal)	Persen	-	-	73,25	74,80	76,36
	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	2,8 juta	Orang	-	-	-	40	252
1.4.	1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya difasilitasi kesehatan	70%	Persen	-	60	60,67	61,33	62
	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	63%	Persen	55,62	56,08	56,54	57,01	57,47
	1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%	Persen	56,11	56,67	57,22	57,78	58,33
	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak (100%)	Persen	-	60	62,67	68,15	68,52
	1.4.1.(e)	100%	Persen	-	-	-	83,56	83,59

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan							
	1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase Rumah layak huni (0%)	Persen	-	5	4,67	4,33	4
	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	94,78%	Persen	96,49	96,82	96,33	96,07	97,71
	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat	82,20%	Persen	71,83	69,28	68,57	70,3	73,96
	1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (91,63)	Persen	56,9	44,32	48,63	53,47	57,86
	1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (77,4%)	Persen	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4
	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	100%	Persen	100	100	100	100	100
1.5.	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Tidak Ada Target	Orang					
	1.5.1.(a) Jumlah lokasi pengurangan risiko bencana daerah	39 Daerah	Lokasi					
2.1.	2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Under nourishment</i>)	Tidak Ada Target						
	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (<i>under weight</i>) pada anak balita	Prevalensi Kurang Gizi anak balita (17%)	Persen	17	17	17	17	17
	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Tidak Ada Target	Persen					
	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kal/ kapita/ hari	8,50%	Persen	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
2.2.	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (tidak ada target)	Persen					

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi Stunting pada anak Balita (28%)	Persen	28	28	28	28	28
	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasar kan tipe	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun (Tidak Ada Target)	Persen					
	2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil (28%)	Persen	28	28	28	28	28
	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang menda patkan ASI eks klusif (50%)	Persen	-	20	22	24	26
2.3.	2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertain an (rupiah per tenaga kerja) (Tidak Ada Target)	Persen (Rupiah per Tenaga Kerja)	106,84	93,72	109,93	103,37	92,82
3.1.	3.1.2* Proporsi perem puan pernah ka win umur 15-49 tahun yang proses mela hirkan terakhir nya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Proporsi perempu an pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses mela hirkan terakhir nya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (95%)	Persen	95	95	95	95	95
	3.1.2.(a)* Persentase perem puan per nah kawin umur 15-49 tahun yang proses me lahirkan terakhir nya di fasilitas kesehatan	Persentase perem puan pernah kawin umur 15-49 ta hun yang pro ses melahirkan terakhir nya di fasilitas kese hatan (85%)	Persen	85	85	85	85	85
3.2.	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kema tian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahir an hidup (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kemati an Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hi dup (24 bayi)	Persen	24	24	24	24	24
	3.2.2.(b) Persentase kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase kab/kota yang mencapai 80% imunisasi da sar lengkap pa da bayi (95%)	Persen	95	95	95	95	95
3.3.	3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang	Kejadian Malaria per 1.000 orang (Tidak Ada Target)						
	3.3.3.(a) Jumlah kab/ kota yang mencapai eliminasi malaria	Jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria (300)						
	3.3.4.(a)	Persentase kab/ kota yang melaku kan deteksi	Persen					

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Persentase kab/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	dini untuk infeksi He patitis B (Tidak Ada Target)						
	3.3.5. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Jumlah Kab/kota dengan eliminasi Kusta (7)	kabupaten /kota	7	7	7	7	7
	3.3.5.(b) Jumlah kab/ kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian trans misi tahap I).	Jumlah kab/ kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian trans misi tahap I) (35)	Kab/Kota					
3.4.	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun (5,40%)		-	20	19,03	18,05	17,08
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi	Prevalensi tekanan darah tinggi (24,30%)	Persen	-	35	34,27	33,54	32,81
	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun (15,40%)	Persen	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.4.2.(a) Jumlah kab/ kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Jumlah kab/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa (280)	Kab./ Kota					
3.5.	3.5.1(a) Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Tidak Ada Target	Orang					
	3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Tidak Ada Target	Orang					
	3.5.1(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	210	Orang	-	-	30	42,86	55,71

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	3.5.1(d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	85	Lembaga	-	-	10	15,36	20,71
	3.5.1(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Tidak Ada Target	Persen					
3.7.	3.7.1. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Min 4 jenis 85%)	Persen	85	85	85	85	85
	3.7.1(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (66%)	Persen	66	66	66	66	66
	3.7.1(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern (23,50%)	Persen	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
	3.7.2. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR) (38)		38	38	38	38	38
	3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) (2,28)		2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
3.8.	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan	Unmet need pelayanan kesehatan (9,91%)	Persen	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91
	3.8.2. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk (Tidak Ada Target)	Persen (jiwa/1000)					
	3.8.2(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Min 95%)	Persen	-	-	-	60	62,69

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
3.a.	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun (Tidak Ada Target)	Persen					
3.b.	3.b.1.(a) Persentase keterse diaan obat dan vak sin di Puskesmas	Tidak Ada Target	Persen					
3.c.	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Tidak Ada Target)						
	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (84,20%)	Persen					69
	4.1.1.(b) Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B.	Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B (81%)	Persen					48
	4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Persentase SMA/ MA berakreditasi minimal B/84,60%)	Persen					47,7
	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat (114,09%)	Persen	113,22	111,07	111,75	110,58	111,15
	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat (106,94)	Persen	85,52	87,6	84,38	84,53	85,93
	4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat (91,63%)	Persen	75,51	76,41	79,1	82,88	82,21
	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	(8,8 tahun)	Tahun	7,76	7,79	7,62	7,78	8,24
4.2.	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka Partisipasi Kasar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (77,20%)	Persen	-	28,51	29,13	30,25	39,44
4.3.	4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat (91,63%)	Persen	75,51	76,41	79,1	82,88	82,21
	4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) (36,73%)	Persen	-	20	21,12	22,23	23,35
4.4.	4.4.1. Proporsi remaja dan dewasa dengan keteram pilan teknologi informasi dan komunikasi	Tidak Ada Target	Persen		49,14	55,88	64,4	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
4.5.	4.5.1* Rasio angka partisipasi Murni perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/ MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar perempuan/ laki-laki di (4) Perguruan Tinggi							
	Rasio APM Dan Rasio APK SD/MI		Persen		100,53	100,9	100,92	
	Rasio APM Dan Ra sio APK SMP/ MTS		Persen		104,28	107,59	99,56	
	Rasio APM Dan Rasio APK SMA/MA		Persen		104,02	108,12	105,74	
	Rasio APM Dan Rasio APK PT		Persen		173,03	245,05	134,4	
4.6.	4.6.1(a) Persentase angka melek aksara per penduduk umur ≥15 tahun	Persentase angka melek aksara pen penduduk umur ≥15 tahun (96,10%)	Persen	96,1	97,63	97,66	97,79	
	4.6.1(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun							
	Persentase Angka Melek Aksara Pen penduduk Umur 15-24 Tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	Persen		99,88	99,79	99,8	
	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur Umur 15-59 Tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	Persen		97,98	98,75	98,77	
4.c.	4.c.1* Persentase guru SMA yang bersertifi kat pendidik	Persentase guru SMA yang berserk tifkat pendidik (Tidak Ada Target)	Persen		93	93,4	95,1	96,9
5.1.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	16		-	-	1	2	3
5.2.	5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Prevalensi keke rasan terhadap anak perempuan (menurun tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan)		20,48	20,48	20,48	20,48	20,48
	5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase korban kekerasan terha dap perempuan yang mendapat layanan kompre hensif (70%)	Persen	70	70	70	70	70
5.3.	5.3.1* Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum	Proporsi Perem puan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun	Persen					

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	dan sebelum umur 18 tahun (Tidak Ada Target)						
	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perem puan pernah kawin umur 25-49 tahun	Median usia kawin pertama perem puan pernah kawin umur 25-49 tahun (21)	Tahun	21	21	21	21	21
	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility</i>) Rate/ASFR	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility</i>) Rate/ ASFR (38)		38	38	38	38	38
	5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/ sederajat (91,63%)	Persen	75,51	76,41	79,1	82,88	82,21
5.5.	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Tidak Ada Target)	Persen					
	5.6.1(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluar ga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Beren cana/KB yang tidak terpenuhi) (9,90%)	Persen	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
	5.6.1(b) Pengetahuan dan pemahaman Pa sangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pa sangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontra sepsi modern (85)	Persen	85	85	85	85	85
5.b.	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam (Tidak Ada Target)	Persen					
6.1.	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memili ki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (100%)	Persen	64,44	66,67	68,89	87,24	86,88
	6.1.1.(b) Kapasitas prasa rana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (118,6 m3/ dtk; 60 pulau	m3/detik	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6
6.2.	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasili tas cuci tangan de ngan sabun dan air	Proporsi populasi yang memiliki fasi litas cuci tangan dengan sabun dan air (Tidak Ada Target)	Persen					
	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (100%)	persen	76,47	77,94	79,41	84,21	87,11
	6.2.1.(c) Jumlah desa/ kelura han yang melaksana kan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis	Desa/Kelur ahan					

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
		Masyarakat (STBM) (45.000)						
	6.2.1.(d) Jumlah desa/ ke lurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan(SBS).	Jumlah desa/ kelu rahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) (Tidak Ada Target)	Desa/Kelurahan					
6.4.	6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah (Tidak Ada Target)						
6.5.	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	RPDAST	1	1	1	1	1
	6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta pening katan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Ha	8.744	8.743	8.744	1.574	4.164
7.1.	7.1.1* Rasio Elektrifikasi	Rasio elektrifikasi (96,60%)	Persen	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6
	7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita (1.200 KWh)		-	650	686,67	723,33	760
	7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga (Tidak Ada Target)						
8.1.	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita	Laju pertumbuhan PDB per kapita (> 50 juta)		8,22	10,83	13,44	16,06	18,67
	8.1.1.(a) PDB per kapita	PDB per kapita (Tidak Ada Target)						
8.3.	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin (Tidak Ada Target)						
	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal	Persentase tenaga kerja formal (51%)	Persen	15	15	15	15	15
	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian (Tidak Ada Target)	Persen					
8.5.	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja (Tidak Ada Target)	persen					
	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Tidak Ada Target)	Persen					
	8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran	Persentase setengah pengangguran	Persen					

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
8.6.	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (Tidak Ada Target)	Persen					
8.9.	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara	20 juta	Orang	2.297	3.078	5.037	7.183	8.124
	8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Tidak Ada Target	Orang	256.393	254.530	295.688	362.992	417.818
8.10.	8.10.1* a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Tidak Ada Target						
	8.10.1* b. Jumlah kantor Bank per 100.000 penduduk dewasa	Tidak Ada Target						
9.1.	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Unit	4	4	3	3	3
9.2.	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita (Tidak Ada Target)	Persen					
	9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	Mendekati 26%	Persen	21,14	21,86	22,18	23,32	24,10
	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	(Tidak Ada Target)	Persen					
	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet	(Tidak Ada Target)	Persen					
10.1.	10.1.1* Koefisien Gini	0,36		0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	Persen	8	8	8	8	8
10.3.	10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	87	Point	-	81	81,4	81,8	82,2
10.4.	10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	(62,4 jt pekerja formal, 3,5 jt pekerja informal)	Jiwa					
11.1.	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(18,6 juta)	Persen	-	-	-	89,81	90,16
11.2.	11.2.1.(a). Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Load Factor	Persen	48	36	36	32	24

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
11.4.	11.4.1.(a). Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metro politan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	(Tidak Ada Target)	kota					
	11.5.1.(a). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	-30%	Indeks Risiko	-30	-30	-30	-30	-30
	11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	(Tidak Ada Target)	EWS (titik)					
11.6.	11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani (80%)	Persen	—	—	—	21,15	34,62
12.4	12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	(Tidak Ada Target)	Perusahaan	27	31	33	37	41
	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	(150 juta ton)	Ton	-	---	-	---	24.928
12.5.	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang di daur ulang	(Tidak Ada Target)	Ton	-	-	-	4.899,83	7.705,15
	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	(Tidak Ada Target)	Orang					
14.2.	14.2.1 (a) Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	(Tidak Ada Target)	Perda					
	14.2.1 (b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	(Tidak Ada Target)	WPP	1	1	1	1	1
14.5.	14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan	(20 juta ha)	Ha	800.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00	4.400.000,00	5.600.000,00
14.6.	14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.	87%	UMKM	87	87	87	87	87
15.1.	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Persen tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Persen	15,45	14,2	13,99	13,5	13,28
	15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit	13	13	13	13	13
15.3.	15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	(5,5 jt Ha)	Persen	8744	8743	8744	1574	4164
16.1.	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembuahan pada satu tahun terakhir	(Tidak Ada Target)	Persen					

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	(Tidak Ada Target)	Persen					
	16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	(Tidak Ada Target)	persen					
	16.6.1.(a) Persentase peningka tan Opini Wajar Tan pa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	(Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%)	Persen	85	85	85	85	85
	16.6.1.(b) Persentase peningka tan Sistem Akuntabi litas Kinerja Pemerin tah (SAKIP) Kemen terian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kab/Kota)		Skor	55,08	60,69	61	63,65	67,17
	16.6.1.(a) Persentase data dan informasi pengadaan barang/ jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT	PL baru tahun 2018 (90%)	Persen	—	—	—	90	90
	16.6.1.(b) Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP	PL baru tahun 2018 (90%)	Persen	—	—	—	90	90
	16.6.1.(c) Persentase penggu naan E-procurement terhadap belanja pengadaan barang.	PL baru tahun 2018 (90%)	Persen				90	90
	16.7.1.(a) Persentase keterwa kilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Persen	8,89	6,67	6,67	4,44	6,67
	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	(di atas 12%)	Persen	4,89	5,33	5,78	6,22	6,67
	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	(Tidak Ada Target)	Persen					
17.8.	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet	(Tidak Ada Target)	persen					
	17.8.1.(a) Persentase kab 3T yang terjangkau laya nan akses telekomu nikasi universal dan internet	(Tidak Ada Target)	Persen					
17.18.	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	(Tidak Ada Target)	Persen					

2.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Berikut merupakan penerapan dan pencapaian SPM dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

1. Urusan Pendidikan

SPM Urusan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jenis pelayanan dasar untuk Urusan Pendidikan antara lain:

- a. Pendidikan menengah dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
 - b. Pendidikan khusus dengan indikator pencapaian jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.
- Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.85
SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	-	37.154 orang/ 62,5%	57.427 Orang/ 81,68%
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	-	1.089 orang/ 85,34%	2.239 Orang/ 58,24%
3.	Pendidikan Kejuruan	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi	-	0	57.427 Orang/ 81,68%

2. Urusan Kesehatan

SPM Urusan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan kesehatan antara lain:

- Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan indikator jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.86
SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan Kesehatan	-	47 orang/ 100%	13.930 Orang/ 100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	-	863 orang/ 100%	330 Orang/ 100%

3. Urusan Pekerjaan Umum

SPM Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

- Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Pekerjaan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.87
SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	0	0	88,33%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaen/Kota	0	0	89,10%

Realisasi capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum ada capaian dikarenakan belum adanya SPAM regional dan SPALD regional yang terbangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga sulit untuk direalisasikan.

4. Urusan Perumahan Rakyat

SPM Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.88
SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,16%	-	-
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0	-	-
2	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	0	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				
3.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	0	276 Unit/ 100%	0
4.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Rumah yang Layak Huni Bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	-	0	730 Unit/ 100%

Pada tahun 2018 masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sehingga jenis layanan dasar adalah Rumah Layak Huni dan Terjangkau dan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam lampirannya, bahwa ketersediaan rumah layak huni bukan menjadi kewenangan Provinsi. Sedangkan ruang lingkup pelaksanaan terkait ketersediaan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Provinsi hanya terbatas pada lokasi permukiman kumuh dengan luasan 10 – 15 ha dan pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

Sedangkan pada tahun 2019 sudah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang lebih lanjut penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada tahun 2019 dan 2020 menggunakan layanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada di provinsi.

Sedangkan realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.89
SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	-	0	-
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	-	-	0
3	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	-	-	22.635 Perda/ 100%

6. Urusan Sosial

SPM Urusan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan sosial antara lain:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial dengan indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Realisasi pencapaian SPM untuk Urusan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel II.90
SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			2018	2019	2020
1.	Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala provinsi	Persentase PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	90,26 %	-	-
2.	Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panto sosial skala provinsi	Persentase Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial	95,12 %	-	-
3	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	Persentase panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	99,89 %	-	-
4.	Penyediaan sarana prasarana luar panti skala provinsi	Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	100 %	-	-
5.	Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	Persentase kabupaten/ kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	89,35 %	-	-
6.	Evaluasi korban bencana skala provinsi	Persentase kabupaten/ kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	99,00%	-	-
7.	Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	Persentase kabupaten/ kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	82,36 %	-	-
8.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapat kan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	-	15 Orang/ 75%	18 Orang/ 90%
9.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapat kan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	-	16 Orang/ 106.675	27 Orang/ 112,5%
10.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	-	4 Orang/ 80%	6 Orang/ 100%
11.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabili tasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	-	0	0
12.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.		Bencana Alam 292 Orang/ 87,43% Bencana sosial 9 Orang/ 100%	18 Orang/100 %

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kemampuan keuangan di suatu daerah adalah kunci utama dalam merealisasikan perencanaan dan pembangunan, dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk, besaran dana perimbangan yang diterima, serta keikutsertaan investor dan dunia usaha sebagai sumber dana perimbangan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya kinerja keuangan pada periode sebelumnya dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Hasil analisis juga digunakan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi lima tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah itu sendiri.

3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2021

Kemampuan keuangan di suatu daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terkait dengan peraturan yang ada, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi antara belanja daerah serta pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018-2021 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tepat menjadi kunci kinerja pelaksanaan APBD yang optimal.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam periode 2018–2021, pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan dari Rp2.590.384.617.108,68 pada tahun 2018 menjadi Rp2.601.535.787.627,55 pada tahun 2021. Berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah, maka selama kurun waktu 4 tahun, rata-rata realisasi pendapatan daerah 100,51%, sebagaimana disajikan pada Tabel III.1.

Tabel III.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Bangka Belitung Tahun 2018-2021

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	2.487.065.640.565,87	2.556.977.711.924,35	102,81%
2019	2.762.433.155.880,37	2.694.205.659.655,07	97,53%
2020	2.555.339.034.450,47	2.405.260.307.097,81	94,13%
2021	2.556.700.637.538,00	2.749.699.471.832,98	107,55%
Rata-rata	2.590.384.617.108,68	2.601.535.787.627,55	100,51%

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Persentase pencapaian pendapatan daerah menurun dari tahun 2018-2020. Sementara itu, pada tahun 2021 persentase pencapaian pendapatan daerah meningkat daripada tahun 2020. Penurunan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terjadi dikarenakan sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 yang melanda sejak akhir tahun 2019 pertama kali muncul di Kota Wuhan China dan menyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia awal tahun 2020. Namun tahun 2021 pendapatan daerah Bangka Belitung kembali bangkit seiring dengan adanya kebijakan pemerintah seperti menjalankan protokol kesehatan dan vaksin bagi seluruh warga masyarakat Indonesia sesuai dengan ketentuannya. Secara keseluruhan realisasi pendapatan dari tahun 2018-2021 tren bersifat fluktuatif.

Kontribusi Pendapatan Daerah ada 3 (tiga) komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Gambaran perkembangan angka-angka capaiannya dari ketiga komponen sumber pendapatan daerah tersebut dari tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.2
Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2018-2021

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian	Kontribusi Terhadap Pendapatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Asli Daerah				
2018	789.629.819.565,87	850.441.774.831,35	107,70%	33,26%
2019	884.562.215.880,37	826.701.095.332,07	93,46%	30,68%
2020	748.055.044.035,47	683.432.674.809,81	87,17%	28,41%

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian	Kontribusi Terhadap Pendapatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2021	767.219.366.538,00	896.982.419.466,98	116,91%	32,62%
Rata-rata	797.366.611.504,93	814.389.491.110,05	101,31%	31,24%
Dana Perimbangan				
2018	1.685.118.643.150,00	1.694.218.759.243,00	100,54%	66,26%
2019	1.766.282.638.000,00	1.742.433.563.849,00	98,65%%	64,67%
2020	1.658.313.208.855,00	1.604.813.796.610,00	96,77%	66,72%
2021	1.638.542.274.000,00	1.712.417.278.263,00	104,51%	62,28%
Rata-rata	1.687.064.191.001,25	1.688.470.849.491,25	100,61%	64,98%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
2018	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	100,00%	0,48%
2019	86.102.500.000,00	99.585.198.474,00	115,66%	3,70%
2020	148.970.781.560,00	117.013.835.678,00	78,55%	4,86%
2021	94.500.000.000,00	83.860.777.103,00	88,74%	3,05%
Rata-rata	85.472.614.852,50	78.194.247.276,25	95,74%	3,02%

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Jika dilihat dari sumber dananya dalam 4 tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 31,24%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kategori sedang. Kemudian dana perimbangan memberikan sumbangan rata-rata sebesar 64,98%, hal ini berarti ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat masih relatif besar, sehingga daerah masih tetap besar ketergantungannya atas peningkatan fiskal nasional.

Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, dapat dilihat dari rasio PAD terhadap realisasi belanja. PAD mampu membiayai rata-rata 31,24% dari kebutuhan belanja. Sedangkan dana perimbangan berkontribusi rata-rata sebesar 64,98%. Namun demikian, selama periode 2018-2021, trend kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2018 ke tahun 2021 berfluktuatif. Peran terbesar adalah di tahun 2021, sebesar 33,26%. Artinya peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan harus ditingkatkan.

Tabel III.3
Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan
Tahun Anggaran 2018-2021

Uraian	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Kemampuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Asli Daerah			
2018	789.629.819.565,87	850.441.774.831,35	92,85
2019	884.562.215.880,37	826.701.095.332,07	107,00
2020	748.055.044.035,47	683.432.674.809,81	109,46
2021	767.219.366.538,00	896.982.419.466,98	85,53
Rata-rata			98,71

Uraian	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Kemampuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Dana Perimbangan			
2018	1.685.118.643.150,00	1.694.218.759.243,00	99,46
2019	1.766.282.638.000,00	1.742.433.563.849,00	101,37
2020	1.658.313.208.855,00	1.604.813.796.610,00	103,33
2021	1.638.542.274.000,00	1.712.417.278.263,00	95,69
Rata-rata			99,96
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
2018	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	100,00
2019	86.102.500.000,00	99.585.198.474,00	86,46
2020	148.970.781.560,00	117.013.835.678,00	127,31
2021	94.500.000.000,00	83.860.777.103,00	112,69
Rata-rata			106,61

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Dari data diatas terlihat bahwa kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja untuk pegawai, program pembangunan dan kegiatan.

(1.) Pendapatan Asli Daerah

Selama Periode 2018-2021 angka tersebut realisasi PAD mengalami peningkatan. Hal ini diperoleh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Realisasi PAD sampai dengan tahun 2021 menurut jenis PAD dapat dilihat pada Tabel III.4.

Tabel III.4
Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sampai dengan 2021 menurut jenis PAD

No.	Sumber Pendapatan	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4:3)	(6=4-3)
1	Pajak daerah	649.853.405.459,00	817.141.235.274,58	125,74	167.287.829.815,58
2	Retribusi Daerah	20.214.191.546,00	5.947.140.845,00	29,42	-14.267.050.701,00
3	Hasil PMD & Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.500.000.000,00	5.714.380.624,89	103,90	214.380.624,89
4	Lain-lain PAD yang Sah	91.651.769.533,00	68.179.662.722,51	74,39	-23.472.106.810,49
	Jumlah	767.219.366.538,00	896.982.419.466,98	116,91	129.763.052.928,98

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

a. Pajak Daerah

Secara umum realisasi Pajak Daerah Tahun 2018-2021 tergambar pada Tabel III.5. Perkembangan hasil pajak daerah dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.5
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2018	669.996.399.762,00	787.235.420.038,83	117,50%
2019	790.139.435.584,04	760.997.424.482,42	96,31%
2020	634.727.812.959,02	613.615.822.923,72	96,67%
2021	649.853.405.459,00	817.141.235.274,58	125,74%
Jumlah	2.744.717.053.764,06	2.978.989.902.719,55	108,54%

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Berdasarkan data pada tabel III.5 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 dan 2021 persentase pajak daerah memenuhi target dan realisasi pada tahun tersebut meningkat daripada target yang telah ditetapkan. Sebaliknya sepanjang kurung waktu 2019-2020 persentase pajak daerah tidak dapat memenuhi target dan realisasi. Pada tahun 2020 diperparah adanya pandemi Covid-19 yang berakibat terhadap sumber-sumber pajak daerah berkurang. Selanjutnya beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk meningkatkan pajak daerah di tahun 2021 anatar lain dalam pemutihan pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun 4. Pada tahun 2019 realisasi pajak daerah lebih kecil daripada target yang telah ditetapkan dengan persentase sebesar 96,31%.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada kepentingan pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi daerah mempunyai potensi untuk dikembangkan, karena kinerjanya bersifat pemenuhan atas permintaan berbagai jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada masyarakat. Perkembangan realisasi Retribusi Daerah 2018-2021, dapat dilihat pada Tabel III.6.

Tabel III.6
Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2018	16.438.195.604,87	7.613.352.047,00	46,32
2019	9.315.527.150,00	8.731.932.753,00	93,74
2020	16.194.191.546,00	6.513.383.818,00	40,22
2021	20.214.191.546,00	5.947.140.845,00	29,42
JUMLAH	62.162.105.846,87	28.805.809.463,00	46,34

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Pada komponen retribusi daerah, selama periode 2018-2021 cenderung mengalami

penurunan. Persentase realisasi retribusi daerah terbaik pada tahun 2019. Sementara itu, realisasi retribusi daerah terburuk adalah tahun 2021 pada angka 29,42%. Diketahui bahwa sejak tahun 2017, RS Jiwa dan Propinsi menjadi BLUD dan tidak menjadi objek pajak seperti pada realisasi tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan realisasi retribusi daerah tidak memnuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Dearah.

c. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, diperoleh dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada perusahaan swasta. Realisasi penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah selama periode 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel III.7.

Tabel III.7
Realisasi Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2018	8.500.000.000,00	5.114.092.291,88	60,17
2019	5.500.000.000,00	5.442.309.381,71	98,95
2020	5.500.000.000,00	5.471.185.541,79	99,48
2021	5.500.000.000,00	5.714.380.624,89	103,90
JUMLAH	25.000.000.000,00	21.741.967.840,27	86,97

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Selama kurun waktu 2014-2018 Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah rata-rata 86,97%. Ditahun 2016 pernah mencapai 100%. Artinya upaya peningkatan harus senantiasa dilakukan agar realisasi hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat mencapai target. Kenaikan realisasi hasil PMD dan pengelolaan kekayaan pada tahun 2018-2021 disebabkan oleh adanya pemutihan pajak kendaraan baik motor maupun mobil.

d. Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada pajak daerah, retribusi daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan lain-lain PAD utamanya bersumber dari Penerimaan Jasa Giro, Rekening Deposito pada bank dan Rupa-rupa Pendapatan. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD 2018-2021, secara rata-rata melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 63,77%. Realisasi Lain-lain PAD sepanjang tahun 2018-2020 bersifat fluktuatif. Realisasi tahun 2018 sebesar 53,31 mengalami kenaikan tahun 2019 menjadi sebesar 64,73%. Namun kembali mengalami penurunan tahun 2020 sebesar 63,11%. Selanjutnya kondisi mulai membaik dengan peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 sebesar 74,39%. Secara keseluruhan realisasi Lai-lain PAD tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga masih perlu dilakukan upaya peningkatan lebih lanjut. Adapun realiasasi lain-lain PAD adalah sebagaimana tertera pada Tabel III.8.

Tabel III.8
Realisasi Lain-lain PAD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2018	94.695.224.199,00	50.478.910.453,64	53,31
2019	79.607.253.146,33	51.529.428.714,94	64,73
2020	91.633.039.530,45	57.832.282.526,30	63,11
2021	91.651.769.533,00	68.179.662.722,51	74,39
Jumlah	357.587.286.408,78	228.020.284.417,39	63,77

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

(2.) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada Daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Dana Perimbangan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019-2020 masih dibawah target, sedangkan Tahun 2021 sudah mencapai target sebesar 104,51 % dengan rincian sebagaimana yang dapat dilihat pada Table III.9. Peningkatan ini disebabkan oleh pemerintah pusat melakukan pembayaran kurang bayar DBA sumber daya alam tahun anggaran 2017.

Tabel III.9
Realisasi Dana Perimbangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)	(5=3-2)
2018	1.685.118.643.150,00	1.694.218.759.243,00	100,54	9.100.116.093,00
2019	1.766.282.638.000,00	1.742.433.563.849,00	98,65	1.694.218.759.243,00
2020	1.658.313.208.855,00	1.604.813.796.610,00	96,77	1.742.433.563.849,00
2021	1.638.542.274.000,00	1.712.417.278.263,00	104,51	73.875.004.263,00
JUMLAH	6.748.256.764.005,00	6.753.883.397.965,00	100,08	5.626.633.960,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non Fisik, dan Dana Alokasi Umum (DAU).

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi, sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan komponen pendapatan daerah yang meliputi Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan dan Bagi Hasil dari Pertambangan. Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018-2021, dapat dilihat pada Tabel

III.10.

Tabel III.10
Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2018	188.486.286.150,00	215.555.879.603,00	114,36
2019	55.616.230.000,00	43.368.024.475,00	77,98
2020	43.541.047.000,00	32.807.368.096,00	75,35
2021	152.890.551.000,00	241.681.854.342,00	158,08
JUMLAH	440.534.114.150,00	533.413.126.516,00	121,08

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Berdasarkan tabel 3.10 di atas dapat terlihat bahwa secara rata-rata realisasi pada komponen Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 121,08 persen, dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 158,08 persen dari target.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun realisasi DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018-2021 adalah sebagaimana yang terlihat pada Tabel III.11.

Tabel III.11
Dana Alokasi Umum / Penyeimbang DAU
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2018	1.018.673.218.000,00	1.018.435.174.809,00	99,98
2019	1.046.862.622.000,00	1.046.862.622.000,00	100,00
2020	943.982.191.000,00	942.308.451.000,00	99,82
2021	939.550.039.000,00	939.550.039.000,00	100,00
Jumlah	3.949.068.070.000,00	3.947.156.286.809,00	99,95

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Berdasarkan tabel III.11, dapat dijelaskan bahwa DAU selama tahun 2018-2021 secara rata-rata sebesar 99,95 persen. Upaya peningkatan DAU secara terus menerus dilakukan, antara lain secara bersama-sama dengan provinsi yang tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk memasukkan luas wilayah laut sebagai dasar perhitungan alokasi DAU ke daerah, disamping pemberian dana khusus kemahalan membangun di daerah kepulauan.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Realisasi DAK dari Tahun 2018-2021 sebesar 97,97 persen. Sepanjang 4 (empat) tahun terakhir, hanya tahun 2019 realisasi DAK mencapai sebesar 100,11 persen dan tahun 2021 semakin menurun sebesar 97,26 persen. Hal ini disebabkan karena kurangnya alokasi yang diberikan Pemerintah Pusat. Adanya kebijakan refocusing anggaran untuk beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan mendapat alokasi DAK tidak dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kebijakan refocusing anggaran dilakukan sebagai akibat pandemi Covid-19. Secara periodik, realisasi DAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2018-2021 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.12.

Tabel III.12
Realisasi Pos Dana Alokasi Khusus
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2018	477.959.139.000,00	460.227.704.831,00	96,29
2019	490.614.576.000,00	491.156.874.143,00	100,11
2020	555.251.520.855,00	545.345.060.864,00	98,22
2021	546.101.684.000,00	531.185.384.921,00	97,26
Jumlah	2.069.926.919.855,00	2.027.915.024.759,00	97,97

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

(3.) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Sumbangan Pihak Ketiga, Pendapatan Hibah, Dana Intensif Daerah (DID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018-2021 mengalami peningkatan. Kenaikan yang sangat signifikan pada Tahun 2019 sebesar 115,66 persen yang bersumber dari Hibah. Adapun Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2018-2021 adalah sebagaimana tergambar pada Tabel III.13.

Tabel III.13
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 3 - 2
2018	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	100,00	0
2019	86.102.500.000,00	99.585.198.474,00	115,66	12.317.177.850,00
2020	148.970.781.560,00	117.013.835.678,00	78,55	99.585.198.474,00
2021	94.500.000.000,00	83.860.777.103,00	88,74	-10.639.222.897,00
Jumlah	341.890.459.410,00	312.776.989.105,00	91,48	101.263.153.427

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel III.14.

Tabel III.14
Target dan Realisasi
Pendapatan Daerah Tahun 2018 s/d Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH			
		REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
1,1	Pendapatan Asli Daerah	850.441.774.831,35	826.701.095.332,07	683.432.674.809,81	896.982.419.466,98
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	787.235.420.038,83	760.997.424.482,42	613.615.822.923,72	817.141.235.274,58
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.613.352.047,00	8.731.932.753,00	6.513.383.818,00	5.947.140.845,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.114.092.291,88	5.442.309.381,71	5.471.185.541,79	5.714.380.624,89
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	50.478.910.453,64	51.529.428.714,94	57.832.282.526,30	68.179.662.722,51
	PENDAPATAN TRANSFER				
1,2	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.694.218.759.243,00	1.742.433.563.849,00	1.604.813.796.610,00	1.712.417.278.263,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	215.555.879.603,00	43.368.024.475,00	32.807.368.096,00	241.681.854.342,00
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	161.046.043.231,00	84.352.916.650,00	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.018.435.174.809,00	1.046.862.622.000,00	942.308.451.000,00	939.550.039.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	460.227.704.831,00	491.156.874.143,00	545.345.060.864,00	531.185.384.921,00
1,3	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	-	25.485.802.000,00	-	-
1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.3.2	Dana Penyesuaian	-	25.485.802.000,00	-	-

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	URAIAN	JUMLAH			
		REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6
1,4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	12.317.177.850,00	99.585.198.474,00	117.013.835.678,00	140.299.774.103,00
1.4.1	Pendapatan Hibah	-	99.585.198.474,00	64.193.790.678,00	83.860.777.103,00
1.4.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1.4.3	Pendapatan Lainnya (Sumbangan Pihak Ketiga)	-	-	-	-
1.4.5	Dana Intensif Daerah	-	-	52.820.045.000,00	56.438.997.000,00
1.4.5	Sumbangan Pihak Ketiga	12.317.177.850,00	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah		2.556.977.711.924,35	2.694.205.659.655,07	2.405.260.307.097,81	2.749.699.471.832,98

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Dari data tabel III.14 menunjukkan bahwa pendapatan daerah dan realisasi meningkat dalam kurun waktu dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan realisasi pendapatan daripada target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari sektor pajak kendaraan. Selain itu, realisasi retribusi daerah tidak mencapai target yang ditetapkan karena ada perubahan pada objek pajak dan perubahan perda tentang objek retribusi pajak baru.

3.1.1.2. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah pada periode 2018–2021 dipergunakan untuk upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang dijabarkan dalam periode perencanaan pembangunan setiap tahun (RKPD) atas dasar RPJMD 2012-2017 yang telah disusun sebelumnya. Pemahaman terhadap tantangan pembangunan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam visi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yaitu: ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***. Mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kondisi daerah, maka misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2017– 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal;
4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Serta Pembangunan Demokrasi; dan
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tersebut telah dilakukan upaya-upaya antara lain dengan mengintensifkan segala sektor pendapatan yang dapat dijadikan sumber daya untuk membiayai pembangunan tersebut.

Kinerja Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2018-2021 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.15.

Tabel III.15
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2018	2.596.704.155.898,11	2.364.345.563.586,80	91,05	(232.358.592.311,31)
2019	3.064.703.819.549,99	2.776.076.365.844,58	90,58	2.364.345.563.586,80
2020	2.775.738.991.930,58	2.575.170.436.359,30	92,77	2.776.076.365.844,58

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2021	2.848.626.619.540,00	2.463.804.285.970,62	86,49	(384.822.333.569,38)
Jumlah	11.285.773.586.918,70	10.179.396.651.761,30	90,20	4.523.241.003.551

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Berdasarkan Tabel III.15, dapat dijelaskan bahwa pada periode 2018-2021 jumlah anggaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan berjumlah Rp11.285.773.586.918,70 dengan realisasi sebesar Rp10.179.396.651.761,30 atau 90,20 persen. Kemampuan membelanjakan anggaran yang tersedia rata-rata baru 90,20 persen. Artinya masih besar jumlah anggaran yang tersisa setiap tahunnya.

(1.) Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Tabel III.16 diketahui bahwa Belanja Tidak Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018 sebesar Rp1.461.192.937.319,86 dengan realisasi sebesar Rp.360.176.219.327,02 atau 93,09 persen, dengan rincian komponen sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018 sebesar Rp705.272.537.397,66 dengan realisasi sebesar Rp659.760.322.587,62 atau 93,55 persen.

b. Belanja Bunga

Belanja Bunga dalam APBD selama tahun 2018 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018 sebesar Rp812.500.000,00 namun tidak terealisasi.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2018 sebesar Rp281.677.752.950,20 dengan realisasi sebesar Rp267.958.447.520,00 atau 95,13 persen.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018 sebesar Rp718.910.000,00 dengan realisasi sebesar Rp479.075.000,00 atau 66,64 persen.

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018 sebesar Rp192.487.959.172,00 dengan realisasi sebesar Rp170.854.282.754,76 atau 88,76 persen

g. Belanja Bantuan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018 sebesar Rp192.487.959.172,00 dengan realisasi sebesar Rp170.854.282.754,76 atau 88,76.

h. Belanja Tidak Terduga dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018 sebesar Rp2.296.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp59.757.300,00 atau 2,60 persen.

Tabel III.16
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung serta Komponennya
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Uraian	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
Belanja Pegawai	705.272.537.397,66	659.760.322.587,62	93,55	(45.512.214.810,04)
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	812.500.000,00	-	-	-
Belanja Hibah	281.677.752.950,20	267.958.447.520,00	95,13	(13.719.305.430,20)
Belanja Bantuan Sosial	718.910.000,00	479.075.000,00	66,64	(239.835.000,00)
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	277.927.277.800,00	261.064.334.164,64	93,93	(16.862.943.635,36)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	192.487.959.172,00	170.854.282.754,76	88,76	(21.633.676.417,24)
Belanja Tidak Terduga	2.296.000.000,00	59.757.300,00	2,60	(2.236.242.700,00)
Jumlah	1.461.192.937.319,86	1.360.176.219.327,02	93,09	(101.016.717.992,84)

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

(2.) Belanja Langsung

Belanja Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 yang digunakan sebagai belanja pembangunan dianggarkan sebesar Rp1.135.511.218.578,25 dengan realisasi sebesar Rp1.004.169.344.259,78 atau 88,43 persen, dengan rincian komponen sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018 sebesar Rp42.759.193.600,00 dengan realisasi sebesar Rp36.915.135.524,00 atau 86,33 persen.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2014-2018 sebesar Rp747.616.658.181,25 dengan realisasi sebesar Rp651.856.375.641,14 atau 87,19 persen.

c. Belanja Modal

Belanja Modal dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2018 sebesar Rp345.135.366.797,00 dengan realisasi sebesar Rp315.397.833.094,64 atau 91,38 persen.

Tabel III.17
 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung serta Komponennya
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Uraian	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
Belanja Pegawai	42.759.193.600,00	36.915.135.524,00	86,33	(5.844.058.076,00)
Belanja Barang dan Jasa	747.616.658.181,25	651.856.375.641,14	87,19	(95.760.282.540,11)
Belanja Modal	345.135.366.797,00	315.397.833.094,64	91,38	(29.737.533.702,36)
Jumlah	1.135.511.218.578,25	1.004.169.344.259,78	88,43	(131.341.874.318,47)

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

(3) Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019-2021 yang digunakan sebagai belanja pembangunan dianggarkan sebesar Rp 5.764.646.841.274,57 dengan realisasi sebesar Rp 5.244.281.816.873,50 atau 91,00 persen sebagaimana yang dapat terlihat pada Tabel III.18.

Tabel III.18
 Realisasi Belanja Operasi
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	2.030.165.607.953,99	1.822.821.431.195,45	89,79
2020	1.867.844.643.330,58	1.741.021.626.249,62	93,21
2021	1.866.636.589.990,00	1.680.438.759.428,43	90,02
Jumlah	5.764.646.841.274,57	5.244.281.816.873,50	91,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019-2021 sebesar Rp2.737.128.344.391,57 dengan realisasi sebesar Rp2.576.882.827.587,32 atau 94,15 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.19.

Tabel III.19
Realisasi Belanja Pegawai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	900.260.324.025,99	834.688.294.949,01	92,72
2020	994.627.738.061,58	943.695.426.476,30	94,88
2021	842.240.282.304,00	798.499.106.162,01	94,81
Jumlah	2.737.128.344.391,57	2.576.882.827.587,32	94,15

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

b. Belanja Barang

Belanja Barang dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019-2021 sebesar Rp2.089.234.602.998,00 dengan realisasi sebesar Rp1.770.441.639.948,18 atau 84,74 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.20.

Tabel III.20
Realisasi Belanja Barang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	827.415.064.868,00	701.916.523.186,44	84,83
2020	543.608.770.269,00	478.541.675.862,32	88,03
2021	718.210.767.861,00	589.983.440.899,42	82,15
Jumlah	2.089.234.602.998,00	1.770.441.639.948,18	84,74

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

c. Belanja Bunga

Belanja Barang dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019-2021 tidak dianggarkan, sehingga tidak ada realisasinya sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.21.

Tabel III.21
Realisasi Belanja Bunga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019-2021 hanya dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp3.000.000.000,00 namun tidak direalisasikan sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.22.

Tabel III.22
Realisasi Belanja Subsidi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	-	-	-
2020	3.000.000.000,00	-	-
2021	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019-2021 sebesar Rp931.367.481.525,00 dengan realisasi sebesar Rp894.241.306.738,00 atau 96,01 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.23.

Tabel III.23
Realisasi Belanja Hibah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	301.740.219.060,00	285.775.098.060,00	94,71
2020	325.858.135.000,00	318.197.523.911,00	97,65
2021	303.769.127.465,00	290.268.684.767,00	97,65
Jumlah	931.367.481.525,00	894.241.306.738,00	96,01

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019-2021 sebesar Rp3.916.412.360,00 dengan realisasi sebesar Rp2.716.042.600,00 atau 69,35 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.24.

Tabel III.24
Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	750.000.000,00	441.515.000,00	58,87
2020	750.000.000,00	587.000.000,00	78,27
2021	2.416.412.360,00	1.687.527.600,00	69,84
Jumlah	3.916.412.360,00	2.716.042.600,00	69,35

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

(4) Belanja Modal

Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019-2021 yang digunakan sebagai belanja pembangunan dianggarkan sebesar Rp1.521.198.597.111,00 dengan realisasi sebesar Rp1.305.182.562.650,86 atau 85,80 persen sebagaimana yang dapat terlihat pada Tabel III.25.

Tabel III.25
Realisasi Belanja Modal
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	488.546.559.104,00	441.201.203.550,86	90,31
2020	457.688.934.042,00	436.502.107.450,47	95,37
2021	574.963.103.965,00	427.479.251.649,53	74,35
Jumlah	1.521.198.597.111,00	1.305.182.562.650,86	85,80

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

a. Belanja Tanah

Belanja Tanah dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019-2021 hanya dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp115.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.933.500,00 atau 12,99 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.26.

Tabel III.26
Realisasi Tanah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	-	-	-
2020	115.000.000,00	14.933.500,00	12,99
2021	-	-	-
Jumlah	115.000.000,00	14.933.500,00	12,99

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019-2021 sebesar Rp387.815.233.374,00 dengan realisasi sebesar Rp270.005.109.710,55 atau 69,62 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.27.

Tabel III.27
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	122.387.223.000,00	96.024.460.290,15	78,46
2020	114.552.653.517,00	105.556.804.293,20	92,15
2021	150.875.356.857,00	68.423.845.127,20	43,35
Jumlah	387.815.233.374,00	270.005.109.710,55	69,62

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019-2021 sebesar Rp295.405.866.783,00 dengan realisasi sebesar Rp234.903.226.644,37 atau 79,52 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.28.

Tabel III.28
Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	96.973.966.555,00	82.415.022.888,98	84,99
2020	90.425.978.950,00	85.735.352.027,00	94,81
2021	108.005.921.278,00	66.752.851.728,39	61,80
Jumlah	295.405.866.783,00	234.903.226.644,37	79,52

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

d. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019-2021 sebesar Rp787.770.616.670,00 dengan realisasi sebesar Rp752.004.578.303,30 atau 95,46 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.29.

Tabel III.29
Realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	253.752.098.000,00	249.940.059.305,00	98,50
2020	240.623.202.084,00	233.356.140.924,36	96,98
2021	293.395.316.586,00	268.708.378.073,94	91,59
Jumlah	787.770.616.670,00	752.004.578.303,30	95,46

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

e. Belanja Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019-2021 sebesar Rp50.091.880.284,00 dengan realisasi sebesar Rp48.254.714.492,64 atau 96,33 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.30.

Tabel III.30
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	15.433.271.549,00	12.821.661.066,73	83,09
2020	11.972.099.491,00	11.838.876.705,91	98,89

2021	22.686.509.244,00	23.594.176.720,00	104,00
Jumlah	50.091.880.284,00	48.254.714.492,64	96,33

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

f. Belanja Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019-2021 tidak dianggarkan, sehingga tidak dapat direalisasikan.

(5) Belanja Tak Terduga

Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019-2021 yang digunakan sebagai belanja pembangunan dianggarkan sebesar Rp63.740.621.638,00 dengan realisasi sebesar Rp32.071.047.569,00 atau 50,31 persen sebagaimana yang dapat terlihat pada Tabel III.31.

Tabel III.31
Realisasi Belanja Tak Terduga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	4.327.596.207,00	-	0,00
2020	39.109.400.830,00	26.104.864.180,00	66,75
2021	20.303.624.601,00	5.966.183.389,00	29,38
Jumlah	63.740.621.638,00	32.071.047.569,00	50,31

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

(6) Transfer

Transfer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019-2021 yang digunakan sebagai belanja pembangunan dianggarkan sebesar Rp1.339.483.370.997,00 dengan realisasi sebesar Rp1.255.137.408.056,69 atau 93,70 persen sebagaimana yang dapat terlihat pada Tabel III.32.

Tabel III.32
Realisasi Transfer
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	541.664.056.285,00	512.053.731.098,27	94,53
2020	411.096.013.728,00	371.541.838.479,21	90,38
2021	386.723.300.984,00	371.541.838.479,21	90,48

Jumlah	1.339.483.370.997,00	1.255.137.408.056,69	93,70
---------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

a. Transfer/Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota

Transfer/Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019-2021 sebesar Rp1.254.050.675.515,00 dengan realisasi sebesar Rp1.156.985.387.599,14 atau 92,96 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.33.

Tabel III.33
Realisasi Transfer/Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	541.664.056.285,00	512.053.731.098,27	94,53
2020	365.400.268.246,00	330.883.067.997,21	90,55
2021	346.986.350.984,00	314.048.588.503,66	90,51
Jumlah	1.254.050.675.515,00	1.156.985.387.599,14	92,26

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

b. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2020-2021 sebesar Rp85.432.695.482,00 dengan realisasi sebesar Rp76.530.273.482,00 atau persen 89,58 sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.34. Sedangkan tahun 2019 tidak dianggarkan dan direalisasikan. Rincian tranfer pada tahun 2020 meliputi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya; (ii) Tansfer Bantuan Keuangan ke Desa; (iii) Transfer Bnatuan Keuangan Lainnya. Selanjutnya tahun 2021 dalam bentuk Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.

Tabel III.34
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2019	-	-	-
2020	45.695.745.482,00	40.658.770.482,00	88,98
2021	39.736.950.000,00	35.871.503.000,00	90,27

Jumlah	85.432.695.482,00	76.530.273.482,00	89,58
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Adapun proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dirinci seperti pada Tabel III.35.

Tabel III.35
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021
		(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
A	Belanja Tidak Langsung	93,09	-	-	-
1	Belanja Pegawai	93,55	-	-	-
2	Belanja Bunga	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	95,13	-	-	-
5	Belanja Bantuan Sosial	66,64	-	-	-
6	Belanja Bagi Hasil	93,93	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	88,76	-	-	-
8	Belanja Tidak Terduga	2,60	-	-	-
B	Belanja Langsung	88,43	-	-	-
1	Belanja Pegawai	86,33	-	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	87,19	-	-	-
3	Belanja Modal	91,38	-	-	-
C	Belanja Operasi	-	89,79	93,21	90,02
1	Belanja Pegawai	-	92,72	94,88	94,81
2	Belanja Barang	-	84,83	88,03	82,15
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	-	94,71	97,65	97,65
6	Belanja Bantuan Sosial	-	58,87	78,27	69,84
D	Belanja Modal	-	90,31	95,37	74,35
1	Belanja Tanah	-	-	12,99	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	78,46	92,15	43,35
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	84,99	94,81	61,80
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	98,50	96,98	91,59
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	83,09	98,89	104,00
6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
E	Belanja Tak Terduga	-	0,00	66,75	29,38
1	Belanja Tak Terduga	-	0,00	66,75	29,38
F	Transfer	-	94,53	90,38	90,48

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021
		(%)	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Transfer/Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	94,53	90,55	90,51
2	Transfer Bantuan Keuangan	-	-	88,98	90,27

Sumber: Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Dari tabel 3.34 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terhadap anggaran belanja dari ketahun semakin meningkat akan tetapi masih terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan realisasi belanja pada beberapa komponen belanja, hal ini menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah cukup baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi.

3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Pembiayaan Daerah dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017-2021 dianggarkan sebesar Rp1.136.927.144.215,03 dengan realisasi sebesar Rp1.182.141.297.536,21 atau 103,98 persen dengan uraian sebagaimana Tabel III.36.

Tabel III.36
Realisasi Pembiayaan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2017	212.692.026.730,06	217.692.026.730,06	102,35
2018	109.638.515.332,24	109.638.515.332,24	100,00
2019	302.270.663.669,62	302.270.663.669,62	100,00
2020	220.399.957.480,11	219.446.867.864,11	99,57
2021	291.925.981.003,00	333.093.223.940,18	114,10
Jumlah	1.136.927.144.215,03	1.182.141.297.536,21	103,98

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

(1.) Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan penerimaan mencakup komponen: 1) SILPA tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman; dan 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pembiayaan Penerimaan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dianggarkan sebesar Rp1.192.644.063.217,03 dengan realisasi sebesar Rp 1.192.644.063. 216,86 atau 103,43 persen sebagaimana yang terlihat pada Tabel III.37.

Tabel III.37
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2017	217.692.026.730,06	217.692.026.730,06	100,00
2018	109.638.515.332,24	109.638.515.332,24	100,00
2019	302.270.663.669,62	302.270.663.669,62	100,00
2020	220.399.957.480,11	219.446.867.864,11	99,57
2021	294.832.738.603,00	335.032.102.752,62	113,63
Jumlah	1.192.644.063.217,03	1.192.644.063.216,86	103,43

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

(2.) Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan pengeluaran mencakup komponen: 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal pemerintah daerah; 3) pembayaran pokok utang; dan 4) pemberian pinjaman. Adapun pembiayaan pengeluaran dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017-2021 dianggarkan sebesar Rp7.906.757.600,00 dengan realisasi sebesar Rp1.938.878.785,44 atau terealisasi sebesar 24,52 persen sebagaimana yang tergambar dalam Tabel III.38.

Tabel III.38
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2021

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2017	5.000.000.000,00	-	0,00
2018	-	-	0,00
2019	-	-	0,00
2020	-	-	0,00
2021	2.906.757.600,00	1.938.878.785,44	66,70
Jumlah	7.906.757.600,00	1.938.878.785,44	24,52

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

3.1.2 Neraca Daerah

3.1.2.1 Pertumbuhan Neraca Daerah

Neraca merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, sebagai informasi neraca menyediakan gambaran mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset,

kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai tingkat rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara ekonomis, efektif dan efisien atau memenuhi unsur *value for money*. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2016-2020 seperti terlihat pada Tabel III.32 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

- a. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.
- b. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- c. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2016-2020, merupakan kewajiban jangka pendek (atau kewajiban lancar) berupa utang perhitungan pihak ketiga dan utang jangka pendek (atau kewajiban lancar) berupa utang perhitungan pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya.
- d. Ekuitas dana yang meliputi dana lancar dan dana investasi merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Perkembangan Neraca Daerah dari Tahun 2014-2018 dapat dilihat tabel III.39.

Tabel III.39

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	(%)
1	2	5	6	7	8	9	10
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	235.487.309.498,46	161.279.900.542,67	367.282.600.406,23	298.144.607.303,18	148.140.499.691,60	
1.1.1.	Kas	217.350.414.204,06	110.649.986.772,00	304.799.410.235,25	220.333.111.744,28	50.962.617.031,74	
1.1.2.	Piutang	5.200.699.808,70	2.469.698.963,19	5.095.138.651,38	18.637.408.118,66	8.320.304.896,61	
1.1.3.	Persediaan	12.936.195.485,70	48.160.214.807,48	57.362.054.213,60	58.963.747.676,24	88.668.800.881,53	
1.1.4.	Biaya Dibayar Di Muka (Uang Muka Proyek)	-	-	25.997.306,00	210.339.764,00	188.776.881,72	
1.2.	INVESTASI	82.237.317.816,27	77.625.597.367,77	77.800.341.510,06	78.605.345.345.007,00	78.605.345.345.007,00	
1.3.	ASET TETAP	3.400.008.327.539,19	3.610.675.201.291,90	3.729.241.652.344,41	3.988.739.982.887,91	4.153.913.550.619,41	
1.3.1.	Tanah	372.119.606.315,00	651.804.492.713,00	654.759.377.563,00	655.486.426.053,00	655.916.133.677,00	
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	529.400.666.385,41	747.579.419.837,29	822.098.441.502,51	954.823.674.918,02	1.105.993.109.117,53	
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	885.491.468.775,92	1.159.714.109.736,30	1.227.543.841.556,73	1.322.046.144.349,59	1.364.637.459.366,93	
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.258.185.675.506,80	2.546.022.960.677,54	2.712.482.234.293,29	2.962.936.262.453,29	3.197.131.609.777,32	
1.3.5.	Aset tetap lainnya	24.893.432.457,06	38.316.449.219,00	47.538.848.491,00	57.650.488.364,00	65.991.658.734,00	
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	32.191.566.715,00	53.659.895.692,77	69.930.518.677,88	82.733.361.264,00	85.516.052.744,00	
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-802.274.088.616,00	(1.586.422.126.584,00)	(1.805.111.609.740,00)	-2.046.936.374.513,99	-2.321.272.472.797,37	
1.4.	ASET LAINNYA	38.898.122.400,31	144.139.121.561,70	80.228.121.406,67	89.269.281.530,67	84.815.516.447,17	
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	-	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	(%)
1	2	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	-	
1.4.3.	kemitraan dengan pihak kedua	-	-	-	-	-	
1.4.4.	Aset tak berwujud	622.604.400,00	1.365.519.411,00	3.277.233.188,83	3.474.339.286,83	3.347.575.154,50	
1.4.5.	Aset Lain-lain	38.275.518.000,31	142.773.602.150,70	76.950.888.217,84	85.794.942.243,84	81.467.941.292,67	
	JUMLAH ASET DAERAH	3.756.631.077.254,23	3.993.719.820.764,04	4.254.552.715.667,37	4.465.483.911.765,08	4.456.676.815.376,42	
2.	KEWAJIBAN	115.183.779.404,41	71.075.327.807,10	223.874.892.226,72	26.393.204.823,73	32.132.914.897,00	
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	115.183.779.404,41	71.075.327.807,10	223.874.892.226,72	26.393.204.823,73	32.132.914.897,00	
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	23.928.474,00	87.699.171,00	93.532.330,00	79.843.544,73	8.750.000,00	
2.1.2.	Utang Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3.	Utang Pajak	-	-	-	-	-	
2.1.4.	Bagian lancar utang jangka panjang dalam negeri	-	-	-	-	-	
2.1.5.	Pendapatan Diterima dimuka	-	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	
	Utang Beban		608.968.626,00	21.546.912.381,42	26.132.051.370,00	28.712.598.822,00	
2.17.	Utang jangka pendek lainnya	115.159.850.930,41	70.351.960.010,10	202.207.747.515,30	154.609.909,00	3.384.866.075,00	
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	
2.2.1.	Utang dalam negeri	-	-	-	-	-	
2.2.2.	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	(%)
1	2	5	6	7	8	9	10
2.2.3.	Utang jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	
3.	EKUITAS DANA	3.641.447.297.849,82	3.922.644.492.956,92	4.030.677.823.451,65	4.312.378.114.995,86	4.346.665.008.128,56	

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020

3.1.2.2 Rasio Neraca

(1.) Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam penghitungan rasio likuiditas yang sering digunakan adalah rasio lancar dan *quick* rasio. Nilai rasio lancar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tabel III.39 berada pada 2,27-1,00 untuk tahun 2017-2020. Jika angka rasio lebih dari 1 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mampu melunasi kewajibannya sedangkan nilai rasio kurang dari 1 menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melunasi hutang sangat rendah. Sementara *Quick* Rasio tahun 2017 dan 2018 dianggap baik dikarenakan berada pada angka 1,59 dan 1,38, tetapi berbeda dengan tahun 2019 dan 2020 yang memiliki angka 0,80 dan 0,40 yang berada dibawah dari angka 1. Berikut data rasio likuiditas dan *quick* rasio selama 4 (empat) tahun terakhir 2017-2020 sebagaimana Tabel III.40 berikut.

Tabel III.40
Rasio Likuiditas Neraca Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2020

Rasio Likuiditas	Rumus	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Rasio Lancar	Aset Lancar/Kewajiban Jangka Pendek	2.27	1.64	1.00	1.00
<i>Quick</i> Rasio	(Aset Lancar-Persediaan) / Kewajiban Jangka Pendek	1.59	1.38	0.80	0.40

Sumber: Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017-2020 (diolah)

(2.) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Pengukuran rasio solvabilitas ini menggunakan 2 pendekatan yaitu rasio kewajiban terhadap total aset yang mengukur kemampuan daerah dalam penjaminan hutang dengan jumlah aktiva yang dimilikinya dan rasio kewajiban terhadap ekuitas yang mengukur seberapa besar daerah dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan ekuitas. Tabel III.40 menunjukkan bahwa rasio solvabilitas pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2020 antara 0,02-0,06. Nilai rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu dalam membayar kewajiban jangka panjangnya dimana nilai maksimal dari rasio ini adalah 1. Berikut Rasio Solvabilitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 4 (empat) tahun terakhir tahun 2017-2020 sebagaimana pada Tabel III.41.

Tabel III.41
Rasio Solvabilitas Neraca Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2020

Rasio Solvabilitas	Rumus	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Rasio Total Kewajiban terhadap Total Aset	Total Kewajiban/Total Aset	0.02	0.05	0.03	0.03
Rasio Total Kewajiban terhadap Ekuitas	Total Kewajiban/Total Ekuitas	0.02	0.06	0.03	0.03

Sumber: Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017-2020 (diolah)

3.1.3 Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah

Dari analisis kemampuan keuangan daerah sejak 2022-2026, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, ternyata terjadi defisit anggaran setiap tahunnya. Artinya kemampuan pendapatan masih lebih kecil dari belanja yang ditetapkan. Untuk periode 2022-2026, telah ditetapkan RPJMD yang juga memuat indikasi anggaran yang dibutuhkan selama 5 tahun tersebut.

Oleh karena itu untuk meyakinkan terselenggaranya seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD, maka harus dilakukan perubahan rancangan kemampuan keuangan daerah pada sisa tahun kedepan, terutama total pendapatan, baik dari pendapatan asli daerah maupun sumber dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah. Prediksi 5 tahun mulai dari tahun 2022-2026. Namun dikarenakan indikasi anggaran yang dibutuhkan selama 5 tahun, sebagaimana tertuang dalam Bab III, ternyata lebih besar dari kemampuan anggaran yang diprediksi, maka selain sumber PAD dan Dana Perimbangan, maka dibutuhkan dana APBN yang dilaksanakan di daerah, serta dana investasi serta kerjasama usaha, disamping dukungan dana APBD kabupaten/kota yang ada. Artinya pelaksanaan seluruh program yang telah ditetapkan di RPJMD, akan didanai tidak hanya dari APBD Provinsi, tetapi juga APBN yang dilaksanakan di daerah, Dana investasi dan kerja sama badan usaha, serta dana APBD kabupaten/kota.

Kemampuan pendapatan daerah yang sudah direalisasikan dan direncanakan kembali seperti tabel berikut ini.

Tabel III.42
Prediksi Kemampuan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2022-2026

No	Sumber Pendapatan	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	814,514,935,188.00	928,009,515,890.73	943,523,064,102.61	959,036,612,314.49	974,550,160,526.36
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	698,200,594,255.00	837,078,445,431.75	847,047,050,510.33	857,015,655,588.91	866,984,260,667.50
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	21,682,741,400.00	4,836,333,377.00	4,280,929,643.00	3,725,525,909.00	3,170,122,175.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,500,000,000.00	6,114,572,846.90	6,314,668,957.90	6,514,765,068.90	6,714,861,179.91
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	89,131,599,533.00	79,980,164,235.09	85,880,414,991.38	91,780,665,747.67	97,680,916,503.96
	PENDAPATAN TRANSFER					
1.2	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1,113,021,097,000.00	1,729,834,594,755.67	1,738,543,253,002.00	1,747,251,911,248.33	1,755,960,569,494.67
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	-	259,099,170,834.67	267,807,829,081.00	276,516,487,327.33	285,225,145,573.67
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Umum	-	939,550,039,000.00	939,550,039,000.00	939,550,039,000.00	939,550,039,000.00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	-	531,185,384,921.00	531,185,384,921.00	531,185,384,921.00	531,185,384,921.00
1.3	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	-	-	-	-	-
1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

No	Sumber Pendapatan	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	140,299,774,103.00	140,299,774,103.00	140,299,774,103.00	140,299,774,103.00
1.4.1	Pendapatan Hibah	-	83,860,777,103.00	83,860,777,103.00	83,860,777,103.00	83,860,777,103.00
1.4.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.4.3	Pendapatan Lainnya (Sumbangan Pihak Ketiga)	-	-	-	-	-
1.4.5	Dana Intensif Daerah	-	56,438,997,000.00	56,438,997,000.00	56,438,997,000.00	56,438,997,000.00
1.4.5	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah		1,927,536,032,188.00	2,798,143,884,749.40	2,822,366,091,207.61	2,846,588,297,665.82	2,870,810,504,124.03

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Sejumlah permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini diidentifikasi sebagai faktor yang perhatian untuk pembangunan di masa mendatang.

4.1.1. Permasalahan Daerah

Permasalahan daerah mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, sehingga menjadi fokus. Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Beberapa permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. *Belum Optimalnya Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian;*

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada lapangan usaha PDRB Sub Sektor Pertanian yang terdiri dari Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian dalam periode 2017-2020 cukup fluktuatif. Dimana pada tahun 2017 sebesar 1,17% dan meningkat di tahun 2018 menjadi sebesar 4,15%. Pada tahun 2019 pertumbuhan melambat sebesar 1,40%. Kemudian meningkat kembali di tahun 2020 menjadi sebesar 7,78%. Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian sangat fluktuatif karena masih didominasi oleh sub sektor perkebunan terutama sektor kelapa sawit. Rendahnya pertumbuhan pada sektor ini disebabkan fluktuatifnya harga komoditas perkebunan. Adanya kebijakan pembatasan perluasan lahan perkebunan juga sangat mempengaruhi tingkat produksi perkebunan. Ditambah dengan usia tananam perkebunan yang sudah tidak produktif sehingga dilakukan kebijakan replanting (peremajaan) yang otomatis mempengaruhi tingkat produksi sektor perkebunan.

2. *Belum Optimalnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan;*

Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan periode tahun 2017-2020 cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2017 tumbuh negatif sebesar -3,24%. Namun pada tahun berikutnya tumbuh positif sebesar 8,10% (2018) dan melambat di tahun 2019 sebesar 5,76% kemudian meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 9,76%. Masih rendahnya kontribusi sub sektor perikanan di dalam perekonomian daerah yang secara rata-rata hanya berkontribusi sebesar 7,43% dan tidak sebanding dengan potensi kelautan yang sangat

besar mencapai 80% luas wilayah perairan laut Bangka Belitung. Hal ini dikarenakan potensi laut Bangka Belitung belum dikelola secara optimal. Saat ini sektor perikanan lebih mengandalkan produksi perikanan budidaya dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya tumbuh pesat ditahun 2020 sebesar 14,17% dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,09% (data Dinas Kelautan 2021).

3. *Rendahnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian;*

Rendahnya PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Energi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain masih rendahnya nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian. Menurunnya laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2018 berada di angka -0,95%, sedangkan ditahun sebelumnya berada di angka 2,22% (menurun 1,97 poin). Kenaikan pertumbuhan tidak signifikan ditahun 2019 sebesar 0,91% dan kembali minus di tahun 2020 menjadi sebesar -9,23%. Hal ini berimbas pada menurunnya pertumbuhan sub sektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi dari -1,23% (2017) menjadi -16,58% (2018), kemudian naik 2,61% (2019) dan kembali minus ditahun 2020 menjadi sebesar -23,47%. Penurunan pertumbuhan ini pun terjadi pada sub sektor pertambangan biji logam dari 2,90% (2017) menjadi sebesar -0,11% (2018). Kemudian dari -0,30% (2019) menjadi -10,04%(2020). Rendahnya PDRB sub sektor pertambangan dan penggalian disebabkan menurunnya cadangan deposit khususnya logam timah sekunder, mengingat sampai dengan saat ini belum ada teknologi yang canggih dan ramah lingkungan yang dapat menjangkau timah primer.

4. *Belum optimalnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan;*

Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari 6,15% (2017) menjadi 3,97% (2018) menurun kembali menjadi sebesar 1,20% (2019) dan -5,64% (2020). Belum optimalnya PDRB sub sektor industri pengolahan ini sebagai dampak dari penurunan kontribusi sub sektor industri logam dasar dari 7,70% (2017) menjadi -0,34% (2018) kemudian menurun kembali menjadi sebesar -0,77% (2019) dan -10,08% (2020). Lebih dari 50% industri pengolahan di Bangka Belitung di dominasi oleh sub sektor industri logam dasar, yang mana sub sektor logam dasar ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari sub sektor pertambangan biji logam sebagai sumber bahan baku bagi industri pengolahan.

5. *Belum optimalnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan;*

Sub sektor perdagangan termasuk dalam klasifikasi sektor tersier. Kinerja sektor perdagangan selama 4 (empat) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga 2020 semakin menurun. Laju pertumbuhan sub sektor perdagangan tahun 2017 sebesar 7,81% dan tumbuh melambat sebesar 2,64% (2018) dan 1,76 (2019). Pada tahun 2020 mengalami laju pertumbuhan negatif menjadi sebesar -4,62%. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan sub sektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya yang tumbuh negatif sebesar -21,52% (2020) dan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor juga tumbuh negatif sebesar 1,41%. Belum optimalnya Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) sektor yaitu pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Kontribusi ketiga sektor ini lebih dari 50% mengingat sub sektor perdagangan merupakan sektor sekunder. Ketika tiga sektor ini melemah maka akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

6. *Belum optimalnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestik*

Bangka Belitung memiliki potensi pariwisata yang sangat menakjubkan sehingga bisa diandalkan sebagai potensi unggulan. Dengan keindahan alam dan pantai berpasir putih yang indah dan tersebar di hampir seluruh daerah, maka sektor ini bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Bangka Belitung. Namun berdasarkan data BPS, dalam kurun waktu 2017-2020 tercatat jumlah kunjungan wisatawan mengalami fluktuasi. Pada 2017, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 7.143 wisatawan dan domestik 362.279 wisatawan. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 8.124 wisatawan dan domestik sebanyak 417.818 wisatawan. Sedangkan pada tahun 2019 wisatawan mancanegara sebanyak 9.183 dan domestik 429.190 wisatawan. Di tahun 2020 wisatawan yang datang ke Bangka Belitung mengalami penurunan signifikan yang disebabkan mewabahnya pandemi Covid-19, yaitu Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 2.476 wisatawan dan domestik sebanyak 221.475 wisatawan. Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik menyebabkan rendahnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan yang berpengaruh terhadap akomodasi, makan minum dan UMKM yang bergerak di bidang pariwisata sehingga menyebabkan rendahnya kontribusi terhadap PDRB sektor pariwisata. Laju pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2019 sebesar 2,92%, sedangkan tahun 2020 sebesar - 48,45 %.

7. *Belum optimalnya pertumbuhan ekspor*

Dalam perdagangan internasional, Bangka Belitung terkenal dengan lada putih dan timah. Sejak lama, kedua komoditas tersebut telah diperdagangkan secara internasional. Selain komoditas logam timah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menghasilkan lada, minyak kelapa sawit (CPO), karet, dan hasil perikanan. Pertumbuhan ekspor di Bangka Belitung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Desember 2017 pertumbuhan ekspor Bangka Belitung cukup baik sebesar 58,04%. Namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami pertumbuhan minus yaitu sebesar -1,49% (2018), -22,59 (2019), dan - 6,03(2020). Belum optimalnya pertumbuhan ekspor Bangka Belitung disebabkan masih relatif terbatasnya komoditas daerah yang akan diekspor, dimana 80 persen ekspor Bangka Belitung masih berasal dari ekspor logam timah.

8. *Belum maksimalnya nilai investasi (PMA/PMDN) daerah*

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen dalam pertumbuhan ekonomi. Adanya aktivitas investasi akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan statusnya, investasi meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam periode 2017 sampai dengan 2021, nilai PMDN dan PMA di Bangka Belitung terus meningkat dengan Perkembangan nilai investasi dari sebesar 3.781 Milyar (2017) menjadi sebesar 4.330 Milyar (2021) dengan rincian 3.677 Milyar PMDN dan 652 Milyar PMA. Pada tahun 2020 nilai investasi ini meliputi 2.371 proyek untuk PMDN dan 287 proyek untuk PMA, hal ini mengalami penurunan yang disebabkan adanya pandemic covid 19 yang berpengaruh terhadap seluruh sector. Capaian investasi Bangka Belitung meskipun diatas target yang di tetapkan, namun masih di di bawah target nasional yaitu sebesar 4,5 triliun.

9. *Belum maksimalnya peningkatan pembangunan manusia*

Pegukuran Indeks pembangunan manusia (IPM) suatu daerah menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh suatu wilayah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Adapun capaian IPM Bangka Belitung Pada periode 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan, pada 2021 mencapai 71,69, meningkat 0,22 poin atau 0,31 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya, Peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Namun peningkatan ini belum signifikan. Jika dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 72,29, Bangka Belitung masih harus dengan usaha yang keras untuk mengejar ketertinggalan.

10. *Menurunnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga dalam demokrasi*

Kebebasan Sipil (Civil Liberty), hak hak politik (Political Rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (Institution of Democracy) adalah tiga aspek demokrasi yang merupakan aspek pembentukan IDI yaitu indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2019, kebebasan sipil naik 3,17 poin (dari 80,95 menjadi 84,12), hak-hak politik turun 1,85 poin (dari 73,56 menjadi 71,71), dan lembaga-lembaga demokrasi naik 11,72 poin (dari 63,76 menjadi 75,48). Adapun capaian pada tahun 2020, kebebasan sipil sebesar 79,12, hak hak politik sebesar 66,20 dan Lembaga demokrasi 92,97. Penurunan nilai aspek Kebebasan Sipil menunjukkan indikasi bahwa ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah maupun oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat serta berpendapat mengalami peningkatan. Pada aspek hak-hak politik mengalami penurunan yang disebabkan partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan agak menurun. Selain 2 aspek yang mengalami penurunan, aspek lembaga demokrasi mengalami peningkatan nilai didukung oleh kinerja DPRD dan pemerintah daerah yang semakin baik, seperti alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD, jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN, serta berkurangnya keputusan hakim yang kontroversial. Secara umum, perkembangan demokrasi di Bangka Belitung menunjukkan tren ke arah positif. Nilai IDI Bangka Belitung pada 2017-2020 berfluktuasi pada kisaran angka 70 hingga 80-an. IDI Kepulauan Bangka Belitung pada 2020 mencapai 77,39, naik 0,64 poin dibandingkan tahun 2019. Nilai IDI Bangka Belitung ini sudah di atas rata rata nasional yang sebesar 6,71 dan berada pada peringkat ke-9 secara nasional, namun Status demokrasi Bangka Belitung masih berada pada kategori sedang.

11. *Belum optimalnya tata kelola pemerintahan*

Penatakelolaan pemerintah dilihat dari belum optimalnya capaian indeks reformasi birokrasi dimana pada tahun 2018 capaian yang diperoleh sebesar 65,39 dan tahun 2019 sebesar 66,84, sedangkan capaian pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dengan capaian sebesar 66,08. Capaian RB tersebut masuk dalam kategori "B" yang bergabung dengan 22 Provinsi lainnya di Indonesia. Capaian sekarang

belum merupakan nilai yang terbaik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diperlukan 3 (tiga) jenjang lagi untuk mencapai predikan “AA”. Hal ini perlu kerjasama dan upaya keras dari seluruh Perangkat Daerah untuk perbaikan dimasa yang akan datang, serta masih harus diperbaiki terutama sistem pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang saat ini masih dalam bentuk dokumentasi dan penugasan, serta belum diikuti upaya yang nyata untuk dapat mencapai sasaran Reformasi Birokrasi.

12. *Belum Maksimalnya ketersediaan infrastruktur*

Keberadaan infrastruktur pada sebuah negara maupun daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan, namun dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur pada sebuah daerah tidaklah mudah, ada beberapa masalah yang dapat menghambat. Provinsi Bangka Belitung dalam pengembangan infrastruktur sudah bisa di kategorikan baik, dengan sarana prasarana yang sudah dianggap memadai. Namun untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur terkendala pada kewenangan provinsi yaitu hanya sebatas pada wilayah regional atau perbatasan antar kabupaten dan kota maupun antar kabupaten dan kabupaten. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur air bersih, sanitasi dan persampahan regional di Bangka Belitung sampai saat ini belum terlaksana. Selain itu, dalam hal penanganan Kawasan kumuh, pembagian kewenangan antara Provinsi dan kabupaten/kota masih belum dilaksanakan secara maksimal sehingga pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh provinsi terkait pemenuhan infrastruktur dasar hanya dilaksanakan pada kawasan kumuh kewenangan provinsi yang memiliki luasan 10-15 ha pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta pemenuhan prasana sarana utilitas permukiman.

13. *Belum optimalnya kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang*

Kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang dapat dilihat dari evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya penilaian terhadap RTRW Provinsi meliputi beberapa hal yaitu terdapatnya perubahan kebijakan dalam RTRW Provinsi, terdapatnya dinamika pembangunan dan ditemukan adanya simpangan dalam pelaksanaan RTRW Provinsi. Simpangan pemanfaatan ruang berdasarkan overlay peta eksisting dan Rencana peruntukan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya yaitu jumlah luas rencana kawasan lindung dengan kawasan budidaya seluas 1754,479 Ha sementara berdasarkan kondisi eksisting penggunaan lahan yang dimanfaatkan sebesar 1792,669 Ha (sumber: data Kajian Peninjauan Kembali RTRWP Tahun 2018). Adapun data terkait penyelenggaraan pemanfaatan ruang dari awal historis tahun 2018 hingga tahun 2020 yaitu sebesar 60% (0,6) yang dihitung dari persentase realisasi pemanfaatan ruang dibagi dengan rencana pemanfaatan ruang yang ada dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2014-2034.

14. *Tingginya resiko bencana*

Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020, Bangka Belitung memiliki nilai IRBI 161,54. Nilai ini merupakan kelas resiko multi bahaya yang tinggi bersama 3 (tiga) provinsi lainnya, yaitu Bengkulu, Maluku dan Sulawesi Barat. Menurut data dan informasi bencana Indonesia (DIBI), kejadian bencana di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2011-2020 ada 77 kejadian, yaitu banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan.

15. *Belum optimalnya pembangunan kawasan pedesaan*

Optimalisasi pembangunan kawasan pedesaan diarahkan sebagai kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dengan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun yang memotret perkembangan status dan kemandirian Desa. Dari 309 Jumlah desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nilai rata-rata IDM statusnya berkembang. Oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan nilai tersebut, kapasitas desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu ditingkatkan statusnya, meskipun saat ini sudah tidak ada lagi desa dengan status Desa Tertinggal. Tahun 2020, status Desa Mandiri sebanyak 11 desa, Desa Maju berjumlah 102 desa, dan Desa Berkembang berjumlah 196 desa. Secara nasional peringkat Indeks Desa Membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di peringkat ke-9. sedangkan di wilayah Sumatera berada di peringkat ke-2 dibawah provinsi Sumatera Barat.

16. *Lambatnya penurunan laju pertumbuhan penduduk*

Kepadatan penduduk menunjukkan penurunan, dari 91 jiwa per km² pada tahun 2019 menjadi 89 jiwa per km². Pada tahun 2020 penduduk usia non produktif, usia 0-14 tahun berjumlah 363.044 dan usia 65+ tahun berjumlah 72.643 sedangkan penduduk usia produktif, usia 15-64 tahun berjumlah 1.019.991. Dengan demikian, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki era bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak bekerja. Agar bonus demografi dapat menjadi keuntungan bagi daerah, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian penduduk, hingga kebijakan ekonomi. Adapun laju pertumbuhan penduduk (LPP) Bangka Belitung dari tahun 2017 – 2020 terus mengalami penurunan yaitu sebesar 2,07% (2017), 2,02% (2018), 1,98% (2019), dan 1,93% pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Bangka Belitung 1,84%. Laju pertumbuhan penduduk ini masih di atas rata-rata nasional yang sebesar 0,98%. Pertumbuhan ini disebabkan selisih antara tingkat kematian dan kelahiran yang cukup tinggi di mana penurunan tingkat kematian lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Penduduk usia lanjut dan usia produktif termasuk usia angkatan kerja akan bertambah besar proporsinya. Sementara itu penduduk usia muda (bayi dan anak) jumlahnya meningkat.

17. *Belum maksimalnya penurunan kemiskinan*

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Bangka Belitung dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Pada September 2019 penduduk miskin diangka 67.37 ribu orang (4,50%) sedangkan pada periode yang sama tahun 2020 sebanyak 72.50 ribu orang (4,89%). Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 69,70 ribu orang dengan persentase sebesar 4,67%. Tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 9,71%

dan berada pada peringkat 3 (tiga) terendah setelah Provinsi Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta. Namun disisi lain, jumlah penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif cukup banyak, yaitu berjumlah 264.262 Jiwa (80.623 KK). Tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah Bangka Belitung. Kemiskinan disebabkan karena struktur sosial dalam masyarakat, yaitu kurang mampunya memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah.

18. Rendahnya kesempatan kerja

Tahun 2020 jumlah penduduk usia kerja di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1.104.219 orang. Dari total angkatan kerja sebesar 94,75 persen diantaranya bekerja dan sisanya 5,25 persen merupakan pengangguran. Adapun capaian indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Bangka Belitung tahun 2017 sebesar 58,83 kemudian meningkat sebesar 63,23 (2018) dan 63,82 (2020). Pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu dengan capaian 47,84. Capaian IPK Bangka Belitung sampai saat ini masih masuk kategori menengah ke bawah yaitu < 65,99. Secara umum permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tingginya laju angkatan kerja, rendahnya mutu tenaga kerja dan rendahnya laju kesempatan kerja yang tersedia. Tingginya laju angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan laju penciptaan lapangan kerja akan mengakibatkan timbulnya banyak pengangguran dan mutu tenaga kerja yang rendah akan mempersulit penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada rendahnya penghasilan yang akhirnya bermuara pada tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Berdasarkan data BPS pusat per Agustus 2021 Bangka Belitung menduduki peringkat 18 (delapan belas) dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,03% dan masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 6,49%.

19. Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan 2021 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) cenderung fluktuatif. Nilai IKLH dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus menurun dari 67,85 menjadi 64,85 namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 73,50. Tahun 2021 nilai IKLH kembali menurun menjadi 72,05. Indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara yang menurun memberikan andil terhadap penurunan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.1.2. Permasalahan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan Daerah berdasarkan urusan adalah masalah yang terkait langsung atau pun tidak langsung dengan masalah utama Daerah, yaitu sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Bidang Pendidikan

Permasalahan di Bidang Pendidikan, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun 2021 sebesar 68,15. Ini menunjukkan bahwa sebanyak 31,75 persen anak usia 16-18 tahun tidak melanjutkan sekolah di tingkat SMA/SMK dan

ini tentunya berdampak pada rendahnya capaian rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam skala Nasional, pada tahun 2021, APS Bangka Belitung sebesar 68,15 masih di bawah capaian nasional sebesar 73,09 persen dan secara Regional untuk Pulau Sumatera, capaian APS Bangka Belitung tahun 2021 berada di tingkat paling rendah. Capaian APS tertinggi diraih oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 84,40 persen.

- b. Rendahnya pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah. Pada tahun 2021, capaian APM pendidikan menengah sebesar 58,79 persen dan ini menunjukkan bahwa hanya sebanyak 58.79 persen anak usia 16-18 tahun di Bangka Belitung yang bersekolah di tingkat pendidikan menengah. Secara Nasional, capaian APM Bangka Belitung masih di bawah capaian nasional, yang pada tahun 2021 adalah sebesar 61,65 persen. Secara Regional untuk pulau Sumatera, capaian Bangka Belitung tahun 2021 paling rendah se-Sumatera, sedangkan APM tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau, yakni sebesar 73,36 persen.
- c. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat disebabkan masih banyak satuan pendidikan yang belum terakreditasi A. Pada tahun 2021, dari 139 SMA/SMK dan SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah sekolah dengan akreditasi A sebanyak 65 sekolah atau 46,76 persen, sekolah dengan akreditasi B sebanyak 57 sekolah atau 41,01 persen, sekolah terakreditasi C sebanyak 12 sekolah atau 8,63 persen, dan lima sekolah atau sebesar 3,59 persen sekolah yang belum terakreditasi. Untuk sekolah berbentuk SMA, pada tahun 2021 terdapat 44 SMA atau 61,79 persen SMA yang terakreditasi A; 21 SMA atau 29,58 persen yang terakreditasi B; lima SMA atau sebesar 7,04 persen yang terakreditasi C; dan satu SMA atau sebesar 1,41 persen yang belum terakreditasi. Pada sekolah berbentuk SMK, dari 59 SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebanyak 18 SMK atau sebesar 30,51 persen yang terakreditasi A; 31 SMK atau 52,54 persen yang terakreditasi B; enam SMK atau 10,17 persen terakreditasi C; dan masih ada empat SMK yang belum terakreditasi. Pada sekolah pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB), dari sembilan SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebanyak tiga SLB atau 46,76 persen yang terakreditasi A; lima SLB atau 41,01 persen terakreditasi B; dan satu SLB yang terakreditasi C. Akreditasi sekolah adalah proses yang digunakan dalam pendidikan untuk memastikan bahwa sekolah memenuhi dan mempertahankan standar minimum kualitas dan integritas layanan pendidikan yang diberikan, terkait dengan akademik, administrasi, dan layanan terkait lainnya. Sebelum tahun 2021, akreditasi sekolah diukur dari delapan standar pendidikan (isi, proses, penilaian, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan dan sarana prasarana). Sejak tahun 2021, dalam melaksanakan reformasi sistem pendidikan, penilaian akreditasi sekolah dinilai dari empat komponen, yakni mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen sekolah. Reformasi dalam sistem penilaian akreditasi sekolah ini dikarenakan sistem penilaian akreditasi yang lama tidak menjamin mutu pendidikan, sehingga semua sekolah yang terakreditasi A tidak selalu bermutu tinggi. Penilaian akreditasi sekolah dengan sistem penilaian yang lama hanya mengukur penilaian berbasis administrasi (compliance), sementara itu sistem penilaian akreditasi terbaru yang menggunakan sistem dashboard monitoring merupakan penilaian berbasis kinerja (performance).
- d. Masih tingginya jumlah siswa yang putus sekolah.

Secara keseluruhan, jumlah siswa putus sekolah pada periode 2017-2021 adalah 2.212 orang. Tahun 2017 dan 2018 merupakan tahun-tahun dimana siswa yang putus sekolah mencapai jumlah tertinggi, yakni sebanyak 578 dan 987 orang. Berdasarkan jenis sekolah, selama lima tahun terakhir, jumlah siswa yang mengalami putus sekolah tertinggi berada di SMK mencapai 1.571 orang siswa SMK yang putus sekolah. Tahun 2018 dan 2020 merupakan tahun-tahun dengan jumlah siswa putus sekolah tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya dalam periode 2017-2021, dimana sebanyak 527 dan 632 orang siswa SMK putus sekolah. Sementara itu, pada sekolah menengah jenis SMA, jumlah siswa yang mengalami putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2017 dimana sebanyak 302 dan 186 orang siswa SMA putus sekolah pada masing-masing tahun tersebut. Tingginya jumlah siswa jenjang SMA/SMK yang putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan beberapa faktor, antara lain pernikahan usia anak-anak, rendahnya motivasi belajar para siswa, dan dampak dari pandemi Covid 19 dimana proses pendidikan yang tidak berjalan dengan efektif mengakibatkan banyak siswa mengalami learning loss. Selanjutnya, tingginya jumlah siswa putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dipengaruhi isu sosiokultural dimana banyak siswa yang bekerja di tambang timah milik masyarakat, mencari bijih timah di tambang timah, dan/atau bekerja di perkebunan sehingga hilangnya motivasi mereka untuk kembali ke sekolah. Kurangnya kebermaknaan peran sekolah dan pendidikan di dalam kehidupan nyata para siswa, terutama di dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari, seperti masalah kemiskinan yang dialami oleh keluarga para siswa juga menyumbang terhadap jumlah anak putus sekolah di Kepulauan Bangka Belitung. Tak kalah pentingnya adalah belum optimalnya lingkungan/ekosistem sekolah yang mendukung wellbeing atau kesejahteraan siswa juga membuat banyak siswa memutuskan untuk tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

- e. Belum optimalnya kualitas/mutu pengembangan kurikulum dengan kebutuhan/tuntutan abad 21. Rendahnya kualitas/mutu pendidikan yang diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan masih rendahnya penyelenggaraan proses pembelajaran berbasis literasi ilmiah (saintifik), dan belum optimalnya penerapan kurikulum Merdeka Belajar dengan pengintegrasian kurikulum nasional dan lokal, pendekatan multikultural, kecakapan abad 21, STEAM/STEM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan warga negara dunia (Global Citizenship) dalam rangka mempersiapkan siswa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Pelajar Pancasila yang cakap dan berakhlak mulia. Rendahnya kualitas/mutu pengembangan kurikulum ini tentunya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Disparitas atau kesenjangan antara kualitas/mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan dengan kecakapan abad 21 juga disebabkan masih belum optimalnya peran Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di dalam mengembangkan kurikulum dan kualitas pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan (market demand), masih rendahnya relevansi antara penyelenggaraan proses pembelajaran dengan pemanfaatan/pemberdayaan potensi dan kekayaan daerah dan diversitas multikultural yang dimiliki oleh siswa, masih rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan, rendahnya koordinasi antara satuan pendidikan

dengan para pemangku kebijakan dan belum optimalnya manajemen pengelolaan pendidikan yang berbasis saintifik (ilmiah).

- f. Masih rendahnya keselarasan fasilitas pembelajaran di satuan pendidikan dengan perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Fasilitas pembelajaran yang dikembangkan oleh satuan pendidikan belum optimal mengikuti perkembangan Sekolah Masa Depan dan perkembangan zaman, seperti ketersediaan fasilitas pembelajaran yang mendukung kecakapan Abad 21, Industri 4.0 dan Society 5.0, terutama pada jenjang SMK yang masih minim; ketersediaan sarana prasarana sekolah, seperti area bermain dan untuk kegiatan-kegiatan di lapangan yang belum totalitas ramah anak; ketersediaan fasilitas pembelajaran, seperti peralatan, alat dan bahan praktek di laboratorium sains, komputer dan bahasa, ruang kelas dengan papan promethean atau papan tulis interaktif, peralatan dan perlengkapan alat praktek yang masih minim. Rendahnya keselarasan fasilitas pembelajaran dengan perkembangan dan/atau tuntutan kebutuhan pada zaman digital ini tentunya berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang dilalui para siswa di dalam membentuk persepsi, karakter dan skill/keterampilan mereka.
- g. Belum optimalnya pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang tidak berbasis multikultural menyebabkan rendahnya keterlibatan orang tua, dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), dan para *stake holder* lainnya. Keterlibatan berbagai golongan masyarakat di dalam perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan sesungguhnya bisa dimanfaatkan sebagai modal (*fund of knowledge*) untuk perencanaan, dan penyelenggaraan layanan pendidikan dan kurikulum, penilaian (*assessment*), serta penyediaan fasilitas pembelajaran yang lebih akan bermanfaat dan tepat sasaran dan tentunya sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga potensi satuan pendidikan, para GTK dan para siswa dapat berkembang dengan pesat.
- h. Belum meratanya distribusi dan/atau persebaran guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi mumpuni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebanyakan guru dan tenaga kependidikan yang bertempat di kota mendapatkan akses layanan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berada di lingkungan yang jauh dari kota. Hal ini menyebabkan para guru dan tenaga kependidikan yang berada di kota memiliki lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka disebabkan lingkungan budaya yang lebih mendukung di dalam pengembangan karir dan kompetensi mereka dibandingkan dengan para guru dan tenaga kependidikan yang berada di daerah-daerah yang jauh dari kota. Selain itu, adanya kekurangan guru dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah yang jauh dari kota yang kemudian mengakibatkan para guru dan tenaga kependidikan harus melakukan berbagai tugas dan kewajiban (*multi tasking*) yang bukan menjadi tugas pokok utama mereka. Hal ini mengakibatkan para guru dan tenaga kependidikan tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban mereka secara optimal, yakni di dalam pemberian layanan pendidikan dan penciptaan ekosistem yang baik dan positif bagi perkembangan *wellbeing* (kesejahteraan) dan kualitas akademik para siswa.

2. Urusan Bidang Kesehatan

Permasalahan di Bidang Kesehatan, sebagai berikut:

- a. Masih tingginya angka kematian Ibu (AKI). Jumlah kematian Ibu di Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir masih sangat tinggi dimana pada tahun 2017 sebanyak 21 kasus meningkat menjadi 44 kasus tahun 2018 dan menurun tahun 2019 menjadi 36 kasus. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, yaitu sebanyak 26 kasus, tetapi kemudian tahun 2021 meningkat menjadi 36 kasus. Tingginya jumlah kematian ibu mengindikasikan bahwa kemampuan dan kaulitas pelayanan kesehatan yang belum optimal, kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat terkait kehidupan sehat yang rendah, kualitas kesehatan lingkungan, social budaya dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang belum maksimal.
- b. Masih tingginya angka kematian Bayi (ABI) dan Angka Kematian Balita (AKABA). Jumlah kematian Bayi (0-12 bulan) di Bangka Belitung sangat tinggi dimana pada tahun 2018 sebanyak 166 kasus meningkat menjadi 188 kasus pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 186 kasus. Untuk jumlah kematian balita (0-5 tahun) menunjukkan tren peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir, pada tahun 2018 sebanyak 194 kasus kematian meningkat pada tahun 2019 menjadi 209 kasus dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 213 kasus kematian. Tingginya angka kematian bayi dan belita ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang masih belum optima, kesadaran dan kebiasaan masyarakat yang kurang terhadap pentingnya kesehatan serta kualitas lingkungan kesehatan yang masih rendah.
- c. Masih rendahnya persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; yaitu pada tahun 2019 sebesar 57,14%. Angka ini masih dibawah target provinsi tahun 2019 yaitu sebesar 80%. Hal ini disebabkan masih kurangnya dukungan dari *stakeholder* terkait di kabupaten/kota.

3. *Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang*

Permasalahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya tingkat kemantapan jalan; Pada tahun 2018 tingkat kemantapan jalan provinsi ditargetkan sebesar 93,43%, namun hanya tercapai 83,66%. Pada tahun 2019 tercapai 92,23% dari target sebesar 94,21% atau menurun sebesar 9,77%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu bencana banjir tahun 2017 hingga 2019 yang mempercepat penurunan kualitas jalan dan jembatan, adanya beberapa ruas jalan yang umurnya lebih pendek daripada yang diperkirakan, sehingga terdapat penambahan jumlah jalan yang harus dilakukan pemeliharaan. Selain daripada itu jembatan rusak pada jalur strategis yang perlu segera ditangani dan membutuhkan dana yang cukup besar, serta terdapat beberapa jalan yang belum memenuhi standar.
- b. Kurangnya tenaga ahli konstruksi; Seiring dengan maraknya pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kebutuhan akan tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat pun meningkat pesat. Kurangnya tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat di provinsi ini menjadi salah satu masalah dalam kegiatan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum. Pengambilan tenaga ahli dari luar daerah menyebabkan meningkatnya biaya yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2018 dan 2019, bidang jasa konstruksi telah berhasil

menyelenggarakan pelatihan tenaga ahli konstruksi sebanyak lebih dari 150 orang lebih setiap tahunnya, namun tetap saja belum memenuhi kebutuhan tenaga ahli konstruksi bersertifikat yang sangat tinggi;

- c. Jaringan irigasi yang masih rendah. Dari luas potensi jaringan irigasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 sebesar 7.132 ha dengan panjang jaringan irigasi 133.582.11m, jaringan irigasi dengan kondisi baik mencapai 46.305.41 meter (34,66%), kondisi sedang 27.680.2 meter (20,7%), dan kondisi rusak sepanjang 98.450.8 meter (73,7%), kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena akan menurunkan produktivitas pertanian terutama tanaman pangan seperti padi dan berdampak kepada kemandirian pangan di Bangka Belitung. Untuk itu perlu penanganan yang intensif dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyediaan jaringan irigasi terutama di daerah-daerah lumbung pangan seperti Kabupaten Bangka Selatan dan Belitung Timur dalam meningkatkan produktifitas pertanian.
- d. Ketersediaan infrastruktur sumber daya air masih sangat rendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2019 persentase kawasan yang terlindungi dari daya rusak air baru mencapai 6,06%. Masalah erosi pantai, penanganan banjir, serta kekeringan menjadi fokus utama bidang sumber daya air. Pada musim penghujan, banjir besar yang melanda di beberapa daerah di provinsi ini menyebabkan rusaknya sumber daya air dan abrasi pantai yang perlu segera ditangani. Sedangkan pada musim kemarau, beberapa daerah di provinsi ini mengalami kekeringan. Untuk itu perlu upaya penyediaan air baku seperti konservasi sumber air, pembangunan embung dan prasarannya perlu ditingkatkan. Capaian penyediaan air baku pada tahun 2019 hanya 19%. Padahal saat musim kemarau Disamping itu, sektor irigasi juga memerlukan perhatian untuk menghidupkan sektor pertanian. Rasio jaringan irigasi baru mencapai 7% atau baru 35% yang tertangani, sedangkan kondisi jaringan irigasi yang rusak mencapai 73,7%. maka jaringan irigasi pun perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

4. *Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*

Permasalahan di Bidang Perumahan Rakyat, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya akses terhadap tempat tinggal/hunian layak dan terjangkau yang dilengkapi sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai bagi masyarakat. Pada tahun 2019 capaian kinerja rumah layak huni 26,16 %, dan pada tahun 2020meningkat menjadi 3064 % dan menurun menjadi 27,60% pada tahun 2021. Untuk tingkat Nasional capaian Bangka belitung masih dibawah nasional yang mencapai 60,90 % pada tahun 2021, sedangkan secara regional se-sumatera, capaian Bangka Belitung pada tahun 2021 paling rendah se-Sumatera dan tertinggi adalah Provinsi Riau dengan capaian 70,63 persen.

Permasalahan di Bidang Kawasan Permukiman, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya ketersediaan akses terhadap air minum layak. Melalui kebijakan universal akses dan Sustainable Development Goal's (SDG's) Pemerintah Indonesia mentargetkan akses terhadap air minum layak sebesar 100 % pada tahun 2035 dan sanitasi layak sebanyak 100%, namun dalam lima tahun terakhir capaian

persentase rumah tangga dengan ketersediaan air minum layak belum optimal dimana tahun 2018 sebesar 68,83 % meningkat menjadi 73,75 tahun 2019 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 73,40 %. Untuk tingkat Nasional capaian Bangka Belitung masih dibawah nasional yang mencapai 90,78 % pada tahun 2021, sedangkan secara regional se-sumatera, capaian Bangka Belitung pada tahun 2021 terendah kedua setelah Provinsi Bengkulu dengan capaian sebesar 67,39 persen dan tertinggi se-sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 90,89 persen.

- b. Belum optimalnya ketersediaan akses terhadap Sanitasi layak. Hal ini terlihat dari indikator persentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak dalam 5 (lima) tahun terakhir di Bangka Belitung. Pada tahun 2018 capaian terhadap sanitasi layak sebesar 85,64% meningkat pada tahun 2019 menjadi 90,32 % dan tahun 2020 meningkat menjadi 92,58 % namun menurun pada tahun 2021 menjadi 92,24 %.

5. *Urusan Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat*

Permasalahan di Bidang Kebencanaan, sebagai berikut:

- a. Belum adanya peta rawan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peta potensi rawan bencana perlu disusun sebagai suatu gambaran yang untuk menjadi rujukan dalam penanganan bencana yang akan terjadi. Peta rawan bencana harus disusun sebagai pedoman bagi suatu daerah dalam menentukan kebijakan dan tindakan yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan kesiapsiagaan bencana maupun dalam pasca penanganan bencana.
- b. Rendahnya kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dikarenakan rendahnya capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dimana capaian IKD dibagi menjadi capaian rendah (0 s.d 0,40), sedang (0,41 s.d. 0,80) dan tinggi (lebih besar atau sama dengan 0,81). Indeks kapasitas bencana Bangka Belitung 0,39 (rendah). Rendahnya IKD yang menggambarkan rendahnya kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana dikarenakan masih kurangnya penguatan kebijakan dan kelembagaan, dengan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigas Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Permasalahan di Bidang Satuan Pamong Praja, sebagai berikut:

- a. Terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diketahui sepanjang tahun 2017 sebanyak 3.584 orang/pelanggar, tahun 2018 sebanyak 2.353 orang/pelanggar dan tahun 2019 sebanyak 975 orang/pelanggar;
- b. Meningkatnya tindak kriminal; Kasus tindak kriminal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 sebanyak 1.828 kasus dan tahun 2017 sebanyak 1.490 kasus. Sedangkan tahun 2018 sebanyak 1.447 kasus dan tahun 2019 sebanyak 1.453 kasus. Meningkatnya jumlah tindak kriminal ini menggambarkan kurang amannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Belum optimalnya pelatihan bagi Satlinmas; Belum semua anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pelatihan dalam rangka

membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta membantu penanganan bencana dan kebakaran. Data per 31 Desember 2019 jumlah anggota Satlinmas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 3.997 orang, namun baru 1.030 orang anggota Satlinmas yang telah mendapatkan pelatihan;

- d. Tingginya kasus bencana kebakaran; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk daerah yang sering mengalami bencana kebakaran. Sampai dengan tahun 2019 telah terjadi 1.565 kasus kebakaran. Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peta khusus daerah rawan kebakaran. Tidak hanya itu, kecuali anggota Satlinmas, masyarakat/relawan pemadam kebakaran belum diberikan pemahaman metode pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan.

6. *Urusan Bidang Sosial*

Permasalahan di Bidang Sosial, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dimana pada tahun 2017 sebanyak 394,681 orang menjadi 391,124 orang ditahun 2018 serta 398,670 ditahun 2019. Meningkatnya PMKS di Bangka Belitung disebabkan naiknya beberapa komponen PMKS diantaranya anak terlantar dari 54,357 orang (2018) menjadi 63,168 orang (2019), lanjut usia terlantar sebanyak 38,728 orang (2018) menjadi 42,964 orang (2019), pemulung dari 156 orang (2018) menjadi 225 (orang), Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) dari 240 orang (2018) menjadi 551 orang;
- b. Kecenderungan jumlah pekerja migran bermasalah dan yang harus dipulangkan ke tempat asalnya semakin bertambah setiap tahunnya yang mengharuskan pemerintah daerah untuk memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan perlindungan sosial mereka. Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) orang WNI asal Pangkalpinang yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari Timor Leste yang telah dipulangkan melalui KBRI Dili. Upaya perlindungan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mencakup perlindungan dalam bentuk bantuan, pemulihan psikologis, perawatan kesehatan dan pemulangan ke daerah asal.
- c. Menurunnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Dimana jumlah PSKS sebanyak 752 lembaga dan 1.017 orang (2017), 689 lembaga dan 980 orang (2018), dan 700 lembaga dan 962 orang (2019). Menurunnya jumlah PSKS disebabkan oleh menurunnya pekerja sosial profesional dari 159 (2018) menjadi 143 (2019), pekerja sosial masyarakat dari 415 orang (2018) menjadi 413 orang (2019), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dari 117 orang (2018) menjadi 109 orang (2019).

B. *Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar*

1. *Urusan Bidang Tenaga Kerja*

Permasalahan di Bidang Tenaga Kerja, sebagai berikut:

- a. Pembangunan ketenagakerjaan yang belum optimal. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) yang masih pada status menengah ke bawah dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 63,95 dan masih di bawah capaian

Nasional yang sebesar 67,64. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar, yaitu: 1). perencanaan tenaga kerja; 2). penduduk dan tenaga kerja; 3). kesempatan kerja; 4). pelatihan kerja dan kompetensi kerja; 5). produktivitas tenaga kerja; 6). hubungan industrial; 7). kondisi lingkungan kerja; 8). pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan 9). jaminan sosial tenaga kerja.

- b. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja; Berdasarkan data tahun 2016 jumlah pencari kerja di Bangka Belitung yang terdaftar sebanyak 15.593 orang dengan penempatan hanya sebanyak 424 orang atau sebesar 2,7% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 4 persen atau sebanyak 5.225 pencari kerja sebanyak 155 tenaga kerja yang ditempatkan. Hal ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara tingkat kualitas tenaga kerja dan kebutuhan dunia kerja, juga kurang diminatinya lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan kepada para pencari kerja.

2. *Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Permasalahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan peningkatan kualitas keluarga; Salah satu faktor meningkatnya kualitas keluarga adalah sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi salah satu yang menjadi objek pembinaan adalah Industri Rumah Tangga (IRT) yang dikelola oleh perempuan. Dari data tahun 2018 IRT yang dikelola oleh perempuan hanya 1.941 atau 0,40 % dibandingkan dengan perempuan yang produktif. Pada tahun 2019 walaupun ada peningkatan tetapi masih jauh perbandingan antara perempuan yang mandiri melalui IRT yaitu sebesar 3.129 dengan perempuan produktif 472.545 yaitu sebesar 0,66% tentu dirasakan masih sangat kurang. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah belum optimalnya penganggaran kegiatan yang berbasis gender dari data pada tahun 2019. Perangkat Daerah yang sudah menerapkan kegiatan yang berbasis gender sebanyak 22 PD dari 32 PD yang ada di provinsi, begitu juga ketersediaan data pilah masih belum optimal data tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 32 PD hanya 22 PD yang telah memiliki data pilah.
- b. Belum memadainya SDM perlindungan anak, perempuan dan pemenuhan hak anak; Dari data 2019 SDM perlindungan perempuan yang terdata sebanyak 177 orang jika dibandingkan dengan jumlah perempuan yang harus dilindungi sebanyak 471.329 atau sebesar 0,037% sehingga dapat dikatakan angka tersebut sangat tidak proporsional. Begitu juga SDM perlindungan anak yang terdata sebanyak 790 dengan jumlah anak yang harus dilindungi sebanyak 436.486 atau sebesar 0,18% dan juga dalam pemenuhan hak anak, jumlah SDM yang terdata sebanyak 800 dengan perbandingan 436.486 orang anak atau sebesar 0,183%.

3. *Urusan Bidang Pangan*

Permasalahan di Bidang Pangan, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Nilai Skor PPH Ketersediaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2016 Nilai Skor PPH Ketersediaan sebesar 78,78 kemudian meningkat di tahun 2017 sebesar 87,84 dan 88,45 ditahun 2018. Sedangkan tahun

2019 dan 2020 sebesar 87,23 dan 87,26. Meskipun skor PPH Ketersediaan meningkat namun Nilai Skor ini masih rendah dibawah nasional yaitu sebesar 96. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan energi telah tercapai, namun masih diperlukan upaya peningkatan keragaman pangan sumber energi.

- b. Belum optimalnya Nilai Skor PPH Konsumsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai Skor PPH Konsumsi di Bangka Belitung sangat fluktuatif. Pada tahun 2016 Nilai Skor PPH Konsumsi sebesar 77,1 kemudian meningkat di tahun 2017 sebesar 81,2 dan menurun kembali ditahun 2018 sebesar 80,09. Di tahun 2019 kembali meningkat sebesar 83,01 dan begitupun di tahun 2020 kembali meningkat sebesar 83,07. Meskipun skor PPH Ketersediaan meningkat namun Nilai Skor ini masih rendah dibawah nasional yaitu sebesar 96. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan energi telah tercapai, namun masih diperlukan upaya peningkatan keragaman pangan sumber energi.
- c. Masih adanya penduduk rawan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimanadalam rentang tahun 2016-2020, *Prevalence of Undernourishment* (PoU) meskipun cukup fluktuatif namun secara keseluruhan angka PoU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 PoU sebesar 10,44 persen, kemudian menurun menjadi sebesar 9,66 persen (2017) dan meningkat lagi menjadi 10,13 persen (2018). Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 7,9 persen dan Kembali naik tipis menjadi 8,17 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan masih adanya prevalensi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan atau penduduk rawan pangan. Dengan jumlah penduduk Bangka Belitung yang dihitung sebanyak 1.517.590 jiwa terdapat 124.442 jiwa.

4. **Urusan Bidang Pertanian**

Permasalahan di Bidang Pertanian, sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya kasus sengketa tanah

Masih banyak lahan yang merupakan lahan sengketa, sehingga menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur dan penataan ruang. Penyelesaian kasus sangat fluktuatif. Pada tahun 2016 penyelesaian kasus hanya mencapai 38 persen dari 39 kasus hanya 15 kasus yang terselesaikan. Sedangkan pada tahun 2019 dari 8 kasus terdapat 2 kasus yang tidak terselesaikan. Kemudian masih banyak juga lahan pemerintah yang belum terinventarisir maupun teridentifikasi sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk dapat memanfaatkannya. Hingga tahun 2019 anggaran untuk bidang pertanian masih sangat sedikit. Akibatnya masalah-masalah diatas sulit untuk diselesaikan. Bahkan kewajiban daerah untuk menyelesaikan ganti rugi sengketa tanah pembangunan jalan provinsi pun menjadi terhambat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan infrastuktur pun masih cukup rendah, dampaknya antara lain adalah biaya pembebasan lahan yang cukup tinggi untuk pelebaran jalan dikarenakan masyarakat menginginkan ganti rugi yang cukup tinggi atas lahan mereka.

5. *Urusan Bidang Lingkungan Hidup*

Permasalahan urusan Bidang Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

- a. Belum adanya dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup; Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup adalah sebagai instrumen pengendalian, pencegahan kerusakan lingkungan di awal sehingga perlu dokumen perencanaan lingkungan hidup yang mengatur pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian serta pengawasan sehingga meminimalkan kerusakan lingkungan. Jika dokumen perencanaan ini tidak tersusun maka akan menyulitkan dalam melakukan pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan.
- b. Masih rendahnya pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengaduan kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pengaduan Masyarakat ini bersumber baik dari hasil pengawasan, pengaduan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup ataupun yang berasal dari Media massa baik yang izin lingkungannya dikeluarkan oleh Provinsi maupun oleh kabupaten/kota. Pada tahun 2017 semua pengaduan/kasus yang masuk 100% diverifikasi. Sedangkan pada tahun 2018 pengaduan yang masuk sebanyak 20 kasus (85%), dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus. Pada tahun 2019, pengaduan yang masuk sebanyak 18 kasus dan yang diverifikasi sebanyak 17 kasus atau sebesar 94 persen karena terdapat satu pengaduan yang sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
- c. Masih rendahnya Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Salah satu instrumen penegak hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, ketaatan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan) serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dokumen lingkungan, air, udara, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Ketaatan usaha/kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, namun dari kondisi tahun 2017 sebesar 60% meningkat menjadi 86% pada tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah usaha/kegiatan yang menggunakan izin lingkungan juga menurun dari sebanyak 50 usaha/kegiatan pada tahun 2017 menjadi 35 usaha/kegiatan di tahun 2021. Sedangkan target tahun 2023 untuk ketaatan usaha /kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan sebesar 75% dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi sebesar 85% dari total izin yang diterbitkan.
- d. Masih rendahnya ijin rekomendasi izin lingkungan yang diterbitkan; Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan data di atas izin lingkungan yang dikeluarkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 meningkat dari 126 usaha/kegiatan (2017) menjadi sebanyak 146 usaha/kegiatan. Namun kondisi ini menurun menjadi 36 usaha/kegiatan di tahun 2020 dan 20 usaha/kegiatan di tahun 2021.

- e. Belum adanya TPA Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Pada saat ini, TPA Regional sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menampung sampah dari Kota Pangkalpinang dan sekitar Kabupaten Bangka Tengah dan untuk implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan dan pengurangan timbunan sampah yang masuk ke TPA di 7 (tujuh) kabupaten/kota. Verifikasi hasil calon lokasi TPA Regional berada di Pulau Bangka (belum final verifikasi lokasi) dan 1 di Pulau Belitung (telah final verifikasi lokasi dan perlu ditindaklanjuti).

6. ***Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil***

Permasalahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan; Berdasarkan data pada tahun 2018 baru 6 dinas/instansi atau sektor lain yang memanfaatkan data kependudukan, sedangkan di tahun 2019 dinas/instansi atau sektor lain yang memanfaatkan data kependudukan hanya 8. Permasalahan lain masih rendahnya cakupan kepemilikan akta, baik akta nikah, kelahiran dan kematian. Pada tahun 2018 masyarakat yang telah memiliki akta pencatatan sipil sebanyak 63,32% sementara pada tahun 2019 yaitu sebesar 71,10%. Begitu juga cakupan dokumen pendaftaran penduduk yaitu KK, KTP dan KIA belum maksimal. Data tahun 2018 masyarakat Bangka Belitung yang sudah mengurus dokumen kependudukan sebesar 60,41% dan 2019 sebesar 74,41%.

7. ***Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***

Permasalahan urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya pengelolaan lembaga kemasyarakatan; Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif di Bangka Belitung tahun 2015-2019 dari 65 BUMDes menjadi 289 BUMDes yang tersebar di seluruh desa di Bangka Belitung. Meskipun jumlah BUMDes aktif naik setiap tahunnya namun kenaikan ini belum maksimal. Sebanyak 77 Desa dari 309 desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum memiliki BUMDes. Padahal unit usaha ini hal yang wajib dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum terbentuknya BUMDes, diantaranya faktor modal, belum adanya kesiapan BPD dan Peraturan Desa.

8. ***Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***

Permasalahan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Angka Kelahiran Total (TFR); Perbandingan antara tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,03 % yaitu dari 2,27 menjadi 2,30. Hal ini salah

satu penyebabnya adalah masih kurang optimalnya pembinaan kepada kabupaten/kota tentang keluarga berencana. Data 2018 menyebutkan hanya 5 dari 7 kabupaten/kota yang intensif menjadi binaan provinsi. Kemudian untuk pembinaan diperbaharui lagi di 2019 dengan mengupayakan pembinaan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung.

- b. Masih belum seluruh kabupaten/kota yang memiliki dokumen pengendalian penduduk; Data 2019 menyebutkan bahwa dari 7 kabupaten/kota di Bangka Belitung hanya 4 kabupaten/kota yang telah memiliki dokumen kependudukan (*Grand Design* Kependudukan). Hal ini tentunya akan mempersulit untuk pelaksanaan pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk.
- c. Belum optimalnya pembentukan Kampung KB; Meskipun dari tahun 2016-2019 pembentukan Kampung KB meningkat namun Data tahun 2019 Kampung KB yang terbentuk 118 Kampung KB dari target 131 kampung KB yang terbentuk pada akhir masa RPJMD.

9. *Urusan Bidang Perhubungan*

Permasalahan urusan Bidang Perhubungan, sebagai berikut:

- a. Belum memadainya infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Meskipun pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dari tahun 2016-2019 terus meningkat namun peningkatan tersebut belum optimal. Pemenuhan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan baru mencapai 38,12 persen di tahun 2019. Pemenuhan infrastruktur lalu lintas baru terealisasi sebesar 15,25% (1 unit APILL, 1200 m Marka jalan dan 36 unit rambu lalu lintas) atau capaian sampai dengan tahun 2019 sebesar 15,25%. Sedangkan untuk pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk jalan provinsi kawasan perkotaan, dimana kebutuhan perkotaan sebanyak 1.120 unit, sampai dengan tahun 2019 baru dapat terealisasi sebanyak 80 unit.

Dalam rangka meminimalisir angka kecelakaan LLAJ, Pemerintah Daerah tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan target penyediaan perlengkapan jalan, melainkan dapat berfokus pada penyediaan perlengkapan jalan secara efektif dan efisien pada DRK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meminimalisir angka kecelakaan LLAJ.

10. *Urusan Bidang Komunikasi dan Informasi*

Permasalahan urusan Bidang Komunikasi dan Informasi, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya layanan publik dan pemerintah berbasis *e-government*; meskipun pada tahun 2019 capaian kinerja sudah mencapai 90 persen namun layanan publik dan pemerintah berbasis *e-government* belum optimal dikarenakan belum terintegrasinya data antar instansi dan terbatasnya belum adanya payung hukum yang mengatur terkait dengan pemanfaatan satu data.

11. *Urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah*

Permasalahan urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sebagai berikut:

- a. Menurunnya jumlah koperasi di Bangka Belitung; Jumlah kopersidi Bangka Belitung pada tahun 2016 berjumlah 1.149 dan menurun menjadi 1.049 koperasi di

2019. Hal ini dikarenakan adanya pembubaran koperasi dan koperasi yang tidak aktif. Setidaknya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat 100 pembubaran koperasi. Sedangkan koperasi tidak aktif bertambah dari 328 menjadi 395 ditahun 2019.

- b. Belum optimalnya pemberdayaan UMKM; Pada tahun 2016 jumlah UMKM tercatat sebanyak 293.985 UMKM sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 150.948 UMKM dan 2019 sebanyak 161.186 UMKM. Jumlah ini menurun dikarenakan terdapat pembaharuan data UMKM di Bangka Belitung. Sedangkan jumlah UMKM yang diberdayakan tercatat pada tahun 2018 sebanyak 3.500 UMKM dan 4.300 UMKM di tahun 2019. Belum optimalnya pemberdayaan UMKM dikarenakan beberapa faktor, seperti: Minimnya modal, kurang inovatif, belum maksimalnya pemasaran secara online, dan sebagainya.

12. ***Urusan Bidang Penanaman Modal***

Permasalahan urusan Bidang Penanaman Modal, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya persentase capaian realisasi investasi. Pada tahun 2018 nilai sebesar 3,7 triliun dengan realisasi 3,1 triliun PMDN dan 620 miliar untuk PMA. Sedangkan tahun 2019 realisasi investasi sebesar 4,2 trilyun dengan rincian 2,9 triliun PMDN dan 1,3 triliun PMA. Nilai ini jauh dari target nasional 6,85 triliun (2019). Beberapa hambatan dan kendala investor dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni, belum adanya pelabuhan yang representatif, masih banyak investor yang belum memahami proses mendapatkan NIB pada sistem perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*) sehingga ada beberapa pelaku usaha mengisi rencana investasinya pada OSS tidak sesuai dengan nilai rencana investasi yang akan diinvestasikan.

13. ***Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga***

Permasalahan urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kualitas pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipengaruhi oleh tingkat persaingan yang semakin tinggi sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan dimana pada tahun 2019 jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi sebanyak 184 orang dan tahun 2018 sebanyak 199 orang. Hal ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah seluruh pemuda yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Masih belum optimalnya pembinaan cabang olah raga dimana pada tahun 2019 terdapat 8 cabor yang diikutsertakan dalam 13 cabor pada pertandingan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dan pada tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan ke 6 dari 7 provinsi yang ikut serta dalam pertandingan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah I.

14. ***Urusan Bidang Statistik***

Permasalahan urusan Bidang Statistik, sebagai berikut:

Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral; Meskipun pemanfaatan data sudah mencapai 95 persen di tahun 2019, namun capaian ini belum optimal mengingat kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dalam memanfaatkan data statistik dalam

perencanaan dan belum adanya regulasi daerah didalam mengatur penggunaan data tersebut dalam perencanaan dan pengambil kebijakan. Untuk itu, perlu penanganan terhadap permasalahan tersebut, yaitu dengan kolaborasi dan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan membuat Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penggunaan Satu Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

15. *Urusan Bidang Persandian*

Permasalahan urusan Bidang Persandian, sebagai berikut:

Rendahnya capaian indeks kematangan keamanan informasi; Indeks Kematangan Keamanan Informasi(IKKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 dan 2018 Indeks Kematangan Keamanan Informasi(IKKI) yaitu 1 atau berada pada level I (sangat kurang/non existent/kondisi awal) dan tahun 2018 meningkat yaitu 2 atau berada pada level II, dimana level ini masih berada pada kondisi awal penerapan keamanan informasi dan kondisi penerapan kerangka kerja dasar penerapan keamanan informasi. Hal ini menunjukkan tingkat sistem elektronik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat dikatakan matang dan sesuai dengan standar ISO 27001:2013 karena belum mencapai level III+ dimana penerapan keamanan informasi telah terdefinisi dan konsisten.

16. *Urusan Bidang Perpustakaan*

Permasalahan di urusan Bidang Perpustakaan, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya tingkat pembinaan perpustakaan. Sampai dengan tahun 2021 jumlah perpustakaan yang sudah dibina masih sangat sedikit yaitu sebanyak 102 perpustakaan atau sebesar 6,67 persen dari 1.548 perpustakaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dilakukan pembinaan perpustakaan adalah memperkuat peran perpustakaan provinsi dalam peningkatan kemampuan literasi dan pengembangan perpustakaan ditingkat kabupaten/kota dan desa. Dengan adanya pembinaan perpustakaan maka kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) perpustakaan, pengelolaan perpustakaan serta sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai, dapat meningkat dengan baik. Maka dari itu pembinaan perpustakaan sangat penting dan perlu didukung oleh semua pihak.
- b. Masih rendahnya koleksi buku dan naskah kuno di perpustakaan. Sampai tahun 2021 koleksi buku yang dimiliki perpustakaan daerah masih sangat sedikit yaitu sebanyak 26.209 koleksi buku, sedangkan untuk naskah kuno sangat minim sekali. Sesuai aturan koleksi buku yang harus dimiliki perpustakaan sekurang-kurangnya 0,015 per kapita masyarakat dan subjeknya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jumlah koleksi buku di perpustakaan sekurangnya mencapai minimal 50.000 judul.

17. *Urusan Bidang Kebudayaan*

Permasalahan di urusan Bidang Kebudayaan, sebagai berikut:

- a. Kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya. Permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

seperti program pelestarian cagar budaya dan permuseuman yaitu belum adanya museum provinsi, program pembinaan kesenian dan perfilman yaitu belum adanya taman budaya dan pasar seni, masih terbatasnya produksi film yang mengangkat tema pendidikan dan budaya, pembangunan karakter bangsa dan penguatan kearifan lokal serta masih terbatasnya ruang pertunjukkan film.

18. *Urusan Bidang Kearsipan*

Permasalahan di urusan Bidang Kearsipan, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar baku kearsipan. Tantangan terbesar adalah penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar baku kearsipan, di mana berdasarkan hasil Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Tahun 2019 sebesar 38,79 yang dilakukan oleh pihak ANRI, belum menunjukkan angka yang baik. Penyebab kegagalan tersebut antara lain disebabkan adanya permasalahan pengelolaan arsip yang belum maksimal walaupun sudah mempunyai Depo Arsip Daerah namun belum memiliki sarana dan prasarana sesuai standar ANRI. Pada tahun 2020 meningkat dan terus meningkat pada tahun 2021 sebesar 56,86 menjadi 66,23 dengan peringkat baik.
- b. Masih rendahnya arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku. Perlindungan dan penyelamatan arsip oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menunjukkan keseriusan dalam pelaksanaannya, karena belum diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia kearsipan yang memadai, disamping anggaran yang tersedia minim. Disamping itu, kendala yang dihadapi adalah sebagian besar perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum pernah menyerahkan arsip inaktifnya ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melakukan berbagai upaya dalam menyelamatkan dan mempromosikan pentingnya arsip untuk diselamatkan.
- c. Belum adanya layanan perizinan penggunaan arsip yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Program layanan perizinan penggunaan arsip di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan, hal ini disebabkan belum ada aturan yang mengatur tentang pedoman keterbukaan arsip statis untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta penyelidikan dan penyidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Peraturan Gubernur.

C. *Urusan Pilihan*

1. *Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan*

Permasalahan urusan di Bidang Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya pemanfaatan luasan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang termanfaatkan; Pemanfaatan ruang laut untuk kawasan konservasi sampai tahun 2021 baru 595.182,01 ha dengan 2 lokasi yakni kawasan konservasi perairan gugusan pulau-pulau momparang dan perairan sekitarnya di Kabupaten Belitung Timur dan kawasan konservasi perairan Kabupaten Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

- b. Pertumbuhan produksi perikanan tangkap masih sangat rendah; Dengan Potensi kelautan yang besar serta sumber perikanan yang melimpah di Perairan Bangka Belitung seharusnya menjadi hasil perikanan tangkap menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat yang potensial terutama di untuk masyarakat sekitar pantai. Melihat perkembangan pertumbuhan produksi perikanan tangkap pada lima tahun terakhir kurang menggembirakan, tahun 2018 sebesar 4,87 persen menurun menjadi tumbuh negatif sebesar 4,5 tahun 2019 dan meningkat lagi dengan tumbuh sebesar 1,12 persen tahun 2021. Ketidakstabilan pertumbuhan ini disebabkan belum optimalnya pelabuhan perikanan sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah; rendahnya teknologi perikanan tangkap; dominasi perikanan tangkap skala kecil; berkurangnya daerah penangkapan ikan (DPI) akibat pemanfaatan ruang perairan pesisir yang multi-sektor; masih terjadinya konflik kepentingan antar sektor yang memanfaatkan wilayah pesisir dan laut terutama sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan; serta masih maraknya kegiatan *illegal unregulated and unreported fishing* di wilayah perairan provinsi kepulauan Bangka Belitung.
- c. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya masih sangat rendah; pertumbuhan produksi perikanan budidaya tahun 2021 sebesar 16,5 persen meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 14,17 persen, walaupun sempat berkontraksi (tumbuh negatif) pada tahun 2019 sebesar 23,44 persen. Ketidakstabilan pertumbuhan ini disebabkan karena rendahnya minat masyarakat untuk melakukan budidaya perikanan khususnya budidaya perairan tawar; adopsi teknologi yang minim; serta suplai pakan dan benih masih didatangkan dari luar Pulau Bangka Belitung. Disisi lain, perkembangan budidaya air payau, terutama budidaya tambak udang vannamei yang berkembang pesat belum disertai dengan adanya peraturan terkait budidaya vannamei di tingkat provinsi.
- d. Masih rendahnya persentase pelaku usaha yang taat aturan; Sampai tahun 2021 baru 69,96% pelaku usaha yang taat aturan. Terkendala dengan minimnya hari operasi kapal pengawas yang dalam setahun hanya memiliki 25 hari operasi pada tahun 2021, jumlah hari operasi yang optimal minimal 100 hari operasi dalam setahun, dan harus memiliki minimal 2 tim patroli, sedangkan saat ini hanya memiliki 1 tim patrol.
- e. Jumlah produksi benih ikan yang unggul dari balai pemuliaan milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal; Beberapa Sarana dan prasarana yang ada di Balai benih air laut telah direhabilitasi guna mengoptimalkan produksi benih ikan laut. Untuk balai benih air payau, karakteristik instalasinya untuk udang windu sedangkan saat ini balai beralih ke jenis udang vaname sehingga perlu dilakukan rehabilitasi guna pengoptimalan produksi benih di kedua balai benih. Pada tahun 2021, produksi benih air laut dan air payau hanya memproduksi sebanyak 11 juta ekor.

2. *Urusan Bidang Pertanian*

Permasalahan urusan di Bidang Pertanian, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian; Meskipun capaian rasio sarana dan prasarana meningkat setiap tahun namun belum optimal. Meningkatnya rasio

sarana dan prasarana pertanian diikuti dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), dimana tahun 2019 sebesar 89,12 menjadi 103,94 pada tahun 2020. Namun peningkatan NTP tersebut tidak berdampak bagi kesejahteraan petani dimana indeks harga yang diterima petani terhadap indeks yang dibayar petani tidak terlalu signifikan. Melambungnya harga saprodi (pupuk dan pestisida) menambah beban produksi petani ditambah dengan masih rendahnya harga lada dan karet menyebabkan menurunnya ketertarikan petani untuk berkebun lada dan karet sehingga terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke pertambangan dan perkebunan sawit yang dianggap lebih menguntungkan.

3. ***Urusan Bidang Pariwisata***

Permasalahan urusan di Bidang Pariwisata, sebagai berikut:

- a. Kunjungan wisatawan yang menurun. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan ke Bangka Belitung dalam lima tahun terakhir cenderung menurun, terutama pada saat pandemi COVID-19 mulai menerpa pada pertengahan tahun 2020. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 sebanyak 438.373 orang, dengan wisatawan mancanegara sebanyak 9.183 orang dan wisatawan nusantara sebanyak 429.190, sedangkan pada tahun 2020 kunjungan wisatawan sebanyak 193.758 orang dengan wisatawan mancanegara sebanyak 3.457 orang dan wisatawan Nusantara sebanyak 191.291 orang, menurun sebesar 119,83 persen. Penurunan ini terjadi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dimana dengan pemberlakuan lockdown/PSBB dan social distancing, pembatasan aktivitas masyarakat serta pembatasan penerbangan menuju dan dari Bangka Belitung menyebabkan menurunnya perekonomian di Bangka Belitung.
- b. Belum optimalnya sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi. Hal ini terlihat dari realisasi tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi sampai dengan tahun 2019 hanya sebesar 9 persen atau sebanyak 337 dari 3.642 SDM Pariwisata. Meningkatnya tenaga pariwisata belum diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya pariwisata. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dalam memberikan pelatihan bagi sumber daya pariwisata.

4. ***Urusan Bidang Kehutanan***

Permasalahan urusan di Bidang Kehutanan, sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pengelolaan hutan yang disebabkan karena:
 - kelembagaan pengelola kawasan hutan tingkat tapak, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 13 (tiga belas) unit yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baru 8 (delapan) unit yang ditetapkan sebagai UPTD KPH sebagai pelaksana kewenangan urusan kehutanan tingkat provinsi; perlunya peningkatan kapasitas SDM di KPH;
 - luas lahan kritis berdasarkan data Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Baturusa Cerucuk tahun 2013, luas lahan kritis dan sangat kritis tahun 2013 mencapai 216.109 hektar; capaian penanaman tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 seluas 18.973 hektar (LPPD Dinas Kehutanan tahun 2019); masih tingginya kerusakan hutan dan lahan, perlu peningkatan upaya penegakan hukum melalui koordinasi yang sinergis dengan berbagai unsur; kebakaran

hutan dan lahan pada tahun 2019 kebakaran hutan seluas 1.423 ha (LPPD Dinas Kehutanan tahun 2019).

- b. Masih rendahnya penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; Hal ini disebabkan oleh belum terbentuk dan ditetapkannya kawasan ekosistem essensial/kawasan yang memiliki nilai ekosistem penting dan lembaga pengelolanya termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi; belum dimiliki data tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. Masih rendahnya Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan; hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas penyuluh kehutanan yang berdampak rendahnya kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH). Jumlah KTH tahun 2020 dari 180 KTH, terdiri dari kelas pemula berjumlah 168 KTH, kelas madya berjumlah 15 KTH, kelas utama berjumlah 0 KTH;
- d. Belum optimalnya program perhutanan sosial; Hingga tahun 2019 tercatat sebanyak 172 izin dengan luas 38.051 ha, namun baru 52 izin yang sudah menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan sesuai jenis usahanya. Rendahnya usulan masyarakat untuk mengusulkan pengelolaan hutan sosial menjadi salah satu belum optimalnya pemanfaatan perhutanan social. Untuk tahun 2020, terdapat 7 usulan (± 334 ha) yang sedang berproses untuk pengajuan usulan ke Kementerian.
- e. Masih rendahnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS); Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat 433 DAS yang terdiri dari 357 DAS bernama dan 76 DAS belum bernama; sejumlah 162 DAS harus dipulihkan daya dukungnya dan 271 DAS yang dipertahankan daya dukungnya; capaian hingga tahun 2019 sejumlah 4 DAS telah diupayakan dipulihkan daya dukungnya dan 2 DAS yang dipertahankan daya dukungnya; kelembagaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (Forum DAS) Kabupaten/Kota baru terbentuk 3 Forum DAS dari 7 kabupaten dan kota.

5. *Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*

Permasalahan urusan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut:

- a. Rasio Elektrifikasi (RE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif berfluktuatif; capaian rasio elektrifikasi tidak akan statis mengingat kebutuhan untuk memiliki rumah dan berkembangnya dunia usaha semakin bertambah tentunya kebutuhan akan listrik juga semakin meningkat.

6. *Urusan Bidang Perdagangan*

Permasalahan urusan di Bidang Perdagangan, sebagai berikut:

- a. Menurunnya ekspor di Kepulauan Bangka Belitung; ekspor Bangka Belitung masih sangat didominasi oleh ekspor logam timah. pada tahun 2019 ekspor mengalami penurunan menjadi 1.294 juta USD atau 465,1 juta ton. Hal tersebut disebabkan karena adanya syarat CPI (*competent person of Indonesia*) dalam pengajuan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Belanja) dan hanya ada empat perusahaan yang memenuhi persyaratan tersebut.

- b. Masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang undang-undang perlindungan konsumen, hak advokasi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen serta rendahnya perilaku komplain atau mengungkapkan keluhan dikalangan konsumen agar produsen dapat memberikan pelayanan produk yang sesuai aturan.

7. *Urusan Bidang Perindustrian*

Permasalahan urusan di Bidang Perindustrian, sebagai berikut:

- a. Rendahnya pertumbuhan jumlah industri; Sektor industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami tren penurunan baik industri besar, sedang, dan kecil. Pertumbuhan jumlah industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat 18,36% (2018), 12,40% (2019), dan 9,20 (2020). Menurunnya pertumbuhan industri di Bangka Belitung, salah satunya disebabkan oleh menurunnya jumlah industri sedang dari 106 unit (2018) menjadi 100 unit (2020). Hal ini membuat persentase pertumbuhan jumlah industri mengalami perlambatan kenaikan sebesar 2%.
- b. Kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri masih rendah; Industri yang sesuai izin usaha industri (IUI) memenuhi 3 aspek, yang salah satunya merupakan penyampaian data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019, untuk penyampaian tersebut perusahaan industri terlebih dahulu harus memiliki akun SIINas, kondisi saat ini baru 30% perusahaan industri yang memiliki akun SIINas sehingga tingkat kepatuhan perusahaan industri masih rendah terhadap penyampaian data.

8. *Transmigrasi*

Permasalahan urusan di Bidang Transmigrasi, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi; Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan dijadikan sebagai kawasan transmigrasi oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu pada tahun 2016 dengan luas 180.278.28 ha. Kemudian pada tahun 2018 ditetapkan 1 kawasan lagi yaitu kawasan Jebus dengan 74.015.27. Meskipun sudah ada 2 kawasan transmigrasi yang ditetapkan akan tetapi pelaksanaan dilapangan belum begitu optimal dalam pengembangan wilayah, terutama menjadikan wilayah yang strategis secara ekonomi dan menjadi pusat perkotaan baru. Pembangunan kota mandiri terpadu perlu mendapat dukungan dari semua sektor agar dapat berkembang dengan baik.

D. *Urusan Pendukung Urusan Pemerintah*

1. *Sekretariat Daerah.*

Permasalahan urusan Sekretariat Daerah, sebagai berikut.

- a. Belum optimalnya Nilai Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah; Hal ini disebabkan kemampuan menyediakan data masih rendah. Data yang disajikan hanya mencapai 60% atau 0-50% data IKK LPPD. Sekitar 30% lainnya sudah cukup baik, mampu menyediakan 50-75% data IKK. Rendahnya nilai LPPD

berimplikasi pada Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) menjadi rendah, *good governance* tidak berjalan. Bila hal ini terjadi tiga tahun berturut-turut, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), pemerintah akan melakukan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD).

2. Sekretariat DPRD

Permasalahan urusan Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

- a. Pencapaian target jumlah produk hukum yang dihasilkan/ditetapkan dalam 1 tahun masih sulit dilakukan. Biasanya target yang ditetapkan dalam 1 tahun ditentukan berdasarkan program legislasi daerah yang telah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif. Sulitnya pencapaian target tersebut dikarenakan waktu yang diperlukan untuk membahas dan menuntaskan satu produk hukum sulit diprediksi. Satu produk hukum bisa saja dituntaskan dalam waktu yang sebentar namun bisa juga dituntaskan dalam waktu panjang tergantung perkembangan yang terjadi pada saat pembahasan rancangan produk hukum tersebut. Sebagai contoh, untuk tahun 2019 target jumlah produk hukum yang dibahas adalah 23 produk hukum. Namun sampai dengan semester pertama tahun 2019, jumlah produk hukum yang dibahas masih di bawah 10. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa rancangan peraturan daerah yang pembahasannya cukup panjang hingga memakan waktu beberapa bulan. Sehingga Sekretariat DPRD melakukan penyesuaian target yang semula 23 menjadi 10 target saja. Selain itu, pembahasan rancangan perda yang berasal dari eksekutif baru bisa dibahas setelah rancangan perdanya disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Bisa saja penyampaian rancangan Peraturan Daerahnya mundur dari jadwal semula. Hal ini juga berpengaruh terhadap pembahasan rancangan Peraturan Daerah tersebut.

E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintah

Permasalahan Urusan Penunjang Pemerintah antara lain:

1. Unsur Perencanaan

Permasalahan unsur Perencanaan, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Program/indikator dalam RPJMD dengan Renstra PD. Hal ini disebabkan belum terintegrasinya sistem pembangunan daerah satu data secara elektronik, baik perencanaan data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Hal ini akan berdampak pada belum optimalnya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja provinsi untuk komponen perencanaan kinerja dalam upaya peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan pada tahun 2018 sebesar 23,27 dan tahun 2019 sebesar 23,50 dari bobot maksimal 30.
- b. Belum optimalnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah. Hal ini dilihat dari belum optimalnya hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada komponen capaian

kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2019 hanya sebesar 12,40 dari bobot maksimal 20.

2. *Unsur Keuangan*

Permasalahan unsur Keuangan, sebagai berikut:

- a. Rendahnya rata-rata ratio kemandirian keuangan daerah; capaian rasio kemandirian daerah yang mencapai 46,16% sejak tahun 2014, Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah (> 50%), hanya pada tahun 2018 saja angka kemandirian keuangan diatas 50% yaitu 50,20%. Hal ini disebabkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bergerak fluktuatif, sejak tahun 2014 angka kontribusi menunjukkan kinerja yang naik turun dengan rata-rata capaian 31.57%. Dalam kurun waktu 2014-2019 kontribusi PAD terhadap APBD mencapai performa tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai angka 35.97 %, sedangkan capaian terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 27.74%.

3. *Unsur Kepegawaian*

Permasalahan Unsur Kepegawaian, sebagai berikut:

- a. Kualifikasi pendidikan ASN masih rendah, hal ini terlihat dari masih adanya ASN yang tidak berpendidikan tinggi sebanyak 26,54 persen di thn 2017, tahun 2018 25,50 persen, Tahun 2019 sebesar 22,86 persen, Tahun 2020 21,64 persen, thn 2021 20,50 persen.
- b. Kinerja ASN belum optimal, hal ini terlihat dari masih adanya penilaian sasaran kinerja pegawai masih di bawah nilai 70 serta masih ada ASN yang melanggar disiplin pegawai atau mendapat hukuman disiplin, Pada tahun 2018 pelanggaran disiplin ASN sebesar 75,4 persen, Pada tahun 2019 meningkatsebesar 99,89 persen, Namun pada tahun 2020 turun menjadi 99,44 dan pada tahun 2021 naik menjadi 99,81 persen.

4. *Unsur Pendidikan dan Pelatihan*

Permasalahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut:

- a. Kompetensi ASN masih rendah, hal ini terlihat dari jumlah ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan tahun 2018 terealisasi 59,49 persen dari target 57,5 persen, tahun 2019 terealisasi 34,07 persen dari target 69 persen, tahun 2020 terealisasi 48,86 persen dari target 78,5 persen dan realisasi 2021 sebesar 69,90 persen dari target 74 persen.

5. *Unsur Penelitian dan Pengembangan*

Permasalahan Unsur Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah masih rendah. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan hanya sebesar 75 %.

- b. Hasil inovasi daerah yang dikembangkan masih sangat rendah. Pada tahun 2019 Laporan Indeks Inovasi Daerah untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang inovatif dengan skor nilai 280.

6. Unsur Penghubung

Permasalahan Unsur Penghubung, sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya pelayanan Badan Penghubung, dimana Nilai Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung pada tahun 2018 sebesar 82,34 % dan 2019 sebesar 100 %. Selain itu dilihat dari capaian data dan informasi Nilai Sakip Badan Penghubung Mencapai nilai di tahun 2018 (70) dan 2019 (71,18), walaupun mengalami peningkatan namun masih terbatas pada kepuasan pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya mencerminkan kepuasan hasil dari pelayanan Badan Penghubung.

F. Unsur Pengawasan Pemerintahan

Permasalahan Unsur Pengawasan, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Nilai Materialitas Temuan Hasil Pemeriksaan. Tujuan yang akan dicapai adalah nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan sebesar <5% dari total APBD tahun anggaran berjalan. Data pada tahun anggaran 2018 menunjukkan nilai materialitas temuan hasil pemeriksaan sebesar 0,86% dan pada tahun anggaran 2019 sebesar 0,06%.
- b. Belum optimalnya nilai level capaian maturitas SPIP. Hal ini terlihat dari data tahun 2018 masih level 2+ dan tahun 2019 level 3 (dengan catatan).
- c. Belum optimalnya Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan. Hal ini terlihat pada realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan tahun 2018 memperoleh Nilai 5,66 dan tahun 2019 mendapatkan Nilai 5,74 dari total Nilai Bobot sebesar 12. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya instrumen pengawasan lainnya seperti benturan kepentingan, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah upaya pembangunan zona integritas yang lebih intensif di unit-unit kerja guna mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 serta mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi yang akan menjawab keluhan mengenai pelayanan publik yang selama ini dirasakan masyarakat.

4.2. Analisis Dan Penetapan Isu Strategis

4.2.1. Analisis Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan

menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

- a. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Isu strategis dari Kebijakan Pembangunan Nasional atau pemerintah pusat yang mempengaruhi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2000-2025.
 - 2) Analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang.
 - 3) Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

1. Kajian terhadap isu dunia internasional, nasional dan regional

Isu dunia internasional, nasional dan regional yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah masih tergantungnya harga komoditas unggulan daerah pada pasar global sehingga turut serta mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir PDRB sektor unggulan daerah Bangka Belitung, khususnya sektor pertanian dan pertambangan tumbuh secara fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung Tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 3,32%, hal ini dikarenakan anjloknya harga dari beberapa komoditas utama Bangka Belitung akibat efek dari ekonomi global. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung terkontraksi sebesar 2,30%, hal ini disebabkan terbatasnya aktifitas ekonomi setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan tentang pandemi virus Covid-19 di seluruh dunia. Pada tahun 2021, seiring dengan semakin melandainya kasus Covid-19 karena sudah dimulainya distribusi vaksin, kinerja ekonomi global pun mulai mengalami pertumbuhan ke arah positif. Kegiatan produksi sudah mulai berjalan. Ini dibuktikan dengan mulai meningkatnya permintaan global akan bahan baku produksi. Hal ini tentu juga dirasakan oleh Indonesia tidak terkecuali Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai salah satu penghasil timah dan CPO. Harga kedua komoditas ini tentunya berimbas pada peningkatan ekspor luar negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertumbuhan kinerja ekspor terutama ditopang oleh tetap tingginya permintaan komoditas dari negara mitra dagang utama, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Singapura.

Pandemi Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kinerja ekonomi, tetapi memberikan dampak negatif pada sektor kesehatan. Dunia sedang menghadapi krisis kesehatan masyarakat dalam satu abad terakhir. Semua Negara perlu memperkuat system kesehatan dan program pencegahan penyakit. Tidak ada negara yang mencapai apa yang disebut **Herd-Immunity**, semuanya sangat rentan terhadap gelombang baru pandemic covid-19.

Pandemi covid-19 harus dijadikan momentum untuk mereformasi system kesehatan nasional (SKN). Hal ini untuk mempersiapkan kemungkinan keadaan darurat munculnya pandemic penyakit lain di masa yang akan datang. Mengingat berbagai tantangan mengenai SKN di Indonesia masih sangat banyak, mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, ketimpangan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, dan pengembangan inovasi dalam program JKN yang perlu dilakukan agar kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat. Pandemi Covid-19 juga menunjukkan bahwa program JKN berperan penting dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang terintegrasi dengan jaminan sosial lainnya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berupaya untuk metransformasi perekonomian dari sector pertambangan ke sektor pariwisata sebagai sektor unggulan daerah mendapatkan tantangan yang cukup berat. Peluang kunjungan wisata sebagai nilai tambah pertumbuhan ekonomi sangat sulit untuk tercapai, sebagai akibat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah untuk mencegah meluasnya pandemic covid-19, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan turunnya mutu dan kualitas pendidikan. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia, sebagian besar negara mengumumkan penutupan sekolah dalam waktu sementara demi menjaga keselamatan dan kesehatan para siswa, keluarga siswa dan guru. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) melaporkan bahwa kebijakan tersebut secara global berdampak pada lebih dari 91 persen siswa mengalami *learning loss*, yakni hilangnya kemampuan dan keterampilan secara spesifik maupun secara umum. *Learning loss* bisa juga diartikan sebagai kemunduran kemampuan akademis yang dialami para siswa yang disebabkan adanya diskontinuitas proses pembelajaran, adanya kesenjangan yang berkepanjangan dan/atau proses pendidikan dan pembelajaran yang tidak baik.

UNESCO melaporkan lebih dari 500 juta siswa di dunia tidak bisa mengikuti pembelajaran online dikarenakan keterbatasan koneksi internet dan media pendukung pembelajaran, seperti smart phone/laptop/PC, dan atau jaringan internet, sehingga dampak dari *learning loss* semakin parah, disamping dikarenakan adanya penutupan sekolah sementara pada saat Covid-19 mulai melanda dunia. Pembelajaran online menjadi tantangan bagi pendidikan di seluruh dunia, terlebih lagi bagi negara yang sedang berkembang dan negara kepulauan, seperti Indonesia. Perubahan sistem pembelajaran tatap muka di kelas menjadi pembelajaran online berdampak bagi menurunnya kualitas layanan pendidikan. Hal ini disebabkan teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru karena pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi nilai esensi dari pendidikan adalah membangkitkan diri siswa untuk menemukan jati diri mereka sebagai agen pembelajar yang memiliki *soft skill* dan/atau kecakapan abad 21 yang baik, seperti aktif, kreatif, bisa bekerjasama/berkolaborasi, berpikir kritis analitis, dan memiliki keterampilan berkomunikasi yang efektif.

Selanjutnya, pola pembelajaran jarak jauh yang sudah diterapkan pada masa dan pasca pandemi Covid-19 kebanyakan tidak berjalan dengan efektif. Faktor ketidaksiapan para guru dan tenaga kependidikan di dalam menggunakan teknologi komputer dan informasi di dalam menyelenggarakan pendidikan online dan/atau *hybrid* yang efektif dan berkualitas; ketidaksiapan para orang tua di dalam mendampingi anak-anak mereka di

rumah di dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh; dan beban perekonomian yang dihadapi keluarga yang terdampak pandemi; serta perubahan tatanan kehidupan sosial budaya pada masa pandemi and post Covid-19 menjadi tantangan besar bagi siswa di dalam mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, perkembangan karakter, kesehatan mental, dan kesejahteraan (well beings) mereka.

Pandemi Covid-19 selanjutnya telah meningkatkan angka kemiskinan, memperparah gap atau ketimpangan, dan mengancam hak-hak anak pada tingkat yang jauh lebih besar dibandingkan masa-masa sebelumnya sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal. Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berkualitas, merata, dan berkeadilan mendapatkan tantangan yang semakin besar dikarenakan anak-anak dari golongan ekonomi rendah dan/atau beresiko, dan anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini sudah termajinalkan menjadi semakin terpuruk. UNESCO menyatakan bahwa sampai dengan tahun 2021, sekitar 117 juta siswa di dunia mengalami putus sekolah sejak pandemi Covid-19 menghantam dunia. Fakta ini juga ditemukan di Indonesia dimana Organisasi Bantuan Kemanusiaan dan Perkembangan Kesejahteraan Anak-Anak (UNICEF) melaporkan sekitar 4,4 juta anak-anak dan remaja usia 7-18 tahun di Indonesia masih tidak bersekolah. Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan UNICEF melaporkan pada tahun 2021, jumlah anak-anak yang menjadi pekerja anak telah meningkat menjadi 160 juta di seluruh dunia. Ini berarti telah terjadinya peningkatan, yakni sekitar 8,4 juta anak dalam empat tahun terakhir menjadi pekerja anak-anak. UNESCO menyatakan bahwa peningkatan jumlah anak-anak menjadi pekerja ini dikarenakan hampir 369 juta anak yang bergantung pada makanan sekolah untuk nutrisi harian mereka harus mencari sumber lain dalam memenuhi kebutuhan nutrisi mereka.

Fenomena anak usia sekolah menjadi pekerja kebanyakan ditemui di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap berkurangnya atau hilangnya pendapatan rumah tangga yang kemudian menciptakan tekanan bagi anak-anak, khususnya remaja, sehingga banyak remaja usia sekolah mengalami putus sekolah dan harus bekerja. Selain untuk memenuhi kebutuhan ketika mengikuti pembelajaran online, seperti biaya untuk pembelian smart phone/laptop/PC, dan kuota internet, serta biaya-biaya personil lainnya, dimana di Indonesia, kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi tanggungjawab keluarga siswa, para siswa yang putus sekolah harus bekerja guna mendukung perekonomian keluarga mereka.

Sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia, Revolusi industri 4.0 yang dicetuskan oleh Jerman menggabungkan teknologi otomasi dengan teknologi siber dan menitikberatkan pada manufaktur, sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan (cloud computing) dan komputasi kognitif. Dan sebagai timbal balik dari Revolusi Industri 4.0 Jepang melahirkan program Society 5.0 dimana kehidupan masyarakat yang makmur akan tercipta dengan adanya dukungan inovasi-inovasi di bidang teknologi yang erat berkaitan dengan *Big Data*, *artificial intelligence* (kecerdasan buatan), *Internet of Things (IoT)*s atau jaringan objek fisik yang disematkan dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya untuk menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet, dan teknologi robotik, tentunya ini juga berimbas dengan ilmu pengetahuan, informasi dan keterampilan-keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh SDM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Industri 4.0 dan masyarakat 5.0 atau super smart society (society 5.0) yang diperkenalkan Pemerintah Jepang pada 2019, menjadi solusi dan tanggapan dari revolusi industri 4.0 tak dapat dipungkiri akan menimbulkan degradasi manusia. Di masa society 5.0, sistem sosial ekonomi yang berkelanjutan dimana *Big Data*, *artificial intelligence*/kecerdasan buatan, *Internet of Things (IoT)*s) atau jaringan objek fisik yang disematkan dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya untuk menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet, dan teknologi robotik semakin pesat digunakan menuntut manusia untuk lebih cepat menghasilkan solusi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini pun mendorong manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menciptakan inovasi baru guna menciptakan masyarakat cerdas dan lebih sejahtera. Komunikasi menjadi bagian integral dari proses pembangunan masyarakat menghadapi tantangan era society 5.0. Sebagai penentu kebijakan dan pembuat regulasi, Pemerintah tentunya tidak akan dapat menciptakan aturan dan kebijakan yang berkeadilan sosial jika dalam prosesnya tidak melibatkan komunikasi secara konvergen.

Akses pendidikan dan pengembangan keterampilan untuk masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kemajuan. Meskipun demikian, terdapat disparitas yang besar dalam hal akses dan relevansi antar provinsi di Indonesia. Model komunikasi timbal balik yang terjadi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat seharusnya dijembatani melalui media yang relevan dengan kondisi era masyarakat digital seperti saat ini. Di sisi lain peran pemerintah juga perlu terus melanjutkan secara sistemik untuk melahirkan SDM digital serta menciptakan ekosistem digital. Tentunya hal ini tak lepas dari pendidikan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang melek akan teknologi digital dan literasi digital. Di saat yang sama, pemerintah harus terus melanjutkan pembangunan infrastruktur digital, membuat kebijakan dan regulasi yang mendorong pertumbuhan industri teknologi informasi yang efisien dan progresif.

Pembangunan kebijakan juga harus memperhatikan hak-hak perempuan sebagai salah satu agen pembangunan. Fakta menunjukkan perempuan Indonesia mencapai tingkat pendidikan yang sedikit lebih rendah daripada laki-laki. Sekitar 31% dari populasi wanita berusia 25 tahun ke atas mencapai lebih dari pendidikan menengah atas, dibandingkan dengan 38,3% untuk pria (UNESCO Institute for Statistics, 2020). Namun sangat mengejutkan, lebih banyak wanita muda daripada pria yang mencapai gelar tersier. Kesenjangan gender dalam pencapaian pendidikan di Indonesia mengikuti tren yang sama seperti di negara-negara OECD dimana 18% wanita berusia 25-34 tahun di Indonesia sekarang memiliki gelar tersier dibandingkan dengan 14% pria berusia 25-34 tahun (OECD, 2019). Para pemuda sekarang dihadapkan pada permintaan pasaran dunia industri yang semakin menantang dimana mereka dituntut untuk bisa mengakses teknologi informasi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam industry 4.0 dan society 5.0. Tentunya hal ini sangat memperihatinkan dimana 60 % tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Meskipun ada peningkatan substansial dalam pencapaian pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus berjuang keras untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja.

Penunjukan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 (Group of Twenty) atau forum kerja sama multilateral 19 negara utama dan Uni Eropa, sejatinya merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan negara-negara besar di dunia bagi Indonesia. Presidensi G20 akan dapat menjadi milestone peta jalan Indonesia Maju, khususnya dengan memastikan pengembangan pilar “Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan” terhadap poin-poin penting seperti peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri, percepatan industri dan pariwisata, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan energi dan air, dan komitmen terhadap lingkungan hidup. Momentum ini juga seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena sudah dipercayakan oleh pemerintah pusat sebagai tuan rumah. Hal ini tentunya memberikan dampak yang positif bagi kemajuan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu membuka peluang untuk mempromosikan pariwisata di Bangka Belitung serta dapat menjadi katalis yang mempercepat pemulihan lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang lebih baik.

Inflasi global telah melanda berbagai negara di seluruh dunia. Hingga Oktober 2021, tingkat inflasi menyentuh angka 6,2%, tertinggi sejak 1990. Kenaikan harga menambah berat perekonomian di saat pandemi. Tingginya inflasi global menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai. Sebab, inflasi global bisa berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Saat ini, laju inflasi Indonesia pada tahun 2021 masih terkendali pada level yang rendah dan stabil, serta berada di bawah kisaran target sebesar $3 \pm 1\%$ (yoy) yang telah ditetapkan. Kondisi tingkat inflasi Indonesia dipengaruhi oleh lemahnya permintaan (demand) karena pertumbuhan ekonomi yang belum stabil sebagai akibat pandemic covid-19 yang masih belum mereda.

Efek rumah kaca sejatinya dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi, supaya perbedaan suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar. Namun efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global, dimana suhu di bumi akan naik secara signifikan yang ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut dan perubahan iklim yang ekstrim. Indonesia telah terlibat aktif di tingkat internasional sebagai salah satu negara peratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protocol Kyoto. Komitmen dan Kontribusi Indonesia kembali ditunjukkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris di New York pada tanggal 22 April 2016, Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan bergerak aktif mencegah terjadinya perubahan iklim. Perjanjian Paris juga memposisikan hutan sebagai kunci dari upaya penurunan gas rumah kaca. Hal ini mengingat kemampuan hutan menyerap gas rumah kaca. Posisi ini tersirat dari ketentuan pasal 5 Paris Agreement yang mendorong negara-negara pihak untuk menerapkan dan mendukung kerangka kerja berdasarkan perjanjian untuk kegiatan-kegiatan terkait reducing emission from deforestation and forest degradation dan konservasi serta pengelolaan hutan yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan. Implementasi dari kesepakatan di tingkat internasional tersebut memerlukan penterjemahan ke dalam konteks pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

2. Kajian terhadap kebijakan pembangunan nasional/pemerintah pusat

a. Undang-undang Cipta Kerja

Pada November 2020, presiden secara resmi mengesahkan dan mengundang Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU Ciptaker dibentuk dengan metode omnibus law, yaitu membentuk 1 (satu) undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Melalui UU Ciptaker, pemerintah berupaya untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi sangat diperlukan oleh Indonesia saat ini untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, pengadaan lahan, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang.

UU Ciptaker mengubah, mencabut, dan atau membuat ketentuan baru yang menysasar 78 undang-undang. Sampai saat ini, pemerintah telah menerbitkan 51 peraturan pelaksana yang terdiri atas 47 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden. UU Ciptaker dan peraturan pelaksanaanya tersebut tentu berimplikasi terhadap keberadaan produk hukum di daerah. Disamping itu, implementasi UU Cipta Kerja di daerah harus diperkuat pada dimensi regulasi, kelembagaan, dan digitalisasi platform online.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, yaitu diarahkan pada peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.
2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yaitu ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan Pembangunan nasional.
3. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, yaitu ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
4. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, yaitu diarahkan pada pembangunan nasional yang perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, yaitu dengan menekankan pada Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yaitu menekankan pada peran Negara yang wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara.
7. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa aitu diarahkan pada Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa yang memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan Negara bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Dalam kerangka pembangunan nasional (RPJMN 2020-2024), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi bagian integral dalam penetapan strategi dari arah kebijakan nasional, yaitu arah kebijakan dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi dan arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Nasional. Kawasan Industri (KI) Sadai merupakan salah satu strategi nasional dalam upaya Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dengan dukungan bagi industrialisasi terintegrasi hulu hilir dan yang berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Disamping itu, dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah nasional tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Pada tahun 2020-2024, arah kebijakan pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam bagian Pengembangan wilayah pulau Sumatera, yang diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai sentra produksi komoditas dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, serta sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan merupakan bagian dari Strategi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama yang diprioritaskan, yaitu pengembangan Kawasan Industri (KI) Sadai, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Tanjung Kelayang.

c. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam rangka pelaksanaan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan provinsi selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1) Pendidikan

- Pendidikan menengah
- Pendidikan khusus

2) Kesehatan

- pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
- pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

5) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

- pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi

6) Sosial

- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
- rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
- rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
- rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

d. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah konsep pembangunan dengan mempertimbangkan berbagai

macam aspek, potensi dan karakteristik yang ada pada suatu daerah. SDGs memuat tujuan dan sasaran global pembangunan berkelanjutan tahun 2016 sampai tahun 2030 dan merupakan penyempurnaan dari Millennium Development Goals (MDGs)/Tujuan Pembangunan Milenium (TPM). Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, SDGs memiliki 17 Tujuan dan 169 Target rencana aksi global yang berlaku bagi seluruh Negara (universal), sehingga seluruh Negara tanpa terkecuali tingkat kemajuan Negara memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs, yaitu:

1) Tanpa Kemiskinan

Secara keseluruhan untuk tujuan I tanpa kemiskinan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sangat baik, namun perlu kerja keras dalam mencapai sasaran indikator pada tahun 2030, karena terdapat 1 (satu) indikator yang pada tahun 2020 belum mencapai target, yaitu persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap dengan capai 55,57% dari target 60,85 %.

2) Tanpa Kelaparan

Dari 4 (empat) indikator penyusun capaian tujuan ini secara umum pada tahun 2020 dapat tercapai. Namun berkenaan dengan indikator mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian (Target Global 2.5), capaian kinerja untuk produksi Ternak Besar dan Kecil belum mencapai target, yaitu sebanyak 15.310 ekor dari target 51.124 ekor, serta untuk produksi perikan budidaya juga belum mencapai target, yaitu sebanyak 7.150 ton/tahun dari target 11.200 ton/tahun.

3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Dari tujuh target dan 36 (tiga puluh enam) indicator SDGs, terdapat 4 (empat) indikator tidak atau sulit untuk tercapai, yaitu terkait dengan angka mengurangi rasio angka kematian ibu, yaitu sebesar 137/100.000 kelahiran hidup dari target 72/100.000 kelahiran hidup, Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi sebesar 57,1% dari target sebesar 100 %, Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk sebesar 105 dari target 91.45/100.000 penduduk, Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% dari target sebesar 95%,

4) Pendidikan Berkualitas

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Melek Aksara, proporsi remaja dan dewasa yang menguasai keterampilan TIK, proporsi tenaga pendidikan bersertifikat kompetensi, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan capaian terkait dengan indikator tersebut terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

5) Kesetaraan Gender

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat kesatu sebagai provinsi dengan pernikahan dengan usia anak pada tahun 2020. Angka persentase ini terus meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016, persentase ini sebesar 15,98 persen, dan pada tahun 2020, meningkat menjadi 18,76 %. Artinya, terdapat sekitar 19 dari setiap 100 orang perempuan berumur 20 hingga 24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Disamping itu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasusnya sempat mengalami penurunan dari tahun 2016 yang tercatat sebanyak 123 kasus kekerasan menjadi 60 kasus di tahun 2018 dan 2019. Namun di tahun 2020, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 81 kasus. Meskipun demikian semua korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini ditangani dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sebagian besar indikator yang terdapat di dalamnya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

6) Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan keenam, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Secara nasional, tujuan tersebut memiliki 8 (delapan) target dengan 16 (enam belas) indikator, sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menitikberatkan pada 6 (enam) target dengan 13 (tiga belas) indikator. Pada tahun 2020 hampir sebagian besar target untuk capaian tujuan SDGs ini tidak tercapai karena refocusing anggaran.

7) Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan untuk semua sangat penting dalam mendukung pembangunan, baik pada pilar pembangunan ekonomi maupun pilar pembangunan lainnya. Indikator yang diukur untuk mencapai tujuan SDGs ini adalah jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik yaitu sebesar 99,9% serta proporsi rumah tangga yang telah memanfaatkan gas sebagai bahan bakar untuk memasak dibanding total rumah tangga secara keseluruhan sebesar 85,8%. Secara keseluruhan capaian tersebut pada tahun 2020 memenuhi target yang telah ditetapkan.

8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Tujuan 8 meliputi target-target seperti mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, menciptakan tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, meningkatkan kebijakan pembangunan dan mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang semakin layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mengurangi pekerja anak, mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Adanya pandemi COVID-19 berimplikasi kepada menurunnya pencapaian pada sebagian besar indikator yang termasuk

ke dalam tujuan ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kebijakan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional yang bersifat inklusif, merata dan berkelanjutan pada masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 menjadi sangat krusial. Dari 12 target tujuan, terdapat 4 (empat) indikator yang belum mencapai target, yaitu berkaitan dengan Laju pertumbuhan PDB per kapita sebesar -0,22% dari target 4,5%, prosentase setengah pengangguran sebesar 9,11% dari target 5,6%, jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 2.476 orang dari target 7.615 orang dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 223.951 orang dari target 405.175 orang.

9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan ini menitikberatkan pada 4 (empat) target dengan 13 (tiga belas) indikator. Target yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di antaranya adalah: (1) Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua; (2) Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di Negara kurang berkembang; (3) Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing; (4) Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara negara kurang berkembang pada tahun 2020. Hampir sebagian besar dari indikator tujuan ini belum memenuhi target, dikarenakan refocusing anggaran.

10) Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan ini memiliki 4 (empat) target, dimana terdapat satu indikator yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu, aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia yang belum mencapai target, yaitu sebesar 79,12 point dari target sebesar 81,75 point.

11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Tujuan ini memiliki 6 (enam) target. Terdapat satu target yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota yang capaiannya belum memenuhi target yaitu sebesar 66,26% dari target sebesar 86% untuk indikator persentase sampah perkotaan yang tertangani.

12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Konsep indikator global untuk target ini adalah melakukan kuantifikasi dan pemantauan atas perkembangan siklus kebijakan yang dibuat oleh negara-

negara dalam menyusun instrumen kebijakan yang mengikat dan tidak mengikat, untuk mendukung perubahan menuju ke produksi dan konsumsi berkelanjutan. Secara umum indikator tujuan SDGs ini secara umum capaian telah memenuhi target.

13) Penanganan Perubahan Iklim.

Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca adalah pelaksanaan rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca, serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dilaporkan dalam dokumen Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2022 dan Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2021. Kedua dokumen tersebut yang menjadi indikator pengukuran capaian tujuan SDGs telah dibuat dengan baik.

14) Ekosistem Lautan

Berdasarkan matriks capaian indikator untuk tujuan ekosistem laut melalui status diketahui ada yang perlu mendapat perhatian dan data dukung tidak tersedia, yaitu terkait dengan proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. Sementara itu, indikator lainnya telah tercapai bahkan melebihi target seperti persentase kepatuhan pelaku usaha.

15) Ekosistem Daratan

Target tujuan SDGs yang perlu mendapat perhatian yaitu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global sebesar 3.332 Ha. Dengan indikator luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya pada tahun 2020 sebesar 0 Ha.

16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan SDGs ini merupakan upaya untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, mewujudkan penegakan keadilan dengan menyediakan akses keadilan untuk semua serta membangun institusi yang tangguh. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fokus dengan 4 target sasaran yaitu (1) Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun, (2) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat dan (3) Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan, (4) Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran, untuk indikator SDG's yang digunakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 10 indikator. Secara umum capaian dari indikator tersebut memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun terdapat 2 (dua) indikator yang perlu mendapat perhatian adalah Indeks kebebasan Sipil dan Indeks Hak-Hak Politik yang capaiannya masih rendah.

17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tujuan SDGs ini adalah mewujudkan kemitraan untuk mencapai Tujuan, memiliki satu indikator yang meningkatkan ekonomi pada saat pandemic covid 19 secara meningkat, yaitu Proporsi individu yang menggunakan internet dengan capaian mencapai 45,85. Sedangkan untuk dua indikator lainnya menurun dan membutuhkan perhatian khusus.

e. Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024

Pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkada sebelumnya, dikarenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pilkada serentak pada tahun 2024 juga dilaksanakan dalam kondisi pasca covid-19 dimana sedang terjadi recovery di berbagai tatanan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus sigap dan tepat untuk memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga diperlukan berbagai dukungan sumber daya yang memadai. Dukungan keuangan dan berbagai instrument pendukung seperti penyelenggara pemilu, sarana prasarana dan aparat keamanan sangatlah diprioritaskan untuk dipersiapkan dengan baik. Perlu komitmen pemerintah agar kesiapan ini dapat diantisipasi dalam berbagai instrument kebijakan yang pasti. Disamping itu perlu kerja keras dan senergi bersama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan sistem Pilkada Serentak yang memang merupakan hal yang baru bagi masyarakat.

3. Kajian terhadap kebijakan pembangunan daerah

- a. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 merupakan penjabaran tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting, mengingat RPD merupakan pengejawantahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diamanatkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa Kepala Daerah berakhir tahun 2022, menyatakan bahwa “Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi. RPD 2023-2026 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPD, dimana Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah Agri-Bahari yang maju dan berwawasan lingkungan dapat terwujud, yang ditandai dengan berkembangnya potensi ekonomi lokal, meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, terwujudnya pemerintahan yang amanah, serta terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Sasaran pembangunan jangka panjang daerah yang ingin dicapai pada periode akhir RPJPD (Tahun 2025) sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya ekonomi daerah, yang ditandai dengan PDRB sebesar 6,50%.
- 2) Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,95 point.
- 3) Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi menjadi 77,50 point.

- 4) Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 70,00 point.
- 5) Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat, yang ditandai dengan Indeks Williamson pada angka 0,215 point dan Indeks Gini Ratio pada angka 0,21 point.
- 6) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam, ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 68,01 point.

b. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah

Evaluasi capaian pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2017-2022 menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2023-2026. Dinamika pembangunan dan perekonomian daerah memunculkan berbagai isu dan permasalahan yang masih mengemuka selama kurun waktu 2017-2022 dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sasaran pembangunan RPD Tahun 2023-2026. Beberapa isu dan permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
- 2) Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi
- 3) Nilai tambah produk UKM yang masih rendah
- 4) Kemandirian pangan rendah
- 5) Tingginya tingkat inflasi global
- 6) Kewenangan pemerintah dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mineral sangat terbatas
- 7) Hilirisasi sumber daya mineral masih rendah
- 8) Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan.
- 9) Tingkat investasi masih rendah
- 10) Tingginya laju pertumbuhan penduduk
- 11) Tingkat pendidikan dan daya saing SDM masih rendah
- 12) Pentingnya Keterampilan self-directed learning atau pembelajar mandiri sebagai outcome edukasi pada abad 21.
- 13) Derajat kesehatan masyarakat masih rendah
- 14) Kebutuhan hak anak yang belum terpenuhi secara maksimal
- 15) Partisipasi pemuda dan pembangunan olah raga masih rendah
- 16) Belum meredanya pandemi covid-19 yang ditandai dengan munculnya varian baru covid-19
- 17) Belum terwujudnya herd immunity di kalangan masyarakat
- 18) Masih rendahnya status indeks kapasitas desa
- 19) Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
- 20) Kondusivitas demokrasi belum stabil

- 21) Lingkungan hidup banyak yang rusak
- 22) Lingkungan dan Geografis yang Rawan bencana
- 23) Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten
- 24) Kebutuhan akan energi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi
- 25) Konektivitas antar pulau sebagian besar sulit dijangkau
- 26) Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi
- 27) Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik
- 28) Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas
- 29) Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika
- 30) Masih rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan lambatnya pertumbuhan infrastruktur digital.

4.2.2. Penetapan Isu Strategis

Berbagai kajian lingkungan isu strategis dimaksud merupakan tantangan yang perlu diantisipasi juga potensi sumber daya yang perlu dikembangkan untuk keberhasilan pencapaian cita-cita pembangunan daerah. Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari berbagai lingkungan isu strategis, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026, karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Pejabat Kepala Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah selama 4 (empat) tahun ke depan sampai terpilihnya Kepala Daerah definitive. Isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani;
6. Kesesuaian dengan RPJPD-P.

Berdasarkan identifikasi dan analisa yang telah dilakukan, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi melambat dan cenderung stagnan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah di samping indikator-indikator lain

seperti tingkat pengangguran, angka kemiskinan, laju inflasi, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil diharapkan akan memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung bagi variabel ekonomi lainnya. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai beberapa komponen kebijakan yang bisa digunakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,19 persen, turun dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 4,55 persen. Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada tahun 2020 mencapai Rp3,37 triliun atau sekitar 21,36 persen dari total PDRB 34 provinsi di Indonesia. Sementara PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan kontribusi sebesar 2,24 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,48 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia. Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp75,53 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2020 mencapai Rp52,70 triliun. Sementara itu PDRB per Kapita Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 mencapai Rp49,77 juta, mengalami penurunan dibanding PDRB per Kapita tahun 2019 yang mencapai Rp50,91 juta.

a. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi

Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 terkontraksi sebesar 2,30 persen, turun dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 3,32 persen. Hampir sebagian besar lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan, kecuali lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; informasi dan komunikasi serta pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 6,48 persen, 16,22 persen dan 14,42 persen. Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 1,52 persen.

Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Struktur perekonomian Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha tahun 2020 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (20,45 persen); Industri Pengolahan (19,59persen), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor; Konstruksi (10,12 persen) serta Pertambangan dan Penggalan (8,50persen). Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan yang merupakan penyumbang terbesar kelima bagi perekonomian Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan negatif (terkontraksi). Perlambatan kinerja perekonomian di tahun 2020 juga dipengaruhi oleh Industri Pengolahan yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini merupakan selain dampak dari adanya surat edaran ICDX (Indonesia Commodity and Derivatives Exchange) pada bulan Oktober 2018 yang menolak surat keterangan asal bijih timah yang dikeluarkan oleh Surveyor Indonesia, juga dipengaruhi oleh industri logam timah yang mengalami penurunan produksi

sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia secara global, mengakibatkan penurunan permintaan logam timah di pasar dunia serta turunnya harga logam timah yang membuat para produsen logam timah menahan produksinya.

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 yakni sebesar 1,52 persen, menunjukkan fenomena bahwa Potensi laut yang kaya, pola konsumsi masyarakat yang gemar mengkonsumsi hasil laut, serta semakin maraknya usaha perikanan budidaya di Kepulauan Bangka Belitung menjadi pendorong tetap tumbuhnya lapangan usaha Perikanan di tengah pandemi. Produksi komoditas strategis perkebunan Bangka Belitung yakni lada dan kelapa sawit mengalami peningkatan. Pemerintah daerah sedang berupaya untuk mengembalikan kejayaan lada Bangka Belitung agar lebih bersaing di pasar global.

b. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran

Dari sisi Pengeluaran, Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 secara kumulatif mengalami kontraksi sebesar -1,04 persen. Seluruh komponen pengeluaran mengalami kontraksi kecuali komponen konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 1,28 persen. Namun demikian Konsumsi LNPRT mengalami penurunan tipis dibanding tahun sebelumnya karena berkurangnya kegiatan lembaga di masa pandemi, tetapi masih didukung dengan adanya pilkada serentak pada bulan Desember 2020. Kinerja Perekonomian dari sisi pengeluaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini masih mengalami perlambatan, meskipun mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini didorong komponen ekspor yang menjadi salah satu tumpuan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung memiliki kinerja yang kurang baik. Laju pertumbuhan ekspor total Bangka Belitung masih mengalami kontraksi sebesar -0,63 persen. Hal ini dikarenakan berkurangnya permintaan komoditas unggulan Bangka Belitung seperti timah dan lada akibat adanya lockdown pada negara tujuan ekspor. Sementara itu, komponen pengurang PDRB yakni impor barang dan jasa mengalami kontraksi lebih tinggi dibandingkan komponen ekspor yaitu -4,36 persen. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi terjadi pengurangan kegiatan produksi, membuat arus masuk barang (barang jadi, bahan baku, modal) dan jasa juga mengalami penurunan.

Struktur ekonomi Kepulauan Bangka Belitung menurut pengeluaran secara kumulatif pada tahun 2020 didominasi oleh komponen pengeluaran rumah tangga dengan kontribusi sebesar 60,83 persen. Komponen ekspor secara total mencakup ekspor luar negeri dan ekspor antar daerah menyumbang porsi sebesar 33,71 persen, namun sumbangan dari komponen pengurang ekspor yakni impor luar negeri dan impor antar daerah mengambil porsi lebih besar pada perekonomian Bangka Belitung sebesar 36,32 persen. Komponen pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan sumbangan pada perekonomian dengan kontribusi masing-masing sebesar 26,93 persen dan 13,20 persen.

Sumber pertumbuhan ekonomi utama dipegang oleh komponen LNPRT dengan -0,01 persen. Meskipun laju pertumbuhannya sendiri mengalami perlambatan tetapi porsinya yang besar masih mampu mendukung perekonomian Kepulauan Bangka Belitung. Pertumbuhan komponen ini secara kumulatif didorong oleh adanya

pilkada serentak pada bulan Desember 2020 serta Relaksasi ekonomi yang telah berlangsung sejak triwulan III-2020 juga berdampak pada peningkatan kegiatan lembaga yang sempat vakum pada masa pembatasan sosial. Sumber pertumbuhan tertinggi kedua dipegang oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai sebesar -0,45 persen, Pandemi menjadi faktor utama penurunan konsumsi masyarakat. Adanya pembatasan sosial selama pandemi mengurangi kegiatan ekonomi masyarakat dan membuat pendapatan berkurang, sehingga penurunan daya beli membuat masyarakat menahan untuk melakukan konsumsi. Namun demikian, bantuan pemerintah dan membaiknya harga komoditas pertanian membuat konsumsi pengeluaran rumah tangga menunjukkan perbaikan dari triwulan sebelumnya. Disamping itu, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan sumber pertumbuhan tertinggi selanjutnya dengan sumbangan -3,44 persen.

2. Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Daya Saing masih rendah

Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang mencerminkan pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018, status pembangunan manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Namun masih terdapat 2 (dua) Kabupaten yang capaian IPMnya masih pada level “sedang”, yaitu Kabupaten Bangka Barat (69,60) dan Kabupaten Bangka Selatan (67,06). Selama 2010-2021 IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata meningkat sebesar 0,75 persen per tahun, dari 66,02 pada tahun 2010 menjadi 71,69 pada tahun 2021. Pada tahun 2021, IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 0,31 persen. Gambaran utama terkait dengan kapasitas dan kualitas SDM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi kesehatan (healty) dan dimensi pengetahuan (Knowledge). Dimensi kesehatan yang mencerminkan umur Panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH). Angka Harapan Hidup menggambarkan aspek kesehatan, yaitu perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator AHH maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama. Indikator umur harapan hidup penduduk Kepulauan Bangka Belitung pada saat lahir (Eo) tercatat meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari 69,95 tahun pada tahun 2017 menjadi 70,64 tahun pada tahun 2020 serta pada tahun 2021 sebesar 70,73. Angka sebesar 70,73 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 hingga akhir hayatnya.

Secara nasional, angka harapan hidup penduduk Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 menempati peringkat 15, sementara dalam tingkat regional Sumatera menempati peringkat 3 di bawah Provinsi Riau dan Jambi. Umur harapan hidup masyarakat Kepulauan Bangka Belitung memang menunjukkan peningkatan, namun capaian tersebut masih di bawah angka nasional yang pada tahun 2021 mencapai 71,57 tahun. Secara umum, peningkatan angka harapan hidup penduduk pada saat lahir di suatu wilayah menggambarkan kualitas kesehatan penduduk yang semakin membaik.

Terlebih pada kelompok bayi dan anak berusia di Bawah Lima Tahun (Balita) serta kelompok wanita berusia produktif. Fenomena peningkatan kualitas kesehatan penduduk

ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menjamin dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar melalui penyediaan infrastruktur dan sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan. Di samping penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan, upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan layanan persalinan secara adil dan merata bagi semua penduduk yang tinggal di wilayah Kepulauan Bangka Belitung juga turut mendorong peningkatan usia harapan hidup penduduk. Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap tingginya angka harapan hidup di Kepulauan Bangka Belitung adalah gaya hidup masyarakat yang saat ini semakin peduli dengan kesehatan, terutama kesehatan wanita hamil.

Selama periode 2017-2021, jumlah infrastruktur rumah sakit baik swasta maupun pemerintah mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 hanya ada 10 rumah sakit pemerintah dan 9 rumah sakit swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun pada tahun 2021, sudah ada 12 rumah sakit pemerintah dan satu diantaranya merupakan Rumah Sakit Khusus yang melayani pasien Covid-19 yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disamping itu, terdapat 13 rumah sakit swasta dan 3 rumah bersalin di Kepulauan Bangka Belitung. Peningkatan jumlah rumah sakit juga diiringi oleh peningkatan kapasitas tempat tidur dari 1.729 unit di tahun 2017 menjadi unit di tahun 2020 atau meningkat sebesar persen selama kurun waktu empat tahun terakhir.

Tidak semua penduduk yang mengalami keluhan atau gangguan kesehatan bisa dan mampu mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit, karena ketersediaan sarana yang belum sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang mengalami keluhan/gangguan kesehatan. Untuk mengantisipasinya, pemerintah mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang berbasis wilayah kecamatan yang dekat dengan tempat tinggal penduduk serta berbiaya murah dengan sistem berjenjang yang dikenal dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Untuk menjangkau daerah sulit dan terpencil, pemerintah mengaktifkan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling serta mengaktifkan peran posyandu pada level desa/kelurahan untuk melayani pemeriksaan kesehatan bagi balita, ibu hamil, dan penduduk lansia.

Sampai dengan tahun 2020, di Kepulauan Bangka Belitung terdapat 66 unit puskesmas dan 141 unit puskesmas pembantu. Selain itu, jumlah posyandu sebanyak 1.086 unit, yang artinya di masing-masing kecamatan di Kepulauan Bangka Belitung sudah tersedia Puskesmas serta sarana penunjang kesehatan lainnya sebagai pusat layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan juga diperlukan untuk mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2020, tercatat jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 7.159 orang yang terdiri dari 708 tenaga medis, 3.303 perawat, 1.480 bidan, 651 tenaga farmasi, 219 ahli gizi, 296 tenaga kesehatan masyarakat, 285 teknisi medis dan 151 tenaga sanitasi dan 66 tenaga terapi fisik.

Ketersediaan infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan yang representatif diyakini menjadi syarat yang diperlukan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Namun, hal tersebut belum menjadi syarat kecukupan. Artinya, masih ada aspek yang harus dipenuhi terutama berkaitan dengan daya beli atau kemampuan masyarakat dalam membayar jasa layanan kesehatan yang diaksesnya maupun kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan gizi hariannya. Pada tahun 2021, tercatat masih ada 39 bayi yang

mengalami gizi buruk dan 1.314 bayi dengan berat badan lahir rendah. Hal ini yang masih akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera diatasi agar pembangunan manusia di Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dimensi Pengetahuan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator tersebut merupakan indikator yang digunakan untuk menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) yang dipandang tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang. Harapan lama sekolah dihitung dari jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas. Indikator harapan lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung tercatat memiliki pola yang semakin meningkat selama periode 2010-2021. Pada tahun 2021, angka harapan lama sekolah mencapai 12,17 tahun yang menggambarkan angka perkiraan lama tahun sekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka ini meningkat 1,69 tahun dibanding tahun 2010 yang sebesar 10,48 tahun.

Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang digunakan untuk memotret pemerataan pendidikan dan mengukur kesempatan seorang penduduk dari usia tujuh tahun dalam menyelesaikan pendidikannya di masa mendatang. Selama periode 2010-2021, angka HLS penduduk Kepulauan Bangka Belitung tercatat memiliki capaian yang semakin meningkat. Pada tahun 2021, angka HLS masyarakat Kepulauan Bangka Belitung mencapai 12,17 tahun, meningkat sebesar 1,69 tahun dibanding tahun 2010 yang sebesar 10,48 tahun. Selama periode 2010-2021, angka HLS tertinggi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 0,99 persen, yaitu 12,05 pada tahun 2020 menjadi 12,17 pada tahun 2021. Selanjutnya, dalam periode tiga tahun terakhir, angka HLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berada di posisi kedua terakhir, dan Provinsi Papua dengan HLS terendah se-nasional. Pada tingkat regional, Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 menempati peringkat terbawah. Angka HLS masyarakat Kepulauan Bangka Belitung sebesar 12,17 pada tahun 2021 menggambarkan perkiraan lama tahun sekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas, yakni memiliki harapan untuk menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun atau lulus setara SMA/SMK.

Selanjutnya, dimensi pengetahuan masyarakat Bangka Belitung ditinjau dari angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas selama periode 2010-2021, mengalami peningkatan sebesar 1,01 tahun, yaitu dari 7,07 tahun pada tahun 2010 menjadi 8,08 pada tahun 2021. Angka RLS sebesar 8,08 pada tahun 2021 ini merupakan capaian tertinggi selama sepuluh tahun terakhir dan menggambarkan rata-rata lamanya pendidikan yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru setara kelas VIII (delapan) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dan capaian ini berada di bawah tingkat nasional. Selama periode 2017-2021, laju pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,71 persen, yaitu 7,78 pada tahun 2017 meningkat menjadi 8,08 pada tahun 2021. Pada tingkat nasional, angka rata-rata lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung berada pada peringkat 11 terbawah dan pada tingkat regional Sumatera menempati peringkat terbawah sama dengan Provinsi Lampung.

Secara umum, perkembangan kedua indikator pendidikan tersebut merepresentasikan stok modal manusia (human capital) di Kepulauan Bangka Belitung yang semakin

meningkat. Meskipun terjadi peningkatan, namun angka tersebut menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum berhasil diterapkan di Kepulauan Bangka Belitung, mengingat rata-rata lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai jenjang kelas delapan atau setara SMP. Sementara itu, berdasarkan perhitungan terbaru yang dikeluarkan oleh The United Nations Development Programme (UNDP), jumlah tahun pendidikan yang diharapkan seorang siswa bisa dapatkan adalah selama 18 tahun, dan lamanya waktu 18 tahun tersebut mencerminkan bahwa setiap siswa diharapkan dapat mengenyam pendidikan sampai dengan tingkat universitas dan mendapatkan gelar magister atau S2. Dan ketika semua siswa di suatu negara bisa menyelesaikan pendidikan pada jenjang magister (S2), maka indeks HLS di negara tersebut mencapai angka 1,0. Jika dilihat dari perhitungan ini, indeks HLS masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai 0,68, dan ini berarti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih harus berupaya keras agar indeks HLS ini menjadi semakin lebih meningkat dan bahkan mencapai 1,0. Sebagaimana UNDP menetapkan bahwa lamanya rata-rata pendidikan 15 tahun menjadi proyeksi maksimum indikator indeks RLS pada tahun 2025, maka ketika warga berusia 25 tahun ke atas di sebuah negara memiliki rata-rata lama sekolah 15 tahun, maka negara tersebut memiliki indeks RLS sebesar 1,0. Jika ditinjau dari hal ini, maka indeks RLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai 0,539, dan ini menandakan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus bekerja keras agar indeks RLS ini terus meningkat dan bahkan mencapai 1,0.

Selanjutnya, pada tahun 2021, angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 68,15, menempatkan Kepulauan Bangka Belitung berada di posisi keempat terbawah atau peringkat ke-31 se-nasional. Selama periode 2017-2021, APS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersifat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,53 persen sementara itu pertumbuhan APS tingkat nasional sebesar 0,63 persen. Untuk wilayah Sumatera, APS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di posisi paling terendah atau peringkat terakhir, dan memiliki selisih poin dengan Provinsi Lampung sebesar 3,57 sebagai provinsi dengan APS terendah kedua di wilayah Sumatera. Dibandingkan dengan Provinsi Riau sebagai provinsi dengan APS tertinggi di wilayah Sumatera, sebesar 84,40, APS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki selisih poin sebesar 16,25. Selanjutnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki selisih poin sebesar 15,92 dengan capaian Provinsi Sumatera Barat sebesar 84,07 sebagai provinsi dengan APS tertinggi kedua di wilayah Sumatera.

Secara umum, terjadi peningkatan pada lamanya pendidikan yang dikenyam oleh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung selama 10 tahun terakhir ditinjau dari angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C, namun capaian-capaian tersebut menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum berhasil diterapkan di Kepulauan Bangka Belitung. Sampai dengan tahun 2021, sebanyak 60 persen dari tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan lulusan SD dan SMP. Alhasil, kondisi ini menggambarkan kualitas, potensi dan daya saing SDM di Kepulauan Bangka Belitung harus bekerja keras agar bisa bersaing dalam revolusi industri 4.0 yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber, serta program Society 5.0 dimana kehidupan masyarakat yang makmur akan tercipta dengan adanya dukungan inovasi-inovasi di bidang teknologi yang erat berkaitan dengan *Big Data*, *artificial intelligence* (kecerdasan buatan), *Internet of Things (IOTs)* atau jaringan objek fisik yang disematkan dengan sensor, perangkat lunak, dan

teknologi lainnya untuk menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet, dan teknologi robotik. Hal ini semua tentunya juga berimbas dengan ilmu pengetahuan, informasi dan keterampilan-keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh SDM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rendahnya capaian-capaian indikator dimensi pengetahuan dan indikator-indikator pengukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pola pikir masyarakat yang masih kurang mementingkan pendidikan menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu pemerataan infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan terutama bagi anak-anak yang masih dalam usia sekolah sangat diperlukan guna meningkatkan capaian indikator ini.

Selanjutnya, pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal mendorong pembelajaran yang menciptakan penguasaan *soft-skills* yang mendukung penguasaan literasi, dan kecakapan abad 21. Rendahnya kualitas/mutu pendidikan yang diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan masih rendahnya penyelenggaraan proses pembelajaran berbasis literasi ilmiah (saintifik), belum optimalnya penerapan kurikulum Merdeka Belajar dengan pengintegrasian kurikulum nasional dan lokal, pendekatan multikultural, kecakapan abad 21, STEAM/STEM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), dan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan warga negara dunia (Global Citizenship) dalam rangka mempersiapkan siswa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Pelajar Pancasila yang cakap dan berakhlak mulia. Pada jalur pendidikan dan pelatihan vokasi, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan belum sepenuhnya didukung dengan sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang memadai serta berkualitas, kecukupan pendidik mata pelajaran produktif yang berkualitas mumpuni, kecukupan kesempatan untuk mengikuti kegiatan magang dan praktik kerja, serta keterbatasan kapasitas sertifikasi kompetensi. Selain itu, pembelajaran juga belum mendorong penguasaan *soft-skills* yang mendukung keberkerjaan, seperti penguasaan literasi.

Rendahnya kualitas/mutu pengembangan kurikulum ini tentunya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Disparitas atau kesenjangan antara kualitas/mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan di satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kecakapan abad 21 juga disebabkan masih belum optimalnya peran Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di dalam mengembangkan kurikulum dan menciptakan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar (*market demand*), masih rendahnya relevansi antara penyelenggaraan proses pembelajaran dengan pemanfaatan/pemberdayaan potensi dan kekayaan daerah, serta diversitas multikultural yang dimiliki oleh siswa; masih rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan; masih belum optimalnya koordinasi antara satuan pendidikan dengan para pemangku kebijakan; dan belum optimalnya manajemen pengelolaan pendidikan yang berbasis saintifik (ilmiah).

Prestasi olahraga juga menjadi salah satu indikator daya saing SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, budaya dan prestasi olahraga Bangka Belitung masih tertinggal.

Hal ini ditandai dengan Indeks Pembangunan olahraga Bangka Belitung masih rendah, yaitu 28,00 point. Peningkatan daya saing olah raga perlu ditempuh melalui pemassalan olahraga untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial, memperbanyak event-event olah raga yang menopang prestasi serta peningkatan sarana prasarana olah raga.

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu bangsa, karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal. Sekitar 6,07 persen anak belum memiliki akta kelahiran (BPS 2020). Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tinggi. Tahun 2021 tercatat sebanyak 110 jumlah kasus yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Pelaporan terbanyak di Kota Pangkalpinang dengan jumlah 34 kasus. Ketimpangan gender masih terlihat dari Indeks Pembangunan gender yang mengalami penurunan pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 88,92%, sedangkan tahun 2019 sebesar 89,00%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didominasi oleh laki-laki (83,68 persen laki-laki dan 46,86 persen perempuan) (BPS, 2021), serta keterwakilan perempuan secara kuantitas dan kualitas di lembaga legislatif masih rendah, yaitu sebesar 6,6%.

Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan juga belum optimal. Secara nasional, rata-rata lama sekolah pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat keenam terendah (9,73 tahun). Bahkan, APK perguruan tinggi merupakan yang terendah (13,20%) dan jauh lebih rendah daripada angka nasional (30,19%). Kondisi tersebut menyebabkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat kedua terendah setelah Provinsi Papua untuk nilai indeks domain pendidikan. Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga masih rendah (76,40%) dan di bawah angka nasional (81,36%). Begitu pula halnya dengan keaktifan pemuda dalam organisasi dan proporsi pemuda yang memberi saran/pendapat dalam rapat. Nilai kedua indikator tersebut masih berada di bawah angka nasional.

3. Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 bernilai 77,39 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI tahun 2017. Capaian kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berada pada kategori “sedang”, meskipun sebelumnya pada tahun 2017 sempat mencapai kategori “baik”. Capaian IDI dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, capaian IDI Kepulauan Bangka Belitung sebesar 80,11. Angka ini terus

mengalami perubahan yang berfluktuasi, yaitu tahun 2018 sebesar 72,76, dan tahun 2019 sebesar 76,75. Pada tahun 2020 angka IDI kembali mengalami kenaikan sebesar 0,64 point. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Indonesia. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas. Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Apalagi tantangan besar terhadap capaian IDI akan terjadi pada tahun 2024, yaitu moment penyelenggaraan Pilkada serentak.

Angka IDI Kepulauan Bangka Belitung 2020 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 79,12; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 66,20; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 92,97. Pada periode 2018-2020 Aspek Hak-Hak Politik menunjukkan kecenderungan trend yang semakin menurun. Sementara itu, aspek Kebebasan Sipil cenderung berfluktuasi dan Lembaga Demokrasi menunjukkan kecenderungan trend yang semakin meningkat. Capaian aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2020 Indeks aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan sebesar 5,51 poin. Sedangkan indeks aspek Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik masing-masing mengalami penurunan sebesar 5 poin dan 5,1 poin. Hampir sama dengan tahun 2019 dimana hanya terdapat satu indeks aspek yang sudah berada pada kategori “baik”, namun terjadi perubahan kategori, yaitu indeks aspek kebebasan sipil pada tahun 2019 berada pada kategori “baik”, sedangkan pada 2020 berada pada kategori “sedang”. Untuk indeks aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2019 berada pada kategori “sedang”, sedangkan pada tahun 2020 berada pada kategori “baik”. Sementara itu untuk indeks aspek Hak-Hak Politik masih bertahan pada kategori “sedang”.

Pada tahun 2020 terdapat enam variabel yang mengalami penurunan indeks dan empat variabel yang mengalami peningkatan. Dari enam variabel yang mengalami penurunan, satu di antaranya menurun cukup tajam. Variabel kebebasan berkumpul dan berserikat menurun paling tajam yaitu sebesar 87,50 poin, dari 100,00 pada 2019 menjadi 12,50 pada 2020. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel kebebasan berpendapat yang turun 29,60 poin, dari 79,18 pada 2019 menjadi 48,59 pada 2020. Di sisi lain, variabel Peran Peradilan yang Independen meningkat cukup tinggi sebesar 75,00 poin, dari 25,00 pada 2019 menjadi 100,00 pada 2020. Peningkatan nilai indeks ini mengubah posisi variabel Peran Peradilan yang Independen dari kategori “buruk” menjadi kategori “baik”. Variabel lain yang juga meningkat adalah Kebebasan Dari Diskriminasi. Variabel ini meningkat sebesar 8,25 poin dari 85,22 pada 2019 menjadi 93,47 pada 2020. Sementara itu terdapat satu variabel yang nilai indeksnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan nilai indeks sebesar 100,00.

4. Masih Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 kembali dapat mempertahankan nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat “B” (66,08), meskipun mengalami penurunan nilai -0,76 dibanding tahun 2019 (66,84). Sedangkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pertumbuhan nilainya positif. Nilai tersebut

meningkat dibandingkan pencapaian predikat “B” pada tahun 2018 (65,39), namun nilai tersebut masih jauh dari target di akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2005–2025) yaitu mencapai target nilai 70,00. Fakta ini menggambarkan bahwa masih terdapat kelemahan dan permasalahan terkait dengan upaya percepatan peningkatan predikat yang lebih baik.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam meningkatkan indeks reformasi birokrasi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lebih fokus di tingkat pemerintahan daerah dan belum menyeluruh di setiap perangkat daerah. Selain itu pelaksanaannya belum berfokus pada perubahan yang diharapkan terjadi sebagai akibat dari upaya-upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- b. Agen perubahan masih sebatas melakukan perubahan dalam bentuk proyek perubahan dan belum berperan sebagai agen yang mampu membangun social control di antara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas, serta monitoring dan evaluasi atas target kinerja agen perubahan belum optimal;
- c. Peta keterkaitan antara kebijakan Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah belum sepebunya disusun;
- d. Penyetaraan jabatan fungsioanl belum diterapkan sepenuhnya.
- e. Peta proses bisnis yang disusun belum sepenuhnya ideal dan belum menunjukkan bentuk penyederhanaan organisasi yang berbasis kinerja.
- f. Penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya optimal, seperti belum adanya Grand Design pengembangan SPBE dan beberapa aplikasi belum terintegrasi.
- g. Penguatan sistem manajemen SDM belum optimal, yaitu:
 - 1) Assesment serta tidak lanjut hasil assessment sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi belum dilakukan pada seluruh pegawai.
 - 2) Penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau Human Capital Development (HCDP) belum menyeluruh.
 - 3) Pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/ suksesi belum dilakukan.
- h. Beberapa Perangkat Daerah ditemukan indikator kinerja tujuan dan sasaran pada proses bisnis yang belum sepenuhnya memenuhi indikator SMART.
- i. Pemanfaatan aplikasi monitoring kinerja masih belum berjalan optimal, sehingga informasi kinerja yang dihasilkan masih belum efektif memicu brebagai perbaikan kinerja yang yang diperlukan.
- j. Penguatan kebijakan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan tidak hanya sebatas pada kebijakan serta sosialisasinya, namun harus pada implemtasinya.
- k. Hasil dari survey mandiri terhadap kepuasan masyarakat dalam rangka upaya peningkatan pelayanan public belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dijasikan dasar perbaikan untuk menjawab permasalahan yang ada yang diharapkan oleh pengguna layanan.

5. Disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat masih Tinggi

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan yang berkesinambungan terhadap masyarakat dan sistem sosial ekonomi secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik. Pembangunan adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk didalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta intitusional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang merata, pertumbuhan yang cepat dan tidak diimbangi dengan pemerataan yang akan menimbulkan ketimpangan wilayah (Regional Disparity). Ketimpangan pembangunan antar daerah dapat terlihat dari adanya daerah yang

maju dan daerah yang berkembang bahkan terbelakang. Ketimpangan antar daerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan pembangunan suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografis yang terdapat pada setiap wilayah. Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi berbagai kendala, baik kendala geografis yang terdiri dari 470 pulau- pulau kecil, maupun potensi sumberdaya alam serta potensi wisata bahari yang belum optimal dimanfaatkan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukungnya. Persebaran penduduk yang tidak merata, serta ketaatan terhadap tata ruang yang masih rendah. Selain itu sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja dalam pembangunan juga terkadang menjadi masalah bagi pembangunan itu sendiri dan besaran biaya pembangunan yang dimiliki pemerintah daerah. Untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah Indeks Williamson, sedangkan untuk mengukur ketimpangan pembangunan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari capaian Indeks Gini.

Indeks willamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasarkan PDRB perkapita. Formula ini pada dasarnya sama dengan coefficient of variation (CV) biasa dimana standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Sedangkan Indeks Gini adalah merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurun waktu 3 (tiga) tahun ke belakang masih cukup tinggi. Tahun 2017 sebesar 0,193 point meningkat menjadi 0,199 point di tahun 2018 dan 0,200 di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 indeks Williamson Bangka Belitung turun menjadi 0,190 point. Capaian ini perlu untuk diperhatikan, mengingat masih belum meratanya ketersediaan infrastruktur, dimana sampai dengan tahun 2020 ketersediaan infrastruktur perhubungan baru terpenuhi sebesar 44,12% dan Infrastruktur Pekerjaan Umum sebesar 41,80%. Disamping itu, hal yang perlu diperhatikan adalah masih rendahnya ketaatan tata ruang, terdapatnya beberapa daerah rawan bencana yang belum terkelola dengan baik, belum tercapainya status desa mandiri serta belum meratanya persebaran penduduk di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan terkait dengan indeks Gini, meskipun capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling rendah secara nasional, yaitu sebesar 0,247 point yang menunjukkan bahwa tingkat pemerataan distribusi pendapatan di Bangka Belitung sangat baik, namun jumlah penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung relatif cukup banyak, yaitu berjumlah 264.262 Jiwa (80.623 KK). Disamping itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga masih tinggi diatas rata-rata nasional.

6. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan tatakelola sumber daya alam

a. Degradasi kualitas lingkungan hidup

Secara umum indeks kualitas tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 – 2020 selalu di bawah rata-rata nasional. Tahun 2020, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah 39,32 sedangkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Nasional adalah 43,2.

Kondisi ini disebabkan karena kondisi tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semakin menurun. Kegiatan penambangan timah dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit, lada dan karet oleh masyarakat dan perusahaan adalah salah satu faktor utama menurunnya tutupan dan kualitas lahan. Selain kondisi tutupan lahan yang sudah banyak rusak tersebut, disebutkan bahwa potensi lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 20.488 ha atau 1,23% dari total luasan darat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPDASHL Baturusa Cerucuk, Tahun 2018).

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung dari keseluruhan luas lahan 1.669.419 ha, didapatkan seluas 20.428 ha merupakan lahan kritis, 260 ha berkondisi sangat kritis, seluas 392.437 ha berkondisi agak kritis. Lahan berpotensi kritis seluas 794.718 ha, lahan tidak kritis sebesar 461.576 ha. Luasan terbesar berupa kondisi lahan yang potensial kritis mencapai persentase 47,60 %, kemudian diikuti oleh lahan tidak kritis sebesar 27,65%, lahan agak kritis sebesar 23,51%, lahan kritis 1,22% dan lahan sangat kritis memiliki persentase luasan yang sangat kecil sebesar 0,02%.

b. Tata Kelola sumber daya alam

Tiga persoalan besar yang menjadi benang merah terkait dengan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia yaitu Pertama, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masih bergantung kepada ketersediaan SDA kunci seperti lahan, hutan, tambang, laut, dan energi. Kedua, pertumbuhan industri masih akan terpusat di daerah perkotaan. Polusi industri yang terjadi berkombinasi dengan faktor lingkungan kota seperti sampah dan asap kendaraan. Ketiga, tingginya pertumbuhan ekonomi menciptakan konflik pemanfaatan Sumber Daya Alam, seperti lahan, hutan, laut dan SDA lainnya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Martinuzen, 1997), bahwa hubungan antara perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi menunjukkan adanya gap yang cukup lebar. Perhatian yang paling utama adalah bagaimana menciptakan level pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pada saat bersamaan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Di sinilah peranan pemerintah diperlukan dalam rangka menciptakan aturan tata kelola SDA yang sesuai.

Konflik antara masyarakat dengan para penambang timah ilegal hampir setiap tahun terus terjadi di Kepulauan Bangka Belitung. Karena kegiatan penambangan ilegal sudah merusak bentang alam, baik di darat maupun di laut yang menyebabkan

masyarakat lokal terganggu kehidupannya. Padahal, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengatur regulasi terkait tata kelola pemanfaatan sumber daya alam, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K Tahun 2020-2040, yang memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, terkait dengan pengelolaan sampah, bahwa tahun 2020 terdapat sebanyak 210.905,58 ton timbulan sampah di Kepulauan Bangka Belitung, akan tetapi yang mampu ditangani oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah hanya sebanyak 104.727,78 ton atau sebesar 49,66% dari timbulan yang ada. Ini mengindikasikan sebesar 40,33% sisanya belum mampu dikelola oleh TPA yang tersedia di semua kabupaten/kota. Pada semua Kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung, jumlah sampah yang masuk ke TPA jauh lebih rendah dibandingkan timbulan sampah.

Kota Pangkalpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menanggung tekanan jumlah sampah yang besar setiap tahunnya dengan timbulan sampah sampai mencapai 53,63% dari total timbulan sampah di Kepulauan Bangka Belitung. Jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan permasalahan yang besar di masa yang akan datang berupa sebaran sampah yang tidak pada tempat semestinya yang telah disiapkan. Dampak terbesar adalah pencemaran lingkungan sekitar oleh keberadaan sampah yang tidak mampu ditangani oleh TPA. Sisa makanan mendominasi komposisi sampah dan cenderung meningkat persentasenya dari tahun ke tahun, diikuti oleh sampah plastik, jenis sampah lainnya dengan persentase cukup besar berupa kertas/karton, diikuti oleh sampah taman, nappies, kain dan Produk tekstil, kayu, gelas dan dengan persentase terkecil berupa logam. Cukup banyak keterdapatn sampah yang tidak mampu diuraikan secara alami (sampah anorganik), akumulasinya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia terutama jika berupa logam berat. Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen pengelolaan sampah yang bersifat terpadu, dengan mengkombinasikan prinsip daur ulang dan pemakaian kembali produk hasil daur ulang sampah berupa produk tertentu.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Daerah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034 dan RPJMD Provinsi tetangga yang berbatasan.

5.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan RPJPD 2005 – 2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, RPJM Nasional 2020-2024, RPD Provinsi Tetangga yang berbatasan dan terdekat. Permasalahan yang ada, isu-isu strategis, serta capaian kinerja urusan pemerintahan 5 tahun yang lalu (2017-2022), maka dengan menggunakan penyelarasan serta analisis SWOT, ditetapkan tujuan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi Daerah
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam

Untuk mencapai ke 6 (enam) tujuan ini, maka ditetapkan sasaran sejumlah 19 (dua puluh) sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian

4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan
5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan
6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
7. Meningkatnya Ekspor
8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah
9. Meningkatnya Pembangunan Manusia
10. Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi
11. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
12. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur
13. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang
14. Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana
15. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan
16. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
17. Menurunkan Tingkat Kemiskinan
18. Meningkatkan Kesempatan Kerja
19. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

Baik tujuan maupun sasaran, semuanya ditetapkan indikatornya, disertai target-target capaian selama 4 tahun (2023-2026), sehingga bisa diukur keberhasilan pencapaiannya, dan ditetapkan dalam RPD ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekonomi Daerah yang diukur dengan indikator kinerja Tujuan Pertumbuhan PDRB, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
 - Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
 - Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian
 - Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
 - Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan
 - Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
 - Meningkatnya Ekspor dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan Ekspor

- Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah dengan indikator kinerja sasaran Pertumbuhan Investasi
- 2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya Pembangunan Manusia dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi dengan indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi dengan indikator kinerja sasaran Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
- 4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator kinerja sasaran Indeks Reformasi Birokrasi
- 5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Indeks Williamson, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dengan indikator kinerja sasaran Persentase Ketersediaan Infrastruktur
 - Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang dengan indikator kinerja sasaran Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana dengan indikator kinerja sasaran Indeks Resiko Bencana
 - Percepatan pembangunan kawasan perdesaan dengan indikator kinerja sasaran Indeks desa membangun
 - Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator kinerja sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
 - b. Indikator tujuan Indeks Gini, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Menurunkan Tingkat Kemiskinan dengan indikator kinerja sasaran Persentase Angka Kemiskinan
 - Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan indikator kinerja sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka
- 6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Keterkaitan dan konsistensiantara visi, misi, tujuan, Indikator kinerja tujuan, sasaran dan Indikator kinerja sasaran berserta target selama 4 tahun digambarkan seperti pada Tabel V.1 berikut ini.

Tabel V.1
Keterkaitan Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
RPD Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	1. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian 2. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan 3. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian 4. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan 5. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan 6. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik 7. Meningkatnya Ekspor 8. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	1) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian 2) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan 3) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian 4) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan 5) Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan 6) Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik 7) Laju Pertumbuhan Ekspor 8) Pertumbuhan Investasi
2	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya Pembangunan Manusia	1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1. Meningkatkan Kebebasan, Kesenjangan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	1) Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1) Indeks Reformasi Birokrasi
	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	1) Persentase Ketersediaan Infrastruktur
			2. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	2) Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
			3. Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	3) Indeks Kapasitas Daerah
			4. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	4) Indeks desa membangun
			5. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	5) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
		Indeks Gini	1. Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1) Persentase Angka Kemiskinan
			2. Meningkatkan Kesempatan Kerja	2) Tingkat Pengangguran Terbuka
6			1. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		

Tabel V.2
Target Indikator Kinerja Tujuan RPD 2023-2026
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET				KONDISI AKHIR RPD
			Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Meningkatnya ekonomi Daerah	Pertumbuhan PDRB	5,05	4,28	4,39	4,46	4,78	5,78
2	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69	71,91	72,13	72,35	72,57	72,58
3	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	77,79	77,39	78,40	79,41	80,42	81,42
4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	70,51
5	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	0,190	0,184	0,181	0,178	0,176	0,177
		Indeks Gini	0,247	0,239	0,229	0,224	0,217	0,217
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	75,43	75,84	76,70	77,50	77,50

Tabel V.3

Target Indikator Kinerja Sasaran RPD 2023-2026
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET				KONDISI AKHIR RPD
			Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	7,78*		4,23	4,43	4,60	4,60
2	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-9,76	3,85 4,03	4,05	4,25	4,45	4,45
3	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	-9,23	2,95	4,52	1,75	0,46	0,46
4	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	-5,64	1,86	3,25	4,50	4,55	4,55
5	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	-4,62	6,50	4,94	5,50	5,55	5,55
6	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	43,00	2,70	2,63	2,56	2,50	2,50
7	Meningkatnya Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	106,95	8,13	7,51	6,99	6,53	6,53
8	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Pertumbuhan Investasi	-39,68	25,00	30,00	30,77	34,12	34,12
9	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,69	71,91	72,13	72,35	72,57	72,58
11	Meningkatkan Kebebasan,Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	77,79	77,39	78,40	79,41	80,42	80,42
12	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	70,51
13	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	39,45	25,50	49,51	69,85	100	100
14	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,8
15	Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39
16	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,704	0,721	0,730	0,739	0,748	0,748
17	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,93	1,79	1,74	1,70	1,68	1,68
18	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,67	4,30	4,20	4,10	4,01	4,01
19	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,03	4,47	4,39	4,26	4,19	4,19
20	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	75,43	75,84	76,7	77,5	77,5

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab V, maka dirumuskan dan ditetapkan strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Program Pembangunan Daerah haruslah tepat mewujudkan sasaran, sehingga sasaran yang dicapai juga dapat mencapai Tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan juga haruslah tepat dan konsisten dengan sasaran, tujuan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,25 sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengindikasikan tingkat kualitas SDM diharapkan meningkat menjadi 71,05.

Guna mencapai target sasaran pokok pembangunan tersebut, maka:

- a. Pada sasaran pokok meningkatnya perekonomian daerah, arah kebijakan prioritas dalam RPJPD yang dilaksanakan adalah:
 1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
 2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
 3. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
 4. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
 5. Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam;
 6. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
 7. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
 8. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
 9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
 10. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
 11. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;

12. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
13. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah merupakan aturan hukum kaidah-kaidah, norma yang menjamin agar pencapaian tujuan dan sasaran tercapai dengan baik.

Strategi pembangunan dalam RPD ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan analisis SWOT, akhirnya ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

6.1.1. Strategi pencapaian sasaran

Sasaran Strategi yang dirumuskan dan ditetapkan untuk mencapai sasaran terdiri dari 21 (Dua puluh satu) yaitu:

1. Meningkatkan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta sarana dan prasarana produksi, Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian
2. Meningkatkan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
3. Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk
5. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting
6. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
7. Meningkatkan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.

8. Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
9. Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)
10. Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan
11. meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi
12. Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
13. Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
14. Memeratakan ketersediaan infrastruktur
15. Meningkatkan ketaatan tata ruang
16. Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana
17. Meningkatkan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi
18. Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
19. Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin
20. meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
21. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan

Keselarasan antara tujuan, sasaran serta strategi dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ekonomi Daerah yang diintervensi dengan sasaran Sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub sektor

- pertanian dan sarana dan prasarana produksi, Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian
- b. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub sektor Perikanan serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut dan penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
 - c. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.
 - d. Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk
 - e. Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perdagangan, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting
 - f. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
 - g. Meningkatkan Ekspor, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.
 - h. Meningkatkan Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah, yang diintervensi dengan strategi Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang diintervensi dengan strategi sebagai berikut:
 - Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)
 - Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan.
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi yang diintervensi dengan strategi meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi

4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang diintervensi dengan strategi sebagai berikut:
 - Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
 - Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - A. Indeks Williamson, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang diintervensi dengan strategi Memeratakan ketersediaan infrastruktur
 - b. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan ketaatan tata ruang
 - c. Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana
 - d. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi
 - e. Terkendalinya Laju Pertumbuhan yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
 - B. Indeks Gini, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Menurunkan Tingkat Kemiskinan yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin
 - b. Meningkatkan Kesempatan Kerja yang diintervensi dengan strategi meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja

6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan

Untuk melihat lebih jelas keterkaitan dan konsistensi antara strategi dengan sasaran, tujuan dapat dilihat pada table VI.I berikut ini.

Tabel VI.1
Tujuan, Sasaran dan Strategis RPD Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ekonomi Daerah	Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Meningkatan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta sarana dan prasarana produksi, Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian
			Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Meningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
			Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Meningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.
			Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Meningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk
			Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Meningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestic	Meningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya Ekspor	Meningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.
			Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI
1	2	3	4	5
2	Terpenuhinya kapasitas dan pembangunan Sumber Daya Manusia	Pembangunan Manusia	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)
				Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan
3	Meningkatnya Demokrasi Indonesia Provinsi.	Pembangunan Demokrasi	Meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan, kapasitas Lembaga dalam demokrasi	meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi
4	Meningkatnya Reformasi Birokrasi.	Pembangunan Pemerintahan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
				Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
5	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Pembangunan Wilayah	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Memeratakan ketersediaan infrastruktur
			Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Meningkatan ketaatan tata ruang
			Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Meningkatan tata kelola penanggulangan bencana

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN	STRATEGI
1	2	3		4	5
				Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Meningkatkan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi
				Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
		Pemerataan Masyarakat	Pendapatan	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin
				Meningkatkan Kesempatan Kerja	meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Pembangunan Lingkungan		Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan

6.1.2. Arah Kebijakan untuk mendukung Strategi

Strategi yang telah dirumuskan dan ditetapkan keberhasilannya dalam implementasi haruslah didukung oleh arah kebijakan yang tepat dan memadai, agar pencapaian sasaran melalui strategi yang telah ditetapkan, dapat terjamin realisasinya.

Oleh karena itu setiap strategi yang ada harus dikuatkan dan didukung oleh arah kebijakan yang tepat serta memadai. Dengan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, maka telah dirumuskan dan ditetapkan arah kebijakan sebanyak 44 (empat puluh empat), yaitu:

1. Peningkatan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian melalui program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Penanganan Kerawanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Perizinan Usaha Pertanian, Penyuluhan Pertanian Dan Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
2. Peningkatan sarana dan prasarana produksi, Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian melalui program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Dan Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan melalui program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
5. Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan melalui program Pengelolaan Aspek Geologi, Pengelolaan Mineral Dan Batubara, Pengelolaan Energi Terbarukan Dan Pengelolaan Ketenagalistrikan;
6. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja melalui program Hubungan Industrial Dan Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
7. Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk melalui program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Pengendalian Izin Usaha Industri Dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
8. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk melalui program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Dan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
9. Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting melalui program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
10. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata melalui program Pengembangan Kebudayaan, Pengembangan Kesenian Tradisional, Pembinaan Sejarah, Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, Pengelolaan Permuseuman Dan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;

11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata melalui program Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
12. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah melalui program Program Pengembangan Ekspor;
13. Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah melalui program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
14. Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing melalui program Pengelolaan Pendidikan, Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno, Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, Pengelolaan Arsip Dan Perizinan Penggunaan Arsip;
15. Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG) melalui program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak (Pha), Perlindungan Khusus Anak, Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Profil Kependudukan, Pengendalian Penduduk, Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Dan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks);
16. Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan melalui program Pemenuhan Upaya Kesehatan, Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
17. meningkatkan kebebasan demokrasi melalui program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
18. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat melalui program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran;
19. meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi melalui program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
20. meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi melalui program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
21. Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat

- melalui program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Aplikasi Informatika, Penyelenggaraan Statistik Sektor, Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Dan Otonomi Daerah;
22. Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa melalui program Program Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa;
 23. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan melalui program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum Dan Fasilitasi Bantuan Hukum;
 25. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur melalui program Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 26. Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran melalui program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 27. Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah melalui program Pelayanan Penghubung, Perekonomian Dan Pembangunan (Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah Dibidang Perekonomian Dan Pembangunan), Kebijakan Administrasi Pembangunan (Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah Dibidang Administrasi Pembangunan) Dan Penataan Organisasi;
 28. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel melalui program Penyelenggaraan Pengawasan, Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi;
 29. Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 30. Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja melalui program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
 31. Pemerataan ketersediaan infrastruktur melalui program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda), Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) Dan Pengelolaan Pelayanan;
 32. Peningkatan ketaatan tata ruang melalui program Penataan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Penyelenggaraan Jalan, Pengembangan Jasa Konstruksi, Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman, Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu), Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;

33. Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana melalui program Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Bencana;
34. Peningkatan Kapasitas Desa melalui program Penataan Desa, Peningkatan Kerja Sama Desa Dan Administrasi Pemerintahan Desa;
35. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi melalui program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;
36. Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Profil Kependudukan, Pengendalian Penduduk Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks);
37. Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas melalui program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dan Rehabilitasi Sosial;
38. Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan social melalui program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
39. Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui program Pemberdayaan Sosial;
40. Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja melalui program Perencanaan Tenaga Kerja, Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi, Pendidikan Dan Latihan, Perkoperasian Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk) Pengembangan Umkm;
41. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya melalui program Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Dan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
42. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui program Pengawasan Ketenagakerjaan;
43. Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh), Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh, Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Persampahan;
44. Peningkatan tata kelola kehutanan melalui program Pengelolaan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan

Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Keselarasan antara tujuan, sasaran serta strategi dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ekonomi Daerah yang diintervensi dengan sasaran Sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub sektor pertanian dan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian yang diintervensi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Peningkatan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian
 - Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub sektor pertanian
 - Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian
 - b. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub sektor Perikanan serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan yang diintervensi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya
 - Peningkatan Kualitas SDM, Standarisasi Produk dan Jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sub sektor Perikanan
 - Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
 - c. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan yang diintervensi dengan arah kebijakan Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.
 - d. Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk yang diintervensi dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja
 - Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk
 - e. Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang

Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting yang diintervensi dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk
 - Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting
- f. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata yang diintervensi dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
- g. Meningkatnya Ekspor, yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah yang diintervensi dengan arah kebijakan Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.
- h. Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah, yang diintervensi dengan strategi Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah yang diintervensi dengan arah kebijakan Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Meningkatnya Pembangunan Manusia, yang diintervensi dengan strategi sebagai berikut:
- Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG) yang diintervensi dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - i. Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing
 - ii. Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)
 - Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan yang diintervensi dengan arah kebijakan Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan
3. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi yang diintervensi dengan strategi meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi yang diintervensi dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - meningkatkan kebebasan demokrasi
 - Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
 - meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi
 - meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi
4. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang diintervensi dengan strategi Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat yang diintervensi dengan arah kebijakan Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
 - b. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang diintervensi dengan strategi Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang diintervensi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
 - Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa
 - Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
 - Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
 - Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
 - Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah
 - Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel
 - Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
5. Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - A. Indeks Williamson, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang diintervensi dengan strategi Memeratakan ketersediaan infrastruktur yang diintervensi dengan arah kebijakan Pemerataan ketersediaan infrastruktur
 - b. Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan ketaatan tata ruang yang diintervensi dengan arah kebijakan Peningkatan ketaatan tata ruang
 - c. Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana yang diintervensi dengan arah kebijakan Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana
 - d. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi yang diintervensi dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Peningkatan Kapasitas Desa
 - Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi
 - e. Terkendalinya Laju Pertumbuhan yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang yang diintervensi dengan arah kebijakan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang.
- B. Indeks Gini, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
- a. Menurunkan Tingkat Kemiskinan yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin yang diintervensi dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas
 - Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial
 - Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin
 - b. Meningkatkan Kesempatan Kerja yang diintervensi dengan strategi meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja yang diintervensi dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja
 - Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya
 - Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup yang diintervensi dengan strategi Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan yang diintervensi dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - Peningkatan tata kelola kehutanan

Keterkaitan dan konsistensi antara arah kebijakan dengan strategi, sasaran, tujuan diuraikan dalam tabel VI.2

Tabel VI.2
 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan RPD 2023-2026

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RPD
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Ekonomi Daerah	Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	Meningkatkan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta dan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian	Peningkatan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian
					Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian
			Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan	Meningkatkan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan	Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya
					Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
			Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.	Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.
			Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja
					Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RPD
1	2	3	4	6	7
			Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk
					Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya Ekspor	Meningkatkan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.	Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.
			Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
2	Terpenuhinya kapasitas Pembangunan dan kualitas SDM	Pembangunan Manusia	Sumber Daya Meningkatkan Pembangunan Manusia	Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)	Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RPD
1	2	3	4	6	7
					Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)
				Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan	Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan
3	Meningkatnya Demokrasi Indonesia Provinsi.	Pembangunan Demokrasi	Meningkatkan aspek kebebasan , kesetaraan , kapasitas lembaga dalam demokrasi	meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi	meningkatkan kebebasan demokrasi
					Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat
					meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi
					meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi
4	Meningkatnya Reformasi Birokrasi.	Pembangunan Pemerintahan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
				Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan	Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa
				perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur,	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
				manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
					Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RPD
1	2	3	4	6	7
				anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
					Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah
					Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel
					Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah
					Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
5	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Pembangunan Wilayah	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Memeratakan ketersediaan infrastruktur	Pemerataan ketersediaan infrastruktur
			Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Meningkatkan ketaatan tata ruang	Peningkatan ketaatan tata ruang
			Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana	Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana
			Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Meningkatkan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi	Peningkatan Kapasitas Desa
					Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi

NO	TUJUAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RPD			
1	2	3		4		6	7		
				Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju	Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang		
		Pemerataan Masyarakat	Pendapatan	Menurunkan Kemiskinan	Tingkat	Meningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin	Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas		
							Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial		
							Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin		
				Meningkatkan Kerja	Kesempatan	meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja		
							Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya		
							Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja		
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Pembangunan Lingkungan		Meningkatkan Lingkungan Hidup	Pengendalian	Meningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
							Peningkatan tata kelola kehutanan		

6.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah telah dirumuskan dan ditetapkan. Selain sebagai solusi penyelesaian masalah dan isu strategis, maka yang utama adalah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan dukungan strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya.

Dengan memperhatikan tujuan, sasaran, permasalahan dan isu-isu strategis, berkaitan dengan tujuan, sasaran, program kementerian/lembaga sebagai penjabaran RPJMN 2015-2019; serta dengan mencermati program-program berkaitan dengan Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat, serta hasil analisis SWOT, maka dirumuskan dan ditetapkan 7 (tujuh) Program Pembangunan Daerah.

6.2.1. Unggulan Pembangunan Daerah

Dalam Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 terdapat program unggulan, dan program unggulan ini dirumuskan dan ditetapkan menjadi unggulan pembangunan daerah, setelah dicermati, dianalisis, serta memperhatikan kaidah-kaidah teknokratik dan aturan penyusunan RPD. Unggulan pembangunan daerah tersebut ada 7 (tujuh) yaitu sebagai berikut:

1. PEMBANGUNAN EKONOMI

Fokus kegiatan pada pemulihan pasca pandemic Covid-19 dalam rangka mengembalikan sektor ekonomi dengan sasaran pada beberapa sektor antara lain sektor Pertanian, Sektor Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, sektor Pariwisata, Ekspor, dan Nilai Investasi. Hal tersebut guna meningkatkan perekonomian di Provinsi Bangka Belitung dengan cara pemulihan pada sektor yang mempengaruhi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

Fokus kegiatan memberikan dukungan berupa peningkatan akses pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan kualitas hidup untuk dapat mewujudkan SDM yang tangguh dan mempunyai daya saing.

3. PEMBANGUNAN DEMOKRASI

Fokus kegiatan menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang memiliki tingkat demokrasi yang tinggi dengan cara meningkatkan aspek kebebasan, kesetaraan dan meningkatkan kapasitas lembaga dalam demokrasi guna meningkatkan kebebasan demokrasi, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

4. PEMBANGUNAN PEMERINTAH

Fokus kegiatan menjadikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, dengan cara peningkatan akses data dan informasi, transparansi terhadap layanan dan pengadaan barang atau jasa dan peningkatan terhadap reformasi birokrasi agar menjadi pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. PEMBANGUNAN WILAYAH

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat guna memberikan pembangunan yang berkeadilan dengan cara meningkatkan ketersediaan infrastruktur, kualitas dan pemenuhan Rencana Tata Ruang, Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Bencana, pembangunan kawasan perdesaan dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar pembangunan merta dan tepat sasaran.

6. PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT

Fokus kegiatan membangun pemerataan pendapatan masyarakat agar tidak terjadinya ketimpangan dengan cara menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja yang diharapkan dapat mendukung pemerataan pendapatan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Fokus kegiatan Mengembangkan pembanguan yang mengedepankan lingkungan agar terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan.

6.2.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah.

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam menyusun RPD 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pendekatan perencanaan pembangunan Tematik, Holistik, Integratif, dan spasial (THIS). Pendekatan THIS pada dasarnya adalah pendekatan yang memberi penekanan pada keterpaduan, bukan pendekatan yang berangkat dari sektor atau tugas dan fungsi semata tetapi tugas dan fungsi mendukung keterpaduan. Karena penekanannya pada keterpaduan, perencanaan ini, berangkat dari tema pembangunan yang menjadi dasar atau starting pointnya dalam lingkup daerah, tema bisa bersumber dari isu-isu strategis dan/atau prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daera. Inilah titik pusat (core) dari perencanaan berbasis pendekatan THIS. Dalam hal ini perangkat daerah yang terlibat tersebut kita namakan integrarif. Kemudian program-program dan kegiatan yang ada pada setiap Perangkat Daerah yang terlibat untuk membangun suatu tema kecil itu dinamakan Holistik. Kemudian spasial digunakan untuk mendukung pembangunan tematik besarnya yang akan menjadi tema kecil yang dintevensi oleh banyak Perangkat Daerah yang juga dinamakan integratif dan masing-masing perangkat daerah mengintervensi dengan program dan kegiatan yang dinamakan juga holistik.

Atas dasar inilah arah kebijakan merupakan tema kecil, berasal dari turunaan tema besar yang merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, yang membagi perangkat daerah serta program dan kegiatannya dalam mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut. Dengan pendekatan tematik, holistic, integrative dan spasial (THIS) tersebut, telah dirumuskan dan ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) Program Pembangunan Daerah, yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun ke 7 Program Pembangunan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Demokrasi
4. Pembangunan Pemerintahan
5. Pembangunan Wilayah
6. Pemerataan Pendapatan Masyarakat
7. Pembangunan Lingkungan

6.2.3. Tema Prioritas Pembangunan Daerah

1. Tahun 2023, Tema Prioritas Pembangunan “Penguatan Perekonomian, SDM Dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Dengan Cerdas Dan Berwawasan Lingkungan”.
2. Tahun 2024, Tema Prioritas Pembangunan merujuk kepada tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2024.
3. Tahun 2025, Tema Prioritas Pembangunan merujuk kepada tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2025.
4. Tahun 2026, Tema Prioritas Pembangunan merujuk kepada tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2026

6.2.4. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah telah ditetapkan dan dirumuskan sejumlah 197 Program. Ke 197 program ini telah diuraikan oleh perangkat daerah ke dalam 1210 kegiatan. Program dan kegiatan ini telah dirumuskan, disusun dan ditetapkan dalam Renstra masing-masing perangkat daerah. Ke 197 program ini, bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah telah disusun indikatif besaran anggaran pelaksanaannya selama 4 (empat) tahun (2023-2026). Besaran total dana berturut-turut 2023 sebesar Rp3.558.479.605.916, Pada Tahun 2024 sebesar Rp3.489.209.929.124, Pada Tahun 2025 sebesar Rp3.482.094.413.271 dan pada tahun 2026 sebesar Rp3.801.800.262.411.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Program Perangkat Daerah dan Indikasi anggaran dapat digambarkan pada table VI.3 berikut ini:

Tabel VI.3
Program Pembangunan Daerah Yang disertai Pagu Indikatif
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasara n/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026	
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	
Tujuan : Meningkatnya ekonomi Daerah			5,05	4,28	Rp111.192.525.000	4,39	Rp117.261.397.500	4,46	Rp125.150.544.750	4,78	Rp284.179.099.850	4,78	
Indikator Tujuan : Pertumbuhan PDRB			5,05	4,28	Rp111.192.525.000	4,39	Rp117.261.397.500	4,46	Rp125.150.544.750	4,78	Rp284.179.099.850	4,78	
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian			7,78	4,03	Rp27.905.000.000	4,23	Rp29.352.750.000	4,43	Rp30.820.387.500	4,60	Rp175.614.406.875	4,60	
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian			7,78	4,03	Rp27.905.000.000	4,23	Rp29.352.750.000	4,43	Rp30.820.387.500	4,60	Rp175.614.406.875	4,60	
Strategi : Meningkatkan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian					Rp27.905.000.000		Rp29.352.750.000		Rp30.820.387.500		Rp175.614.406.875		
Arah Kebijakan : Peningkatan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian					Rp4.555.000.000		Rp4.835.250.000		Rp5.077.012.500		Rp148.583.863.125		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)	Bidang Pangan	0 persen	2,85 persen	Rp200.000.000	2,85 persen	Rp262.500.000	2,92 persen	Rp275.625.000	2,95 persen	Rp289.406.250	2,95 persen
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Bidang Pangan	0	83,1	Rp800.000.000	84,1	Rp840.000.000	85,1	Rp882.000.000	86,1	Rp926.100.000	86,1
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Bidang Pangan	0 Dokumen	1 Dokumen	Rp250.000.000	1 Dokumen	Rp262.500.000	1 Dokumen	Rp275.625.000	1 Dokumen	Rp289.406.250	1 Dokumen
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Bidang Pangan	0 persen	86 persen	Rp230.000.000	86 persen	Rp241.500.000	86 persen	Rp253.575.000	86 persen	Rp266.253.750	86 persen
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Bidang Pertanian	0 Dok	2 Dok	Rp250.000.000	2 Dok	Rp262.500.000	2 Dok	Rp275.625.000	2 Dok	Rp289.406.250	2 Dok
	0	Terkendalnya Bencana Pertanian akibat serangan OPT (%)	Bidang Pertanian	0 persen	3 persen	Rp275.000.000	3 persen	Rp288.750.000	3 persen	Rp303.187.500	3 persen	Rp318.346.875	3 persen
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dokumen Perizinan Usaha Pertanian	Bidang Pertanian	0 Dok	1 Dok	Rp50.000.000	1 Dok	Rp52.500.000	1 Dok	Rp55.125.000	1 Dok	Rp57.881.250	1 Dok
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian	Bidang Pertanian	0 persen	100 persen	Rp1.250.000.000	100 persen	Rp1.312.500.000	100 persen	Rp1.378.125.000	100 persen	Rp1.447.031.250	100 persen

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	Bidang Pertanian	0 persen	2 persen	Rp1.250.000.000	2 persen	Rp1.312.500.000	2 persen	Rp1.378.125.000	2 persen	Rp144.700.031.250	2 persen
Arah Kebijakan : Peningkatan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian						Rp23.350.000.000		Rp24.517.500.000		Rp25.743.375.000		Rp27.030.543.750	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas tanam perkebunan	Bidang Pertanian	0 persen	1,5 persen	Rp4.000.000.000	1,5 Persen	Rp4.200.000.000	1,5 persen	Rp4.410.000.000	1,5 persen	Rp4.630.500.000	6 persen
		0 Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura (%)	Bidang Pertanian	0 persen	2,5 persen	Rp3.250.000.000	2,5 persen	Rp3.412.500.000	2,5 persen	Rp3.583.125.000	2,5 persen	Rp3.762.281.250	10 persen
		0 persentase peningkatan produksi benih bermutu	Bidang Pertanian	0 persen	2,5 persen	Rp700.000.000	2,5 persen	Rp735.000.000	2,5 persen	Rp771.750.000	2,5 persen	Rp810.337.500	10 persen
		0 Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi	Bidang Pertanian	0 persen	100 persen	Rp250.000.000	100 persen	Rp262.500.000	100 persen	Rp275.625.000	100 persen	Rp289.406.250	100 persen
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian	Bidang Pertanian	0 persen	3,5 persen	Rp6.450.000.000	3,5 persen	Rp6.772.500.000	3,5 persen	Rp7.111.125.000	3,5 persen	Rp7.466.681.250	14 persen
		0 Rasio ketersediaan prasarana pertanian UPTD	Bidang Pertanian	0 persen	2 persen	Rp200.000.000	2 persen	Rp210.000.000	2 persen	Rp220.500.000	2 persen	Rp231.525.000	8 persen
		0 Rasio Ketersediaan prasarana pengolahan pertanian	Bidang Pertanian	0 persen	2 persen	Rp6.000.000.000	2 persen	Rp6.300.000.000	2 persen	Rp6.615.000.000	2 persen	Rp6.945.750.000	8 persen
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pertambahan Angka Populasi Ternak	Bidang Pertanian	0 persen	5 persen	Rp2.500.000.000	5 persen	Rp2.625.000.000	5 persen	Rp2.756.250.000	5 persen	Rp2.894.062.500	5 persen
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perikanan				-9,76	3,85	Rp26.449.800.000	4,05	Rp28.574.050.000	4,25	Rp31.416.800.000	4,45	Rp32.550.500.000	4,45
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan				-9,76	3,85	Rp26.449.800.000	4,05	Rp28.574.050.000	4,25	Rp31.416.800.000	4,45	Rp32.550.500.000	4,45
Strategi : Meningkatkan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan						Rp26.449.800.000		Rp28.574.050.000		Rp31.416.800.000		Rp32.550.500.000	
Arah Kebijakan : Peningkatan sarana prasarana, produktifitas dan kualitas pengelolaan hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya						Rp5.904.800.000		Rp7.414.800.000		Rp8.209.800.000		Rp8.999.800.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pelayanan Pelabuhan Perikanan	Bidang Kelautan dan Perikanan	0 Persen	0 Persen	Rp0	60 Persen	Rp1.200.000.000	70 persen	Rp1.300.000.000	80 persen	Rp1.400.000.000	80 persen

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		yang di Fasilitas di PPP Muara Sungai Baturusa (%)											
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0,7	Rp1.475.000.000	0,73	Rp1.800.000.000	0,76	Rp2.125.000.000	0,8	Rp2.450.000.000	0,8
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Bidang Kelautan dan Perikanan	0 Juta Ekor	10,5 Juta Ekor	Rp2.879.800.000	11 Juta Ekor	Rp3.074.800.000	11,5 Juta Ekor	Rp3.254.800.000	12 Juta Ekor	Rp3.429.800.000	12 Juta Ekor
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0,7	Rp150.000.000	0,73	Rp200.000.000	0,76	Rp250.000.000	0,8	Rp300.000.000	0,8
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Bidang Kelautan dan Perikanan	0 ton	22410 ton	Rp1.300.000.000	22810 ton	Rp940.000.000	23310 ton	Rp980.000.000	23910 ton	Rp1.020.000.000	23910 ton
	0	Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase)	Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0,85	Rp100.000.000	0,87	Rp200.000.000	0,88	Rp300.000.000	0,9	Rp400.000.000	0,9
Arah Kebijakan : Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan						Rp20.545.000.000		Rp21.159.250.000		Rp23.207.000.000		Rp23.550.700.000	
	0	Volume produksi perikanan tangkap	Bidang Kelautan dan Perikanan	0 Ton	235650 ton	Rp15.245.000.000	238713 ton	Rp15.814.250.000	241936 ton	Rp16.082.000.000	245323 ton	Rp17.020.700.000	245323 ton
	0	Volume produksi perikanan budidaya	Bidang Kelautan dan Perikanan	0 Ton	15000 ton	Rp2.450.000.000	15525 ton	Rp2.220.000.000	16146 ton	Rp3.550.000.000	16873 ton	Rp2.360.000.000	16873 ton
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	Bidang Kelautan dan Perikanan	0 %	70 %	Rp250.000.000	73 %	Rp325.000.000	76 %	Rp375.000.000	80 %	Rp420.000.000	80 %
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Bangka Belitung	Bidang Kelautan dan Perikanan	0 lokasi	24 lokasi	Rp2.600.000.000	25 lokasi	Rp2.800.000.000	26 lokasi	Rp3.200.000.000	27 lokasi	Rp3.750.000.000	102 lokasi
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian				-9,23	2,95	Rp4.985.000.000	4,52	Rp6.055.000.000	1,75	Rp6.350.000.000	0,46	Rp6.575.000.000	0,46
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian				-9,23	2,95	Rp4.985.000.000	4,52	Rp6.055.000.000	1,75	Rp6.350.000.000	0,46	Rp6.575.000.000	0,46
Strategi : Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.						Rp4.985.000.000		Rp6.055.000.000		Rp6.350.000.000		Rp6.575.000.000	
Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.						Rp4.985.000.000		Rp6.055.000.000		Rp6.350.000.000		Rp6.575.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah (Cabdin ESDM Wilayah Bangka)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0 %	80 %	Rp30.000.000	85 %	Rp30.000.000	85 %	Rp30.000.000	90 %	Rp30.000.000	90 %
	0	Persentase Kepatuhan penataan	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0%	80%	Rp1.435.000.000	85%	Rp1.435.000.000	85%	Rp1.485.000.000	90%	Rp1.485.000.000	90%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		izin air tanah (DESDM)											
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0 %	85 %	Rp30.000.000	85 %	Rp30.000.000	85 %	Rp30.000.000	85 %	Rp30.000.000	85 %
		Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0%	85%	Rp70.000.000	85%	Rp80.000.000	85%	Rp90.000.000	85%	Rp90.000.000	85%
		Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0%	85%	Rp35.000.000	85%	Rp40.000.000	85%	Rp45.000.000	85%	Rp45.000.000	85%
		Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0%	85%	Rp60.000.000	85%	Rp60.000.000	85%	Rp60.000.000	85%	Rp60.000.000	85%
		Persentase pertambangan yang "good mining practices" (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0%	85%	Rp105.000.000	85%	Rp105.000.000	85%	Rp105.000.000	85%	Rp105.000.000	85%
		Persentase pertambangan yang "good mining practices" (DESDM)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0%	85%	Rp1.555.000.000	85%	Rp1.790.000.000	85%	Rp2.015.000.000	85%	Rp2.240.000.000	85%
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Bauran Energi Terbarukan (DESDM)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0 %	12,32 %	Rp560.000.000	12,98 %	Rp510.000.000	17,21 %	Rp510.000.000	17,98 %	Rp510.000.000	17,98 %
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0 %	99.99 %	Rp60.000.000	99.99 %	Rp925.000.000	99.99 %	Rp925.000.000	99.99 %	Rp925.000.000	99.99 %
		Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0%	99.99 %	Rp35.000.000	99.99 %	Rp40.000.000	99.99 %	Rp45.000.000	99.99 %	Rp45.000.000	99.99 %
		Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0%	99.99 %	Rp25.000.000	99.99 %	Rp25.000.000	99.99 %	Rp25.000.000	99.99 %	Rp25.000.000	99.99 %
		Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM Wilayah Belitung)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0%	99.99 %	Rp25.000.000	99.99 %	Rp25.000.000	99.99 %	Rp25.000.000	99.99 %	Rp25.000.000	99.99 %
		Rasio Elektrifikasi (Cabdin ESDM)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0%	99.99 %	Rp35.000.000	99.99 %	Rp35.000.000	99.99 %	Rp35.000.000	99.99 %	Rp35.000.000	99.99 %

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		Wilayah Belitung Timur											
	0	Rasio Elektrifikasi (DESDM)	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0%	99.99 %	Rp925.000.000	99.99 %	Rp925.000.000	99.99 %	Rp925.000.000	99.99 %	Rp925.000.000	99.99 %
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan				-5,64	1,86	Rp16.000.000.000	3,25	Rp14.050.000.000	4,50	Rp14.455.000.000	4,55	Rp17.210.000.000	4,55
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan				-5,64	1,86	Rp16.000.000.000	3,25	Rp14.050.000.000	4,50	Rp14.455.000.000	4,55	Rp17.210.000.000	4,55
Strategi : Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja dan tata kelola industri dan nilai tambah produk					Rp16.000.000.000		Rp14.050.000.000		Rp14.455.000.000		Rp17.210.000.000		
Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja					Rp5.750.000.000		Rp5.800.000.000		Rp5.850.000.000		Rp5.900.000.000		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial	Bidang Tenaga Kerja	0 %	2,80 %	Rp750.000.000	2,90 %	Rp800.000.000	3,00 %	Rp850.000.000	3,20 %	Rp900.000.000	3,20 %
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten	Bidang Tenaga Kerja	0 %	5 %	Rp5.000.000.000	5,25 %	Rp5.000.000.000	5,50 %	Rp5.000.000.000	5,75 %	Rp5.000.000.000	5,75 %
Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk					Rp10.250.000.000		Rp8.250.000.000		Rp8.605.000.000		Rp11.310.000.000		
	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Fasilitas Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM yang Diproduksi (UPTD RPK)	Bidang Perindustrian	0 %	60 %	Rp3.500.000.000	60 %	Rp1.250.000.000	70 %	Rp1.500.000.000	70 %	Rp4.000.000.000	70 %
0		Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri	Bidang Perindustrian	0%	2,50%	Rp5.025.000.000	2,50%	Rp5.025.000.000	2,75%	Rp5.025.000.000	2,75%	Rp5.025.000.000	2,75%
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Kawasan Usaha Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	Bidang Perindustrian	0 %	60 %	Rp200.000.000	65 %	Rp230.000.000	70 %	Rp250.000.000	75 %	Rp270.000.000	75 %
0		Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	Bidang Perindustrian	0%	50%	Rp1.055.000.000	55%	Rp1.200.000.000	60%	Rp1.230.000.000	65%	Rp1.350.000.000	65%
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas	Bidang Perindustrian	0 %	80 %	Rp470.000.000	85 %	Rp545.000.000	90 %	Rp600.000.000	95 %	Rp665.000.000	95 %
Sasaran : Meningkatnya PDRB Sub Sektor Perdagangan				-4,62	6,50	Rp5.645.000.000	4,94	Rp5.988.700.000	5,50	Rp6.848.370.000	5,55	Rp7.896.307.000	5,55

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan				-4,62	6,50	Rp5.645.000.000	4,94	Rp5.988.700.000	5,50	Rp6.848.370.000	5,55	Rp7.896.307.000	5,55
Strategi : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting						Rp5.645.000.000		Rp5.988.700.000		Rp6.848.370.000		Rp7.896.307.000	
Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk						Rp4.603.000.000		Rp4.842.500.000		Rp5.587.550.000		Rp6.509.405.000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Tertib Usaha	Bidang Perdagangan	0 %	100 %	Rp418.000.000	100 %	Rp459.800.000	100 %	Rp505.780.000	100 %	Rp556.358.000	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Barang terdistribusi	Bidang Perdagangan	0 %	82 %	Rp675.000.000	84 %	Rp600.000.000	86 %	Rp735.000.000	88 %	Rp840.000.000	88 %
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen	Bidang Perdagangan	0 %	42 %	Rp1.087.000.000	43 %	Rp1.195.700.000	43 %	Rp1.315.270.000	44 %	Rp1.446.797.000	44 %
	0	Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB)	Bidang Perdagangan	0%	100%	Rp885.000.000	100%	Rp857.000.000	100%	Rp1.007.500.000	100%	Rp1.098.250.000	100%
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitas Produk UMKM yang dipasarkan (UPTD RPK)	Bidang Perdagangan	0 %	40 %	Rp438.000.000	40 %	Rp380.000.000	50 %	Rp424.000.000	50 %	Rp718.000.000	50 %
	0	Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar	Bidang Perdagangan	0%	60%	Rp1.100.000.000	65%	Rp1.350.000.000	70%	Rp1.600.000.000	75%	Rp1.850.000.000	75%
Arah Kebijakan : Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan atau Barang Penting						Rp1.042.000.000		Rp1.146.200.000		Rp1.260.820.000		Rp1.386.902.000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Bidang Perdagangan	0 %	8,50 %	Rp1.042.000.000	8,30 %	Rp1.146.200.000	8,20 %	Rp1.260.820.000	8,00 %	Rp1.386.902.000	8,00 %
Sasaran : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan asing dan domestik				43,00	2,70	Rp23.857.725.000	2,63	Rp26.365.897.500	2,56	Rp27.407.487.250	2,50	Rp35.263.635.975	2,50
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik				43,00	2,70	Rp23.857.725.000	2,63	Rp26.365.897.500	2,56	Rp27.407.487.250	2,50	Rp35.263.635.975	2,50
Strategi : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata dan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata						Rp23.857.725.000		Rp26.365.897.500		Rp27.407.487.250		Rp35.263.635.975	
Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Eonomi Kreatif, Kebudayaan, Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Industri Pariwisata						Rp11.316.000.000		Rp9.510.000.000		Rp7.646.000.000		Rp14.101.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	Bidang Kebudayaan	0 persen	21,69 persen	Rp2.300.000.000	49,33 persen	Rp4.875.000.000	21,62 persen	Rp3.110.000.000	49,33 persen	Rp8.835.000.000	49,33 persen

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026	
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Bidang Kebudayaan	0 persen	100 persen	Rp706.000.000	100 persen	Rp850.000.000	100 persen	Rp851.000.000	100 persen	Rp706.000.000	100 persen	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal yang Dibina	Bidang Kebudayaan	0 persen	57 persen	Rp330.000.000	71 persen	Rp430.000.000	86 persen	Rp330.000.000	100 persen	Rp680.000.000	100 persen	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Bidang Kebudayaan	0 persen	41 persen	Rp650.000.000	62 persen	Rp600.000.000	84 persen	Rp650.000.000	100 persen	Rp600.000.000	100 persen	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang dikelola	Bidang Kebudayaan	0 persen	100 persen	Rp1.500.000.000	100 persen	Rp1.375.000.000	100 persen	Rp775.000.000	100 persen	Rp1.800.000.000	100 persen	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditingkatkan Kualitasnya di Pulau Belitung, Geopark Belitung dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	Bidang Pariwisata	0 %	25 %	Rp5.830.000.000	25 %	Rp1.380.000.000	25 %	Rp1.930.000.000	25 %	Rp1.480.000.000	100 %	
Arah Kebijakan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Promosi, Destinasi dan Pemasaran Pariwisata						Rp12.541.725.000		Rp16.855.897.500		Rp19.761.487.250		Rp21.162.635.975		
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Bidang Pariwisata	0 kunjungan 26	1600 kunjungan	Rp4.141.725.000	5144 kunjungan	Rp4.555.897.500	8070 kunjungan	Rp5.011.487.250	8780 kunjungan	Rp5.512.635.975	8780 kunjungan	
	0	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Pulau Belitung	Bidang Pariwisata	0 Kunjungan 18	8261 Kunjungan	Rp1.550.000.000	2027 Kunjungan	Rp2.400.000.000	5867 Kunjungan	Rp3.000.000.000	9785 Kunjungan	Rp3.600.000.000	9785 Kunjungan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Bidang Pariwisata	0 %	23,53 %	Rp2.550.000.000	30,77 %	Rp4.400.000.000	44,44 %	Rp5.950.000.000	80 %	Rp6.450.000.000	80 %	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekraf yang Memiliki Kompetensi	Bidang Pariwisata	0 %	9,5 %	Rp4.300.000.000	10 %	Rp5.500.000.000	9,6 %	Rp5.800.000.000	9,7 %	Rp5.600.000.000	9,7 %	
Sasaran : Meningkatnya Ekspor					106,95	8,13	Rp2.050.000.000	7,51	Rp1.925.000.000	6,99	Rp2.117.500.000	6,53	Rp2.329.250.000	6,53
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Ekspor					106,95	8,13	Rp2.050.000.000	7,51	Rp1.925.000.000	6,99	Rp2.117.500.000	6,53	Rp2.329.250.000	6,53
Strategi : Meningkatkan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.						Rp2.050.000.000		Rp1.925.000.000		Rp2.117.500.000		Rp2.329.250.000		
Arah Kebijakan : Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk unggulan daerah.						Rp2.050.000.000		Rp1.925.000.000		Rp2.117.500.000		Rp2.329.250.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor	Bidang Perdagangan	0 %	4 %	Rp2.050.000.000	4,5 %	Rp1.925.000.000	5 %	Rp2.117.500.000	6 %	Rp2.329.250.000	6 %	
Sasaran : Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah					-39,68	25,00	Rp4.300.000.000	30,00	Rp4.950.000.000	30,77	Rp5.735.000.000	34,12	Rp6.740.000.000	34,12
Indikator Sasaran : Pertumbuhan Investasi					-39,68	25,00	Rp4.300.000.000	30,00	Rp4.950.000.000	30,77	Rp5.735.000.000	34,12	Rp6.740.000.000	34,12

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
Strategi : Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;						Rp4.300.000.000		Rp4.950.000.000		Rp5.735.000.000		Rp6.740.000.000	
Arah Kebijakan : Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;						Rp4.300.000.000		Rp4.950.000.000		Rp5.735.000.000		Rp6.740.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Banyaknya investor yang menanamkan modal	Bidang Penanaman Modal	0 Investor	23 Investor	Rp1.300.000.000	25 Investor	Rp1.300.000.000	27 Investor	Rp1.900.000.000	30 Investor	Rp2.200.000.000	105 Investor
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peluang penanaman modal yang dipromosikan	Bidang Penanaman Modal	0 Peluang	2 Peluang	Rp850.000.000	2 Peluang	Rp950.000.000	2 Peluang	Rp675.000.000	2 Peluang	Rp925.000.000	8 Peluang
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelaku Usaha yang terlayani	Bidang Penanaman Modal	0 Pelaku Usaha	950 Pelaku Usaha	Rp1.300.000.000	1000 Pelaku Usaha	Rp1.600.000.000	1050 Pelaku Usaha	Rp1.950.000.000	1125 Pelaku Usaha	Rp2.300.000.000	4125 Pelaku Usaha
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Patuh Terhadap Perundang-Undangan	Bidang Penanaman Modal	0 %	1 %	Rp800.000.000	1,1 %	Rp900.000.000	1,2 %	Rp1.010.000.000	1,3 %	Rp1.115.000.000	1,3 %
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang dikelola	Bidang Penanaman Modal	0 Dokumen	1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp200.000.000	1 Dokumen	Rp200.000.000	1 Dokumen	Rp200.000.000	1 Dokumen
Tujuan : Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM				71,69	71,91	Rp747.770.619.555	72,13	Rp561.383.252.650	72,35	Rp534.655.997.490	72,57	Rp523.297.103.200	72,57
Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				71,69	71,91	Rp747.770.619.555	72,13	Rp561.383.252.650	72,35	Rp534.655.997.490	72,57	Rp523.297.103.200	72,57
Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Manusia				71,69	71,91	Rp747.770.619.555	72,13	Rp561.383.252.650	72,35	Rp534.655.997.490	72,57	Rp523.297.103.200	72,57
Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				71,69	71,91	Rp747.770.619.555	72,13	Rp561.383.252.650	72,35	Rp534.655.997.490	72,57	Rp523.297.103.200	72,57
Strategi : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing serta kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)						Rp521.648.598.253		Rp377.911.450.000		Rp348.861.615.000		Rp333.408.130.500	
Arah Kebijakan : Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing						Rp519.805.328.753		Rp375.896.600.000		Rp346.640.840.000		Rp330.989.234.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Khusus	0 Persen	77,25 Persen	77,25 Persen	Rp12.050.000.000	77,75 persen	Rp12.050.000.000	78,25 persen	Rp12.050.000.000	79 persen	Rp12.050.000.000	79 persen
	0	APK Pendidikan Khusus di CABDIN I	0 Persen	73,5 Persen	73,5 Persen	Rp8.700.000.000	74 persen	Rp2.700.000.000	74,5 persen	Rp2.800.000.000	75 persen	Rp2.800.000.000	75 persen
	0	APK Pendidikan Khusus di CABDIN II	0 Persen	85,5 Persen	85,5 Persen	Rp8.829.400.000	86 persen	Rp2.829.400.000	86,5 persen	Rp2.829.400.000	90 persen	Rp2.829.400.000	90 persen
	0	APK Pendidikan Khusus di CABDIN III	0 Persen	89,5 Persen	89,5 Persen	Rp1.578.600.000	90 persen	Rp1.778.600.000	90,5 persen	Rp1.428.600.000	91 persen	Rp1.278.600.000	91 persen
	0	APK Pendidikan Khusus di CABDIN IV	0 Persen	52 Persen	52 Persen	Rp1.403.200.000	52,5 persen	Rp1.403.200.000	53 persen	Rp603.200.000	53,5 persen	Rp603.200.000	53,5 persen
	0	APK Pendidikan Khusus di CABDIN V	0 Persen	85,5 persen	85,5 persen	Rp1.900.000.000	86 persen	Rp700.000.000	86,5 persen	Rp200.000.000	90 persen	Rp200.000.000	90 persen
	0	APK SMA	0 Persen	41,25 persen	41,25 persen	Rp27.800.000.000	42 persen	Rp27.800.000.000	42,75 persen	Rp27.800.000.000	43,5 persen	Rp20.300.000.000	43,5 persen

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/ Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	0	APK SMA CABDIN I	0 Persen	41,49 persen	41,49 persen	Rp134.900.000.000	42,24 persen	Rp34.500.000.000	42,99 persen	Rp30.950.000.000	43,74 persen	Rp27.650.000.000	43,74 persen
	0	APK SMA CABDIN II	0 Persen	38,79 persen	38,79 persen	Rp19.638.300.000	39,54 persen	Rp16.737.300.000	40,29 persen	Rp15.914.300.000	41,04 persen	Rp16.214.300.000	41,04 persen
	0	APK SMA CABDIN III	0 Persen	48,31 persen	48,31 persen	Rp19.909.900.000	49,06 persen	Rp14.409.900.000	49,81 persen	Rp12.959.900.000	50,56 persen	Rp12.809.900.000	50,56 persen
	0	APK SMA CABDIN IV	0 Persen	36,96 persen	36,96 persen	Rp14.194.000.000	37,71 persen	Rp10.109.000.000	38,46 persen	Rp7.899.000.000	39,21 persen	Rp6.751.000.000	39,21 persen
	0	APK SMA CABDIN V	0 Persen	40,7 persen	40,7 persen	Rp8.820.000.000	41,45 persen	Rp12.030.000.000	42,2 persen	Rp9.950.000.000	42,95 persen	Rp13.440.000.000	42,95 persen
	0	APK SMK	0 Persen	36,27 persen	36,27 persen	Rp12.900.000.000	37,02 persen	Rp12.900.000.000	37,77 persen	Rp12.900.000.000	38,52 persen	Rp12.900.000.000	38,52 persen
	0	APK SMK CABDIN I	0 Persen	46,38 persen	46,38 persen	Rp14.500.000.000	47,13 persen	Rp15.450.000.000	47,88 persen	Rp14.350.000.000	48,63 persen	Rp15.650.000.000	48,63 persen
	0	APK SMK CABDIN II	0 Persen	33,47 persen	33,47 persen	Rp8.746.100.000	34,22 persen	Rp8.746.100.000	34,97 persen	Rp8.746.100.000	35,72 persen	Rp8.746.100.000	35,72 persen
	0	APK SMK CABDIN III	0 Persen	24,32 persen	24,32 persen	Rp5.751.000.000	25,07 persen	Rp6.351.000.000	25,82 persen	Rp5.751.000.000	26,57 persen	Rp5.751.000.000	26,57 persen
	0	APK SMK CABDIN IV	0 Persen	26,44 persen	26,44 persen	Rp5.965.500.000	27,19 persen	Rp7.290.500.000	27,94 persen	Rp7.490.500.000	28,69 persen	Rp6.990.500.000	28,69 persen
	0	APK SMK CABDIN V	0 Persen	39,49 persen	39,49 persen	Rp15.480.000.000	40,24 persen	Rp19.440.000.000	40,99 persen	Rp16.350.000.000	41,74 persen	Rp17.190.000.000	41,74 persen
	0	Proporsi Guru dan Siswa yang menguasai TIK (UPT BALAI TEKOMDIK)	0 Persen	65 Persen	65 Persen	Rp4.690.000.000	70 Persen	Rp4.780.000.000	75 Persen	Rp4.870.000.000	80 Perse	Rp4.960.000.000	72.5 Persen
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase guru yang berprestasi di tingkat nasional	Pendidikan	0 persen	50 persen	Rp1.000.000.000	60 persen	Rp1.000.000.000	70 persen	Rp1.000.000.000	80 persen	Rp1.000.000.000	80 persen
	0	persentase guru yang bersertifikat pendidik	Pendidikan	0	61,9 persen	Rp4.456.000.000	65 persen	Rp5.000.000.000	70 persen	Rp5.000.000.000	75 persen	Rp5.000.000.000	75 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di cabdin V	Pendidikan	0 persen	100 persen	Rp2.425.000.000	100 persen	Rp2.300.000.000	100 persen	Rp1.800.000.000	100 persen	Rp1.200.000.000	100 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah III	Pendidikan	0 persen	100 persen	Rp650.000.000	100 persen	Rp900.000.000	100 persen	Rp375.000.000	100 persen	Rp500.000.000	100 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV	Pendidikan	0 persen	100 persen	Rp2.300.000.000	100 persen	Rp1.000.000.000	100 persen	Rp900.000.000	100 persen	Rp900.000.000	100 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A	Pendidikan	0 persen	90 persen	Rp12.378.000.000	100 persen	Rp12.415.800.000	100 persen	Rp12.472.500.000	100 persen	Rp12.567.000.000	100 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan khusus terakreditasi A di Cabdin Wilayah I	Pendidikan	0 persen	100 persen	Rp150.000.000	100 persen	Rp150.000.000	100 persen	Rp150.000.000	100 persen	Rp150.000.000	100 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan khusus pendidikan khusus	Pendidikan	0 persen	100 persen	Rp150.000.000	100 persen	Rp150.000.000	100 persen	Rp150.000.000	100 persen	Rp150.000.000	100 persen

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		terakreditasi A di Cabdin Wilayah II											
	0	Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A	Pendidikan	0 persen	43,48 persen	Rp22.638.200.000	51,29 persen	Rp23.500.800.000	59,08 persen	Rp24.363.400.000	66,89 persen	Rp25.226.000.000	66,89 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin I	Pendidikan	0 persen	55 persen	Rp20.250.000.000	60 persen	Rp9.400.000.000	65 persen	Rp5.200.000.000	70 persen	Rp4.300.000.000	70 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah II	Pendidikan	0 persen	41,6 persen	Rp18.590.000.000	50 persen	Rp11.110.000.000	58,3 persen	Rp5.710.000.000	66,6 persen	Rp5.000.000.000	66,6 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah III	Pendidikan	0 persen	75 persen	Rp10.350.000.000	83,3 persen	Rp7.925.000.000	91,6 persen	Rp6.475.000.000	100 persen	Rp4.900.000.000	100 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV	Pendidikan	0 persen	33,3 persen	Rp16.300.000.000	44,4 persen	Rp9.800.000.000	55,5 persen	Rp13.070.000.000	66,6 persen	Rp10.760.000.000	66,6 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A di Cabdin Wilayah V	Pendidikan	0 persen	12,5 persen	Rp10.350.000.000	18,75 persen	Rp10.350.000.000	25 persen	Rp10.350.000.000	31,25 persen	Rp10.350.000.000	31,25 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A	Pendidikan	0 persen	64,78 persen	Rp15.775.200.000	73,6 persen	Rp16.359.600.000	82,36 persen	Rp16.944.000.000	89,16 persen	Rp17.528.400.000	89,16 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin I	Pendidikan	0 persen	73,3 persen	Rp4.260.000.000	80 persen	Rp3.100.000.000	86,6 persen	Rp3.250.000.000	93,3 persen	Rp2.950.000.000	93,3 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah II	Pendidikan	0 persen	70,6 persen	Rp13.150.000.000	76,5 persen	Rp13.150.000.000	82,4 persen	Rp13.150.000.000	88,2 persen	Rp13.150.000.000	88,2 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah III	Pendidikan	0 persen	28,6 persen	Rp2.650.000.000	42,9 persen	Rp2.650.000.000	57,1 persen	Rp2.850.000.000	71,4 persen	Rp2.850.000.000	71,4 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah IV	Pendidikan	0 persen	80 persen	Rp3.925.000.000	90 persen	Rp4.600.000.000	100 persen	Rp1.550.000.000	100 persen	Rp1.500.000.000	100 persen
	0	Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A di Cabdin Wilayah V	Pendidikan	0 persen	71,4 persen	Rp15.225.000.000	78,6 persen	Rp12.920.000.000	85,7 persen	Rp8.965.000.000	92,9 persen	Rp3.810.000.000	0 persen
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang mengintegrasikan kurikulum muatan lokal dengan kurikulum Nasional	Pendidikan	0 Persen	10 Persen	Rp525.000.000	15 Persen	Rp525.000.000	25 Persen	Rp525.000.000	35 Persen	Rp525.000.000	35 Persen

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara n/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi	Pendidikan	0 Person	82 Person	Rp162.928.753	84 Person	Rp200.000.000	86 Person	Rp200.000.000	88 Person	Rp200.000.000	88 Person
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK	Pendidikan	0 persen	70 persen	Rp500.000.000	73 persen	Rp500.000.000	76 persen	Rp500.000.000	80 persen	Rp500.000.000	80 persen
0		Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah I	Pendidikan	0 persen	55 persen	Rp500.000.000	60 persen	Rp550.000.000	65 persen	Rp600.000.000	70 persen	Rp650.000.000	70 persen
0		Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II	Pendidikan	0 persen	55 persen	Rp450.000.000	60 persen	Rp500.000.000	65 persen	Rp550.000.000	70 persen	Rp600.000.000	70 persen
0		Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III	Pendidikan	0 persen	55 persen	Rp400.000.000	60 persen	Rp450.000.000	65 persen	Rp500.000.000	70 persen	Rp550.000.000	70 persen
0		Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV	Pendidikan	0 persen	55 persen	Rp350.000.000	60 persen	Rp400.000.000	65 persen	Rp450.000.000	70 persen	Rp500.000.000	70 persen
0		Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V	Pendidikan	0 persen	55 persen	Rp400.000.000	60 persen	Rp450.000.000	65 persen	Rp500.000.000	70 persen	Rp550.000.000	70 persen
0		Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK	Pendidikan	0 persen	70 persen	Rp2.925.000.000	73 persen	Rp2.925.000.000	76 persen	Rp2.925.000.000	80 persen	Rp2.925.000.000	80 persen
0		Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah I	Pendidikan	0 persen	55 persen	Rp400.000.000	60 persen	Rp450.000.000	65 persen	Rp500.000.000	70 persen	Rp550.000.000	70 persen
0		Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah II	Pendidikan	0 persen	55 persen	Rp350.000.000	60 persen	Rp400.000.000	65 persen	Rp450.000.000	70 persen	Rp500.000.000	70 persen
0		Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah III	Pendidikan	0 persen	55 persen	Rp300.000.000	60 persen	Rp350.000.000	65 persen	Rp400.000.000	70 persen	Rp450.000.000	70 persen
0		Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah IV	Pendidikan	0 persen	55 persen	Rp300.000.000	60 persen	Rp350.000.000	65 persen	Rp400.000.000	70 persen	Rp450.000.000	70 persen
0		Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK di Cabdin Wilayah V	Pendidikan	0 persen	55 persen	Rp450.000.000	60 persen	Rp500.000.000	65 persen	Rp550.000.000	70 persen	Rp600.000.000	70 persen
0		Persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikast kompetensi	Pendidikan	0 persen	65 persen	Rp2.000.000.000	68 persen	Rp2.000.000.000	71 persen	Rp2.000.000.000	75 persen	Rp2.000.000.000	75 persen

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator/Sasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	0	Persentase lulusan SMK yang terserap di DUDIKA	Pendidikan	0 persen	59 persen	Rp500.000.000	59 persen	Rp500.000.000	59 persen	Rp500.000.000	59 persen	Rp500.000.000	59 persen
	0	Persentase siswa PK yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS	Pendidikan	0 persen	4 persen	Rp75.000.000	6 persen	Rp75.000.000	8 persen	Rp75.000.000	10 persen	Rp75.000.000	10 persen
	0	Persentase siswa SMA yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS	Pendidikan	0 persen	50 persen	Rp200.000.000	55 persen	Rp200.000.000	60 persen	Rp200.000.000	65 persen	Rp200.000.000	65 persen
	0	Persentase siswa SMK yang melanjutkan pendidikan di PTN dan PTS	Pendidikan	0 persen	10 persen	Rp150.000.000	12 persen	Rp150.000.000	15 persen	Rp150.000.000	18 persen	Rp150.000.000	18 persen
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentasi Perpustakaan Yang di Bina	Bidang Perpustakaan	0 %	35 %	Rp1.664.000.000	37 %	Rp1.912.900.000	38 %	Rp2.104.190.000	41 %	Rp2.314.609.000	44 %
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Bidang Perpustakaan	0 Dokumen	5 Dokumen	Rp1.225.000.000	5 Dokumen	Rp1.347.500.000	5 Dokumen	Rp1.482.250.000	5 Dokumen	Rp1.630.475.000	5 Dokumen
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Berkas Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Sesuai Dengan Ketentuan	Bidang Kearsipan	0 %	25 %	Rp680.000.000	25 %	Rp748.000.000	25 %	Rp822.800.000	25 %	Rp905.080.000	25 %
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standart Baku Kearsipan	Bidang Kearsipan	0 %	20 %	Rp525.000.000	20 %	Rp577.500.000	20 %	Rp635.250.000	20 %	Rp698.775.000	20 %
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	Bidang Kearsipan	0 %	12,50 %	Rp45.000.000	12,50 %	Rp49.500.000	12,50 %	Rp54.450.000	12,50 %	Rp59.895.000	13 %
Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)						Rp1.843.269.500		Rp2.014.850.000		Rp2.220.775.000		Rp2.418.896.500	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 persen	2.5 persen	Rp450.000.000	2.6 persen	Rp495.000.000	2.7 persen	Rp544.500.000	2.8 persen	Rp598.950.000	2.8 persen
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kebijakan perlindungan perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 persen	100 persen	Rp200.000.000	100 persen	Rp220.000.000	100 persen	Rp242.000.000	100 persen	Rp266.200.000	100 persen
	0	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 persen	100 persen	Rp71.500.000	100 persen	Rp78.650.000	100 persen	Rp86.515.000	100 persen	Rp95.166.500	100 persen

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/ Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		Mendapatkan Layanan Komprehensif											
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 persen	44.54 persen	Rp530.000.000	44.98 persen	Rp580.000.000	45.42 persen	Rp650.000.000	45.86 persen	Rp700.000.000	45.86 persen
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 persen	19.40 persen	Rp273.069.500	19.90 persen	Rp296.600.000	20.40 persen	Rp326.260.000	20.90 persen	Rp358.880.000	20.90 persen
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 persen	100 persen	Rp108.700.000	100 persen	Rp119.600.000	100 persen	Rp131.500.000	100 persen	Rp144.700.000	100 persen
	0	Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 persen	31 persen	Rp135.000.000	33 persen	Rp145.000.000	35 persen	Rp155.000.000	37 persen	Rp165.000.000	37 persen
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 persen	88.88 persen	Rp75.000.000	92.59 persen	Rp80.000.000	96.29 persen	Rp85.000.000	96.29 persen	Rp90.000.000	96.29 persen
Strategi : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan						Rp226.122.021.302		Rp183.471.802.650		Rp185.794.382.490		Rp189.888.972.700	
Arah Kebijakan : Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan						Rp226.122.021.302		Rp183.471.802.650		Rp185.794.382.490		Rp189.888.972.700	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Kesehatan Tooni Maulana	0 persen	100 persen	Rp200.000.000	100 persen	Rp206.000.000	100 persen	Rp212.180.000	100 persen	Rp218.545.400	100 persen
	0	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya	Kesehatan	0 fasyankes	85 fasyankes	Rp42.627.267.603	86 fasyankes	Rp34.886.671.650	87 fasyankes	Rp35.933.271.800	88 fasyankes	Rp37.011.269.953	88 fasyankes
	0	Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan lintas kab/kota	Kesehatan	0 persen	100 persen	Rp120.149.756	100 persen	Rp103.000.000	100 persen	Rp106.090.000	100 persen	Rp109.272.700	100 persen
	0	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	Kesehatan	0 persen	93 persen	Rp2.129.267.268	94 persen	Rp1.837.571.500	94 persen	Rp1.892.698.645	94 persen	Rp1.949.479.604	94 persen
	0	Persentase peningkatan	Kesehatan	0 persen	86 persen	Rp771.365.836	87 persen	Rp602.550.000	88 persen	Rp620.626.500	89 persen	Rp639.245.295	89 persen

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator/Sasaran/ Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		kesehatan masyarakat											
	0	Persentase peningkatan pemeriksaan laboratorium kesehatan	Kesehatan	0 persen	0 persen	Rp0	0 persen	Rp0	0 persen	Rp0	0 persen	Rp0	0 persen
	0	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial	Kesehatan	0 persen	87 persen	Rp491.770.133	87 persen	Rp118.965.000	88 persen	Rp122.533.950	88 persen	Rp126.209.969	88 persen
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	Kesehatan	0 persen	86 persen	Rp2.014.999.590	87 persen	Rp2.075.450.000	88 persen	Rp2.137.713.500	88 persen	Rp2.201.844.905	88 persen
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	Kesehatan	0 persen	88 persen	Rp240.047.116	89 persen	Rp161.710.000	88 persen	Rp166.561.300	90 persen	Rp171.558.139	90 persen
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kesehatan	0 persen	87 persen	Rp400.000.000	88 persen	Rp314.150.000	88 persen	Rp323.574.500	89 persen	Rp333.281.735	89 persen
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	Kesehatan	0 persen	85 persen	Rp126.272.555.000	85 persen	Rp99.600.000.000	86 persen	Rp99.250.000.000	86 persen	Rp103.000.000.000	86 persen
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai klasifikasi Rumah Sakit tipe B	Kesehatan	0 persen	85 persen	Rp30.890.000.000	85 persen	Rp30.970.000.000	86 persen	Rp31.050.000.000	86 persen	Rp31.130.000.000	86 persen
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan, kemitraan bidang kesehatan	Kesehatan	0 persen	100 persen	Rp300.000.000	100 persen	Rp325.000.000	100 persen	Rp350.000.000	100 persen	Rp375.000.000	100 persen
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai kelas Rumah Sakit	Kesehatan	0 persen	80 persen	Rp8.330.500.000	82 persen	Rp1.330.000.000	83 persen	Rp1.750.000.000	85 persen	Rp1.550.000.000	85 persen
	0	Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan	Kesehatan	0 persen	80 persen	Rp3.205.145.500	82 persen	Rp2.372.005.500	83 persen	Rp3.243.984.295	85 persen	Rp2.438.117.000	85 persen

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026	
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		kesehatan jiwa dan non jiwa											
	0	Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan penunjang	Kesehatan	0 persen	80 persen	Rp303.816.500	82 persen	Rp300.000.000	83 persen	Rp350.000.000	85 persen	Rp350.000.000	85 persen
	0	Persentase masyarakat ataupun perseorangan yang mendapat penanganan penyalahgunaan NAPZA	Kesehatan	0 persen	80 persen	Rp173.581.000	82 persen	Rp173.581.000	83 persen	Rp190.000.000	82 persen	Rp190.000.000	82 persen
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan sesuai analisa beban kerja RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kesehatan	0 persen	85 persen	Rp6.338.100.000	86 persen	Rp6.845.148.000	87 persen	Rp6.845.148.000	88 persen	Rp6.845.148.000	88 persen
	0	Persentase SDM kesehatan yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Kesehatan	0 persen	85 persen	Rp1.313.456.000	86 persen	Rp1.250.000.000	87 persen	Rp1.250.000.000	88 persen	Rp1.250.000.000	88 persen
Tujuan : Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.				77,79	77,39	Rp169.397.047.465	78,40	Rp174.009.906.959	79,41	Rp43.183.248.350	80,42	Rp52.935.958.022	80,42
Indikator Tujuan : Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi				77,79	77,39	Rp169.397.047.465	78,40	Rp174.009.906.959	79,41	Rp43.183.248.350	80,42	Rp52.935.958.022	80,42
Sasaran : Meningkatkan aspek kebebasan , kesetaraan , kapasitas lembaga dalam demokrasi				77,79	77,39	Rp169.397.047.465	78,40	Rp174.009.906.959	79,41	Rp43.183.248.350	80,42	Rp52.935.958.022	80,42
Indikator Sasaran :Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi				77,79	77,39	Rp169.397.047.465	78,40	Rp174.009.906.959	79,41	Rp43.183.248.350	80,42	Rp52.935.958.022	80,42
Strategi : meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi						Rp169.397.047.465		Rp174.009.906.959		Rp43.183.248.350		Rp52.935.958.022	
Arah Kebijakan : meningkatkan kebebasan demokrasi						Rp7.239.036.247		Rp8.686.843.497		Rp10.424.212.196		Rp12.509.054.636	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0	urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik	0	0	Rp4.574.451.700	0	Rp5.489.342.040	0	Rp6.587.210.448	0	Rp7.904.652.538	0
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Daerah terlibat Konfik Sosial	urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik	0 %	75 %	Rp2.664.584.547	50 %	Rp3.197.501.457	25 %	Rp3.837.001.748	25 %	Rp4.604.402.098	25 %
Arah Kebijakan : Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masvarakat						Rp10.130.000.000		Rp10.139.450.000		Rp10.038.700.000		Rp13.162.500.000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikuukuhkan	Urusan Keteteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	0 %	26,34 %	Rp170.000.000	31,14 %	Rp175.000.000	35,94 %	Rp180.000.000	40,78 %	Rp185.000.000	40,8 %
		0	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	0%	100%	Rp8.320.000.000	100%	Rp8.325.000.000	100%	Rp8.330.000.000	100%	Rp8.335.000.000	100%
		0	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	0%	35,70%	Rp50.000.000	39,30%	Rp50.000.000	42,90%	Rp55.000.000	50%	Rp60.000.000	50%
		0	Persentase personil Satpol PP yang berkompeten	0%	78,40%	Rp170.000.000	81,10%	Rp175.000.000	83,80%	Rp180.000.000	86,50%	Rp185.000.000	86,50%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase responstime 15 menit kejadian kebakaran/pertolonga n	Urusan Keteteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	0 %	64 %	Rp1.420.000.000	67 %	Rp1.414.450.000	70 %	Rp1.293.700.000	73 %	Rp4.397.500.000	78,5 %
Arah Kebijakan : meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi					Rp10.883.141.218		Rp13.059.769.462		Rp15.671.723.354		Rp18.806.068.026		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik	0 %	30 %	Rp4.688.689.518	30 %	Rp5.626.427.422	20 %	Rp6.751.712.906	20 %	Rp8.102.055.488	100 %
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Jumlah konflik yang berlatarbelakang Ideologi	urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik	0 %	75 %	Rp5.574.451.700	50 %	Rp6.689.342.040	25 %	Rp8.027.210.448	25 %	Rp9.632.652.538	25 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik	0 Dokumen	1 Dokumen	Rp620.000.000	1 Dokumen	Rp744.000.000	1 Dokumen	Rp892.800.000	1 Dokumen	Rp1.071.360.000	0
Arah Kebijakan : meningkatkan kapasitas lembaga demokrasi					Rp141.144.870.000		Rp142.123.844.000		Rp7.048.612.800		Rp8.458.335.360		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pembinaan politik di daerah	urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik	0 %	30 %	Rp141.144.870.000	30 %	Rp142.123.844.000	20 %	Rp7.048.612.800	20 %	Rp8.458.335.360	100 %
Tujuan : Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.				66,08	68,25	Rp2.093.422.521.951	69,00	Rp2.104.066.639.629	69,75	Rp2.190.618.928.318	70,50	Rp2.274.548.608.841	70,50

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
Indikator Tujuan :Indeks Reformasi Birokrasi				66,08	68,25	Rp2.093.422.521.951	69,00	Rp2.104.066.639.629	69,75	Rp2.190.618.928.318	70,50	Rp2.274.548.608.841	70,50
Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan				66,08	68,25	Rp2.093.422.521.951	69,00	Rp2.104.066.639.629	69,75	Rp2.190.618.928.318	70,50	Rp2.274.548.608.841	70,50
Indikator Sasaran :Indeks Reformasi Birokrasi				66,08	68,25	Rp2.093.422.521.951	69,00	Rp2.104.066.639.629	69,75	Rp2.190.618.928.318	70,50	Rp2.274.548.608.841	70,50
Strategi : Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat						Rp96.548.921.835		Rp105.779.264.159		Rp114.465.449.209		Rp122.815.573.281	
Arah Kebijakan : Peningkatan akses data dan informasi serta Kualitas Pelayanan Publik dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat						Rp96.548.921.835	Rp5	Rp105.779.264.159	Rp5	Rp114.465.449.209	Rp6	Rp122.815.573.281	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik	Bidang Komunikasi dan Informatika	0 %	100 %	Rp10.850.000.000	100 %	Rp12.300.000.000	100 %	Rp12.300.000.000	100 %	Rp12.300.000.000	100 %
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik.	Bidang Komunikasi dan Informatika	0 %	80 %	Rp5.125.000.000	85 %	Rp5.396.250.000	90 %	Rp5.679.162.500	100 %	Rp5.974.320.375	100 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Bidang Statistik	0 %	60 %	Rp305.000.000	75 %	Rp383.250.000	85 %	Rp402.100.000	100 %	Rp421.580.000	100 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	Bidang Persandian	0 %	65 %	Rp716.000.000	75 %	Rp748.000.000	85 %	Rp780.000.000	100 %	Rp0	100 %
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE USULAN KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERSUSUN	Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah	0 %	80 %	Rp69.060.794.544	80 %	Rp75.966.873.999	80 %	Rp83.563.561.400	80 %	Rp91.919.917.540	70 %
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun	Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah	0 %	75 %	Rp10.492.127.291	75 %	Rp10.984.890.160	75 %	Rp11.740.625.309	75 %	Rp12.199.755.366	75 %
Strategi : Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa, Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan, Penataan peraturan perundang-undangan, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, manajemen aset dan pencatatan						Rp1.996.873.600.116		Rp1.998.287.375.470		Rp2.076.153.479.109		Rp2.151.733.035.560	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran, tata laksana dan kinerja pemerintah daerah serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel dan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja													
Arah Kebijakan : Peningkatan transparansi dan layanan Pengadaan barang dan jasa						Rp3.148.968.545		Rp3.209.907.916		Rp3.274.106.074		Rp3.339.608.196	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Usulan Kebijakan Daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun	Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah	0 %	80 %	Rp3.148.968.545	80 %	Rp3.209.907.916	80 %	Rp3.274.106.074	80 %	Rp3.339.608.196	80 %
Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan						Rp494.746.640.204		Rp473.123.984.279		Rp496.041.827.242		Rp521.603.001.731	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	0 Kab/Kota	7 Kab/Kota	Rp1.676.300.000	7 Kab/Kota	Rp1.823.755.000	7 Kab/Kota	Rp1.984.946.750	7 Kab/Kota	Rp2.161.198.488	7 Kab/Kota
	0	Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi,	Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	0 Nilai	2 Nilai	Rp506.550.000	2 Nilai	Rp531.877.500	2 Nilai	Rp558.471.375	2 Nilai	Rp586.394.944	2 Nilai
	0	Nilai ketepatan waktu penetapan APBD dan Perubahan APBD	Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	0 Nilai	2 Nilai	Rp1.100.431.204	2 Nilai	Rp1.155.452.764	2 Nilai	Rp1.213.225.402	2 Nilai	Rp1.273.886.673	2 Nilai
	0	persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan terhadap penyaluran Dana Transfer dan BTT	Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	0%	100%	Rp491.068.359.000	100%	Rp469.198.149.015	100%	Rp491.849.696.215	100%	Rp517.124.259.751	100%
	0	persentase realisasi penyediaan dana belanja APBD	Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	0%	92.5 %	Rp395.000.000	93%	Rp414.750.000	93.5 %	Rp435.487.500	94%	Rp457.261.875	94%
Arah Kebijakan : Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan						Rp88.590.043.836		Rp76.989.921.732		Rp80.905.866.295		Rp85.024.252.934	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD Persentase meningkatnya fungsi penganggaran lembaga DPRD dan	Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD	0 %	82 %	Rp38.944.092.077	82 %	Rp24.801.264.680	82 %	Rp26.041.327.914	82 %	Rp27.343.394.310	82 %
	0	Persentase meningkatnya fungsi pengawasan lembaga DPRD	Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD	0%	82%	Rp48.437.797.647	82%	Rp50.859.687.529	82%	Rp53.402.671.905	82%	Rp56.072.805.501	82%
	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang hukum yang tersusun	Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah	0 %	85 %	Rp1.208.154.112	90 %	Rp1.328.969.523	95 %	Rp1.461.866.476	95 %	Rp1.608.053.123	100 %
Arah Kebijakan : Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur						Rp27.296.601.524		Rp27.851.760.488		Rp28.529.720.115		Rp28.491.119.629	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian	0 %	24,42 %	Rp3.221.250.000	26,60 %	Rp3.705.156.250	28,80 %	Rp3.824.550.781	31,04 %	Rp4.183.869.629	31,04 %
	0	Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik	Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian	0%	99.85 %	Rp460.000.000	99.87 %	Rp515.000.000	99.89 %	Rp570.000.000	99.91 %	Rp625.000.000	99.91 %
	0	Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi	Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian	0%	94%	Rp800.000.000	95%	Rp900.000.000	96%	Rp1.000.000.000	97%	Rp1.100.000.000	97%
	0	Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian	0%	85%	Rp2.115.351.524	86%	Rp1.456.404.238	87%	Rp2.159.919.334	88%	Rp1.607.000.000	88%
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	Urusann Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan	0 %	70 %	Rp20.700.000.000	75 %	Rp21.275.200.000	80 %	Rp20.975.250.000	85 %	Rp20.975.250.000	85 %
Arah Kebijakan : Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran						Rp756.250.000		Rp794.062.500		Rp833.765.625		Rp875.453.906	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Nilai Kepatuhan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan	Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	0 Nilai	2 Nilai	Rp756.250.000	2 Nilai	Rp794.062.500	2 Nilai	Rp833.765.625	2 Nilai	Rp875.453.906	2 Nilai
Arah Kebijakan : Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah						Rp5.780.098.221		Rp6.424.342.230		Rp7.019.081.829		Rp7.630.552.661	
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Survey kepuasan pelayanan Badan Penghubung	Urusan Pemerintahan Unsur Penghubung	0 %	77 %	Rp2.455.325.700	82 %	Rp2.623.092.457	87 %	Rp2.803.747.080	92 %	Rp2.998.384.434	92 %
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Perekonomian dan Pembangunan yang tersusun	Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah	0 %	75 %	Rp975.000.000	75 %	Rp1.195.000.000	75 %	Rp1.320.000.000	75 %	Rp1.440.000.000	75 %
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Administrasi Pembangunan yang tersusun	Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah	0 %	75 %	Rp409.000.000	75 %	Rp471.400.000	75 %	Rp547.000.000	75 %	Rp609.000.000	75 %
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi yang tersusun	Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah	0 %	80 %	Rp1.940.772.521	80 %	Rp2.134.849.773	80 %	Rp2.348.334.749	80 %	Rp2.583.168.227	80 %
Arah Kebijakan : Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel						Rp4.118.110.083		Rp4.324.014.587		Rp4.540.216.367		Rp4.767.227.185	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasara n/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Materialitas Hasil Temuan Hasil Pengawasan dibawah 5%, Bidang Pemerintahan dan Aparatur; Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya.	Urusan Pemerintahan Unsur pengawasan	0 %	>5 %	Rp3.319.787.122	>5 %	Rp3.485.775.478	>5 %	Rp3.660.065.302	>5 %	Rp3.843.068.567	>5 %
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Hasil Kapabilitas APIP dan Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3 (INSPEKTORAT)	Urusan Pemerintahan Unsur pengawasan	0 Level	3 Level	Rp798.322.961	3 Level	Rp838.239.109	3 Level	Rp880.151.065	3 Level	Rp924.158.618	3 Level
Arah Kebijakan : Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah						Rp1.358.588.787.703		Rp1.392.289.826.738		Rp1.441.507.657.812		Rp1.486.919.044.180	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan pelayanan internal	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp371.997.450.229	90 Nilai	Rp371.997.450.229	90 Nilai	Rp371.997.450.229	90 Nilai	Rp371.997.450.229	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal (Cabdin Wilayah I)	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp3.518.900.000	90 Nilai	Rp3.518.900.000	90 Nilai	Rp3.518.900.000	90 Nilai	Rp3.518.900.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal (Cabdin Wilayah II)	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp996.600.000	90 Nilai	Rp994.400.000	90 Nilai	Rp1.178.900.000	90 Nilai	Rp1.374.900.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal (Cabdin Wilayah III)	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp4.623.100.000	90 Nilai	Rp814.300.000	90 Nilai	Rp624.300.000	90 Nilai	Rp514.300.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal (Cabdin Wilayah IV)	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp705.650.000	90 Nilai	Rp1.731.840.000	90 Nilai	Rp726.750.000	90 Nilai	Rp616.500.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal (Cabdin Wilayah V)	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp3.963.500.000	90 Nilai	Rp984.000.000	90 Nilai	Rp884.500.000	90 Nilai	Rp765.000.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SLB N 31 PKLK NEGERI PANGKALPINANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp394.500.000	90 Nilai	Rp433.950.000	90 Nilai	Rp473.400.000	90 Nilai	Rp512.850.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SLB N Koba	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp151.500.000	90 Nilai	Rp166.650.000	90 Nilai	Rp181.800.000	90 Nilai	Rp196.950.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SLBN Manggar	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp171.000.000	90 Nilai	Rp188.100.000	90 Nilai	Rp205.200.000	90 Nilai	Rp222.300.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SLBN MUNTOK	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp132.000.000	90 Nilai	Rp145.200.000	90 Nilai	Rp158.400.000	90 Nilai	Rp171.600.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SLB N SUNGAILIAT	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp243.000.000	90 Nilai	Rp267.300.000	90 Nilai	Rp29.600.000	90 Nilai	Rp315.900.000	90 Nilai

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator/Sasara n/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SLB N TANJUNGPANDAN	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp235.500.000	90 Nilai	Rp259.050.000	90 Nilai	Rp282.600.000	90 Nilai	Rp306.150.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 AIRGEGAS	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp209.100.000	90 Nilai	Rp250.920.000	90 Nilai	Rp292.740.000	90 Nilai	Rp334.560.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal (SMAN 1 BELINYU)	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp174.000.000	90 Nilai	Rp208.800.000	90 Nilai	Rp243.600.000	90 Nilai	Rp278.400.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 GANTUNG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp214.500.000	90 Nilai	Rp257.400.000	90 Nilai	Rp300.300.000	90 Nilai	Rp343.200.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 JEBUS	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp214.200.000	90 Nilai	Rp257.040.000	90 Nilai	Rp299.880.000	90 Nilai	Rp342.720.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 KELAPA	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp200.100.000	90 Nilai	Rp240.120.000	90 Nilai	Rp280.140.000	90 Nilai	Rp320.160.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 KELAPA KAMPIT	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp152.400.000	90 Nilai	Rp182.880.000	90 Nilai	Rp213.360.000	90 Nilai	Rp243.840.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 KEP. PONGOK	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp58.500.000	90 Nilai	Rp70.200.000	90 Nilai	Rp81.900.000	90 Nilai	Rp93.600.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 KOBAS	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp212.700.000	90 Nilai	Rp255.240.000	90 Nilai	Rp297.780.000	90 Nilai	Rp340.320.000	0 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 LEPAR PONGOK	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp97.200.000	90 Nilai	Rp116.640.000	90 Nilai	Rp136.080.000	90 Nilai	Rp155.520.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 LUBUK BESAR	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp176.100.000	90 Nilai	Rp211.320.000	90 Nilai	Rp246.540.000	90 Nilai	Rp281.760.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MANGGAR	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp244.500.000	90 Nilai	Rp293.400.000	90 Nilai	Rp342.300.000	90 Nilai	Rp391.200.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MEMBALONG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp158.100.000	90 Nilai	Rp189.720.000	90 Nilai	Rp221.340.000	90 Nilai	Rp252.960.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MENDO BARAT	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp151.200.000	90 Nilai	Rp181.440.000	90 Nilai	Rp211.680.000	90 Nilai	Rp241.920.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MERAWANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp144.900.000	90 Nilai	Rp173.880.000	90 Nilai	Rp202.860.000	90 Nilai	Rp231.840.000	90 Nilai

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator/Sasara n/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 MUNTOK	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp224.100.000	90 Nilai	Rp268.920.000	90 Nilai	Rp313.740.000	90 Nilai	Rp358.560.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 NAMANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp164.700.000	90 Nilai	Rp197.640.000	90 Nilai	Rp230.580.000	90 Nilai	Rp263.520.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PANGKALAN BARU	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp172.500.000	90 Nilai	Rp207.000.000	90 Nilai	Rp241.500.000	90 Nilai	Rp276.000.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PANGKAL PINANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp309.300.000	90 Nilai	Rp371.160.000	90 Nilai	Rp433.020.000	90 Nilai	Rp494.880.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PARITTIGA	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp148.800.000	90 Nilai	Rp178.560.000	90 Nilai	Rp208.320.000	90 Nilai	Rp238.080.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PAYUNG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp194.700.000	90 Nilai	Rp233.640.000	90 Nilai	Rp272.580.000	90 Nilai	Rp311.520.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PEMALI	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp265.200.000	90 Nilai	Rp318.240.000	90 Nilai	Rp371.280.000	90 Nilai	Rp424.320.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 PUDING BESAR	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp118.800.000	90 Nilai	Rp142.560.000	90 Nilai	Rp166.320.000	90 Nilai	Rp190.080.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 RIAU SILIP	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp138.900.000	90 Nilai	Rp166.680.000	90 Nilai	Rp194.460.000	90 Nilai	Rp222.240.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SIJUK	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp138.600.000	90 Nilai	Rp166.320.000	90 Nilai	Rp194.040.000	90 Nilai	Rp221.760.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SIMPANG PESAK	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp132.900.000	90 Nilai	Rp159.480.000	90 Nilai	Rp186.060.000	90 Nilai	Rp212.640.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SIMPANG RIMBA	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp126.900.000	90 Nilai	Rp152.280.000	90 Nilai	Rp177.660.000	90 Nilai	Rp203.040.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SP TERITIP	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp177.900.000	90 Nilai	Rp213.480.000	90 Nilai	Rp249.060.000	90 Nilai	Rp284.640.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SUNGAI LIAT	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp298.800.000	90 Nilai	Rp358.560.000	90 Nilai	Rp418.320.000	90 Nilai	Rp478.080.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 SUNGAI SELAN	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp108.600.000	90 Nilai	Rp130.320.000	90 Nilai	Rp152.040.000	90 Nilai	Rp173.760.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp240.000.000	90 Nilai	Rp288.000.000	90 Nilai	Rp336.000.000	90 Nilai	Rp384.000.000	90 Nilai

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		SMAN 1 TANJUNG PANDAN											
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 TEMPILANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp132.900.000	90 Nilai	Rp159.480.000	90 Nilai	Rp186.060.000	9- Nilai	Rp212.640.000	9- Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 1 TOBOALI	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp285.000.000	90 Nilai	Rp342.000.000	90 Nilai	Rp399.000.000	90 Nilai	Rp456.000.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 MENDO BARAT	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp90.300.000	90 Nilai	Rp108.360.000	90 Nilai	Rp126.420.000	90 Nilai	Rp144.480.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 PANGKAL PINANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp270.000.000	90 Nilai	Rp324.000.000	90 Nilai	Rp378.000.000	90 Nilai	Rp432.000.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 SUNGAI SELAN	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp180.600.000	90 Nilai	Rp216.720.000	90 Nilai	Rp252.840.000	90 Nilai	Rp288.960.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 TANJUNG PANDAN	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp213.900.000	90 Nilai	Rp256.680.000	90 Nilai	Rp299.460.000	90 Nilai	Rp342.240.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 2 TOBOALI	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp165.300.000	90 Nilai	Rp198.360.000	90 Nilai	Rp231.420.000	90 Nilai	Rp264.480.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 3 PANGKAL PINANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp288.000.000	90 Nilai	Rp345.600.000	90 Nilai	Rp403.200.000	90 Nilai	Rp460.800.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMAN 4 PANGKAL PINANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp208.500.000	90 Nilai	Rp250.200.000	90 Nilai	Rp291.900.000	90 Nilai	Rp333.600.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal (SMA Negeri 1 Damar)	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp118.800.000	90 Nilai	Rp142.560.000	90 Nilai	Rp166.320.000	90 Nilai	Rp190.080.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMA NEGERI 1 PULAU BESAR	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp65.400.000	90 Nilai	Rp78.480.000	90 Nilai	Rp91.560.000	90 Nilai	Rp104.640.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMA NEGERI 2 PUDING BESAR	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp118.800.000	90 Nilai	Rp142.560.000	90 Nilai	Rp166.320.000	90 Nilai	Rp190.080.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMA NEGERI 3 TOBOALI	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp30.000.000	90 Nilai	Rp30.000.000	90 Nilai	Rp30.000.000	90 Nilai	Rp32.160.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp1.200.000.000	90 Nilai	Rp1.275.000.000	90 Nilai	Rp1.350.000.000	90 Nilai	Rp1.500.000.000	90 Nilai

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		SMAN OLAHRAGA MUHAMMAD NOER											
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 AIRGEGAS	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp121.800.000	90 Nilai	Rp146.160.000	90 Nilai	Rp170.520.000	90 Nilai	Rp194.880.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 BADAU	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp134.400.000	90 Nilai	Rp161.280.000	90 Nilai	Rp188.160.000	90 Nilai	Rp215.040.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK N 1 BAKAM	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp111.000.000	90 Nilai	Rp133.200.000	90 Nilai	Rp155.400.000	90 Nilai	Rp177.600.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 BELINYU	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp129.000.000	90 Nilai	Rp154.800.000	90 Nilai	Rp180.600.000	90 Nilai	Rp206.400.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 KELAPA	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp463.000.000	90 Nilai	Rp555.600.000	90 Nilai	Rp648.200.000	90 Nilai	Rp740.800.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 KELAPA KAMPIT	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp105.600.000	90 Nilai	Rp126.720.000	90 Nilai	Rp147.840.000	90 Nilai	Rp168.960.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 KOB A	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp539.000.000	90 Nilai	Rp646.800.000	90 Nilai	Rp754.600.000	90 Nilai	Rp862.400.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 MANGGAR	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp221.400.000	90 Nilai	Rp265.680.000	90 Nilai	Rp309.960.000	90 Nilai	Rp354.240.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 MENDOBARAT	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp78.600.000	90 Nilai	Rp94.320.000	90 Nilai	Rp110.040.000	90 Nilai	Rp125.760.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 MUNTOK	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp551.000.000	90 Nilai	Rp661.200.000	90 Nilai	Rp771.400.000	90 Nilai	Rp881.600.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 PANGKALAN BARU	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp989.000.000	90 Nilai	Rp1.186.800.000	90 Nilai	Rp1.384.600.000	90 Nilai	Rp1.582.400.000	90 Nilai
	0	SMKN 1 PANGKALPINANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp882.000.000	90 Nilai	Rp1.186.800.000	90 Nilai	Rp1.384.600.000	90 Nilai	Rp1.582.400.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 PARIT TIGA	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp783.000.000	90 Nilai	Rp939.600.000	90 Nilai	Rp1.096.200.000	90 Nilai	Rp1.252.800.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 PAYUNG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp399.000.000	90 Nilai	Rp478.800.000	90 Nilai	Rp558.600.000	90 Nilai	Rp638.400.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 SELAT NASIK	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp163.000.000	90 Nilai	Rp195.600.000	90 Nilai	Rp228.200.000	90 Nilai	Rp260.800.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 SIMPANG KATIS	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp292.800.000	90 Nilai	Rp351.360.000	90 Nilai	Rp409.920.000	90 Nilai	Rp468.480.000	90 Nilai

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara n/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp43.800.000	90 Nilai	Rp52.560.000	90 Nilai	Rp61.320.000	90 Nilai	Rp70.080.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 SUNGAILIAT	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp306.000.000	90 Nilai	Rp367.200.000	90 Nilai	Rp428.400.000	90 Nilai	Rp489.600.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 TANJUNGPANDAN	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp281.400.000	90 Nilai	Rp337.680.000	90 Nilai	Rp393.960.000	90 Nilai	Rp450.240.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 TEMPILANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp110.100.000	90 Nilai	Rp132.120.000	90 Nilai	Rp154.140.000	90 Nilai	Rp176.160.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 TOBOALI	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp216.600.000	90 Nilai	Rp259.920.000	90 Nilai	Rp303.240.000	90 Nilai	Rp346.560.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 1 TUKAK SADAI	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp99.000.000	90 Nilai	Rp118.800.000	90 Nilai	Rp138.600.000	90 Nilai	Rp158.400.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 2 KOBA	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp228.000.000	90 Nilai	Rp273.600.000	90 Nilai	Rp319.200.000	90 Nilai	Rp364.800.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 2 PANGKALPINANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp461.400.000	90 Nilai	Rp553.680.000	90 Nilai	Rp645.960.000	90 Nilai	Rp738.240.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 2 SUNGAILIAT	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp237.300.000	90 Nilai	Rp284.760.000	90 Nilai	Rp332.220.000	90 Nilai	Rp379.680.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 2 TANJUNGPANDAN	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp825.000.000	90 Nilai	Rp990.000.000	90 Nilai	Rp1.155.000.000	90 Nilai	Rp1.320.000.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 3 PANGKALPINANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp829.000.000	90 Nilai	Rp994.800.000	90 Nilai	Rp1.160.600.000	90 Nilai	Rp1.326.400.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 3 TANJUNGPANDAN	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp181.200.000	90 Nilai	Rp217.440.000	90 Nilai	Rp253.680.000	90 Nilai	Rp289.920.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 4 PANGKALPINANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp225.000.000	90 Nilai	Rp270.000.000	90 Nilai	Rp315.000.000	90 Nilai	Rp360.000.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMKN 5 PANGKALPINANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp123.000.000	90 Nilai	Rp147.600.000	90 Nilai	Rp172.200.000	90 Nilai	Rp196.800.000	90 Nilai

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 DENDANG	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp51.600.000	90 Nilai	Rp61.920.000	90 Nilai	Rp72.240.000	90 Nilai	Rp82.560.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 PULAU BESAR	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp30.900.000	90 Nilai	Rp37.080.000	90 Nilai	Rp43.260.000	90 Nilai	Rp49.440.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 SIJUK	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp107.700.000	90 Nilai	Rp129.240.000	90 Nilai	Rp150.780.000	90 Nilai	Rp172.320.000	90 Nilai
	0	SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp63.900.000	90 Nilai	Rp76.680.000	90 Nilai	Rp89.460.000	90 Nilai	Rp102.240.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp52.500.000	90 Nilai	Rp63.000.000	90 Nilai	Rp73.500.000	90 Nilai	Rp84.000.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal SMK NEGERI 1 SUNGAISELAN	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp64.800.000	90 Nilai	Rp77.760.000	90 Nilai	Rp90.720.000	90 Nilai	Rp103.680.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan pelayanan internal (UPT BALAI TEKOMDIK)	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp2.611.000.000	90 Nilai	Rp2.656.000.000	90 Nilai	Rp2.701.000.000	90 Nilai	Rp2.780.000.000	90 Nilai
	0	Kepuasan pelayanan internal (Cabdin Wllayah I)	Urusan Penunjang pemerintahan	0 Nilai	0 Nilai	Rp0	0 Nilai	Rp0	0 Nilai	Rp0	0 Nilai	Rp0	0 Nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan pelayanan internal Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	82 nilai	Rp26.844.774.420	82 nilai	Rp27.264.815.409	83 nilai	Rp28.082.759.871	83 nilai	Rp28.925.242.668	83 nilai
	0	Indeks kepuasan pelayanan internal (UPTD Labkes)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	0 nilai	Rp0	0 nilai	Rp0	0 nilai	Rp0	0 nilai	Rp0	0 nilai
	0	Nilai Sakip PD (Dinas Kesehatan)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	80 nilai	Rp278.801.047	80 nilai	Rp157.075.000	80 nilai	Rp161.787.250	80 nilai	Rp166.640.868	80 nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (RSUP)	Urusan Penunjang pemerintahan	0 nilai	76 nilai	Rp105.832.000.000	77 nilai	Rp111.842.000.000	78 nilai	Rp116.473.250.000	79 nilai	Rp122.721.312.500	79 nilai
	0	Nilai Sakip Perangkat daerah (RSUP)	Urusan Penunjang pemerintahan	0 nilai	78 nilai	Rp300.000.000	78 nilai	Rp500.000.000	79 nilai	Rp500.000.000	79 nilai	Rp500.000.000	79 nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (RSJ)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	78 nilai	Rp50.928.395.000	80 nilai	Rp49.564.789.000	81 nilai	Rp50.722.051.500	82 nilai	Rp50.424.742.125	82 nilai
	0	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (RSJ)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	81 nilai	Rp40.000.000	81.1 nilai	Rp40.000.000	81.2 nilai	Rp40.000.000	81.3 nilai	Rp40.000.000	81.3 nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD (Dinas PUPR PRKP)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	78 Nilai	Rp1.000.000.000	79 Nilai	Rp1.100.000.000	80 Nilai	Rp1.300.000.000	81 Nilai	Rp1.400.000.000	81 Nilai

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	0	Survey Kepuasan Pelayanan Internal (Dinas PUPR PRKP)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	80 Nilai	Rp31.000.000.000	80 Nilai	Rp32.000.000.000	80 Nilai	Rp33.000.000.000	82 Nilai	Rp34.000.000.000	82 Nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan pelayanan internal (Satpol PP)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	75 Nilai	Rp55.000.000	77 Nilai	Rp58.000.000	80 Nilai	Rp61.000.000	81 Nilai	Rp64.000.000	81 Nilai
	0	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satpol PP)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nllai	79,5 Nllai	Rp14.583.133.000	80 Nilai	Rp13.603.750.000	81 Nllai	Rp13.894.550.000	81 Nllai	Rp14.031.200.000	81 Nllai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BPBD)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	82.84 Nilai	Rp11.801.823.218	82.86 Nilai	Rp14.313.712.693	82.88 Nilai	Rp19.946.682.191	82.90 Nilai	Rp14.939.972.550	82.90 Nilai
	0	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (BPBD)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	77,12 Nilai	Rp302.500.000	77,14 Nilai	Rp317.625.000	77,16 Nilai	Rp333.506.250	77,18 Nilai	Rp350.181.563	77,18 Nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (DinsosPMD)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 %	90 %	Rp29.054.527.316	90 %	Rp31.673.164.649	90 %	Rp34.128.645.547	90 %	Rp37.015.818.243	90 %
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (PSBLH)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0%	90%	Rp6.025.797.122	90%	Rp3.628.461.573	90%	Rp2.769.083.393	90%	Rp1.762.980.589	90%
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (PSBS)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0%	90%	Rp4.023.439.385	90%	Rp6.318.652.834	90%	Rp1.520.086.814	90%	Rp1.592.973.969	90%
	0	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DinsosPMD)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0%	78%	Rp191.396.944	78,10%	Rp261.016.888	78,20%	Rp263.016.888	78,30%	Rp265.016.888	78,30%
	0	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PSBLH)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0%	78%	Rp20.360.000	78,10%	Rp20.360.000	78,20%	Rp20.360.000	78,30%	Rp20.360.000	78,30%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Disnaker)	Urusan Penunjang Daerah	0 %	99 %	Rp21.396.512.406	99 %	Rp23.271.083.646	99 %	Rp24.519.747.826	99 %	Rp25.609.595.219	99 %
	0	Nilai saki perangkat daerah (DISNAKER)	Urusan Penunjang Daerah	0 Nilai	86 Nilai	Rp325.000.000	87 Nilai	Rp377.000.000	87 Nilai	Rp479.000.000	88 Nilai	Rp580.000.000	88 Nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DP3ACSKB)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	75 nilai	Rp10.157.986.019	76 nilai	Rp10.634.217.420	78 nilai	Rp13.103.878.821	80 nilai	Rp10.857.469.222	80 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD PPA)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	75 Nilai	Rp121.000.000	76 Nilai	Rp131.000.000	78 Nilai	Rp144.000.000	80 Nilai	Rp159.100.000	80 Nilai
	0	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	74 nilai	Rp120.000.000	74.5 nilai	Rp136.000.000	75 nilai	Rp152.000.000	75.5 nilai	Rp168.000.000	75.5 nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DPKP)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	80 nilai	Rp36.402.057.048	80 nilai	Rp37.259.058.474	80 nilai	Rp38.141.828.686	80 nilai	Rp39.051.229.091	80 nilai

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan internal (DPKP-UPTD Balai Benih)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	80 Nilai	Rp550.000.000	80 Nilai	Rp577.500.000	80 Nilai	Rp606.375.000	80 Nilai	Rp636.693.750	80 Nilai
	0	Indeks kepuasan Pelayanan Internal (DPKP-UPTD PMKP)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	80 Nilai	Rp270.000.000	80 Nilai	Rp283.500.000	80 Nilai	Rp297.675.000	80 Nilai	Rp312.588.750	80 Nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal(DPKP-UPTD Proteksi)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	80 Nilai	Rp350.000.000	80 Nilai	Rp367.500.000	80 Nilai	Rp385.875.000	80 Nilai	Rp405.168.750	80 Nilai
	0	Indeks kepuasan Pelayanan Internal (DPKP-UPTD - PSMB)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	80 nilai	Rp350.000.000	80 nilai	Rp367.500.000	80 nilai	Rp385.875.000	80 nilai	Rp405.168.750	80 nilai
	0	Nilai SAKIP PD (DPKP)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	80,88 nilai	Rp275.000.000	81,29 nilai	Rp288.750.000	81,69 nilai	Rp303.187.500	82,1 nilai	Rp318.346.875	82,1 nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp40.892.013.094	90 nilai	Rp37.522.013.094	90 nilai	Rp38.162.013.094	90 nilai	Rp37.562.013.094	90 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Laboratorium Lingkungan Hidup)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	90 Nilai	Rp1.965.219.500	90 Nilai	Rp1.999.977.500	90 Nilai	Rp2.019.525.000	90 Nilai	Rp2.103.870.000	90 Nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Belantu Mendanau)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp604.000.000	90 nilai	Rp622.000.000	90 nilai	Rp654.500.000	90 nilai	Rp689.763.000	90 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Bubus Panca)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp293.872.000	90 nilai	Rp319.230.000	90 nilai	Rp299.750.000	90 nilai	Rp295.740.000	90 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Gunung Duren)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp1.272.980.000	90 nilai	Rp435.980.000	90 nilai	Rp421.480.000	90 nilai	Rp389.980.000	90 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Jebu Bembang Antan)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp293.872.000	90 nilai	Rp319.230.000	90 nilai	Rp299.750.000	90 nilai	Rp295.740.000	90 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Muntai Palas)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp402.488.000	90 nilai	Rp437.000.000	90 nilai	Rp527.500.000	90 nilai	Rp576.763.000	90 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Rambat Menduyung)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp289.472.000	90 nilai	Rp328.260.000	90 nilai	Rp233.860.000	90 nilai	Rp371.840.000	90 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD KPH Sigambir Kota Waringin)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp297.000.000	90 nilai	Rp297.000.000	90 nilai	Rp297.000.000	90 nilai	Rp297.000.000	90 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp494.500.000	90 nilai	Rp549.500.000	90 nilai	Rp562.000.000	90 nilai	Rp622.000.000	90 nilai

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		(UPTD KPH Sungai Sembulan)											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Perhubungan)	Urusan Penunjinag Pemerintahan	0 %	51 %	Rp297.000.000	51 %	Rp312.000.000	60 %	Rp327.000.000	60 %	Rp343.000.000	60 %
	0	Survei Kepuasan Internal Daerah (Dinas Perhubungan)	Urusan Penunjinag Pemerintahan	0%	85%	Rp19.000.998.307	85%	Rp31.277.999.180	85%	Rp21.478.999.180	85%	Rp22.556.999.180	85%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD (DISKOMINFO)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 %	82 nilai	Rp189.000.000	83 nilai	Rp192.000.000	84 nilai	Rp195.000.000	85 nilai	Rp198.000.000	85 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal PD (DISKOMINFO)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0%	90 nilai	Rp10.678.000.000	90 nilai	Rp10.787.200.000	90 nilai	Rp10.877.500.000	90 nilai	Rp10.945.750.000	90 nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (UPT Balaikop)	Urusan Penunjang Pemerintah	0 persen	80 persen	Rp12.408.516.106	80.5 persen	Rp12.866.679.664	80.8 persen	Rp13.020.582.790	81 persen	Rp13.446.768.295	81 persen
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DKUKM)	Urusan Penunjang Pemerintah	0	83	Rp8.576.061.981	84	Rp8.790.463.531	85	Rp9.010.225.119	86	Rp9.235.480.747	86
	0	Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-Balkop)	Urusan Penunjang Pemerintah	0	80	Rp724.746.483	80,5	Rp424.721.131	81	Rp512.193.244	81,5	Rp1.332.412.569	86
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DPMPTSP)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	69 Nilai	Rp11.560.329.872	70 Nilai	Rp11.846.246.365	72 Nilai	Rp13.010.458.683	75 Nilai	Rp12.707.981.617	75 Nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPT PPT WILAYAH BELITUNG)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	68 Nilai	Rp6.095.500.000	69 Nilai	Rp608.000.000	70 Nilai	Rp615.000.000	71 Nilai	Rp616.700.000	71 Nilai
	0	Nilai Sakip PD (DPMPTSP)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	78 Nilai	Rp395.000.000	79 Nilai	Rp414.750.000	80 Nilai	Rp435.487.500	81 Nilai	Rp457.261.875	81 Nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan pelayanan internal (PARBUDKEPORA)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	67 Nilai	Rp23.774.621.871	68 Nilai	Rp28.493.546.245	69 Nilai	Rp34.156.255.495	70 Nilai	Rp40.951.506.594	70 Nilai
	0	Indeks kepuasan pelayanan internal UPTD Belitung (PARBUDKEPORA)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	67 Nilai	Rp1.320.200.000	68 Nilai	Rp827.200.000	69 Nilai	Rp834.400.000	70 Nilai	Rp953.040.000	70 Nilai
	0	Nilai SAKIP PD (PARBUDKEPORA)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	77 Nilai	Rp469.700.000	78 Nilai	Rp553.640.000	79 Nilai	Rp654.368.000	80 Nilai	Rp775.241.600	80 Nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal PD (DKPUS)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	100 Nilai	Rp43.361.900.638	100 Nilai	Rp39.590.551.402	100 Nilai	Rp40.925.196.541	100 Nilai	Rp42.393.306.188	100 Nilai
	0	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DKPUS)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	78 Nilai	Rp195.000.000	79 Nilai	Rp200.000.000	79 Nilai	Rp205.700.000	80 Nilai	Rp210.000.000	80 Nilai

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DKP)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 %	83 %	Rp19.070.980.000	84 %	Rp19.373.180.000	85 %	Rp19.046.140.000	86 %	Rp19.703.606.000	86 %
	0	Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-BPI)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0%	83%	Rp1.939.500.000	84%	Rp1.835.250.000	85%	Rp1.946.500.000	86%	Rp2.276.800.000	86%
	0	Indeks kepuasan Pelayanan Internal (UPTD-LPPMHP)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0%	83%	Rp439.000.000	84%	Rp572.250.000	85%	Rp525.500.000	86%	Rp828.800.000	86%
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD_PPP Muara Sungai Baturusa	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 %	0%	Rp0	84%	Rp1.635.000.000	85%	Rp1.769.500.000	86%	Rp1.808.800.000	86%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Bangka)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp382.140.000	92 nilai	Rp372.140.000	92 nilai	Rp372.140.000	92 nilai	Rp372.140.000	92 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Barat)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp799.600.000	92 nilai	Rp574.600.000	92 nilai	Rp574.600.000	92 nilai	Rp574.600.000	92 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Bangka Tengah dan Selatan)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp441.450.000	92 nilai	Rp468.200.000	92 nilai	Rp468.200.000	92 nilai	Rp468.200.000	92 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Belitung)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp400.200.000	92 nilai	Rp400.200.000	92 nilai	Rp400.200.000	92 nilai	Rp400.200.000	92 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Cabdin ESDM Wilayah Belitung Timur)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp439.700.000	92 nilai	Rp439.700.000	92 nilai	Rp439.700.000	92 nilai	Rp439.700.000	92 nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DESDM)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	90 nilai	Rp20.961.628.350	92 nilai	Rp20.657.700.000	92 nilai	Rp21.728.700.000	92 nilai	Rp21.762.700.000	92 nilai
	0	Nilai SAKIP PD (DESDM)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	85 nilai	Rp195.000.000	87 nilai	Rp250.000.000	89 nilai	Rp250.000.000	91 nilai	Rp250.000.000	91 nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip Perangkat Daerah (DISPERINDAG)	0	0 Nilai	75 Nilai	Rp265.000.000	75 Nilai	Rp285.000.000	75 Nilai	Rp320.000.000	75 Nilai	Rp330.000.000	75 Nilai
	0	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (DISPERINDAG)	0	0 Nilai	60 Nilai	Rp20.619.715.000	60 Nilai	Rp19.466.265.000	60 Nilai	Rp19.495.345.000	60 Nilai	Rp19.558.208.000	60 Nilai
	0	Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu	0	0 Nilai	77 Nilai	Rp523.500.000	77 Nilai	Rp580.500.000	77 Nilai	Rp591.050.000	77 Nilai	Rp625.155.000	77 Nilai

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator/Sasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		Barang (UPTD BPSMB)											
	0	Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan (UPTD RPK)	0	0 Nilai	77 Nilai	Rp4.218.800.000	77 Nilai	Rp1.898.640.000	77 Nilai	Rp1.166.314.000	77 Nilai	Rp1.511.555.400	77 Nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Setwan)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	92 Nilai	Rp73.245.647.900	92 Nilai	Rp76.907.930.295	92 Nilai	Rp80.753.326.809	92 Nilai	Rp84.790.993.150	92 Nilai
	0	Nilai Sakip PD (Sekretariat DPRD)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 nilai	79 nilai	Rp700.000.000	79 nilai	Rp735.000.000	79 nilai	Rp771.750.000	79 nilai	Rp810.337.500	79 nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD (Bappeda)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	83,33	Rp192.000.000	83,33	Rp192.000.000	83,35	Rp202.000.000	83,35	Rp202.000.000	83,35
	0	Survey Kepuasan Pelayanan Internal (BAPPEDA)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	80	Rp15.504.000.000	80	Rp15.894.000.000	80	Rp16.084.000.000	82	Rp16.524.000.000	82
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indek Kepuasan Pelayanan (Bakuda : UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	80 Nilai	Rp1.641.500.000	81 Nilai	Rp1.347.075.000	82 Nilai	Rp1.814.841.250	83 Nilai	Rp1.906.208.313	83 Nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Bakuda)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	78 Nilai	Rp71.415.684.184	79 Nilai	Rp74.498.218.393	80 Nilai	Rp78.211.129.313	81 Nilai	Rp82.109.685.779	81 Nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (Bakuda : UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	80.25 Nilai	Rp1.029.532.509	80.50 Nilai	Rp851.095.385	80.75 Nilai	Rp1.130.356.403	81 Nilai	Rp938.549.223	81 Nilai
	0	indeks kepuasan pelayanan internal (Bakuda: UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	79 Nilai	Rp1.161.000.000	80 Nilai	Rp1.063.040.336	81 Nilai	Rp1.330.942.353	82 Nilai	Rp1.171.489.471	82 Nilai
	0	Indeks kepuasan Pelayanan internal (Bakuda : UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	81 Nilai	Rp1.454.000.000	82 Nilai	Rp1.316.950.000	83 Nilai	Rp1.583.022.500	84 Nilai	Rp1.662.373.625	84 Nilai
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	79.5 Nilai	Rp1.098.500.000	81 Nilai	Rp986.342.905	82 Nilai	Rp1.235.410.050	82.5 Nilai	Rp1.296.930.552	82.5 Nilai
	0	Indeks kepuasan pelayanan internal (UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	79.5 Nilai	Rp2.294.450.000	80 Nilai	Rp1.408.105.000	80.5 Nilai	Rp2.473.915.500	81 Nilai	Rp1.901.307.050	81 Nilai

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator/Sasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	0	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	80,5 Nilai	Rp1.725.800.000	81 Nilai	Rp1.472.475.000	815 Nilai	Rp1.746.323.750	82 Nilai	Rp1.833.839.938	82 Nilai
	0	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Bakuda)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	80 Nilai	Rp162.500.000	81 Nilai	Rp170.625.000	82 Nilai	Rp179.156.250	83 Nilai	Rp188.114.063	83 Nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (BKPSDM)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	70 Nilai	Rp23.206.825.702	71 Nilai	Rp23.822.653.845	72 Nilai	Rp24.173.440.191	73 Nilai	Rp24.686.597.195	73 Nilai
	0	Nilai Sakip PD (BKPSDM)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	82 Nilai	Rp130.000.000	82,25 Nilai	Rp144.000.000	82,5 Nilai	Rp150.000.000	82,75 Nilai	Rp175.000.000	82,75 Nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Derah (Badan Penghubung)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 %	75 %	Rp11.938.039.946	80 %	Rp13.556.604.103	85 %	Rp19.197.824.923	90 %	Rp19.377.289.908	90 %
	0	Nilai Sakip PD (Badan Penghubung)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	70 Nilai	Rp6.247.301	72 Nilai	Rp7.496.761	74 Nilai	Rp8.996.113	75 Nilai	Rp10.795.336	75 Nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (INSPEKTORAT)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	85 Nilai	Rp18.034.272.531	90 Nilai	Rp19.324.053.658	90 Nilai	Rp19.871.726.340	90 Nilai	Rp20.680.098.407	90 Nilai
	0	Nilai Sakip PD (INSPEKTORAT)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	79 Nilai	Rp65.000.000	80 Nilai	Rp68.250.000	81 Nilai	Rp71.662.500	81 Nilai	Rp75.245.625	81 Nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan Pelayanan Internal (BAKESBANGPOL)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	76,61 Nilai	Rp9.606.769.606	77,5 Nilai	Rp9.675.723.528	78,8 Nilai	Rp12.090.868.233	80 Nilai	Rp13.789.041.880	80 Nilai
	0	Nilai Sakip PD (BAKESBANGPOL)	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	79 Nilai	Rp419.809.668	80 Nilai	Rp503.771.602	81 Nilai	Rp604.525.922	82 Nilai	Rp725.431.107	82 Nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD Setda	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 Nilai	77,5 Nilai	Rp450.000.000	78 Nilai	Rp495.000.000	78,5 Nilai	Rp537.000.000	79 Nilai	Rp575.000.000	79 Nilai
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Setda	Urusan Penunjang Pemerintahan	0 %	82%	Rp104.978.300.000	83%	Rp115.469.530.000	84%	Rp127.016.483.000	85%	Rp139.718.131.300	0
Arah Kebijakan : Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja						Rp13.848.100.000		Rp13.279.555.000		Rp13.501.237.750		Rp13.082.775.138	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan PAD	Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	0 %	8.5 %	Rp935.000.000	10 %	Rp981.750.000	11.5 %	Rp1.030.837.500	13 %	Rp1.082.379.375	13 %
	0	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB (UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA)	Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	0%	9,57%	Rp510.000.000	10,52%	Rp535.500.000	11,58%	Rp562.275.000	12,73%	Rp590.388.750	12,73%
	0	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB (UPTB WILAYAH	Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	0%	9,71%	Rp136.600.000	10,68%	Rp143.430.000	11,75%	Rp150.601.500	12,92%	Rp158.131.575	12,92%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		KABUPATEN BANGKA BARAT)											
0		pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB (UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA SELATAN)	Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	0%	11.26 %	Rp370.500.000	12.36 %	Rp389.025.000	13.63 %	Rp408.476.250	14.99 %	Rp428.900.063	14.99 %
0		pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB (UPTB WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH)	Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	0%	11.26 %	Rp231.000.000	12.39 %	Rp254.100.000	13.63 %	Rp279.510.000	14.99 %	Rp307.461.000	14.99 %
0		pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB (UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG)	Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	0%	11.26 %	Rp230.000.000	12.39 %	Rp261.500.000	13.63 %	Rp274.575.000	14.99 %	Rp288.303.750	14.99 %
0		pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB (UPTB WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR)	Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	0%	11.26 %	Rp345.000.000	12.39 %	Rp362.250.000	13.63 %	Rp380.362.500	14.99 %	Rp399.380.625	14.99 %
0		pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB (UPTB WILAYAH KOTA PANGKALPINANG)	Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	0%	5,36%	Rp240.000.000	5,66%	Rp252.000.000	5,95%	Rp264.600.000	6,24%	Rp277.830.000	6,24%
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program Pembangunan di RPKD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan	0 %	100 %	Rp2.650.000.000	100 %	Rp2.650.000.000	100 %	Rp2.650.000.000	100 %	Rp2.650.000.000	100 %
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan	0 %	100 %	Rp700.000.000	100 %	Rp700.000.000	100 %	Rp700.000.000	100 %	Rp700.000.000	100 %
0		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan	0	100%	Rp850.000.000	100%	Rp850.000.000	100%	Rp850.000.000	100%	Rp850.000.000	100%
0		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan	0%	100%	Rp1.100.000.000	100%	Rp700.000.000	100%	Rp700.000.000	100%	Rp700.000.000	100%
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI	Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Dokumen	Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan	0%	75%	Rp550.000.000	75%	Rp550.000.000	80%	Rp550.000.000	80%	Rp0	80%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti											
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan	0 %	90 %	Rp400.000.000	90 %	Rp400.000.000	90 %	Rp400.000.000	90 %	Rp400.000.000	90 %
0		Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	0 %	90 %	Rp400.000.000	90 %	Rp400.000.000	90 %	Rp400.000.000	90 %	Rp400.000.000	90 %
0		Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0	0,00 %	90 %	Rp400.000.000	90 %	Rp400.000.000	90 %	Rp400.000.000	90 %	Rp400.000.000	90 %
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan	Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan	0 %	80 %	Rp3.250.000.000	0,8	Rp2.750.000.000	0,8	Rp2.750.000.000	0,85	Rp2.750.000.000	0,85
0		Persentase Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangkan	Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan	0%	80%	Rp550.000.000	80%	Rp700.000.000	80%	Rp750.000.000	80%	Rp700.000.000	80%
Tujuan : Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat						Rp414.747.402.481		Rp502.603.960.335		Rp549.286.662.877		Rp628.490.996.278	
Indikator Tujuan : Indeks Williamson				0,190	0,184	Rp338.435.978.687	0,181	Rp414.412.336.804	0,178	Rp444.181.467.727	0,176	Rp527.466.379.792	0,176
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur						Rp103.363.386.141		Rp143.188.220.548		Rp188.620.302.741		Rp175.741.069.747	
Indikator Sasaran :Persentase Ketersediaan Infrastruktur						Rp103.363.386.141		Rp143.188.220.548		Rp188.620.302.741		Rp175.741.069.747	
Strategi : Memerataan ketersediaan infrastruktur						Rp103.363.386.141		Rp143.188.220.548		Rp188.620.302.741		Rp175.741.069.747	
Arah Kebijakan : Pemerataan ketersediaan infrastruktur						Rp103.363.386.141		Rp143.188.220.548		Rp188.620.302.741		Rp175.741.069.747	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	- Rasio Jaringan Irigasi	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0 %	26,07%	Rp49.944.834.391	64,74%	Rp79.089.874.923	80,52%	Rp81.789.875.798	100%	Rp89.450.444.410	100%
	0	0	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0%	0.30%	Rp23.037.938.750	0.39%	Rp44.086.732.625	0.51%	Rp58.633.813.943	0.56%	Rp37.249.495.337	0.56%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara n/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0 %	14 %	Rp200.000.000	29 %	Rp350.000.000	29 %	Rp800.000.000	29 %	Rp750.000.000	100%
		Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0%	25%	Rp6.150.000.000	25%	Rp1.050.000.000	25%	Rp24.600.000.000	25%	Rp23.850.000.000	25%
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0%	0%	Rp0	0%	Rp0	0%	Rp0	0%	Rp0	0%
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0 %	25 %	Rp850.000.000	25 %	Rp175.000.000	25 %	Rp250.000.000	25%	Rp350.000.000	0 %
		Persentase Readiness Criteria pembangunan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0%	100%	Rp800.000.000	0%	Rp0	0%	Rp0	0%	Rp0	0%
		Persentase rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0%	0%	Rp0	0%	Rp0	0%	Rp0	10%	Rp500.000.000	10%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0 %	27 %	Rp2.555.000.000	18 %	Rp2.255.000.000	27 %	Rp2.555.000.000	27 %	Rp2.755.000.000	27 %
		Persentase rumah tangga yang besanitasi	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0%	6%	Rp0	6%	Rp0	6%	Rp0	6%	Rp0	6%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0 %	0 %	Rp0	50 %	Rp800.000.000	50 %	Rp800.000.000	0 %	Rp0	0 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Perhubungan	0 %	15,16 %	Rp17.000.000.000	23,21 %	Rp13.774.000.000	30,98 %	Rp14.934.000.000	40,00 %	Rp14.560.000.000	40,00 %
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pelabuhan	Bidang Perhubungan	0 %	6.90 %	Rp2.825.613.000	13.30 %	Rp1.607.613.000	19.09 %	Rp4.257.613.000	25.00 %	Rp6.276.130.000	25.00 %
Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang				0,6	0,65	Rp216.919.176.000	0,70	Rp252.640.498.000	0,75	Rp235.481.856.200	0,80	Rp330.634.363.440	0,80
Indikator Sasaran : Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang				0,6	0,65	Rp216.919.176.000	0,70	Rp252.640.498.000	0,75	Rp235.481.856.200	0,80	Rp330.634.363.440	0,80
Strategi : Meningkatkan ketaatan tata ruang				0,6	0,65	Rp216.919.176.000	0,70	Rp252.640.498.000	0,75	Rp235.481.856.200	0,80	Rp330.634.363.440	0,80
Arah Kebijakan : Peningkatan ketaatan tata ruang				0,6	0,65	Rp216.919.176.000	0,70	Rp252.640.498.000	0,75	Rp235.481.856.200	0,80	Rp330.634.363.440	0,80
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0 %	24 %	Rp1.490.000.000	65 %	Rp18.990.000.000	100 %	Rp4.990.000.000	100 %	Rp990.000.000	100 %
	0	Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0%	0%	Rp0	100%	Rp0	100%	Rp0	100%	Rp0	100%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Luas kawasan yang tertata	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0 %	7 %	Rp6.210.000.000	44 %	Rp6.660.000.000	100 %	Rp8.510.000.000	100 %	Rp610.000.000	100 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0 %	90,13 %	Rp156.176.687.000	91,07 %	Rp172.600.142.000	91,89 %	Rp163.892.707.000	92,83 %	Rp263.552.387.000	92,83 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0 %	27,41 %	Rp2.792.489.000	39,15 %	Rp2.990.356.000	53,79 %	Rp3.289.149.200	70,58 %	Rp3.981.976.440	70,58 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0 %	85 %	Rp6.450.000.000	86 %	Rp3.350.000.000	87 %	Rp2.900.000.000	88 %	Rp2.950.000.000	88 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0 %	33 %	Rp22.425.000.000	20 %	Rp29.075.000.000	27 %	Rp28.725.000.000	20 %	Rp38.725.000.000	20 %

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator/Sasara n/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026	
					2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	
		0	Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0%	25%	Rp0	25%	Rp0	25%	Rp0	25%	Rp0	25%
		0	Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0%	100%	Rp0	100%	Rp0	100%	Rp0	100%	Rp0	100%
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0 %	23 %	Rp2.350.000.000	23 %	Rp2.350.000.000	23 %	Rp6.350.000.000	31 %	Rp2.850.000.000	31 %
		0	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0%	6%	Rp0	6%	Rp0	6%	Rp0	6%	Rp0	6%
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0 %	25 %	Rp14.925.000.000	25 %	Rp14.925.000.000	25 %	Rp14.925.000.000	25 %	Rp14.925.000.000	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat kemampuan menengah yang ditingkatkan	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0 %	25 %	Rp50.000.000	25 %	Rp50.000.000	25 %	Rp50.000.000	25 %	Rp50.000.000	25 %
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		Presentase Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	BIDANG PERTANAHAN	0 %	20 %	Rp500.000.000	30 %	Rp550.000.000	40 %	Rp650.000.000	50 %	Rp700.000.000	50 %
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	BIDANG PERTANAHAN	0 %	15 %	Rp400.000.000	20 %	Rp400.000.000	25 %	Rp400.000.000	30 %	Rp400.000.000	30 %
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	BIDANG PERTANAHAN	0 %	80 %	Rp3.150.000.000	85 %	Rp700.000.000	90 %	Rp800.000.000	100 %	Rp900.000.000	100 %
Sasaran : Menurunnya Resiko Bencana				0,34	0,36	Rp8.812.917.320	0,37	Rp9.186.022.984	0,38	Rp10.479.715.033	0,39	Rp10.783.883.946	0,39	
Indikator Sasaran : Indeks Ketahanan Bencana				0,34	0,36	Rp8.812.917.320	0,37	Rp9.186.022.984	0,38	Rp10.479.715.033	0,39	Rp10.783.883.946	0,39	
Strategi : Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana				0,34	0,36	Rp8.812.917.320	0,37	Rp9.186.022.984	0,38	Rp10.479.715.033	0,39	Rp10.783.883.946	0,39	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
Arah Kebijakan : Peningkatan tata kelola penanggulangan bencana				0,34	0,36	Rp8.812.917.320	0,37	Rp9.186.022.984	0,38	Rp10.479.715.033	0,39	Rp10.783.883.946	0,39
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat	0 %	71,5 %	Rp620.000.000	71,5 %	Rp679.500.000	85,7 %	Rp744.825.000	85,7 %	Rp816.551.250	85,7 %
		0	Persentase Penanganan Pra Bencana	0%	100%	Rp1.730.000.000	100%	Rp1.449.000.000	100%	Rp2.207.325.000	100%	Rp2.002.691.250	100%
		0	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	0%	100%	Rp4.449.300.000	100%	Rp4.855.265.000	100%	Rp5.291.528.250	100%	Rp5.728.604.663	100%
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	BIDANG SOSIAL	0 %	24,56 %	Rp2.013.617.320	25,15 %	Rp2.202.257.984	25,15 %	Rp2.236.036.783	25,15 %	Rp2.236.036.783	100 %
Sasaran : Percepatan pembangunan kawasan perdesaan				0,704	0,721	Rp7.419.499.226	0,730	Rp7.229.095.272	0,739	Rp7.214.593.753	0,748	Rp7.681.062.659	0,748
Indikator Sasaran : Indeks desa membangun				0,704	0,721	Rp7.419.499.226	0,730	Rp7.229.095.272	0,739	Rp7.214.593.753	0,748	Rp7.681.062.659	0,748
Strategi : Meningkatkan Kapasitas Desa dan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi				0,704	0,721	Rp7.419.499.226	0,730	Rp7.229.095.272	0,739	Rp7.214.593.753	0,748	Rp7.681.062.659	0,748
Arah Kebijakan : Peningkatan Kapasitas Desa						Rp4.635.738.971		Rp4.495.190.887		Rp4.386.705.368		Rp4.718.546.910	
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa yang dibina	bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	0 %	25 %	Rp319.927.000	25 %	Rp661.133.000	25 %	Rp681.334.000	25 %	Rp748.473.000	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase kerjasama desa yang dilaksanakan	bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	0 %	17,50 %	Rp302.903.002	22,50 %	Rp337.187.042	27,50 %	Rp346.337.042	32,50 %	Rp363.615.042	100 %
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Dibina	bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	0 %	25 %	Rp4.012.908.969	25 %	Rp3.496.870.845	25 %	Rp3.359.034.326	25 %	Rp3.606.458.868	100 %
Arah Kebijakan : Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat pada kawasan transmigrasi						Rp2.783.760.255		Rp2.733.904.385		Rp2.827.888.385		Rp2.962.515.749	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang dikembangkan	Bidang Transmigrasi	0 Desa	1 Desa	Rp240.000.000	1 Desa	Rp280.000.000	1 Desa	Rp280.000.000	1 Desa	Rp280.000.000	1 Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	0 %	25 %	Rp2.543.760.255	25 %	Rp2.453.904.385	25 %	Rp2.547.888.385	25 %	Rp2.682.515.749	100 %
Sasaran :Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk				1,93	1,79	Rp1.921.000.000	1,74	Rp2.168.500.000	1,70	Rp2.385.000.000	1,68	Rp2.626.000.000	1,68
Indikator Sasaran : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)				1,93	1,79	Rp1.921.000.000	1,74	Rp2.168.500.000	1,70	Rp2.385.000.000	1,68	Rp2.626.000.000	1,68

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	
Strategi : Meningkatkan Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang			1,93	1,79	Rp1.921.000.000	1,74	Rp2.168.500.000	1,70	Rp2.385.000.000	1,68	Rp2.626.000.000	1,68	
Arah Kebijakan : Pengendalian tingkat kelahiran Penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang			1,93	1,79	Rp1.921.000.000	1,74	Rp2.168.500.000	1,70	Rp2.385.000.000	1,68	Rp2.626.000.000	1,68	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 persen	88.07	Rp670.000.000	89.8 persen	Rp759.000.000	91.53	Rp835.000.000	93.27 persen	Rp919.000.000	93.27 persen
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan)	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 persen	86 persen	Rp670.000.000	89.5 persen	Rp759.000.000	93 persen	Rp835.000.000	96.50 persen	Rp919.000.000	96.50 persen
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan perjanjian kerjasama	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 Persen	31.43 Persen	Rp520.000.000	37.14 Persen	Rp583.000.000	42.86 Persen	Rp640.000.000	48.57 Persen	Rp705.000.000	48.57 Persen
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyediaan penyalangan data kependudukan tingkat provinsi	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 persen	100 persen	Rp61.000.000	100 persen	Rp67.500.000	100 persen	Rp75.000.000	100 persen	Rp83.000.000	100 persen
Indikator Tujuan : Indeks Gini				0,247	0,239	Rp76.311.423.794	0,229	Rp88.191.623.531	0,224	Rp105.105.195.150	0,217	Rp101.024.616.486	0,217
Sasaran : Menurunkan Tingkat Kemiskinan				4,67	4,30	Rp17.275.815.719	4,20	Rp19.391.623.531	4,10	Rp20.739.445.150	4,01	Rp21.540.653.986	4,01
Indikator Sasaran : Persentase Angka Kemiskinan				4,67	4,30	Rp17.275.815.719	4,20	Rp19.391.623.531	4,10	Rp20.739.445.150	4,01	Rp21.540.653.986	4,01
Strategi : Meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, serta Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin					Rp17.275.815.719		Rp19.391.623.531		Rp20.739.445.150		Rp21.540.653.986		
Arah Kebijakan : Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas					Rp6.676.803.411		Rp10.101.452.923		Rp11.396.414.066		Rp12.126.191.172		
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani	BIDANG SOSIAL	0 %	11,90 %	Rp78.615.000	23,81 %	Rp96.935.000	28,57 %	Rp115.145.000	35,71 %	Rp124.148.000	100 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti	BIDANG SOSIAL	0 %	22,36 %	Rp2.294.406.185	22,58 %	Rp2.257.864.490	27,00 %	Rp2.479.898.109	28,05 %	Rp2.810.740.185	100 %
	0	Persentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Bina Laras Hijrah	BIDANG SOSIAL	0%	10,00%	Rp1.095.480.726	30,00%	Rp4.222.170.033	30,00%	Rp4.251.535.017	30,00%	Rp4.238.065.047	100%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	0	Persentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun	BIDANG SOSIAL	0%	21,43%	Rp3.208.301.500	21,43%	Rp3.524.483.400	28,57%	Rp4.549.835.940	28,57%	Rp4.953.237.940	100%
Arah Kebijakan : Pengembangan sistem pemberdayaan, perlindungan dan		jaminan sosial				Rp7.238.504.534		Rp7.095.508.059		Rp7.152.385.329		Rp7.193.842.059	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	BIDANG SOSIAL	0 %	28,11 %	Rp6.330.502.213	25,28 %	Rp6.289.834.738	23,70 %	Rp6.334.874.008	22,91 %	Rp6.351.743.738	100 %
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola	BIDANG SOSIAL	0 %	100 %	Rp908.002.321	100 %	Rp805.673.321	100 %	Rp817.511.321	100 %	Rp842.098.321	100 %
Arah Kebijakan : Peningkatan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin						Rp3.360.507.774		Rp2.194.662.549		Rp2.190.645.755		Rp2.220.620.755	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS/PSKS yg terberdayakan	BIDANG SOSIAL	0 %	100 %	Rp3.360.507.774	100 %	Rp2.194.662.549	100 %	Rp2.190.645.755	100 %	Rp2.220.620.755	100 %
Sasaran : Meningkatkan Kesempatan Kerja				5,03	4,47	Rp59.035.608.075	4,39	Rp68.800.000.000	4,26	Rp84.365.750.000	4,19	Rp79.483.962.500	4,19
Indikator Sasaran : Tingkat Pengangguran Terbuka				5,03	4,47	Rp59.035.608.075	4,39	Rp68.800.000.000	4,26	Rp84.365.750.000	4,19	Rp79.483.962.500	4,19
Strategi : meningkatkan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja, kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG), kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan Kesejahteraan Tenaga Kerja						Rp59.035.608.075		Rp68.800.000.000		Rp84.365.750.000		Rp79.483.962.500	
Arah Kebijakan : Peningkatan akses terhadap penciptaan lapangan kesempatan kerja						Rp13.355.000.000		Rp13.990.000.000		Rp15.248.000.000		Rp16.421.300.000	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan kab/kota	Bidang Tenaga Kerja	0 %	100 %	Rp200.000.000	100 %	Rp250.000.000	100 %	Rp300.000.000	100 %	Rp350.000.000	100 %
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten	Bidang Tenaga Kerja	0 %	5 %	Rp5.000.000.000	5,25 %	Rp5.000.000.000	5,50 %	Rp5.000.000.000	5,75 %	Rp5.000.000.000	5,75 %
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenga Kerja Yang Ditempatkan	Bidang Tenaga Kerja	0 %	5 %	Rp905.000.000	5 %	Rp755.000.000	5 %	Rp810.000.000	5 %	Rp880.000.000	5 %
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang Difasilitasi	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 %	2 %	Rp150.000.000	3 %	Rp200.000.000	3 %	Rp300.000.000	5 %	Rp350.000.000	5 %
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 %	23 %	Rp275.000.000	20 %	Rp330.000.000	20 %	Rp375.000.000	27 %	Rp445.000.000	27 %
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 %	67 %	Rp150.000.000	67 %	Rp200.000.000	67 %	Rp250.000.000	67 %	Rp300.000.000	67 %
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi, UKM yang Terlatih (BALATKOP KUKM)	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 %	0,27%	Rp625.000.000	0,28%	Rp625.000.000	0,29%	Rp650.000.000	0,30%	Rp700.000.000	0,30%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberdayakan	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 %	5 %	Rp750.000.000	7 %	Rp800.000.000	9 %	Rp1.150.000.000	11 %	Rp1.375.000.000	11 %
	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 %	0,47 %	Rp3.000.000.000	0,51 %	Rp3.300.000.000	0,56 %	Rp3.630.000.000	0,62 %	Rp3.960.000.000	0,62 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang Meningkat Menjadi Usaha Menengah	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 %	0,10 %	Rp2.300.000.000	0,11 %	Rp2.530.000.000	0,12 %	Rp2.783.000.000	0,13 %	Rp3.061.300.000	0,13 %
Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan anak serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender (KKG)						Rp1.640.000.000		Rp1.775.000.000		Rp1.985.000.000		Rp2.175.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0 persen	57.14 persen	Rp645.000.000	71.42 persen	Rp640.000.000	85.71 persen	Rp720.000.000	100 persen	Rp790.000.000	100 persen
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0 persen	100 persen	Rp445.000.000	100 persen	Rp505.000.000	100 persen	Rp555.000.000	100 persen	Rp595.000.000	100 persen
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase pembinaan kampung KB	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0 persen	50 persen	Rp550.000.000	63 persen	Rp630.000.000	72 persen	Rp710.000.000	84 persen	Rp790.000.000	84 persen
Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya						Rp43.590.608.075		Rp52.435.000.000		Rp66.482.750.000		Rp60.187.662.500	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0 persen	55.56 persen	Rp37.490.608.075	61.11 persen	Rp45.450.000.000	63.89 persen	Rp58.450.000.000	69.44 persen	Rp50.950.000.000	69.44 persen
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0 organisasi	52.24 persen	Rp1.050.000.000	55.22	Rp1.207.500.000	58.21	Rp1.388.625.000	61.19	Rp1.596.918.750	61.19
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase tingkat keaktifan Organisasi Pramuka	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0 persen	19.51 persen	Rp2.970.000.000	19.51 persen	Rp3.415.500.000	19.51 persen	Rp3.927.825.000	19.51 persen	Rp4.516.998.750	19.51 persen
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Yang dibina	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0 persen	0.85 persen	Rp2.080.000.000	1.06 persen	Rp2.362.000.000	1.16 persen	Rp2.716.300.000	1.26 persen	Rp3.123.745.000	1.26 persen
Arah Kebijakan : Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja						Rp450.000.000		Rp600.000.000		Rp650.000.000		Rp700.000.000	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator/Sasara n/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan Norma Ketenagakerjaan	Bidang Tenaga Kerja	0 %	15 %	Rp450.000.000	17,5 %	Rp600.000.000	20 %	Rp650.000.000	22,5 %	Rp700.000.000	22,5 %
Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam				72,05	75,43	Rp22.905.849.616	75,84	Rp31.331.123.051	76,70	Rp41.045.382.486	77,50	Rp41.575.496.220	77,50
Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				72,05	75,43	Rp22.905.849.616	75,84	Rp31.331.123.051	76,70	Rp41.045.382.486	77,50	Rp41.575.496.220	77,50
Sasaran : Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup				72,05	75,43	Rp22.905.849.616	75,84	Rp31.331.123.051	76,70	Rp41.045.382.486	77,50	Rp41.575.496.220	77,50
Indikator Sasaran :Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				72,05	75,43	Rp22.905.849.616	75,84	Rp31.331.123.051	76,70	Rp41.045.382.486	77,50	Rp41.575.496.220	77,50
Strategi :Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola kehutanan						Rp22.905.849.616		Rp31.331.123.051		Rp41.045.382.486		Rp41.575.496.220	
Arah Kebijakan : Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						Rp12.559.204.024		Rp20.886.874.426		Rp30.805.255.548		Rp30.923.655.548	
	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Bidang Lingkungan Hidup	0 %	100 %	Rp1.200.000.000	100 %	Rp1.000.000.000	100 %	Rp475.000.000	100 %	Rp550.000.000	100 %
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengujian Sampel Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani (Laboratorium Lingkungan)	Bidang Lingkungan Hidup	0 %	90 %	Rp4.334.204.024	90 %	Rp4.767.624.426	90 %	Rp5.006.005.548	90 %	Rp5.006.005.548	90 %
		Persentase Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan	Bidang Lingkungan Hidup	0%	100%	Rp425.000.000	100%	Rp294.250.000	100%	Rp514.250.000	100%	Rp564.650.000	100%
		Persentase Titik Sampling Uji Kualitas Lingkungan	Bidang Lingkungan Hidup	0%	62%	Rp500.000.000	65%	Rp510.000.000	67%	Rp520.000.000	70%	Rp530.000.000	70%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan	Bidang Lingkungan Hidup	0 %	100 %	Rp450.000.000	100 %	Rp460.000.000	100 %	Rp120.000.000	100 %	Rp133.000.000	100 %
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Bidang Lingkungan Hidup	0 %	100 %	Rp450.000.000	100 %	Rp575.000.000	100 %	Rp700.000.000	100 %	Rp700.000.000	100 %
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN	Persentase Ketaatan Usaha/ Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan	Bidang Lingkungan Hidup	0 %	60 %	Rp675.000.000	65 %	Rp740.000.000	70 %	Rp805.000.000	75 %	Rp875.000.000	75 %

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara n/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	PENGLOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)											
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase penyusunan Rekomendasi pengakuan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Bidang Lingkungan Hidup	0 %	100 %	Rp225.000.000	100 %	Rp240.000.000	100 %	Rp265.000.000	100 %	Rp265.000.000	100 %
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok swadaya masyarakat yang aktif dan mandiri	Bidang Lingkungan Hidup	0 %	60 %	Rp800.000.000	70 %	Rp700.000.000	80 %	Rp900.000.000	90 %	Rp1.000.000.000	90 %
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan	Bidang Lingkungan Hidup	0 %	75 %	Rp200.000.000	80 %	Rp200.000.000	85 %	Rp200.000.000	90 %	Rp200.000.000	90 %
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diverifikasi	Bidang Lingkungan Hidup	0 %	100 %	Rp200.000.000	100 %	Rp200.000.000	100 %	Rp200.000.000	100 %	Rp200.000.000	100 %
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan di TPA Regional	Bidang Lingkungan Hidup	0 %	0 %	Rp3.100.000.000	5 %	Rp11.200.000.000	19 %	Rp21.100.000.000	15 %	Rp20.900.000.000	15 %
Arah Kebijakan : Peningkatan tata		kelola kehutanan				Rp10.346.645.592		Rp10.444.248.625		Rp10.240.126.938		Rp10.651.840.672	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (DLHK)	Bidang Kehutanan	0 %	20 %	Rp1.700.000.000	20 %	Rp1.800.000.000	20 %	Rp1.900.000.000	20 %	Rp2.000.000.000	20 %
	0	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Belantu Mendanau)	Bidang Kehutanan	0%	20%	Rp50.000.000	20%	Rp75.000.000	20%	Rp75.000.000	20%	Rp75.000.000	20%
	0	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Bubus Panca)	Bidang Kehutanan	0%	20%	Rp62.300.000	20%	Rp76.950.000	20%	Rp91.610.000	20%	Rp100.550.000	20%
	0	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Gunung Duren)	Bidang Kehutanan	0%	20%	Rp50.000.000	20%	Rp50.000.000	20%	Rp50.000.000	20%	Rp50.000.000	20%
	0	Persentase kerusakan hutan	Bidang Kehutanan	0%	20%	Rp90.400.000	20%	Rp103.000.000	20%	Rp115.000.000	20%	Rp128.900.000	20%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasara n/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Jebu Bembang Antan)											
	0	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Muntai Palas)	Bidang Kehutanan	0%	20%	Rp50.000.000	20%	Rp75.000.000	20%	Rp75.000.000	20%	Rp75.000.000	20%
	0	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Rambat Menduyung)	Bidang Kehutanan	0%	20%	Rp90.400.000	20%	Rp103.000.000	20%	Rp115.000.000	20%	Rp128.900.000	20%
	0	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin)	Bidang Kehutanan	0%	20%	Rp53.760.000	20%	Rp53.760.000	20%	Rp53.760.000	20%	Rp53.760.000	20%
	0	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (UPTD KPH Sungai Sembulan)	Bidang Kehutanan	0%	20%	Rp50.000.000	20%	Rp50.000.000	20%	Rp50.000.000	20%	Rp50.000.000	20%
	0	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (DLHK)	Bidang Kehutanan	0%	13.17 %	Rp250.000.000	13.17 %	Rp250.000.000	13.17 %	Rp250.000.000	13.17 %	Rp250.000.000	13.17 %
	0	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Belantu Mendanau)	Bidang Kehutanan	0%	13.17 %	Rp45.000.000	13.17 %	Rp45.000.000	13.17 %	Rp45.000.000	13.17 %	Rp45.000.000	13.17 %
	0	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Bubus Panca)	Bidang Kehutanan	0%	13.17 %	Rp133.500.000	13.17 %	Rp133.500.000	13.17 %	Rp133.500.000	13.17 %	Rp133.500.000	13.17 %
	0	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Gunung Duren)	Bidang Kehutanan	0%	13.17 %	Rp50.000.000	13.17 %	Rp50.000.000	13.17 %	Rp50.000.000	13.17 %	Rp50.000.000	13.17 %
	0	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Jebu Bembang Antan)	Bidang Kehutanan	0%	13.17 %	Rp133.500.000	13.17 %	Rp133.500.000	13.17 %	Rp133.500.000	13.17 %	Rp133.500.000	13.17 %
	0	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Muntai Palas)	Bidang Kehutanan	0%	13.17 %	Rp50.000.000	13.17 %	Rp50.000.000	13.17 %	Rp50.000.000	13.17 %	Rp50.000.000	13.17 %
	0	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD	Bidang Kehutanan	0%	13.17 %	Rp133.500.000	13.17 %	Rp133.500.000	13.17 %	Rp133.500.000	13.17 %	Rp133.500.000	13.17 %

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		KPH Rambat Menduyung)											
	0	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sigambir KotaWaringin)	Bidang Kehutanan	0%	13.17 %	Rp25.000.000	13.17 %	Rp25.000.000	13.17 %	Rp25.000.000	13.17 %	Rp25.000.000	13.17 %
	0	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (UPTD KPH Sungai Sembulan)	Bidang Kehutanan	0%	13.17 %	Rp45.000.000	13.17 %	Rp45.000.000	13.17 %	Rp45.000.000	13.17 %	Rp45.000.000	13.17 %
	0	Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (DLHK)	Bidang Kehutanan	0%	35.68 %	Rp2.750.000.000	35.65 %	Rp2.800.000.000	35.61 %	Rp2.350.000.000	35.41 %	Rp2.450.000.000	35.41 %
	0	Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Belantu Mendanau)	Bidang Kehutanan	0%	35.68 %	Rp130.000.000	35.65 %	Rp130.000.000	35.61 %	Rp130.000.000	35.41 %	Rp130.000.000	35.41 %
	0	Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Bubus Panca)	Bidang Kehutanan	0%	35.68 %	Rp55.000.000	35.65 %	Rp59.500.000	35.61 %	Rp67.500.000	35.41 %	Rp72.575.000	35.41 %
	0	Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Gunung Duren)	Bidang Kehutanan	0%	35.68 %	Rp350.000.000	35.65 %	Rp350.000.000	35.61 %	Rp350.000.000	35.41 %	Rp350.000.000	35.41 %
	0	Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Jebu Bembang Antan)	Bidang Kehutanan	0%	35.68 %	Rp43.260.000	35.65 %	Rp47.524.000	35.61 %	Rp52.513.000	35.41 %	Rp57.350.000	35.41 %
	0	Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Muntai Palas)	Bidang Kehutanan	0%	35.68 %	Rp75.000.000	35.65 %	Rp75.000.000	35.61 %	Rp75.000.000	35.41 %	Rp75.000.000	35.41 %
	0	Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Rambat Menduyung)	Bidang Kehutanan	0%	35.68 %	Rp43.260.000	36.65 %	Rp47.524.000	35.61 %	Rp52.513.000	35.41 %	Rp57.350.000	35.41 %
	0	Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin)	Bidang Kehutanan	0%	35.68 %	Rp115.000.000	35.65 %	Rp115.000.000	35.61 %	Rp115.000.000	35.41 %	Rp115.000.000	35.41 %
	0	Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan (UPTD KPH Sungai Sembulan)	Bidang Kehutanan	0%	35.68 %	Rp330.000.000	35.65 %	Rp330.000.000	35.61 %	Rp330.000.000	35.41 %	Rp330.000.000	35.41 %

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/IndikatorSasara n/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (DLHK)	Bidang Kehutanan	0 %	100 %	Rp978.000.000	100 %	Rp978.000.000	100 %	Rp978.000.000	100 %	Rp978.000.000	100 %
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (DLHK)	Bidang Kehutanan	0 %	30 %	Rp330.000.000	40 %	Rp360.000.000	45 %	Rp350.000.000	50 %	Rp360.000.000	50 %
		Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Belantu Mendanau)	Bidang Kehutanan	0%	30%	Rp74.000.000	40%	Rp74.000.000	45%	Rp76.000.000	50%	Rp114.500.000	50%
		Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Bubus Panca)	Bidang Kehutanan	0%	30%	Rp59.120.000	40%	Rp65.450.000	45%	Rp72.100.000	50%	Rp79.300.000	50%
		Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Gunung Duren)	Bidang Kehutanan	0%	30%	Rp144.000.000	40%	Rp144.000.000	45%	Rp144.000.000	50%	Rp144.000.000	50%
		Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Muntai Palas)	Bidang Kehutanan	0%	30%	Rp256.205.592	40%	Rp292.340.625	45%	Rp358.510.938	50%	Rp436.263.672	50%
		Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sigambir Kotawaringin)	Bidang Kehutanan	0%	30%	Rp37.200.000	40%	Rp37.200.000	45%	Rp37.200.000	50%	Rp37.200.000	50%
		Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPTD KPH Sungai Sembulan)	Bidang Kehutanan	0%	30%	Rp44.000.000	40%	Rp44.000.000	45%	Rp44.000.000	50%	Rp44.000.000	50%
		Peningkatan akses legal kepada	Bidang Kehutanan	0%	30%	Rp59.120.000	40%	Rp65.450.000	45%	Rp72.100.000	50%	Rp79.300.000	50%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Tujuan/Indikator Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran/Program Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Program/outcome)	Bidang Urusan	Kondisi Kinerja Awal RPD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD Tahun 2026
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Jebu Bembang Antan)											
	0	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (UPT KPH Rambat Menduyung)	Bidang Kehutanan	0%	30%	Rp161.120.000	40%	Rp177.050.000	45%	Rp194.820.000	50%	Rp214.392.000	50%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase luas DAS yang dikelola (DLHK)	Bidang Kehutanan	0 %	9,13 %	Rp1.250.000.000	9,13 %	Rp1.000.000.000	9,13 %	Rp1.000.000.000	9,13 %	Rp1.000.000.000	9,13 %

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan diperlukan, agar dapat memastikan kemampuan riil keuangan daerah, untuk membiayai program jangka menengah RPD 2023-2026 (selama 4 tahun). Untuk itu dilakukan dulu analisis keuangan daerah, karena dengan melakukan analisis keuangan daerah akan diperoleh: (1) Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dan (2) Kerangka pendanaan dan pedoman indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan daerah.

7.1. Analisis Keuangan Daerah

Keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah ini dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu diwujudkan dalam APBD, sehingga analisa keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Keuangan daerah dalam APBD terdiri dari 3 (tiga) elemen utama, yaitu Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan.

7.1.1. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer (dana perimbangan dan lainnya) serta lain-lain pendapatan yang sah (meliputi : pendapatan hibah, Dana Insentif Daerah dan sebagainya).

Selama lima tahun sebelumnya (2018-2022) realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel VII.1, berikut ini:

Tabel VII.1

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Daerah	850,441,774,831.35	826,701,095,332.07	683,432,674,809.81	896,982,419,466.98	814,514,935,188.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	787,235,420,038.83	760,997,424,482.42	613,615,822,923.72	817,141,235,274.58	698,200,594,255.00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7,613,352,047.00	8,731,932,753.00	6,513,383,818.00	5,947,140,845.00	21,682,741,400.00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,114,092,291.88	5,442,309,381.71	5,471,185,541.79	5,714,380,624.89	5,500,000,000.00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	50,478,910,453.64	51,529,428,714.94	57,832,282,526.30	68,179,662,722.51	89,131,599,533.00
	PENDAPATAN TRANSFER					
1.2	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1,694,218,759,243.00	1,742,433,563,849.00	1,604,813,796,610.00	1,712,417,278,263.00	1,113,021,097,000.00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	215,555,879,603.00	43,368,024,475.00	32,807,368,096.00	241,681,854,342.00	-
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	161,046,043,231.00	84,352,916,650.00	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,018,435,174,809.00	1,046,862,622,000.00	942,308,451,000.00	939,550,039,000.00	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	460,227,704,831.00	491,156,874,143.00	545,345,060,864.00	531,185,384,921.00	-
1.3	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	-	25,485,802,000.00	-	-	-
1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Penyesuaian	-	25,485,802,000.00	-	-	-
1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	12,317,177,850.00	99,585,198,474.00	117,013,835,678.00	140,299,774,103.00	-
1.4.1	Pendapatan Hibah	-	99,585,198,474.00	64,193,790,678.00	83,860,777,103.00	-
1.4.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.4.3	Pendapatan Lainnya (Sumbangan Pihak Ketiga)	-	-	-	-	-

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.4.5	Dana Intensif Daerah	-	-	52,820,045,000.00	56,438,997,000.00	-
1.4.5	Sumbangan Pihak Ketiga	12,317,177,850.00	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah		2,556,977,711,924.35	2,694,205,659,655.07	2,405,260,307,097.81	2,749,699,471,832.98	1,927,536,032,188.00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Tabel VII.1 merupakan data tentang realisasi pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp2.556.977.711.924,35 dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp850.441.774.831,35. Kemudian pada tahun 2019, pendapatan daerah menjadi Rp2.694.205.659.655,07 atau naik sebesar Rp137.227.947.730,72 atau tumbuh sebesar 5,36%.

Pada tahun 2020, pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan sebesar Rp288.945.352.557,26 atau minus 10,72% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terkait dengan kondisi pandemik covid-19 yang ikut mengganggu keberlangsungan perekonomian masyarakat tidak hanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetapi melanda seluruh provinsi di Indonesia maupun seluruh belahan dunia. Namun pada tahun 2021, pendapatan ekonomi cenderung membaik dengan total Rp2.749.699.471.832,98 atau naik 14,32% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini merupakan dampak dari kenaikan harga beberapa komoditas unggulan Bangka Belitung seperti timah, sawit dan naiknya angka produksi dari sektor perikanan khususnya udang vaname. Sedangkan untuk realisasi tahun 2022 merupakan alokasi anggaran tahun berjalan dengan angka target dan untuk komposisi pendapatan transfer belum mendapatkan alokasi anggaran dari pusat.

Berdasarkan pada tabel VII.1, pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum dengan rata-rata sebesar Rp986.789.071.702,25. Dimana jika dilihat laju pertumbuhannya dari tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat sebesar 2,79%, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -9,99% serta -0,29% untuk tahun 2021. Penurunan DAU untuk 2 tahun terakhir ini merupakan dampak mewabahnya pandemi Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia, sehingga turut mempengaruhi kinerja penyaluran TKDD di daerah.

Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan dari Rp460.227.704.831,00 pada tahun 2018 menjadi Rp531.185.384.921,00 atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,05 persen selama 3 tahun. Rata-rata pendapatan dari DAK selama 4 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp506.978.756.189,75

Setelah dilakukan analisis realisasi pendapatan selama lima tahun sebelumnya (2018-2021), termasuk analisis perkembangan neraca daerah serta peluang-peluang optimalisasi penerimaan di masa datang, maka disusunlah proyeksi pendapatan daerah lima tahun kedepan seperti pada tabel VII.2 berikut ini.

Tabel VII.2
Proyeksi dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2026

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Target (Rp)	Target/ Proyeksi (Rp)			
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENDAPATAN								
1.1	Pendapatan Asli Daerah	826.701.095.332,07	683.432.674.809,81	896.982.419.466,98	814.514.935.188,00	1.169.791.402.466,32	1.452.179.731.068,50	1.521.090.922.022,67	1.598.778.768.591,84
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	760.997.424.482,42	613.615.822.923,72	817.141.235.274,58	698.200.594.255,00	1.085.347.058.546,20	1.363.132.279.094,39	1.427.440.272.983,71	1.500.525.011.498,91
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.731.932.753,00	6.513.383.818,00	5.947.140.845,00	21.682.741.400,00	6.290.017.012,35	6.632.889.330,68	6.975.768.279,17	7.318.640.597,49
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.442.309.381,71	5.471.185.541,79	5.714.380.624,89	5.500.000.000,00	6.043.837.245,90	6.373.290.168,52	6.702.749.461,82	7.032.202.384,44
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	51.529.428.714,94	57.832.282.526,30	68.179.662.722,51	89.131.599.533,00	72.110.489.661,87	76.041.272.474,91	79.972.131.297,97	83.902.914.111,00
	PENDAPATAN TRANSFER								
1.2	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.742.433.563.849,00	1.604.813.796.610,00	1.712.417.278.263,00	-	2.332.249.206.449,68	1.980.591.201.055,50	1.904.564.494.248,33	2.146.582.496.819,16
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	43.368.024.475,00	32.807.368.096,00	241.681.854.342,00	-	259.099.170.834,67	267.807.829.081,00	276.516.487.327,33	285.225.145.573,67
1.2.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	161.046.043.231,00	84.352.916.650,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.046.862.622.000,00	942.308.451.000,00	939.550.039.000,00	-	1.246.862.622.000,00	1.131.597.987.053,50	1.046.862.622.000,00	1.146.862.622.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	491.156.874.143,00	545.345.060.864,00	531.185.384.921,00	-	826.287.413.615,01	581.185.384.921,00	581.185.384.921,00	714.494.729.245,49
1.3	Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	25.485.802.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Penyesuaian	25.485.802.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	99.585.198.474,00	117.013.835.678,00	140.299.774.103,00	-	56.438.997.000,00	56.438.997.000,00	56.438.997.000,00	56.438.997.000,00
1.4.1	Pendapatan Hibah	99.585.198.474,00	64.193.790.678,00	83.860.777.103,00	-	-	-	-	-
1.4.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Pendapatan Lainnya (Sumbangan Pihak Ketiga)	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Target (Rp)	Target/ Proyeksi (Rp)			
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5	Dana Intensif Daerah	-	52.820.045.000,00	56.438.997.000,00	-	56.438.997.000,00	56.438.997.000,00	56.438.997.000,00	56.438.997.000,00
1.4.5	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah		2.694.205.659.655,07	2.405.260.307.097,81	2.749.699.471.832,98	814.514.935.188,00	3.558.479.605.916,00	3.489.209.929.124,00	3.482.094.413.271,00	3.801.800.262.411,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Hasil Analisis, 2022

Tabel VII.2 menunjukkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019-2026. Secara keseluruhan, pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Namun pada rentang waktu 2019 ke 2020 pendapatan daerah sempat mengalami penurunan sebesar Rp288.945.352.557,26 atau 10,72% akibat krisis ekonomi sebagai dampak covid-19. Setelah itu pada tahun 2021, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp344.439.164.735,17 atau 14,32% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diproyeksikan mencapai Rp2.892.283.174.755,67 dengan asumsi pendapatan transfer pemerintah pusat - dana perimbangan sama seperti pada tahun 2019 yaitu sebelum adanya pandemic covid-19. Dan pada tahun 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat hingga Rp3.073.552.149.494,67 atau naik Rp181.268.974.739,003 (6,27%) dari tahun 2023.

Selain itu, pada tabel VII.2 ini menunjukkan beberapa item yang menjadi sumber pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019-2026. Transfer pemerintah pusat - dana perimbangan masih menjadi sumber pendapatan yang besar bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2019, transfer pemerintah pusat - dana perimbangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp1.742.433.563.849,00. Kemudian pada tahun 2020, dana transfer ini turun 7,9% menjadi Rp1.604.813.796.610,00 akibat adanya penurunan penerimaan dana bagi hasil (DBH). Namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp1.712.417.278.263,00.

Sektor kedua yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pajak daerah. Pada tahun 2019, pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp760.997.424.482,42. Pada tahun 2020, pajak daerah mengalami penurunan sebesar Rp 143.268.420.522,26 dari tahun 2019 namun mengalami kenaikan sebesar Rp213.549.744.657,17 pada tahun 2021. Kenaikan pajak daerah yang meningkat ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam pemutihan pajak kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua dan empat. Pada tahun 2023, diproyeksikan pajak daerah naik dari realisasi tahun 2021 dengan analisis berdasarkan pada realisasi kenaikan pada tahun 2019-2020. Diproyeksikan rata-rata pertumbuhan pajak daerah naik sebesar 5,12 persen dari tahun 2023-2026. Pada tahun 2023 pajak daerah diproyeksikan sebesar Rp857.765.929.541,01 dan pada akhir periode perencanaan yaitu tahun 2026 naik menjadi Rp996.274.100.141,13.

7.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah dan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lima tahun (2018-2022) sebelumnya, perkembangan dapat dilihat data-datanya pada Tabel VII.3 berikut ini :

Tabel VII.3
Realisasi Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018-2022

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
2018	2.364.345.563.586,80
2019	2.776.076.365.844,58
2020	2.575.170.436.359,30
2021	2.463.804.285.970,62
2022	2.079.664.741.774,00
Jumlah	12.259.061.393.535,30

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Dari tabel VII.3 menunjukkan bahwa belanja daerah dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Belanja daerah merupakan pembiayaan daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, transfer/ bagi hasil pendapatan ke Kabupaten/Kota serta transfer bantuan keuangan. Pada tahun 2018, belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp2.364.345.563.586,80 dan naik sebesar Rp411.730.802.257.779,00 pada tahun 2019. Namun dalam rentang waktu 2020-2022 mengalami penurunan sebesar Rp495.505.694.585,30 atau 19,24 persen. Hal ini tentunya tidak lepas dari adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan adanya penghematan belanja daerah dan lebih diprioritaskan untuk sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi.

7.2. Kerangka Pendanaan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan memperhatikan pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik akan mewujudkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Saat ini telah ditetapkan kebijakan *money follow priority program*, bukan lagi *money follow function*.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas:

- (1) **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yang terdiri dari: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) **Pendapatan Transfer** yang terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang meliputi: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
 - b. Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya yang meliputi: Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian;

- (3) **Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah** meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, pendapatan lainnya (sumbangan pihak ketiga), dana intensif daerah dan sumbangan pihak ketiga.

Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2023–2026 diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan yang berlaku; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan asas pemerataan pembangunan; dan (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang taat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 5 jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya oleh kabupaten/kota.

7.2.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Strategi belanja daerah tahun 2023-2026 diarahkan untuk mendukung:

- a. Pencapaian pembangunan nasional 2015-2019 dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional (NAWACITA) dan RPJMN 2020-2024;
- b. Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
- c. Peningkatan sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur;
- d. Pemulihan ekonomi Pasca Covid-19

Untuk itu, kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2023-2026 dilakukan melalui

pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, ekonomis, efisien dan efektif, yaitu:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam dokumen RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
2. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pelaksanaan urusan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
9. Penurunan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
10. Dalam mendukung pengembangan aktivitas pembangunan ekonomi di pedesaan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
11. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 30%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
12. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan

memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;

13. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan;
14. Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB);
15. Kebijakan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemulihan ekonomi pasca covid-19;
 - d. Mengalokasikan belanja modal yang digunakan untuk pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud atau barang inventaris dengan nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (1 tahun), termasuk di dalamnya menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset;
 - e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
16. Kebijakan untuk dana transfer meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi provinsi yang bersifat khusus dari Provinsi. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan pembiayaan melalui PT. SMI melalui program pinjaman dari dana pemulihan ekonomi daerah (PEN) sebesar Rp285.495.364.123,00. Pembiayaan ini digunakan untuk beberapa program prioritas daerah yang diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;
3. Penyertaan modal disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Dengan adanya penerimaan pinjaman daerah dari PT. SMI pada tahun 2021, tentunya menambah kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pembayaran pokok pinjaman selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Besaran pokok pinjaman yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp83.193.051.192,00 per tahun.

Pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 sebagaimana ditampilkan pada Tabel VII.4.

Tabel VII.4
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Target Tahun 2022 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	BELANJA	1,932,426,946,667.40	2,264,022,634,746.31	2,203,628,597,880.09	2,113,884,194,466.96	1,712,921,584,608.00	-2.14
1.1	BELANJA OPERASI	1,616,969,356,272.76	1,822,821,431,195.45	1,741,021,626,249.62	1,680,438,759,428.43	1,517,044,854,464.00	-1.24
1.1.1	Belanja Pegawai	696,675,458,111.62	834,688,294,949.01	943,695,426,476.30	798,499,106,162.01	837,915,921,782.00	5.61
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	651,856,375,641.14	701,916,523,186.44	478,541,675,862.32	589,983,440,899.42	605,969,276,138.00	0.46
1.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0.00
1.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0.00
1.1.5	Belanja Hibah	267,958,447,520.00	285,775,098,060.00	318,197,523,911.00	290,268,684,767.00	70,584,818,544.00	-16.62
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	479,075,000.00	441,515,000.00	587,000,000.00	1,687,527,600.00	2,574,838,000.00	66.29
1.2	BELANJA MODAL	315,397,833,094.64	441,201,203,550.86	436,502,107,450.47	427,479,251,649.53	166,529,305,672.00	-6.07
1.2.1	Belanja Tanah	-	-	14,933,500.00	-	499,390,000.00	0.00
1.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	96,024,460,290.15	105,556,804,293.20	68,423,845,127.20	76,860,213,542.00	21.77
1.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	82,415,022,888.98	85,735,352,027.00	66,752,851,728.39	938,707,000.00	-4.18
1.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	249,940,059,305.00	233,356,140,924.36	268,708,378,073.94	88,053,449,626.00	10.32
1.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	12,821,661,066.73	11,838,876,705.91	23,594,176,720.00	177,545,504.00	23.10
1.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	0.00
1.3	BELANJA TAK TERDUGA	59,757,300.00	-	26,104,864,180.00	5,966,183,389.00	29,347,424,472.00	78.69
1.3.1	Belanja Tak Terduga	59,757,300.00	-	26,104,864,180.00	5,966,183,389.00	29,347,424,472.00	78.69
II.	TRANSFER	431,918,616,919.40	512,053,731,098.27	371,541,838,479.21	349,920,091,503.66	366,743,157,166.00	-2.47
2.1	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	261,064,334,164.64	512,053,731,098.27	330,883,067,997.21	314,048,588,503.66	318,777,357,166.00	14.29
2.1.1	Transfer/Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	261,064,334,164.64	512,053,731,098.27	330,883,067,997.21	314,048,588,503.66	318,777,357,166.00	14.29
2.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	170,854,282,754.76	-	40,658,770,482.00	35,871,503,000.00	47,965,800,000.00	5.49
2.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	170,854,282,754.76	-	35,557,625,000.00	35,871,503,000.00	47,965,800,000.00	8.65
2.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	4,042,200,000.00	-	-	0.00
2.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	1,058,945,482.00	-	-	0.00

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Target Tahun 2022 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III.	PEMBIAYAAN	109,638,515,332.24	302,270,663,669.62	219,446,867,864.11	333,093,223,940.18	152,128,709,586.00	36.44
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	109,638,515,332.24	302,270,663,669.62	219,446,867,864.11	335,032,102,725.62	250,321,760,778.00	43.92
3.1.1	Penggunaan SILPA	109,638,515,332.24	302,270,663,669.62	219,446,867,864.11	49,536,738,602.62	160,000,000,000.00	73.47
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	285,495,364,123.00	90,321,760,778.00	7.91
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	0.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	1,938,878,785.44	98,193,051,192.00	1266.11
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-	15,000,000,000.00	25.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	1,938,878,785.44	83,193,051,192.00	1072.70
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0.00
Total (I + II + III)		2,473,984,078,919.04	3,078,347,029,514.20	2,794,617,304,223.41	2,796,897,509,910.80	2,231,793,451,360.00	-1.23

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

7.2.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Jika memperhatikan kinerja pendapatan daerah pada 2023-2026, pendapatan daerah akan diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun kondisi perekonomian Bangka Belitung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memaksimalkan strategi dan kebijakan pendapatan daerah yang telah diuraikan diatas dalam meningkatkan pertumbuhan dan realisasi PAD. Hal ini dapat dipahami karena disparitas PAD memiliki kecenderungan yang tinggi akibat kepastiannya masih rendah. Selama ini pendapatan daerah masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor yang bersifat *closed list* dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan (terbatasi oleh ketersediaan ruang dan sarana prasarana infrastruktur), sehingga rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Tabel VII.5
Prediksi Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah
Provinsi Kep Bangka Belitung Tahun 2023-2026

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (%)
1	2	3	4
2023	3.558.479.605.916,00	1.085.347.058.546,20	30,50
2024	3.489.209.929.124,00	1.363.132.279.094,39	39,07
2025	3.482.094.413.271,00	1.427.440.272.983,71	40,99
2026	3.801.800.262.411,00	1.500.525.011.498,91	39,47

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Prediksi Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2023-2026 diasumsikan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 2,05 persen. Sedangkan untuk pajak daerah diprediksi akan mengalami kenaikan secara bertahap rata-rata sebesar 5,18 persen pertahun, dengan asumsi kondisi perekonomian stabil. Laju pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan tidak terlalu tinggi karena melihat kondisi pandemic covid-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Pada tahun 2023 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 29,88 persen dan diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2026 sebesar 32,72 persen.

Demikian juga dengan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, dengan asumsi tumbuh rata-rata sebesar 0,23 persen. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD ditahun 2023 hanya sebesar 0,22% namun ditahun berikutnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan pelayanan terhadap masyarakat semakin meningkat.

Tabel VII.6
Prediksi PAD dan Retribusi Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

Tahun	PAD	Retribusi Daerah	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2023	1.169.791.402.466,32	6.290.017.012,35	0,54
2024	1.452.179.731.068,50	6.632.889.330,68	0,46
2025	1.521.090.922.022,67	6.975.768.279,17	0,46
2026	1.598.778.768.591,84	7.318.640.597,49	0,46

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Dalam era otonomi daerah, proporsi belanja daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Diperkirakan dalam periode 2023–2026, kebutuhan belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar 2 persen. Kenaikan belanja diproyeksikan tidak terlalu tinggi mengingat kondisi ekonomi yang belum stabil serta adanya beban pembayaran pokok pinjaman kepada PT. SMI sehingga perlu dilakukan beberapa efisiensi dalam hal belanja daerah.

Tabel VII.7
Proyeksi Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

TAHUN	JUMLAH BELANJA (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
2023	3.558.479.605.916,00
2024	3.489.209.929.124,00
2025	3.482.094.413.271,00
2026	3.801.800.262.411,00

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Kondisi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun tahun 2023-2026 dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan sisanya untuk melakukan investasi. Penerimaan pembiayaan daerah meliputi: penggunaan SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdiri dari: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman, dan pemberian pinjaman daerah.

Untuk penerimaan pembiayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2021 sebesar Rp335.032.102.725,62 yang terdiri dari penggunaan SILPA sebesar Rp49.536.738.602,62 dan penerimaan pinjaman daerah dari PT. SMI sebesar Rp285.495.364.123,00 untuk pembangunan beberapa proyek prioritas di Bangka Belitung dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah. Untuk tahun 2022, SILPA ditargetkan meningkat sebesar Rp160.000.000.000,00. Selanjutnya proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dalam kurun waktu tahun 2023-2026, gambarannya seperti terlihat pada Tabel VII.8.

Tabel VII.8
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Lalu (SILPA) pada APBD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

Tahun	Target (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
2023	98,193,051,192.00
2024	98,193,051,192.00
2025	15,000,000,000.00
2026	15,000,000,000.00
Jumlah	226,386,102,384.00

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Pada tahun 2021, total pengeluaran pembiayaan adalah sebesar Rp1.938.878.785,44. Sedangkan pada tahun 2022 – 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewajiban untuk pembayaran pokok pinjaman kepada PT. SMI sebesar Rp83.193.051.192,00 per tahun.

7.2.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Jika memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada, maka Rencana alokasi pengeluaran prioritas adalah sebagai berikut:

- Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Tahun 2015-2025 serta dokumen RPD Tahun 2023-2026. Selanjutnya wajib melaksanakan amanat pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, RPJMN 2020-2024 dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat PD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak

luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

- c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan ASN, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Adapun kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel VII.9 berikut:

Tabel VII.9
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No	Uraian	Proyeksi			
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	3.558.479.605.916,00	3.489.209.929.124,00	3.482.094.413.271,00	3.801.800.262.411,00
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)	-	-	-	-
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	98.193.051.192,00	98.193.051.192,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	Total penerimaan	3.656.672.657.111,00	3.587.402.980.320,00	3.497.094.413.276,00	3.816.800.262.417,00
	Dikurangi:				
4	Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	3.558.479.605.916,00	3.489.209.929.124,00	3.482.094.413.271,00	3.801.800.262.411,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	-	-	-	-

Sumber: Proyeksi dan Perhitungan Bappeda, 2022

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang terus bertambah hingga tahun 2026, demikian juga dengan proyeksi jumlah pengeluaran terus meningkat, maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu verifikasi spesifik dalam memilah program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya.
2. Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui skenario kemitraan pemerintah dan sektor swasta (*public private partnership*) maupun potensi *corporate social responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar diberbagai lapangan usaha di Kepulauan Bangka Belitung;
3. Reorganisasi struktur organisasi pemerintah daerah yang semakin relevan dengan posisi dan kedudukan pemerintahan provinsi yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan

urusan pemerintahan pada skala regional dan lintas kabupaten/kota. Dengan reorganisasi ini, akan diperlukan besaran organisasi yang lebih efisien serta gugus penugasan yang makin ahli dengan penguatan jabatan fungsional di berbagai lini yang salah satunya dengan adanya penyetaraan jabatan fungsional.

Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana diuraikan pada Tabel VII.10.

Tabel VII.10
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

No	Uraian	Proyeksi			
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	3.558.479.605.916,00	3.489.209.929.124,00	3.482.094.413.271,00	3.801.800.262.411,00
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I				
II.a	Belanja Operasi dan Modal	3.083.778.426.486,81	3.023.749.324.578,86	3.017.583.018.540,65	3.294.640.107.405,37
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
	Dikurangi:				
II.c	Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	3.083.778.426.486,81	3.023.749.324.578,86	3.017.583.018.540,65	3.294.640.107.405,37
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	474.701.179.429,19	465.460.604.545,15	464.511.394.730,35	507.160.155.005,63
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	-	-	-	-
III.a	Belanja Tak Terduga + Transfer	474.701.179.429,19	465.460.604.545,14	464.511.394.730,35	507.160.155.005,63
	Dikurangi:				
III.b	Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	474.701.179.429,19	465.460.604.545,14	464.511.394.730,35	507.160.155.005,63

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

No	Uraian	Proyeksi			
		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)	-	-	-	-

Sumber: Proyeksi dan Perhitungan Bappeda, 2022

Selanjutnya Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, digambarkan seperti terlihat pada Tabel VII.11.

Tabel VII.11
Proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

No	Uraian	Proyeksi				Jumlah
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDAPATAN	1.169.791.402.466,32	1.452.179.731.068,50	1.521.090.922.022,67	1.598.778.768.591,84	5.741.840.824.149,34
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.169.791.402.466,32	1.452.179.731.068,50	1.521.090.922.022,67	1.598.778.768.591,84	5.741.840.824.149,34
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.085.347.058.546,20	1.363.132.279.094,39	1.427.440.272.983,71	1.500.525.011.498,91	5.376.444.622.123,22
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.290.017.012,35	6.632.889.330,68	6.975.768.279,17	7.318.640.597,49	27.217.315.219,69
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.043.837.245,90	6.373.290.168,52	6.702.749.461,82	7.032.202.384,44	26.152.079.260,68
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	72.110.489.661,87	76.041.272.474,91	79.972.131.297,97	83.902.914.111,00	312.026.807.545,75
II	PENDAPATAN TRANSFER	2.388.688.203.449,68	2.037.030.198.055,50	1.961.003.491.248,33	2.203.021.493.819,16	8.589.743.386.572,67
2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2.332.249.206.449,68	1.980.591.201.055,50	1.904.564.494.248,33	2.146.582.496.819,16	8.363.987.398.572,67
2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	259.099.170.834,67	267.807.829.081,00	276.516.487.327,33	285.225.145.573,67	1.088.648.632.816,67
2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.246.862.622.000,00	1.131.597.987.053,50	1.046.862.622.000,00	1.146.862.622.000,00	4.572.185.853.053,50

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

No	Uraian	Proyeksi				Jumlah
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
2.1.4	Dana Alokasi Khusus	826.287.413.615,01	581.185.384.921,00	581.185.384.921,00	714.494.729.245,49	2.703.152.912.702,50
2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	-	-	-	-	-
2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
2.2.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
2.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	56.438.997.000,00	56.438.997.000,00	56.438.997.000,00	56.438.997.000,00	225.755.988.000,00
2.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
2.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
2.3.3	Pendapatan Lainnya (Sumbangan Pihak Ketiga)	-	-	-	-	-
2.3.4	Dana Intensif Daerah	56.438.997.000,00	56.438.997.000,00	56.438.997.000,00	56.438.997.000,00	225.755.988.000,00
2.3.5	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah (I + II)		3.558.479.605.916,00	3.489.209.929.124,00	3.482.094.413.271,00	3.801.800.262.411,00	14.331.584.210.722,00
III.	BELANJA	3.115.093.047.018,87	3.054.454.371.955,15	3.048.225.449.377,43	3.328.095.949.714,59	12.545.868.818.066,00
3.1	BELANJA OPERASI	1.920.511.443.312,87	1.883.126.598.748,22	1.879.286.354.842,36	2.051.831.601.623,22	7.734.755.998.526,66
3.1.1	Belanja Pegawai	870.759.959.567,65	853.809.669.656,64	852.068.502.927,41	930.300.524.211,97	3.506.938.656.363,67
3.1.2	Belanja Barang dan Jasa	958.654.405.833,77	939.993.154.906,01	938.076.234.935,21	1.024.204.990.693,52	3.860.928.786.368,51
3.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
3.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
3.1.5	Belanja Hibah	88.961.990.147,90	87.230.248.228,10	87.052.360.331,78	95.045.006.560,28	358.289.605.268,05
3.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.135.087.763,55	2.093.525.957,47	2.089.256.647,96	2.281.080.157,45	8.598.950.526,43
3.2	BELANJA MODAL	1.163.266.983.173,94	1.140.622.725.830,64	1.138.296.663.698,29	1.242.808.505.782,16	4.684.994.878.485,03
3.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	-
3.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	551.155.896.627,81	540.427.047.498,56	539.324.959.260,25	588.842.670.039,59	2.219.750.573.426,21
3.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	3.606.127.647,84	3.535.930.450,07	3.528.719.657,46	3.852.706.367,92	14.523.484.123,30
3.2.4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	335.020.891.154,10	328.499.345.039,22	327.829.439.145,11	357.928.849.665,26	1.349.278.525.003,69
3.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	697.960.189,90	684.373.635,50	682.977.998,22	745.685.103,47	2.810.996.927,09

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

No	Uraian	Proyeksi				Jumlah
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
3.2.6	Belanja Aset Lainnya	272.786.107.554,29	267.476.029.207,29	266.930.567.637,25	291.438.594.605,92	1.098.631.299.004,74
3.3	BELANJA TAK TERDUGA	31.314.620.532,06	30.705.047.376,29	30.642.430.836,78	33.455.842.309,22	126.117.941.054,35
3.3.1	Belanja Tak Terduga	31.314.620.532,06	30.705.047.376,29	30.642.430.836,78	33.455.842.309,22	126.117.941.054,35
IV.	TRANSFER	443.386.558.897,13	434.755.557.168,85	433.868.963.893,57	473.704.312.696,41	1.785.715.392.655,96
4.1	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	346.595.913.616,22	339.849.047.096,68	339.155.995.852,60	370.295.345.558,83	1.395.896.302.124,32
4.1.1	Transfer/Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	346.595.913.616,22	339.849.047.096,68	339.155.995.852,60	370.295.345.558,83	1.395.896.302.124,32
4.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	96.790.645.280,92	94.906.510.072,17	94.712.968.040,97	103.408.967.137,58	389.819.090.531,64
4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	96.790.645.280,92	94.906.510.072,17	94.712.968.040,97	103.408.967.137,58	389.819.090.531,64
4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-	-
4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (III + IV)		3.558.479.605.916,00	3.489.209.929.124,00	3.482.094.413.271,00	3.801.800.262.411,00	14.331.584.210.722,00
Surplus/(defisit)		-	-	-	-	-
V.	PEMBIAYAAN					-
5.1	Penerimaan Pembiayaan	98.193.051.192,00	98.193.051.192,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	226.386.102.384,00
5.1.1	Penggunaan SILPA	98.193.051.192,00	98.193.051.192,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	226.386.102.384,00
5.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
5.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
5.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
5.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
5.2	Pengeluaran Pembiayaan	98.193.051.192,00	98.193.051.192,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	226.386.102.384,00
5.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
5.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	60.000.000.000,00

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

No	Uraian	Proyeksi				Jumlah
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman	83.193.051.192,00	83.193.051.192,00	-	-	166.386.102.384,00
5.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto)		-	-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Kebijakan belanja daerah khususnya belanja operasi tahun anggaran 2023-2026 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, ekonomis, efisien dan efektif, yaitu:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam dokumen RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025;
2. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pelaksanaan urusan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
9. Penurunan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
10. Dalam mendukung pengembangan aktivitas pembangunan ekonomi di pedesaan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
11. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 30%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan

terhadap sumber daya alam;

12. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
13. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan;
14. Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB);
15. Kebijakan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemulihan ekonomi pasca covid-19;
 - d. Mengalokasikan belanja modal yang digunakan untuk pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud atau barang inventaris dengan nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (1 tahun), termasuk di dalamnya menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset;
 - e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
16. Kebijakan untuk dana transfer meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi provinsi yang bersifat khusus dari Provinsi. Belanja bantuan keuangan

kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kemudian dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005. Seiring dengan perubahan peraturan tersebut maka, uraian dalam postur keuangan daerah berubah sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan daerah yang baru seperti yang tertera dalam tabel VII.9. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perubahan dalam uraian belanja daerah. Perubahan uraian tersebut yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Uraian perubahan tersebut untuk mengganti uraian pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yaitu belanja langsung dan tidak langsung.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bunga dan belanja subsidi dimasukkan dalam belanja operasi. Untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan dimasukkan dalam belanja transfer. Sedangkan untuk belanja modal dan belanja tidak terduga menjadi uraian belanja sendiri.

Dalam melaksanakan program Perangkat Daerah kita senantiasa mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian maka program yang disusun memberi keyakinan akan dapat dibiayai sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya gambaran kerangka pendanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel VII.12.

Tabel VII.12
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi				Jumlah
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
I.	BELANJA	3.115.093.047.018,87	3.054.454.371.955,15	3.048.225.449.377,43	3.328.095.949.714,59	12.545.868.818.066,00
1.1	BELANJA OPERASI	1.920.511.443.312,87	1.883.126.598.748,22	1.879.286.354.842,36	2.051.831.601.623,22	7.734.755.998.526,66
1.1.1	Belanja Pegawai	870.759.959.567,65	853.809.669.656,64	852.068.502.927,41	930.300.524.211,97	3.506.938.656.363,67
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	958.654.405.833,77	939.993.154.906,01	938.076.234.935,21	1.024.204.990.693,52	3.860.928.786.368,51
1.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
1.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
1.1.5	Belanja Hibah	88.961.990.147,90	87.230.248.228,10	87.052.360.331,78	95.045.006.560,28	358.289.605.268,05
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.135.087.763,55	2.093.525.957,47	2.089.256.647,96	2.281.080.157,45	8.598.950.526,43
1.2	BELANJA MODAL	1.163.266.983.173,94	1.140.622.725.830,64	1.138.296.663.698,29	1.242.808.505.782,16	4.684.994.878.485,02
1.2.1	Belanja Tanah	-	-	-	-	-
1.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	551.155.896.627,81	540.427.047.498,56	539.324.959.260,25	588.842.670.039,59	2.219.750.573.426,21
1.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	3.606.127.647,84	3.535.930.450,07	3.528.719.657,46	3.852.706.367,92	14.523.484.123,30
1.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	335.020.891.154,10	328.499.345.039,22	327.829.439.145,11	357.928.849.665,26	1.349.278.525.003,69
1.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	697.960.189,90	684.373.635,50	682.977.998,22	745.685.103,47	2.810.996.927,09
1.2.6	Belanja Aset Lainnya	272.786.107.554,29	267.476.029.207,29	266.930.567.637,25	291.438.594.605,92	1.098.631.299.004,74
1.3	BELANJA TAK TERDUGA	31.314.620.532,06	30.705.047.376,29	30.642.430.836,78	33.455.842.309,22	126.117.941.054,35
1.3.1	Belanja Tak Terduga	31.314.620.532,06	30.705.047.376,29	30.642.430.836,78	33.455.842.309,22	126.117.941.054,35
II.	TRANSFER	443.386.558.897,13	434.755.557.168,85	433.868.963.893,57	473.704.312.696,41	1.785.715.392.655,96
2.1	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	346.595.913.616,22	339.849.047.096,68	339.155.995.852,60	370.295.345.558,83	1.395.896.302.124,32

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

No	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi				Jumlah
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Transfer/Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	346.595.913.616,22	339.849.047.096,68	339.155.995.852,60	370.295.345.558,83	1.395.896.302.124,32
2.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	96.790.645.280,92	94.906.510.072,17	94.712.968.040,97	103.408.967.137,58	389.819.090.531,64
2.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	96.790.645.280,92	94.906.510.072,17	94.712.968.040,97	103.408.967.137,58	389.819.090.531,64
2.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-	-
2.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (I + II)		3.558.479.605.916,00	3.489.209.929.124,00	3.482.094.413.271,00	3.801.800.262.411,00	14.331.584.210.722,00

Sumber : Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel VII.12 merupakan penyusunan kapasitas riil pembangunan daerah berdasarkan uraian belanja yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kapasitas riil ini digunakan dalam melakukan pembiayaan yang dialokasikan untuk melakukan pembiayaan prioritas 1, 2 dan 3. Pada Prioritas 1 pembiayaan dilakukan pada prioritas yang berkaitan dengan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas pertama dan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah seperti bantuan sosial, tambahan penghasilan dan belanja hibah serta prioritas 2 merupakan pembiayaan kegiatan prioritas.

7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas

Indikasi rencana program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berisi program prioritas untuk perencanaan strategis yaitu untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah serta program prioritas untuk perencanaan operasional yaitu untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Sebagaimana telah dirumuskan pada Bab VI, indikasi rencana program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 terdiri dari 45 program pembangunan daerah yang dirumpunkan kedalam 24 Urusan Wajib, 6 Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan program prioritas dibutuhkan sejumlah dana sehingga disusunlah pagu indikatif yang penghitungannya berdasarkan pendekatan prioritas program. Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun juga oleh sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, pagu indikatif yang dicantumkan dalam Tabel VII.1 hanya bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan selengkapnya disajikan pada Tabel VII.13.

Tabel VII.13
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar												
Urusan Pendidikan												
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA	41	41,25	Rp27.800.000.000	42	Rp27.800.000.000	42,75	Rp27.800.000.000	43,5	Rp20.300.000.000	44,25	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA Cabdin I	—	41,49	Rp134.900.000.000	42,24	Rp34.500.000.000	42,99	Rp30.950.000.000	43,74	Rp27.650.000.000	44,49	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA Cabdin II	—	38,79	Rp19.638.300.000	39,54	Rp16.737.300.000	40,29	Rp15.914.300.000	41,04	Rp16.214.300.000	41,79	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA Cabdin III	—	48,31	Rp19.909.900.000	49,06	Rp14.409.900.000	49,81	Rp12.959.900.000	50,56	Rp12.809.900.000	51,31	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA Cabdin IV	—	36,96	Rp14.194.000.000	37,71	Rp10.109.000.000	38,46	Rp7.899.000.000	39,21	Rp6.751.000.000	39,96	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA Cabdin V	—	40,7	Rp8.820.000.000	41,45	Rp12.030.000.000	42,2	Rp9.950.000.000	42,95	Rp13.440.000.000	43,7	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA	—	41,25	Rp16.760.400.000	42	Rp16.800.000.000	42,75	Rp16.950.000.000	43,5	Rp17.100.000.000	44,25	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PENDIDIKAN KHUSUS	—	77,25	Rp12.050.000.000	77,75	Rp12.050.000.000	78,25	Rp12.050.000.000	79	Rp12.050.000.000	79,5	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi A	—	43,48	Rp22.638.200.000	51,29	Rp23.500.800.000	59,08	Rp24.363.400.000	66,89	Rp25.226.000.000	74,7%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi A	—	64,78	Rp15.775.200.000	73,6	Rp16.359.600.000	82,36	Rp16.944.000.000	89,16	Rp17.528.400.000	98,0%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Khusus terakreditasi A	—	90	Rp12.378.000.000	100	Rp12.415.800.000	100	Rp12.472.500.000	100	Rp12.567.000.000	100%	Dinas Pendidikan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase sekolah yang mengintegrasikan kurikulum muatan lokal dengan kurikulum nasional	-	10	Rp125.000.000	15	Rp130.000.000	25	Rp135.000.000	35	Rp140.000.000	40%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA	persentase guru yang mengajar sesuai dengan kompetensi	80	82	Rp50.000.000	84	Rp55.000.000	86	Rp60.000.000	88	Rp65.000.000	90%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	-	100	Rp650.000.000	100	Rp800.000.000	100	Rp900.000.000	100	Rp900.000.000	100%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	persentase guru yang bersertifikat pendidik	89%	61,9	Rp3.942.464.998	65	Rp4.217.953.169	70	Rp5.674.300.332	75	Rp5.782.800.332	78,1%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SMKterakreditasi A	—	73,3	Rp4.260.000.000	80	Rp3.100.000.000	86,6	Rp3.250.000.000	93,3	Rp2.950.000.000	100%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SMKterakreditasi A	—	70,6	Rp13.150.000.000	76,5	Rp13.150.000.000	82,4	Rp13.150.000.000	88,2	Rp13.150.000.000	94,1%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SMKterakreditasi A	—	28,6	Rp2.650.000.000	42,9	Rp2.650.000.000	57,1	Rp2.850.000.000	71,4	Rp2.850.000.000	85,7%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SMKterakreditasi A	—	80	Rp3.925.000.000	90	Rp4.600.000.000	100	Rp1.550.000.000	100	Rp1.500.000.000	100%	Dinas Pendidikan
PRGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SMKterakreditasi A	—	71,4	Rp10.350.000.000	78,6	Rp10.350.000.000	85,7	Rp10.350.000.000	92,9	Rp10.350.000.000	100%	Dinas Pendidikan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Proporsi Guru dan Siswa yang menguasai TIK	—	65	Rp1.000.000.000	70	Rp1.000.000.000	75	Rp1.000.000.000	80	Rp1.000.000.000	#REF!	Dinas Pendidikan
PRGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SMATERakreditasi A	—	43,48	Rp70.000.000.000	51,29	Rp70.000.000.000	59,08	Rp70.000.000.000	66,89	Rp70.000.000.000	74,7%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMK yang memiliki sertifikast kompetensi	—	65	Rp2.000.000.000	68	Rp2.000.000.000	71	Rp2.000.000.000	75	Rp2.000.000.000	78%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK	—	70	Rp500.000.000	73	Rp500.000.000	76	Rp500.000.000	80	Rp500.000.000	83%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK	N/A	55	Rp500.000.000	60	Rp550.000.000	65	Rp600.000.000	70	Rp650.000.000	75%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK	N/A	55	Rp450.000.000	60	Rp500.000.000	65	Rp550.000.000	70	Rp600.000.000	75%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK	N/A	55	Rp400.000.000	60	Rp450.000.000	65	Rp500.000.000	70	Rp550.000.000	75%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK	N/A	55	Rp350.000.000	60	Rp400.000.000	65	Rp450.000.000	70	Rp500.000.000	75%	Dinas Pendidikan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7	8	9		10	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMA yang memiliki kompetensi TIK	N/A	55	Rp400.000.000	60	Rp450.000.000	65	Rp500.000.000	70	Rp550.000.000	75%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK	—	70	Rp500.000.000	73	Rp500.000.000	76	Rp500.000.000	80	Rp500.000.000	83%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK	N/A	55	Rp400.000.000	60	Rp450.000.000	65	Rp500.000.000	70	Rp550.000.000	75%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK	N/A	55	Rp350.000.000	60	Rp400.000.000	65	Rp450.000.000	70	Rp500.000.000	75%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK	N/A	55	Rp300.000.000	60	Rp350.000.000	65	Rp400.000.000	70	Rp450.000.000	75%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK	N/A	55	Rp300.000.000	60	Rp350.000.000	65	Rp400.000.000	70	Rp450.000.000	75%	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase lulusan SMK yang memiliki kompetensi TIK	N/A	55	Rp450.000.000	60	Rp500.000.000	65	Rp550.000.000	70	Rp600.000.000	75%	Dinas Pendidikan
Urusan Kesehatan												

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan sinkronisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan lintas kabupaten/kota	N/A		Rp10.500.000		Rp10.815.000		Rp11.139.450		Rp11.473.634		Dinas Kesehatan
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan (SIK)	N/A		Rp52.500.000		Rp54.075.000		Rp55.697.250		Rp57.368.168		Dinas Kesehatan
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Essensial	N/A		Rp115.500.000		Rp118.965.000		Rp122.533.950		Rp126.209.969		Dinas Kesehatan
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	N/A		Rp1.087.605.000		Rp1.120.233.150		Rp1.153.840.145		Rp1.188.455.349		Dinas Kesehatan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat	N/A		Rp92.000.000		Rp47.380.000	Rp48.801.400			Rp50.265.442		Dinas Kesehatan
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kesehatan masyarakat	N/A		Rp663.750.000		Rp683.662.500	Rp704.172.375			Rp725.297.546		Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan Ibu hamil	N/A	92		95		97		98		100%	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan Ibu bersalin	N/A	93		95		97		98		100%	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	N/A	92		95		97		98		100%	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita	N/A	80		85		90		95		100%	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar	N/A	100		100		100		100		100%	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan usia produktif	N/A	100		100		100		100		100%	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut)	N/A	60		65		70		75		80%	Dinas Kesehatan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7	8	9		10	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	N/A		Rp305.000.000		Rp314.150.000		Rp323.574.500		Rp333.281.735		Dinas Kesehatan
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan	N/A	75		100		100		100		100%	Dinas Kesehatan
	Jumlah layanan yang diperiksa	N/A	4		4		4		4		4	Dinas Kesehatan
	jumlah layanan yang ada	N/A	4		4		4		4		4	Dinas Kesehatan
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal madya	N/A		Rp32.931.655.875		Rp33.883.555.551		Rp34.900.062.218		Rp35.947.064.084		Dinas Kesehatan
	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang minimal terakreditasi madya¹-	N/A	50/65		52/70		55/75		60/80		64/80	Dinas Kesehatan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	N/A	50/65		52/70		55/75		60/80		64/80	Dinas Kesehatan
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit	N/A		Rp1.839.370.000		Rp182.124.600		Rp187.588.338		Rp193.215.988		Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	N/A	60		65		70		75		80%	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan penderita DM	N/A	98		98		100		100		100%	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ODGJ	N/A	98		98		100		100		100%	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan TB	N/A	80		83		85		90		92%	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan HIV	N/A	85		87		90		95		97%	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan krisis kesehatan	N/A	0		0		0		0		0%	Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		N/A		Rp53.250.000.000		Rp56.135.000.000		Rp58.951.250.000		Rp61.875.312.500		Rumah Sakit Umum Provinsi

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		N/A		Rp41.660.000.000		Rp41.660.000.000		Rp41.660.000.000		Rp41.660.000.000		Rumah Sakit Umum Provinsi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		N/A		Rp1.466.000.000		Rp1.221.000.000		Rp1.466.000.000		Rp1.221.000.000		Rumah Sakit Umum Provinsi
program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan		N/A		Rp300.000.000		Rp315.000.000		Rp330.750.000		Rp347.287.500		Rumah Sakit Umum Provinsi
program pemenuhan upaya kesehatan perorang dan upaya kesehatan masyarakat		N/A		Rp1.100.000.000		Rp1.115.000.000		Rp1.130.750.000		Rp1.147.287.500		Rumah Sakit Umum Provinsi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		N/A		Rp4.150.000.000		Rp4.300.000.000		Rp4.950.000.000		Rp5.100.000.000		Rumah Sakit Umum Provinsi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		N/A		Rp510.000.000		Rp595.000.000		Rp680.000.000		Rp765.000.000		Rumah Sakit Umum Provinsi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		N/A		Rp550.000.000		Rp700.000.000		Rp850.000.000		Rp1.000.000.000		Rumah Sakit Umum Provinsi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		N/A		Rp12.700.000.000		Rp14.740.000.000		Rp16.770.000.000		Rp18.830.000.000		Rumah Sakit Umum Provinsi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		N/A		Rp3.400.000.000		Rp1.400.000.000		Rp1.400.000.000		Rp1.400.000.000		Rumah Sakit Umum Provinsi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		N/A		Rp13.548.000.000		Rp13.548.000.000		Rp13.548.000.000		Rp13.547.000.000		Rumah Sakit Umum Provinsi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		N/A		Rp107.472.555.000		Rp81.450.000.000		Rp80.250.000.000		Rp82.650.000.000		Rumah Sakit Umum Provinsi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		N/A		Rp10.000.000.000		Rp11.000.000.000		Rp11.000.000.000		Rp12.000.000.000		Rumah Sakit Umum Provinsi

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan kesehatan Jiwa dan Non Jiwa	80%	80%	Rp7.126.145.500	82%	Rp3.702.005.500	83%	Rp4.993.984.295	85%	Rp3.988.117.000	87%	Rumah Sakit Jiwa Daerah
	2. Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat penanganan penyalahgunaan NAPZA											Rumah Sakit Jiwa Daerah
	3.Persentase masyarakat ataupun perorangan yang mendapat pelayanan penunjang											Rumah Sakit Jiwa Daerah
	4.Persentase Fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai kelas Rumah Sakit											Rumah Sakit Jiwa Daerah

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase SDM kesehatan sesuai analisa beban kerja RS.Jiwa Daerah Prov.Kep.Babel	85%	85%	Rp7.651.556.000	86%	Rp8.095.148.000	87%	Rp8.095.148.000	88%	Rp8.095.148.000	89%	Rumah Sakit Jiwa Daerah
	2. Persentase SDM kesehatan yang mendapat pendidikan dan pelatihan											Rumah Sakit Jiwa Daerah
Urusan Sosial												
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang di Rehabilitasi sosial di Dalam Panti		22,36	Rp2.288.552.585	22,58	Rp2.257.864.490	27,00	Rp2.479.898.109	28,05	Rp2.810.740.185		Dinsospemdes
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang di Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti Sosial Bina Serumpun		21,43	Rp3.208.301.500	21,43	Rp3.524.483.400	28,57	Rp4.549.835.940	28,57	Rp4.953.237.940		Dinsospemdes
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang di rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial Bina Laras Hijrah		10,00	Rp1.095.480.726	30,00	Rp4.222.170.033	30,00	Rp4.251.535.017	30,00	Rp4.238.065.047		Dinsospemdes

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		28,11155889	Rp6.230.838.013	25,27639031	Rp6.289.834.738	23,70003532	Rp6.334.874.008	22,91201549	Rp6.351.743.738		Dinsospemdes
PROGRAMPENANGANANWARGANEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di ditangani		11,90	Rp78.615.000	23,80952381	Rp96.935.000	28,57142857	Rp115.145.000	35,71428571	Rp124.148.000		Dinsospemdes
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yg mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		24,56140351	Rp2.066.819.048	25,14619883	Rp2.202.257.984	25,14619883	Rp2.236.036.783	25,14619883	Rp2.236.036.783		Dinsospemdes
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS dan PSKS yang diberdayakan		100,00	Rp2.150.812.555	100,00	Rp2.194.662.549	100,00	Rp2.190.645.755	100,00	Rp2.220.620.755		Dinsospemdes
PROGRAMPENGELOLAANTAMANMAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dikelola dengan baik		100,00	Rp908.002.321	100,00	Rp805.673.321	100,00	Rp817.511.321	100,00	Rp842.098.321		Dinsospemdes
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
Peningkatan ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	Rp9.640.000.000	100%	Rp10.120.000.000	100%	Rp9.622.200.000	100%	Rp9.607.200.000	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10			
	Persentase anggota satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	23,94	26,3		31,1		35,9		40,8		45,6%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase personil Satpol PP yang berkompeten	78,38	78,4		81,1		83,8		86,5		89,2%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	28,57	35,7		39,3		42,9		50		53,6%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase resptime 15 menit kejadian kebakaran/pertolongan	61,61	64	Rp1.420.000.000	67	Rp1.414.450.000	70	Rp1.293.700.000	73	Rp4.397.500.000	78%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Urusan Bencana												
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	42,85	100	Rp3.750.000.000	100	Rp3.937.500.000	100	Rp4.365.900.000	100	Rp4.341.093.750	100	BPBD
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	Rp4.748.600.000	100	Rp5.169.530.000	100	Rp5.621.506.500	100	Rp5.115.081.825	100	BPBD
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	57,14	71,5	Rp720.000.000	71,5	Rp784.500.000	85,7	Rp855.075.000	85,7	Rp932.313.750	85,7	BPBD
URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN												

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab	
			2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2		4	5		6	7		8	9		10	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	94,64	90,13	Rp156.176.687.000,00		91,07	Rp172.600.142.000	91,89	Rp163.892.707.000,00	92,83	Rp263.552.387.000,00	92,83	Dinas PUPERKIM
PROGRAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	50,69%	27,41%	2.792.489.000		39,15%	Rp2.990.356.000	53,79%	3.289.149.200	70,58%	3.981.976.440	70,58%	Dinas PUPERKIM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGANSISTEMPEN YEDIAAN AIR MINUM	1. Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	-	25%	6.150.000.000		25%	Rp1.050.000.000	25%	24.600.000.000	25%	23.850.000.000	25%	Dinas PUPERKIM
	2. persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak		0%			0%		0%		0%		0%	Dinas PUPERKIM
	3. Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi		14%			29%		29%		29%		29%	Dinas PUPERKIM

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Readiness Criteria pembangunan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang disiapkan	-	100%	800.000.000	0%	Rp100.000.000	0%	-	0%	-	0%	Dinas PUPERKIM
	Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan		0%		100%		0%		0%		0%	Dinas PUPERKIM
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang disiapkan	-	0%	1.755.000.000	0%	Rp1.755.000.000	50%	2.555.000.000	50%	2.755.000.000	50%	Dinas PUPERKIM
	Persentase rumah tangga yang besanitasi		6%		6%		6%		6%		6%	Dinas PUPERKIM

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Readiness Criteria pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang disiapkan	-	0%	-	50%	Rp800.000.000	50%	800.000.000	0%	-	0%	Dinas PUPERKIM
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan ketersediaan Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	33%	22.425.000.000	20%	Rp29.075.000.000	27%	28.725.000.000	20%	38.725.000.000	20%	Dinas PUPERKIM
	Persentase penyelenggaraan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		25%		25%		25%		25%		25%	Dinas PUPERKIM

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
	Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi		25%		25%		25%		25%		25%	Dinas PUPERKIM
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh yang sudah direncanakan	-	23%	2.350.000.000	23%	Rp2.350.000.000	23%	6.350.000.000	31%	2.850.000.000	31%	Dinas PUPERKIM
	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani		6%		6%		6%		6%		6%	Dinas PUPERKIM
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU	-	25%	14.925.000.000	25%	Rp14.925.000.000	25%	14.925.000.000	24%	14.925.000.000	24%	Dinas PUPERKIM
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASIBIDANGPERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman tingkat kemampuan menengah yang ditingkatkan	-	25%	50.000.000	25%	Rp50.000.000	25%	50.000.000	25%	50.000.000	25%	Dinas PUPERKIM

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara	-	24%	1.490.000.000	65%	Rp18.990.000.000	100%	4.990.000.000	100%	990.000.000	100%	Dinas PUPERKIM
	Persentase Readiness Criteria bangunan gedung yang disiapkan		0%		100%		100%		100%		100%	Dinas PUPERKIM
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Luas kawasan yang tertata	20%	7%	6.210.000.000	44%	Rp6.660.000.000	100%	8.510.000.000	100%	610.000.000	100%	Dinas PUPERKIM
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan air baku											Dinas PUPERKIM
	Rasio Jaringan Irigasi		0,3	23.037.938.750	0,39	Rp44.086.732.625	0,51	58.633.813.943	0,56	37.249.495.337	0,56	Dinas PUPERKIM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang	69,63%	85%	6.450.000.000	86%	Rp3.350.000.000	87%	2.900.000.000	88%	2.950.000.000	88%	Dinas PUPERKIM
PROGRAMPENYELESAIANGA NTIKERUGIAN	PRESENTASE PENYELESAIANGAN TIKERUGIAN	N/A	80%	3.150.000.000	85%	Rp700.000.000	90%	800.000.000	100%	900.000.000	100%	Dinas PUPERKIM
DANSANTUNANTANAHUNTUK PEMBANGUNAN	DANSANTUNANTANAHUNTUK PEMBANGUNAN	(tidak dianggarkan)										Dinas PUPERKIM

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUKKEPENTINGAN UMUM	PRESENTASE PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUKKEPENTINGAN UMUM	N/A	20%	500.000.000	30%	Rp550.000.000	40%	650.000.000	50%	700.000.000	50%	Dinas PUPERKIM
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	N/A	15%	400.000.000	20%	Rp400.000.000	25%	400.000.000	30%	400.000.000	30%	Dinas PUPERKIM
URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN KETENAGAKERJAAN												
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten	N/A	5	Rp5.000.000.000	5,25	Rp5.500.000.000	5,5	Rp6.000.000.000	5,75	Rp6.500.000.000	5,75	Disnaker
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan Menengah yang dibina	N/A	9		9		9		9		9	Disnaker
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial	N/A	2,80%	Rp750.000.000	2,90%	Rp800.000.000	3,00%	Rp850.000.000	3,20%	Rp900.000.000	3,20%	Disnaker
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan kab/kota		100%	Rp200.000.000	100%	Rp250.000.000	100%	Rp300.000.000	100%	Rp350.000.000		Disnaker

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten		5,00	Rp5.000.000.000	5,25	Rp5.500.000.000	5,50	Rp6.000.000.000	5,75	Rp6.500.000.000		Disnaker
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan Menengah yang dibina		9		9		9		9			Disnaker
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenga Kerja Yang Ditempatkan		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp		Disnaker
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial		2,80%	750 Jt	2,90%	800 Jt	3,00%	850 Jt	3,20%	900 Jt		Disnaker
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan Norma Ketenagakerjaan		15	450 jt	17,5	600 jt	20	650 jt	22,5	700 jt		Disnaker
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten		5	Rp5.000.000.000	5,25	Rp5.500.000.000	5,5	Rp6.000.000.000	5,75	Rp6.500.000.000	5,75	Disnaker
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan Menengah yang dibina		9		9		9		9		9	Disnaker
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenga Kerja Yang Ditempatkan											Disnaker

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7	8	9		10	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial		2,80%	Rp750.000.000	2,90%	Rp800.000.000	3,00%	Rp850.000.000	3,20%	Rp900.000.000	3,20%	Disnaker
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan Norma Ketenagakerjaan		15	Rp450.000.000	17,5	Rp600.000.000	20	Rp650.000.000	22,5	Rp700.000.000	22,5	Disnaker
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan kab/kota		100%	Rp200.000.000	100%	Rp250.000.000	100%	Rp300.000.000	100%	Rp350.000.000	100%	Disnaker
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja Yang Berkompeten		5	Rp5.000.000.000	5,25	Rp5.500.000.000	5,5	Rp6.000.000.000	5,75	Rp6.500.000.000	5,75	Disnaker
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan Menengah yang dibina		9		9		9		9		9	Disnaker
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenga Kerja Yang Ditempatkan											Disnaker
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang telah memiliki sarana hubungan industrial		2,80%	Rp750.000.000	2,90%	Rp800.000.000	3,00%	Rp850.000.000	3,20%	Rp900.000.000	3,20%	Disnaker

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan Norma Ketenagakerjaan		15	Rp450.000.000	17,5	Rp600.000.000	20	Rp650.000.000	22,5	Rp700.000.000	22,5	Disnaker
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang menerapkan anggaran berbasis gender	62,9	70%	Rp650.000.000	80%	Rp715.000.000	90%	Rp786.500.000	95%	Rp865.150.000	100%	DP3ACSKB
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	0,441	0,4454	-	0,45	-	0,454	-	0,459	-	0,46%	DP3ACSKB
PROGRAM PELINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kebijakan perlindungan perempuan	N/A										DP3ACSKB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak	0,20%	0,31%	Rp135.000.000	0,33%	Rp145.000.000	0,35%	Rp155.000.000	0,37%	Rp165.000.000	0,39%	DP3ACSKB
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK	0,00189	0,194	Rp272.800.000	0,199	Rp296.600.000	0,204	Rp326.260.000	0,209	Rp358.886.000	0,213%	DP3ACSKB

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA	Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak	0,8437	88,88	Rp75.000.000	92,59	Rp80.000.000	96,29	Rp85.000.000	96,29	Rp90.000.000	100%	DP3ACSKB
Program Pengendalian Penduduk	Persentase kabupaten/kota yang memiliki dokumen pengendaliann penduduk	N/A										DP3ACSKB
program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Modern Kontraseptik Pravelensi Rate (MCPR)/Rata-rata PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi	N/A										DP3ACSKB
3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga kesejahteraan (KS)	persentase kabupaten/kota yang dibina	N/A										DP3ACSKB
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang menerapkan anggaran berbasis gender	62,9	70%	Rp650.000.000	80%	Rp715.000.000	90%	Rp786.500.000	95%	Rp865.150.000		DP3CSKB
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	0,441	0,4454		0,4498		0,4542		0,4586			DP3CSKB

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10			
PROGRAM PELINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kebijakan perlindungan perempuan										DP3CSKB	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak	0,20%	0,31%	Rp135.000.000	0,33%	Rp145.000.000	0,35%	Rp155.000.000	0,37%	Rp165.000.000	DP3CSKB	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK	0,00189	0,194	Rp272.800.000	0,199	Rp296.600.000	0,204	Rp326.260.000	0,209	Rp358.886.000	DP3CSKB	
PROGRAMPENGELOLAANSIS TEMDATA	Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak	0,8437	88,88	Rp75.000.000	92,59	Rp80.000.000	96,29	Rp85.000.000	96,29	Rp90.000.000	DP3CSKB	
Program Pengendalian Penduduk	Persentase kabupaten/kota yang memiliki dokumen pengendaliann penduduk										DP3CSKB	
program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Modern Kontraseptik Pravelensi Rate (MCPR)/Rata-rata PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi										DP3CSKB	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga kesejahteraan (KS)	persentase kabupaten/kota yang dibina											DP3CSKB
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang menerapkan anggaran berbasis gender	63	70%	Rp650.000.000	80%	Rp715.000.000	90%	Rp786.500.000	95%	Rp865.150.000	95%	DP3ACSKB
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	0,441	0,445		0,45		0,454		0,459		0,459	DP3ACSKB
PROGRAM PELINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kebijakan perlindungan perempuan											DP3ACSKB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak	0,2	0,31	Rp135.000.000	0,33	Rp145.000.000	0,35	Rp155.000.000	0,37	Rp165.000.000	0,37	DP3ACSKB
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK	0,00189	0,194	Rp272.800.000	0,199	Rp296.600.000	0,204	Rp326.260.000	0,209	Rp358.886.000	0,209	DP3ACSKB
PROGRAMPENGELOLAANSIS TEMDATA	Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak	0,8437	88,88	Rp75.000.000	92,59	Rp80.000.000	96,29	Rp85.000.000	96,29	Rp90.000.000	96,29	DP3ACSKB
Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga kesejahteraan (KS)	persentase kabupaten/kota yang dibina											DP3ACSKB

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan perjanjian kerjasama	45,16	31,43	Rp520.000.000	37,14	Rp583.000.000	42,86	Rp640.000.000	48,57	Rp705.000.000		DP3CSKB
PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)	86,68	86,57	Rp670.000.000	89,8	Rp759.000.000	90,03	Rp835.000.000	93,27	Rp919.000.000		DP3CSKB
PENCATATAN SIPIL	Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan)	83,85	86	Rp619.000.000	89,5	Rp703.000.000	93	Rp772.000.000	96,5	Rp851.000.000		DP3CSKB
PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi	100	100	Rp61.000.000	100	Rp67.500.000	100	Rp75.000.000	100	Rp83.000.000		DP3CSKB
PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi	100	100	Rp61.000.000	100	Rp67.500.000	100	Rp75.000.000	100	Rp83.000.000	100%	DP3ACSKB

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)	86,68	86,57	Rp670.000.000	89,8	Rp759.000.000	90,03	Rp835.000.000	93,27	Rp919.000.000	97%	DP3ACSKB
PENCATATAN SIPIL	Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan)	83,85	86	Rp619.000.000	89,5	Rp703.000.000	93	Rp772.000.000	96,5	Rp851.000.000	99%	DP3ACSKB
PENGLOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan perjanjian kerjasama	45,16	31,43	Rp520.000.000	37,14	Rp583.000.000	42,86	Rp640.000.000	48,57	Rp705.000.000	54%	DP3ACSKB
URUSAN PERTANIAN DAN PANGAN												
PROGRAM PENGENDALIAN DAN	Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	1	1	Rp250.000.000	1	Rp262.500.000	1	Rp275.625.000	1	Rp289.406.250	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN												
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dokumen Perizinan Usaha Pertanian	N/A	1	Rp50.000.000	1	Rp52.500.000	1	Rp55.125.000	1	Rp57.881.250	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras)	2,74	2,85	Rp250.000.000	2,85	Rp262.500.000	2,92	Rp275.625.000	2,95	Rp289.406.250	2,95	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	1	1	Rp250.000.000	1	Rp262.500.000	1	Rp275.625.000	1	Rp289.406.250	1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,7	83,1	Rp750.000.000	84,1	Rp787.500.000	85,1	Rp826.875.000	86,1	Rp868.218.750	86,1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pertambahan Angka Populasi Ternak	5%	5%	Rp2.500.000.000	5%	Rp2.625.000.000	5%	Rp2.756.250.000	5%	Rp2.894.062.500	5%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	2%	2%	Rp1.250.000.000	2%	Rp1.312.500.000	2%	Rp1.378.125.000	2%	Rp1.447.031.250	2%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya Bencana Pertanian	3%	3%	Rp275.000.000	3%	Rp288.750.000	3%	Rp303.187.500	3%	Rp318.346.875	3%	UPTD Proteksi
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi		86%	Rp230.000.000	86%	Rp241.500.000	86%	Rp253.575.000	86%	Rp266.253.750	86%	UPTD PMKP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan & Hortikultura (%)	13,42	5	Rp3.500.000.000	5	Rp3.675.000.000	5	Rp3.858.750.000	5	Rp4.051.687.500	5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7	8	9		10	
	Persentase peningkatan luas tanam perkebunan	0,14415954 4	2,50%	Rp4.000.000.000	2,50%	Rp4.200.000.000	2,50%	Rp4.410.000.000	2,50%	Rp4.630.500.000	2,50%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi	N/A		Rp250.000.000		Rp262.500.000		Rp275.625.000		Rp289.406.250		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian prapanen	15%	15%	Rp3.700.000.000	15%	Rp3.885.000.000	15%	Rp4.079.250.000	15%	Rp4.283.212.500	15%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Rasio ketersediaan prasarana pertanian pasca panen	5,0%	5,00%	Rp200.000.000	5,00%	Rp210.000.000	5,00%	Rp220.500.000	5,00%	Rp231.525.000	5,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian	80%	100%	Rp1.250.000.000	100%	Rp1.312.500.000	100%	Rp1.378.125.000	100%	Rp1.447.031.250	100%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih pertanian dan bibit peternakan bermutu yang diproduksi	N/A		Rp700.000.000		Rp735.000.000		Rp771.750.000		Rp810.337.500		UPTD Balai Benih

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian prapanen											UPTD Balai Benih
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat	80%		Rp275.000.000	50%	Rp288.750.000	70%	Rp303.187.500	80%	Rp318.346.875	80%	UPTD PSMB
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN												
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun		100	Rp450.000.000	100		100		100		100	DLHK
ROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Titik Sampling Uji Kualitas Lingkungan		62	Rp500.000.000	65	Rp510.000.000	67	Rp520.000.000	70	Rp530.000.000	70	DLHK
	Persentase Penurunan Emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan		100	Rp325.000.000	100	Rp467.500.000	100	Rp514.250.000	100	Rp564.575.000	100	DLHK

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10			
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		100		100		100		100		100	DLHK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Usaha/ Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		60		65		70		75		75	DLHK
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penyusunan Rekomendasi pengakuan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak MHA terkait dengan PPLH		100	Rp155.000.000	100	Rp150.000.000	100	Rp150.000.000	100	Rp150.000.000	100	DLHK

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10			
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok swadaya masyarakat yang aktif dan mandiri		60	Rp800.000.000	70	Rp850.000.000	80	Rp900.000.000	90	Rp950.000.000	90	DLHK
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan		75	Rp200.000.000	80	Rp200.000.000	85	Rp200.000.000	90	Rp200.000.000	90	DLHK
(2 11 10) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diverifikasi		100	Rp200.000.000	100	Rp200.000.000	100	Rp200.000.000	100	Rp200.000.000	100	DLHK
(2 11 11) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan di TPA Regional		0		5		10		15		15	DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase luas DAS yang dikelola	600	9,13	Rp1.150.000.000	9,13	Rp1.000.000.000	9,13	Rp1.000.000.000	9,13	Rp1.000.000.000	9,13	DLHK
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	25	30	Rp330.000.000	40	Rp340.000.000	45	Rp350.000.000	50	Rp360.000.000	50	DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi		13,17	Rp325.000.000	13,17	Rp325.000.000	13,17	Rp325.000.000	13,17	Rp325.000.000	13,17	DLHK

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekarahaman Hayati yang dilaksanakan		100	Rp450.000.000	100	Rp460.000.000	100	Rp125.000.000	100	Rp133.100.000	100	DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Persentase Pemanfaatan Kawasan Hutan	46,18	35,68	Rp3.420.000.000	35,65	Rp3.495.000.000	35,61	Rp3.070.000.000	35,41	Rp3.220.000.000	35,41	DLHK
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)		20	Rp1.675.000.000	20	Rp1.775.000.000	20	Rp1.875.000.000	20	Rp1.975.000.000	20	DLHK
	Persentase dukungan usaha penurunan kerusakan hutan dan lahan											DLHK
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		100	Rp600.000.000	100	Rp600.000.000	100	Rp600.000.000	100	Rp600.000.000	100	DLHK
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama desa yang dilaksanakan	100	17,5	Rp302.903.042	22,5	Rp337.187.042	27,5	Rp346.337.042	32,5	Rp363.615.042	100	DINSOSPEMDES
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	25	Rp2.327.096.263	25	Rp2.453.904.385	25	Rp2.547.888.385	25	Rp2.682.515.749	100	DINSOSPEMDES

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa yang dibina	100	25	Rp319.927.000	25	Rp661.133.000	25	Rp681.334.000	25	Rp748.473.000	100	DINSOSPEMDES
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Dibina	100	25	Rp3.689.467.252	25	Rp3.496.870.845	25	Rp3.359.034.326	25	Rp3.606.458.868	100	DINSOSPEMDES
URUSAN PERHUBUNGAN												
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	26,47%	87,4	Rp17.000.000.000	87,42	Rp13.774.000.000	87,43	Rp14.934.000.000	87,45	Rp14.560.000.000	87,45	DISHUB
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	67%	81,5	Rp3.198.000.000	81,5	Rp1.980.000.000	81,5	Rp4.480.000.000	81,5	Rp6.260.000.000	81,5	DISHUB
	Persentase Rute Pelayaran yang terfasilitasi	67%	85	Rp15.867.000.000	85	Rp17.696.000.000	85	Rp19.596.000.000	85	Rp19.696.000.000	85	DISHUB
URUSAN KOMUNIKASI, INFORMASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK												
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik	95	100	Rp8.900.000.000	100	Rp9.345.000.000	100	Rp9.812.250.000	100	Rp10.302.862.500		Diskominfo

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7	8	9		10	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASIINFORMATIKA	Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik.	90	80	Rp4.295.000.000	85	Rp4.509.750.000	90	Rp4.735.237.500	100	Rp4.971.999.375		Diskominfo
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	75	60	Rp365.000.000	75	Rp383.250.000	85	Rp402.100.000	100	Rp421.580.000		Diskominfo
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Presentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	60	65	Rp721.000.000	75	Rp757.000.000	85	Rp794.000.000	100	Rp833.000.000		Diskominfo
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi, UKM yang terlatih		250	250,000,000	260	275,000,000	270	302,500,000	280	332,750,000	280	DKUMKM
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi, UKM yang terlatih		250	Rp250.000.000	260	Rp275.000.000	270	Rp302.500.000	280	Rp332.750.000	280	DKUKM
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi, UKM yang terlatih		250	Rp250.000.000	260	Rp260.000.000	270	Rp270.000.000	280	Rp280.000.000	280	DKUKM

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10			
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi, UKM yang terlatih		250	Rp250.000.000	260	Rp275.000.000	270	Rp302.500.000	280	Rp332.750.000	280	DKUKM
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi, UKM yang terlatih		250	Rp250.000.000	260	Rp260.000.000	270	Rp270.000.000	280	Rp280.000.000	280	DKUKM
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi		2	Rp. 150,000,000.00	3	Rp. 200,000,000.00	3	Rp. 300,000,000.00	5	Rp. 350,000,000.00	5	DKUKM
Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa		20	Rp. 100,000,000.00	20	Rp. 150,000,000.00	20	Rp. 200,000,000.00	27	Rp. 250,000,000.00	27	DKUKM
			20	Rp. 150,000,000.00	20	Rp. 200,000,000.00	20	Rp. 300,000,000.00	27	Rp. 350,000,000.00	27	DKUKM
			13	Rp. 25,000,000.00	13	Rp. 30,000,000.00	13	Rp. 35,000,000.00	13	Rp. 40,000,000.00		DKUKM
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai		10	Rp. 75,000,000.00	10	Rp. 100,000,000.00	10	Rp. 125,000,000.00	10	Rp. 150,000,000.00	10	DKUKM
			3	Rp. 75,000,000.00	3	Rp. 100,000,000.00	3	Rp. 125,000,000.00	3	Rp. 150,000,000.00	3	DKUKM
			0	Rp. 0.00	0	Rp. 0.00	0	Rp. 0.00	0	Rp. 0.00	0	DKUKM
			0	Rp. 0.00	0	Rp. 0.00	0	Rp. 0.00	0	Rp. 0.00	0	DKUKM
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan		5	Rp. 400,000,000.00	7	Rp. 500,000,000.00	9	Rp. 600,000,000.00	11	Rp. 700,000,000.00	11	DKUKM
			5	Rp. 200,000,000.00	7	Rp. 225,000,000.00	9	Rp. 250,000,000.00	11	Rp. 300,000,000.00	11	DKUKM
			5	Rp. 150,000,000.00	7	Rp. 225,000,000.00	9	Rp. 300,000,000.00	11	Rp. 375,000,000.00	11	DKUKM

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan (UMKM)		0,47%	3.000.000.000	0,51%	3.300.000.000	0,56%	3.630.000.000	0,62%	3.960.000.000	0,62%	DKUKM
URUSAN PENANAMAN MODAL												
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Banyaknya investor yang menanamkan modal	779 investor	23 Investor	Rp1.300.000.000	25 Investor	Rp1.300.000.000	27 Investor	Rp1.900.000.000	30 Investor	Rp2.200.000.000	105 Investor	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Promosi Penanaman Modal	Peluang penanaman modal yang dipromosikan	N/A	2	Rp850.000.000	2	Rp950.000.000	2	Rp675.000.000	2	Rp925.000.000	2	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pelayanan Penanaman Modal	Pelaku Usaha yang terlayani	N/A	950 Pelaku Usaha	Rp1.300.000.000	1000 Pelaku Usaha	Rp1.600.000.000	1050 Pelaku Usaha	Rp1.950.000.000	1125 Pelaku Usaha	Rp2.300.000.000	4.25 Pelaku Usaha	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengendalian Pelaksanaan PenanamanModal	Persentase Perusahaan Yang Patuh Terhadap Perundang-Undangan	1,05%	1%	Rp800.000.000	1,10%	Rp900.000.000	1,20%	Rp1.010.000.000	1,30%	Rp1.115.000.000	1,30%	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang dikelola	1 Dokumen	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	Rp50.000.000	1	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		23,53	Rp3.900.000.000	30,77	Rp6.050.000.000	44,44	Rp8.900.000.000	80	Rp10.550.000.000	80	DISPARBUDPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang dibina	55,56	55,56	Rp37.450.000.000	61,11	Rp45.450.000.000	63,89	Rp58.450.000.000	69,44	Rp50.950.000.000	69,44	DISPARBUDPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Yang dibina		0,38		0,45		0,52		0,57		0,57	DISPARBUDPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	35	35	Rp550.000.000	35	Rp605.000.000	35	Rp665.500.000	35	Rp732.050.000	35	DISPARBUDPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase tingkat keaktifan Organisasi Pramuka	19,51	19,51	Rp1.500.000.000	19,51	Rp1.500.000.000	19,51	Rp1.500.000.000	19,51	Rp1.500.000.000	19,51	DISPARBUDPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Yang dibina	0,51	0,38	Rp1.728.426.394	0,45	Rp2.065.311.673	0,52	Rp2.478.374.008	0,57	Rp2.974.048.809	0,57	DISPARBUDPORA
URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN												
Pembinaan Perpustakaan	Persentasi Perpustakaan Yang di Bina	67%	35%	Rp1.664.000.000	37%	Rp1.912.900.000	38%	Rp2.104.190.000	41%	Rp2.314.609.000	44%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentasi Perpustakan yang dikembangkan		40%		41%		42%		43%		44%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7	8	9		10	
	Jumlah sosialisasi perpustakaan dan kepustakawan sebagai narasumber										DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	Jumlah pengkajian ke pustakawanan bersifat kompleks										DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	Jumlah konsultasi kepustakawanan bersifat konsep kepada institusi										DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	Jumlah karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kepustakawanan yang di publikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional										DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	Jumlah Evaluasi penyelenggaraan perpustakaan										DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10			
	Jumlah Bimbingan Penggunaan Sumber Referensi										DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	Jumlah Bimbingan Pemustaka dalam bentuk literasi informasi										DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	jumlah sarana prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dibidang kepustakawanan pada pertemuan ilmiah										DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	Jumlah koleksi perpustakaan hasil penyiangan yang dikelola										DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	jumlah konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep kepada institusi										DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7	8	9		10	
	jumlah tulisan ilmiah populer dibidang kepustakawanan yang disebarluaskan melalui media massa										DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	jumlah konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep kepada institusi										DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	jumlah tulisan ilmiah populer dibidang kepustakawanan yang disebarluaskan melalui media massa										DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno	0	5	Rp1.225.000.000	5	Rp1.347.500.000	5	Rp1.482.250.000	5	Rp1.630.475.000	5	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Jumlah cantuman katalogisasi deskriptif Bahan Perpustakaan yang divalidasi tingkat 3										DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
	Jumlah judul klasifikasi kompleks dan tajuk subyek Bahan Perpustakaan yang divalidasi											DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno											DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Jumlah Cantuman Katalogisasi Deskriptif Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tervalidasi											DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Berkas Arsip Yang Di Lindungi Dan Di Selamatkan Sesuai Dengan Ketentuan	0	25%	Rp680.000.000	25%	Rp748.000.000	25%	Rp822.800.000	25%	Rp905.080.000	25%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standart Baku Kearsipan	N/A	20	Rp525.000.000	20	Rp577.500.000	20	Rp635.250.000	20	Rp698.775.000	20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
Program Perizinan dan Penggunaan Arsip	Persentase Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup	N/A	12,50%	Rp45.000.000	12,50%	Rp49.500.000	12,50%	Rp54.450.000	12,50%	Rp59.895.000	13%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
												DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
URUSAN KEBUDAYAAN												
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	5	100	Rp706.000.000	100	Rp850.000.000	100	Rp851.000.000	100	Rp706.000.000	100	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal yang Dibina	42,86	57	Rp150.000.000	71	Rp150.000.000	86	Rp150.000.000	100	Rp150.000.000	100	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	18,92	41	Rp650.000.000	62	Rp600.000.000	84	Rp650.000.000	100	Rp600.000.000	100	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang dikelola	100	100	Rp1.500.000.000	100	Rp1.375.000.000	100	Rp775.000.000	100	Rp1.800.000.000	100	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	5	100	Rp706.000.000	100	Rp850.000.000	100	Rp851.000.000	100	Rp706.000.000	100	DISPARBUDPORA

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal yang Dibina	42,86	57	Rp150.000.000	71	Rp150.000.000	86	Rp150.000.000	100	Rp150.000.000	100	DISPARBUDPORA
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	18,92	41	Rp650.000.000	62	Rp600.000.000	84	Rp650.000.000	100	Rp600.000.000	100	DISPARBUDPORA
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang dikelola	100	100	Rp1.500.000.000	100	Rp1.375.000.000	100	Rp775.000.000	100	Rp1.800.000.000	100	DISPARBUDPORA
URUSAN PILIHAN												
URUSAN PARIWISATA												
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	N/A	23,53	Rp3.900.000.000	30,77	Rp6.050.000.000	44,44	Rp8.900.000.000	80	Rp10.550.000.000	80	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekraf yang Memiliki Kompetensi	N/A	9,50%	Rp2.710.000.000	10%	Rp4.220.000.000	9,60%	Rp4.580.000.000	9,70%	Rp4.390.000.000	0,097	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Ditingkatkan Kualitasnya	N/A	67%	Rp3.105.504.000	83%	Rp2.575.504.000	100%	Rp2.105.504.000	100%	Rp650.000.000	100	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	N/A	261.600	Rp4.226.725.000	285.144	Rp4.649.397.500	310.807	Rp5.114.337.250	338.780	Rp5.625.770.975	196.331	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditingkatkan Kualitasnya di Pulau Belitung, Geopark Belitung dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	N/A	109	Rp5.800.000.000	105	Rp1.350.000.000	106	Rp1.900.000.000	105	Rp1.450.000.000	105	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA (UPT)
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Pulau Belitung	N/A	9	Rp1.550.000.000	14	Rp2.400.000.000	18	Rp3.000.000.000	22	Rp3.600.000.000	63	DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA (UPT)
URUSAN TRANSMIGRASI												
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Perencanaan Ketenagakerjaan kab/kota		100%	Rp200.000.000	100%	Rp250.000.000	100%	Rp300.000.000	100%	Rp350.000.000	100%	Disnaker
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang dikembangkan		1 Desa	Rp240.000.000	1 Desa	Rp280.000.000	1 Desa	Rp280.000.000	1 Desa	Rp280.000.000	1 Desa	Disnaker
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang dikembangkan		1 Desa	240 juta	1 Desa	280 jt	1 Desa	280 jt	1 Desa	280 jt		Disnaker

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Yang dikembangkan		1 Desa	Rp240.000.000	1 Desa	Rp280.000.000	1 Desa	Rp280.000.000	1 Desa	Rp280.000.000	1 Desa	Disnaker
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN												
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap	225.282	226.300	Rp14.545.000.000	229.300	Rp18.170.000.000	232.400	Rp18.780.000.000	235.650	Rp19.870.000.000	235.650	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya	N/A	13.500	Rp4.929.800.000	13.980	Rp4.894.800.000	14.540	Rp6.504.800.000	15.170	Rp5.589.800.000	15.170	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	N/A	10,5	Rp2.479.800.000	11	Rp2.674.800.000	11.5	Rp2.954.800.000	12	Rp3.229.800.000	12	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAMPENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi pengolahan hasil perikanan	N/A	24,41	Rp1.100.000.000	22.810	Rp920.000.000	23.310	Rp1.040.000.000	23.910	Rp1.160.000.000	23.910	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAMPENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase UPI yang dibina memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persentase)	92%	85%	Rp100.000.000	87%	Rp200.000.000	88%	Rp300.000.000	90%	Rp400.000.000	90%	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAMPENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	75	70	Rp1.975.000.000	73	Rp2.450.000.000	76	Rp2.900.000.000	80	Rp3.345.000.000	80	Dinas Kelautan Dan Perikanan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
PROGRAMPENGAWASANSU MBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	75	70	Rp1.975.000.000	73	Rp2.450.000.000	76	Rp2.900.000.000	80	Rp3.345.000.000	80	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAMPENGAWASANSU MBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	75	70	Rp1.975.000.000	73	Rp2.450.000.000	76	Rp2.900.000.000	80	Rp3.345.000.000	80	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	lokasi Jasa Kelautan yang dimanfaatkan untuk peningkatan investasi di perairan Bangka Belitung	N/A	24	Rp2.600.000.000	25	Rp2.800.000.000	25	Rp3.200.000.000	27	Rp3.750.000.000	27	Dinas Kelautan Dan Perikanan
PROGRAMPENGAWASANSU MBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	75	70	Rp1.975.000.000	73	Rp2.450.000.000	76	Rp2.900.000.000	80	Rp3.345.000.000	80	Dinas Kelautan Dan Perikanan
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL												
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah Dokumen Bauran Energi Terbarukan	N/A	12,32%	Rp560.000.000	12,98%	Rp510.000.000	17,21%	Rp510.000.000	17,98%	Rp510.000.000	17,98%	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah Dokumen Perizinan Ketenagalistrikan	N/A	99,99%	Rp925.000.000	99,99%	Rp925.000.000	99,99%	Rp925.000.000	99,99%	Rp925.000.000	99,99%	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah	N/A	80%	Rp1.435.000.000	85%	Rp1.435.000.000	85%	Rp1.485.000.000	90%	Rp1.485.000.000	90%	Dinas ESDM

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase pertambangan yang "good mining practices"	N/A	85%	Rp1.555.000.000	85%	Rp1.790.000.000	85%	Rp2.015.000.000	85%	Rp2.240.000.000	85%	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah	N/A	80%	Rp30.000.000	85%	Rp30.000.000	85%	Rp30.000.000	90%	Rp30.000.000	90%	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah Dokumen Perizinan Ketenagalistrikan	N/A	99,99%	Rp60.000.000	99,99%	Rp60.000.000	99,99%	Rp60.000.000	99,99%	Rp60.000.000	99,99%	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase pertambangan yang "good mining practices"	N/A	85%	Rp30.000.000	85%	Rp30.000.000	85%	Rp30.000.000	85%	Rp30.000.000	85%	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah Dokumen Perizinan Ketenagalistrikan	N/A	99,99%	Rp35.000.000	99,99%	Rp40.000.000	99,99%	Rp45.000.000	99,99%	Rp45.000.000	99,99%	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase pertambangan yang "good mining practices"	N/A	85%	Rp70.000.000	85%	Rp80.000.000	85%	Rp90.000.000	85%	Rp90.000.000	85%	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah Dokumen Bauran Energi Terbarukan	N/A	12,32%	Rp0	12,98%	Rp0	17,21%	Rp0	17,98%	Rp0	17,98%	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah Dokumen Perizinan Ketenagalistrikan	N/A	99,99%	Rp25.000.000	99,99%	Rp25.000.000	99,99%	Rp25.000.000	99,99%	Rp25.000.000	99,99%	Dinas ESDM

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Kepatuhan penataan izin air tanah	N/A	80%	Rp0	85%	Rp0	85%	Rp0	90%	Rp0	90%	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase pertambangan yang "good mining practices"	N/A	85%	Rp35.000.000	85%	Rp40.000.000	85%	Rp45.000.000	85%	Rp45.000.000	85%	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah Dokumen Perizinan Ketenagalistrikan	N/A	99,99%	Rp25.000.000	99,99%	Rp25.000.000	99,99%	Rp25.000.000	99,99%	Rp25.000.000	99,99%	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase pertambangan yang "good mining practices"	N/A	85%	Rp60.000.000	85%		85%		85%		85%	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah Dokumen Perizinan Ketenagalistrikan	N/A	99,99%	Rp35.000.000	99,99%	Rp35.000.000	99,99%	Rp35.000.000	99,99%	Rp35.000.000	99,99%	Dinas ESDM
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase pertambangan yang "good mining practices"	N/A	85%	Rp105.000.000	85%	Rp105.000.000	85%	Rp105.000.000	85%	Rp105.000.000	85%	Dinas ESDM
URUSAN PERDAGANGAN												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RPK)	Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan	1	75	Rp4.218.800.000	75	Rp1.898.640.000	75	Rp1.166.314.000	75	Rp1.511.555.400	75	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Tertib Usaha	1	100	Rp313.000.000	100	Rp344.300.000	100	Rp378.730.000	100	Rp416.603.000	100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Barang terdistribusi	12	82	Rp500.000.000	84	Rp600.000.000	86	Rp735.000.000	88	Rp840.000.000	88	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	9,20%	8,50%	Rp673.000.000	8,30%	Rp740.300.000	8,20%	Rp814.330.000	8,00%	Rp895.763.000	8,00%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Nilai Indeks Keberdayaan Konsumen	40	42	Rp1.087.000.000	43	Rp1.195.700.000	43	Rp1.315.270.000	44	Rp1.446.797.000	44	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (BPSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (UPTD BPSMB)		100	Rp775.000.000	100	Rp857.000.000	100	Rp1.007.500.000	100	Rp1.098.250.000	100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Lokal yang digunakan, dipromosikan dan dipasarkan melalui Akses Pasar	12	60	Rp1.100.000.000	65	Rp1.350.000.000	70	Rp1.600.000.000	75	Rp1.850.000.000	75	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (RPK)	Persentase Fasilitas Produk UMKM yang dipasarkan (UPTD RPK)	70%	40%	Rp438.000.000	40%	Rp380.000.000	50%	Rp424.000.000	50%	Rp718.000.000	50%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan nilai ekspor	6	4%	Rp1.750.000.000	4,5	Rp1.925.000.000	5	Rp2.117.500.000	6	Rp2.329.250.000	6	DISPERINDAG
URUSAN PERINDUSTRIAN												
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Industri	1	2	Rp9.025.000.000	2	Rp9.025.000.000	2	Rp9.025.000.000	2	Rp9.025.000.000	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Tersusunnya Risalah Naskah Penelitian Pertumbuhan Industri		2		2		2		2		2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPK)	Persentase Fasilitas Layanan Desain dan Kemasan Produk UMKM yang diproduksi (UPTD RPK)	70%	60%	Rp3.500.000.000	60%	Rp1.250.000.000	70%	Rp1.500.000.000	70%	Rp4.000.000.000	70%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7	8	9		10	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Perusahaan Industri dan Kawasan Industri	Persentase Industri yang Sesuai IUI	60	Rp200.000.000	65	Rp230.000.000	70	Rp250.000.000	75	Rp270.000.000	75	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Industri dan Kawasan Industri		50	Rp1.055.000.000	55	Rp1.200.000.000	60	Rp1.230.000.000	65	Rp1.350.000.000	65	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri pada Akun SIINas	Persentase Data Informasi Industri di SIINas	80	Rp470.000.000	85	Rp545.000.000	90	Rp600.000.000	95	Rp665.000.000	95	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD dan Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Derah	67,90% dan Nilai SAKIP 80	75% dan Nilai SAKIP 70	Rp11.427.352.191	80% dan Nilai SAKIP 72	Rp13.687.596.629	85% dan Nilai SAKIP 74	Rp16.431.089.955	90% dan Nilai SAKIP 75	Rp19.710.081.946	90% dan Nilai SAKIP 75	Badan Penghubung
PELAYANAN PENGHUBUNG	Survey kepuasan pelayanan Badan Penghubung	100%	80%	Rp2.205.325.700	85%	Rp2.315.592.457	90%	Rp2.431.372.080	95%	Rp2.552.940.684	95%	Badan Penghubung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75%	77%	Rp20.931.028.350	80%	Rp20.857.700.000	83%	Rp21.928.700.000	86%	Rp21.962.700.000	86%	Dinas ESDM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85%	Rp382.140.000	90%	Rp372.140.000	90%	Rp372.140.000	95%	Rp372.140.000	95%	Dinas ESDM Cabang Dinas Wilayah Bangka
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85%	Rp799.600.000	90%	Rp574.600.000	90%	Rp574.600.000	95%	Rp574.600.000	95%	Dinas ESDM Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85%	Rp441.450.000	90%	Rp468.200.000	90%	Rp468.200.000	95%	Rp468.200.000	95%	Dinas ESDM Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85%	Rp400.200.000	90%	Rp400.200.000	90%	Rp400.200.000	95%	Rp400.200.000	95%	Dinas ESDM Cabdin ESDM Wil. Bltng
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85%	Rp439.700.000	90%	Rp439.700.000	90%	Rp439.700.000	95%	Rp439.700.000	95%	Cabdin ESDM Wil. Beltim
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		79	Rp18.840.980.000	79,5	Rp19.538.180.000	80	Rp19.217.640.000	80,5	Rp19.868.256.000	80,5	Dinas Kelautan Dan Perikanan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		79	Rp779.500.000	79,5	Rp875.250.000	80	Rp986.500.000	80,5	Rp1.336.800.000	80,5	DKP UPT BPI

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7	8	9		10	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		79	Rp439.000.000	79,5	Rp572.250.000	80	Rp525.500.000	80,5	Rp828.800.000	80,5	DKP UPT LPPMHP
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah dan Survey Kepuasan Pelayanan Internal	Nilai Sakip PD	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah dan Survey Kepuasan Pelayanan Internal	17,269,526,031	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah dan Survey Kepuasan Pelayanan Internal	18,133,002,333	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah dan Survey Kepuasan Pelayanan Internal	19,039,652,449	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah dan Survey Kepuasan Pelayanan Internal	19,991,635,072	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah dan Survey Kepuasan Pelayanan Internal	Inspektorat
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72%	79	Rp374.118.520	80	Rp448.942.224	81	Rp538.730.669	82	Rp646.476.803	82	Bankesbangpol
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Sakip PD		78	Rp395.000.000	79	Rp414.750.000	80	Rp435.487.500	81	Rp457.261.875	81	DPMPTSP
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Survey Kepuasan Pelayanan internal (DPMPTSP)			Rp11.560.329.872		Rp11.846.246.365		Rp13.010.458.683		Rp12.707.981.617		DPMPTSP
(2 11 01) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/a	79	Rp37.002.639.079	81	Rp40.392.648.231	83	Rp36.962.648.231	85	Rp36.972.503.231	85	Dinas DLHK
	2. Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK)		100		100		100		100		100	Dinas DLHK
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2. Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK)			Rp470.500.000		Rp615.500.000		Rp553.500.000		Rp619.000.000		Dinas DLHK KPH BM
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (KPH SS)	2. Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK)			Rp470.500.000		Rp615.500.000		Rp553.500.000		Rp619.000.000		Dinas DLHK KPH SS

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (KPH RM)	2. Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK)			Rp290.220.000	Rp405.460.000	Rp324.550.000	Rp372.240.000			Dinas DLHK KPH RM		
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (KPH BP)	2. Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK)			Rp271.720.000	Rp395.430.000	Rp299.750.000	Rp295.740.000			Dinas DLHK KPH BP		
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (KPH MP)	2. Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK)		100	Rp548.949.438	100	Rp805.863.220	100	Rp1.145.593.671	100	Rp1.607.889.016	100	Dinas DLHK KPH MP
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (KPH SKW)	2. Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK)			Rp282.000.000	Rp287.000.000	Rp292.000.000	Rp297.000.000			Dinas DLHK KPH SKW		
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (KPH GD)	2. Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK)			Rp448.239.086	Rp412.490.000	Rp383.990.000	Rp351.990.000			Dinas DLHK KPH GD		
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (KPH JBA)	2. Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK)	N/a	79	Rp271.720.000	81	Rp395.430.000	83	Rp299.750.000	85	Rp295.740.000	85	Dinas DLHK KPH JBA
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (LAB LINGKUNGAN	2. Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (DLHK)			Rp1.965.219.500	Rp1.998.977.500	Rp2.019.525.000	Rp2.103.870.000			Dinas DLHK LAB LINGKUNGAN		
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Survey Kepuasan pelayanan internal		90	Rp305.025.976.449	90	Rp315.025.976.449	90	Rp325.025.976.449	90	Rp335.025.976.449	90	DINAS PENDIDIKAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan											DINAS PENDIDIKAN
	Survey Kepuasan pelayanan internal		90		90		90		90		90	DINAS PENDIDIKAN
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan pelayanan internal		90	Rp3.473.900.000	90	Rp4.227.100.000	90	Rp1.320.300.000	90	Rp1.063.500.000	90	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Survey Kepuasan pelayanan internal		90	Rp1.854.400.000	90	Rp994.400.000	90	Rp1.178.900.000	90	Rp1.374.900.000	90	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Survey Kepuasan pelayanan internal		90	Rp3.684.300.000	90	Rp814.300.000	90	Rp624.300.000	90	Rp514.300.000	90	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Survey Kepuasan pelayanan internal		90		90	Rp1.731.840.000	90	Rp726.750.000	90	Rp616.500.000	90	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Survey Kepuasan pelayanan internal		90	Rp3.963.500.000	90	Rp984.000.000	90	Rp884.500.000	90	Rp765.000.000	90	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan pelayanan internal		90	Rp2.611.000.000	90	Rp2.656.000.000	90	Rp2.701.000.000	90	Rp2.780.000.000	90	UPT BALAI TEKOMDIK
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Survey Kepuasan pelayanan internal		90	Rp30.000.000.000	90	Rp30.000.000.000	90	Rp30.000.000.000	90	Rp30.000.000.000	90	Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74	Nilai SAKIP A	Rp297	Nilai SAKIP A	Rp312	Nilai SAKIP A	Rp328	Nilai SAKIP A	Rp343	Nilai SAKIP A	DINAS PERHUBUNGAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Derah	90%	85	Rp18.859	85	Rp31.212	85	Rp21.293	85	Rp22.351	85	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BPSMB)	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Disperindag)		80	Rp240.000.000	80	Rp260.000.000	80	Rp290.000.000	80	Rp300.000.000		DIPERINDAG
	Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			Rp633.500.000		Rp720.250.000		Rp814.500.000		Rp889.000.000		UPT Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk NAMA : Armaini, SP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (RPK)	Survey Kepuasan Pelayanan Teknis Rumah Promosi dan Kemasan	80	75%	Rp4.218.800.000	75%	Rp1.898.640.000	75%	Rp1.166.314.000	75%	Rp1.511.555.400		UPT Rumah Promosi dan Kemasan Produk NAMA : Alfatah Suriaan, S.S
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD (DPKP)	-	80,88	Rp3.750.000.000	81,29	Rp3.937.500.000	81,69	Rp4.134.375.000	82,1	Rp4.341.093.750	82,1	DPKP
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal (DPKP) (%)	80	80		80		80		80		80	DPKP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD (DPKP)	-		Rp550.000.000		Rp577.500.000		Rp606.375.000		Rp636.693.750		UPTD Balai benih
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD (DPKP)	-	80	Rp350.000.000	80	Rp367.500.000	80	Rp385.875.000	80	Rp405.168.750	80	UPTD Proteksi

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD (DPKP)	-		Rp270.000.000		Rp283.500.000		Rp297.675.000		Rp312.558.750		UTPD PMKP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD (DPKP)	-		Rp350.000.000		Rp367.500.000		Rp385.875.000		Rp405.168.750		UPTD PSMB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	78	Rp149.814.944	78,1	Rp164.796.438	78,2	Rp181.276.082	78,3	Rp199.403.690	78,3	Dinsospemdes
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD	100	90	Rp29.010.284.759	90	Rp31.473.164.649	90	Rp33.978.645.547	90	Rp36.865.818.243	90	Dinsospemdes
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD	100	90	Rp2.859.226.852	90	Rp3.431.052.834	90	Rp1.520.086.814	90	Rp1.592.973.969	90	Dinsospemdes
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	78	Rp20.360.000	78,1	Rp20.360.000	78,2	Rp20.360.000	78,3	Rp20.360.000	78,3	Dinsospemdes
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD	100	90	Rp3.984.540.022	90	Rp3.145.261.573	90	Rp2.769.083.393	90	Rp1.762.980.589	90	Dinsospemdes
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD	N/a	79	Rp419.700.000	80	Rp503.640.000	81	Rp604.368.000	82	Rp725.241.600	82	DIPARBUDKEPORA
	Survey kepuasan pelayanan internal	N/a	75	Rp23.594.621.871	76	Rp28.283.546.246	77	Rp33.940.255.495	79	Rp40.728.306.594	79	DIPARBUDKEPORA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Survey kepuasan pelayanan internal UPTD	N/a		Rp1.270.200.000		Rp777.200.000		Rp784.400.000		Rp903.040.000		UPTD. BALAI PENGEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH BELITUNG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD		80	8,641,061,981	80	8,861,963,531	80	9,088,875,119	80	9,321,995,747	80	DKUMKM
												DKUMKM

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Survey Kepuasan Pelayanan Internal		80		80		80		80	80	DKUMKM	
											DKUMKM	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kepuasan Pelayanan Internal (DKUMKM)		80%	724,746,483	80%	424,721,131	80%	512,193,244	80%	1,332,412,569	80%	DKUMKM
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi, UKM yang terlatih		250	250,000,000	260	275,000,000	270	302,500,000	280	332,750,000	280	DKUMKM
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Pelayanan Internal PD Setda	80%	82	99,242,300,000	83	109,166,530,000	84	120,083,183,000	85	132,091,501,300	85	SETDA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD	81,75	82	Rp65.000.000	82,25	Rp81.250.000	82,5	Rp101.562.500	82,75	Rp126.953.125	82,75	BKPSDMD
	Survei Kepuasan Pelayanan Internal	69,42%	70	Rp21.782.825.702	71	Rp21.266.253.845	72	Rp21.860.190.191	73	Rp22.482.837.195	73	BKPSDMD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	Survey Kepuasan Pelayanan Internal ,Nilai Sakip PD	92 Nilai	92 Nilai	Rp73.245.647.900	92 Nilai	Rp76.907.930.295	92 Nilai	Rp80.753.326.810	92 Nilai	Rp84.790.993.150	92 Nilai	Setwan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,28	80	Rp125.000.000	81	Rp131.250.000	82	Rp137.812.500	83	Rp144.703.125	83	Bakuda
	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah	76,79	78	Rp64.934.258.349	79	Rp67.813.471.267	80	Rp71.192.144.830	81	Rp74.739.752.071	81	Bakuda

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,28	80	Rp15.000.000	81	Rp15.750.000	82	Rp16.537.500	83	Rp17.364.375	83	UPTB Bakuda
	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah	76,79	80,25	Rp1.870.640.926	80,5	Rp1.546.147.972	80,75	Rp2.053.830.371	81	Rp1.705.021.889	81	UPTB Bakuda
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,28	80	Rp15.000.000	81	Rp15.750.000	82	Rp16.537.500	83	Rp17.364.375	83	UPTB Bakuda
	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah	76,79	81	Rp1.299.000.000	82	Rp1.154.200.000	83	Rp1.412.135.000	84	Rp1.482.941.750	84	UPTB Bakuda
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,28	80	Rp25.000.000	81	Rp26.250.000	82	Rp27.562.500	83	Rp28.940.625	83	UPTB Bakuda
	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah	76,79	79	Rp1.161.000.000	80	Rp1.063.040.336	81	Rp1.330.942.353	82	Rp1.171.489.471	82	UPTB Bakuda
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,28	80	Rp15.000.000	81	Rp15.750.000	82	Rp16.537.500	83	Rp17.364.375	83	UPTB Bakuda
	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah	76,79	81,5	Rp1.626.500.000	82,5	Rp1.331.325.000	83,5	Rp1.798.303.750	84,5	Rp1.888.843.938	84,5	UPTB Bakuda
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,28	80	Rp15.000.000	81	Rp15.750.000	82	Rp16.537.500	83	Rp17.364.375	83	UPTB Bakuda
	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah	76,79	79,5	Rp2.199.500.000	80	Rp759.333.611	80,5	Rp997.050.292	81	Rp836.652.806	81	UPTB Bakuda

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,28	80	Rp25.000.000	81	Rp26.250.000	82	Rp27.562.500	83	Rp28.940.625	83	UPTB Bakuda
	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah	76,79	80,5	Rp1.410.500.000	81	Rp1.082.275.000	81,5	Rp1.556.613.750	82	Rp1.403.644.438	82	UPTB Bakuda
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,28	80	Rp15.000.000	81	Rp15.750.000	82	Rp16.537.500	83	Rp17.364.375	83	UPTB Bakuda
	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah	76,79	79,5	Rp988.500.000	81	Rp854.364.835	82	Rp1.096.833.076	82,5	Rp1.151.424.730	82,5	UPTB Bakuda
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD		77.12	Rp296,087,416	77.14	Rp310,891,787	77.16	Rp326,436,376	77.18	Rp342,758,195	77.18	BPBD
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	80	80	Rp10,693,359,826	82	Rp11,957,655,090	82	Rp54,132,702,034	84	Rp57,104,851,511	84	BPBD
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A		Rp103.861.000.000		Rp107.796.000.000		Rp112.362.250.000		Rp116.136.312.500		Rumah Sakit Umum Provinsi
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD											Rumah Sakit Umum Provinsi
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD	77,3	80	Rp24.884.748.266	80	Rp25.631.290.714	80	Rp26.400.229.436	80	Rp27.192.236.319	80%	Dinas Kesehatan
	Survey kepuasan pelayanan internal (dinkes)		82%		82%		82%		83%		83%	Dinas Kesehatan

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Survey Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD Balai Labkes)	N/A	82%	Rp4.557.241.850	82%	Rp1.554.793.961	82%	Rp1.601.437.780	83%	Rp1.649.480.913	83%	Dinas Kesehatan
Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	N/A	81%	Rp40.000.000	81,1%	Rp40.000.000	81,2%	Rp40.000.000	81,3%	Rp40.000.000	81,4,%	Rumah Sakit Jiwa Daerah
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD	N/A	78%	Rp20.290.145.000	80%	Rp18.926.539.000	81%	Rp19.317.845.250	82%	Rp19.020.535.875	83%	Rumah Sakit Jiwa Daerah
Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,28%	78%	Rp12.247.533.543	78,0%	Rp12.247.533.543	80,0%	Rp12.247.533.543	80,0%	Rp12.247.533.543	82,0%	DISKOMINFO
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD	100%	100%	Rp20.290.145.000	100%	Rp18.926.539.000	100%	Rp19.317.845.250	100%	Rp19.020.535.875	100%	DISKOMINFO
Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86%	86%	Rp16.560.381.176	86,0%	Rp16.560.381.176	87,0%	Rp16.560.381.176	87,0%	Rp16.560.381.176	88,0%	DISNAKER
Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78%	78%	Rp5.605.586.199	79%	Rp5.605.586.199	79%	Rp5.605.586.199	80%	Rp5.605.586.199	80%	DKPUS
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal PD	100%	100%	Rp18.239.588	100%	Rp18.239.588	100%	Rp18.239.588	100%	Rp18.239.588	100%	DKPUS
Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	74%	74%	Rp8.217.201.000	75%	Rp8.217.201.000	75%	Rp8.217.201.000	76%	Rp8.217.201.000	76%	DP3ACSKB
	2. Survey Kepuasan Pelayanan Internal (DP3ACSKB)	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	DP3ACSKB
	3. Tingkat Kepuasan Aparatur Daerah Terhadap Pelayanan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	DP3ACSKB

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
	Kesekretariatan UPTD PPA											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD	77	78	Rp1.000.000.000	79	Rp1.100.000.000	80	Rp1.300.000.000	81	Rp1.400.000.000	81	Dinas PUPERKIM
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	55	80	Rp31.000.000.000	80	Rp32.000.000.000	80	Rp33.000.000.000	82	Rp34.000.000.000	82	Dinas PUPERKIM
UNSUR PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program Pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	100	100	1.470.000.000	100	1.470.000.000	100	1.470.000.000	100	1.470.000.000	100	Bappeda
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	Bappeda
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	100	700.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	Bappeda
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	Bappeda
Program Penelitian dan Pengembagan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang digunakan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan	80	80	1.425.000.000	80	1.425.000.000	80	1.425.000.000	85	1.425.000.000	85	Bappeda

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
	Persentase Jumlah Inovasi Daerah yang dikembangkan	75	80	1.825.000.000	80	1.325.000.000	80	1.325.000.000	80	1.325.000.000	80	Bappeda
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	75	75	500.000.000	75	500.000.000	80	500.000.000	80	500.000.000	80	Bappeda
												Bappeda
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90	90	300.000.000	90	300.000.000	90	300.000.000	90	300.000.000	90	Bappeda
	Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	90	90	300.000.000	90	300.000.000	90	300.000.000	90	300.000.000	90	Bappeda
	Persentase Rumusan Hasil Pengendalian dan Evaluasi pada Dokumen Perencanaan PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90	90	300.000.000	90	300.000.000	90	300.000.000	90	300.000.000	90	Bappeda
UNSUR KEUANGAN												
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai ketepatan waktu penetapan APBD dan Perubahan APBD	NA	2	Rp930.000.000	2	Rp976.500.000	2	Rp1.025.325.000	2	Rp1.076.591.250	2	Bakuda

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
	Jumlah kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	7 Kabupaten/kota	7 Kabupaten/kota	Rp1.498.000.000	7 Kabupaten/kota	Rp1.630.300.000	7 Kabupaten/kota	Rp1.774.155.000	7 Kabupaten/kota	Rp1.930.686.750	7 Kabupaten/kota	Bakuda
	persentase realisasi penyediaan dana belanja APBD	83,46%	92,50%	Rp345.000.000	93,00%	Rp362.250.000	93,50%	Rp380.362.500	94,00%	Rp399.380.625	94,00%	Bakuda
	Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi,	2	2	Rp460.500.000	2	Rp483.525.000	2	Rp507.701.250	2	Rp533.086.313	2	Bakuda
	persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan terhadap penyaluran Dana Transfer dan BTT	NA	100%	Rp405.000.000.000	100%	Rp425.250.000.000	100%	Rp446.512.500.000	100%	Rp468.838.125.000	100%	Bakuda
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan PAD	16,71%	8,50%	Rp850.000.000	10,00%	Rp892.500.000	11,50%	Rp937.125.000	13,00%	Rp983.981.250	13,00%	UPTB Bakuda
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB	30,04%	11,26%	Rp124.800.000	12,39%	Rp131.040.000	13,63%	Rp137.592.000	14,99%	Rp144.471.600	14,99%	UPTB Bakuda
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB	30,04%	11,26%	Rp225.000.000	12,39%	Rp236.250.000	13,63%	Rp248.062.500	14,99%	Rp260.465.625	14,99%	UPTB Bakuda
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB	30,04%	11,26%	Rp165.000.000	12,39%	Rp173.250.000	13,63%	Rp181.912.500	14,99%	Rp191.008.125	14,99%	UPTB Bakuda
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB	30,04%	11,26%	Rp295.000.000	12,39%	Rp309.750.000	13,63%	Rp325.237.500	14,99%	Rp341.499.375	14,99%	UPTB Bakuda
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB	30,04%	11,26%	Rp210.000.000	12,39%	Rp184.800.000	13,63%	Rp194.040.000	14,99%	Rp203.742.000	14,99%	UPTB Bakuda
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB	30,04%	11,26%	Rp167.500.000	12,39%	Rp175.875.000	13,63%	Rp184.668.750	14,99%	Rp193.902.188	14,99%	UPTB Bakuda

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB	30,04%	11,26%	Rp237.500.000	12,39%	Rp249.375.000	13,63%	Rp261.843.750	14,99%	Rp274.935.938	14,99%	UPTB Bakuda
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Nilai Kepatuhan Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan	2	2	Rp687.500.000	2	Rp721.875.000	2	Rp757.968.750	2	Rp795.867.188	100%	Bakuda
UNSUR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui pengadaan	84,07	85	Rp1.615.341.955	86	Rp1.062.156.816	87	Rp1.792.561.831	88	Rp1.340.406.546	88	BKPSDMD
	Persentase pemenuhan pegawai ASN melalui mutasi, promosi	93,13	94%	Rp440.000.000	95%	Rp326.000.000	96%	Rp500.000.000	97%	Rp530.000.000	97%	BKPSDMD
	Persentase ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	11	1310	Rp3.221.250.000	1427	Rp3.705.156.250	1545	Rp3.824.550.781	1665	Rp4.183.869.629	1665	BKPSDMD
	Persentase ASN yang memiliki kinerja minimal baik	99,81	99,85	Rp460.000.000	99,87	Rp515.000.000	99,89	Rp570.000.000	99,91	Rp625.000.000	99,91	BKPSDMD
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat pengembangan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis	69,9	70	Rp7.500.000.000	75	Rp8.525.200.000	80	Rp8.175.250.000	85	Rp8.225.250.000	85	BKPSDMD
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
SEKRETARIAT DPRD												
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD	82%	82%	Rp38.944.092.077	82%	Rp24.801.264.681	82%	Rp26.041.327.915	82%	Rp27.343.394.311	82%	Sekretariat DPRD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase meningkatnya fungsi penganggaran lembaga DPRD dan Persentase meningkatnya fungsi pengawasan lembaga DPRD	82%	82%	Rp48.437.797.647	82%	Rp50.859.687.529	82%	Rp53.402.671.906	82%	Rp56.072.805.501	82%	Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT DAERAH												
PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah)	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun	90%	75%	Rp738.497.148	75%	Rp727.497.148	75%	Rp771.273.148	75%	Rp771.273.148		Setda Biro Pemerintahan
PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah)	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun	90%	75%	Rp781.627.257	75%	Rp859.789.983	75%	Rp945.768.981	75%	Rp1.040.345.879		Setda Biro Pemerintahan
PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah)	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang tersusun	90%	75%	Rp40.000.000	75%	Rp45.000.000	75%	Rp50.000.000	75%	Rp55.000.000		Setda Biro Pemerintahan
MENINGKATNYA USULAN KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE USULAN KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERSUSUN	70%	70%	Rp57.823.095.539	70%	Rp63.605.405.094	70%	Rp69.965.945.605	70%	Rp76.962.540.166		Setda Biro Kesra
Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Pengadaan Barang dan Jasa yang tersusun	100	80%	Rp2.951.904.715	80%	Rp3.008.902.809	80%	Rp3.069.081.865	80%	Rp3.130.482.483		Biro Pengadaan Barang/jasa

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9	10			
Meningkatnya Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi yang tersusun	473.288.000	80%	Rp610.290.809	80%	Rp807.688.907	80%	Rp966.512.040	80%	Rp1.063.163.449		Biro Organisasi
FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang hukum yang tersusun	80%	85%	Rp1.208.154.112	90%	Rp1.328.969.523	95%	Rp1.461.866.476	100%	Rp1.608.053.123	100%	Setda Biro Hukum
Penataan Organisasi	Persentase Usulan Kebijakan Daerah dibidang Penataan Organisasi yang tersusun	80%	80%	Rp610.290.809	80%	Rp807.688.907	80%	Rp966.512.040	80%	Rp1.063.163.449	80%	Setda Biro Organisasi
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Materialitas Hasil Temuan Hasil Pengawasan dibawah 5%, Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Na	Nilai Materialitas Hasil Temuan Hasil Pengawasa n dibawah 5%, Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Rp2.371.464.161	Nilai Materialitas Hasil Temuan Hasil Pengawasan dibawah 5%, Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Rp2.490.037.369	Nilai Materialitas Hasil Temuan Hasil Pengawasan dibawah 5%, Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Rp2.614.539.238	Nilai Materialitas Hasil Temuan Hasil Pengawasan dibawah 5%, Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Rp2.745.266.199	2.745.266.199	Inspektorat
	Persentase Peningkatan TLHP BPK	Na	Persentase Peningkata n TLHP BPK		Persentase Peningkatan TLHP BPK		Persentase Peningkatan TLHP BPK		Persentase Peningkatan TLHP BPK			Inspektorat
Pengawasan Kinerja PEMDA	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Na										Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Materialitas Hasil Temuan Hasil Pengawasan dibawah 5%, Bidang Pengelolaan	Na										Inspektorat

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
	Keuangan dan Aset Daerah											
	Persentase Peningkatan TLHP BPK	Na									Inspektorat	
Pengawasan Kinerja PEMDA	Jumlah Laporan Hasil Periksaan (LHP)	Na									Inspektorat	
Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Materialitas Hasil Temuan Hasil Pengawasan dibawah 5%, Bidang Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Na									Inspektorat	
	Persentase Peningkatan TLHP BPK	Na									Inspektorat	
Pengawasan Kinerja PEMDA	Jumlah Laporan Hasil Periksaan (LHP)	Na									Inspektorat	
Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Materialitas Hasil Temuan Hasil Pengawasan dibawah 5%, Bidang Pencegahan dan Investigasi	Na									Inspektorat	
	Persentase Peningkatan TLHP BPK	Na									Inspektorat	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat yang sudah diselesaikan	Na									Inspektorat	
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3	Na	Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3	Rp770.056.399	Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3	Rp808.559.219	Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3	Rp848.987.180	Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3	Rp891.436.539	891.436.539	Inspektorat

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5	6	7	8	9		10		
	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3	Na	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3		Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3		Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3		Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3		Inspektorat	
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3	Na									Inspektorat	
	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3	Na									Inspektorat	
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3	Na									Inspektorat	
	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3	Na									Inspektorat	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3	Na									Inspektorat	
	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3	Na									Inspektorat	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3	Na									Inspektorat	
	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3	Na									Inspektorat	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3	Na									Inspektorat	

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3	Na										Inspektorat
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Nilai Hasil Kapabilitas APIP Level 3	Na										Inspektorat
	Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Level 3	Na										Inspektorat
RUSAN PEMERINTAHAN UMUM U												
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Terwujudnya Sinergi kemitraan ormas dengan pemerintah	0	50	Rp620.000.000	55	Rp744.000.000	60	Rp892.800.000	65	Rp1.071.360.000		Bakesbangpol
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	NA	30%	Rp1.088.689.518	30%	Rp1.306.427.422	20%	Rp1.567.712.906	20%	Rp1.881.255.487		Bakesbangpol
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatkan Pemahaman Terhadap Ideologi Pancasila, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	NA	75% (3)	Rp320.000.000	50% (2)	Rp384.000.000	25% (1)	Rp460.800.000	25% (1)	Rp552.960.000		Bakesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	memperkuat kewaspadaan dan ditekni dini di masyarakat dalam rangka penanganan konflik sosial		75% (3)	Rp1.070.000.000	50% (2)	Rp1.284.000.000	25% (1)	Rp1.540.800.000	25% (1)	Rp1.848.960.000		Bakesbangpol
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatkan Pemahaman Terhadap Ideologi Pancasila, Karakter Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	NA	75%	320.000.000	50%	384.000.000	25%	460.800.000	25%	552.960.000	25%	Bakesbangpol

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

Urusan/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Program/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir RPD	PD yang Bertanggung Jawab
			2023		2024		2025		2026			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4	5		6	7		8	9		10
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGAPENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIKDAN PENGEMBANGAN ETIKASERTA BUDAYA POLITIK	Terciptanya Stabilitas dalam berdemokrasi	7	30%	Rp4.604.760.000	30%	Rp94.188.851.000	20%	Rp5.646.854.400	20%	Rp6.776.225.280	10%	Bakesbangpol

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator dan asumsi pembangunan daerah tahun 2023-2026 selain mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Selain itu, kondisi awal juga menjadi pertimbangan dalam upaya untuk menentukan target kinerja serta memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu empat tahun mendatang.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa rencana pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci ini, selain dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi alat ukur yang bisa dimiliki dan dievaluasi, sehingga pencapaian daerah dapat diukur dan dievaluasi, baik tahunan maupun empat tahunan. Oleh karena itu Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan RPD 2023-2026 ini, dirumuskan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) Indikator Kinerja Utama dan (2) Indikator Kinerja Kunci.

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama dirumuskan dan ditetapkan dari pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2023-2026, yang diturunkan dari RPJPD perubahan 2005-2025 dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta program unggulan daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

8.2.1. Indikator Kinerja Tujuan dan Target

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang dijabarkan target-target pencapaian setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RPD 2023-2026 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada sebanyak enam indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dengan indikator kinerja pertumbuhan PDRB.
2. Tujuan 2 : Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Tujuan 3 : Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.
4. Tujuan 4 : Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan Indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.
5. Tujuan 5 : Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat, dengan indikator kinerja : (a) Indeks Williamson, (b) Indeks Gini
6. Tujuan 6 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam, dengan indikator kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Jadi dari tujuh tujuan yang diturunkan dari RPJPD perubahan 2005-2025, diperoleh tujuh indikator kinerja tujuan, yang semuanya ditetapkan target-target capaiannya, sehingga bisa diukur secara valid.

Keterkaitan dan konstitusi antara tujuan, indikator kinerja tujuan dan target-target selama empat tahun dapat dilihat pada tabel VIII.1, berikut ini:

Tabel VIII.1
Target Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2023-2026
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET				KONDISI AKHIR RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Meningkatnya ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB	5,05	4,28	4,39	4,46	4,78	5,78
2	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69	71,91	72,13	72,35	72,57	72,58
3	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	77,79	77,39	78,40	79,41	80,42	81,42
4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	70,51
5	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	0,190	0,184	0,181	0,178	0,176	0,177
		Indeks Gini	0,247	0,239	0,229	0,224	0,217	0,217
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	75,43	75,84	76,70	77,50	77,50

8.2.2. Indikator Kinerja Sasaran dan Target

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Oleh karena itu sasaran menjadi sangat penting untuk bisa diukur, dengan indikator yang tepat dan target-target yang tepat pula.

Sasaran dalam RPD 2023-2026, telah dirumuskan dan ditetapkan lebih lanjut ke dalam guna mencapai enam tujuan pembangunan. Indikator kinerja dari ke 19 (sembilan belas) sasaran yang telah dirumuskan dan diperoleh 19 (sembilan belas) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Sasaran 2 : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan, dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Sasaran 3 : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian
4. Sasaran 4 : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
5. Sasaran 5 : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan, dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan.
6. Sasaran 6 : Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
7. Sasaran 7 : Laju Pertumbuhan Ekspor, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan Ekspor
8. Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah, dengan indikator kinerja : Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah
9. Sasaran 9 : Meningkatnya Pembangunan Manusia, dengan indikator kinerja : Indeks Pembangunan Manusia
10. Sasaran 10 : Meningkatnya Pembangunan Demokrasi, dengan indikator kinerja : Indeks Demokrasi Indonesia
11. Sasaran 11 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikator kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi
12. Sasaran 12 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur, dengan indikator kinerja : Persentase Ketersediaan Infrastruktur
13. Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang, dengan indikator kinerja : Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
14. Sasaran 14 : Menurunnya Resiko Bencana, dengan indikator kinerja : Indeks Kapasitas Daerah.
15. Sasaran 15 : Indeks Kapasitas Daerah, dengan indikator kinerja : Indeks Desa Membangun.
16. Sasaran 16 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).
17. Sasaran 17 : Menurunkan Tingkat Kemiskinan, dengan indikator kinerja : Persentase Angka Kemiskinan.

18. Sasaran 18 : Meningkatkan Kesempatan Kerja, dengan indikator kinerja : Tingkat Pengangguran Terbuka.
19. Sasaran 19 : Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sebanyak 18 (delapan belas) sasaran dengan 18 (delapan belas) indikator kinerjanya, telah ditetapkan target-target selama empat tahun, sebagaimana yang tertera dalam tabel VIII.2 berikut ini:

Tabel VIII.2
Target Indikator Kinerja Sasaran RPD 2023-2026
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET				KONDISI AKHIR RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	7,78*	4,03	4,23	4,43	4,60	4,60
2	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-9,76	3,85	4,05	4,25	4,45	4,45
3	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	-9,23	2,95	4,52	1,75	0,46	0,46
4	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	-5,64	1,86	3,25	4,50	4,55	4,55
5	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	-4,62	6,50	4,94	5,50	5,55	5,55
6	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	43,00	2,70	2,63	2,56	2,50	2,50
7	Laju Pertumbuhan Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	106,95	8,13	7,51	6,99	6,53	6,53
8	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	-39,68	25,00	30,00	30,77	34,12	34,12
9	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,69	71,91	72,13	72,35	72,57	72,58
10	Meningkatnya Pembangunan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	77,79	77,39	78,40	79,41	80,42	80,42
11	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	70,51
12	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur	39,45	25,50	49,51	69,85	100	39,45
13	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,8
14	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39
15	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,704	0,721	0,730	0,739	0,748	0,748

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL RPD	TARGET				KONDISI AKHIR RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,93	1,79	1,74	1,70	1,68	1,68
17	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,67	4,30	4,20	4,10	4,01	4,01
18	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,03	4,47	4,39	4,26	4,19	4,19
19	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	75,43	75,84	76,7	77,5	77,5

8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Setelah diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka berikutnya, ditetapkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator penyelenggaraan pemerintah daerah ini, adalah merupakan indikator kinerja kunci, karena untuk mengukur pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh semua perangkat daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang semua urusan penyelenggaraan pemerintah daerah ini (wajib dan pilihan) telah dirumuskan dan ditetapkan didalam Renstra semua perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan demikian telah ditetapkan Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RPD 2023-2026 ini, yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama Tujuan berjumlah tujuh indikator tujuan, untuk mengukur pencapaian enam tujuan.
2. Indikator Kinerja Utama Sasaran berjumlah 19 (sembilan belas), untuk mengukur pencapaian 19 (sembilan belas) sasaran.

Tabel VIII.3
Indikator Kinerja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	PROYEKSI CAPAIAN KINERJA			
		TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	4	5	6	7	8
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
A.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1	Pertumbuhan PDRB					
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	5.05	4.28	4.39	4.46	4.78
1.2	Laju inflasi					
1.2.1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.75	3.00	3.00	3.00	3.00
1.3	PDRB per kapita (ADHB)	55,565,863	61,773,013	65,242,943	68,975,076	73,165,267
1.4.	Indeks Gini	0.247	0.237	0.232	0.222	0.216
1.5.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0.19	0.184	0.181	0.178	0.176
1.6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.69	71.91	72.13	72.35	72.57
1.7.	Kemiskinan					
1.7.1	Persentase Penduduk Miskin (%)	4.67	4.60	4.52	4.41	4.33
1.7.2	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	69.70	66.70	65.51	64.95	63.62
1.7.3	Garis Kemiskinan (Rp)	727.114	860.062	905.646	951.647	997.000
1.7	Pengangguran					
1.7.1	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	5.03	3.85	3.19	2.49	1.64
1.7.2	Jumlah Pengangguran (jiwa)	37,180	29,269	24,623	19,534	13,024
1.7.3	Jumlah penduduk yang bekerja	701,440	731,675	747,736	764,410	782,680
B.	Fokus Kesejahteraan Masyarakat					
1	Pendidikan					
1.1.	Angka melek huruf	98.1	98.12	98.14	98.16	98.18
	Angka rata-rata lama sekolah > 25 Tahun	8.08	8.33	8.43	8.53	8.63

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	PROYEKSI CAPAIAN KINERJA			
		TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	4	5	6	7	8
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah > 15 Tahun	8.54	8.78	8.89	9.00	9.11
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK/MA	86.49	92.43	94.27	96.11	97.95
1.4.	Harapan Lama Sekolah	12.17	12.30	12.39	12.47	12.55
1.5.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	58.79	59.76	60.12	60.48	60.84
1.6.	Angka Partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK	68.15	68.98	69.34	69.7	70.06
2	Kesehatan					
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	992.6	992.97	993.32	993.66	993.97
2.1.1	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	7.4	7	7	6	6
2.1.2	Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup)	8.01	7.61	7.22	6.87	6.52
2.1.3	Angka Kematian Neonatus (per 1000 kelahiran hidup)	5.8	5.51	5.23	4.97	4.72
2.2.	Angka usia harapan hidup	70.73				
2.3	Prevalensi Kurang Gizi anak balita	3.82	3.5	3.2	3	2.8
2.4	Kematian ibu (per 100.000 orang)	62/24469KH	59/KH	56/KH	53/KH	51/KH
2.5	Angka Stunting	4.16	4	3.8	3.6	3.4
2.6	Persentase Anak wasting	1.24	1.1	1	0.9	0.8
3	Ketenagakerjaan					
3.1	Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa)	701440	731675.3958	747735.6708	764410.1762	782679.5794
C.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga					
1	Kebudayaan					
1.1.	Jumlah grup kesenian	11	13	13	14	14
1.2.	Jumlah gedung	0,0066	0.0069	0.0071	0.0073	0.0074
2	Pemuda dan Olahraga					
2.2.	Jumlah gedung olahraga	14	16	17	18	19
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A.	Fokus Layanan Urusan Wajib					
1	Pendidikan					
1.1.	Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah					

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	PROYEKSI CAPAIAN KINERJA			
		TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	4	5	6	7	8
	SMA/MA/SMK					
1.1.1.	Jumlah gedung sekolah	127	142	145	148	151
1.1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	70,306	74,350	74,640	74,905	75,125
1.1.3.	Rasio	18.06	19.10	19.43	19.76	20.10
1.2.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar					
	SMA/MA/SMK					
1.2.1.	Jumlah guru	3,349	3,649	3,667	3,686	3,705
1.2.2.	Jumlah murid	56,143	62,182	63,802	65,422	67,042
1.2.3.	Rasio	16.76	17.04	17.40	17.75	18.10
2	Kesehatan					
2.1.	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah	14	14	14	14	14
2.2.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	12	12	12	12	12
2.3.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	1	1	1	1	1
2.4.	Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap air bersih	86.49%	87.50%	88%	88.50%	89.00%
2.5.	Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun	0.09	<1	<1	<1	<1
2.6.	Perkembangan Prevelensi HIV	31%	45%	50%	55%	60%
2.8.	Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun	64	64	64	64	64
3	Pekerjaan Umum					
3.1.	Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Pemanfaatan Ruang	0.75	0.85	0.86	0.87	0.88
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	0.28	0.30	0.39	0.51	0.56
3.3.	Persentase Luas kawasan yang tertata	7%	7%	44%	100%	100%
3.4.	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	0.294	0.274	0.392	0.538	0.706
3.5.	Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	90.13	90.13	91.07	91.89	92.83
4	Perumahan					
4.1.	Persentasi Pengembangan perumahan korban Bencana atau relokasi program provinsi	25%	25%	25%	25%	25%
4.2.	Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	6%	6%	6%	6%	6%

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	PROYEKSI CAPAIAN KINERJA			
		TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	4	5	6	7	8
4.3.	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU	25%	25%	25%	25%	24%
4.4.	Persentase jumlah bangunan gedung yang terselenggara	24%	24%	65%	100%	100%
5	Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat					
5.1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	227	237	247	247	257
5.2.	Jumlah Pos Siskamling	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132
5.3.	Jumlah Desa	393	393	393	393	393
5.4.	Rasio Jumlah Pos Siskamling	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
5.5.	persentase kasus konflik sara yg dapat diantisipasi	0	1	1	1	1
5.6.	persentase partisipasi pemilih	82%	85%	86%	87%	88%
5.7.	Persentase jumlah konflik yang berlatar belakang ideologi	75%	75%	50%	25%	25%
5.8.	Persentase pembinaan politik di daerah	30%	30%	30%	20%	20%
5.9.	Indeks kinerja ormas	50	50	55	60	65
5.10.	Persentase pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di daerah	30%	30%	30%	20%	20%
5.11.	Persentase daerah terlibat konflik sosial	75%	75%	50%	25%	25%
7	Sosial					
7.1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	375,125	385,125	383,525	314,525	300,000
7.2.	Potensi dan SumberKesejahteraanSosial (PSKS)	960	950	935	920	910
8	Ketenagakerjaan					
8.1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65.88	66.1	66.28	66.38	66.58
8.2.	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	738,620	760,945	772,359	783,944	795,704
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
9.1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53.03	53.37	54	54.33	54.67
9.2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88.92	89.00	89.11	89.23	89.34
9.3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65.82	66.90	67.22	67.52	67.82
9.3.	Jumlah KDRT	45	40	39	38	37
9.4.	Jumlah Rumah Tangga	413,526	432,906	444,502	451,520	456,375

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	PROYEKSI CAPAIAN KINERJA			
		TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	4	5	6	7	8
9.5.	Persentase Capaian Provinsi Layak Anak	2 MADYA DAN 5 PRATAMA	2 MADYA DAN 5 PRATAMA	3 MADYA DAN 4 PRATAMA	3 MADYA DAN 4 PRATAMA	4 MADYA DAN 3 PRATAMA
10	Ketahanan Pangan					
10.2.	Skor PPH konsumsi	83.44	83.65	83.75	83.89	83.95
10.3.	Prevalence of Undernourishment (PoU)	8.3	8.48	8.52	8.58	8.64
10.4.	Skor PPH Ketersediaan	87.92	88.15	88,38	88.56	88.72
11	Pertanahan					
11.1.	Jumlah kasus tanah terselesaikan	8	8	9	10	11
11.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	78.25	78.84	79.3	79.75	80.24
12	Lingkungan Hidup					
12.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72.05	75.43	75.84	76.7	77.5
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
13.1	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100	100	100	100	100
13.2	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	96.71	99.2	99.4	99.6	99.8
13.3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	97.01	98	98.5	99	99.5
13.4	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	63.21	60.5	70	70.5	80
13.5	Persentase Cakupan Akta Kematian	96.3	80	80.5	90	95
13.6	Persentase Cakupan Akta Perkawinan	58.25	80	85	90	95
14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
14.1	Kelompok LPM	3286	3286	3310	3345	3370
14.2	Kelompok PKK	7921	7921	7945	7968	7995
14.5.	Jumlah Posyandu Aktif	694	694	698	75	7012
15.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
15.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.84	1.79	1.74	1.70	1.68
15.2.	persentase pembinaan kampung KB	50%	50%	63%	72%	84%
15.2.	Indeks Pembangunan Keluarga	56.03	56.14	56.23	56.38	56.45
15.2.	Total Fertility Rate (TFR)	2.49	2.43	2.37	2.32	2.30

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	PROYEKSI CAPAIAN KINERJA			
		TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	4	5	6	7	8
15.2.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR/15-19)	29.00	28.80	28.65	28.32	28.10
15.2.	Angka Prevalensi Kontrasepsi modern (M-CPR)	66.90	67.00	67.40	67.80	68.20
15.2.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet-Need)	12.00	11.12	10.45	9.54	8.90
15.2.	Persentase PA MKJP	14.23%	14.58%	14.83%	15.37%	15.68%
15.2.	persentase pelayanan KB pasca persalinan	72.74%	73.50%	74.20%	75.70%	76.90%
16	Perhubungan					
16.1.	Jumlah kendaraan bermotor	1,048,188	1,087,500	1,098,540	1,115,450	1,135,250
16.2.	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	38.24	87.4	87.42	87.43	87.45
16.3.	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kepelabuhanan	67	81.5	81.5	81.5	81.5
17	Komunikasi dan Informatika					
17.1.	Persentase Jumlah Layanan Infrastruktur Teknologi dan Kapasitas Layanan Publik Pemerintah Berbasis e-Government	90	92	93	94	95
18	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
18.1	Jumlah Koperasi Aktif	708	855	940	1034	1137
18.2.	Jumlah Koperasi	1116	1171	1200	1230	1260
18.3	Persentase Koperasi Aktif	63.44	73.01	78.33	84.06	90.23
19	Penanaman Modal					
19.1.	Jumlah Investor	620	630	645	655	668
19.2.	Nilai Investasi (Trillin Rp)	4,562.50	4,710.25	4,875.30	4,910.25	4,987.50
20	Kepemudaan dan Olahraga					
20.1.	Jumlah Organisasi Pemuda	35	10	14	21	28
20.2.	Pertumbuhan kewirausahaan pemuda		-0.032	0.021	0.032	0.024
21.	Statistik					
21.1.	Buku daerah dalam angka	8	8	8	8	8
21.2.	Buku PDRB prov/kabupaten/kota	8	8	8	8	8
22.	Kebudayaan					
22.2.	Jumlah Kesenian Tradisional Yang Dibina	5	5	5	5	5

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	PROYEKSI CAPAIAN KINERJA			
		TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	4	5	6	7	8
22.3.	Jumlah Museum Provinsi Yang Dikelola	1	1	1	1	1
22.4.	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Dikelola	7	7	5	5	5
23	Perpustakaan					
23.1.	Jumlah Pengunjung	4,850	4,950	5,000	5,050	5,100
23.2.	Perpustakaan Milik Pemda	1,415	1,415	1,415	1,415	1,415
23.3.	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan	145,000	147,000	148,000	149,000	150,000
23.4.	Persentase perpustakaan yang dibina	42.5	46.3	48.2	50.1	52
24	Kearsipan					
24.1.	Laporan audit kearsipan Eksternal (LAKE)	91%	92%	93%	94%	95%
24.2.	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan Sesuai Dengan Standard Baku Kearsipan	20%	22%	23%	24%	25%
	Fokus Layanan Urusan Pilihan					
25	Kelautan dan Perikanan					
25.1.	Potensi perikanan Tangkap	282,100	282,100	282,100	282,100	282,100
25.2.	Potensi perikanan budidaya	Tawar;1692 Ha; Laut: 120.000 Ha; Payau: 250 Ha	Tawar;1692 Ha; Laut: 120.000 Ha; Payau: 250 Ha	Tawar;1692 Ha; Laut: 120.000 Ha; Payau: 250 Ha	Tawar;1692 Ha; Laut: 120.000 Ha; Payau: 250 Ha	Tawar;1692 Ha; Laut: 120.000 Ha; Payau: 250 Ha
25.3.	Produksi perikanan tangkap	225.282 Ton	226.300 ton	229.300 ton	232.400 ton	235.650 ton
25.4.	Produksi perikanan budidaya	9,512	13,500	13,980	14,540	15,170
25.5.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	111.24	0	0	0	0
25.6.	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	61.54	0	0	0	0
25.7.	Produksi olahan ikan (Ton)	34,365	22,410	22,810	23,310	23,910
25.8.	Jumlah Produksi Benih Ikan air Laut (Juta Ekor)		10.5	11	11.5	12
25.9	Luas kawasan konservasi yang dicadangkan (Ha)	516,140.93	516,140.93	523,513.43	534,871.13	627,612.90
26	Pariwisata					
26.1.	Jumlah Wisatawan Luar Negeri	5,357	5,357	5,497	5,638	5,779
26.2.	Jumlah Wisatawan DalamNegeri	321,088	321,088	329,520	337,953	346,385

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	PROYEKSI CAPAIAN KINERJA			
		TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	4	5	6	7	8
26.3.	Jumlah Wisatawan	326,445	326,445	335,018	343,591	352,164
26.4.	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif	23.53	23.53	30.77	44.44	80.00
26.5.	Persentase SDM Pariwisata dan Ekraf yang Memiliki Kompetensi	9.50%	9.50%	10.00%	9.60%	9.70%
27	Pertanian					
27.1.	Produksi Padi	68,290	693,380	70,150	70,435	70,645
27.2.	Produksi Lada	56,378	56874	56945	57145	57456
27.3.	Produksi Karet	33,920	34642	34875	34915	35245
27.4.	Produksi sawit	147330	148500	149150	149850	150275
27.5.	Jumlah populasi sapi (ribu ekor)	11,614	12500	12845	13050	13560
27.6.	Jumlah populasi ayam (juta ekor)	15,742	15950	16075	16385	16850
28	Kehutanan					
28.1.	Luas Hutan Produksi (Ha)	432.882	452,500	455,600	458,750	459,500
28.2.	Luas Hutan Lindung (Ha)	189.965	188,500	189,750	191,500	192,500
28.3.	Luas Hutan Konservasi (Ha)	35.473	35,850	35,975	36,245	36,415
28.4.	Luas Hutan Produksi Konversi (Ha)	692,58	715.50	735.45	756.25	775.64
29	Energi dan Sumber Daya Mineral					
29.1.	Rasio Elektrifikasi		99	99	100	100
30.	Perdagangan					
30.1.	Ekspor (us Dollar)	2,672.05	3,144.67	3,380.98	3,617.28	3,853.59
30.2.	Timah	2,320.76	2,530.45	2,720.60	2,910.75	3,100.91
30.3.	Non Timah	351.29	614.22	660.37	706.53	752.68
30.4.	Impor (us Dollar)	34.22	52.40	61.49	70.58	79.67
30.5.	Migas	2.77	23.80	27.92	32.05	36.18
30.6.	Non Migas	31.45	28.60	33.57	38.53	43.49
31	Perindustrian					
31.1	Jumlah Industri Kecil	21609	22043	22264	22486	22711
31.2	Laju pertumbuhan	6.64	1	1	1	1

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	PROYEKSI CAPAIAN KINERJA			
		TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	4	5	6	7	8
31.3	Industri Menengah	127	129	130	131	132
31.4	Laju pertumbuhan	-9.29	0.75	0.75	0.75	0.75
32	Transmigrasi					
32.1	Jumlah Kawasan transmigrasi	1	1	1	1	1
32.2	jumlah KTM	1	1	1	1	1
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah					
1.1.	Total Pengeluaran RT		785,326	808,576	831,826	855,076
1.4.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	117.43	117.5	118.25	119.45	120.35
1.5.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	112.23	114.45	114.1	116.45	117.3
1.6.	Rasio	1,05	1,07	1,08	1,09	1,10
1.7.	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	730,723	750,125	757,125	759,250	764,500
1.8.	Total pengeluaran	1,501,844	1515250	1535250	1545250	1555250
1.9.	Rasio	0.490	0.495	0.493	0.491	0.492
1.10.	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	4.604	5850	5945	6125	6325
1.11.	Jumlah seluruh PMA/PMDN	2658	850	875	912	944
1.12.	Rasio daya serap tenaga kerja	1,73	6.88	6.79	6.72	6.70
IV	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
1	Panjang Jalan	3. 967	3,967	4,125	4,352	35,123
2	Jumlah Kendaraan	1.048.188	1,058,188	1,065,000	1,074,250	1,081,245
3	Rasio	0,0039	0.0037	0.0039	0.0041	0.0325
4	Jumlah Pelabuhan Udara	2	2	2	2	2
5	Jumlah Pelabuhan Laut	17	17	17	17	17
6	Jumlah Terminal	13	13	13	13	13
V	Fokus Iklim Berinvestasi					
1	Angka Kriminalitas	9.91	9.41	9.34	9.26	9.19
2	Jumlah Demo	33	31.2	32.9	33.6	40.10

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI	PROYEKSI CAPAIAN KINERJA			
		TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	4	5	6	7	8
VI.	Fokus Sumber Daya manusia					
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	74,394	81,965	82,351	83,902	84,188
2	Jumlah penduduk	1,517,590	1,584,444	1,603,410	1,622,342	1,647,319
3	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	0.049	0.052	0.051	0.052	0.051
4	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	363,044	366,840	361,583	356,327	351,071
5	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	72,643	83,246	88,233	93,220	98,207
6	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2)	435,687	450,085	449,816	449,547	449,278
7	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	1,019,991	1,069,798	1,087,323	1,104,848	1,122,373
8	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	49.7	51.32	52.67	54.02	55.38

BAB IX

PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga terpilihnya Gubernur baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Gubernur terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017-2022 maka perlu disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun berjalan.

Pedoman transisi pada RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Masa berlaku RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah terhitung mulai tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan menghindari kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPJMD periode 2017-2022 maka dokumen RPD Tahun 2023-2026 ini akan digunakan oleh Pejabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.
3. Selain mengacu pada RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, penyusunan RKPD Tahun 2023 juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahunan 2023 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 – 2026 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama empat tahun ke depan. Uraian program prioritas dan program unggulan merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2023 – 2026. Pada saat penyusunan perencanaan pembangunan tahunan RKPD tahun 2023 dan RPJMD tahun

2023 – 2027 belum disusun, maka untuk menjamin kelangsungan pembangunan pada periode tersebut perlu disusun kaidah pelaksanaan yang menjadi acuan pembangunan daerah.

Kaidah pelaksanaan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kepada masyarakat;
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan sebaik- baiknya mengacu pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
3. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahun;
4. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335
PANGKALPINANG 33149